



INDONESIA
EMAS
2045



RPJMD 2025-2029

**RENCANA JANGKA MENENGAH DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BARRU**

**"BARRU BERKEADILAN
BARRU MAJU BERKELANJUTAN
BARRU SEJAHTERA LEBIH CEPAT"**



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARRU,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kondisi daerah;
 - b. bahwa untuk menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat Daerah, perlu disusun Rencana Menengah Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
 5. Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2024 tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 323, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7074);
 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 12);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 3)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARRU

dan

BUPATI BARRU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Barru.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten, yang mengacu pada RTRW nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang strategis nasional dan rencana tata ruang provinsi.

Pasal 2

- (1) RPJMD Tahun 2025-2029 ditetapkan untuk periode 5 (lima) tahun.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional serta RTRW.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum Daerah;
 - c. visi, misi, dan program prioritas pembangunan Daerah;
 - d. program perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
 - e. penutup.
- (4) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah dengan memperhatikan RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah nasional, kondisi lingkungan strategis di Daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

Pasal 4

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.
- (3) Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah.
- (4) Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI BARRU,



[Handwritten Signature]
INA KARTIKA SARI

Diundangkan di Barru
pada tanggal 20 Agustus 2025

Pj SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,



[Handwritten Signature]
ABUBAKAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2025 NOMOR 3

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU PROVINSI
SULAWESI SELATAN B.HK.03.040.25.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Pembangunan merupakan proses perubahan kearah kondisi yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana yang memiliki tujuan utama untuk memperbaiki dan menaikkan taraf hidup, kesejahteraan, dan kualitas manusia. Dalam proses pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah, maka perencanaan pembangunan daerah mempunyai peran dan fungsi dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan daerah secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perencanaan pembangunan Kabupaten Barru tidak terlepas dari hierarki perencanaan pembangunan nasional dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun RPJMD yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barru Tahun 2025-2029 dapat disusun dengan baik. Dokumen ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan guna mewujudkan visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan.

RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam penyusunannya, kami melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat, guna memastikan dokumen ini mencerminkan kebutuhan serta aspirasi masyarakat secara menyeluruh.

Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas, serta indikator kinerja yang menjadi acuan dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berdaya saing, berkelanjutan, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Kami berharap RPJMD ini dapat menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan program pembangunan secara efektif dan efisien.

Ucapan terima kasih dan apresiasi kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan RPJMD ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat dalam mencapai tujuan pembangunan daerah yang lebih baik. Akhir kata, kami mengajak seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengawal dan mendukung pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 demi terwujudnya pembangunan daerah yang berkeadilan, maju berkelanjutan, dan sejahtera lebih cepat.


BUPATI BARRU

INA KARTIKA SARI



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR GRAFIK	xxii
BAB I. PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-6
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-9
1.4 Maksud dan Tujuan	I-11
1.5 Sistematika Penulisan	I-12
BAB II. GAMBARAN UMUM DAERAH	II-1
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah	II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-41
2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah	II-65
2.1.4 Aspek Pelayanan Umum.....	II-81
2.2 Gambaran Keuangan Daerah	II-219
2.2.1 Gambaran Ringkas Kondisi Keuangan Daerah Lima Tahun Terakhir	II-221
2.2.2 Kerangka Pendanaan	II-265
2.2.3 Pembiayaan Pembangunan Daerah Non APBD Kabupaten.....	II-272
2.3 Permasalahan Dan Isu Strategis	II-277
2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah.....	II-277
2.3.2 Isu Strategis.....	II-282
BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	III-1
3.1 Visi	III-1
3.2 Misi.....	III-2
3.2.1 Misi 1	III-6
3.2.2 Misi 2	III-6
3.2.3 Misi 3	III-7
3.2.4 Misi 4	III-7
3.2.5 Misi 5	III-8
3.3 Tujuan dan Sasaran.....	III-8
3.4 Strategi dan Arah kebijakan	III-17

3.4.1	Strategi Pembangunan Daerah	III-17
3.4.2	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	III-27
3.5	Arah Pembangunan Kewilayah	III-37
3.6	Program Pembangunan Daerah	III-43

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA

	PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH.....	IV-1
4.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan	IV-1
4.2	Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Barru	IV-20
4.3	Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah.....	IV-21

BAB V PENUTUP

5.1.	Pedoman Transisi	V-1
5.2.	Kaidah Pelaksanaan	V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2	Luas Wilayah Kecamatan dan Jumlah Kelurahan/Desa Kab.Barru	II-2
Tabel 2.3	Luas dan persentase Tutupan lahan Kabupaten Barru Tahun 2024	II-4
Tabel 2.4	Capaian TPB Kabupaten Barru Tahun 2024	II-6
Table 2.5	Potensi Jenis Tambang Menurut Kecamatan Kab.Barru Tahun 2024 ..	II-8
Tabel 2.6	Sungai Mengalir Menurut Daerah Aliran Sungai di Kab.Barru	II-9
Tabel 2.7	Luas Arahkan Kawasan Budidaya Kabupaten Barru Tahun 2024	II-10
Tabel 2.8	Luas Kawasan Hutan Menurut Kecamatan Kab Barru Tahun 2024	II-11
Tabel 2.9	Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan di Kab.Barru Tahun 2024	II-12
Tabel 2.10	Status Daya Dukung Penyediaan Pangan Kab.Barru Tahun 2024	II-13
Tabel 2.11	Ketersediaan dan Kebutuhan Air di Kabupaten Barru Tahun 2024	II-15
Tabel 2.12	Status Daya Dukung Penyediaan Air Kab.Barru Tahun 2024	II-17
Tabel 2.13	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan Listrik di Kabupaten Barru Tahun 2020-2024.....	II-19
Tabel 2.14	Status Mutu Air Sungai Kabupaten Barru Tahun 2024	II-22
Tabel 2.15	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kab. Barru Tahun 2020-2024	II-22
Tabel 2.16	Kategori Kerentanan Perubahan Iklim Masing-Masing Desa/Kelurahan di Kabupaten Barru	II-29
Tabel 2.17	Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Barru Tahun 2020-2024.....	II-31
Tabel 2.18	Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2024-2029	II-32
Tabel 2.19	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kab.Barru (Jiwa) Tahun 2024.....	II-33
Tabel 2.20	Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Barru (Jiwa) Tahun 2025-2029.....	II-33

Tabel 2.21	Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kab.Barru Tahun 2019 s.d 2024	II-34
Tabel 2.22	Proyeksi Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kab.Barru Tahun 2025 s.d 2029	II-35
Tabel 2.23	Struktur Penduduk Menurut Jumlah Rumah Tangga Kab.Barru Tahun 2019 - 2024.....	II-35
Tabel 2.24	Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Kabupaten Barru Tahun 2020 s.d 2024.....	II-35
Tabel 2.25	Cakupan Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-51
Tabel 2.26	Angka Ketergantungan Penduduk Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-56
Tabel 2.27	Indikator Terukur pada Indeks Ekonomi Biru Tahun 2021-2023.....	II-62
Tabel 2.28	Kondisi Infrastruktur Jalan di Kabupaten Barru Tahun 2020-2024.....	II-66
Tabel 2.29	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan Listrik Kabupaten Barru Tahun 2020-2024.....	II-67
Tabel 2.30	Capaian Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Barru berdasarkan Indikator Kinerja Makro Tahun 2020-2024.....	II-72
Tabel 2.31	Capaian Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Barru berdasarkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022-2024.....	II-73
Tabel 2.32	Pendidikan Anak Usia ini (PAUD) Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-75
Tabel 2.33	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-76
Tabel 2.34	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Barru Tahun 2020 – 202.....	II-76
Tabel 2.35	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-77
Tabel 2.36	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI & SMP/MTs Kab.Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-78
Tabel 2.37	Angka Kelulusan (AL) SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-78

Tabel 2.38	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI dan SMP/MTs di Kab.Barru 2020 – 2024.....	II-79
Tabel 2.39	Sekolah pendidikan SD/MI dan SMP/MTs kondisi bangunan baik di Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-79
Tabel 2.40	Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar (SD dan SMP) Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-80
Tabel 2.41	Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-81
Tabel 2.42	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidakbuta aksara) Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-81
Tabel 2.43	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Di Kab.Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-82
Tabel 2.44	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-82
Tabel 2.45	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-83
Tabel 2.46	Angka Kematian Balita (AKBa)/1000 kelahiran hidup.....	II-83
Tabel 2.47	Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-84
Tabel 2.48	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-85
Tabel 2.49	Rasio Posyandu Persatuan Balita Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-86
Tabel 2.50	Rasio Puskesmas, poliklinik puskesmas pembantu per 1.000 jumlah penduduk Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-87
Tabel 2.51	Rasio rumah sakit/1.000 jumlah penduduk Tahun 2020 – 2024.....	II-87
Tabel 2.52	Rasio Dokter Persatuan penduduk Kabupaten Barru Tahun 2020–2024.....	II-88
Tabel 2.53	Rasio Tenaga Medis per 1.000 Jumlah Penduduk Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-88
Tabel 2.54	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-89

Tabel 2.55	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Kabupaten Barru 2020 – 2024.....	II-90
Tabel 2.56	Cakupan Desa Kelurahan UCI Kab. Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-90
Tabel 2.57	Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-91
Tabel 2.58	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-92
Tabel 2.59	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-92
Tabel 2.60	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-93
Tabel 2.61	Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani Tahun 2020 – 2024.....	II-93
Tabel 2.62	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Kabupaten Barru Tahun 2020– 2024.....	II-94
Tabel 2.63	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 pddk) Tahun 2020 – 2024.....	II-95
Tabel 2.64	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-95
Tabel 2.65	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-96
Tabel 2.66	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-97
Tabel 2.67	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Tahun 2020 – 2024.....	II-98
Tabel 2.68	Penderita diare yang ditangani Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024	II-98
Tabel 2.69	Angka kejadian Malaria Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-99
Tabel 2.70	Tingkat kematian akibat malaria Tahun 2020 – 2024.....	II-99

Tabel 2.71	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-100
Tabel 2.72	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi Tahun 2020 – 2024.....	II-100
Tabel 2.73	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-101
Tabel 2.74	Cakupan Kunjungan Bayi Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-101
Tabel 2.75	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-102
Tabel 2.76	Cakupan Pelayanan Nifas Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-103
Tabel 2.77	Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani Tahun 2020 – 2024	II-103
Tabel 2.78	Cakupan Pelayanan Anak Balita Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-104
Tabel 2.79	Cakupan Pemberian MP ASI Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024	II-104
Tabel 2.80	Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat Tahun 2020 – 2024.....	II-105
Tabel 2.81	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Kab. Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-106
Tabel 2.82	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-106
Tabel 2.83	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Tahun 2020 – 2024.....	II-107
Tabel 2.84	Kondisi Panjang Jaringan Jalan di Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-107
Tabel 2.85	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk di Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-108
Tabel 2.86	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam) di Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-109

Tabel 2.87	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) di Kab.Barru Tahun 2020-2024.....	II-109
Tabel 2.88	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-110
Tabel 2.89	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-111
Tabel 2.90	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik Tahun 2020 – 2024.....	II-111
Tabel 2.91	Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-112
Tabel 2.92	Persentase Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-113
Tabel 2.93	Areal Kawasan Kumuh Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-113
Tabel 2.94	Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk Kab.Barru Tahun 2021-2023.....	II-114
Tabel 2.95	Rasio Rumah Layak Huni terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2020 – 2024.....	II-115
Tabel 2.96	Rasio Permukiman Layak Huni Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024	II-115
Tabel 2.97	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kab. Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-116
Tabel 2.98	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-117
Tabel 2.99	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-117
Tabel 2.100	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-118
Tabel 2.101	Persentase Penegakan PERDA Kab.Barru Tahun 2020 – 2024	II-119
Tabel 2.102	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-119

Tabel 2.103	Persentase PMKS Yang Tertangani Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-120
Tabel 2.104	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-121
Tabel 2.105	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian kerjasama Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-121
Tabel 2.106	Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan Kabupaten Barru Tahun 2020-2024.....	II-122
Tabel 2.107	Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-122
Tabel 2.108	Perselisihan Buruh Dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-123
Tabel 2.109	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024	II-123
Tabel 2.110	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan kewirausahaan Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024	II-124
Tabel 2.111	Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024	II-125
Tabel 2.112	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-126
Tabel 2.113	Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan di DPR Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024	II-126
Tabel 2.114	Rasio KDRT terhadap Total Jumlah Rumah Tangga Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-127
Tabel 2.115	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu Kab.Barru Tahun 2020-2024	II-128
Tabel 2.116	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A Dan	

	PPT/PKT di Rumah Sakit di Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-128
Tabel 2.117	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi Perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu di Kabupaten Barru Tahun 2020-2024	II-129
Tabel 2.118	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024	II-129
Tabel 2.119	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum di Kab.Barru Tahun 2020-2024.....	II-130
Tabel 2.120	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Barru Tahun 2020-2024.....	II-130
Tabel 2.121	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi Perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Barru Tahun 2020-2024	II-131
Tabel 2.122	Ketersediaan Pangan Utama, Energi Dan Protein Perkapita Dan Pengawasan Dan Pembinaan keamanan Pangan Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024	II-132
Tabel 2.123	Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH) Kabupaten Barru Tahun 2020-2024.....	II-132
Tabel 2.124	Tersusunnya RPPLH Dan Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2020– 2024	II-133
Tabel 2.125	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-134
Tabel 2.126	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024	II-135
Tabel 2.127	Pembinaan dan Pengawasan terkait Ketaatan penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024	II-137

Tabel 2.128	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024	II-137
Tabel 2.129	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024	II-138
Tabel 2.130	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah di Kabupaten Barru Tahun 2020-2024.....	II-138
Tabel 2.131	Timbulan Sampah yang ditangani di Kabupaten Barru Tahun 2020-2024	II-139
Tabel 2.132	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R di Kabupaten Barru Tahun 2020-2024.....	II-139
Tabel 2.133	Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-140
Tabel 2.134	Operasionalisasi TPA/ TPST/ SPA di Kabupaten/ Kota Kabupaten Barru Tahun 2020-2024.....	II-140
Tabel 2.135	Rasio Penduduk ber-KTP Per Satuan Penduduk Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-141
Tabel 2.136	Rasio Bayi dan Penduduk Berakte Kelahiran Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-141
Tabel 2.137	Rasio Penduduk Berakte Kelahiran Kabupaten Barru Tahun 2022-2023.....	II-142
Tabel 2.138	Rasio pasangan berakte nikah Kabupaten Barru Tahun 2020-2024.....	II-142
Tabel 2.139	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi dan Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-143
Tabel 2.140	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-144
Tabel 2.141	Cakupan penerbitan akte kelahiran di Kabupaten Barru Tahun 2020-2024.....	II-144
Tabel 2.142	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-145
Tabel 2.143	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-145
Tabel 2.144	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-146

Tabel 2.145	Persentase LSM Aktif Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024	II-146
Tabel 2.146	Persentase LPM Berprestasi Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024	II-147
Tabel 2.147	Persentase PKK Aktif Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-147
Tabel 2.148	Persentase Posyandu Aktif Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-148
Tabel 2.149	Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-148
Tabel 2.150	Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-149
Tabel 2.151	Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Barru Tahun 2020-2024.....	II-149
Tabel 2.152	Persentase Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB Di Kabupaten Barru Tahun 2020-2024.....	II-150
Tabel 2.153	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk Di Kabupaten Barru Tahun 2020-2024.....	II-150
Tabel 2.154	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan Di Kabupaten Barru Tahun 2020-2024.....	II-151
Tabel 2.155	Rata-rata jumlah anak per keluarga Tahun 2020 – 2024.....	II-151
Tabel 2.156	Rasio akseptor KB Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-152
Tabel 2.157	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-152
Tabel 2.158	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Istrinya Dibawah 20 Tahun Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-153
Tabel 2.159	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak Terpenuhi (unmet need) Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-154
Tabel 2.160	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-154

Tabel 2.161	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-155
Tabel 2.162	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-156
Tabel 2.163	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-156
Tabel 2.164	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-157
Tabel 2.165	Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) disetiap Kecamatan Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024	II-157
Tabel 2.166	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024	II-158
Tabel 2.167	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 –2024	II-158
Tabel 2.168	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-159
Tabel 2.169	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024	II-160
Tabel 2.170	Cakupan Ketersediaan dan distribusi alat dan obat Kontrasepsi Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-160
Tabel 2.171	Persentase Faskes Dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerjasama Dengan BPJS Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-161
Tabel 2.172	Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-161
Tabel 2.173	Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-162
Tabel 2.174	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024	II-163
Tabel 2.175	Jumlah Uji Kir Angkutan umum Kabupaten Barru Tahun 2020-2024.....	II-163
Tabel 2.176	Rasio Ijin Trayek Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-164

Tabel 2.177	Jumlah Pelabuhan Laut/Terminal Bis Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024	II-164
Tabel 2.178	Persentase Layanan Angkutan Darat Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024	II-165
Tabel 2.179	Pemasangan Rambu-rambu Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-166
Tabel 2.180	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum Tahun 2020-2024.....	II-166
Tabel 2.181	Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Terminal Pertahun Di Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-167
Tabel 2.182	Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-168
Tabel 2.183	Persentase UKM non BPR/LKM Aktif Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024	II-168
Tabel 2.184	Persentase BPR/LKM Aktif Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024	II-169
Tabel 2.185	Persentase Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-170
Tabel 2.186	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-171
Tabel 2.187	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-171
Tabel 2.188	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kabupaten Barru Tahun 2019 - 2024	II-172
Tabel 2.189	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (miliar rupiah) Kabupaten Barru Tahun 2020-2024.....	II-172
Tabel 2.190	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-173
Tabel 2.191	Persentase Wirausaha Muda Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-174
Tabel 2.192	Cakupan Pembinaan Olahraga Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024	II-174
Tabel 2.193	Cakupan Pelatih Yang Bersertifikasi Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024	II-175
Tabel 2.194	Cakupan Pembinaan Atlet Muda Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024	II-175
Tabel 2.195	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024	II-176

Tabel 2.196	Jumlah Prestasi Olahraga Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-176
Tabel 2.197	Buku "Kabupaten Barru Dalam Angka" dan Buku "PDRB Kabupaten Barru" Tahun 2020 – 2024.....	II-177
Tabel 2.198	Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah di Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024	II-178
Tabel 2.199	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-178
Tabel 2.200	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-179
Tabel 2.201	Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi dan Inventarisasi Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024	II-180
Tabel 2.202	Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024	II-180
Tabel 2.203	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-181
Tabel 2.204	Koleksi Buku dan Judul Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-181
Tabel 2.205	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-182
Tabel 2.206	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun Kabupaten Barru Tahun 2019 – 2024.....	II-182
Tabel 2.207	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-183
Tabel 2.208	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-183
Tabel 2.209	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-184
Tabel 2.210	Produksi Perikanan Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024....	II-184
Tabel 2.211	Konsumsi Ikan Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-185
Tabel 2.212	Cakupan Bina Kelompok Nelayan Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024	II-185
Tabel 2.213	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024	II-186

Tabel 2.214	Kunjungan Wisata Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-186
Tabel 2.215	PAD Sektor Pariwisata Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-187
Tabel 2.216	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024	II-187
Tabel 2.217	Cakupan Bina Kelompok Petani Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024	II-188
Tabel 2.218	Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024	II-188
Tabel 2.219	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal Tahun 2020 – 2024.....	II-189
Tabel 2.220	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024	II-190
Tabel 2.221	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-190
Tabel 2.222	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Kabupaten Barru Tahun 2020 -2024.....	II-191
Tabel 2.223	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-191
Tabel 2.224	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Barru Tahun 2020-2024.....	II-192
Tabel 2.225	Persentase SILPA Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024	II-193
Tabel 2.226	Persentase Belanja Pendidikan(20%) Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-193
Tabel 2.227	Persentase Belanja Kesehatan (10%) Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-194
Tabel 2.228	Perbandingan Belanja Langsung Dengan Belanja Tidak Langsung Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024	II-194
Tabel 2.229	Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-195
Tabel 2.230	Penetapan APBD Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-196
Tabel 2.231	Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barru Tahun 2020 –2024.....	II-196

Tabel 2.232	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-197
Tabel 2.233	Persentase Pejabat ASN yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-198
Tabel 2.234	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah, Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional Tertentu Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-198
Tabel 2.235	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024	II-199
Tabel 2.236	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024	II-200
Tabel 2.237	Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024	II-200
Tabel 2.238	Persentase Kebijakan Inovasi Daerah yang diterapkan Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-201
Tabel 2.239	Daftar Inovasi Daerah Kabupaten Barru Tahun 2023 – 2024.....	II-201
Tabel 2.240	Tersedianya Rencana Kerja, terintegrasi program-program DPRD ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD Kabupaten Barru Tahun 2020-2024.....	II-203
Tabel 2.241	Persentase Tindak Lanjut temuan Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-204
Tabel 2.242	Persentase Pelanggaran Pegawai Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024	II-205
Tabel 2.243	Jumlah Temuan BPK Kabupaten Barru Tahun 2020 – 20.....24	II-205
Tabel 2.244	Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun 2020 – 2024.....	II-209
Tabel 2.245	Kinerja Pembiayaan Daerah Tahun 2020 – 2024.....	II-221
Tabel 2.246	Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Tahun 2020 – 2024.....	II-224
Tabel 2.247	Rasio Lancar Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-229
Tabel 2.248	Rasio Quick Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-230
Tabel 2.249	Rasio Cash Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-230
Tabel 2.250	Rasio Total Utang terhadap Total Aset Tahun 2020 – 2024..	II-231

Tabel	2.251	Rasio Total Utang terhadap Modal Tahun 2020 – 2024.....	II-232
Tabel	2.252	Rata-rata Umur Piutang Tahun 2020 – 2024.....	II-233
Tabel	2.253	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2020 – 2024.....	II-235
Tabel	2.254	Defisit Riil Anggaran Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-235
Tabel	2.255	Asumsi Indikator Makro Ekonomi dan Sosial Tahun 2025 – 2029.....	II-237
Tabel	2.256	Proyeksi Pendapatan Tahun 2025 – 2029.....	II-238
Tabel	2.257	Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2025 – 2029.....	II-239
Tabel	2.258	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2025 – 2029.....	II-241
Tabel	2.259	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2025 – 2029.....	II-241
Tabel	3.1	Keterkaitan RPJMD Tahun 2025-2030 Kab.Barru dengan RPJM Nasional Tahun 2025-2029.....	III-4
Tabel	3.2	Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Kab.Barru Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Perubahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029.....	III-5
Tabel	3.3	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Barru.....	III-13
Tabel	3.4	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025–2029.....	III-24
Tabel	3.5	Persandingan rekomendasi KLHS dengan rumusan strategi RPJMD Kabupaten Barru 2025–2029.....	III-25
Tabel	3.6	Perumusan Arah Kebijakan Pembangunan.....	III-27
Tabel	3.7	Pemetaan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Barru...III-35	
Tabel	3.8	Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2026–2030.....	III-40
Tabel	3.9	Tujuan, Sasaran, dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Barru 2026-2030.....	III-43
Tabel	4.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2025 s.d. 2029.....	IV-1
Tabel	4.2	Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Barru Tahun 2025 – 2029.....	IV-3

Tabel 4.3	Penetapan Indikator Kinerja Makro Kabupaten Barru Tahun 2025 – 2029.....	IV-21
Tabel 4.4	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Barru Tahun 2025 – 2029.....	IV-22
Tabel 4.5	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kab. Barru Tahun 2025 – 2029.....	IV-23
Tabel 4.6	Penetapan Target Indikator SPM Kabupaten Barru Tahun 2025 – 2029.....	IV-32
Tabel 4.7	Penetapan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDG) Kab. Barru Tahun 2025 – 2029.....	IV-33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RPJMD berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017.....	I-5
Gambar 1.2	Keterkaitan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor lainnya.....	I-10
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Barru	II-2
Gambar 2.2	Peta Topografi Kabupaten Barru	II-3
Gambar 2.3	Peta Bentang Alam Kabupaten Barru Tahun 2024.....	II-4
Gambar 2.4	Peta Tutupan Lahan Kabupaten Barru Tahun 2024....	II-5
Gambar 2.5	Peta Status Daya Dukung Penyediaan Pangan di Kabupaten Barru Tahun 2024	II-14
Gambar 2.6	Peta Status Daya Dukung Penyediaan Air di Kabupaten Barru Tahun 2024	II-16
Gambar 2.7	Peta Kerentanan Terhadap Perubahan Iklim Kabupaten Barru.....	II-30
Gambar 3.1	Value Visi Pembangunan Kab. Barru.....	III-2
Gambar 3.2	Keterkaitan Pokok-Pokok Visi dengan Misi RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025 – 2029	III-3
Gambar 3.3	Proses Bisnis Pencapaian Visi RPJMD Kab.Barru Tahun 2025-2029	III-5
Gambar 3.4	Cascading Pencapaian Tujuan 1 Misi 1 RPJMD Tahun 2025-2029.....	III-9
Gambar 3.5	Cascading Pencapaian Tujuan 2 Misi 2 RPJMD Tahun 2025-2029.....	III-10
Gambar 3.6	Cascading Pencapaian Tujuan 3 Misi 3 RPJMD Tahun 2025-2029.....	III-11
Gambar 3.7	Cascading Pencapaian Tujuan 4 Misi 4 RPJMD Tahun 2025-2029.....	III-11
Gambar 3.8	Cascading Pencapaian Tujuan 5 Misi 5 RPJMD Tahun 2025-2029.....	III-12
Gambar 3.9	Skema Strategi Pencapaian Misi 1.....	III-15
Gambar 3.10	Skema Strategi Pencapaian Misi 2.....	III-16
Gambar 3.11	Skema Strategi Pencapaian Misi 3.....	III-19
Gambar 3.12	Skema Strategi Pencapaian Misi 4.....	III-20
Gambar 3.13	Skema Strategi Pencapaian Misi 5.....	III-22

Gambar 3.14 Tema dan Prioritas Tahun RPJMD Kabupaten Barru 2025-2029.....	III-39
Gambar 3.15 Ilustrasi Janji Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.....	III-40

DAFTAR GRAFIK

Grafik	2.1	Komposisi Capaian TPB Kabupaten Barru.....	II-7
Grafik	2.2	Indeks Ketahanan Pangan Kab.Barru Tahun 2020-2024.....	II-18
Grafik	2.3	Prevalensi ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Barru Tahun 2020-2024.....	II-19
Grafik	2.4	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum Perpipaan Tahun 2021-2024.....	II-20
Grafik	2.5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru Tahun 2020-2024	II-21
Grafik	2.6	Timbulan Sampah Terolah di fasilitas Pengolahan sampah Kabupaten Barru Tahun 2021-2024	II-23
Grafik	2.7	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Kabupaten Barru Tahun 2021-2024	II-23
Grafik	2.8	Penurunan Intensitas Emisi GRK Kab.Barru Tahun 2019-2021.....	II-25
Grafik	2.9	Indeks Resiko Bencana Kabupaten Barru Tahun 2019-2024	II-26
Grafik	2.10	Persentase Wilayah berdasarkan Kategori Kerentanan Perubahan Iklim di Kabupaten Barru	II-29
Grafik	2.11	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Barru Tahun 2019-2024	II-32
Grafik	2.12	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barru Tahun 2018-2024	II-36
Grafik	2.13	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barru dengan Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024.....	II-38
Grafik	2.14	Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kab.Barru Tahun 2019-2024	II-39
Grafik	2.15	Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Barru dengan Capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Capaian Nasional Tahun 2019-2024	II-40
Grafik	2.16	Perbandingan Persentase Penduduk Miskin dengan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barru Tahun 2020-2024	II-40
Grafik	2.17	Indeks Gini Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan	

	Kab.Barru Tahun 2020-2024	II-41
Grafik 2.18	Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Barru dengan Wilayah Sekitar Tahun 2020 – 2024.....	II-42
Grafik 2.19	Tingkat Pengangguran Terbuka(TPT) Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 (dalam persen)	II-43
Grafik 2.20	Perbandingan Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Barru dengan Wilayah Setara dan Capaian Propinsi Sulawesi Selatan serta Capaian Nasional Tahun 2019-2024	II-43
Grafik 2.21	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Barru Tahun 2019 – 2023)	II-44
Grafik 2.22	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Barru dengan Capaian Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan dan Capaian Nasional	II-45
Grafik 2.23	Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kabupaten Barru dengan Capaian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024	II-46
Grafik 2.24	Perbandingan Usia Harapan Hidup Kabupaten Barru dengan Capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Capaian Nasional Tahun 2020-2024	II-46
Grafik 2.25	Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Barru Tahun 2019–2022	II-48
Grafik 2.26	Prevalensi Stunting Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024.....	II-48
Grafik 2.27	Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Barru dengan Capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Capaian Nasional Tahun 2020-2024.....	II-49
Grafik 2.28	Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Barru dengan Capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Capaian Nasional Tahun 2020-2024.....	II-50
Grafik 2.29	Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2021.....	II-52
Grafik 2.30	Perbandingan Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020 – 2023.....	II-52

Grafik	2.31	Indeks Perlindungan Anak (IPA) di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2021.....	II-53
Grafik	2.32	Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022.....	II-54
Grafik	2.33	Perbandingan Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018 – 2023.....	II-55
Grafik	2.34	Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Barru Tahun 2020-2024.....	II-57
Grafik	2.35	Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Barru Tahun 2020-2024	II-58
Grafik	2.36	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Kabupaten Barru Tahun 2019-2024	II-58
Grafik	2.37	Rasio Kewirausahaan Kabupaten Barru Tahun 2018-2022.....	II-59
Grafik	2.38	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Barru Tahun 2020-2024.....	II-59
Grafik	2.39	Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Barru dengan Capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020 – 2024.....	II-60
Grafik	2.40	Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021-2023.....	II-61
Grafik	2.41	Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Barru Tahun 2020-2024	II-61
Grafik	2.42	Indeks Layanan Infrastruktur Kabupaten Barru Tahun 2019-2024.....	II-65
Grafik	2.43	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Barru Tahun 2020-2024.....	II-69
Grafik	2.44	Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Barru Tahun 2020-2024.....	II-69
Grafik	2.45	Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020-2024.....	II-71
Grafik	2.46	Nilai Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Barru Per Pilar Tahun 2024.....	II-71
Grafik	2.47	Kinerja Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024.....	II-212
Grafik	2.48	Postur Pendapatan Daerah Tahun 2020 – 2024.....	II-213
Grafik	2.49	Kinerja Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 – 2024.....	II-213
Grafik	2.50	Postur Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 – 2024.....	II-214
Grafik	2.51	Kinerja Pendapatan Transfer Tahun 2020 – 2024.....	II-215
Grafik	2.52	Postur Pendapatan Transfer Tahun 2020 – 2024.....	II-216
Grafik	2.53	Kinerja Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2020 – 2024.....	II-217
Grafik	2.54	Kinerja Belanja Daerah Tahun 2020 – 2024.....	II-218

Grafik 2.55 Kinerja Belanja Operasi Tahun 2020 – 2024.....	II-219
Grafik 2.56 Kinerja Belanja Modal Tahun 2020 – 2024.....	II-220

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Pemerintah Daerah (Pemda) menyusun perencanaan pembangunan daerah, di mana perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Lebih lanjut, pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanahkan pemerintah daerah untuk menyusun rencana pembangunan daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, yang terdiri atas: 1). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu dua puluh tahun; 2). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu lima tahun; dan 3). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu satu tahun.

Berdasarkan ketentuan pasal 261 ayat (4), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dengan menggunakan pendekatan politis adalah menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru hasil pemilihan tahun 2024 adalah Bupati Barru **ANDI INA KARTIKA SARI, SH., M.Si** dan Wakil Bupati Barru **Dr. Ir. ABUSTAN, M.Si**, yang dilantik oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Februari 2025. Visi dan misi bupati dan wakil bupati harus diterjemahkan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dibahas bersama dengan DPRD Kabupaten Barru.

RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Barru untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun sesuai dengan kewenangan kabupaten dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Barru Tahun 2025-2045 dan KLHS Kabupaten Barru Tahun 2025-2029 serta memperhatikan RPJMN 2025-2029 khususnya Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Selain Visi Misi dan janji politik Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang harus diterjemahkan pada RPJMD, hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya, capaian SDGs, isu-isu strategis serta potensi-potensi unggulan Kabupaten Barru juga harus diakomodir dalam RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025-2029. Keseluruhan hal tersebut dianalisis berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut diamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2025–2029 merupakan Periode I atau tahapan pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barru tahun 2025 – 2029 sehingga menjadi sangat penting. Dimana RPJMD Tahun 2025 – 2029 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Barru Tahun 2025 – 2045. Adapun visi RPJPD 2025-2045 adalah “**Kabupaten Barru Maju dan Berkelanjutan Berbasis Ekonomi Biru**”.

Dari segi proses, penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025 - 2029 menggunakan 4 (empat) pendekatan, yaitu :

- a. Pendekatan Teknokratis, merupakan pendekatan yang menggunakan metode dan kerangka ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

- b. Pendekatan Partisipatif, merupakan pendekatan yang dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dengan mempertimbangkan relevansi pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan serta kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintahan dan non pemerintahan dalam pengambilan keputusan.
- c. Pendekatan politis, adalah pendekatan perencanaan pembangunan yang berasal dari proses politik dimana visi, misi dan program pembangunan daerah yang ditawarkan pada saat kampanye oleh masing-masing calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih kemudian disusun ke dalam Rancangan RPJMD.
- d. Pendekatan *Top-Down* dan *Bottom-Up*, merupakan proses perencanaan yang dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan, dimana hasilnya diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah

Kabupaten Barru merupakan salah satu daerah strategis di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki posisi geografis yang sangat menguntungkan. Terletak di jalur lintas barat Sulawesi, terletak di pantai Selat Makassar dengan panjang garis pantai 78 kilometer dan dilalui jalur jalan trans nasional dan rel Kereta Api trans Sulawesi. Barru menjadi penghubung utama antara Kota Makassar dan kawasan utara Sulawesi Selatan seperti Parepare dan Palopo. Kondisi ini menjadikan Barru sebagai wilayah transit dan distribusi yang potensial, terutama dalam pengembangan sektor logistik dan perdagangan. Dari sisi geografis, Barru memiliki topografi yang beragam, mulai dari wilayah pesisir hingga perbukitan dan pegunungan. Hal ini memberikan potensi besar dalam berbagai sektor, seperti kelautan dan perikanan, pertanian, peternakan, dan pariwisata alam. Pantai-pantai yang indah, seperti Pantai Ujung Batu, Lasonrai, Laguna serta Pulau Dutungan dan Pulau Pannikiang, menawarkan potensi wisata bahari yang menarik bagi investor dan wisatawan. Keunggulan strategis lainnya adalah keberadaan Pelabuhan Garongkong, salah satu pelabuhan terbesar di Sulawesi Selatan yang kini

terus dikembangkan menjadi pusat logistik nasional. Pelabuhan ini berperan penting dalam mendukung aktivitas ekspor-impor, khususnya untuk sektor pertambangan, agrikultur, dan hasil laut. Selain itu, pengembangan kawasan industri di sekitar pelabuhan membuka peluang besar dalam menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja. Keunggulan posisi strategis dan potensi alam ini perlu dipadukan secara bijak dan dikelola seoptimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka pembangunan daerah yang mengedepankan prinsip pembangunan dengan produktivitas tinggi namun tetap inklusif dan berkelanjutan.

Pembangunan di Kabupaten Barru selama ini telah dilakukan dengan memperhatikan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi yang terbangun antar wilayah, antar-ruang, antar waktu, dan antar fungsi, serta berupaya untuk mengoptimalkan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Capaian pembangunan Kabupaten Barru selama kurun waktu 2021 hingga 2024 telah menunjukkan hasil yang semakin membaik, namun masih menyisakan pula permasalahan yang perlu ditindaklanjuti penyelesaiannya pada pembangunan daerah periode tahun 2025 hingga tahun 2029.

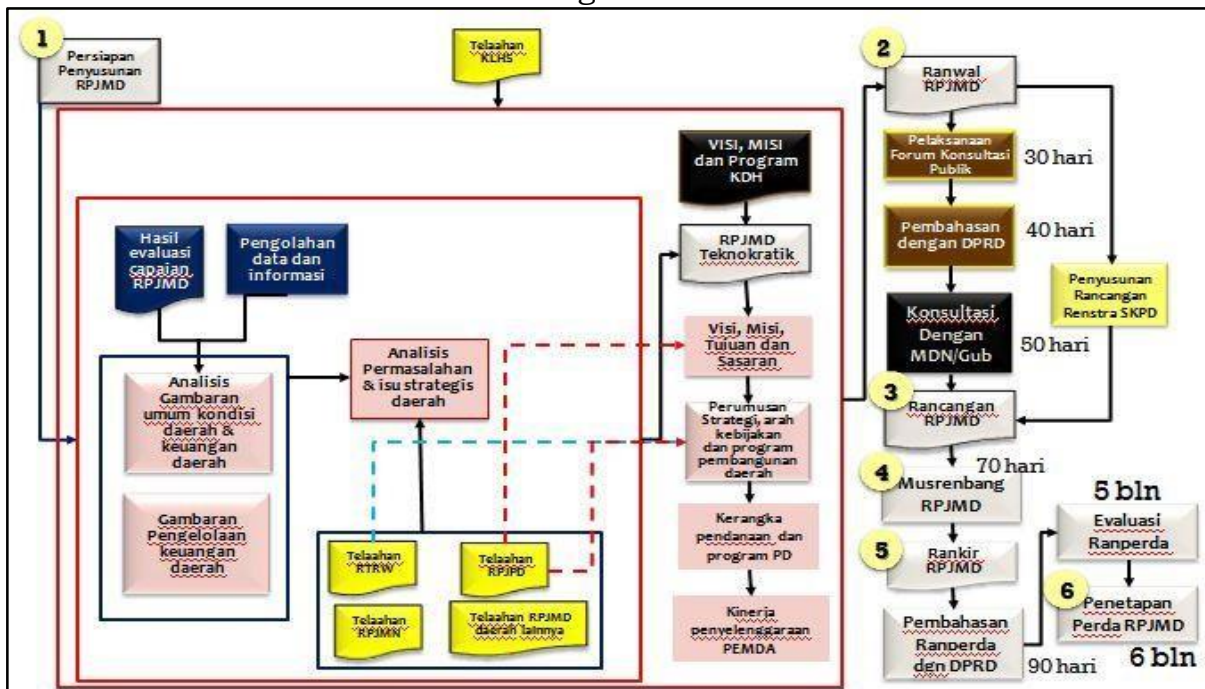
Penyusunan RPJMD Kabupaten Barru tahun 2025 – 2029 juga memperhatikan evaluasi kinerja periode sebelumnya. Gambaran capaian pembangunan selama 5 tahun terakhir diantaranya ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Barru yang telah mencapai 74,51 poin pada tahun 2024 atau naik dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 72,43 poin. Dari aspek kesejahteraan penduduk, tingkat kemiskinan Kabupaten Barru meningkat sepanjang 5 tahun terakhir sebesar 0,05% persen, dari 8,26% di tahun 2020 menjadi 8,31% di Tahun 2024. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barru Tahun 2024 tumbuh sebesar 4,92%, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru lima tahun sebelumnya di tahun 2020 yang hanya sebesar 0,87%. Gini Ratio Kabupaten Barru mengalami penurunan selama periode 2020 hingga 2024, yakni sebesar 0,50 dari angka 0,360 di tahun 2020 menurun menjadi 0,310 di Tahun 2024. Pada sektor ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan dari tahun 2020 yang mencapai angka 6,39% menjadi 6,42% pada tahun 2024.

Indonesia Emas Tahun 2045 yang tertuang dalam RPJPN Tahun 2025- 2045, perlu didukung dengan kontribusi pembangunan tingkat

daerah secara maksimal yang dilakukan oleh pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat serta semua pihak terkait sesuai peran dan kewenangan masing-masing dengan memanfaatkan kearifan lokal, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah. Dalam usaha perwujudan Indonesia Emas Tahun 2045, maka sinergitas perencanaan mulai dari nasional, provinsi dan kabupaten menjadi hal yang mutlak dilakukan. Selain itu dokumen RPJMD Tahun 2025–2029 Kabupaten Barru selanjutnya menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk lima tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Substansi yang termuat dalam dokumen RPJMD juga akan dijabarkan dalam dokumen rencana tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya. Proses penyusunan RPJMD Kabupaten Barru berdasarkan alur penyusunan dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1

Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RPJMD berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017



Sumber : Permendagri 86Tahun 2017

Penyusunan RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025-2029 dilakukan dengan memperhatikan dan memedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025-2029 dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu mulai dari pembentukan tim penyusun, orientasi penyusunan RPJMD, penyiapan agenda kerja, penyiapan data dan informasi, pembahasan visi dan misi secara teknokratis, penyusunan

rancangan awal, pelaksanaan forum konsultasi publik, penyampaian ranwal ke DPRD, pembahasan dan kesepakatan dengan DPRD, konsultasi ranwal ke Gubernur, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang), penyusunan rancangan akhir, review APIP, evaluasi pemerintah Pusat, hingga penetapan Peraturan Daerah RPJMD

Selain itu untuk menjamin sinergitas dokumen perencanaan, maka penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Barru berpedoman pada RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Barru. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Barru tahun 2025 - 2029 didasarkan pada sejumlah landasan hukum sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang

- Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 12. Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2024 tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 323, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7074);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 20. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 21. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);
 22. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

- Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
 30. Peraturan Menteri Hukum Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 272);
 31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2012 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 16);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 13);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru

- Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024 Nomor 3);
35. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 36. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.

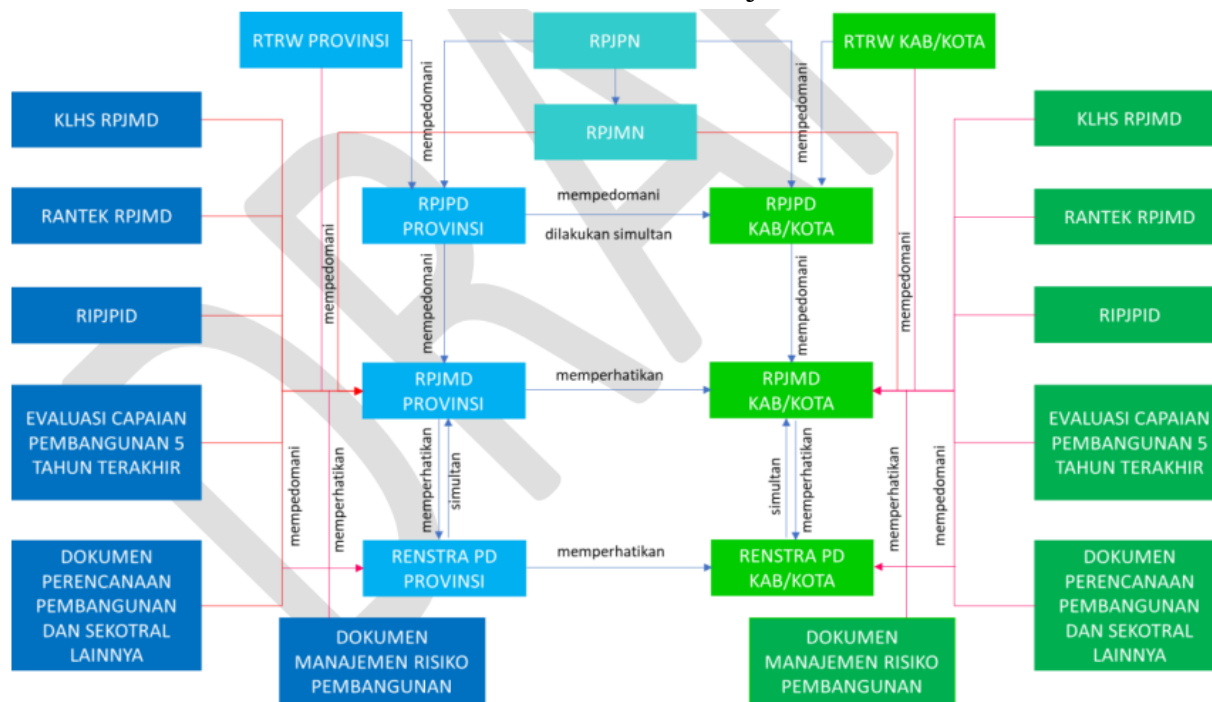
1.3. Hubungan Antar Dokumen

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menjelaskan pedoman teknis penyusunan dokumen perencanaan. Berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barru Tahun 2025–2029 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Penyusunan dokumen RPJMD diawali dengan penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD yang memuat diantaranya permasalahan dan isu strategis sebagai pedoman pembangunan daerah. Tahapan selanjutnya adalah penyempurnaan rancangan dokumen RPJMD sesuai platform politik dari Bupati/Wakil Bupati terpilih. Selanjutnya dilakukan sinkronisasi perencanaan dimana RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan jangka panjang daerah, RPJMD Provinsi, dan rencana pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan sehingga RPJMD harus sinkron dan sinergi antar level pemerintahan, antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Adapun keterkaitan dokumen RPJMD dengan perencanaan Pembangunan dan sektoral lainnya disajikan pada gambar berikut:

Gambar 1.2

Keterkaitan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral lainnya



Sumber : Imendagri Nomor 2 Tahun 2025

Penyusunan RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025-2029 disusun selaras dan berpedoman pada : 1) RPJPD Kabupaten Barru Tahun 2025-2045, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 dan RPJMN Tahun 2025-2029, meliputi keselarasan dalam visi, misi/agenda pembangunan, arah pembangunan, dan indikator kinerja utama pembangunan, dan 2) RTRW Kabupaten Barru, meliputi keselarasan dalam arahan rencana tata ruang utamanya struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis daerah. Selain itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Barru juga memperhatikan isu strategis dan arah kebijakan dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Barru, Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025-2029, serta hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 terutama pada tingkat ketercapaian dan rekomendasi, dan dokumen perencanaan pembangunan sektoral lainnya yaitu Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Minum (RISPAM) Tahun 2022-2037 dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPARDA) Tahun 2016-2030.

RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru yang merupakan perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Barru untuk periode 2025-

2029. Dokumen Renstra Perangkat daerah sebagai turunan pencerminan pelaksanaan RPJMD di level perangkat daerah. Dalam pelaksanaannya, pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sangat bergantung pada peran aktif seluruh perangkat daerah melalui penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah periode 2025-2029. Renstra merupakan dokumen perencanaan operasional masing-masing perangkat daerah untuk jangka waktu 5 tahun yang disusun berdasarkan tupoksi (tugas dan fungsi) serta berpedoman langsung pada dokumen RPJMD.

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barru Tahun 2025 - 2029 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RPJPD Kabupaten Barru Tahun 2025-2045 dan menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program prioritas daerah, program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif, serta menyelaraskan RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2029

1.4.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan tahap pertama periodisasi RPJPD Kabupaten Barru Tahun 2025 – 2045;
2. Menjabarkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih hasil Pilkada Serentak Tahun 2024;
3. Menciptakan koordinasi dan sinergi antar pelaku pembangunan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Barru.
4. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Barru dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Menyelesaikan permasalahan pembangunan, mengelola potensi dan sumber daya Kabupaten Barru secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan serta meraih setiap

peluang yang ada untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

6. Menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Barru dan penyusunan dokumen tahunan RKPD Kabupaten Barru.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025 - 2029 disusun dengan sistematika sebagaimana tertuang dalam Lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yakni sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan,

memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan penyusunan RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025–2029.

Bab II. Gambaran Umum Daerah,

menjelaskan dan menyajikan: (i) gambaran umum kondisi daerah yang meliputi Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, serta Aspek Daya saing Daerah; (ii) gambaran keuangan daerah yang meliputi Kinerja Keuangan masa Lalu, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu Serta Kerangka Pendanaan; dan (iii) permasalahan dan isu strategis daerah, yang terdiri dari Permasalahan Pembangunan Daerah dan Isu Strategis.

Bab III. Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

menguraikan tentang visi dan misi kepala daerah terpilih, serta perumusan tujuan dan sasaran yang akan hendak dicapai kepala dan wakil kepala daerah Kabupaten Barru hingga akhir periode RPJMD ini. Serta menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Menguraikan program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Bab IV. Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,

memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh

program yang dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan. Serta menguraikan penetapan indikator kinerja daerah untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Bab V. Penutup

menguraikan tentang Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan daerah sebagai bagian dari Upaya pencapaian sasaran Pembangunan di daerah.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

A. Posisi dan Peran Strategis Daerah

Kabupaten Barru yang terletak di pantai Selat Makassar merupakan salah satu lokasi yang strategis di sepanjang pesisir bagian Barat Sulawesi Selatan. Secara geografis Kabupaten Barru terletak diantara koordinat 4°05'49" LS – 4°47'35" LS dan 119°35'00" – 119°49'16" BT. Kabupaten Barru mempunyai wilayah yang cukup bervariasi terdiri dari daerah pesisir dan laut, dataran rendah dan dataran tinggi. Di bagian timur Kabupaten Barru terbentang daerah dataran tinggi dengan ketinggian antara 100 sampai 1700 meter di atas permukaan laut, sedangkan bagian barat yang berhadapan dengan selat Makassar, bertopografi datar sampai landai dengan ketinggian 0 – 20 meter di atas permukaan laut. Sementara itu, wilayah Kabupaten Barru memiliki kelerengan yang sangat bervariasi mulai datar, bergelombang hingga bergunung dengan persentase kemiringan antara 0% - >40%.

Posisi wilayah dan administrasi Kabupaten Barru memiliki karakteristik yang spesifik. Bentuk geometri yang memanjang dari arah Utara ke Selatan menjadikan daerah yang berada pada jalur poros trans Sulawesi, penghubung utama pusat Kota Makassar dengan kawasan lain di bagian utara dan wilayah provinsi lain memiliki kedudukan yang strategis dalam hal ekonomi, investasi dan perdagangan. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten dengan luas wilayah 1.201,32 km² sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Kota Pare-Pare dan Kabupaten Sidrap
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- Sebelah Barat dengan Selat Makassar

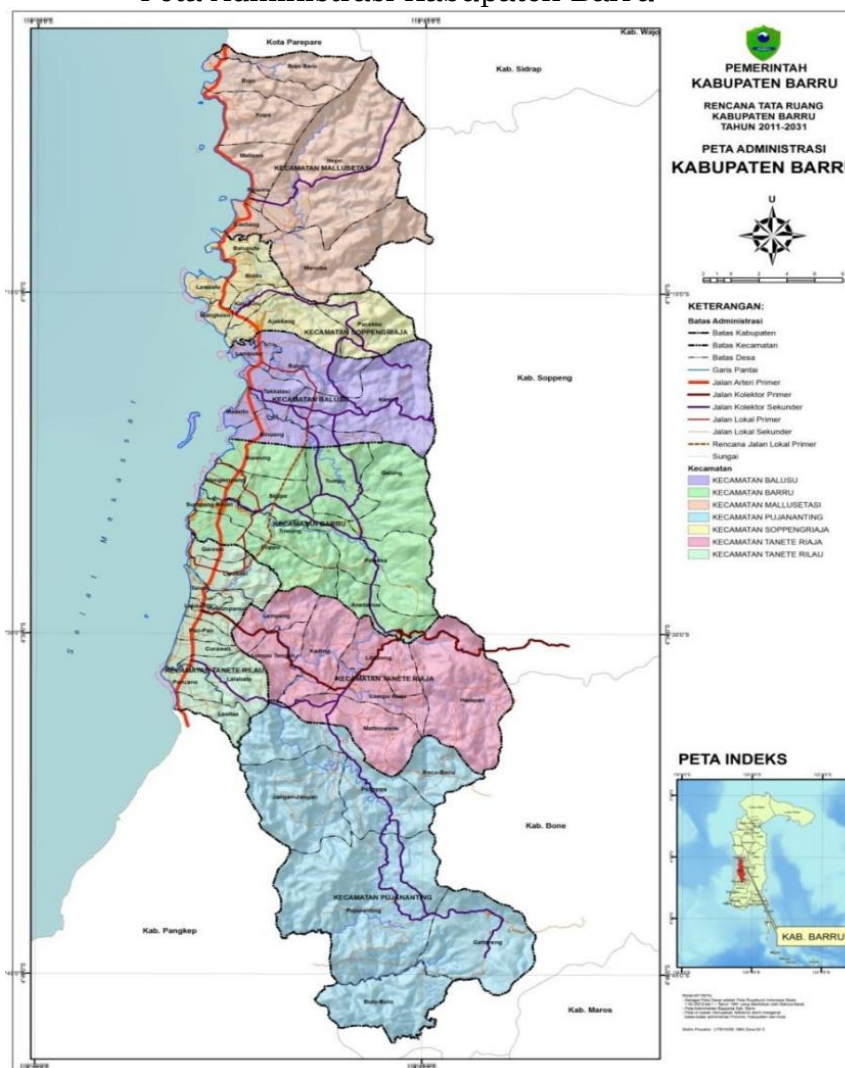
Secara administratif Kabupaten Barru terbagi atas 7 (tujuh) Kecamatan yaitu Kecamatan Tanete Riaja, Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Barru (Ibukota Kabupaten), Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Pujananting dan Kecamatan Balusu yang terdiri dari 15 Kelurahan dan 40 Desa yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 1
Luas Wilayah Kecamatan dan Jumlah Kelurahan/Desa Kab.Barru

Kode	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Luas (km ²)	%
731101	Tanete Riaja	6	1	174,29	14,83
731102	Tanete Rilau	8	2	79,17	6,74
731103	B a r r u	5	5	199,32	16,97
731104	Soppeng Riaja	5	2	78,90	6,72
731105	Mallusetasi	5	3	216,58	18,44
731106	Pujananting	6	1	314,26	26,75
731107	Balusu	5	1	112,20	9,55
Total		40	15	1.201,32	100

Sumber: Kabupaten Barru Dalam Angka 2025

Gambar 2. 1
Peta Administrasi Kabupaten Barru



Sumber: Dinas PUTR Perkim Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kecamatan Pujananting adalah kecamatan yang terluas di Kabupaten Barru yakni seluas 314,26 km² atau sebesar 26,75% dari total wilayah Kabupaten Barru, sementara Kecamatan Soppeng Riaja merupakan kecamatan yang tersempit di Kabupaten Barru yakni hanya seluas 78,90 km² atau sebesar 6,72% dari total wilayah keseluruhan. Luas total Kabupaten Barru dengan akumulasi luas masing-masing kecamatan belum sesuai

karena luas masing-masing kecamatan masih akan dilakukan penyesuaian disebabkan data belum tersedia

Selain wilayah daratan Kabupaten Barru juga memiliki 10 pulau-pulau kecil, yaitu Pulau Bakki, Pulau Batukalasi, Pulau Batuloang, Pulau Dutungan, Pulau Gusung Bulobulo, Pulau Gusung Padongko, Pulau Lawase, Pulau Panikiang, dan Pulau Puteangin. Dari kesepuluh pulau yang ada, hanya terdapat 3 pulau yang berpenghuni yaitu Pulau Dutungan, Pulau Panikiang, dan Pulau Puteangin.

Secara topografis, Kabupaten Barru mempunyai wilayah bervariasi yang terdiri atas wilayah laut, dataran rendah dan wilayah pegunungan dengan ketinggian wilayah antara 0–1.700 meter di atas permukaan laut (mdpl). Topografi wilayah Kabupaten Barru berdasarkan ketinggian dari permukaan laut yang dibagi dalam 5 (lima) kriteria yaitu 0-25 m, 25-100 m, 100-500 m, 500-1.000 m dan ≥ 1000 m, dengan luas wilayah yang paling besar adalah wilayah dengan ketinggian antara 100-500 m yaitu sebesar 58.016 Ha sedangkan yang paling kecil adalah wilayah dengan ketinggian ≥ 1.000 m yaitu sebesar 1.842 Ha.

Gambar 2. 2
Peta Topografi Kabupaten Barru

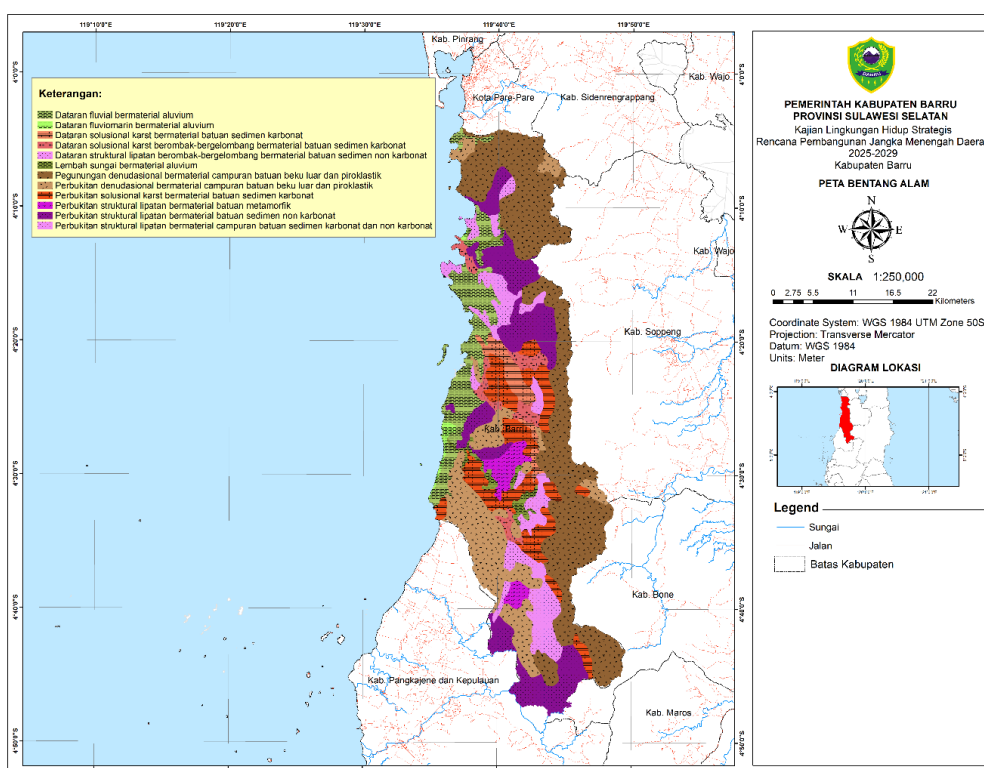


Sumber: Dinas PUTR Perkim Tahun 2025

Kabupaten Barru mempunyai wilayah yang cukup bervariasi terdiri

dari daerah pesisir/laut, dataran rendah dan dataran tinggi. Di bagian timur Kabupaten Barru terbentang daerah dataran tinggi dengan ketinggian antara 100 sampai 1700 meter di atas permukaan laut, sedangkan bagian barat yang berhadapan dengan selat Makassar, bertopografi datar sampai landai dengan ketinggian 0-20 meter di atas permukaan laut. Sementara itu, wilayah Kabupaten Barru memiliki kelerengan yang sangat bervariasi mulai datar, bergelombang hingga bergunung dengan persentase kemiringan antara 0% - > 40%. Bentang alam Kabupaten Barru dapat dilihat pada peta dibawah ini:

Gambar 2. 3
Peta Bentang Alam Kabupaten Barru Tahun 2024



Sumber: Dinas PUTR Perkim Tahun 2025

Dari aspek tutupan lahan, lebih dari setengah wilayah di Kabupaten Barru merupakan area hutan, selebihnya merupakan area persawahan, semak belukar, perkebunan dan ladang. Sedangkan untuk bangunan permukiman masih dibawah 3% dari total wilayah di Kabupaten Barru. Adapun luas dan persentase tutupan lahan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut:

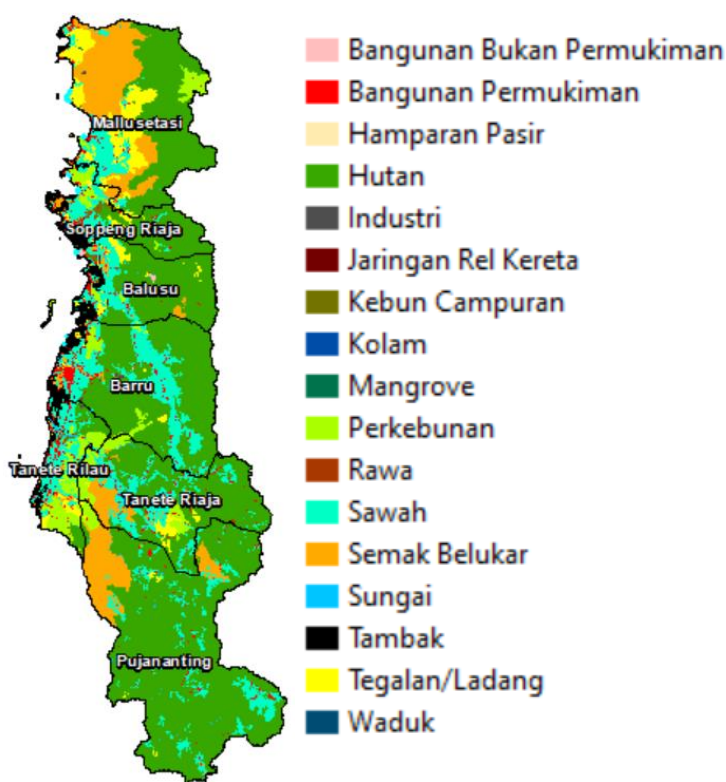
Tabel 2. 2
Luas dan persentase Tutupan lahan Kabupaten Barru Tahun 2024

No	Tutupan Lahan	Luas (Ha)	%
1	Rawa	4,20	0.003%
2	Waduk	6,83	0.01%
3	Kolam	22,48	0.02%
4	Hamparan Pasir	27,13	0.02%

No	Tutupan Lahan	Luas (Ha)	%
5	Bangunan Bukan Permukiman	105,81	0.09%
6	Industri	127,76	0.11%
7	Jaringan Rel Kereta	174,60	0.15%
8	Mangrove	254,46	0.21%
9	Kebun Campuran	400,76	0.33%
10	Sungai	724,32	0.60%
11	Tambak	2.890,81	2.40%
12	Bangunan Permukiman	2.947,90	2.45%
13	Tegalan/Ladang	5.707,03	4.74%
14	Perkebunan	5.956,79	4.95%
15	Semak Belukar	12.383,09	10.29%
16	Sawah	181.543,90	15.40%
17	Hutan	69.854,11	58.24%
Jumlah		1.201.32,20	100.00%

Sumber : Dinas PUTR Perkim Kabupaten Barru Tahun 2025

Gambar 2. 4
Peta Tutupan Lahan Kabupaten Barru Tahun 2024



Sumber : Dinas PUTR Perkim Kabupaten Barru Tahun 2025

Kabupaten Barru memiliki garis pantai 78 km dan masuk ke dalam jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, posisi strategis ini akan memicu dampak signifikan pada peningkatan investasi di wilayah ini. Sektor infrastruktur dinilai akan terdongkrak seiring aktivitas pelayaran yang melewati perairan Sulsel. Keberadaan Barru pada jalur ALKI II menjadi gambaran para investor dan para pedagang, bahwa Kabupaten Barru merupakan pintu ke wilayah internasional. Masuknya Kabupaten Barru di jalur ALKI II menegaskan wilayah ini sangat strategis, harusnya bisa menjadi pintu untuk langsung ke

negara-negara tujuan utama perdagangan ekspor impor Indonesia.

Kontribusi Kabupaten Barru terhadap wilayah sekitarnya dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu:

1. Kontribusi ekonomi regional

Pada tahun 2024, perekonomian Kabupaten Barru tumbuh sebesar 4,92%, naik dari 3,51% di tahun sebelumnya, meskipun sedikit menurun dibandingkan 2022 yang mencapai 5,11%. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap menjadi penyumbang terbesar terhadap PDRB sekitar 31,46% diikuti sektor konstruksi 20,25% dan perdagangan besar dan eceran 10,39%.

Barru menyediakan pangan melalui sektor pertanian dan perikanan, infrastruktur dan konstruksi mendorong pengembangan wilayah, serta sektor jasa terutama kesehatan dan bisnis menguatkan pelayanan di Sulawesi Selatan. Kabupaten Barru menjadi sumber pangan, konstruksi, perdagangan, dan jasa yang menopang ekonomi regional. Selain itu, Kabupaten Barru terletak di jalur trans-Sulawesi, sekitar 100 km dari Makassar. Pelabuhan Garongkong dan Pelabuhan Awerange serta keberadaannya sebagai pusat komoditas menjadikannya pusat distribusi dan logistik penting serta yang memiliki peran penting sebagai simpul logistik maritim dan penopang kawasan industri. Secara geostrategis Kabupaten Barru menjadi pusat distribusi komoditas, pelabuhan, dan lintasan trans-Sulawesi

2. Pusat Agropolitan dan destinasi Pariwisata

Kabupaten Barru sebagai pusat peternakan sapi Bali dan rujukan kawasan agropolitan di Sulawesi Selatan. Selain itu, kontribusi dari sektor pariwisata diantaranya Bukit Maddo, Lappalaona, Air Terjun Waesae, Celebes Canyon, pulau Dutungan, dan Embung Pacekke, sehingga menumbuhkan ekonomi lokal dan regional yang mendorong UMKM, *homestay*, kuliner lokal, ekonomi kreatif desa, jasa wisata.

Selain itu, peran strategis daerah Kabupaten Barru dalam konteks pembangunan ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan, dapat dilihat pada capaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Melalui pengelolaan peran strategis tersebut Pemerintah Kabupaten Barru dapat mengembangkan kebijakan dan strategi yang sesuai untuk memaksimalkan kontribusi daerah dalam pembangunan ekonomi dan sosial secara keseluruhan sehingga dapat mencapai tujuan

pembangunan yang berkelanjutan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Gambaran peran strategis daerah Kabupaten Barru hingga akhir periode RPJPD 2005-2025 mengacu pada capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kabupaten Barru berdasarkan indikator yang menjadi kewenangan kabupaten telah mencapai 22% dari 220 indikator.

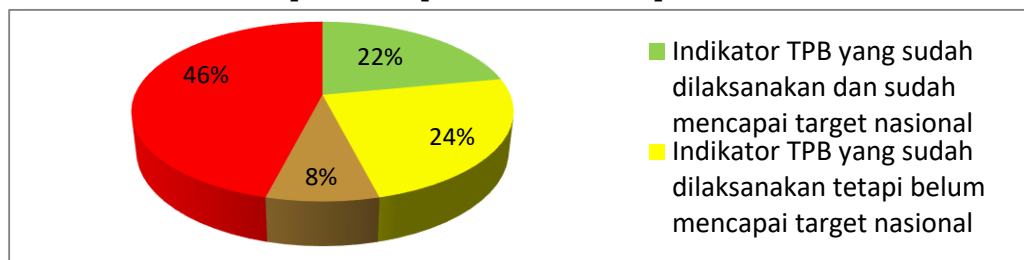
Capaian indikator TPB Kabupaten Barru terhadap target nasional diperoleh proporsi seperti dalam tabel dan gambar di bawah ini :

Tabel 2. 3
Capaian TPB Kabupaten Barru Tahun 2024

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Sudah Dilaksanakan akan Sudah Mencapai Target (SS)	Sudah Dilaksanakan Belum Mencapai Target (SB)	Belum Dilaksanakan Belum Mencapai Target (BB)	Tidak Ada Data (TAD)	Jumlah Indikator
1	Tanpa Kemiskinan	8	5	4	7	24
2	Tanpa Kelaparan	5	3	2	1	11
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	14	8		12	34
4	Pendidikan Berkualitas	7	3		3	13
5	Kesetaraan Gender	1	4		9	14
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	1	7		10	18
7	Energi Bersih dan Terjangkau				2	2
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	4	5		10	19
9	Industri, Inovasi, dan Infrastruktur		5		8	13
10	Berkurangnya Kesenjangan		3	3	5	11
11	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	4		3	6	13
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab		1		4	5
13	Penanggulangan Perubahan Iklim	1		1		2
14	Ekosistem Laut					
15	Ekosistem Darat		1	1	2	4
16	Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh	3	6	3	9	21
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	1	1	1	13	16
Total		49	52	18	101	220
Persentase		22%	24%	8%	46%	

Sumber : Dokumen KLHS RPJPD Tahun 2025

Grafik 2. 1
Komposisi Capaian TPB Kabupaten Barru



Sumber : Dokumen KLHS RPJPD Tahun 2025

Sebanyak 220 indikator TPB yang menjadi wewenang dan relevan di Pemerintah Kabupaten Barru, dengan uraian capaian sebagai berikut : (i) untuk kategori yang telah melaksanakan indikator TPB dan telah mencapai target sebanyak 49 indikator atau 22,00%; (ii) untuk kategori yang telah melaksanakan indikator TPB tapi belum mencapai target sebesar 52 indikator atau sebesar 24%; (iii) untuk kategori indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target sebesar 18 indikator atau 8%; (iv) untuk indikator yang tidak ada data sebesar 101 indikator atau 46%.

Pengkategorian hasil capaian tersebut bertujuan untuk memetakan isu strategis apa saja yang perlu mendapatkan perhatian dalam pencapaian tujuan pembangunan di Kabupaten Barru pada periode RPJPD yang telah ditentukan. Isu strategis yang perlu mendapat perhatian utama adalah target-target TPB yang memiliki indikator Sudah Dilaksanakan Belum Mencapai Target (SB), Belum Dilaksanakan Belum Mencapai Target (BB) dan Tidak Ada Data (TAD) yang menunjukkan banyaknya indikator TPB yang belum dilaksanakan dan sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional, serta perlu adanya penyusunan data sebagai *baseline* penentuan target TPB. Target TPB yang semua indikatornya sudah mencapai target nasional (SS) juga perlu terus dijalankan untuk mempertahankan capaian indikator tersebut.

B. Potensi Sumber Daya Alam

a. Potensi Geologi

Struktur regional Kabupaten Barru terdiri atas struktur lipatan dan struktur sesar dimana struktur lipatan adalah suatu bentuk deformasi pada batuan sedimen, batuan vulkanik dan batuan *metamorf* yang memperlihatkan suatu bentuk bergelombang dan struktur yang berkembang di Kabupaten Barru adalah struktur

sinklin. Sedangkan struktur sesar merupakan suatu rekahan pada batuan yang telah mengalami pergeseran sehingga terjadi perpindahan antara bagian-bagian yang berhadapan dan arahnya sejajar dengan bidang patahan. Kondisi geologi daerah Barru yang kompleks akibat tektonik inilah yang menyebabkan potensi pertambangan di Kabupaten Barru sangat besar khususnya pada bahan galian batuan. Bahan galian batuan yang bernilai ekonomis tersebar di wilayah Kabupaten Barru. Sedangkan potensi batuan menyebar dari Utara sampai Selatan daerah Barru, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 4
Potensi Jenis Tambang Menurut Kecamatan Kab.Barru
Tahun 2024

No.	Kecamatan	Jenis Tambang
1	Tanete Riaja	Batubara, kromit, batugamping, pasirkuarsa, marmer, serpentinit, tanah liat, batu pasir, pasir, dan batu Sungai
2	Tanete Rilau	Pasir besi, pasir sungai, tanah liat dan serpentinite
3	Barru	Batu gamping, serpentinit, tanahliat, pasir dan batu Sungai
4	Soppeng Riaja	Pasir dan batu Sungai
5	Mallusetasi	Tras, pasir besi dan batu Sungai
6	Pujananting	Batubara, kromit, batugamping, marmer, serpentinit, mangan, galena, emas, pasirkuarsa, tanah liat, pasir dan batu Sungai
7	Balusu	Batu gamping dan tanah liat

Sumber: Dinas PUTR Perkim Kabupaten Barru 2025

Dari berbagai potensi jenis tambang yang ada di Kabupaten Barru, Tras merupakan jenis tambang dengan potensi volume yang besar yang terdapat di kecamatan Mallusetasi. Tras dapat digunakan sebagai bahan baku pengganti semen atau campuran semen, selain itu dapat juga digunakan sebagai bahan campuran untuk memperkuat beton

b. Potensi Hidrologi

Kabupaten Barru memiliki potensi sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan keberlangsungan kehidupan masyarakat. Potensi tersebut berupa air hujan, air permukaan, air tanah dan aliran sungai atau limpasan. Sungai-sungai yang ada selain airnya dimanfaatkan untuk keperluan irigasi, industri, rumah tangga juga sungai yang ada berpotensi untuk pembangkit listrik tenaga air skala mikro hidro dan untuk budidaya perikanan. Berikut data sungai yang mengalir menurut lokasi:

Tabel 2. 5
Sungai Mengalir Menurut Daerah Aliran Sungai di Kab.Barru

No	Daerah Aliran Sungai	Lokasi	Panjang (Km)
1	Kupa	Mallusetasi	11,25
2	Lakepo	Balusu, Barru	85,97
3	Lampoko	Balusu, Soppeng Riaja	113,51
4	Sumpang Binangae	Balusu, Barru Tanete Riaja	44,85
5	Bojo	Mallusetasi	26,35
6	Jampue	Mallusetasi, Soppeng Riaja	88,70
7	Matajang	Tanete Rilau, Tanete Riaja,	53,25
8	Pangkajene	Pujananting	64,38
9	Pelapekkae	Mallusetasi	3,93
10	Segeri	Pujananting, Kab. Pangkep	35,17

Sumber: Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2025

Di Kabupaten Barru terdapat 21 sungai yang tersebar di 7 kecamatan, dengan sungai terpanjang adalah Sungai Lampoko di Kecamatan Balusu dan Kecamatan Soppeng Riaja dengan panjang sungai 113,51 Kilometer kemudian disusul sungai Jampue di Kecamatan Mallusetasi dengan panjang 88,70 Kilometer.

Berdasarkan dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Barru yang menguraikan tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) terhadap ketersediaan air Kabupaten Barru, menunjukkan semua wilayah kecamatan di Kabupaten Barru sampai dengan tahun 2024 masih mampu memberi daya dukung atas ketersediaan kebutuhan air.

c. Potensi Tutupan Lahan

Rencana pola ruang wilayah merupakan rencana terhadap karakteristik dan kecenderungan pola pemanfaatan ruang wilayah. Rencana pola ruang meliputi alokasi pemanfaatan ruang, kawasan budidaya, kawasan lindung, serta kawasan perkotaan dan pedesaan. Kawasan budidaya dapat diartikan sebagai wilayah yang dapat dibudidayakan dan difungsikan untuk kepentingan pembangunan dalam bentuk kegiatan usaha berbagai sektor atau subsektor pembangunan yang terkait. Penetapan kawasan budidaya dapat dikelompokkan kedalam dua kriteria, yaitu kriteria sektoral dan kriteria ruang. Kriteria teknis sektoral kawasan budidaya adalah suatu kegiatan dalam kawasan yang memenuhi ketentuan-ketentuan teknis seperti daya dukung, kesesuaian lahan, bebas bencana, dan lain-lain. Sedangkan kriteria ruang kawasan budidaya menentukan pemanfaatan ruang kegiatan

budidaya yang menghasilkan nilai sinergi terbesar untuk kesejahteraan masyarakat dan tidak bertentangan dengan kelestarian lingkungan. Luas arahan kawasan budidaya Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 6

Luas Arahan Kawasan Budidaya Kabupaten Barru Tahun 2024

No	Kawasan Budidaya	Luas (Ha)	%
1	Hutan Produksi	17.290,03	14,52
2	Hutan rakyat	5.923,35	4,97
3	Kawasan Budidaya Perikanan	2.682,69	2,25
	Tambak	2.682,69	2,25
4	Kawasan Budidaya Perkebunan	14.046,91	11,79
	Perkebunan	14.046,91	11,79
5	Kawasan Budidaya Pertanian	19.880,78	16,69
	Pertanian lahan basah	14.322,14	12,02
	Pertanian lahan kering	1.785,70	1,50
	Hortikultura	3.772,94	3,17
6	Kawasan Budidaya Peternakan	2.290,54	1,92
	Peternakan Besar	2.290,54	1,92
7	Kawasan Permukiman	3.771,64	3,17
	Permukiman	3.771,64	3,17
8	Kawasan Pertambangan	1.490,56	1,25
	Pertambangan	1.490,56	1,25
Total Kawasan Budidaya		67.376,50	56,57

Sumber : Dinas PUTR Perkim Kabupaten Barru Tahun 2025

Sementara itu, kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan hutan lindung juga merupakan kawasan yang ditetapkan dengan tujuan mencegah erosi dan sedimentasi serta menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah dan air permukaan. Kawasan dimaksud adalah kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya terdiri dari kawasan hutan lindung yang memiliki skor >175, yang merupakan penjumlahan skor intensitas curah hujan, kepekaan tanah terhadap erosi dan kemiringan lereng. Selain itu kawasan ini meliputi pula wilayah dengan ketinggian >2.000 meter dari permukaan laut. Kawasan resapan air yang meliputi hutan rawa, kawasan sempadan sungai dan danau.

Secara keseluruhan Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Barru seluas 50.574 hektar dan hutan produksi terbatas seluas 17.700 hektar. Secara lebih rinci luasan kawasan hutan lindung berdasarkan kecamatan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 7

Luas Kawasan Hutan Menurut Kecamatan Kab Barru Tahun 2024

No	Kecamatan	KSA/KPA	Hutan Lindung	Hutan Produksi Terbatas	Jumlah
1	Tanete Riaja	188,26	3.608,74	2.830,43	6.627,42
2	Tanete Rilau		1.090,22		1.090,22
3	Barru	96,82	7.186,71	3.433,09	10.716,63
4	Soppeng Riaja		2.044,68	926,03	2.970,71
5	Mallusetasi		16.266,11	123,55	16.389,65
6	Pujananting		18.584,41	6.343,08	24.927,50
7	Balusu		1.793,19	4.044,36	5.837,55
Jumlah		285,08	50.574,07	17.700,54	68.559,69

Sumber Data: Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2024

Sedangkan kawasan lindung adalah sebagai berikut:

- badan air seluas kurang lebih 556 hektar, terdapat di seluruh kecamatan;
- kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan hutan lindung dengan kode HL seluas kurang lebih 50.459 hektar terdapat di seluruh kecamatan;
- kawasan perlindungan setempat seluas kurang lebih 14 hektar, terdapat di Kecamatan Balusu, Kecamatan Barru, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Soppeng Riaja dan Kecamatan Tanete Rilau;
- kawasan konservasi yaitu kawasan pelestarian alam berupa taman wisata alam seluas kurang lebih 269 hektar, terdapat di Kecamatan Barru dan Kecamatan Tanete Riaja;
- kawasan lindung geologi berupa kawasan cagar alam geologi seluas kurang lebih 182 hektar terdapat di Kecamatan Tanete Riaja;
- kawasan cagar budaya seluas kurang lebih 0,4 hektar terdapat di Kecamatan Balusu.; dan
- kawasan ekosistem mangrove seluas kurang lebih 326 hektar, terdapat di Kecamatan Balusu, Kecamatan Barru, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Soppeng Riaja, dan Kecamatan Tanete Rilau.

C. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, daya dukung

merupakan kemampuan dari lingkungan hidup dalam mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup. Sementara itu, daya tampung merupakan kemampuan lingkungan hidup dalam menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamannya. Substansi Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) tertuang dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang menjadi dasar dalam proses penyusunan dan evaluasi kebijakan rencana tata ruang dan rencana pembangunan daerah. Penentuan daya dukung sumber daya alam dilakukan melalui beberapa konsep pendekatan yang berkaitan dengan lahan pertanian, fungsi lindung, sumber daya lahan, sumber daya air, sumber daya energi, keanekaragaman hayati, dan sebagainya

a. Daya Dukung Pangan

Untuk menentukan status daya dukung pangan di Kabupaten Barru yaitu dengan menghitung selisih antara jumlah ketersediaan pangan dengan jumlah kebutuhan pangan di Kabupaten Barru. Data ketersediaan dan kebutuhan pangan pada setiap kecamatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 8

Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan di Kab.Barru Tahun 2024

Kecamatan	Ketersediaan (kkal)	Kebutuhan Pangan (kkal)	
		2025	2030
Balusu	61.963.911.747,87	14.737.571.272,84	14.982.351.425,34
Barru	111.531.341.568,02	35.561.609.050,07	37.672.592.382,77
Mallusetasi	116.374.159.979,24	21.779.587.563,03	22.474.343.520,53
Pujananting	168.828.221.686,35	10.076.845.283,70	10.112.163.653,31
Soppeng Riaja	49.646.043.727,01	14.186.804.690,34	14.193.899.511,51
Tanete Riaja	85.032.168.917,98	20.388.692.357,21	21.566.983.650,41
Tanete Rilau	50.154.880.286,95	29.902.743.768,73	31.474.787.335,30
Grand Total	643.530.727.913,4	146.633.853.985,9	152.477.121.479,17

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru 2025-2045

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa daya dukung lingkungan hidup untuk menyediakan pangan dari setiap kecamatan tertinggi di Kecamatan Pujananting dan terendah di kecamatan Tanete Rilau. Kebutuhan pangan tertinggi di Kabupaten Barru pada Tahun 2024 yaitu pada Kecamatan Barru sebesar 34.341.499.500 kkal dan disebabkan tingginya jumlah penduduk pada Kecamatan tersebut dibandingkan kecamatan lain, sedangkan kebutuhan pangan terendah yaitu pada Kecamatan Pujananting sebesar 10.073.343.000 kkal disebabkan jumlah penduduk paling rendah dari Kecamatan lain.

Tabel diatas juga menunjukkan bahwa masih terdapat selisih ketersediaan pangan dengan kebutuhan pangan dapat dikatakan bahwa status daya dukung penyediaan pangan bagi penduduk Kabupaten Barru sampai di tahun 2024 belum terlampaui. Rincian Status daya dukung pangan Kabupaten Barru tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 9

Status Daya Dukung Penyediaan Pangan Kab.Barru Tahun 2024

Kecamatan	Belum Terlampaui (Ha)		Terlampaui (Ha)		Grand Total
	Tahun 2024	Tahun 2030	Tahun 2024	Tahun 2030	
Balusu	10,945.81	7,157.74	61.51	3,865.29	11.007,32
Barru	18,797.81	18,140.66	1,656.25	2,345.12	20.454,07
Mallusetasi	22,641.42	21,494.60	160.69	1,335.38	22.802,11
Pujananting	35,045.60	25,829.72		9,280.32	35.045,60
Soppeng Riaja	8,033.24	4,196.18	36.05	3,884.22	8.069,30
Tanete Riaja	15,996.73	14,120.37		1,902.94	15.996,73
Tanete Rilau	5,112.03	2,891.09	1,899.33	4,132.74	7.011,36
Grand Total	116,572.65	93,830.37	3,813.84	26,746.01	120.386,4
Persentase	96.83	77.94	3.17	22.22	

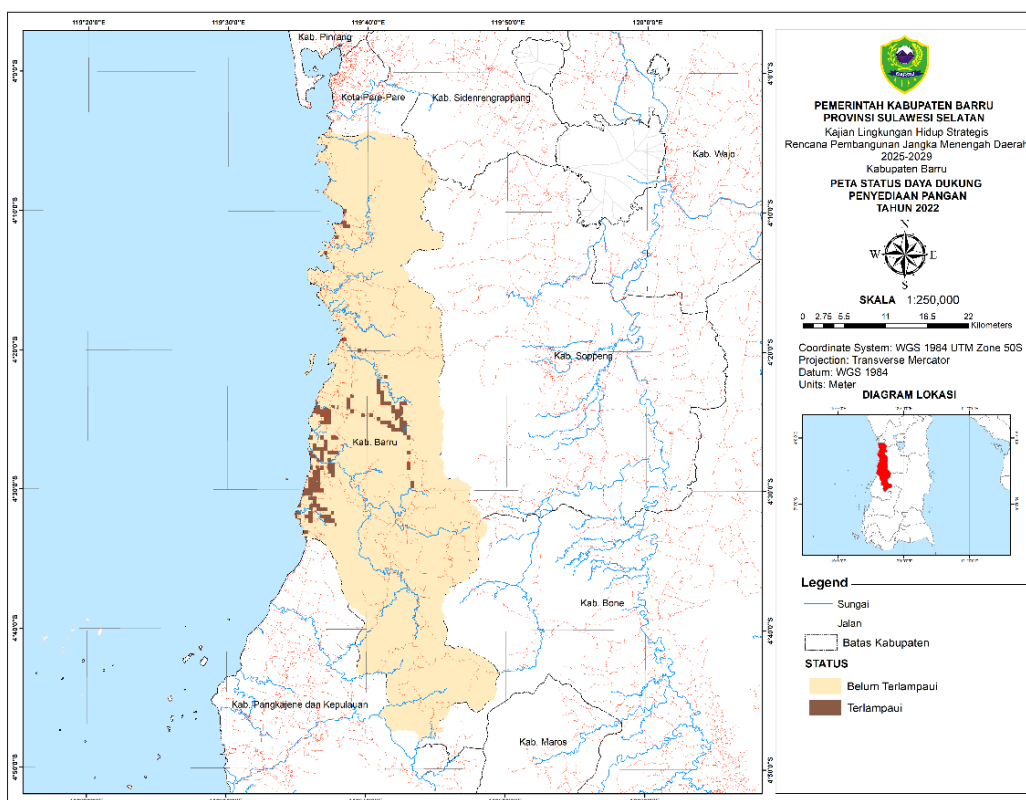
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru 2025

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat peningkatan luas lahan dengan status daya dukung penyediaan pangan terlampaui sampai pada tahun 2030 seluas 26,746.01 Ha, dengan luas lahan terluas terdapat di Kecamatan Pujananting sebanyak 9.280,32 Ha.

Pada Gambar berikut ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa lahan yang telah melampaui ambang batas yakni antara kemampuan alam menyediakan bahan pangan terhadap kebutuhan atau konsumsi pangan yang dibutuhkan masyarakat di wilayah tersebut. Daya dukung penyediaan pangan menggambarkan kapasitas suatu wilayah dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduknya secara berkelanjutan, melibatkan aspek-aspek integral seperti produksi pertanian, keberlanjutan ekologi, ketersediaan lahan pertanian, dan kerangka kebijakan pangan. Keberadaan daya dukung ini menjadi elemen krusial dalam menjaga ketahanan pangan dan mengatasi tantangan kelaparan yang mungkin muncul. Pengukuran daya dukung penyediaan pangan dapat dilakukan dengan melihat sejauh mana produksi pangan dalam wilayah tersebut mampu memenuhi kebutuhan lokal, yang mencakup pertimbangan terhadap jenis pangan yang dihasilkan, produktivitas pertanian,

dan kualitas pangan yang tersedia. Aspek-aspek ini saling terkait dan memerlukan perhatian khusus dalam merinci kemampuan wilayah dalam menyokong kebutuhan pangan penduduknya.

Gambar 2. 5
Peta Status Daya Dukung Penyediaan Pangan di Kab.Barru Tahun 2024



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru 2025

Selain itu, perlu diperhatikan bahwa konservasi lingkungan merupakan aspek penting dalam konteks daya dukung penyediaan pangan. Adanya pertanian yang berkelanjutan dan pelestarian sumber daya alam menjadi elemen esensial agar wilayah tersebut mampu terus memproduksi pangan yang memadai untuk masa depan.

b. Daya Dukung Ketersediaan Air

Daya dukung ketersediaan air mengalami tren menuju penurunan pada sejumlah daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Barru, di beberapa wilayah jumlah kebutuhan air telah melampaui jumlah ketersediaan air. Untuk menentukan status daya dukung air di Kabupaten Barru yaitu dengan menghitung selisih antara jumlah ketersediaan air dengan jumlah kebutuhan air di Kabupaten Barru. Ketersediaan dan kebutuhan air pada setiap kecamatan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel di

bawah ini.

Tabel 2. 10
Ketersediaan dan Kebutuhan Air di Kabupaten Barru Tahun 2024

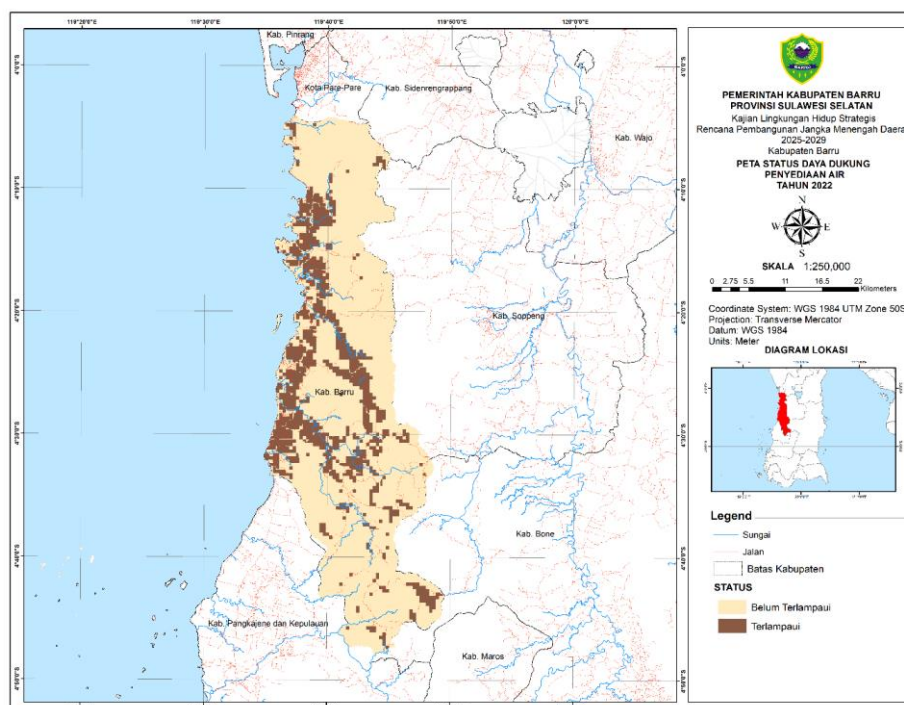
Kecamatan Air	Ketersediaan	Kebutuhan Air (m ³ /tahun)		
		2024	2025	2030
Balusu	141.857.376,46	62.465.903,87	62.611.582,96	62.867.061,26
Barru	245.567.237,89	150.661.297,69	84.345.738,50	86.548.982,68
Mallusetasi	255.689.974,45	87.559.492,80	69.961.371,65	70.686.492,02
Pujananting	373.710.355,22	78.718.635,47	57.747.159,22	57.784.021,19
Soppeng Riaja	112.667.727,01	59.580.904,44	62.036.745,04	62.044.149,94
Tanete Riaja	185.572.694,83	102.934.313,42	68.509.687,15	69.739.475,85
Tanete Rilau	111.936.874,18	96.950.353,18	78.439.551,64	80.080.301,61

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru 2024

Pada Tabel di atas menunjukkan bahwa daya dukung lingkungan hidup untuk menyediakan air dari setiap Kecamatan tertinggi di Kecamatan Pujananting sebesar 373.710.355,22 m³/tahun dan terendah di kecamatan Tanete Rilau sebesar 111.936.874,18 m³/tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan air tertinggi di Kabupaten Barru pada Tahun 2024 di Kecamatan Barru sebesar 150.661.297,69 m³/tahun, sedangkan kebutuhan air terendah yaitu di Kecamatan Soppeng Riaja sebesar 59.580.904,44 m³/tahun.

Berdasarkan tabel diatas, masih terdapat selisih daya dukung lingkungan hidup untuk menyediakan air di Kabupaten Barru dengan kebutuhan air bagi perikehidupan penduduk pada setiap Kecamatan di Kabupaten Barru sehingga dapat disimpulkan bahwa status daya dukung penyediaan air bagi penduduk Kabupaten Barru belum terlampaui atau masih surplus antara ketersediaan dengan kebutuhan air pada setiap kecamatan di Kabupaten Barru. Peta status daya dukung penyediaan air di Kabupaten Barru pada Tahun 2024 sebagai berikut:

Gambar 2. 6
Peta Status Daya Dukung Penyediaan Air di Kab.Barru Tahun 2024



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru 2024

Pada gambar diatas menunjukkan bahwa terdapat beberapa wilayah yang telah melampaui ambang batas yakni antara kemampuan alam menyediakan air terhadap kebutuhan masyarakat baik untuk lahan maupun domestik. Hal ini digambarkan dari besarnya kebutuhan air oleh masyarakat di wilayah tersebut. Area yang berwarna merah pada peta di atas menunjukkan kebutuhan air yang lebih besar dari ketersediaan air. Rincian luasan status daya dukung penyediaan air pada setiap Kecamatan di Kabupaten Barru pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 11
Status Daya Dukung Penyediaan Air Kab.Barru Tahun 2024

Kecamatan	Belum Terlampaui (Ha)	Terlampaui (Ha)	Total
Balusu	8.666,31	2.341,01	11.007,32
Barru	14.292,92	6.161,14	20.454,07
Mallusetasi	19.916,05	2.886,06	22.802,11
Pujananting	32.115,61	2.929,99	35.045,60
Soppeng Riaja	5.823,15	2.246,15	8.069,30
Tanete Riaja	11.424,24	4.572,49	15.996,73
Tanete Rilau	3.153,66	3.857,70	7.011,36
Total	95.391,94	24.994,55	120.386,49
Persentase	79,24%	20,76%	100,00%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru 2025

Tabel diatas menunjukkan bahwa di setiap kecamatan di Kabupaten Barru, sebagian wilayah dalam kecamatan tersebut kebutuhan air sudah melampaui ketersediaan air, atau dengan kata lain tidak mendukung sebagai fungsi penyedia air. Total

wilayah Kabupaten Barru di tahun 2024 yang masih mendukung sebagai fungsi penyedia air yaitu 79,24%, sedangkan wilayah yang tidak mendukung sebagai fungsi penyedia air sebesar 20,76%.

c. Daya Dukung Energi

Daya dukung dari ketersediaan energi dan sumber daya mineral masih sepenuhnya bergantung pada indeks ketahanan energi nasional maupun regional. Walaupun di beberapa daerah sekitar Kabupaten Barru memiliki sumber daya energi dan mineral, namun pengelolaannya tetap dikendalikan pemerintah pusat. Hal ini ditunjukkan dengan indeks ketahanan energi Kabupaten Barru di tahun 2024 berada pada angka terendah yaitu 0,00 poin yang artinya tingkat ketahanan energi berada pada level paling rendah atau tidak dapat memproduksi energi sendiri serta sangat bergantung pada pasokan dari luar, dan tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi resiko atau gangguan pasokan energi.

D. Berketahanan Energi, Air dan kemandirian Pangan

Berketahanan energi, air, dan pangan merupakan hal penting dalam konteks keberlanjutan dan keberhasilan suatu daerah dalam memastikan ketersediaan sumber daya vital untuk kehidupan manusia. Ketiga aspek ini saling terkait dan penting untuk membangun masyarakat Kabupaten Barru yang stabil dan sejahtera. Dari aspek kemandirian pangan, Kabupaten Barru memiliki tingkat kemandirian pangan yang baik, di mana masyarakatnya dapat memproduksi berbagai pangan yang beraneka ragam dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam.

a) Ketahanan Energi

Energi listrik merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat penting dan sebagai sumber daya energi yang paling utama yang dibutuhkan dalam berbagai kegiatan. Dalam waktu yang akan datang kebutuhan listrik akan meningkat seiring dengan adanya peningkatan dan perkembangan baik dari jumlah penduduk, jumlah investasi, dan perkembangan teknologi. Dari total rumah tangga yang ada di Kabupaten Barru, masih terdapat rumah tangga yang belum dialiri listrik. Rasio elektrofikasi di Kabupaten Barru disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 12
 Persentase Rumah Tangga yang menggunakan Listrik di Kabupaten Barru Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Rumah Tangga Berlistrik (Unit)	49.738	52.524	59.757	61.832	63.059
2	Seluruh Rumah tangga	54.707	56.567	63.128	64.228	64.228
	Persentase (%)	90,92%	92,85%	94.66%	96,27%	98,18%

Sumber : BPS Kabupaten Barru Tahun 2025

Dari tabel di atas terlihat bahwa persentase rumah tangga yang telah menggunakan listrik meningkat di tahun 2024, dengan rasio elektrofikasi sebesar 98,18%. Hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah rumah tangga berlistrik yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan sehingga dalam satu rumah terdapat beberapa rumah tangga.

Salah satu indikator penting yang mencerminkan tingkat kesejahteraan, kemajuan ekonomi, dan perkembangan energi di suatu negara atau wilayah adalah konsumsi listrik per kapita yaitu total konsumsi energi listrik dalam suatu wilayah dibagi dengan jumlah penduduk di wilayah tersebut, dalam periode waktu tertentu (biasanya satu tahun. Untuk Kabupaten Barru konsumsi listrik per kapita di Tahun 2024 sebesar 1.680 kWh. Angka ini lebih besar dari rata-rata nasional sebesar 1.411kWh. Hal ini menunjukkan akses listrik yang lebih baik sehingga menjadi indikator kesejahteraan ekonomi masyarakat Kabupaten Barru.

b) Ketahanan Air

Akses Rumah Tangga terhadap Air Siap Minum perpipaan adalah rumah tangga yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut 1) Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan; 2) Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halaman rumah (*on premises*); 3) Tersedia setiap saat dibutuhkan; dan 4) Memenuhi syarat kualitas air minum.

Grafik 2. 2
 Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum Perpipaan Kab.Barru Tahun 2021-2024 (persen)



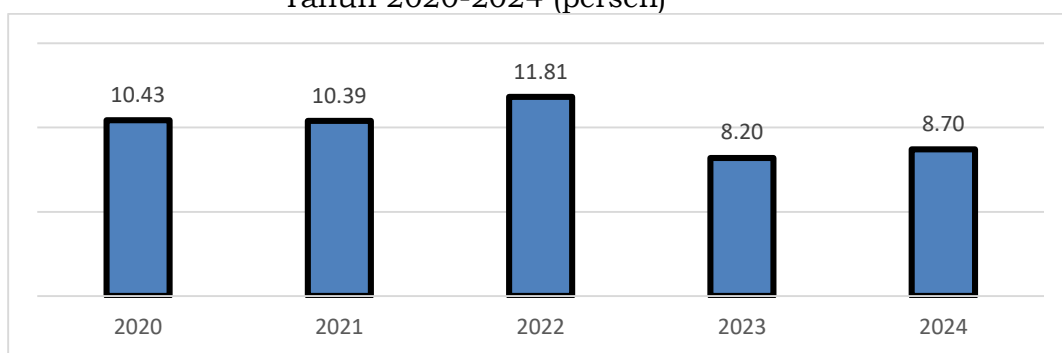
Sumber: Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Tahun 2025

Dari grafik di atas akses rumah tangga terhadap konsumsi air minum perpipaan berfluktuatif namun secara umum dalam empat tahun terakhir masih rendah. Hal ini disebabkan keterbatasan infrastruktur jaringan perpipaan belum menjangkau seluruh wilayah, terutama di daerah pedesaan, pegunungan, atau terpencil. Selain itu, sebagian rumah tangga lebih memilih air sumur, mata air, air hujan, atau air isi ulang karena dianggap lebih murah, mudah diakses, atau lebih bersih. Permasalahan tata kelola dan kelembagaan (PDAM) belum mampu memberikan layanan yang andal.

c) Ketahanan Pangan

Ketidalcukupan konsumsi pangan merupakan kondisi seseorang secara reguler mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. atau probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara reguler mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya. Adapun prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Kabupaten Barru disajikan pada grafik berikut.

Grafik 2. 3
Prevalensi ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 (persen)

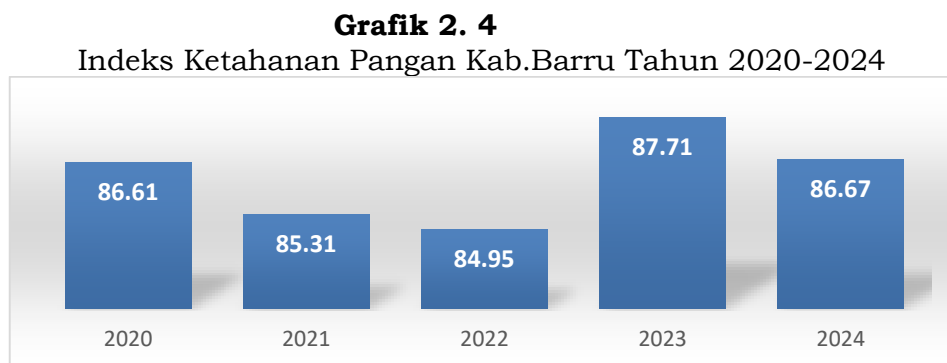


Sumber : BPS Kabupaten Barru, Tahun 2025

Dari grafik diatas menunjukkan tingkat prevalensi ketidakcukupan pangan di Kabupaten Barru berfluktuatif namun di tahun 2023 dan 2024 mengalami penurunan. Ini menunjukkan populasi penduduk yang di Kabupaten Barru yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, semakin berkurang, yang ditandai dengan

tingkat daya beli masyarakat terhadap pangan yang cukup dan bergizi semakin meningkat, ketersediaan dan akses ke pasar serta jaringan distribusi pangan terutama di daerah terpencil semakin mudah.

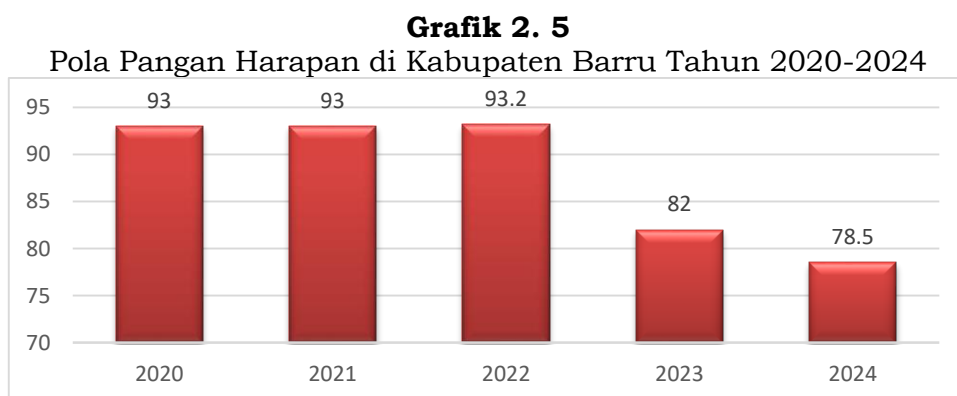
Untuk mengukur kemampuan daerah dalam memastikan akses pangan yang memadai, aman, bergizi, dan terjangkau bagi masyarakat maka Indeks Ketahanan Pangan mencerminkan tingkat ketahanan pangan di Kabupaten Barru, yang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dalam dilihat pada grafik berikut:



Sumber : Badan Pangan Nasional, Tahun 2024

Dari grafik di atas menggambarkan kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Barru fluktuatif dari tahun 2020-2024. Setelah sempat mengalami penurunan di tahun 2021-2022, kondisi ketahanan pangan Kabupaten Barru mengalami perbaikan di tahun 2023 dan tahun 2024. Hal ini menggambarkan bahwa terjadi peningkatan ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan yang bergizi di Kabupaten Barru.

Pola Pangan Harapan yang selanjutnya disingkat PPH adalah suatu metode yang digunakan untuk menilai jumlah dan komposisi atau ketersediaan Pangan. Skor Pola Pangan Harapan merupakan salah satu indikator capaian target kualitas konsumsi pangan masyarakat. Adapun skor PPH Kabupaten Barru dalam kurun waktu 5 tahun terakhir disajikan pada grafik berikut:



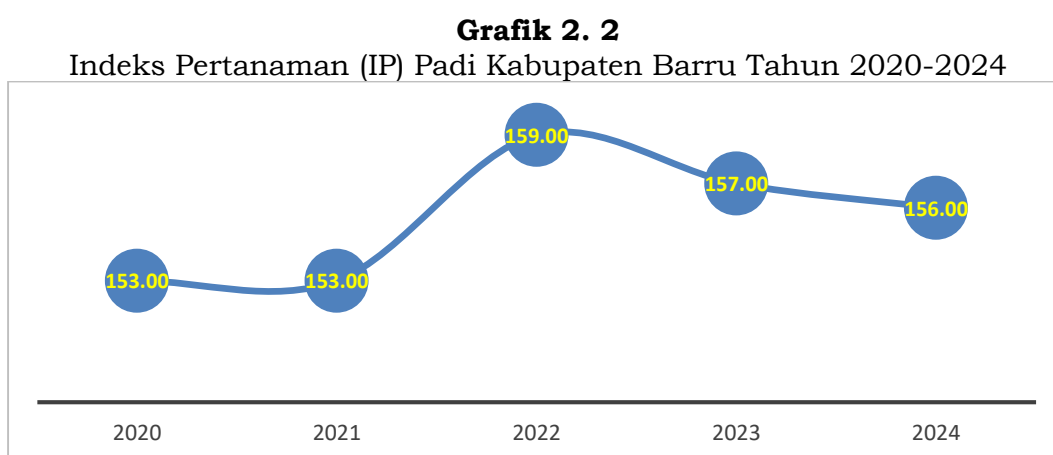
Sumber : Badan Pangan Nasional, Tahun 2024

Dari grafik yang disajikan diatas, PPH Kabupaten Barru mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir. Hal ini disebabkan masyarakat pola konsumsi berlebihan pada bahan pokok tanpa diimbangi dengan konsumsi protein hewani, nabati, sayur, dan buah, daya beli yang rendah membuat masyarakat cenderung memilih pangan murah dan mengenyangkan, bukan yang bergizi dan beragam. Selain itu kebijakan pangan yang belum mendukung diversifikasi sehingga program yang mendorong diversifikasi pangan lokal, terutama dalam produksi dan distribusi masih minim.

E. Lingkungan Hidup Berkualitas

a. Indeks Pertanaman Padi

Indeks Pertanaman (IP) Padi adalah rata-rata jumlah masa tanam dan panen padi dalam satu tahun pada lahan yang sama. Dengan kata lain, IP Padi adalah frekuensi penanaman padi pada sebidang lahan pertanian dalam satu tahun. Peningkatan IP Padi menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan produksi padi dan ketersediaan beras di suatu wilayah. Peningkatan IP Padi dapat dicapai melalui optimalisasi pemanfaatan lahan, seperti pengelolaan sumber daya air, iklim, tanah, dan unsur hara secara terpadu, serta perbaikan pola tanam. Indeks Pertanaman Padi di Kabupaten Barru dalam 5 tahun terakhir disajikan pada grafik berikut:

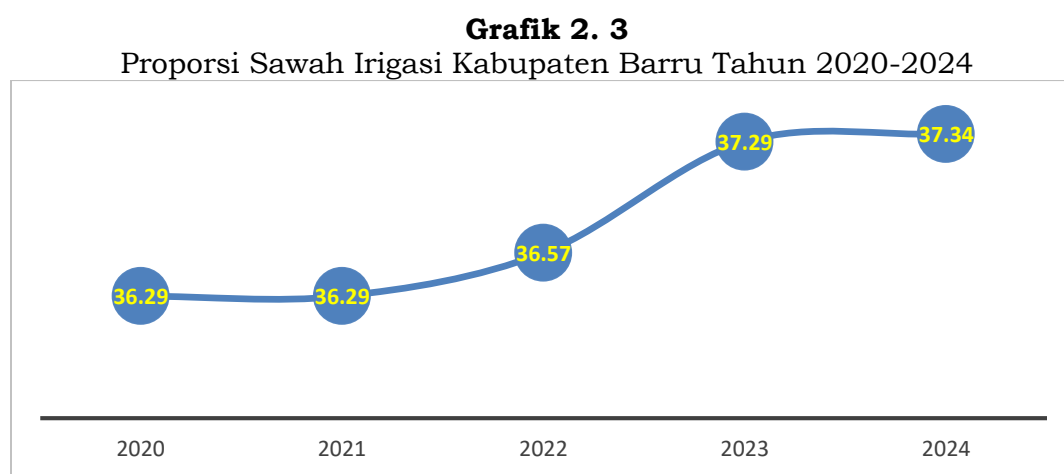


Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barru, Tahun 2025

IP Padi Kabupaten Barru dalam 3 tahun terakhir cenderung mengalami penurunan dan belum mencapai tanam 2 kali. Hal ini disebabkan kondisi teknis seperti air yang terbatas dan irigasi belum optimal, sehingga hanya sebagian siklus tanam kedua yang bisa dilakukan.

b. Proporsi Sawah Irigasi

Proporsi sawah irigasi menunjukkan perbandingan antara luas lahan sawah yang mendapatkan air melalui sistem irigasi dengan total luas lahan sawah di suatu wilayah. Sawah irigasi mendapatkan air dari sumber air permukaan atau air tanah, berbeda dengan sawah tadah hujan yang bergantung pada air hujan. Sawah yang mendapatkan air dari sistem irigasi, baik itu irigasi teknis (dengan jaringan saluran yang terpisah untuk pemberian dan pembuangan air) maupun irigasi non-teknis.



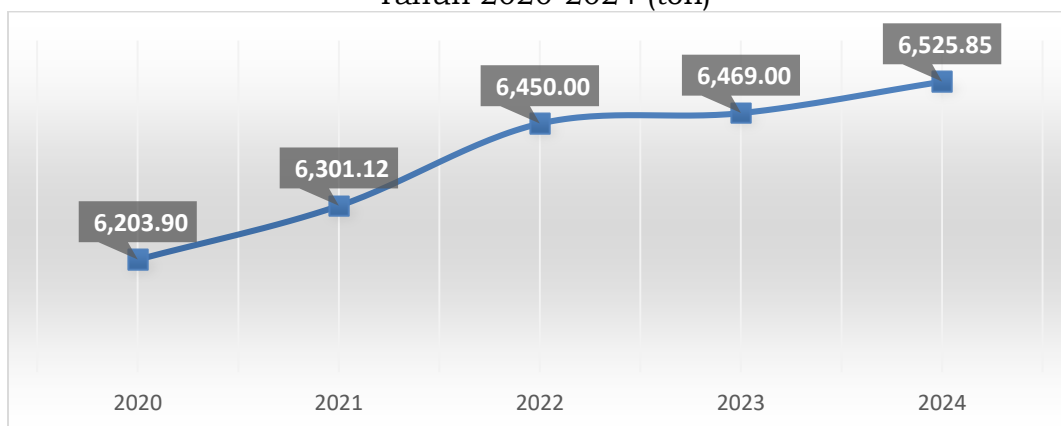
Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barru, Tahun 2025

Walaupun proporsi sawah irigasi di Kabupaten Barru mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, tetapi dengan proporsi sawah irigasi masih di bawah 50%, sehingga masih dalam kategori rendah. Hal ini menyebabkan pada produksi padi yang ditunjukkan dengan indeks pertanaman padi yang rendah sebagaimana disajikan pada grafik sebelumnya.

c. Produksi Perikanan Budidaya

Produksi Perikanan Budidaya merujuk pada hasil yang diperoleh dari kegiatan budidaya perikanan, yaitu usaha pemeliharaan dan pembesaran organisme perairan (ikan, udang, kerang, rumput laut, dan lain-lain) dalam lingkungan terkontrol seperti kolam, tambak, karamba, keramba jaring apung, atau bak. Berdasarkan data Dinas Perikanan Kabupaten Barru, jumlah produksi perikanan budidaya di Kabupaten Barru sejak tahun 2020 terus mengalami peningkatan. Peningkatan luasan tambak mencerminkan ekspansi usaha budidaya disertai upaya pemerintah daerah memberdayakan kelembagaan dan fasilitas via keramba, tambak, dan pelatihan pendampingan.

Grafik 2. 4
 Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Barru
 Tahun 2020-2024 (ton)



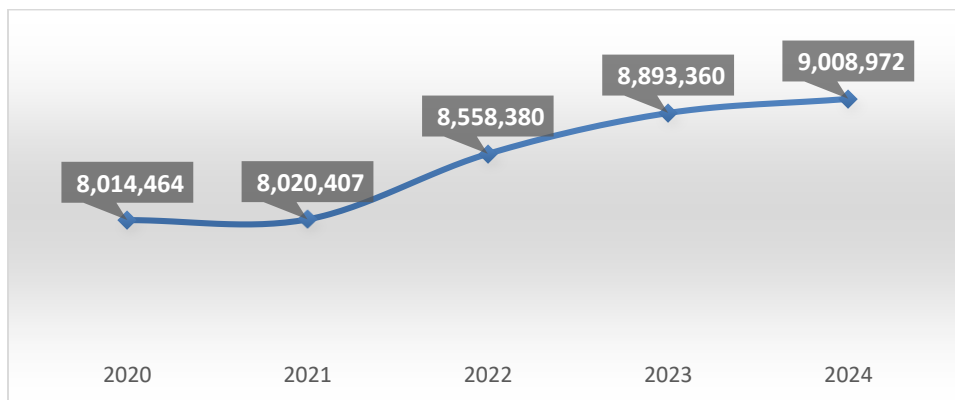
Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Barru, Tahun 2025

Peningkatan produksi perikanan budidaya di Kabupaten Barru didorong oleh penggunaan teknologi modern seperti sistem bioflok, kincir air, aerator otomatis, atau kolam terpal. Selain itu pemanfaatan seperti sistem bioflok, kincir air, aerator otomatis, atau kolam terpal serta penggunaan pakan dengan nutrisi tinggi dan efisien.

d. Angka konsumsi ikan

Angka konsumsi ikan (AKI) adalah indikator yang menunjukkan rata-rata jumlah ikan yang dikonsumsi oleh setiap orang dalam suatu wilayah, biasanya dinyatakan dalam kilogram per kapita per tahun. AKI digunakan untuk mengetahui besarnya kebutuhan ikan di suatu wilayah.

Grafik 2. 5
 Angka Konsumsi Ikan Kabupaten Barru
 Tahun 2020-2024 (ton)



Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Barru, Tahun 2025

Angka konsumsi ikan di Kabupaten Barru menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi terutama setelah Covid-19. Secara

rata-rata angka konsumsi ikan per kapita di Barru mencapai 0,88 kg/minggu. Angka ini masih terbilang rendah mengingat rekomendasi *American Heart Association* minimal 20 gram sehari atau 1,4kg/minggu.

e. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Penurunan kualitas lingkungan hidup serta deplesi sumber daya alam berpotensi menghambat keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan lingkungan hidup diukur dengan menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dimana indeks ini digunakan secara nasional dan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan untuk mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

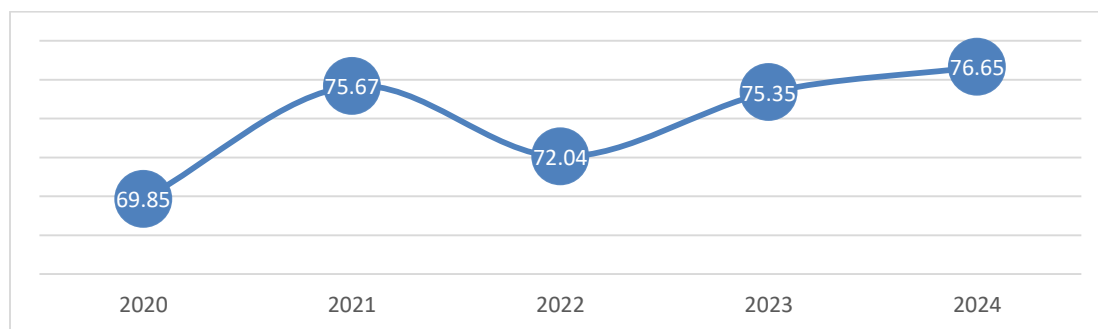
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan gambaran kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tujuan penyusunan nilai IKLH dimaksudkan sebagai informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan suatu daerah yang berkaitan dengan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. nilai IKLH pun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target kinerja program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemerintah.

Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Nilai IKLH Kabupaten Barru Tahun 2024 berada pada angka 76,65 yang tergolong baik, hal ini mengalami peningkatan dari Tahun sebelumnya yang memiliki indek IKLH sebesar 75,35 dan masih tergolong baik. Hal tersebut menggambarkan dari kondisi IKA yang rendah. Yang diakibatkan dari kondisi kualitas air yang rendah.

Dari grafik berikut ini menunjukkan IKLH Kabupaten Barru sejak tahun 2020 mengalami fluktuasi. Capaian tahun 2024 menunjukkan IKLH Kabupaten Barru sebesar 76,65 yang masuk kategori baik. Capaian IKLH Kabupaten Barru tahun 2024 lebih rendah dari capaian IKLH Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 77,17 dan lebih tinggi dibandingkan capaian nasional sebesar 76,09. Hasil

perhitungan IKLH Tahun 2024 meningkat dibandingkan hasil perhitungan tahun 2023. Peningkatan nilai IKLH disebabkan oleh peningkatan nilai IKU, dan IKL, namun mengalami penurunan nilai IKA menjadi 60 poin.

Grafik 2. 6
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru
Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru, Tahun 2025

Dari 15 titik pemantauan, 5 titik pemantauan kualitas air dalam kondisi tercemar ringan. Berdasarkan hasil pengujian, parameter yang melampaui baku mutu didominasi oleh parameter BOD, COD, *Fecal Coli* dan *Total Phospat*. Peningkatan kadar parameter tersebut disebabkan oleh perkembangan industri, pertanian, peternakan dan aktifitas masyarakat di sekitar sungai yang menyebabkan penambahan jumlah polutan dan limbah yang mencemari Sungai.

Kualitas air sungai di Kabupaten Barru berdasarkan pada 5 sungai yang dipantau pada Tahun 2024, yaitu Sungai Sumpang BinangaE, Sungai BottoE, Sungai Bungi, Sungai Takkalasi dan Sungai Nepo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 13
Status Mutu Air Sungai Kabupaten Barru Tahun 2024

No	Nama Sungai	Status mutu air		
		Hulu	Tengah	Muara
1	Sumpang Binangae	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan
2	Bungi	Memenuhi	Memenuhi	Cemar Ringan
3	BottoE	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan
4	Takkalasi	Memenuhi	Cemar Ringan	Memenuhi
5	Nepo	Cemar Ringan	Memenuhi	Memenuhi

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru, Tahun 2025

Rumah tinggal bersanitasi aman merupakan rumah tangga yang dapat mengakses sanitasi yang layak dengan pemahaman akan pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan drainase lingkungan. Persentase rumah tangga dengan sanitasi aman di Kabupaten Barru dapat

dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 14
 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kabupaten Barru
 Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi aman	46.663	46.663	47.318	48.638	48.638
2.	Jumlah rumah tinggal	46.663	46.663	47.318	48.638	48.638
3.	Persentase	100	100	100	100	100

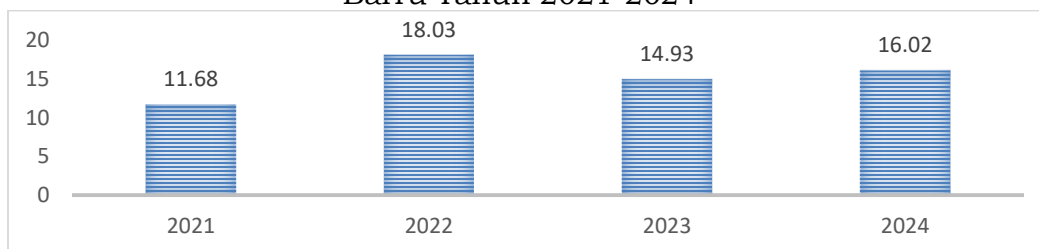
Sumber : Data PUTR Perkim Tahun 2025

Pada tabel diatas terlihat jumlah rumah yang berakses sanitasi aman meningkat setiap tahunnya dengan penjelasan data bahwa jumlah rumah dipersamakan dengan jumlah rumah tangga atau Kepala Keluarga. Angka pada tahun 2024 merupakan angka yang menunjukkan penjumlahan jumlah Rumah tangga atau kepala keluarga yang berakses layak bersama, layak sendiri, dan akses aman yang telah mencapai 100 % dengan predikat ODF

f. Cakupan Pelayanan Persampahan

Pengelolaan sampah merupakan aktivitas untuk mengelola sampah dari awal hingga pembuangan, meliputi pengumpulan, pengangkutan, perawatan, dan pembuangan, diiringi oleh monitoring dan regulasi manajemen sampah. Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan beberapa dampak negatif. Oleh sebab itu, pengelolaan sampah yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk mencapai berbagai target terutama pembangunan berkelanjutan. Dalam pengelolaan timbulan sampah harus memenuhi standar lingkungan yang ketat agar tidak membahayakan lingkungan dan kesehatan

Grafik 2. 7
 Timbulan Sampah Terolah di fasilitas Pengolahan sampah Kabupaten Barru Tahun 2021-2024



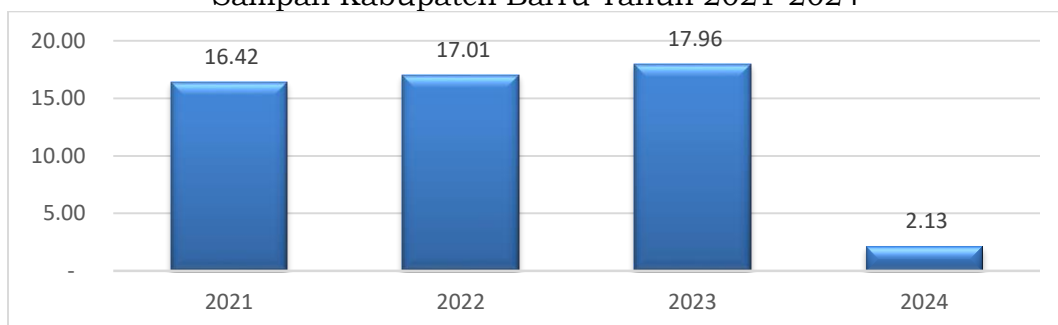
Sumber : Olahan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2025

Berdasarkan data di atas, pada tahun 2024, capaian persentase timbulan sampah yang dikelola Kabupaten Barru sebesar 16,02 persen. Untuk mencapai target pengelolaan sampah maka perlu

didukung dengan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan juga peran aktif masyarakat. Saat ini Pemerintah Kabupaten Barru memiliki sarana dan prasarana yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah dan juga dikelola oleh masyarakat. Terdapat 11 (sebelas) unit mobil pengangkut sampah, 8 (delapan) unit motor 3 roda dan 3 (tiga) unit gedung pengolah sampah yang aktif. Terdapat juga pengolahan sampah yang dilaksanakan oleh masyarakat seperti lapak atau pengepul barang bekas, rumah kompos dan Bank Sampah Unit

Grafik 2. 8

Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Kabupaten Barru Tahun 2021-2024



Sumber : Olahan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2025

Dari grafik diatas ditunjukkan bahwa terjadi penurunan terhadap persentase rumah tangga yang secara rutin mendapatkan layanan pengumpulan sampah dari penyedia layanan hingga ke tempat pembuangan akhir (TPA), tanpa rumah tangga tersebut harus membuang sampah sendiri ke TPS (Tempat Penampungan Sementara). Hal ini disebabkan cakupan layanan pengumpulan sampah masih di seputar ibukota kecamatan, belum menjangkau perdesaan dan kawasan terpencil

F. Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Letak geografis dan kondisi geologis yang bervariasi dapat menyebabkan Kabupaten Barru menjadi salah satu daerah di Sulawesi Selatan rawan bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, badai, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan angin kencang. Kondisi tektonik Kabupaten Barru tidak dapat dipisahkan oleh struktur-struktur tektonik Sulawesi Selatan dan Sulawesi, secara keseluruhan yang mengakibatkan aktivitas gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Selatan dan sekitarnya antara lain :

- 1). Aktivitas tektonik, palung Sulawesi Utara terletak di pinggir Selatan cekungan Sulawesi, ujung Barat dimulai dari Selat Makassar

memanjang ke arah Timur sepanjang Laut Sulawesi, gempa yang terjadi dalam palung ini adalah umumnya berasal dari kedalaman dangkal dan menengah yang didominasi oleh sesar naik (*Thrust Fault*).

- 2). Struktur tektonik inilah yang menyebabkan wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya sering mengalami gempa bumi. Jika gempa bumi ini berpusat di tengah lautan dengan magnitudo lebih besar dari 0,6 skala richter dan pusat gempanya dangkal (kurang dari 33 km), serta gempa bumi yang terjadi memiliki pola mekanisme dominan yaitu sesar naik atau turun akan menyebabkan tsunami.

Wilayah rawan bencana merupakan kawasan yang sering dan berpotensi tinggi terhadap terjadinya bencana alam. Pada wilayah Kabupaten Barru terdapat wilayah rawan bencana alam yang terdiri dari kawasan rawan bencana alam banjir, kebakaran hutan, tanah longsor dan kawasan rawan ombak besar.

- 1). Banjir

Penyebab utama bencana banjir adalah curah hujan yang cukup tinggi, penggundulan hutan di hulu sungai, penyumbatan aliran atau saluran, tidak berfungsinya tanggul, selokan air yang tidak dapat menampung derasnya/besarnya debit air pada musim hujan.

- 2). Tanah Longsor

Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Barru terdiri dari tanah regosol, mediteran, litosol, aluvial, sebagian tanah tersebut berpotensi mengalami gerakan-gerakan yang dapat dikategorikan dalam empat jenis pergerakan yaitu; aliran tanah dan batu batuan, longsor atau tanah longsor, runtuh atau tanah runtuh, amblesan atau pergeseran tanah. Sedangkan penyebabnya atau terjadinya gerakan tanah tersebut antara lain : Topografi wilayah (lereng/ kemiringan); Keadaan tanah, bebatuan, struktur perlapisan dan lainnya; Kandungan air termasuk curah hujan; vegetasi, flora dan penggunaan lahan.

- 3). Cuaca Ekstrim (Angin Puting Beliung)

Cuaca ekstrim adalah fenomena meteorologi yang ekstrim dalam sejarah (distribusi), khususnya fenomena cuaca yang mempunyai potensi menimbulkan bencana, menghancurkan tatanan kehidupan sosial, atau yang menimbulkan korban jiwa manusia.

4). Gelombang Pasang

Bencana gelombang pasang dan abrasi terjadi akibat pengikisan daerah pantai akibat gelombang laut yang sifatnya merusak.

5). Kebakaran Hutan

Kebakaran hutan terjadi pada musim kemarau yaitu antara bulan April sampai bulan Oktober. Hal ini biasanya terjadi kurangnya kesadaran masyarakat yang melakukan pembabatan hutan atau pembukaan lahan oleh masyarakat serta musim kemarau yang berkepanjangan.

6). Kekeringan

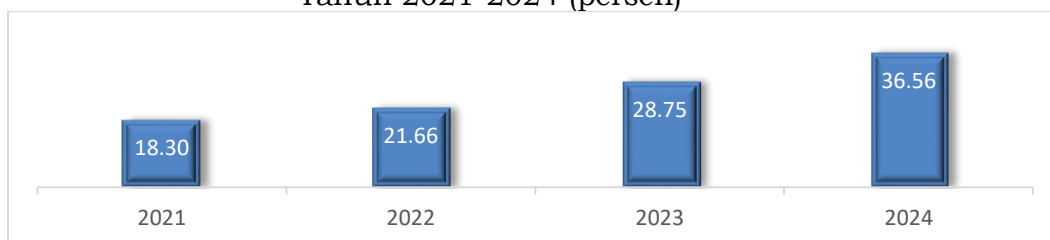
Kekeringan adalah kondisi di mana ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan.

a. Penurunan Intensitas Emisi GRK

Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) adalah perbandingan antara emisi gas rumah kaca yang terlepas ke atmosfer terhadap produk domestik regional bruto yang dihasilkan pada tahun tersebut. Penurunan intensitas emisi GRK untuk memperlihatkan sinergitas antara upaya penurunan emisi dengan pertumbuhan ekonomi.

Grafik 2. 9

Penurunan Intensitas Emisi GRK Kabupaten Barru Tahun 2021-2024 (persen)



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru, Tahun 2024

Pada Grafik diatas dapat terlihat bahwa untuk tahun 2024 terlihat peningkatan persentase penurunan intensitas emisi GRK sebesar 36,56 %. Hal ini disebabkan dari berbagai sektor seperti sektor kehutanan, sektor energi, pertanian dan sektor limbah. Dari sektor-sektor tersebut yang paling signifikan berperan dalam peningkatan emisi adalah pada sektor kehutanan dan sektor energi. Berdasarkan data dari KPH Ajattapareng, BPKH dan hasil perhitungan, pengurangan emisi dari sektor kehutanan untuk tahun 2021 adalah sebesar 259,52. Angka ini sangat jauh jika dibandingkan dengan hasil pengurangan emisi pada tahun 2020 sebesar 1.956,41. Hal tersebut disebabkan oleh tingginya kegiatan

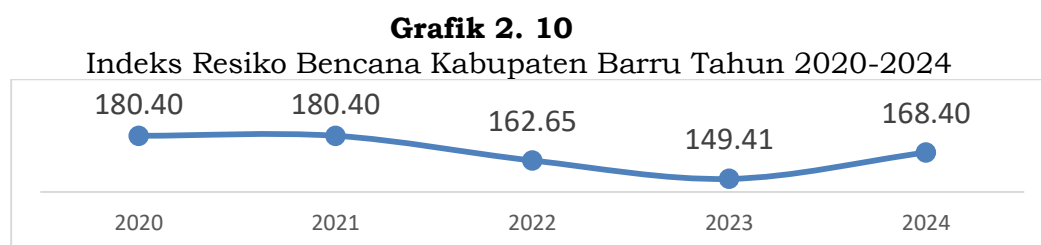
alih fungsi hutan menjadi Kawasan non hutan seperti pemukiman, area pertanian dan Perkebunan. Pada sektor energi, kontributor terbesar penghasil emisi GRK yang tercakup pada inventarisasi GRK di Kabupaten Barru adalah kegiatan pembakaran bahan bakar fosil untuk kebutuhan transportasi.

Faktor pendorong penurunan emisi GRK di Kabupaten Barru diantaranya:

- Penerapan pertanian ramah lingkungan, seperti Sistem Pertanian Organik
- Pengurangan penggunaan pupuk kimia dan pestisida sintetis, yang berkontribusi terhadap emisi N₂O
- Pemanfaatan limbah pertanian sebagai pupuk kompos untuk mengurangi emisi metana (CH₄) dari limbah organik
- Pemberdayaan masyarakat adat/lokal dalam menjaga kawasan hutan melalui skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) Pembangunan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) skala kecil di desa-desa terpencil seperti di Kecamatan Tanete Riaja dan Pujananting
- Pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui program bank sampah dan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*)

b. Indeks Resiko Bencana

Indeks Risiko Bencana (IRB) adalah alat pengukuran yang digunakan untuk menilai tingkat risiko bencana di suatu wilayah atau lokasi. Indeks ini mempertimbangkan berbagai faktor seperti potensi bencana alam, kerentanan masyarakat dan infrastruktur, serta kapasitas mitigasi yang ada. Potensi bencana dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah Kabupaten Barru. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan. Indeks Resiko Bencana Kabupaten Barru Tahun 2019-2024 disajikan sebagai berikut:



Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barru, Tahun 2025

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa IRB di Kabupaten Barru mengalami peningkatan dalam di tahun 2024 sebesar 168,40. IRB Kabupaten Barru masih dalam kategori resiko tinggi ($IRB > 144$). Hal ini disebabkan peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam seperti perubahan iklim menyebabkan meningkatnya curah hujan ekstrem yang menyebabkan banjir di beberapa wilayah di Kabupaten Barru.

c. Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketahanan suatu daerah terhadap berbagai risiko dan ancaman, seperti bencana alam, konflik sosial, atau ketidakstabilan ekonomi. Indeks ini mencakup beberapa dimensi seperti ketahanan pangan, ketahanan ekonomi, ketahanan lingkungan, dan ketahanan sosial. Dengan mengukur indeks ketahanan daerah, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi wilayah yang rentan dan memprioritaskan upaya-upaya untuk meningkatkan ketahanan masyarakat. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) disusun untuk semua jenis bencana berdasarkan parameter kapasitas regulasi, kelembagaan, sistem peringatan dini, pendidikan, pelatihan, keterampilan, mitigasi, dan sistem kesiapsiagaan.

Nilai IKD berada pada rentang 0 – 1, dengan pembagian kelas indeks $\leq 0,4$ adalah rendah, indeks 0,4 - 0,8 adalah sedang dan indeks 0,8 - 1 adalah tinggi. IKD Kabupaten Barru pada tahun 2021 sebesar 0,48 dan tahun 2022 sebesar 0,49 Poin.

d. Kerentanan Terhadap Perubahan Iklim

Kerentanan adalah keadaan atau kondisi yang dapat mengurangi kemampuan masyarakat untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi bahaya atau ancaman bencana. Kerentanan juga didefinisikan sebagai derajat atau tingkat kemudahan terkena atau tidak mampu untuk menghadapi dampak buruk dari perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan iklim esktrim. Tinggi rendahnya tingkat kerentanan ini ditentukan oleh tingkat sensitivitas, tingkat keterpaparan dan kemampuan adaptasi. Tingkat kerentanan suatu wilayah akan menentukan tingkat risiko bencana wilayah tersebut sehingga dalam proses perencanaan

suatu wilayah dibutuhkan suatu kajian terkait risiko bencana yang ditentukan oleh tingkat kerentanannya.

Pengkajian bahaya dimaknai sebagai cara untuk memahami unsur-unsur bahaya yang berisiko bagi daerah dan masyarakat. Karakter-karakter bahaya pada suatu daerah dan masyarakatnya berbeda dengan daerah dan masyarakat lain. Pengkajian karakter bahaya dilakukan sesuai tingkatan yang diperlukan dengan mengidentifikasi unsur-unsur berisiko oleh berbagai bahaya di lokasi tertentu.

Pengkajian kerentanan dapat dilakukan dengan menganalisa kondisi dan karakteristik suatu masyarakat dan lokasi penghidupan mereka untuk menentukan faktor-faktor yang dapat mengurangi kemampuan Masyarakat dalam menghadapi bencana. Kerentanan dapat ditentukan dengan mengkaji aspek keamanan lokasi penghidupan mereka atau kondisi-kondisi yang diakibatkan oleh faktor-faktor atau proses-proses fisik, sosial ekonomi dan lingkungan hidup yang bisa meningkatkan kerawanan suatu Masyarakat terhadap bahaya dan dampak bencana.

Pengkajian kapasitas dilakukan dengan mengidentifikasi status kemampuan individu, masyarakat, Lembaga pemerintah atau non-pemerintah dan aktor lain dalam menangani bahaya dengan sumber daya yang tersedia untuk melakukan Tindakan pencegahan, mitigasi, dan mempersiapkan penanganan darurat, serta menangani kerentanan yang ada dengan kapasitas yang dimiliki oleh Masyarakat tersebut.

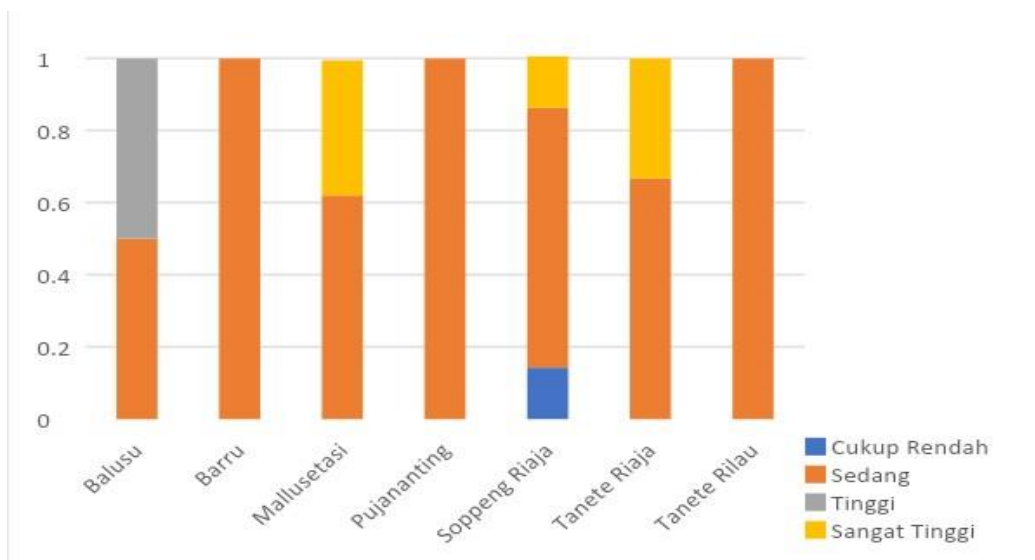
Pengkajian dan pemeringkatan risiko merupakan pengemasan hasil pengkajian bahaya, kerentanan, dan kemampuan/ketahanan suatu daerah terhadap bencana untuk menentukan skala prioritas tindakan yang dibuat dalam bentuk rencana kerja dan rekomendasi guna meredam risiko bencana. Tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim ditentukan oleh indikator-indikator yang mempengaruhi keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi suatu sistem. Ketiga faktor tersebut berubah menurut waktu sejalan dengan dilaksanakannya kegiatan pembangunan dan upaya-upaya adaptasi. Tingkat keterpaparan dan tingkat sensitivitas dapat dicerminkan oleh kondisi biofisik dan

lingkungan, serta kondisi sosial-ekonomi.

Berdasarkan perhitungan kerentanan menggunakan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK) disimpulkan bahwa Kabupaten Barru termasuk kategori daerah yang cukup rentan. Distribusi indeks kerentanan perubahan iklim di Kabupaten Barru disajikan pada Gambar berikut.

Grafik 2. 11

Persentase Wilayah berdasarkan Kategori Kerentanan Perubahan Iklim di Kabupaten Barru



Sumber: Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan KLHK, Tahun 2025

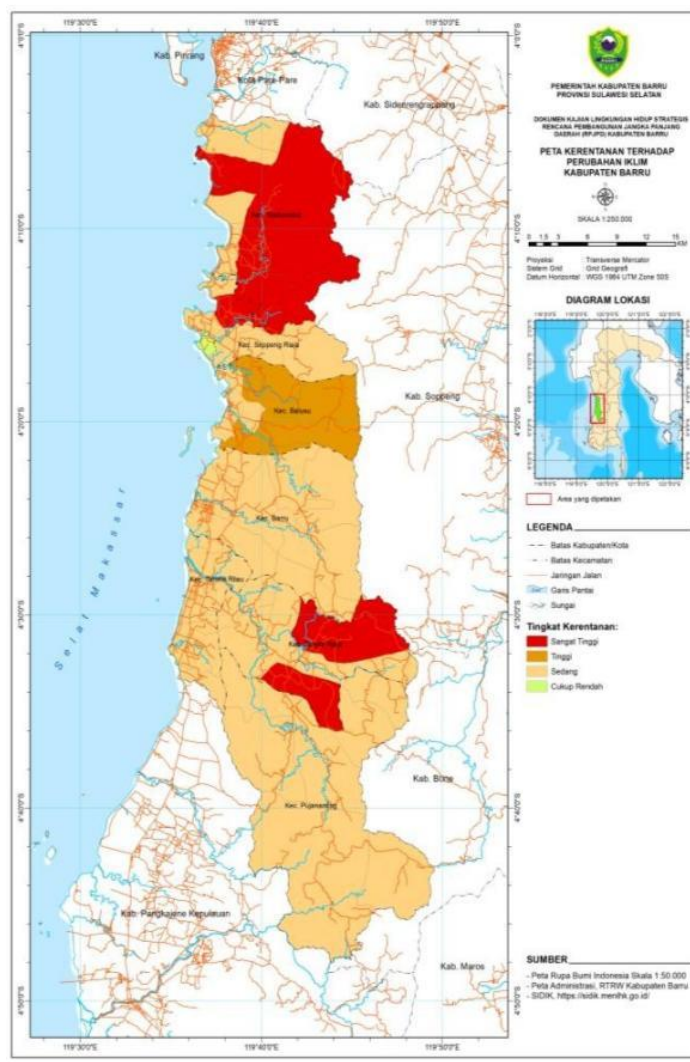
Berdasarkan gambar tersebut di atas menunjukkan bahwa 82% dari seluruh Desa/Kelurahan di Kabupaten Barru termasuk dalam kategori kerentanan sedang yaitu di seluruh wilayah Kecamatan Barru, Kecamatan Pujananting, Kecamatan Tanete Rilau dan sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi dan sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, 2% kategori cukup rendah yaitu di sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, 6% kategori tinggi yaitu di sebagian wilayah Kecamatan Balusu dan 11% kategori sangat tinggi yaitu sebagian di wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja. Rincian kategori kerentanan perubahan iklim pada masing-masing desa dan kelurahan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 15
Kategori Kerentanan Perubahan Iklim Masing-Masing Desa/Kelurahan
di Kabupaten Barru

Desa/kel.	IKA	IKS	Keterangan
Lampoko	0.37	0.50	Sedang
Binuang	0.34	0.42	Tinggi
Takkalasi	0.39	0.47	Sedang
Balusu	0.35	0.41	Tinggi
Kamiri	0.34	0.48	Tinggi
Sumpang binangae	0.56	0.41	Sedang
Tuwung	0.63	0.55	Sedang
Mangempang	0.56	0.61	Sedang
Siawung	0.46	0.48	Sedang
Tompo	0.51	0.51	Sedang
Coppo	0.61	0.47	Sedang
Sepee	0.56	0.57	Sedang
Palakka	0.51	0.50	Sedang
Anabanua	0.50	0.47	Sedang
Galung	0.48	0.48	Sedang
Mallawa	0.45	0.51	Sedang
Bojo	0.55	0.58	Sedang
Kupa	0.38	0.61	Sangat Tinggi
Palanro	0.46	0.64	Sedang
Bojo baru	0.40	0.59	Sedang
Nepo	0.48	0.70	Sangat Tinggi
Manuba	0.41	0.66	Sangat Tinggi
Bacu-bacu	0.52	0.43	Sedang
Harapan	0.52	0.61	Sedang
Gattareng	0.55	0.42	Sedang
Bulo-bulo	0.58	0.52	Sedang
Pujananting	0.55	0.50	Sedang
Jangan-jangan	0.58	0.53	Sedang
Pattappa	0.54	0.54	Sedang
Mangkoso	0.57	0.67	Cukup Rendah
Siddo	0.42	0.65	Sangat Tinggi
Kiru-kiru	0.51	0.50	Sedang
Ajakkang	0.44	0.51	Sedang
Lawallu	0.40	0.49	Sedang
Batupute	0.46	0.49	Sedang
Paccekke	0.40	0.40	Sedang

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025-2029

Gambar 2. 7
Peta Kerentanan Terhadap Perubahan Iklim Kabupaten Barru



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru 2025

G. Demografi

Perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Barru menunjukkan adanya peningkatan setiap tahun, dengan laju pertumbuhan penduduk tahun periode 2020-2024 sebesar 0,68 persen, dimana jumlah penduduk Kabupaten Barru pada Tahun 2020 sebesar 187.442 jiwa meningkat menjadi sebesar 196.001 jiwa pada Tahun 2024. Jumlah penduduk Kabupaten Barru dari tahun ke tahun yang terus mengalami peningkatan, seperti diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 16
Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Barru Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)					Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk Tahun 2024 (jiwa/km ²)
		2020	2021	2022	2023	2024		
1.	Tanete Riaja	25.702	26.016	26.265	26.755	26.806	174,29	154,16

2.	Tanete Rilau	37.788	38.429	38.858	39.451	39.941	79,17	501,91
3.	Barru	44.746	45.340	46.060	46.642	47.049	199,32	234,93
4.	Soppeng riaja	18.598	18.645	18.761	18.900	18.975	78,90	240,51
5.	Mallusetasi	27.746	28.059	28.218	28.500	28.580	216,58	131,77
6.	Pujananting	13.355	13.594	13.715	13.964	14.059	314,26	44,55
7.	Balusu	19.507	19.794	20.018	20.331	20.591	112,20	182,17
Total		187.442	189.877	191.895	194.543	196.001	1174,72	166,85

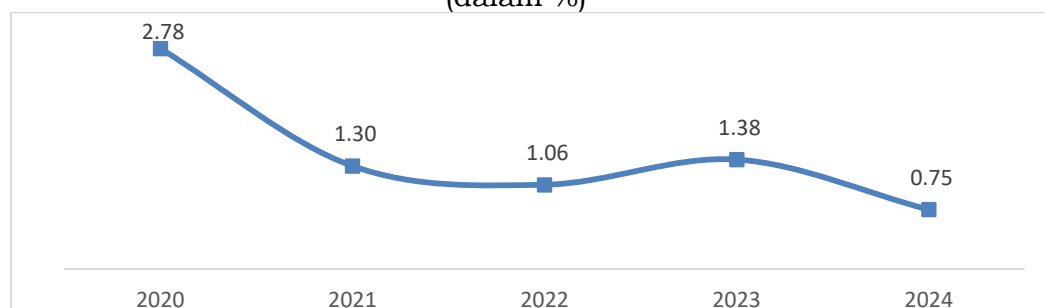
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru Tahun 2025

Data tabel diatas terlihat bahwa kepadatan penduduk Kabupaten Barru berdasarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barru menyebutkan bahwa pada tahun 2024 dengan jumlah penduduk sebesar 196.001 jiwa, kepadatan penduduk Kabupaten Barru sebesar 166,85 jiwa/Km2.

Sedangkan distribusi penduduk di Kabupaten Barru pada Tahun 2024 ini terlihat sangat tinggi di Kecamatan Barru yakni sebesar 47.049 jiwa atau 24% penduduk, lalu disusul oleh Kecamatan Tanete Rilau sebesar 39.941 jiwa atau 20,38%, Kecamatan Mallusetasi sebesar 28.580 jiwa atau 14,58%, Kecamatan Tanete Riaja sebesar 26.806 jiwa atau 13,68%, Kecamatan Balusu sebesar 20.591 jiwa atau 10,51%, Kecamatan Soppeng Riaja sebesar 18.975 jiwa atau 9,68% dan Kecamatan Pujananting sebesar 14.059 jiwa atau 7,17%.

Kabupaten Barru mengalami pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun, namun dari sisi laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Barru kurun waktu 2020-2024 cenderung melandai, yang mengindikasikan bahwa jumlah penambahan penduduk terbilang kecil walaupun masih dalam tren pertumbuhan positif. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Barru dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2. 12
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 (dalam %)



Sumber : Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barru, Tahun 2025

Dari data jumlah penduduk diatas maka dapat diproyeksikan jumlah pertumbuhan penduduk 5 tahun kedepan yang dapat dilihat

pada tabel berikut.

Tabel 2. 17
 Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2025-2029

No	Kecamatan	2025	2026	2027	2028	2029
1	Tanete Riaja	27.323	27.586	27.960	28.223	28.598
2	Tanete Rilau	40.524	40.951	41.576	42.003	42.628
3	Barru	47.707	48.291	48.875	49.459	50.043
4	Soppeng riaja	19.086	19.187	19.288	19.390	19.491
5	Mallusetasi	28.833	29.042	29.250	29.459	29.668
6	Pujananting	14.316	14.432	14.676	14.792	15.036
7	Balusu	20.883	21.123	21.425	21.665	21.967
Total		198.672	200.611	203.051	204.991	207.431

Sumber : Data Hasil Olahan Bappelitbangda, 2025

Dari hasil proyeksi jumlah penduduk tahun 2025-2029 terlihat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Barru di tahun 2024 sebesar 196.001 jiwa meningkat di tahun 2029 menjadi 207.431 jiwa, atau naik sebesar 11.430 jiwa (5,83%). Jika luas wilayah Kabupaten Barru tetap sama, maka kepadatan penduduk di tahun 2029 akan naik menjadi 177 Jiwa/Km².

Komposisi penduduk menurut umur dalam arti demografi adalah komposisi penduduk menurut umur tertentu. Komposisi menurut umur dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

- Usia belum produktif (kelompok umur <14 tahun)
- Usia produktif (kelompok umur antara 15 - 64 tahun),
- Usia tidak produktif (kelompok umur >= 65 tahun)

Untuk mengetahui struktur penduduk berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 18
 Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Kab.Barru (Jiwa) Tahun 2024

No	Usia Non Produktif Dan Produktif	Jenis Kelamin		Penduduk (jiwa)	Persen (%)
		Laki-laki (jiwa)	perempuan (jiwa)		
1.	00-14 Tahun (Usia Muda/Non Produktif)	23.537	22.071	45.608	23,44
2.	15-64 Tahun (Usia Produktif)	64.286	66.582	130.868	67,27
3.	>=65 Tahun (Usia Tua/Non Produktif)	7.748	10.319	18.067	9,29
Total		96.300	99.701	196.001	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru Tahun 2025

Berdasarkan pengelompokan umur tersebut dapat diketahui rasio beban tanggungan (*dependency ratio*) yang dapat digunakan untuk melihat angka ketergantungan suatu wilayah. Rasio beban

tanggungan adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara penduduk usia non produktif dengan penduduk usia produktif. Persentase rasio beban tanggungan (*dependency ratio*) yang rendah menunjukkan rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan penduduk yang tidak produktif lagi.

Tabel di atas menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Barru masih didominasi oleh penduduk yang berusia produktif. Dari data ini diperoleh rasio ketergantungan Kabupaten Barru yang berada pada angka 48,66% yang berarti bahwa setiap 100 orang penduduk dengan usia produktif, harus menanggung/mendukung 49 orang penduduk yang tidak produktif. Jika data tersebut diproyeksikan untuk 5 tahun kedepan, maka akan terlihat seperti pada tabel berikut.

Tabel 2. 19
Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Barru (Jiwa) Tahun 2025-2029

No	Kelompok Umur	2025	2026	2027	2028	2029
1	0-14 Tahun	46,310	46,517	46,724	46,930	47,215
2	15-64 Tahun	135,263	137,462	139,661	141,860	143,021
3	>= 65 Tahun	18,750	19,187	19,625	20,062	20,613
Total		198,672	200,611	203,051	204,991	207,431

Sumber : Data Hasil Olahan Bappelitbangda Tahun 2025

Dari tabel diatas terlihat usia produktif masih mendominasi dengan jumlah 143.021 jiwa pada tahun 2029. Ditahun ini, rasio ketergantungan Kabupaten Barru berada turun pada angka 47,22% yang berarti bahwa setiap 100 orang penduduk dengan usia produktif, harus menanggung/mendukung 47 orang penduduk yang tidak produktif. Penurunan ini disebabkan oleh kenaikan signifikan pada jumlah penduduk dengan usia produktif dibandingkan usia non produktif.

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin adalah penduduk yang dibagi menjadi kelompok jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Struktur penduduk menurut jenis kelamin disuatu wilayah dapat dianalisis dengan menghitung rasio jenis kelamin (*sex ratio*) diwilayah tersebut. Rasio jenis kelamin merupakan angka yang didapat dari perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Rasio jenis kelamin terkait pada penyediaan lapangan kerja, sarana dan prasarana serta tingkat kesejahteraan penduduk di wilayah tersebut.

Struktur penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2. 20
Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kab.Barru Tahun 2019 s.d 2024

No	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Rasio (%)
		L	P	Total	
1	2019	89.248	93.125	182.373	95,84
2	2020	91.963	95.429	187.392	96,37
3	2021	93.231	96.646	189.877	96,47
4	2022	94.251	97.644	191.895	96,53
5	2023	95.571	98.972	194.543	96,56
6	2024	96.300	99.701	196.001	96,61

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barru Tahun 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki dan berdasarkan rasio pada tahun 2024 yang sebesar 97 berarti dari 100 orang perempuan terdapat 97 orang laki-laki. Tabel berikut ini menunjukkan proyeksi pertumbuhan penduduk berdasarkan jenis kelamin yang dapat digunakan mengukur rasio jenis kelamin (sex ratio) dimana pada tahun 2028, rasio jenis kelamin Kabupaten Barru berada pada angka 97.

Tabel 2. 21
Proyeksi Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kab.Barru Tahun 2025 s.d 2029

No	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Rasio (%)
		L	P	Total	
1	2025	98,640	101,746	198.672	97
2	2026	100,107	103,122	200.611	97
3	2027	101,574	104,498	203.051	97
4	2028	103,041	105,874	204.991	97
5	2029	104,043	106,475	207.431	97

Sumber : Data Hasil Olahan Bappelitbangda, Tahun 2025

Rumah tangga dapat diartikan satu orang anggota atau sekelompok orang yang tinggal bersama tetapi dengan atau tidak memiliki hubungan persaudaraan atau ikatan perkawinan. Untuk mengetahui struktur penduduk berdasarkan jumlah rumah tangga pada tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 22
Struktur Penduduk Menurut Jumlah Rumah Tangga Kab.Barru Tahun 2019 - 2024

Kode	Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga (RT)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
731101	Tanete Riaja	7.692	8.189	8.446	8.690	8.880	8.905

731102	Tanete Rilau	11.308	11.870	12.245	12.594	12.844	12.879
731103	Barru	13.321	14.028	14.149	14.917	15.185	15.218
731104	Soppeng Riaja	5.754	5.991	6.180	6.301	6.355	6.375
731105	Mallusetasi	8.438	8.888	9.086	9.328	9.482	9.500
731106	Pujananting	4.014	4.237	4.354	4.500	4.567	4.579
731107	Balusu	6.130	6.432	6.653	6.798	6.915	6.939
TOTAL		51.510	54.707	56.657	63.128	64.228	64.395

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barru Tahun 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah Rumah Tangga di tiap tahunnya mengalami peningkatan, yakni dari tahun 2019 sebesar 51.510 RT meningkat sampai dengan tahun 2024 sebesar 64.395 RT.

Tingkat pendidikan penduduk yang dicapai oleh suatu wilayah akan memberkan gambaran tentang kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut. Tingkat pendidikan di Kabupaten Barru pada tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 23
Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Kabupaten Barru
Tahun 2020 s.d 2024

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Belum/Tidak Punya ijazah	62.996	63.970	63.057	62.785	62.681
2	Tamat SD	54.021	53.309	53.125	52.734	52.191
3	Tamat SMP	25.353	26.516	27.557	28.523	28.711
4	Tamat SMA	31.448	32.180	33.500	35.140	36.430
5	Diploma	2.780	2.795	2.869	2.910	2.914
6	Sarjana S1	10.143	10.425	11.061	11.673	12.241
7	Sarjana S2	630	657	701	750	795
8	Sarjana S3	21	25	25	28	38
Total		182.373	187.392	191.895	194.543	196.001

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, Tahun 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa berdasarkan tingkat pendidikan, penduduk Kabupaten Barru untuk kategori belum/ tidak punya ijazah dan tamat SD mengalami penurunan, sementara kategori tamat SMP hingga Sarjana S3 mengalami peningkatan.

2.1.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Aspek kesejahteraan masyarakat yang akan diuraikan dalam bagian ini terdiri dari aspek kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, aspek kesejahteraan sosial, budaya dan ekologi Kabupaten Barru

A. Kesejahteraan Ekonomi

Berikut ini diuraikan dinamika kondisi dan kinerja atas aspek

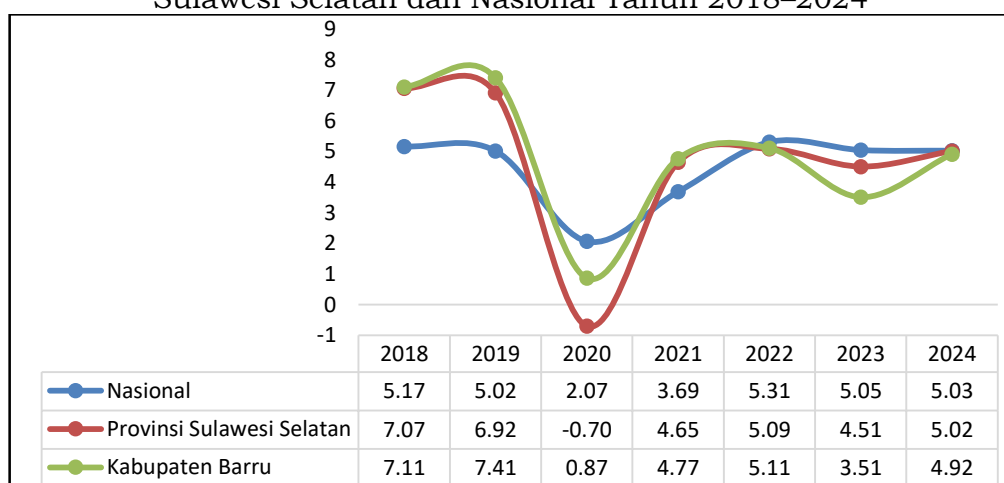
kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kabupaten Barru menggunakan beberapa indikator sebagai berikut :

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Produk domestik regional bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan digunakan untuk mengukur laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang biasa dikenal dengan pertumbuhan ekonomi dan dilihat dari besarnya nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun tertentu dibandingkan dengan nilai PDRB pada tahun sebelumnya.

Grafik 2. 13

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018–2024



Sumber : BPS Kabupaten Barru, Tahun 2025

Berdasarkan grafik di atas, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 cenderung fluktuatif. Pertumbuhan ekonomi mencapai titik terendah pada tahun 2020 ketika pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Pertumbuhan ekonomi kembali mengalami tren peningkatan di tahun-tahun selanjutnya yaitu tahun 2023 dan tahun 2024 sebesar 3,51% dan 4,92%, walaupun proses pemulihan ekonomi masih berjalan lambat bahkan berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2023.

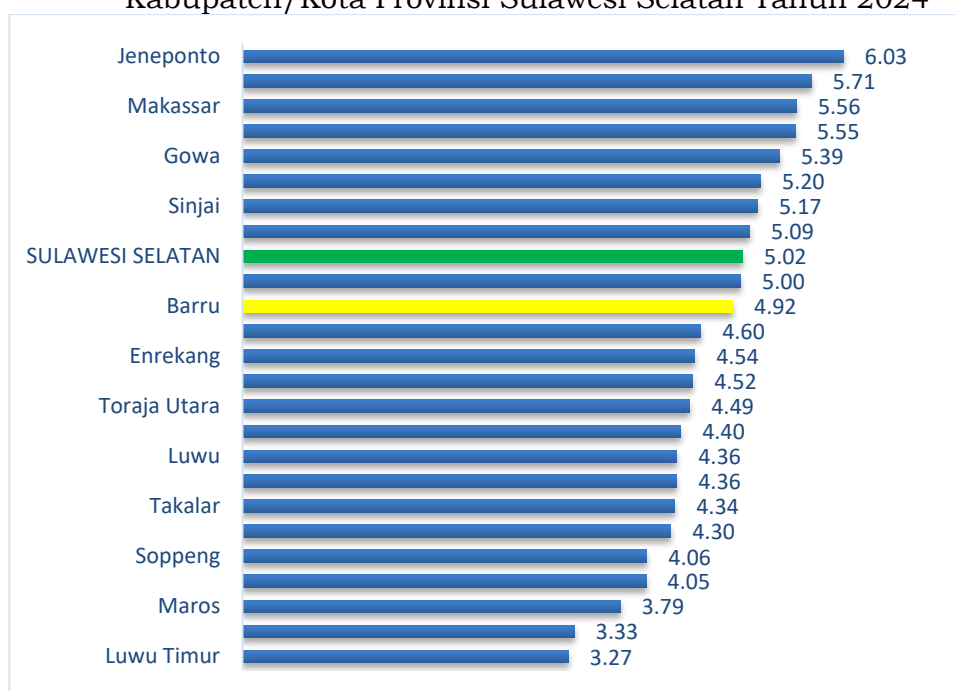
Dalam skala pertumbuhan ekonomi provinsi dan nasional, pencapaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru juga perlu dibandingkan dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional sebagai pembanding.

Jika dilihat pada Grafik di atas pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru tahun 2019 lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan pertumbuhan ekonomi nasional, kecuali pada tahun 2020 hingga tahun 2023. Pada tahun

2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru berada pada angka 3,51 persen setelah di tahun 2020 mengalami kontraksi pada angka 0,87 persen akibat pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi setelah masa pandemi covid-19 di tahun 2021 secara perlahan memperlihatkan tren yang positif, program pemulihan ekonomi nasional yang dicanangkan pemerintah Pusat hingga ke Pemerintah Daerah menunjukkan potensi keberhasilan dalam stabilisasi ekonomi nasional hingga ke daerah, walaupun kembali mengalami perlambatan di tahun 2023, namun kembali menguat di tahun 2024.

Dalam skala pertumbuhan ekonomi wilayah, pencapaian laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru di tahun 2024 dibandingkan dengan pencapaian laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota se Sulawesi Selatan berada pada peringkat 10. Adapun perbandingan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru dengan wilayah sekitar dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2. 14
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barru dengan Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2025

2. Angka Kemiskinan

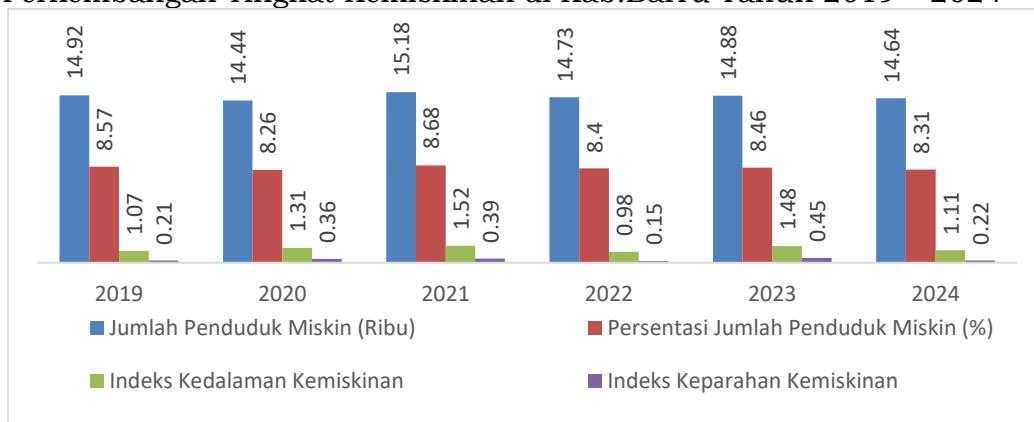
Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan

di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Indikator yang dijadikan parameter untuk penanggulangan kemiskinan antara lain adalah :

1. Angka Kemiskinan;
2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi Indeks Kedalaman Kemiskinan maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan;
3. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*), merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indikator Keparahan Kemiskinan berfungsi untuk memberikan informasi yang saling melengkapi pada insiden kemiskinan.

Adapun perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut:

Grafik 2. 15
Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kab.Barru Tahun 2019 – 2024



Sumber : BPS Kabupaten Barru tahun 2025

Dari grafik diatas terlihat bahwa tren angka kemiskinan Kabupaten Barru berfluktuatif, pada tahun 2021 di masa pandemic Covid-19, cenderung naik, dan menurun di tahun 2024 menjadi 8,31 persen. Untuk kondisi kemiskinan dari dimensi indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan menunjukkan fluktuasi dari tahun 2019 ke tahun 2024.

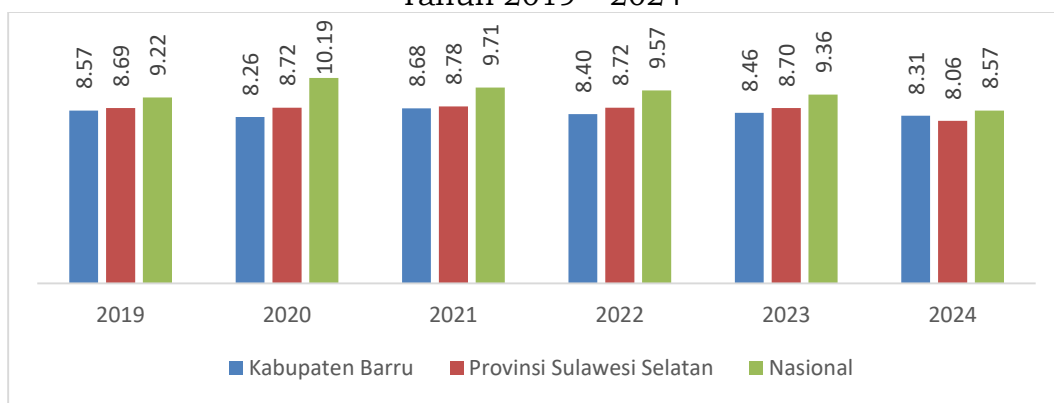
Dari gambaran kondisi kemiskinan yang ada, secara umum dapat diungkapkan bahwa penyebab kemiskinan di Kabupaten Barru disebabkan keterbatasan kesempatan kerja dan berusaha, keterbatasan akses terhadap faktor produksi, rendahnya kepemilikan aset/kepemilikan terhadap aset tertentu, keterbatasan akses terhadap fasilitas pendidikan, terhambatnya mobilitas sosial dan kurangnya partisipasi, lemahnya penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial.

Jika dilihat dari kondisi rumah tangga miskin di Kabupaten Barru, umumnya ditemui pada rumah tangga yang hidup dari sektor perikanan (nelayan) yang sangat tergantung pada alam. Selain itu ditemui juga pada rumah tangga yang berasal dari kelompok petani dan penduduk yang datang sebagai migrasi yang tidak mempunyai keterampilan.

Adapun perbandingan persentase kemiskinan antara Kabupaten Barru dengan Capaian Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan seperti yang terlihat pada grafik berikut ini :

Grafik 2. 16

Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Barru dengan Capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Capaian Nasional Tahun 2019 – 2024

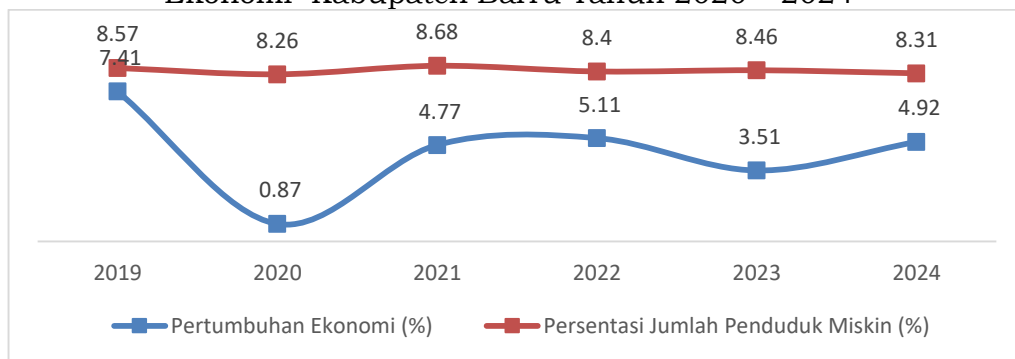


Sumber : BPS Kabupaten Barru Tahun 2025

Berdasarkan angka diatas terlihat bahwa persentase kemiskinan Kabupaten Barru mulai tahun 2019 hingga tahun 2024 selalu berada di bawah angka kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Namun di tahun 2024 angka kemiskinan Kabupaten Barru di atas Provinsi Sulawesi Selatan. Pertumbuhan ekonomi berdampak pada penurunan angka kemiskinan. Peran pemerintah dalam menggerakkan ekonomi sangat besar terutama melalui pengeluaran pemerintah untuk membangun berbagai sarana dan prasarana pemerintahan, berbagai proyek

pembangunan memberikan stimulasi kepada pengusaha-pengusaha local untuk meningkatkan pendapatan usahanya, grafik dibawah ini menunjukkan perbandingan pertumbuhan ekonomi dengan perubahan persentase penduduk miskin Kabupaten Barru.

Grafik 2. 17
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin dengan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024



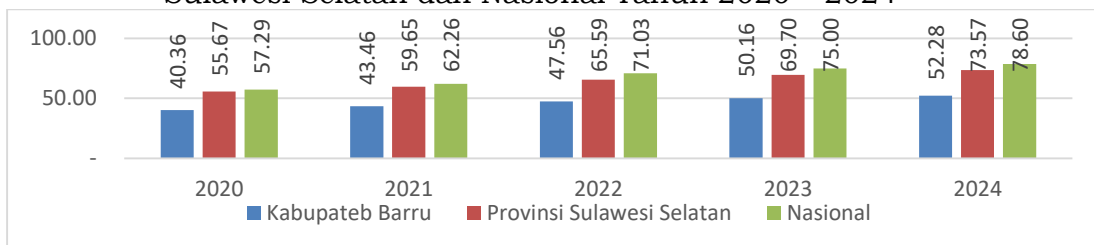
Sumber : BPS Kabupaten Barru Tahun 2025

Berdasarkan grafik di atas terlihat korelasi antara pertumbuhan ekonomi dengan persentase penduduk miskin di Kabupaten Barru. Jika pertumbuhan ekonomi meningkat maka persentase penduduk miskin juga menurun, demikian pula sebaliknya. Peningkatan kesejahteraan dan kemiskinan merupakan permasalahan kompleks dan bersifat multidimensional sehingga upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komperhensif yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilakukan secara terpadu.

3. PRDB Per Kapita

PDRB per kapita adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk daerah tersebut. PDRB per kapita mencerminkan pendapatan rata-rata setiap penduduk di daerah tersebut dan sering digunakan sebagai indikator tingkat kesejahteraan masyarakat. PDRB Kabupaten Barru dari tahun 2020 sampai tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Grafik 2. 18
Perbandingan PDRB Per Kapita Kabupaten Barru dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020 – 2024



Sumber : BPS, Tahun 2025

Dalam 5 (lima) tahun terakhir PRDRB per kapita Kabupaten Barru terus mengalami peningkatan. Peningkatan ini disebabkan oleh membaiknya pertumbuhan PDRB ADHK menurut lapangan usaha melalui kontribusi sektor ekonomi yang bermutu tinggi. Sub sektor Jasa Kesehatan dan Sosial (12,17%), Jasa Perusahaan (7,37%) dan Jasa Lainnya (15,66%) menjadi penyumbang tertinggi peningkatan PDRB total Kabupaten Barru di tahun 2024

PDRB Kabupaten Barru masih lebih rendah dibandingkan dengan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Hal ini disebabkan kombinasi faktor struktural dan kontekstual. Kabupaten Barru masih memiliki karakteristik daerah penyangga dengan basis ekonomi tradisional, perekonomian Barru masih banyak bergantung pada sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan yang nilai tambahnya relatif lebih kecil dibanding sektor industri dan jasa, serta industri pengolahan masih terbatas, sehingga produk primer tidak banyak diolah sebelum dipasarkan.

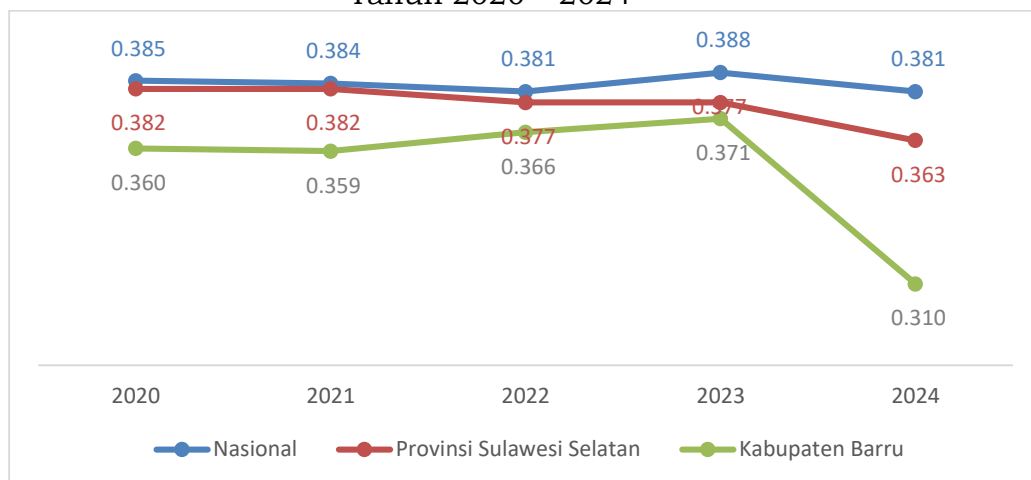
4. Indeks Gini

Indeks gini merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Angka indeks gini sebagai ukuran pemerataan mempunyai selang nilai antara 0 dan 1. Menurut Todaro (2006), klasifikasi nilai dari indeks gini adalah sebagai berikut:

1. Nilai rasio gini terletak antara 0,50 – 0,70 menandakan pemerataan sangat timpang.
2. Nilai rasio gini terletak antara 0,36 – 0,49 menunjukkan ketimpangan sedang.
3. Nilai rasio gini berada pada selang 0,20 – 0,35 menunjukkan pemerataan relatif baik.

Indeks Gini Kabupaten Barru di tahun 2024 sebesar 0,310 yang menunjukkan tingkat ketimpangan rendah. Perbandingan Indeks Gini di Kabupaten Barru dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional pada tahun 2018 - 2024 dapat dilihat pada grafik berikut:

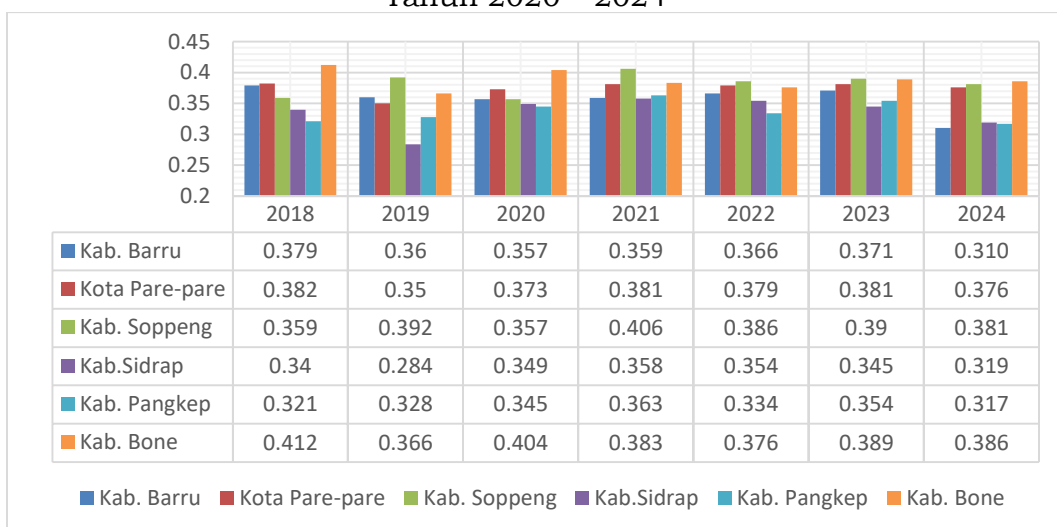
Grafik 2. 19
Indeks Gini Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kab.Barru
Tahun 2020 – 2024



Sumber : BPS Kabupaten Barru Tahun 2025

Indeks Gini di Kabupaten Barru menunjukkan lebih meratanya pendapatan masyarakat yang berarti pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Barru berkembang dengan inklusif. Indeks Gini Kabupaten Barru dalam kurun waktu lima tahun terakhir masih lebih baik dibandingkan capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional.

Grafik 2. 20
Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Barru dengan Wilayah Sekitar
Tahun 2020 – 2024



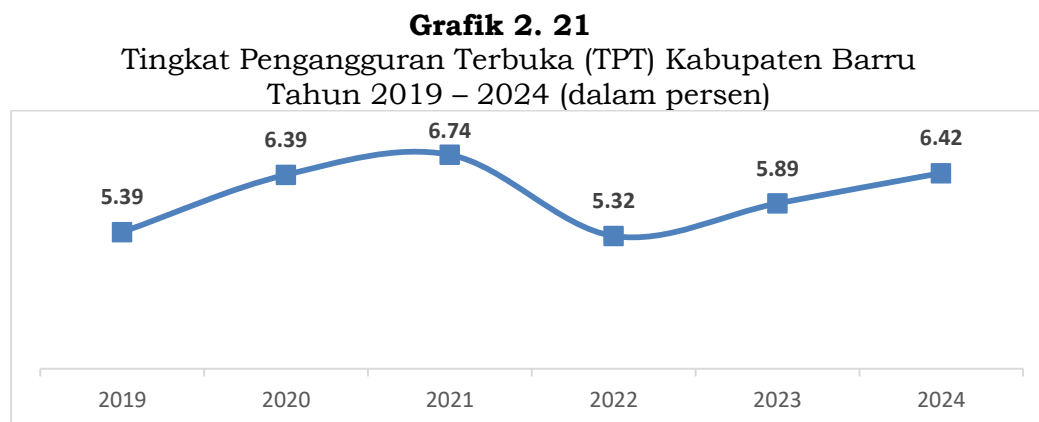
Sumber : BPS Tahun 2025

Berdasarkan data yang diuraikan diatas, Kabupaten Barru memiliki ketimpangan pendapatan (Indeks Gini) yang berfluktuatif pada periode tahun 2020-2024, pada periode tahun 2019-2020 mengalami peningkatan, hingga di tahun 2024 mencapai 0,371. Namun pada tahun 2024 mengalami penurunan, capaian indeks gini di tahun 2024 sebesar 0,310 poin. Ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Barru telah mengoptimalkan penggunaan sumber daya

serta adanya campur tangan pemerintah dalam mengarahkan kebijakan dan strategi perencanaan pembangunan yang mengarah pada kelompok penduduk yang berpenghasilan rendah turut berperan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Fokus pemerintah Kabupaten Barru dalam menurunkan kemiskinan memiliki peran yang cukup besar.

5. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja terhadap jumlah angkatan kerja, digunakan untuk mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT menunjukkan persentase orang yang mencari kerja terhadap penduduk angkatan kerja. Tingginya TPT merupakan indikasi perlunya peningkatan penyerapan tenaga kerja, salah satunya dengan penciptaan lapangan kerja. TPT terkait dengan masalah ekonomi dan sosial seperti kemiskinan dan kerawanan sosial. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. TPT yang tinggi menunjukkan tingginya angkatan kerja yang tidak terserap di dunia kerja. TPT di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.



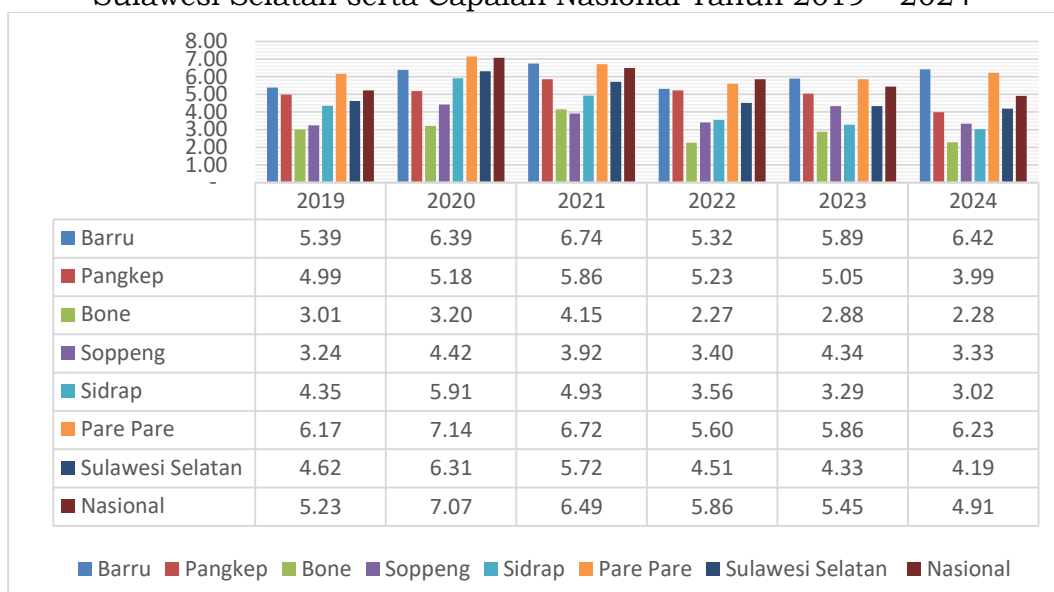
Sumber : BPS Kabupaten Barru tahun 2025

Sepanjang tahun 2019–2024, tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif, dari tahun 2022 hingga tahun 2024 terjadi peningkatan tingkat pengangguran, hal ini dipicu karena banyaknya pencari kerja yang minim pengalaman. Umumnya pada lowongan kerja dalam jajaran entri level membutuhkan kompetensi, kualifikasi dan kemampuan dasar. Selain itu, banyaknya angkatan kerja perempuan yang beralih

menjadi ibu rumah tangga setelah menikah.

Grafik 2. 22

Perbandingan Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Barru dengan Wilayah Setara dan Capaian Propinsi Sulawesi Selatan serta Capaian Nasional Tahun 2019 – 2024



Sumber : BPS Tahun 2025

Dari grafik di atas menunjukkan capaian TPT Kabupaten Barru sejak tahun 2019 berfluktuasi. Namun capaian TPT Kabupaten Barru di tahun 2024 masih lebih tinggi dari capaian Kabupaten dan Kota sekitar serta capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan capaian nasional. TPT yang tinggi di Kabupaten Barru mengindikasikan banyaknya angkatan kerja yang tidak terserap di lapangan pekerjaan.

Berdasarkan data statistik diatas menunjukkan bahwa capaian TPT yang diperoleh Kabupaten Barru berada pada peringkat ke-3 terbawah dari kabupaten/kota se Sulawesi Selatan. TPT Kabupaten Barru yang masih tinggi dipengaruhi oleh banyaknya lulusan sarjana yang tidak terserap di dunia kerja dan memilih tidak bekerja daripada harus bekerja tidak sesuai dengan spesifikasi keilmuan. Selain itu rendahnya lowongan pekerjaan pada sektor formal dan sektor investasi yang tidak berkembang menyebabkan banyaknya pengangguran di Kabupaten Barru.

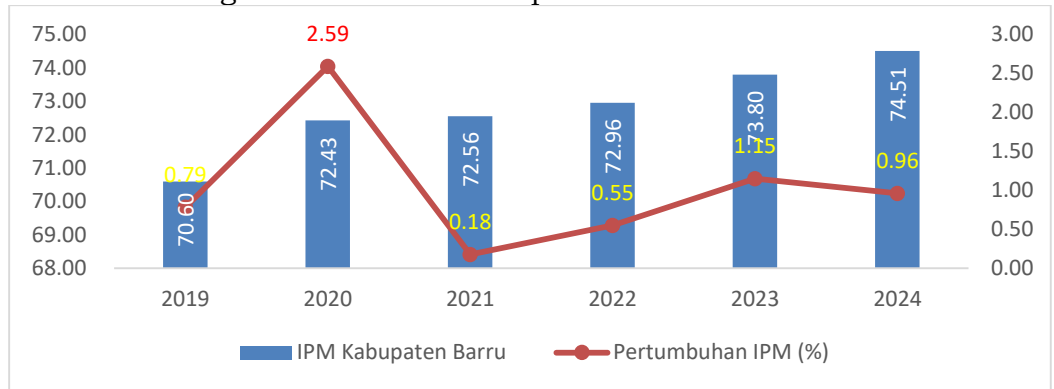
6. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM juga dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah. BPS membuat empat kategori pengelompokan capaian pembangunan manusia

berdasarkan nilai IPM, yakni: kategori sangat tinggi (IPM > 80), kategori tinggi (70 < IPM < 80), kategori sedang (60 < IPM < 70), dan kategori rendah (IPM < 60). Adapun IPM Kabupaten Barru Tahun 2012-2022 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2. 23

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Barru Tahun 2019 – 2024



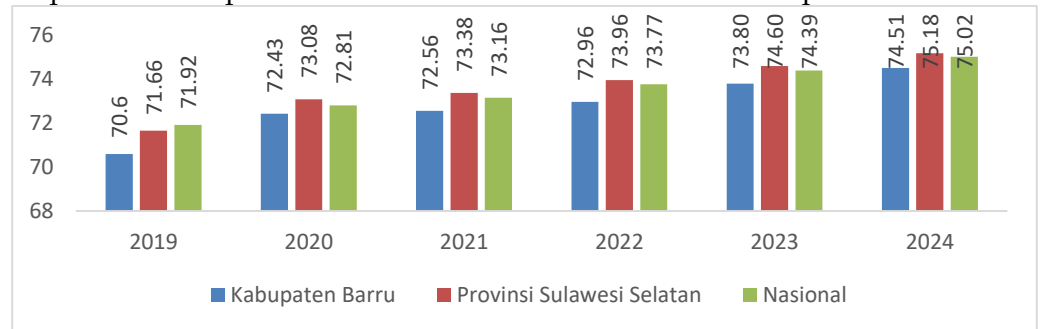
Sumber : BPS Kabupaten Barru Tahun 2025

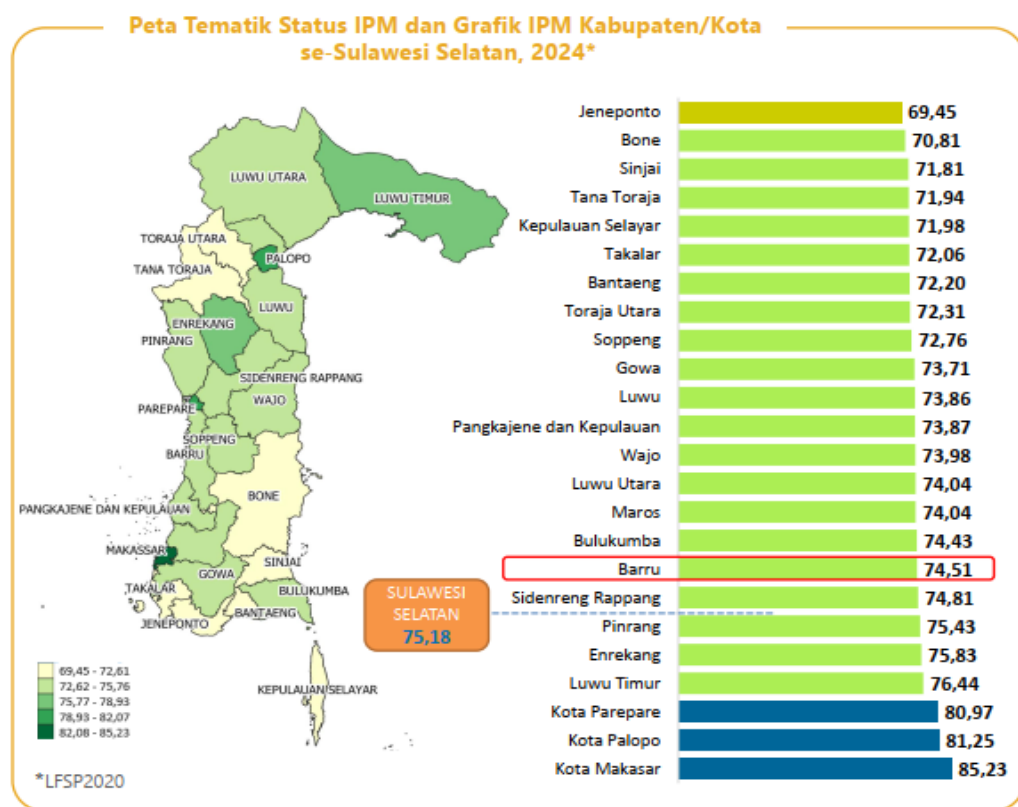
Sejak tahun 2019 IPM Kabupaten Barru berada di kategori tinggi. IPM Kabupaten Barru terus meningkat dari angka 70,60% di tahun 2019 hingga 74,51% di tahun 2024. Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa IPM Kabupaten Barru tidak pernah terkontraksi (menurun nilainya dibanding tahun sebelumnya). Capaian ini adalah hasil pertumbuhan positif dari tiap-tiap komponen penyusun IPM dari tiga dimensi: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

IPM Kabupaten Barru ketika disandingkan dengan capaian nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan, capaian IPM Kabupaten Barru berada di atas Provinsi Sulawesi Selatan dan di bawah capaian Nasional, seperti yang tersaji pada grafik di bawah ini.

Grafik 2. 24

Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Barru dengan Capaian Kabupaten Barru di Sulawesi Selatan dan Capaian Nasional





Sumber : BPS Kabupaten Barru Tahun 2025

Dari grafik di atas menunjukkan IPM Kabupaten Barru berada pada peringkat delapan dari 24 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan. Peningkatan terjadi pada semua komponen, baik kualitas kesehatan, pendidikan maupun pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Grafik 2. 25

Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kabupaten Barru dengan Capaian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kabupaten Barru Tahun 2025

Pengeluaran perkapita disesuaikan masyarakat di Kabupaten Barru mengalami tren peningkatan selama kurun waktu tahun 2019 hingga 2024 meskipun lebih rendah dari rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2024 pengeluaran per kapita yang disesuaikan masyarakat Kabupaten Barru mencapai Rp. 12,06 juta. Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2,95 persen.

B. Kesehatan Untuk Semua

1. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup saat Lahir (UHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. UHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. UHH Barru pada tahun 2024 mencapai 69,73 tahun. Artinya, secara rata-rata bayi yang baru lahir pada tahun 2024 memiliki peluang untuk bertahan hidup sampai dengan 69,73 tahun. Capaian UHH Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional disajikan sebagai berikut:

Grafik 2. 26

Perbandingan Usia Harapan Hidup Kabupaten Barru dengan Capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Capaian Nasional Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kabupaten Barru Tahun 2025

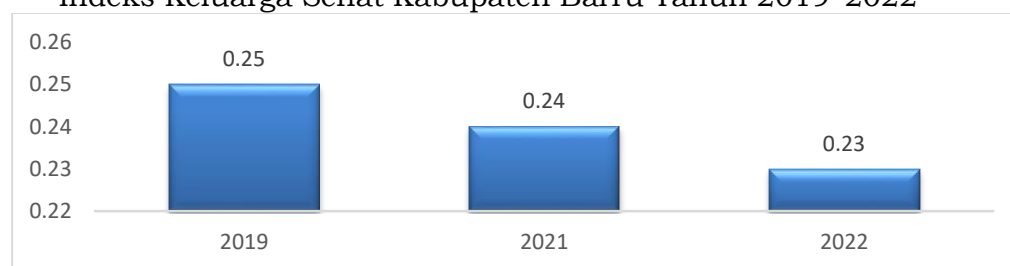
Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat dapat dilihat dari Umur Harapan Hidup, selain angka kesakitan masyarakat yang merepresentasikan sejauh mana tingkat kesehatan masyarakat. Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) atau *Life Expectancy* didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. UHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Dimensi ini berkaitan dengan Angka Kematian Bayi, Prevalensi Stunting, Angka Kematian Ibu, Angka Morbiditas, dan lain-lain. UHH yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Dari sisi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2024 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga usia 69,73 tahun, lebih lama 0,18 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. UHH Kabupaten Barru masih lebih rendah dari capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional sehingga diasumsikan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Barru masih perlu ditingkatkan

2. Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan proporsi keluarga sehat dibagi jumlah seluruh keluarga di wilayah tertentu, yang besarnya berkisar antara 0–1. Menurut Kementerian Kesehatan, ada 12 Indikator Keluarga Sehat, yaitu: 1) Keluarga mengikuti program Kabupaten Barru; 2) Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan; 3) Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap; 4) Bayi mendapat ASI eksklusif; 5) Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan; 6) Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar; 7) Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur; 8) Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan ; 9) Anggota keluarga tidak ada yang merokok; 10) Keluarga sudah menjadi anggota JKN; 11) Keluarga mempunyai akses sarana air bersih; 12) Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat.

Grafik 2. 27

Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Barru Tahun 2019–2022



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Barru, Tahun 2023

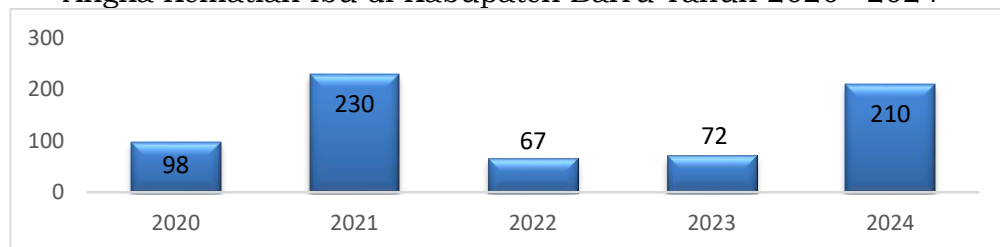
Dari grafik di atas menunjukkan IKS Kabupaten Barru sejak tahun 2019 mengalami penurunan. Tidak terdapat data tahun 2020 yang disebabkan pandemi-Covid. Berdasarkan kategori IKS dari Kementerian Kesehatan, maka IKS Kabupaten Barru masuk dalam kategori tidak sehat ($<0,5$).

3. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup

Grafik 2. 28

Angka Kematian Ibu di Kabupaten Barru Tahun 2020--2024



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Barru, Tahun 2025

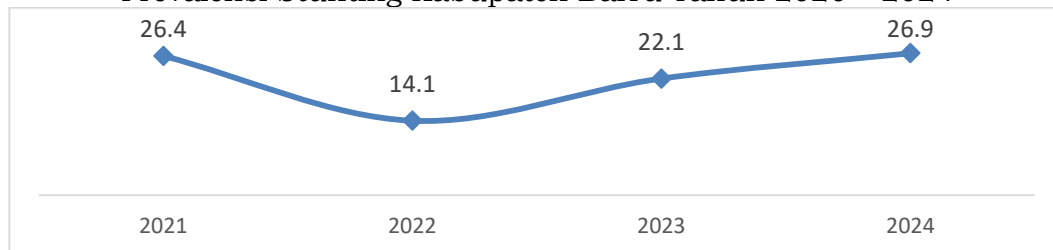
Dari grafik diatas menunjukkan fluktuasi angka Kematian Ibu di Kabupaten Barru. Namun sejak tahun 2022 angka kematian ibu cenderung mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh kombinasi faktor medis, sosial, dan sistem pelayanan kesehatan yang belum optimal. Faktor medis diantaranya perdarahan setelah melahirkan, eklampsia dan preeklampsia, dan faktor infeksi. Sedangkan faktor lainnya terkait dengan kurangnya akses ke fasilitas kesehatan dan masih minimnya kontrol kehamilan.

4. Prevalensi Stunting

Kesehatan seorang balita sangat dipengaruhi oleh asupan gizi yang terserap dalam tubuh. Kurangnya gizi yang diserap oleh tubuh mengakibatkan seorang balita mudah terserang penyakit, karena gizi memberikan pengaruh yang besar terhadap kekebalan tubuh. Peningkatan gizi pada balita ini dipengaruhi oleh peningkatan pengetahuan ibu tentang gizi, melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan, perbaikan ekonomi keluarga, perbaikan perilaku pengasuhan, konsumsi makanan yang mengikuti kaidah gizi dan kesehatan dan peningkatan kesehatan ibu dan anak. Salah satu akibat kurang gizi balita dapat menyebabkan *stunting*. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Prevalensi *Stunting* pada balita dan baduta di Kabupaten Barru dapat dilihat di bawah ini.

Grafik 2. 29

Prevalensi Stunting Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Barru Tahun 2025

Prevalensi *stunting* balita di Kabupaten Barru pada tahun 2021 mencapai angka 26,4% dan mengalami penurunan di tahun 2022, namun terus mengalami peningkatan hingga tahun 2024 mencapai 26,9%. *Stunting* berdampak pada tingkat kecerdasan, kerentanan terhadap penyakit, menurunkan produktifitas dan kemudian menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan. Oleh sebab itu pada perbaikan gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan anak menjadi hal yang penting melalui praktek pengasuhan yang baik, perbaikan layanan kesehatan dan peningkatan akses ke makanan bergizi serta air minum dan sanitasi yang memenuhi syarat.

C. Pendidikan Berkualitas Yang Merata

1. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk suatu wilayah dalam menjalani pendidikan formal. Indikator ini biasanya digunakan untuk menilai tingkat pendidikan penduduk dan merupakan salah satu komponen dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM). RLS Kabupaten Barru disajikan sebagai berikut:

Grafik 2. 30
Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Barru dengan Capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Capaian Nasional Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kabupaten Barru Tahun 2025

Pertumbuhan positif Rata-rata Lama Sekolah merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Kabupaten Barru yang lebih baik. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir RLS mengalami tren peningkatan dimana pada tahun 2024 RLS Kabupaten Barru mencapai 8,80 tahun tumbuh 0,26 tahun dari tahun sebelumnya. Capaian RLS Kabupaten Barru masih lebih rendah dibandingkan capaian RLS Provinsi Sulawesi Selatan dan

Nasional.

2. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur rata-rata lamanya waktu (dalam tahun) yang diharapkan dapat dihabiskan oleh seorang anak untuk menempuh pendidikan formal, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Indikator ini mencerminkan tingkat partisipasi pendidikan di suatu wilayah dan sering digunakan sebagai salah satu komponen dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Capaian HLS Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional disajikan pada tabel berikut.

Grafik 2. 31

Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Barru dengan Capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kabupaten Barru Tahun 2025

Pertumbuhan positif Rata-rata Lama Sekolah merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Kabupaten Barru yang lebih baik. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir RLS mengalami tren peningkatan dimana pada tahun 2024 RLS Kabupaten Barru mencapai 8,80 tahun tumbuh 0,26 tahun dari tahun sebelumnya. Capaian RLS Kabupaten Barru masih lebih rendah dibandingkan capaian RLS Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional.

3. Angka Literasi dan Numerasi

Angka Literasi dan Numerasi mengacu pada kemampuan seseorang dalam memahami, menggunakan, dan mengevaluasi informasi numerik (angka) dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari, serta kemampuan untuk memecahkan masalah praktis menggunakan konsep matematika dasar. Literasi numerasi adalah bagian dari literasi yang lebih luas, yang juga mencakup kemampuan membaca, menulis, dan memahami informasi.

Angka literasi dan numerasi di Kabupaten Barru tahun 2023

sebesar 45,51 meningkat menjadi 62,62 di tahun 2024. Peningkatan ini didorong oleh penerapan kurikulum yang berorientasi pada pengembangan literasi dan numerasi, dengan pembelajaran yang aktif dan interaktif. Selain itu, pemberian pelatihan berkelanjutan bagi guru untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam mengajar termasuk penggunaan metode pembelajaran inovatif dan teknologi.

4. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan literasi masyarakat melalui perpustakaan sebagai sarana belajar sepanjang hayat. IPLM mencerminkan tingkat perkembangan literasi masyarakat yang diukur berdasarkan beberapa unsur, seperti pemerataan layanan perpustakaan, ketersediaan koleksi, dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan literasi.

IPLM Kabupaten Barru tahun 2023 dan 2024 sebesar 91,94 dan 84,17. Penurunan IPLM di Tahun 2024 disebabkan penurunan tingkat kunjungan masyarakat (dari 1,000 menjadi 0,552). Selain itu masih rendahnya ketercukupan koleksi perpustakaan (0,8112 menjadi 0,7458) dan kurangnya pemerataan layanan perpustakaan

D. Perlindungan Sosial Yang Adaptif

1. Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor

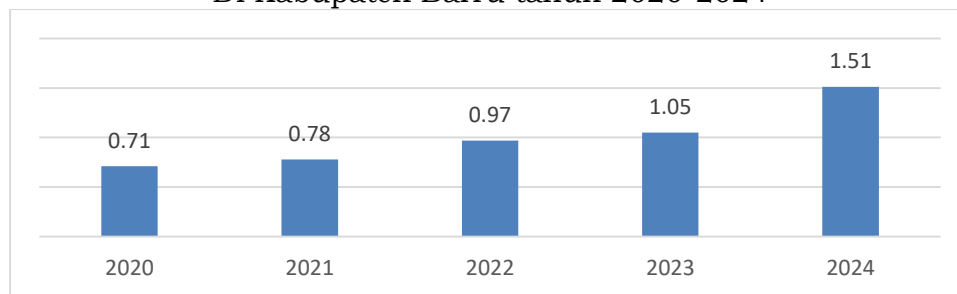
Formal

Pekerja penyandang disabilitas adalah penduduk penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas yang bekerja dan mengalami satu atau lebih hambatan diantaranya: gangguan dalam penglihatan, pendengaran, mobilitas, menggunakan atau menggerakkan jari atau tangan, gangguan berbicara atau memahami atau berkomunikasi dengan orang lain, gangguan mengingat, berkonsentrasi, dan gangguan emosional dengan tingkat keparahan rendah, sedang, sampai parah. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal adalah penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar (status pekerjaan 3) dan buruh/karyawan/pegawai (status pekerjaan 4). Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal adalah proporsi

penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (status pekerjaan 3 dan 4) terhadap total penyandang disabilitas pada angkatan kerja. Penyandang disabilitas yang dihitung dalam indikator ini adalah penyandang disabilitas kategori sedang dan berat

Grafik 2. 32

Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal Di Kabupaten Barru tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Barru Tahun 2025

Dari tabel diatas menunjukkan penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal masih sedikit, namun mengalami kecenderungan peningkatan dalam lima tahun terakhir.

2. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah sebagai upaya perlindungan bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap risiko yang mungkin dihadapi oleh pekerja, seperti kecelakaan kerja, meninggal dunia, persiapan hari tua, pensiun, dan pemutusan hubungan kerja yaitu melalui program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Perlindungan sosial terhadap seluruh pekerja juga merupakan bagian dari salah satu upaya pemerintah dalam menangani kemiskinan ekstrem melalui strategi pengurangan pengeluaran beban. Melalui program Jaminan Sosial ketenagakerjaan, para pekerja akan terlindungi dari resiko yang dimunculkan oleh para pekerja, khususnya mereka yang rentan miskin akan terselamatkan dari jurang kemiskinan ekstrem. Dengan adanya jaminan sosial, keluarga dari pekerja juga memiliki jaminan penghidupan ketika terjadi hal yang tidak diinginkan, Karenanya pekerja yang tergolong miskin ekstrem harus dipastikan tercakup dalam kepesertaan Jaminan Sosial Ketengakerjaan.

Kewajiban Pemerintah Daerah adalah salah satunya memastikan bahwa keakuratan data kepesertaan Program

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan kendala dalam pelaksanaannya di daerah. Adapun cakupan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Barru ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 24

Cakupan Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2022	2023	2024
1	Jumlah Perusahaan yang mengikuti Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	39	50	54
2	Jumlah Tenaga Kerja yang mengikuti Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	1.350 Jiwa	1.709 Jiwa	2.350 Jiwa

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kab. Barru Tahun 2025

Sementara untuk kepesertaan pegawai Non ASN Pemda yang mengikuti Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada tahun 2024 sebanyak 4.050 pegawai.

E. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Peran agama sebagai landasan spiritual, etika, moral, dan modal dasar pembangunan sangat penting dalam membentuk individu dan masyarakat di Kabupaten Barru yang berkarakter, berintegritas, dan berkelanjutan. Agama memainkan peran multidimensional sebagai landasan spiritual, etika, moral, dan modal dasar pembangunan. Dengan menginternalisasi nilai-nilai agama, individu dan masyarakat dapat membangun kehidupan yang lebih bermakna, harmonis, dan berkelanjutan. Agama juga menjadi pilar penting dalam memperkuat karakter bangsa, memajukan kebudayaan, dan menciptakan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan peran agama dalam berbagai aspek kehidupan merupakan langkah strategis untuk membangun masyarakat yang beradab dan berdaya saing.

1. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kerukunan antar umat beragama dalam suatu masyarakat atau negara. Indeks ini mencerminkan sejauh mana hubungan antarumat beragama di suatu daerah dapat dianggap harmonis dan damai. IKUB diukur melalui tiga indikator kerukunan umat beragama, yakni toleransi, kesetaraan, dan kerja sama.

Melalui FGD (Focus Group Discussion) pada Juli 2025 yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, Kabupaten Barru dinyatakan sebagai salah satu wilayah zona hijau dalam pencegahan konflik sosial berbasis agama. Artinya, kondisi kerukunan di Barru tergolong aman dan terkendali. Sistem Early Warning System (EWS) juga tengah direncanakan untuk menjaga situasi tetap kondusif. Pemerintah Kabupaten Barru bersama Kementerian Agama telah meluncurkan inisiatif Kampung Moderasi Beragama yang difokuskan pada Desa Tellumpanua dan Kelurahan Sumpang Binangae. Program ini mengencarkan moderasi beragama hingga ke pelosok dengan dukungan tokoh lintas agama dan elemen masyarakat lainnya.

2. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) adalah suatu instrumen yang digunakan untuk menilai dan mengukur tingkat pembangunan dan perkembangan sektor kebudayaan dalam suatu negara ataupun daerah, yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan memajukan kebudayaan. Kerangka IPK terdiri dari 31 indikator yang dikelompokkan ke dalam 7 dimensi yang diadopsi secara global, yaitu Dimensi Ekonomi Budaya, Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Ekspresi Budaya, Budaya Literasi, Warisan Budaya, dan Gender.

Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Barru dilakukan dari berbagai aspek diantaranya festival budaya (Festival Budaya to Berru), Berbaur Fest), Penguatan Identitas Budaya melalui pemilihan duta budaya, karnaval, dan seni tradisional, aspek pelestarian dan cagar Budaya berupa Situs makam leluhur di beberapa desa kini dipertimbangkan sebagai cagar budaya.

Dari aspek tingkat pengetahuan formal atau pendidikan kebudayaan dalam masyarakat Barru menunjukkan masih kurangnya muatan lokal di sekolah formal seperti pelajaran yang menyentuh nilai-nilai budaya Bugis seperti tokoh lokal atau adat tradisional jarang diajarkan. Ini berdampak pada minimnya pengetahuan anak muda terhadap tokoh-tokoh budaya, cerita rakyat, dan norma adat setempat

F. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif

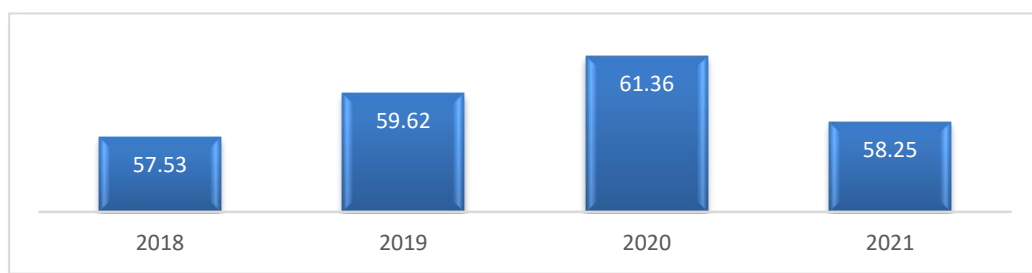
Peningkatan ketangguhan individu, keluarga, dan masyarakat adalah langkah strategis untuk memastikan terbentuknya SDM berkualitas yang mampu menjadi motor penggerak pembangunan di Kabupaten Barru. Dengan fokus pada pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan nilai-nilai sosial, kita dapat menciptakan masyarakat yang tangguh, berdaya saing, dan berkontribusi positif bagi kemajuan daerah. SDM berkualitas tidak hanya menjadi aset berharga bagi pembangunan, tetapi juga menjadi fondasi untuk mencapai kesejahteraan dan keberlanjutan di masa depan. Untuk mengukur tingkat kualitas keluarga, kesetaraan gender dan masyarakat yang inklusif, maka indikator yang digunakan sebagai berikut.

1. Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat perlindungan dan kesejahteraan anak-anak dalam suatu negara atau wilayah. Indeks ini mencakup berbagai aspek, termasuk pendidikan, kesehatan, keselamatan, hak-hak anak, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kehidupan anak-anak. Perlindungan anak merupakan amanah undang-undang nomor 35 tahun 2013 tentang perlindungan anak dan dengan ditandatanganinya deklarasi menuju kabupaten layak anak pada tahun 2019, mengharuskan Kabupaten Barru memberikan perhatian besar terhadap pemenuhan hak-hak anak.

Grafik 2. 37

Indeks Perlindungan Anak (IPA) di Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2018 – 2021



Sumber : Kementerian P3A, Tahun 2025

Untuk perlindungan anak Pemerintah Daerah Kabupaten Barru juga telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak, diharapkan dengan terbitnya Peraturan Daerah dapat melindungi hak-hak anak di Kabupaten Barru. Kabupaten Barru mendapatkan predikat

Kabupaten Layak Anak di tahun 2023. Kabupaten Layak Anak merupakan salah satu tolok ukur pencapaian IPA suatu wilayah. Untuk Kabupaten Barru data IPA belum dirilis, sedangkan untuk provinsi Sulawesi Selatan capaian IPA sebagaimana tabel di atas.

Untuk capaian IPA secara nasional tahun 2020 sebesar 66,89 sedangkan tahun 2021 sebesar 61,39. Hal ini menunjukkan capaian IPA provinsi Sulawesi Selatan dalam di tahun 2020 dan tahun 2021 masih lebih rendah dibandingkan capaian secara nasional.

2. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga

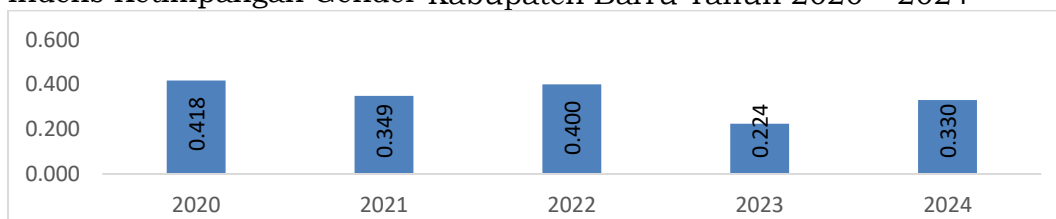
Indeks ini dibentuk oleh lima dimensi yaitu dimensi kualitas legalitas dan struktur, kualitas ketahanan fisik, kualitas ketahanan ekonomi, kualitas ketahanan sosial psikologi, dan kualitas ketahanan sosial budaya. Data yang digunakan dalam publikasi ini bersumber dari berbagai survei yang dilaksanakan oleh BPS. Publikasi ini diharapkan digunakan sebagai referensi dalam menentukan prioritas program/ kebijakan bidang pembangunan keluarga. Untuk Kabupaten Barru belum pernah dilakukan perhitungan terhadap Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga.

3. Indeks Ketimpangan Gender

Pemberdayaan perempuan merupakan urusan yang sangat penting untuk menuju pencapaian kesetaraan gender yaitu dengan memberikan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif disemua bidang kehidupan. Capaian pemberdayaan perempuan ditunjukkan dari angka Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Barru yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Grafik 2. 38

Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024



Sumber : BPS Kabupaten Barru Tahun 2025

Indeks ketimpangan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi utama pembangunan manusia. Hal ini menggambarkan

kesetaraan gender di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Sementara Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indikator yang menunjukkan apakah perempuan dapat berperan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Dari angka IPG dan IDG pada tabel di atas memperlihatkan bahwa angka untuk IPG dalam periode tahun 2018–2020 menunjukkan perolehan yang memuaskan meskipun mengalami penurunan seiring dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan. Dalam konteks pembangunan, pengarusutamaan gender, dan pemberdayaan perempuan begitu erat kaitannya dengan memperbaiki kualitas generasi penerus bangsa, untuk itu sangat penting memberikan perhatian dan fokus terhadap Pemberdayaan Perempuan.

4. Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menilai dan mengukur perkembangan dan kemajuan pemuda dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan keterlibatan sosial. Data indikator IPP meliputi Rata-rata Lama Sekolah, APK Sekolah Menengah, APK Perguruan Tinggi, Angka kesakitan pemuda, Persentase korban kejahatan, Persentase pemuda yang merokok, Persentase remaja perempuan yang sedang hamil, Persentase pemuda wirausaha kerah putih, Tingkat pengangguran terbuka, Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan, Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi, Persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat, Angka perkawinan usia anak, Persentase pemuda perempuan berusia 16–24 tahun yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas, dan Persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal. Untuk Kabupaten Barru data IPP belum dirilis, sedangkan untuk provinsi Sulawesi Selatan dan nasional capaian IPP sebagaimana tabel berikut.

Dari grafik dibawah menunjukkan bahwa IPP Provinsi Sulawesi Selatan cenderung meningkat kecuali di tahun 2020 mengalami penurunan yang disebabkan pandemi Covid-19.

Grafik 2. 39

Perbandingan Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020 – 2024



Sumber : Kementerian Pemuda dan Olah Raga, Tahun 2023

Capaian IPP Provinsi Sulawesi Selatan di tahun 2024 melampaui capaian nasional. Peningkatan IPP Provinsi Sulawesi Selatan terlihat pada domain pendidikan sebesar 73 poin sedangkan nasional sebesar 70 poin. Selain itu domain kesehatan kesehatan dan kesejahteraan mencapai 75 poin juga lebih tinggi dari nasional sebesar 70 poin. Sedangkan domain partisipasi dan kepemimpinan serta domain gender dan diskriminasi masing-masing memiliki selisih 3 poin.

2.1.3. ASPEK DAYA SAING DAERAH

A. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Daya Saing Sumber Daya Manusia di suatu wilayah merupakan salah satu penggerak perekonomian daerah. Gambaran daya saing SDM di Kabupaten Barru salah satunya dapat dilihat melalui indikator Angka Ketergantungan. Angka Ketergantungan adalah sebuah indikator demografis yang mengukur perbandingan antara jumlah penduduk yang dianggap tidak produktif (biasanya anak-anak di bawah 15 tahun dan orang lanjut usia di atas 64 tahun) dengan jumlah penduduk usia produktif (biasanya 15-64 tahun). Angka ini digunakan untuk menilai beban ekonomi yang harus ditanggung oleh kelompok usia produktif dalam mendukung kelompok yang tidak produktif.

Tabel 2. 25

Angka Ketergantungan Penduduk Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (Jiwa)	61.753	62.693	63.197	63.675	62.700
-	Jumlah Penduduk Usia <15 tahun (Jiwa)	45.478	45.828	46.118	45.608	43.352
-	Jumlah Penduduk usia>64 tahun (Jiwa)	16.275	16.865	17.079	18.067	19.348
2	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun (Jiwa)	125.639	127.184	128.698	130.868	133.301
	Rasio ketergantungan(%)	49,15	49,29	49,10	48,66	47,04

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barru Tahun 2025

Berdasarkan data yang diuraikan diatas, Kabupaten Barru memiliki Angka Ketergantungan yang berfluktuatif pada periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 50,29 persen, sedangkan terendah terjadi pada tahun 2024 dengan capaian sebesar 47,04 persen. Berdasarkan tabel di atas, Angka Ketergantungan di Kabupaten Barru memiliki kecenderungan menurun. Penurunan angka ketergantungan di Kabupaten Barru disebabkan beberapa faktor diantaranya penurunan angka kelahiran, peningkatan usia harapan hidup sehat sehingga orang lanjut usia bisa bekerja lebih lama, serta meningkatnya bonus demografi yang ditandai meningkatnya kelahiran dimasa lalu yang kini menjadi dewasa.

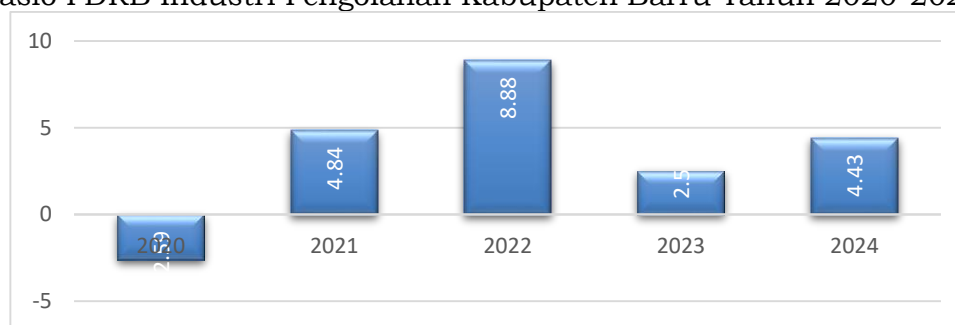
B. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

1. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Rasio PDRB sektor industri pengolahan di Kabupaten Barru mengalami peningkatan di tahun 2023 menjadi 4,75 persen di tahun 2023 atau mengalami pertumbuhan sebesar 2,51 persen dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan rasio PDRB sektor industri pengolahan di Kabupaten Barru lebih karena disebabkan mulai berkembangnya industri rumah tangga, dukungan infrastruktur seperti jalan yang memadai, serta distribusi bahan baku dan jadi yang lebih mudah. Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 disajikan sebagai berikut:

Grafik 2. 40

Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Barru Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kabupaten Barru, Tahun 2025

Grafik diatas menunjukkan rasio PDRB industri pengolahan di Kabupaten Barru berfluktuasi, bahkan di tahun 2020 saat Covid-19 melanda, rasio PDRB industri pengolahan mengalami kontraksi. Namun demikian di tahun 2024 mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan adanya pertumbuhan atau penguatan sektor industri manufaktur dibanding sektor-sektor lainnya dalam struktur

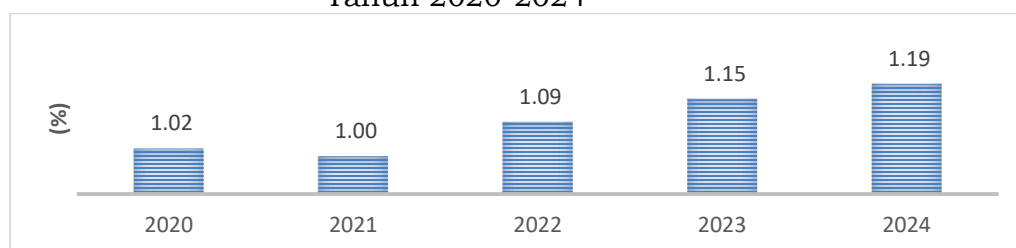
ekonomi di Kabupaten Barru, seperti adanya pendirian pabrik baru dan perluasan kapasitas produksi perusahaan. Selain itu UMKM atau industri rumah tangga mengalami peningkatan, khususnya industri kecil yang bergerak pada makanan olahan dan kerajinan

2. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Sektor pariwisata memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah terutama pada lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum. Jasa akomodasi dan makan minum merupakan bagian dari komponen terpenting yang tak terpisahkan dari obyek wisata dan wisatawan. Pada tabel dibawah memperlihatkan bahwa rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum cenderung meningkat dari tahun 2021 hingga 2023. Namun demikian secara persentase rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum perannya terhadap PDRB masih terbilang kecil sehingga diperlukan upaya strategis untuk mendorong sektor pariwisata agar lebih berkembang di Kabupaten Barru.

Grafik 2. 41

Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Barru Tahun 2020-2024



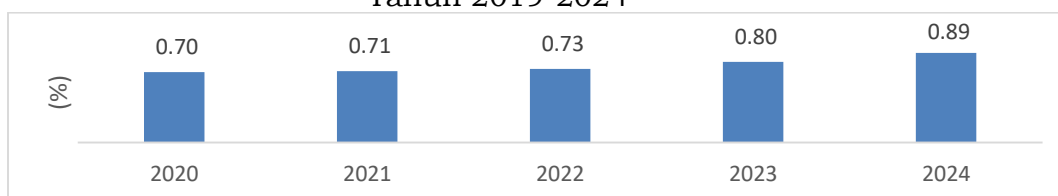
Sumber : BPS Kabupaten Barru, Tahun 2025

3. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif dikembangkan sebagai respons terhadap perubahan dalam struktur ekonomi global yang semakin didorong oleh inovasi, kreativitas, dan keahlian intelektual. Ini mencakup berbagai industri dan aktivitas ekonomi seperti seni pertunjukan, media, desain, periklanan, mode, arsitektur, dan lainnya yang menghasilkan nilai tambah dari ide dan ekspresi kreatif.

Grafik 2. 42

Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Kabupaten Barru Tahun 2019-2024

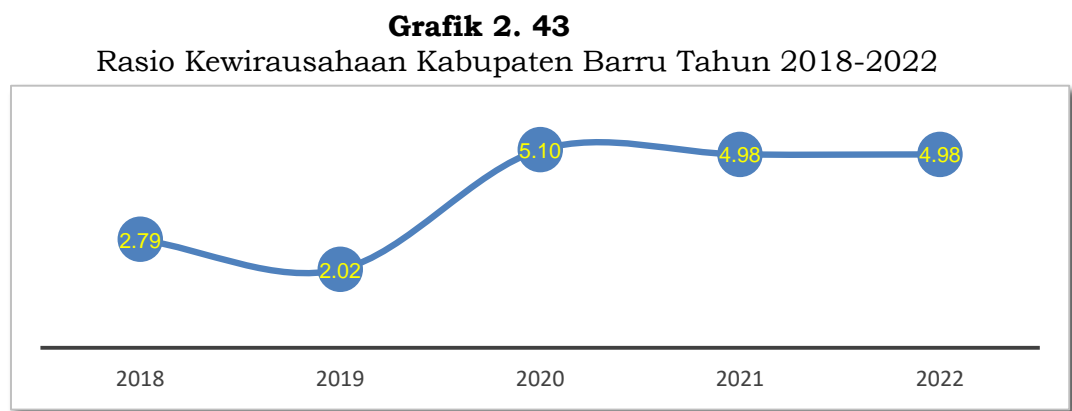


Sumber : BPS Kabupaten Barru, Tahun 2025

Berdasarkan data pada tabel diatas menunjukkan proporsi PDRB Ekonomi Kreatif di Kabupaten Barru mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini didorong makin tumbuhnya sub sektor ekonomi kreatif seperti kuliner, kerajinan tangan dan desain produk.

4. Rasio Kewirausahaan

Rasio Kewirausahaan adalah indikator yang mengukur persentase jumlah wirausaha (*entrepreneur*) dalam suatu populasi atau tenaga kerja di suatu wilayah. Rasio ini digunakan untuk menilai tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan kewirausahaan serta sebagai tolok ukur perkembangan ekonomi, inovasi, dan daya saing suatu daerah. Rasio Kewirausahaan dapat dihitung dengan membandingkan jumlah populasi wirausaha dibagi populasi angkatan kerja di Kabupaten Barru.



Sumber : Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Barru, Tahun 2023

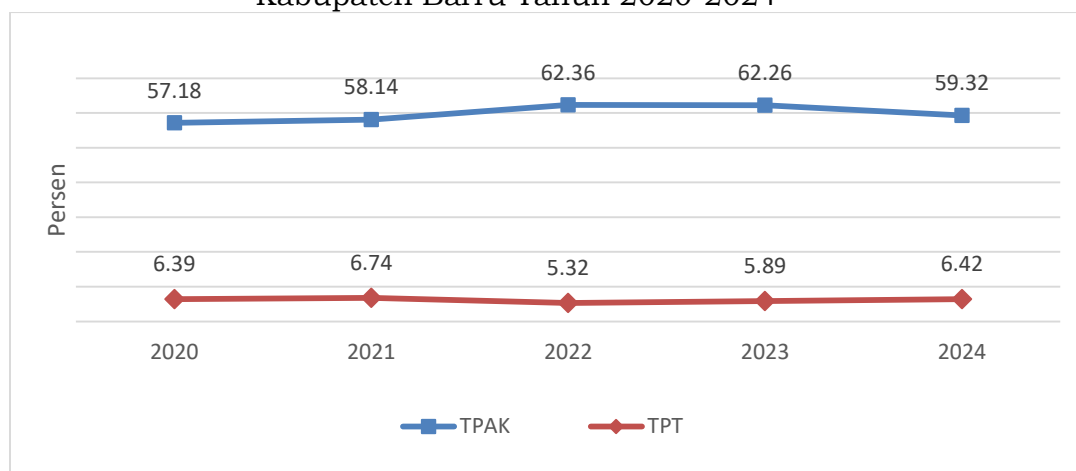
Peningkatan rasio kewirausahaan bertujuan untuk memperkuat struktur ekonomi nasional hingga ke daerah. Rasio kewirausahaan Kabupaten Barru pada kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami tren peningkatan dan rasio kewirausahaan Kabupaten Barru pada tahun 2022 di atas capaian nasional. Capaian rasio kewirausahaan Kabupaten Barru di tahun 2022 sebesar 4,98%. lebih tinggi dibanding capaian Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 3,25% dan capaian nasional sebesar 3,95%. Kurangnya pemanfaatan teknologi digital untuk memulai dan mengembangkan usaha serta ketersediaan pembiayaan untuk memulai dan mengembangkan usaha menjadi salah satu faktor yang menghambat perkembangan wirausaha di Kabupaten Barru.

5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja didefinisikan sebagai perbandingan antara angkatan kerja dengan jumlah seluruh penduduk usia kerja. TPAK dapat digunakan sebagai indikator tingkat

kesulitan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan. TPAK di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

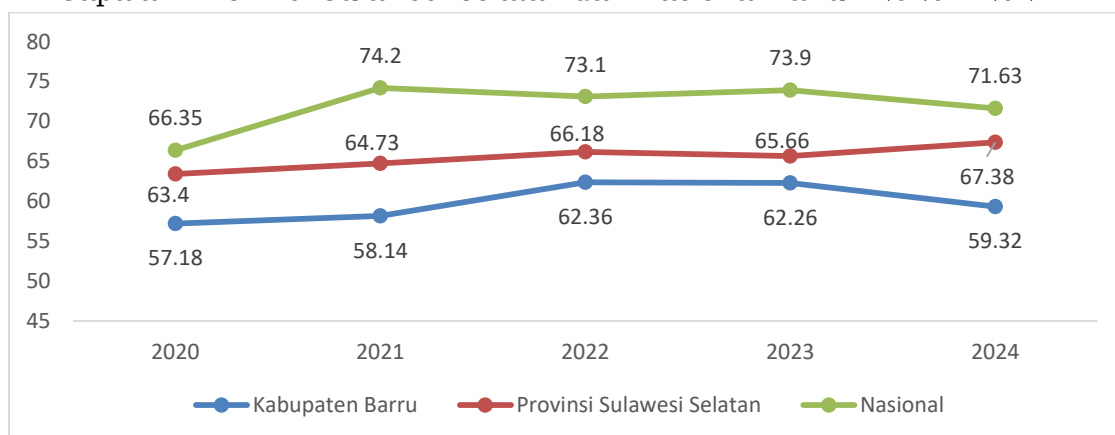
Grafik 2. 44
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Barru Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Barru , Tahun 2025

Sepanjang tahun 2020–2024, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di kabupaten barru mengalami fluktuasi, namun pada periode tahun 2020-2022 terjadi tren peningkatan pasca pandemi dari 57,18% pada tahun 2020 meningkat di tahun 2022 menjadi 62,36%, namun mengalami penurunan di tahun 2024 menjadi 59,32%. TPAK yang tinggi merupakan salah satu indikasi tingginya kesempatan kerja yang tersedia sehingga orang terserap dalam lapangan kerja yang ada atau sedang mencari kerja atau bahkan mempersiapkan usaha. Dari tabel diatas sejak tahun 2020–2024 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Barru selalu di atas 50%, dengan TPAK tertinggi yaitu mencapai 62,36% pada Tahun 2022.

Grafik 2. 45
Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Barru dengan Capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020 – 2024



Sumber : BPS Tahun 2025

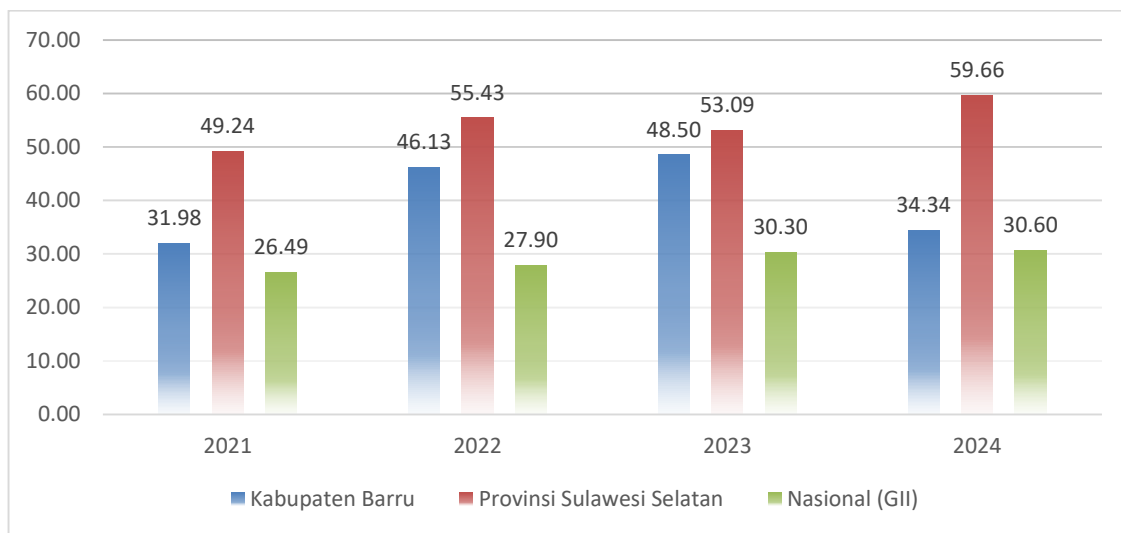
Dari Grafik di atas menunjukkan TPAK Kabupaten Barru masih dibawah capaian TPAK Provinsi Sulawesi Selatan dan capaian

nasional. TPAK Kabupaten Barru yang belum optimal dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang masih rendah, masih minimnya pelatihan vokasi dan penguatan kewirausahaan bagi angkatan kerja produktif, serta kurangnya lapangan kerja yang tersedia di Kabupaten Barru.

6. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah merupakan indikator penilaian yang dilakukan sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kegiatan penilaian inovasi daerah ini dimaksudkan agar dapat mendorong adanya kompetisi positif antar perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat diwujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan, guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan kategori, daerah disebut inovatif jika skornya mencapai 35,00 sampai 60,00. Sementara Kategori Kurang Inovatif skornya 0,01 sampai 34,99. Untuk Kategori Sangat Inovatif skornya 60,01 sampai 100,00. Capaian indeks inovasi daerah Kabupaten Barru dalam 3 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Grafik 2. 46
Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021–2024



Sumber : BRIN, tahun 2024

Nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Barru di tahun 2024 sebesar 34,34 poin masih dalam kategori kurang inovatif. Capaian ini mengalami penurunan dibanding tahun 2023. Capaian IID Kabupaten Barru pada Tahun 2024 lebih besar dari capaian Nasional sebesar 30,60 poin. Namun masih rendah jika dibandingkan dengan

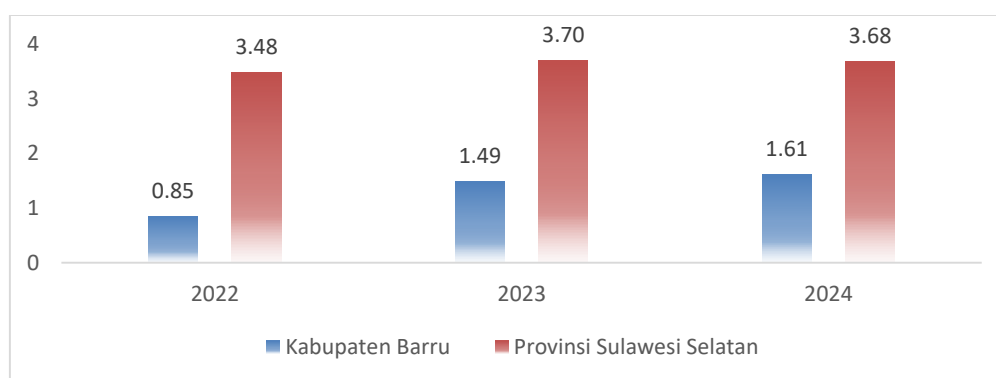
capaian Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 59,66 poin.

7. Indeks Kapabilitas Inovasi

Indeks kapabilitas inovasi merupakan pilar ke-12 dari Indeks Inovasi Daerah. Pilar Kapabilitas Inovasi menggambarkan kuantitas dan kualitas penelitian dan pengembangan formal yang mendorong kolaborasi, konektivitas, kreativitas, keragaman, dan konfrontasi lintas visi dan sudut pandang yang berbeda, serta kapasitas untuk mengubah ide menjadi barang dan jasa baru. Indikatornya adalah keanekaragaman tenaga kerja, status pengembangan klaster, publikasi ilmiah, aplikasi Kekayaan Intelektual (KI), belanja riset, indeks keunggulan lembaga riset, dan aplikasi merek dagang.

Grafik 2. 47

Indeks Kapabilitas Inovasi Kabupaten Barru Tahun 2022–2024



Sumber : BRIN, tahun 2024

Dati grafik diatas menunjukkan indeks kapabilitas inovasi Kabupaten Barru masih rendah dibanding Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini menggambarkan masih minimnya kuantitas dan kualitas penelitian dan pengembangan formal yang mendorong kolaborasi, konektivitas, kreativitas, keragaman serta kapasitas untuk mengubah ide menjadi barang dan jasa baru.

C. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

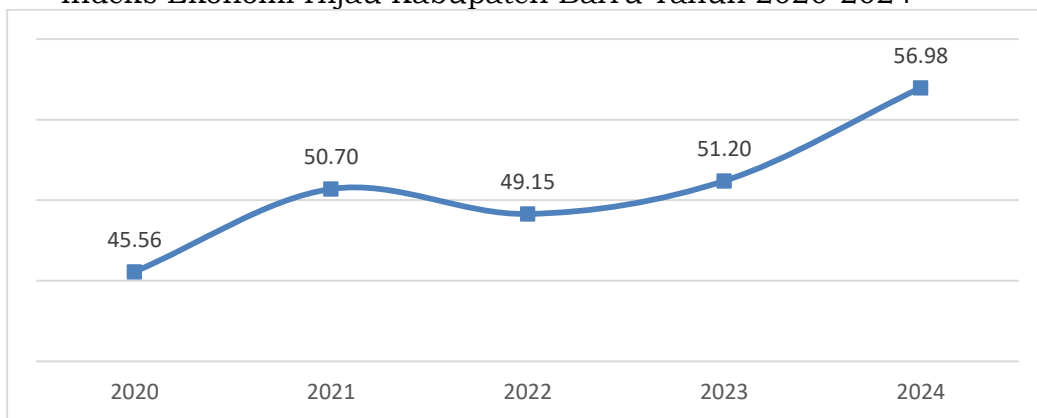
1. Indeks Ekonomi Hijau

Ekonomi Hijau adalah model pembangunan ekonomi untuk menunjang pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada investasi, kapital dan infrastruktur, lapangan kerja dan keterampilan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. Indeks Ekonomi Hijau (Green Economic Index/GEI) ditujukan sebagai alat untuk mengukur progres dan capaian transformasi ekonomi menuju Ekonomi Hijau secara *tangible*, representatif, dan akurat. Fokus dari Indeks Ekonomi Hijau adalah meningkatkan investasi hijau untuk pilar ekonomi; mengelola aset dan infrastruktur yang berkelanjutan serta memastikan

transisi yang adil dan terjangkau, dan memberdayakan sumber daya manusia. Indeks Ekonomi Hijau terdiri atas 15 indikator yang mencakup tiga pilar keberlanjutan, yakni lingkungan, ekonomi, dan sosial. Skor Indeks Pertumbuhan Hijau berkisar antara 1 hingga 100, dengan 1 memiliki kinerja terendah atau sangat rendah dan 100 memiliki kinerja terendah atau sangat tinggi.

Grafik 2. 48

Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Barru Tahun 2020-2024



Sumber : Olahan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2025

Tabel 2. 26

Capaian indikator pada Pilar Ekonomi Hijau Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

Pilar	No.	Indikator	Unit	2020	2021	2022	2023	2024	Keterangan
Lingkungan	1	Luasan Hutan Lindung (Persentase luas tutupan hutan dari luas daratan)	%	41,91	42,52	42,52	42,52	42,52	
	2	Bauran Energi Baru Terbarukan dari sumber energi primer	%						Belum dihitung
	3	Kualitas Air Permukaan pada Parameter BOD	mg/l	3,18	0,87	2,64	3,07	3,07	
	4	Persentase lahan gambut terdegradasi (penurunan tutupan gambut)	%						Belum dihitung
	5	Kualitas Udara (konsentrasi NO2 pada udara ambien)	µg/m ³		5,81	7,29	7,34	7,34	
	6	Persentase penurunan emisi kumulatif dari baseline	%					0,9	
Ekonomi	7	Intensitas emisi	Ton CO2e / 2010 IDR Billion						Belum dihitung
	8	Intensitas energi final	BOE/ 2010 IDR Billion						Belum dihitung

Pilar	No.	Indikator	Unit	2020	2021	2022	2023	2024	Keterangan	
			n							
	9	Pendapatan Domestik Bruto per Kapita	USD/capita	3.011	3.044	3.019	3.254	3.391		
	10	Indeks Produktivitas Pertanian (padi, kelapa sawit, perikanan budidaya)								Belum dihitung
		a. Produktivitas padi	Ton/hectare/year	6,11	5,72	6,19	5,11	5,50		
		b. Produktivitas kelapa sawit	Ton/hectare/year							Belum dihitung
		c. Produktivitas perikanan budidaya	Ton/hectare/year		3,50	3,81	4,11	4,48		
	11	Produktivitas tenaga kerja sektor industri	2010 IDR / person							Belum dihitung
12	Produktivitas tenaga kerja sektor jasa	2010 IDR / person							Belum dihitung	
Sosial	13	Rata-rata lama sekolah	years	8,23	8,24	8,25	8,54	8,80		
	14	Angka harapan hidup	years	72,05	72,10	72,37	72,57	69,73		
	15	Tingkat kemiskinan	%	8,26	8,68	8,40	8,46	8,31		
	16	Tingkat pengangguran	%	6,39	6,74	5,32	5,89	6,42		

Dari grafik dan tabel di atas menunjukkan bahwa Indeks Ekonomi Hijau di Kabupaten Barru mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini ditopang dari indikator pada pilar lingkungan berupa peningkatan luasan tutupan hutan dan tingkat kualitas air permukaan pada parameter BOD yang semakin baik. Dari aspek pilar ekonomi ditopang oleh indikator produktifitas padi dan produktifitas perikanan budidaya, sedangkan pada pilar sosial ditopang oleh indikator rata-rata lama sekolah dan angka harapan hidup yang semakin meningkat. Namun demikian, secara umum capaian Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Barru masih dalam kategori sedang (skor 40-60).

2. Indeks Ekonomi Biru

Menurut world bank (2017) Blue Economy is the "sustainable use of ocean resources for economic growth, improved livelihoods, and jobs while preserving the health of ocean ecosystem A blue economy generates

economic and social benefits while ensuring oceans’ long-term environmental sustainability”. Sedangkan menurut Bappenas (2023) Ekonomi Biru merupakan upaya optimalisasi pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya laut secara inklusif dan berkelanjutan dan turut mendukung pelestarian beserta ekosistem pendukungnya.

Ekonomi Biru adalah konsep yang menggabungkan pemanfaatan sektor kemaritiman dengan pendekatan berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, pelestarian ekosistem laut, serta menciptakan lapangan kerja.

Ekonomi Biru mencakup berbagai sektor diantaranya perkapalan/transportasi laut, perikanan, dan wisata pantai, pesisir, laut/*diving*, perikanan budidaya, pelabuhan, penambangan di pesisir/pantai, pabrik es, pergudangan, industri makanan, industri kimia dan farmasi, restoran, dan industri pengolahan ikan), industri galangan kapal/pembuatan kapal, industri mesin, supply air tawar, jasa pendidikan, bahan bangunan berupa sirtu, dan angkutan sungai dan danau, kegiatan perikanan di sungai dan danau.

Nilai *Indonesia Blue Economy Index* (IBEI) atau Indeks Ekonomi Biru untuk Kabupaten Barru pada Tahun 2023 sebesar 61,68. Untuk perhitungan Indeks Ekonomi Biru terdapat indikator yang telah dilakukan pengujian, pendataan atau pemantauan seperti yang terlihat yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 27
Indikator Terukur pada Indeks Ekonomi Biru Tahun 2021-2023

Pilar	Nomor	Indikator	Unit	Tahun 2023	
EKONOMI	I	Perikanan Tangkap Dan Budidaya			
	1	Peran Sektor Perikanan dalam PDRB	%	21,14	
	2	Volume Ekspor Perikanan	Ton	Tidak ada data	
	3	Peran Ekspor Produk Perikanan Terhadap Total Ekspor	%	Tidak ada data	
	4	Volume Produksi Akuakultur	Ton	6469,00	
	5	Volume Produksi Budidaya Tambak	Ton	5026,70	
	6	Volume Ekspor Perikanan dan Akuakultur	Ton	Tidak ada data	
	II	Manufaktur Berbasis Kelautan			
	1	Volume Ekspor Ikan Olahan (Tuna dan Rajungan Kaleng)	Ton	468,00	
	2	Nilai Angkutan Laut (Ekspor + Impor)	Ton	Tidak ada data	
	3	Jumlah Penumpang Angkutan Laut	Orang	59.565	
	4	Jumlah Penumpang Angkutan Laut di 25 Pelabuhan Strategis	Orang	Tidak ada data	
	5	Volume Produksi Garam	Ton	Tidak ada data	
	6	Volume Ekspor Industri Pembuatan Kapal dan Perahu	Ton	Tidak ada data	
	7	Jumlah Perahu/Kapal Penangkap Ikan	Unit	2251,00	
	III	Pariwisata Berbasis Kelautan			
	1	Jumlah Wisata Bahari	Lokasi	4 titik (Pulau Pannikiang, Pulau Duttungan, Pantai Ujung Batu, Pantai Laguna)	
			Skor Pilar Ekonomi		
	LIN GKU NGA N	I	Kualitas Sumber Daya Dan Konservasi Laut		

Pilar	Nomor	Indikator	Unit	Tahun 2023
	1	Kawasan Terumbu Karang Berkualitas Baik	%	96,27
	2	Kawasan Lamun Berkualitas Baik	%	Tidak ada data
	3	Kawasan Hutan Mangrove Berkualitas Baik	%	91,00
	4	Jumlah Desa Pesisir dengan Tempat Pembuangan Sampah	Desa	4 Desa/Kelurahan
	5	Jumlah Desa Pesisir dengan Tempat Buang Air Besar dan Saluran Air Limbah	Desa	Tidak ada data
	6	Penanaman/Rehabilitasi Hutan Mangrove, Rawa, dan Lahan Gambut	Ha	3.300 Pohon/Ha
	7	Suhu Rata-Rata Permukaan Laut	°C	Tidak ada data
	8	Jumlah Sampah yang Dibuang ke Laut	gr/m2	Tidak ada data
	9	Jumlah Sampah yang Dibuang ke Darat	Ton	27.817
		Skor Pilar Lingkungan		
SOSIAL	I	Ketenagakerjaan		
	1	Jumlah Nelayan dan Petani Ikan	Orang	4556 + 1845 (petani)
	2	Jumlah Perempuan di Sektor Perikanan	Orang	Tidak ada data
	3	Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap	RTP	2251,00
	4	Rata-Rata Pendapatan per Bulan di Sektor Perikanan	Rupiah	Tidak ada data
	5	Nilai Tukar Nelayan		Tidak ada data
	6	Pendapatan per Kapita di Sektor Perikanan	Rupiah	Tidak ada data
	II	Kesehatan		
	1	Rata-Rata Konsumsi Ikan per Kapita	kkal	Tidak ada data
	2	Rata-Rata Konsumsi Protein per Kapita	kkal	Tidak ada data
	III	Pendidikan		
	1	Jumlah Lulusan Sekolah Perikanan	Orang	Tidak ada data
	2	Jumlah Peserta Pelatihan Perikanan	Orang	15
			Skor Pilar Sosial	
		BLUE ECONOMY INDEKS		

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Barru, Tahun 2025

Kabupaten Barru memiliki potensi pengembangan ekonomi biru yang sangat besar. Berdasarkan data diatas dapat terlihat potensi yang dimiliki Kabupaten Barru dalam pengembangan sektor perekonomian berbasis ekonomi biru, dengan garis pantai sepanjang 78 kilometer, beberapa potensi perairan yang dimiliki Kabupaten Barru diantaranya:

1. Pada bidang Wisata Bahari Kabupaten Barru memiliki 4 lokasi wisata bahari yang terdiri dari Pulau Pannikiang, Pulau Dutungan, Pantai Ujung Batu, dan Pantai Laguna.
2. Dua pelabuhan untuk transportasi Laut yaitu Pelabuhan Garongkong dan Awerange memiliki jumlah angkutan penumpang untuk Tahun 2023 sebesar 59.565 orang. Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap Total PDRB Kabupaten Barru pada Tahun 2023 sebesar 21,14 persen.

D. Transformasi Digital

Tantangan dan peluang dalam era digital menuntut seluruh provinsi untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi digital. Teknologi informasi dan

komunikasi membantu pesatnya pertumbuhan industri, mendorong efisiensi dalam pemerintahan, dan operasional bisnis, serta mengembangkan landasan penting menuju perekonomian berbasis teknologi. Salah satu indikator keberhasilan transformasi digital di Kabupaten Barru adalah sejauh mana layanan publik yang diselenggarakan pemerintah daerah telah dilaksanakan secara online dan terintegrasi.

Ketersediaan infrastruktur telekomunikasi yang menjangkau seluruh wilayah secara merata, tersedianya regulasi dan kapasitas pemerintah daerah dalam pemanfaatan teknologi digital yang tepat, dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital secara bijak terutama dalam hal kecakapan digital, etika digital dan budaya digital, perlu menjadi perhatian dalam pembangunan teknologi di Sulawesi Selatan.

E. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Daya saing daerah di kancah global dapat diketahui dengan melihat kondisi integrasi ekonomi domestik dan global dalam mendorong peningkatan produktivitas perekonomian dalam negeri yang terintegrasi dan mendukung partisipasi dalam rantai pasok global. Untuk mengetahui daya saing ekonomi daerah diranah global ditunjukkan dengan volume ekspor.

F. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

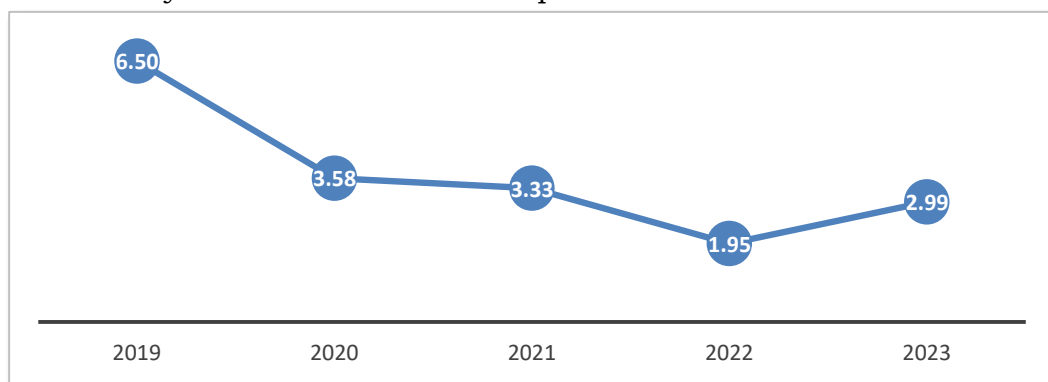
1. Indeks Layanan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian integral pembangunan daerah dan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur diyakini sebagai motor pembangunan suatu daerah. Jaringan transportasi merupakan salah satu tulang punggung distribusi baik barang, penumpang maupun jasa, serta merupakan aspek penting dalam peningkatan produktivitas sektor produksi. Ketersediaan jaringan jalan, pelabuhan, terminal, bandara, layanan air minum dan merata serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan turut menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menyediakan fasilitas dan layanan infrastruktur yang berkualitas, baik dalam bentuk pengaturan dengan kerangka regulasi maupun kerangka investasi melalui rehabilitasi dan peningkatan kapasitas fasilitas infrastruktur yang rusak, serta pembangunan baru. Kerangka kebijakan regulasi dan investasi, diharapkan akan meningkatkan ketersediaan fasilitas dan layanan infrastruktur. Namun ketersediaan infrastruktur perlu ditingkatkan agar angka kecelakaan di sektor transportasi, serta lamanya pemulihan infrastruktur akibat bencana gempa, tanah longsor, banjir, yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir dapat ditekan.

Indeks Layanan Infrastruktur merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Pengukuran Indeks Layanan Infrastruktur memberikan informasi perspektif masyarakat secara obyektif, komprehensif dan kredibel, baik dalam aspek pembangunan fisik maupun aspek manfaat seperti jalan, irigasi, drainase, bangunan, permukiman layak huni, rumah layak huni, maupun penyelenggaraan penataan ruang. Indeks layanan infrastruktur dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2. 49

Indeks Layanan Infrastruktur Kabupaten Barru Tahun 2019-2023



Sumber data : Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN 2024

Dari grafik di atas terlihat bahwa Indeks Layanan Infrastruktur di Kabupaten Barru mengalami penurunan dari tahun 2019 hingga tahun 2022, walaupun sedikit meningkat di tahun 2023. Capaian tertinggi pada tahun 2019 sebesar 6,5 poin sedangkan capaian terendah pada tahun 2022 sebesar 1,95 poin. Hal ini menunjukkan masih rendahnya tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur di Kabupaten Barru.

- **Infrastruktur Jalan**

Tingkat kemantapan jalan menjadi salah satu indikator yang menunjukkan seberapa tinggi kesiapan jalan dan kondisi jalan. Menurut Kementerian Pekerjaan Umum Dirjen Bina Marga, kondisi jalan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Jalan dengan kondisi baik adalah jalan dengan permukaan perkerasan yang benar-benar rata, tidak ada gelombang dan tidak ada kerusakan permukaan.
- Jalan dengan kondisi sedang adalah jalan dengan kerataan permukaan perkerasan sedang, mulai ada gelombang tetapi tidak ada kerusakan permukaan.
- Jalan dengan kondisi rusak ringan adalah jalan dengan permukaan perkerasan sudah mulai bergelombang, mulai ada kerusakan permukaan dan penambalan jalan.

- d. Jalan dengan kondisi rusak berat adalah jalan dengan permukaan perkerasan sudah banyak kerusakan seperti bergelombang, retak-retak dalam ukuran besar, dan terkelupas cukup dalam, disertai dengan kerusakan lapis fondasi seperti amblas, sungkur, dan sebagainya.

Tabel 2. 28

Kondisi Infrastruktur Jalan di Kabupaten Barru Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	panjang Jaringan Jalan Kondisi Baik (km)	445,05	444,24	404,21	425,07	359,86
2	panjang Jaringan Jalan Kondisi Rusak Ringan (km)	57,56	59,04	38,94	29,14	135,49
3	panjang Jaringan Jalan Kondisi Rusak Sedang (km)	54,47	53,8	66,53	146,95	58,52
4	panjang Jaringan Jalan Kondisi Rusak Berat (km)	126,28	126,28	173,69	82,94	130,23
5	Jalan Secara Keseluruhan (km)	683,36	683,36	683,36	684,11	684,10
6	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,65	0,65	0,59	0,66	0,52

Sumber : Dinas PUPRPKP Kabupaten Barru Tahun 2024

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Barru dari tahun 2020 menunjukkan tren yang meningkat hingga tahun 2024 kecuali di tahun 2022 mengalami penurunan. Jika dilihat dari presentase, proporsi jalan yang baik mengalami penurunan dari 0,65 pada tahun 2020 menuju 0,52 pada tahun 2024. Angka proporsi jalan dalam kondisi baik memperlihatkan seberapa panjang jalan yang sudah mencapai kelayakan. Jalan dengan kondisi rusak dan rusak berat harus mendapatkan perbaikan segera demi menjaga keselamatan berkendara.

- **Infrastruktur Utilitas Kelistrikan**

Energi listrik merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat penting dan sebagai sumber daya energi yang paling utama yang dibutuhkan dalam berbagai kegiatan. Dalam waktu yang akan datang kebutuhan listrik akan meningkat seiring dengan adanya peningkatan dan perkembangan baik dari jumlah penduduk, jumlah investasi, dan perkembangan teknologi. Dari total pelanggan listrik yang ada di Kabupaten Barru, masih terdapat rumah tangga yang belum dialiri listrik. Rasio elektrofikasi di Kabupaten Barru disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 29

Jumlah pelanggan Listrik Kabupaten Barru Tahun 2020-2024

Kecamatan District	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tanete Riaja	6.541	6.908	7.204	7.435	7.673
Pujananting	3.754	3.964	4.135	4.267	4.404
Tanete Rilau	9.695	10.238	10.678	11.020	11.373
Barru	11.924	12.592	12.624	13.028	13.445
Soppeng Riaja	5.119	5.405	5.638	5.818	6.005
Balusu	5.391	5.693	5.937	6.128	6.324
Mallusetasi	7.314	7.724	8.056	8.314	8.580
Kabupaten Barru	49.738	52.524	54.272	56.010	57.804

Sumber : BPS Kabupaten Barru Tahun 2025

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah pelanggan listrik yang telah meningkat di tahun 2024, dengan mencapai 57.804 pelanggan. Hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah rumah tangga berlistrik yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan sehingga dalam satu rumah terdapat beberapa rumah tangga.

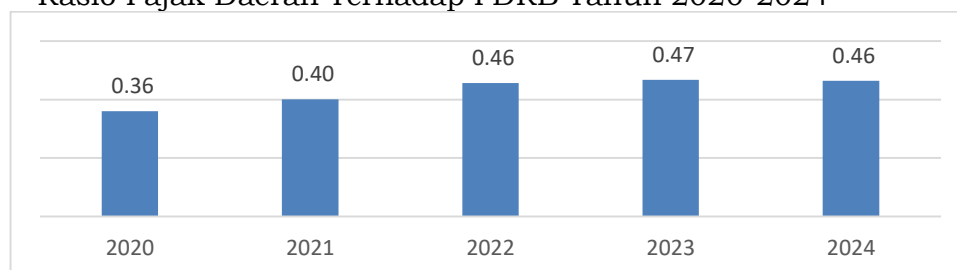
G. Stabilitas Ekonomi Makro

a. Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Persentase rasio tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) yang semakin besar menunjukkan bahwa Semakin tinggi penerimaan pajak daerah, maka semakin besar nilai rasio pajak daerah. Semakin tinggi nilai rasio pajak daerah maka pemerintah daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah.

Grafik 2. 50

Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Barru, Olahan Bappelitbangda Tahun 2025

Dari data yang disajikan pada grafik diatas menunjukkan rasio pajak daerah terhadap PDRB Kabupaten Barru stagnan diangka 0,3-0,5 persen. Hal ini menunjukkan masih rendahnya penerimaan daerah dari sektor pajak daerah sehingga tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Barru masih rendah.

b. Tingkat Inflasi

Inflasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses meningkatnya harga- harga secara umum dan terus menerus (*continue*) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas dipasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinyu, hal ini bila berlebihan dapat berdampak penurunan daya beli masyarakat.

Data laju inflasi Kabupaten Barru sampai hari ini tidak tersedia (tidak dihitung) oleh Kabupaten Barru Dalam Angka (BPS) hanya ada 5 (lima) Kabupaten/Kota yang menjadi sampel perhitungan laju inflasi yaitu Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bone, Kota Makassar, Kota Parepare, dan kota Palopo. Kabupaten/kota yang paling dekat dengan Kabupaten Barru adalah Kota Parepare. Laju inflasi Kabupaten/Kota yang menjadi sampel Kabupaten Barru Dalam Angka di Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2024, laju inflasi di Kota Parepare terkendali dan stabil, dengan angka inflasi year on year (yoy) sebesar 1,73% pada bulan Desember 2024.

c. Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)

IKAD adalah indeks yang menggambarkan kemudahan, keterjangkauan, dan kedalaman akses keuangan di kabupaten/kota yang dihitung dari *supply* dan *demand*. Indeks ini terdiri dari 14 indikator yang terbagi dalam 3 dimensi yaitu Penggunaan, Ketersediaan, dan Kedalaman. Nilai indeks berkisar antara 0-10. Menggambarkan tingkat akses keuangan yang semakin baik. Nilai indeks juga menunjukkan adanya tantangan dalam inklusi keuangan, seperti keterbatasan infrastruktur keuangan, rendahnya literasi keuangan, kepemilikan produk/layanan keuangan yang belum terjangkau, atau kedalaman/kualitas penggunaan

produk/layanan keuangan yang belum memadai.

Kondisi Indeks Akses Keuangan Daerah di Kabupaten Barru untuk tahun 2024 mencapai 5,10. Hal ini menunjukkan masih rendahnya literasi keuangan di Kabupaten Barru, yang ditandai dengan masih kurangnya pemahaman tentang produk dan layanan keuangan formal (bank, asuransi, fintech, dan lain sebagainya), banyak masyarakat masih mengandalkan sistem keuangan informal, seperti arisan, rentenir, atau simpan-pinjam antar tetangga. Selain itu sebaran lembaga keuangan yang tidak merata dimana bank umum, BPR, koperasi simpan pinjam masih terkonsentrasi di Kecamatan Barru dan Soppeng Riaja, di wilayah pegunungan seperti Kecamatan Tanete Riaja dan Pujananting akses ke lembaga keuangan formal terbatas.

Ketergantungan pada sektor primer (pertanian dan perikanan) sehingga masyarakat Barru sebagian besar menggantungkan hidup pada pertanian, peternakan, dan perikanan, yang sering tidak tercatat secara formal dalam sistem keuangan. Selain itu, banyak pelaku usaha mikro tidak memiliki agunan atau dokumen formal, sehingga sulit mengakses kredit perbankan. Pendapatan rumah tangga yang masih rendah juga berkontribusi terhadap rendahnya akses terhadap keuangan formal yang ditandai dengan masyarakat berpenghasilan rendah cenderung tidak aktif menggunakan layanan keuangan formal, karena khawatir akan biaya, bunga, atau sanksi keterlambatan. Hal lain adalah akses digital belum merata sehingga wilayah dengan jaringan internet lemah membatasi pemanfaatan layanan keuangan digital seperti *mobile banking*, *e-wallet*, dan QRIS.

2.1.4. ASPEK PELAYANAN UMUM

A. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

1. Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk mengukur reformasi hukum. IRH dilakukan untuk meningkatkan tata kelola hukum yang merata di seluruh Indonesia.

Tujuan penilaian ini adalah untuk menilai pelaksanaan reformasi hukum dalam rangka mewujudkan birokrasi yang kapabel sesuai sasaran road map reformasi birokrasi tahun 2020-2024.

Selain itu, penilaian ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Barru.

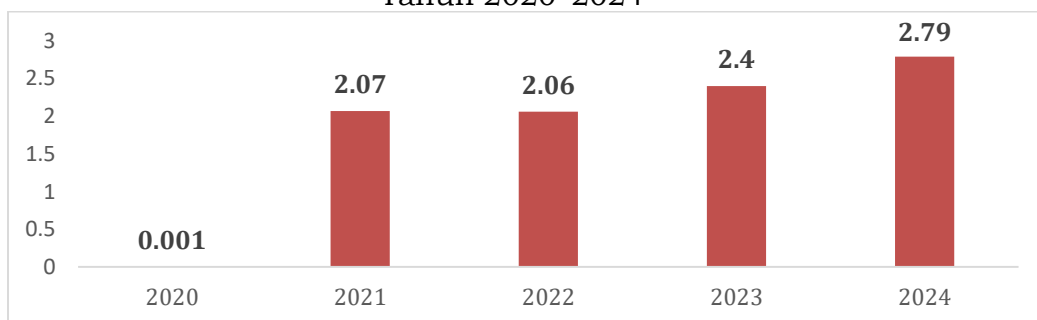
Berdasarkan penilaian yang dilakukan, telah disimpulkan hasil Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Barru tahun 2023 adalah 57.79 dengan kategori CC (Cukup), namun meningkat drastis pada tahun 2024 sebesar 96.12 poin dengan kategori AA (Istimewa).

2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kesiapan dan kemampuan suatu daerah dalam menerapkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam sistem pemerintahannya. SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memberikan layanan kepada masyarakat, pelaku bisnis, aparatur sipil negara, dan instansi pemerintah. SPBE dapat mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel. SPBE juga dapat meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik. Capaian indeks SPBE Kabupaten Barru disajikan pada grafik berikut:

Grafik 2. 51

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Barru Tahun 2020–2024



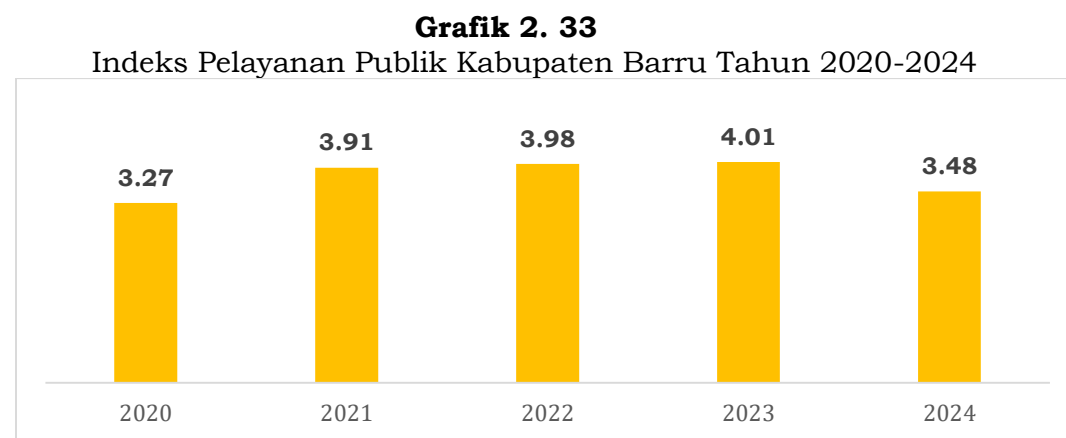
Sumber : Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kab.Barru, tahun 2025

Berdasarkan grafik diatas, capaian indeks SPBE Kabupaten Barru di tahun 2024 sebesar 2,79 dari skala 1-5 masuk dalam kategori cukup. Indeks SPBE Kabupaten Barru masih lebih rendah bila dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 3,09 poin. Rendahnya nilai indeks SPBE Kabupaten Barru disebabkan masih belum memiliki kebijakan internal yang mengatur terkait arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, belum adanya

Perencanaan Strategis SPBE, belum memiliki tatakelola teknologi informasi dan komunikasi terkait pembangunan aplikasi SPBE, layanan pusat data dan penggunaan sistem penghubung layanan, serta penerapan manajemen SPBE belum optimal.

3. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik adalah (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Penyusunan indikator IPP dihasilkan melalui persilangan antara 6 prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik (keadilan, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, berdaya guna, dan aksesibilitas) dengan 6 aspek penilaian kinerja instansi terhadap pelayanan publik (kebijakan pelayanan, sarana prasarana, konsultasi dan pengaduan, profesionalisme SDM, sistem informasi pelayanan publik, dan inovasi pelayanan).



Sumber : Bagian Organisasi Setda Barru, 2025

Dari grafik di atas menunjukkan capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Barru mengalami peningkatan sejak tahun 2020 hingga tahun 2023, namun pada tahun 2024 mengalami penurunan hingga IPP hanya sebesar 3,48 poin dan masuk dalam kategori sangat baik.

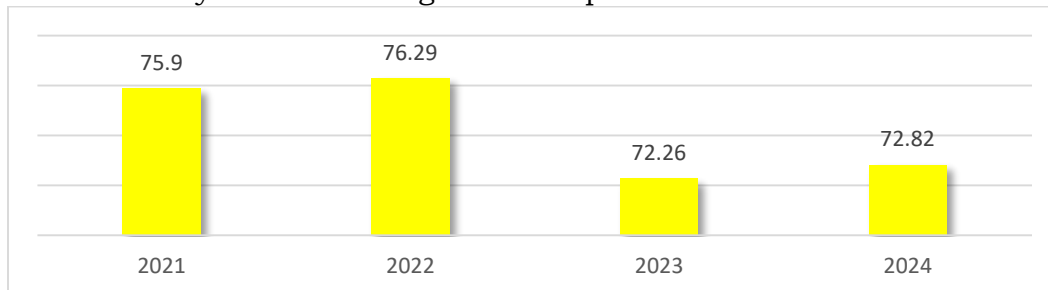
4. Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI)

Salah satu alat ukur yang digunakan untuk memetakan tingkat integritas lembaga publik, mencerminkan risiko korupsi, dan menilai upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan adalah indeks

Survey Penilaian Integritas (SPI). SPI membantu mengidentifikasi area-area yang rentan terhadap praktik korupsi di berbagai lembaga publik, termasuk di Pemerintah Daerah. SPI juga mengukur efektivitas upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan oleh instansi terkait. SPI dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pengguna layanan, pegawai, dan ahli.

Grafik 2. 34

Indeks Survey Penilaian Integritas Kabupaten Barru Tahun 2021-2024



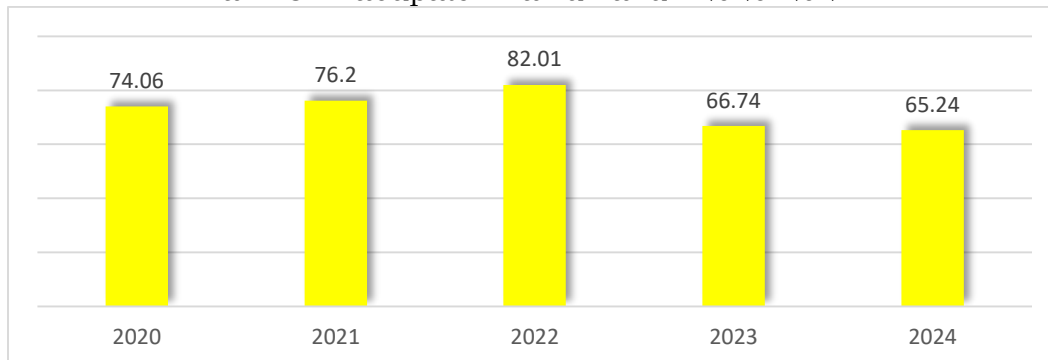
Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Barru, 2025

Secara umum, pelaksanaan tugas di Pemda Kabupaten Barru memiliki risiko korupsi yang tinggi, masuk dalam kategori rentan, setidaknya dalam satu komponen pelaksanaan tugas, seperti penyalahgunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, adanya konflik kepentingan yang dipengaruhi oleh suku, agama, hubungan kekerabatan, almamater, dan sejenisnya, juga adanya atasan yang memberi perintah tidak sesuai aturan, risiko gratifikasi/suap, termasuk pegawai yang melanggar aturan

5. Nilai MCP KPK

MCP KPK merupakan program kolaborasi yang bertujuan untuk mendorong optimalisasi upaya pencegahan korupsi agar tercipta tata kelola Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi. MCP dibangun sebagai salah satu tools (perangkat) untuk membantu pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan. MCP meliputi delapan area perubahan, yaitu perencanaan, penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, Pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah. Capaian nilai MCP KPK Kabupaten Barru dalam 5 tahun terakhir disajikan sebagai berikut:

Grafik 2. 35
 Nilai MCP Kabupaten Barru Tahun 2020-2024



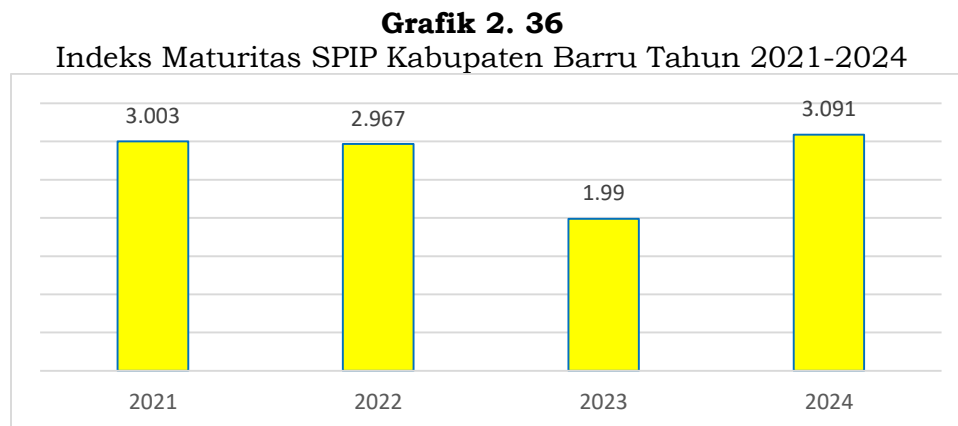
Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Barru, 2025

Berdasarkan data di atas, nilai MCP KPK berfluktuatif dari tahun 2020-2024, dan mengalami penurunan yang signifikan di tahun 2024 mencapai 65,24. Penurunan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor utamanya memang adalah pemenuhan dokumen bukti tidak 100% terpenuhi, hanya 96.50%. Beberapa indikator dan sub indikator yang tidak terpenuhi, seperti pelaksanaan sosialisasi dan kampanye antikorupsi untuk ASN, eksekutif dan legislatif serta masyarakat dan stakeholder lainnya, dan sub indikator hasil survey kepuasan masyarakat terutama di sektor layanan publik dan Pengadaan barang dan jasa.

6. Indeks Maturitas SPIP

Untuk mengetahui kualitas dan tingkat efektifitas sistem pengendalian intern maka dilakukan penilaian maturitas SPIP yakni suatu proses penilaian yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengevaluasi kualitas dan efektivitas sistem pengendalian intern yang diterapkan oleh suatu entitas pemerintah. Sistem pengendalian intern menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Tujuan SPIP yaitu efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. SPIP sebagai sistem melingkupi seluruh proses manajemen/tata kelola pemerintahan mulai dari proses perencanaan dan penetapan tujuan organisasi,

pelaksanaan program dan kegiatan, dan proses yang tidak kalah penting adalah evaluasi. Capaian indeks maturitas SPIP Kabupaten Barru Tahun 2021-2024 disajikan sebagai berikut:



Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Barru, 2025

Capaian SPIP Kabupaten Barru di tahun 2023 sebesar 1.990 poin dan di tahun 2024 sebesar 3.091 poin dari skala 1-5. Peningkatan nilai SPIP pada tahun 2024 terjadi karena pelaksanaan penilaian mandiri oleh perangkat daerah. Penilaian mandiri perangkat daerah setiap tahun seharusnya dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah untuk senantiasa menilai dan memantau penyelenggaraan SPIP. Adapun tantangan penyelenggaraan SPIP antara lain, penyelenggaraan masih terpisah-pisah belum terintegrasi, belum diarahkan untuk mengawal tujuan pemda/organisasi, belum terintegrasi dalam pengendalian atas fraud (kecurangan), penilaian masih terkesan document based, serta Area of Improvement (AoI) dan rekomendasi masih parsial dan belum dipantau

B. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Subtansial

1. Persentase Penegakan Perda

Penegakan Peraturan Daerah (PERDA) merupakan salah satu tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja. Setiap PERDA yang dihasilkan Kabupaten Barru menjadi tanggung jawab Satpol PP dan Damkar dalam Penegakannya.

Berdasarkan data selama 5 (lima) tahun selama kurun waktu 2020-2024 jumlah penyelesaian penegakan perda sebesar 100 persen. Meskipun mencapai 100 persen, namun Satpol PP dan Damkar masih memiliki kendala dan tantangan diantaranya

disebabkan karena terbatasnya personil Satpol PP dan Damkar yang mengikuti diklat PPNS, rendahnya pemahaman terkait tugas operasional dan belum optimalnya kerjasama dengan pihak terkait dalam penegakan perda.

2. Persentase Capaian Aksi HAM

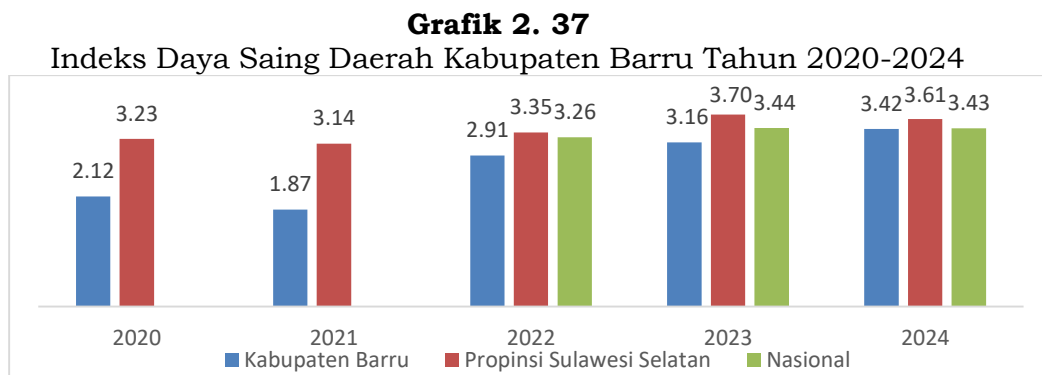
Capaian pelaksanaan aksi HAM diukur melalui penilaian HAM yang dilakukan secara terencana dan sistematis. Penilaian HAM oleh Panitia nasional RANHAM dilakukan terhadap pelaksanaan HAM oleh pemerintah Kabupaten Barru sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Perpres 53 Tahun 2021.

Dari hasil pelaporan RANHAM di tahun 2024 dapat dilihat bahwa capaian secara umum untuk Aksi HAM Pemerintah Kabupaten Barru adalah 33.30 %.

C. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

1. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Di Kabupaten Barru tahun 2022 nilai indeks daya saing daerah sebesar 2,91, masih lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 3,35 dan Nasional sebesar 3,26. Capaian indeks daya saing daerah Kabupaten Barru dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.



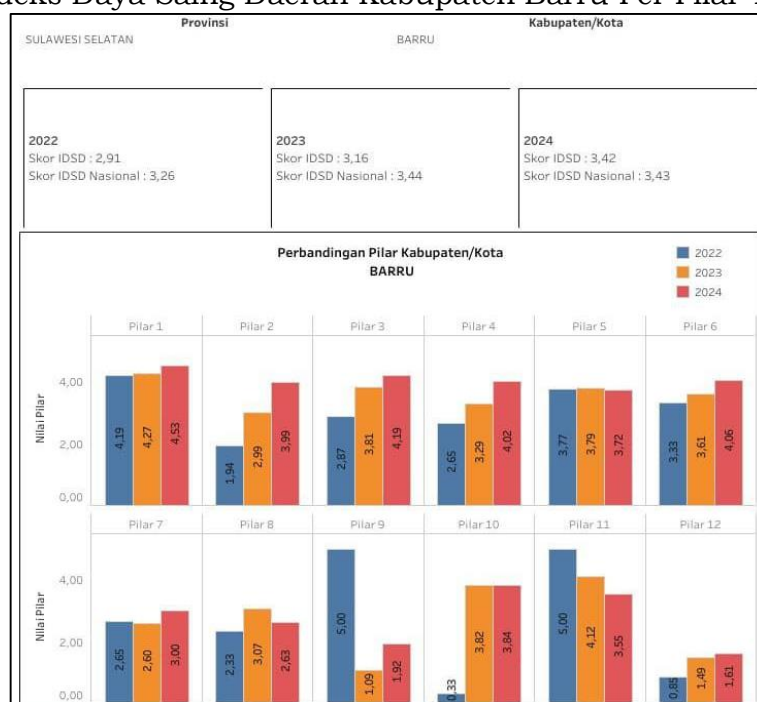
Sumber : Badan Riset dan Inovasi Nasional, tahun 2025

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengeluarkan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) tahun 2022 yang mencakup 34 provinsi

dan 514 kabupaten/kota. Perhitungan IDSD didasarkan pada empat komponen, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Belum optimalnya daya saing daerah Kabupaten Barru dikontribusi oleh rendahnya pasar produk yang mendorong efisiensi di dalam sistem produksi, atau dengan kata lain diperlukan penciptaan lingkungan yang mampu mendorong para produsen untuk menjadi lebih inovatif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan pasar. Peningkatan daya saing daerah perlu didorong dengan hadirnya kebijakan daerah yang mendukung fleksibilitas pasar tenaga kerja, pelatihan keterampilan, dan insentif bagi perusahaan untuk merekrut lebih banyak pekerja yang dapat membantu menekan angka pengangguran.

Grafik 2. 38

Nilai Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Barru Per Pilar Tahun 2024



Sumber : Dokumen Indeks Daya Saing Daerah (BRIN), Tahun 2025

Berdasarkan Dokumen Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2024 (BRIN, 2024), komponen pilar yang unggul di Kabupaten Barru adalah Pilar 1 “Institusi” dan Pilar 11 “Dinamisme Bisnis”. Sementara itu, komponen pilar yang terendah adalah Pilar 9 “Sistem Keuangan” dan Pilar 12 “Kapabilitas Inovasi”.

D. Kinerja Setiap Urusan Pemerintah Daerah

Pembangunan di Kabupaten Barru dilaksanakan secara berkesinambungan. Olehnya itu evaluasi RPJMD Tahun 2021-2026 menjadi bagian penting untuk menjadi dasar perumusan masalah dan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada periode RPJMD 2025-2029.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil pemilihan Tahun 2020 menjabat sampai dengan Tahun 2024, sehingga evaluasi RPJMD berdasarkan masa jabatan yakni hingga tahun 2024. Hasil evaluasi capaian kinerja pelaksanaan RPJMD Kabupaten Barru tahun 2021-2026 sebagai berikut:

❖ **Capaian Indikator Kinerja Makro Daerah**

Penetapan indikator makro adalah gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum dengan menilai capaian kinerja masing-masing indikator kinerja secara makro. Adapun capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan indikator makro disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 30
Capaian Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Barru berdasarkan Indikator Kinerja Makro Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Makro	Satuan	2020		2021		2022		2023		2024	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	71	72,43	71,43	72,56	71,79	72,96	72,16	73,8	72,57	74,51
2	Tingkat Kemiskinan	%	8,26	8,26	9,08	8,68	7,45	8,40	6,67	8,46	6,41	8,31
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,39	6,39	6,17	6,74	5,88	5,32	5,31	5,89	5,14	6,42
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	0,87	0,87	3,98	4,77	4,47	5,11	5,91	3,51	6,64	4,92
5	PDRB Perkapita	Juta Rp	40,3	42,47	41,98	43,43	43,9	47,50	47,08	50,16	50,92	52,28
6	Rasio Gini	Angka	0,360	0,360	0,360	0,359	0,35	0,366	0,34	0,371	0,330	0,310

Sumber : Olahan Bappeliitbangda, Tahun 2025

Dari tabel diatas menunjukkan kinerja penyelenggaraan daerah berdasarkan indikator makro secara umum sebagian telah mencapai target dan sebagian lagi masih belum sepenuhnya mencapai target yang dicanangkan dalam RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021-2026. Untuk indikator IPM menunjukkan keberhasilan pemerintah Kabupaten Barru meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan di Kabupaten Barru. Namun demikian peningkatan IPM tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif dan cenderung menurun di tahun 2023. Demikian pula angka kemiskinan dan tingkat pengangguran yang belum mencapai target sehingga perlu menjadi prioritas pembangunan 5 tahun ke depan.

❖ **Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah**

Untuk evaluasi terhadap indikator kinerja utama sebagai gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran

daerah sebagaimana yang dicanangkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 31
Capaian Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Barru berdasarkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022-2024

No	Indikator	Satuan	2022		2023		2024		Interpretasi
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	71,79	72,96	72,16	73,8	72,57	74,51	Tercapai
2	Indeks Pendidikan	Poin	69,94	65,31	70,28	66,3	70,83	67,19	Belum Tercapai
3	Indeks Kesehatan	Poin	76,69	80,57	76,93	80,88	77,26	81,15	Tercapai
4	Paritas Daya Beli	Juta Rupiah	11,12	11,28	11,35	11,71	11,63	12,06	Tercapai
5	Persentase Penurunan Korban meninggal dan hilang karena bencana	%	0,011	0,061	0,009	0,077	0,006		
6	Persentase Peningkatan Desa/Kel Pemajuan Kebudayaan dari 0 menjadi 12,73%	%	5,45	0,05	7,25	7,25	9,09	10	Tercapai
7	Indeks Ketahanan Bencana	Poin	0,69	0,64	0,72	0,54	0,75	0,51	Belum Tercapai
8	Persentase Objek Kemajuan Budaya yang terpelihara	%	9,52	0,083	11,11	11,11	12,7	11,66	Belum Tercapai
9	Indeks Williamson	Poin	0,29	0,29	0,28	0,27	0,27	0,26	Tercapai
10	Indeks daya saing daerah Pilar infrastruktur	Poin	3,82	1,95	3,874	1,95	3,881	3,42	Belum Tercapai
11	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,47	5,11	5,91	3,51	6,64	4,92	Belum Tercapai
12	Persentase Kontribusi Sektor-sektor strategis terhadap PDRB	%	51,94	50,27	52,52	50,27	52,97	61,8	Tercapai
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	73,73	72,04	74	78,13	74,26	76,65	Tercapai
14	Indeks Gini	Poin	0,35	0,366	0,34	0,371	0,33	0,34	Belum Tercapai
15	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,88	5,32	5,31	5,89	5,14	6,42	Belum Tercapai
16	Angka Kemiskinan	%	7,45	8,40	6,67	8,46	6,41	8,31	Belum Tercapai
17	Nilai Reformasi Birokrasi	Poin	65	50,13	70	50,13	73		
18	Nilai SAKIP	Poin	60	57,34	65	60,04	70		
19	Indeks Pelayanan Publik	Poin	3,51	3,96	3,7	3,96	4		
20	Angka Kriminalitas	Per 10.000 pddk	6,5	0,04	6,1	0,04	5,9		
21	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	Poin	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001		

Sumber : Olahan Bappelitbangda, Tahun 2025

❖ **Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal**

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Adapun capaian untuk SPM dari 6 Bidang adalah sebagai berikut :

(1) SPM Bidang Pendidikan

Adapun SPM bidang pendidikan diantaranya adalah :

1. Pendidikan Anak usia dini
2. Pendidikan Dasar (SD & SMP)
3. Pendidikan Kesetaraan

Untuk capaian 3 SPM bidang pendidikan dalam kurun waktu 5 tahun yakni tahun 2019 – 2024 tidak pernah mencapai 100%, sampai dengan tahun 2024 capaiannya sebagai berikut :

- Pendidikan Anak usia dini dengan capaian 78,31%
- Pendidikan Dasar (SD) dengan capaian 99,30%
- Pendidikan Dasar (SMP) dengan capaian 96,51%
- Pendidikan Kesetaraan dengan capaian 98,30%

Ketiga SPM ini tidak menyentuh capaian 100%, dengan faktor-faktor penyebab diantaranya :

1. Akses Pendidikan Tidak Merata. Di beberapa wilayah Kabupaten Barru, anak usia sekolah kesulitan mengakses layanan pendidikan karena Letak geografis yang sulit dijangkau dan Minimnya sarana transportasi;
2. Masih ada anak yang putus sekolah atau tidak melanjutkan karena terkendala Faktor ekonomi.

(2) SPM Bidang Kesehatan

Adapun SPM bidang Kesehatan diantaranya adalah :

1. Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil
2. Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Bersalin
3. Pelayanan Kesehatan Bagi Bayi Baru Lahir
4. Pelayanan Kesehatan Bagi Balita
5. Pelayanan Kesehatan Bagi usia pendidikan dasar
6. Pelayanan Kesehatan Bagi Usia Produktif
7. Pelayanan Kesehatan Bagi Usia Lanjut
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
9. Pelayanan Kesehatan Bagi Diabetes Militus
10. Pelayanan Kesehatan Bagi Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat

11. Pelayanan Kesehatan Bagi tuberkolosis
12. Pelayanan Kesehatan Bagi penderita HIV

Untuk capaian 12 SPM bidang kesehatan dalam kurun waktu 5 tahun yakni tahun 2019 – 2024 tidak pernah mencapai 100%, sampai dengan tahun 2024 capaiannya sebagai berikut :

1. Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil dengan capaian 70 persen,
2. Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Bersalin dengan capaian 73 persen,
3. Pelayanan Kesehatan Bagi Bayi Baru Lahir dengan capaian 76 persen,
4. Pelayanan Kesehatan Bagi Balita dengan capaian 82 persen,
5. Pelayanan Kesehatan Bagi usia pendidikan dasar dengan capaian 99 persen,
6. Pelayanan Kesehatan Bagi Usia Produktif dengan capaian 93 persen,
7. Pelayanan Kesehatan Bagi Usia Lanjut dengan capaian 70 persen,
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi dengan capaian 89 persen,
9. Pelayanan Kesehatan Bagi Diabetes Militus dengan capaian 112 persen,
10. Pelayanan Kesehatan Bagi Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat dengan capaian 102 persen,
11. Pelayanan Kesehatan Bagi tuberkolosis dengan capaian 72 persen,
12. Pelayanan Kesehatan Bagi penderita HIV dengan capaian 71 persen.

Ke-12 SPM ini tidak menyentuh capaian 100%, dengan faktor-faktor penyebab diantaranya :

- Keterbatasan Fasilitas Kesehatan;
- Kekurangan Tenaga Kesehatan dan penyebaran tenaga kesehatan yang tidak merata;
- Tidak semua sasaran layanan (misalnya bayi baru lahir, balita stunting, ibu hamil, penderita TB) terdata dengan baik;
- Masih ada masyarakat yang enggan memanfaatkan layanan kesehatan dasar karena Kurangnya informasi, Faktor budaya atau kepercayaan serta takut biaya.

(3) SPM Bidang pekerjaan Umum

Adapun SPM bidang Pekerjaan umum diantaranya adalah :

1. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
2. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

Untuk capaian 2 SPM bidang pekerjaan umum dalam kurun waktu 5

tahun yakni tahun 2019 – 2024 untuk pengolahan air limbah domestik telah terlaksana 100%, namun untuk pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari sampai dengan tahun 2024 capainnya berada pada 97%. Adapun faktor penyebab air minum tidak mencapai target adalah sebagai berikut :

- Banyak wilayah belum memiliki jaringan sistem penyediaan air minum (SPAM) yang memadai.
- Sumber air bersih belum tersedia merata

(4) SPM Bidang Perumahan

Adapun SPM bidang Perumahan diantaranya adalah :

1. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
2. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota

Untuk capaian 2 SPM bidang perumahan dalam kurun waktu 5 tahun yakni tahun 2019 – 2024 telah terlaksana 100%. Penerapan pelaksanaan SPM berhasil dikarenakan faktor penentu SPM ini adalah Pemerintah daerah bekerja sama dengan organisasi keagamaan seperti BAZNAS untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana. Sementara untuk SPM fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota tidak pernah dilaksanakan karena tidak ada rumah yang terkena relokasi karena pembangunan.

(5) SPM Bidang Trantibumlinmas

Adapun SPM bidang trantibunlinmas diantaranya adalah :

1. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum
2. pelayanan informasi rawan bencana
3. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
4. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran

Untuk capaian 4 SPM bidang trantibumlinmas dalam kurun waktu 5 tahun yakni tahun 2019 – 2024 telah terlaksana 100%. Penerapan pelaksanaan SPM berhasil dikarenakan faktor-faktor penentu berikut ini :

- Ketersediaan dan Kapasitas SDM, SDM juga didukung dengan pelatihan berkala, termasuk keterampilan non-teknis.
- Koordinasi Lintas Sektor.

(6) SPM Bidang Sosial

Adapun SPM bidang sosial diantaranya adalah :

1. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar

panti

2. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti
3. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti
4. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
5. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota

Untuk capaian 5 SPM bidang sosial dalam kurun waktu 5 tahun yakni tahun 2019 – 2024 telah terlaksana 100%. Penerapan pelaksanaan SPM berhasil dikarenakan faktor-faktor penentu berikut ini :

- Sasaran layanan bidang sosial, seperti lansia atau anak terlantar telah terdata dengan baik, sehingga lebih mudah dilayani secara menyeluruh.
- Adanya dukungan dari pemerintah pusat, seperti Program bantuan sosial (PKH, sembako, rehab sosial, dll), Dukungan ini membantu daerah menjalankan layanan SPM sosial tanpa kendala keuangan yang besar.
- Pemerintah daerah bekerja sama dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) serta organisasi keagamaan seperti BAZNAS. Kolaborasi ini membuat pelayanan bisa lebih cepat, luas, dan efisien, sehingga target 100% bisa tercapai.

❖ **Capaian Kinerja Setiap Urusan Pemerintah Daerah**

Untuk evaluasi Kinerja Setiap Urusan Pemerintah Daerah dilihat dari urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren ini dibagi dua menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib itu sendiri terbagi menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (1) pendidikan; (2) kesehatan; (3) pekerjaan umum dan penataan ruang; (4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman; (5) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan (6) sosial. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (1) tenaga kerja; (2) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (3) pangan; (4) pertanahan; (5) lingkungan hidup; (6) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; (7) pemberdayaan masyarakat dan desa; (8) pengendalian penduduk dan keluarga berencana; (9) perhubungan; (10) komunikasi dan informatika; (11) koperasi, usaha kecil, dan menengah; (12) penanaman modal; (13) kepemudaan dan olah raga; (14) statistik; (15) persandian; (16)

kebudayaan; (17) perpustakaan; dan (18) kearsipan.

Urusan pemerintahan pilihan meliputi: (1) kelautan dan perikanan; (2) pariwisata; (3) pertanian; (4) kehutanan; (5) energi dan sumberdaya mineral; (6) perdagangan; (7) perindustrian; dan (8) transmigrasi.

Selain urusan pemerintahan wajib dan pilihan sebagaimana yang diuraikan di atas, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam melaksanakan fungsi pendukung urusan pemerintahan dan penunjang urusan pemerintahan. Fungsi pendukung urusan pemerintahan terdiri dari Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Fungsi penunjang urusan pemerintahan tersebut mencakup: (1) perencanaan; (2) keuangan; (3) kepegawaian; (4) pendidikan dan pelatihan; (5) penelitian dan pengembangan; dan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mencakup: Unsur Pengawasan Urusan Pemerintah (Inspektorat), Unsur Kewilayahan (Kecamatan); Unsur Pemerintahan Umum (kesatuan bangsa dan politik dalam negeri).

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bersifat konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/ atau susunan pemerintahan yaitu semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah, yang diselenggarakan bersama oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.

➤ **Bidang Urusan Pendidikan**

a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Taman kanak-kanak adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan mulai pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal dan informal. Perkembangan pendidikan anak usia dini (PAUD) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 32
Pendidikan Anak Usia ini (PAUD) Kabupaten Barru
Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)	80,05	91,38	74,14	94,14	78,31

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat angka partisipasi PAUD di Kabupaten Barru, mengalami fluktuatif sampai tahun 2024. Jumlah anak usia 5 – 6 tahun yang bersekolah pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami penurunan, sehingga dibutuhkan upaya peningkatan minat orang tua untuk mengikutsertakan anaknya pada jenjang pendidikan PAUD.

b. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah angka perbandingan antara banyaknya murid dari jenjang pendidikan tertentu dengan banyaknya penduduk usia sekolah pada jenjang yang sama dinyatakan dalam persen. Angka partisipasi kasar (APK) yang meliputi APK SD/MI, APK SMP/MTs di Kabupaten Barru tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 33
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A
dan SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Partisipasi Kasar SD/MI (%)	100,67	101,57	103,23	98,83	96,14
2	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs (%)	112,09	88,87	91,41	96,59	96,50

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Barru Tahun 2025

Tabel diatas menunjukkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Barru pada jenjang SD Sederajat dan jenjang SMP Sederajat tahun 2020 – 2024 berfluktuatif. APK tertinggi pada jenjang SD Sederajat yaitu 103,23% pada tahun 2022, kemudian jenjang SMP Sederajat sebesar 112,09% pada tahun 2020. Penyebab APK SD/Sederajat maupun SMP/Sederajat mencapai lebih dari 100%, disebabkan karena terdapat anak berusia kurang dari 7 tahun dan anak berusia lebih dari 15 tahun yang sekolah di jenjang SD dan SMP/Sederajat.

c. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI/ Paket A dan SMP/ MTs/ Paket B

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih

bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Angka partisipasi murni yang meliputi angka partisipasi murni SD/MI, angka partisipasi murni SMP/MTs di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 34

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket Adan SMP/MTs/ Paket B di Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	98,25	98,20	99,39	98,82	99,30
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	81,38	82,28	82,21	96,59	96,51

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Barru Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, selama kurun waktu 5 (lima) tahun, APM SD/Sederajat menunjukkan kecenderungan meningkat, sedangkan APM/SMP Sederajat cenderung berfluktuasi. Baik APM SD/Sederajat maupun APM SMP/Sederajat belum mencapai angka ideal karena terdapat anak usia sekolah yang tidak sekolah dan anak usia sekolah yang sekolah tidak pada jenjang kelompok usianya.

d. Angka partisipasi sekolah (APS) SD/ MI/ Paket A dan SMP/ MTs/ Paket B

Angka partisipasi sekolah merupakan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai dan dihitung berdasarkan jumlah murid kelompok usia pendidikan yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. APS digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang telah bersekolah di semua jenjang pendidikan dan merupakan alat ukur pemerataan pendidikan yang paling mendekati dan paling baik jika dibandingkan dengan APK atau APM. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Barru, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 35

Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A (%)	97,69	98,19	99,38	98,82	99,30
2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B (%)	93,41	95,32	94,01	96,59	96,51

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel di atas, dapat diuraikan bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A di Kabupaten Barru untuk periode 2020-2024 berfluktuatif. Yang mana capaian tertinggi pada tahun 2019 sebesar 100,40 persen dan capaian terendah pada tahun 2020 dengan angka sebesar 97,69 persen. Sedangkan pada tingkat pendidikan SMP/MTs/Paket B pada tahun 2020-2024 juga berfluktuatif, dimana capaian tertinggi pada tahun 2019 sebesar 107,38% dan capaian terendah pada tahun 2020 sebesar 93,41%.

e. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI dan SMP/MTs

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI dan SMP/MTs merupakan proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Angka putus sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 36

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI & SMP/MTs Kab.Barru Tahun 2020 – 2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)	0,44	0,45	0,52	0,52	0,76
2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	1,19	1,36	1,90	1,93	1,92

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel di atas, angka putus sekolah jenjang SD/MI dan SMP/MTs fluktuatif namun cenderung meningkat dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir. Beberapa faktor yang menyebabkan tingginya APS SD/MI dan SMP/MTs antara lain yaitu siswa yang motivasi belajarnya rendah, tingkat ekonomi keluarga, dan karena alasan sosial budaya lainnya.

f. Angka Kelulusan (AL) SD/MI dan SMP/MTs

Angka kelulusan sebagai salah satu indikator yang mencerminkan keberhasilan proses belajar mengajar disekolah. Semakin baik proses belajar mengajar, maka persentase angka kelulusan semakin baik pula. Angka Kelulusan (AL) SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 37

Angka Kelulusan (AL) SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	100	100	98,63	99,66	99
2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	100	100	97,82	98.85	99

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Barru Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa AL SD/MI dan AL

SMP/MTs pada tahun 2020 dan 2021 menunjukkan pencapaian hingga 100%, namun pada Tahun 2022 dan 2023 mengalami penurunan hanya diangka 98 – 99%. Hal ini disebabkan karena kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan sepenuhnya menjadi kewenangan satuan pendidikan.

g. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

Angka melanjutkan adalah persentase jumlah lulusan pada setiap jenjang pendidikan yang melanjutkan ke jenjang berikutnya. Angka Melanjutkan berguna untuk melihat apakah penduduk usia sekolah menyelesaikan pendidikannya dengan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau tidak. Idealnya adalah semua lulusan melanjutkan pendidikannya ke jenjang berikutnya. Namun di Kabupaten Barru pada tahun 2019 hingga tahun 2023, angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs melebihi 100% disebabkan karena jumlah siswa/siswi yang masuk sekolah SMP/MTs lebih besar dari jumlah siswa/siswi yang lulus SD/MI yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 38
 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI dan SMP/MTs
 di Kab.Barru 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	122,23	93,61	90,29	93,52	93,52

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel di atas, selama tahun 2020 - 2024 Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs berfluktuatif. Capaian tertinggi pada tahun 2020 sebesar 122,23 persen, sedangkan capaian terendah pada tahun 2024 sebesar 93,52 persen.

h. Sekolah pendidikan SD/MI dan SMP/MTs kondisi bangunan baik

Sekolah dengan kondisi bangunan baik merupakan perbandingan antara jumlah sekolah pendidikan SD/MI dan SMP/MTs dengan kondisi bangunan baik dengan jumlah seluruh sekolah SD/MI dan SMP/MTs yang dinyatakan dalam persen. Sekolah mempunyai jumlah ruang kelas yang berbeda-beda dan kondisi ruang kelas terbagi atas 4 (empat) kondisi yaitu kondisi baik, rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat. Sekolah yang mempunyai ruang kelas dengan kondisi baik baik dan rusak ringan dinyatakan sebagai sekolah dengan kondisi bangunan baik karena ruang kelas yang rusak ringan bisa di biayai oleh dana bantuan

operasional sekolah (BOS). Sekolah pendidikan SD/MI dan SMP/MTs kondisi bangunan baik di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 39

Sekolah pendidikan SD/MI dan SMP/MTs kondisi bangunan baik di Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
A SD/MI						
1	Jumlah Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik (Unit)	210	212	212	213	209
2	Jumlah Seluruh Sekolah SD/MI (Unit)	226	226	226	226	226
3	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%)	94,23	98,81	98,81	94,24	92,47
B SMP/MTs						
1	Jumlah Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (Unit)	29	29	30	46	48
2	Jumlah Seluruh Sekolah SMP/MTs (Unit)	53	54	54	54	58
3	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (%)	55	53,70	55,56	85,19	88,88

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Barru Tahun 2025

Selama kurun waktu 2020 – 2024 Persentase bangunan SD/MI dan SMP/MTs dengan kondisi bangunan baik cenderung berfluktuatif. Hingga tahun 2024 Sekolah pendidikan SD/MI dan SMP/MTs kondisi bangunan baik sebesar 92,47 persen untuk tingkatan SD/MI, dan 88,88 persen untuk tingkatan SMP/MTs.

i. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar (SD dan SMP)

Rasio ketersediaan sekolah dapat menunjukkan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan. Rasio ketersediaan sekolah ini dihitung untuk tiap 10.000 penduduk. Rasio ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Kabupaten Barru disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 40

Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar (SD dan SMP) Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar (SD) (%)	100,06	100,51	99,50	116,51	118,61
2	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar (SMP) (%)	52,10	34,07	38,24	51,99	50,88

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Barru Tahun 2025

Apabila dicermati dari tahun 2020 – 2024 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar (SD) dan tingkatan SMP/MTs di kabupaten Barru kondisinya cenderung berfluktuatif.

j. Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar (SD dan SMP)

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru berdasarkan jenjang pendidikan per 10.000 jumlah murid berdasarkan jenjang pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pembelajaran. Rasio jumlah guru/murid sekolah pendidikan dasar (SD dan SMP) Kabupaten Barru disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 41

Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar SD	1.100,34	1.130,48	664,98	868,63	763,06
2	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar SMP	1.216,47	1.038,69	1.434,29	777,51	665,03

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Barru Tahun 2025

Apabila dicermati dari tahun 2020 – 2024 rasio guru dan murid untuk tingkatan Sekolah Pendidikan Dasar (SD) dan SMP di kabupaten Barru cenderung fluktuatif, dengan capaian tertinggi untuk tingkatan SD di tahun 2021 sebesar 1.130,48, mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2024 sebesar 763,06. Sementara untuk tingkatan SMP capaian tahun 2020 sebesar 1.216,47 mengalami penurunan sebesar apabila dibandingkan dengan capaian tertinggi pada tahun 2024 sebesar 665,03.

k. Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)

Proporsi penduduk usia 15 tahun keatas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya tanpa harus mengerti yang dibaca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun keatas. Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 42

Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidakbuta aksara) Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)	90,42	90,81	89,17	75,48	99,02

Sumber : BPS Tahun 2025

Apabila dicermati dari tahun 2020 – 2024, Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) Kabupaten Barru berfluktuasi, dengan capaian tertinggi pada tahun 2024 sebesar 99,02 persen.

1. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Guru sebagai tenaga pendidik berinteraksi langsung dengan peserta didik sehingga harus memiliki keahlian atau kualifikasi atau kompetensi dalam menjalankan tugas dengan baik untuk mencerdaskan peserta didik, hal ini sesuai dengan undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang mensyaratkan bahwa guru wajib memiliki latar belakang akademis strata satu (S1) atau diploma empat (D-IV). Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 43

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Di Kab.Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)	88,24	94,89	100	100	98,05

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Barru Tahun 2025

Perkembangan jumlah pendidik yang memenuhi kualifikasi S1/D4 Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel di atas. Selama kurun waktu tahun 2020 – 2024 jumlah pendidik yang memenuhi kualifikasi akademik cenderung meningkat.

➤ **Bidang Urusan Kesehatan**

Kesehatan merupakan salah satu bidang urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Capaian indikator kesehatan antara lain:

a. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per 1000 kelahiran hidup). Angka kematian

bayi (AKB) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 44
 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup
 Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 tahun) (Jiwa)	10	9	46	27	35
2	Jumlah kelahiran hidup (Jiwa)	3.068	3.047	2.983	2.780	2.385
3	Angka Kematian Bayi (AKB) Bayi per 1000 kelahiran hidup	3	3	15	10	15

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025

AKB pada tahun 2020 – 2024 cenderung berfluktuatif. Hal ini menunjukkan bahwa program-program untuk mengurangi AKB harus tetap di kedepankan, misalnya program pelayanan kesehatan ibu hamil, program imunisasi, pencegahan penyakit menular pada anak-anak, program ASI Eksklusif, program tentang gizi serta pemberian makanan sehat untuk ibu hamil dan balita. Pada tahun 2020 hingga 2024 mengalami fluktuasi.

b. Angka kelangsungan hidup bayi

Angka Kelangsungan Hidup Bayi adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun dimana $AKHB = 1 - \text{Angka Kematian Bayi}$. Sedangkan untuk AKB dihitung dengan jumlah kematian bayi dibawah usia 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. AKHB di Kabupaten Barru dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2. 45
 Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)
 Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (%)	99,70	99,70	99,60	98,90	99,9

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025

AKHB pada periode tahun 2020 – 2024 cenderung berfluktuasi, yang mana pada tahun 2024 mengalami penurunan dibanding periode 4 tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa program-program untuk mengurangi AKHB harus tetap dikedepankan, misalnya program pelayanan kesehatan ibu hamil, program imunisasi, pencegahan penyakit menular pada anak-anak, program ASI Eksklusif, program tentang gizi serta pemberian makanan sehat untuk ibu hamil dan balita.

c. Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup

Angka Kematian Balita (AKBa) adalah Jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi). Angka Kematian Balita (AKBa) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 46
Angka Kematian Balita (AKBa)/ 1000 kelahiran hidup
Kab.Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kematian Balita (Jiwa)	2	2	3	0	0
2	Jumlah kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu (Jiwa)	3.069	3.069	2.983	2.780	2.385
3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Barru Tahun 2025

AKBa pada periode tahun 2020–2024 cenderung berfluktuasi, yang mana pada periode tahun 2020 - 2021 mengalami kondisi stagnan dibandingkan periode tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa program-program untuk mengurangi AKBa harus tetap dikedepankan, misalnya program pelayanan kesehatan ibu hamil, program imunisasi, pencegahan penyakit menular pada anak-anak, program ASI Eksklusif, program tentang gizi serta pemberian makanan sehat untuk ibu hamil dan balita.

Apabila capaian ini disandingkan dengan target RPJMD pada tahun 2023 yang menetapkan target angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Barru sebesar 0,19. Maka dapat disimpulkan bahwa capaian angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup Kabupaten Barru pada tahun 2023 sudah mencapai target dengan capaian pada tahun tersebut mencapai 0 angka kematian balita per 100 kelahiran hidup.

d. Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup

Angka kematian bayi endogen atau kematian neonatal adalah banyaknya kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama (dinyatakan dengan per 1000 kelahiran hidup) setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau di dapat selama kehamilan. Angka Kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Barru dapat dilihat pada

tabel berikut.

Tabel 2. 47
 Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup
 Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 bulan) (Jiwa)	6	8	44	27	26
2	Jumlah kelahiran hidup (Jiwa)	3069	3.047	2.983	2.780	2.385
3	Angka kematian neonatal per 1.000 kelahiran hidup	2,00	3,00	15,00	10,00	11

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025

Angka kematian neonatal pada periode tahun 2020 – 2024 cenderung berfluktuasi, yang mana angka kematian tertinggi pada periode tersebut terjadi pada tahun 2022, yang mencapai 15 angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup, sementara capaian terendah terjadi pada tahun 2020 yang mencapai 2 angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup.

Apabila capaian ini disandingkan dengan target RPJMD pada tahun 2023 yang menetapkan target angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Barru sebesar 1,24. Maka dapat disimpulkan bahwa capaian angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup Kabupaten Barru pada tahun 2023 masih jauh dari target dengan jumlah kematian neonatal pada tahun tersebut mencapai 10 angka kematian neonatal per 100 kelahiran hidup.

e. Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup

Indikator ini menunjukkan Angka Kematian Ibu pada saat hamil, bersalin dan nifas dari per 100.000 kelahiran. Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 48
 Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup
 Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas (jiwa)	3	7	2	2	5
2	Jumlah kelahiran hidup (jiwa)	3069	3.047	2.983	2.780	2.385
3	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	98	230	67	72	210

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025

Angka kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup Kabupaten Barru pada periode tahun 2020 – 2024 cenderung berfluktuasi, yang mana angka kematian tertinggi pada periode tersebut terjadi pada tahun 2021, yang mencapai 230 angka kematian per 100.000 kelahiran hidup, sementara capaian terendah terjadi pada tahun 2022 yang mencapai 67 angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup.

Apabila capaian ini disandingkan dengan target RPJMD pada tahun 2023 yang menetapkan target angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup di Kabupaten Barru sebesar 47. Maka dapat disimpulkan bahwa capaian angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup Kabupaten Barru pada tahun 2023 masih belum mencapai target dengan jumlah kematian ibu pada tahun tersebut mencapai 72 angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup.

f. Rasio Posyandu Persatuan Balita

Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. rasio posyandu per satuan balita di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 49
Rasio Posyandu Persatuan Balita Kabupaten Barru
Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah posyandu (Unit)	267	270	270	272	273
2	Jumlah balita (Jiwa)	13.343	12.788	12.355	9.574	11.352
3	Rasio posyandu per satuan balita (%)	20,01	21,11	21,85	28,41	24,05

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025

Rasio posyandu per satuan balita Kabupaten Barru pada periode tahun 2020 – 2024 cenderung berfluktuasi, yang mana rasio tertinggi pada periode tersebut terjadi pada tahun 2023, yang mencapai angka 28,41, sementara capaian terendah terjadi pada tahun 2020 yang hanya mencapai angka 20,01.

g. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

Puskesmas, poliklinik, puskesmas pembantu merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Rasio puskesmas, poliklinik puskesmas pembantu dihitung berdasarkan jumlah puskesmas, poliklinik puskesmas pembantu per 1.000 jumlah penduduk di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2. 50

Rasio Puskesmas, poliklinik puskesmas pembantu per 1.000 jumlah penduduk Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Puskesmas		Poliklinik		Pustu	
			Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
1	2020	187.392	12	0.064	0	0	33	0.018
2	2021	189.877	12	0.064	0	0	33	0.018
3	2022	191.895	12	0,063	7	0,037	33	0,017
4	2023	193.358	12	0.062	7	0,036	35	0,018
5	2024	195.385	12	0,061	7	0,035	35	0,179

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025

Rasio jumlah puskesmas terhadap jumlah penduduk dari tahun 2020 hingga tahun 2024 terus mengalami penurunan. Namun rasio jumlah pustu terhadap jumlah penduduk cenderung stagnan. Hal ini disebabkan karena laju pertambahan jumlah puskesmas dan puskesmas pembantu lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan jumlah penduduk. Jumlah penduduk dari tahun 2020 hingga tahun 2024 terus mengalami penambahan sementara jumlah puskesmas dan jumlah pustu tetap.

h. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

Rumah sakit mempunyai peranan penting dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Rasio rumah sakit per satuan penduduk yang menunjukkan tingkat cakupan pelayanan kesehatan terhadap jumlah penduduk di wilayah pelayanannya. Rasio rumah sakit per 1.000 penduduk di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 51

Rasio rumah sakit/1.000 jumlah penduduk Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Rumah Sakit (Unit)	1	1	1	1	1
2	Jumlah Penduduk (Jiwa)	187.392	189.877	191.895	194.543	195.385
3	Rasio Rumah Sakit per seribu Penduduk	0,0053	0,0052	0,0052	0,0051	0,0051

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025

Rasio Jumlah Rumah Sakit terhadap Jumlah Penduduk dari tahun 2020 hingga tahun 2024 terus mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena laju penambahan jumlah rumah sakit lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan jumlah penduduk. Jumlah penduduk dari tahun 2020 hingga tahun 2024 terus mengalami penambahan sementara tidak ada penambahan jumlah rumah sakit. Rasio Rumah Sakit terhadap Jumlah rasio tertinggi yaitu pada tahun 2019 sebesar 0,0054 dan terendah pada tahun 2024 yaitu sebesar 0,0051.

i. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Indikator ini dapat menggambarkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter yang diukur berdasarkan jumlah dokter per 1.000 penduduk. Rasio dokter persatuan penduduk di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 52
Rasio Dokter Persatuan penduduk Kabupaten Barru
Tahun 2020–2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah dokter (Orang)	25	25	54	69	50
2	Jumlah penduduk (Jiwa)	187.392	189.877	191.895	194.543	195.385
3	Rasio dokter per satuan penduduk	0.13	0.14	0,28	0,35	0,26

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025

Rasio Dokter Persatuan penduduk belum mencapai target jika berdasar pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 34 tahun 2016 tentang Kriteria daerah kabupaten/kota peduli hak asasi manusia, dimana pada lampirannya disebutkan rasio yang layak untuk dokter/satuan penduduk adalah 1 : 2500, sementara di Kabupaten Barru masih jauh dari layak terkait ketersediaan tenaga dokternya. Hal tersebut juga terlihat pada beberapa puskesmas yang jumlah tenaga dokternya belum mencapai standar nasional. Adapun beberapa alternatif solusi yang telah dilakukan adalah melakukan perekrutan tenaga kontrak dokter daerah dan pendayagunaan dokter internship di beberapa tempat yakni RSUD, PKM Padongko dan PKM Palanro (di tempat tersebut terdapat dokter pendamping internship).

j. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Rasio tenaga medis per satuan penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk yang diukur berdasarkan jumlah tenaga medis per 1.000 penduduk. Rasio

tenaga medis persatuan penduduk disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 53
Rasio Tenaga Medis per 1.000 Jumlah Penduduk Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah tenaga medis (Orang)	57	57	83	85	103
2	Jumlah penduduk (Jiwa)	187.392	189.877	191.895	194.543	195.385
3	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	0,30	0,31	0,43	0,44	0,53

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel diatas terlihat rasio tenaga medis persatuan penduduk belum mencapai target karena tenaga medis yang ada di RSUD dan puskesmas jumlah tenaganya masih kurang sementara disisi lain penduduk terus bertambah. Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan adalah perekrutan tenaga kontrak daerah, kontrak BOK dan tenaga sukarela serta pendayagunaan dokter internship di beberapa tempat yakni RSUD, PKM Padongko dan PKM Palanro (di tempat tersebut terdapat dokter pendamping internship).

k. Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani

Komplikasi dan kematian ibu maternal serta bayi baru lahir sebagian besar terjadi pada proses persalinan sehingga untuk menurunkan angka kematian bayi dan ibu maternal salah satunya melalui persalinan yang sehat dan aman, yaitu persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang terlatih. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 54
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu (kasus)	775	753	1149	863	1062
2	Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama (Jiwa)	775	753	655	863	1.062
3	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (Persen)	100	100	175,4	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025

Pada tabel di atas terlihat bahwa jumlah komplikasi kebidanan yang ditangani mengalami perubahan yang fluktuatif setiap tahunnya. Capaian tertinggi pada tahun 2022 sebesar 175,4 persen.

1. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Cakupan pertolongan persalinan adalah cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (linakes). Adapun perkembangan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 55

Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Kabupaten Barru 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu (Jiwa)	3.181	3.085	2.989	2.796	2379
2	Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama (Jiwa)	3.246	3.199	3.199	3.245	3.251
3	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	98,00	96,00	93,40	86,16	73

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan tahun 2024 menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya hanya sebesar 73 persen, hal ini dipengaruhi oleh jumlah ibu bersalin yang ditolong yang ikut menurun jumlahnya di tahun 2024.

m. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) adalah desa/kelurahan dimana bayi yang ada di desa/kelurahan tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap pada satu kurun waktu tertentu. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 56

Cakupan Desa Kelurahan UCI Kab. Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Desa / Kelurahan UCI (Desa/Kel)	19	44	52	52	39
2	Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan (Desa/Kel)	55	55	55	55	55
3	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)	35,00	80,00	95,00	95,00	71

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025

Pada tabel diatas terlihat bahwa persentase Cakupan Desa Kelurahan UCI Kab. Barru pada periode tahun 2020-2024 mengalami perubahan setiap tahunnya. Dengan capaian cakupan tertinggi terjadi pada tahun 2022 dan 2023 sebesar 95 persen, dan capaian terendah terjadi pada tahun 2020 yang hanya mencapai 35 persen.

n. Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk adalah jumlah balita gizi buruk yang mendapatkan pelayanan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah keseluruhan balita yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama dikali seratus persen. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 57

Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah balita gizi buruk (jiwa)	5	4	4	5	5
2	Jumlah seluruh balita (Jiwa)	13.343	13.024	12.571	12.250	11.352
3	Persentase balita gizi buruk (%)	0,04	0,03	0,03	0,04	0,04

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel di atas terlihat bahwa persentase balita gizi buruk Kabupaten Barru cenderung fluktuatif, namun masih dibawah angka 1%, termasuk kategori rendah menurut WHO dan masih berada di bawah target nasional yaitu kurang dari 5%. Status gizi balita bersifat labil, karena sangat dipengaruhi pola asupan makanan bergizi dan penyakit penyerta, misalnya diare, cacangan, demam berdarah, thypus dan lain-lain. Masih diperlukan adanya upaya peningkatan status gizi bayi dan balita melalui program yang terkait dengan kesehatan bayi dan balita.

o. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan adalah

jumlah balita gizi buruk yang di temukan dan telah mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan dibagi dengan jumlah keseluruhan balita yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama dikali seratus persen. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 58
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelayanan Kesehatan Di satu wilayah Kerja pd kurun wkt tertentu (Jiwa)	3	4	4	5	5
2	Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama (Jiwa)	3	4	4	5	5
3	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Barru Tahun 2025

Pada tabel diatas terlihat bahwa persentase Cakupan Balita gizi buruk Kabupaten Barru pada periode tahun 2020-2024 sudah mencapai 100 persen setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh balita gizi buruk yang ditemukan telah mendapatkan perawatan di sarana kesehatan.

p. Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak

Persentase imunisasi campak adalah perbandingan antara banyaknya anak berumur 1 tahun yang telah menerima minimal satu kali imunisasi campak terhadap jumlah anak usia 1 tahun dan dinyatakan dalam persentase. Indikator ini merupakan ukuran pemantauan untuk cakupan imunisasi dasar sebagai perlindungan terhadap penyakit campak. Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 59
Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak
Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak (jiwa)	2.706	2856	2943	2700	2626
2	Jumlah anak usia 1 tahun (jiwa)	2.967	3048	2213	2.449	3.025
3	Persentase anak usia 1 tahun diimunisasi campak (%)	91,00	93,70	83,5	110	87

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Barru Tahun 2025

Pada tabel diatas terlihat bahwa Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak di Kab. Barru pada periode tahun 2020-2024 mengalami perubahan setiap tahunnya. Dengan capaian cakupan tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 110 persen, dan capaian terendah terjadi pada tahun 2022 yang hanya mencapai 83,5 persen.

q. Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk

Acute Flacid Paralyis (AFP) adalah gejala kelumpuhan pada anak yang berumur di bawah 15 tahun yang terjadi secara mendadak (akut). Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 60

Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kasus AFP non Polio (kasus)	0	0	3	3	6
2	Jumlah penduduk < 15 tahun (jiwa)	45.583	0	45.828	44.905	39.053
3	Non Polio rate per 100.000	0	0	6,5	6,7	15,4

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025

Pada tabel diatas terlihat bahwa jumlah Non Polio rate per 100.000 penduduk Kab. Barru pada periode tahun 2020-2024 mengalami perubahan setiap tahunnya. Dengan kejadian tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 15,4, dan capaian terendah terjadi pada tahun 2020 dan 2021 yang pada tahun tersebut tidak terjadi kasus Non polio.

r. Cakupan balita pneumonia yang ditangani

Pneumonia adalah penyakit infeksi akut yang mengenai jaringan paru (alveoli) yang disebabkan terutama oleh bakteri dan merupakan penyakit saluran pernafasan akut yang sering menyebabkan meningkatnya angka kematian balita. Cakupan balita pneumonia yang ditangani merupakan indikator untuk mengetahui proporsi pneumonia balita di suatu wilayah, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 61

Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penderita pneumonia balita (Jiwa)	24	23	26	28	31

2	Jumlah perkiraan penderita pneumonia (jiwa)	744	744	744	744	744
3	Cakupan balita pneumonia yang ditangani (%)	3,23	3,09	3,49	3,76	4,17

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025

Kurangnya kunjungan masyarakat ke fasilitas kesehatan dikarenakan mereka enggan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan karena masih takut tertular virus corona atau lebih memilih menahan diri untuk tidak datang ke fasilitas kesehatan menyebabkan jumlah penderita pneumonia cenderung naik sejak tahun 2020. Capaian tertinggi pada tahun 2024 sebanyak 4,17 persen, sedangkan capaian terendah terjadi pada tahun 2021 sebanyak 3,09 persen.

s. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA merupakan cakupan dari jumlah penderita TBC/BTA (+) yang ditemukan dan diobati disuatu wilayah kerja selama 1 tahun dibagi dengan jumlah perkiraan penderita baru TBC/BTA (+) dalam kurun waktu yang sama. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC/BTA di Kabaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 62

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Kabupaten Barru Tahun 2020– 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penderita TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 tahun (Jiwa)	202	256	298	298	477
2	Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) (Jiwa)	388	388	460	460	945
3	Cakupan penemuan dan penanganan (%)	52.06	65,98	64,78	64,78	50,69

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025

Pada tabel diatas terlihat bahwa Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Kabupaten Barru pada periode tahun 2020-2024 cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini tentu mengindikasikan masih kurangnya kemampuan untuk menemukan dan mengobati kasus TBC BTA sesuai perkiraan yang ada.

Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebanyak 64,78 persen, sedangkan capaian terendah terjadi pada tahun 2020 sebanyak 52,06 persen

t. Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)

Tuberkulosis adalah suatu penyakit infeksi kronis yang menyerang paru dan merupakan salah satu penyebab kematian dengan jumlah yang tinggi. Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) di Kabupaten Barru dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 63
Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 pddk)
Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama) (Kasus)	202	256	460	341	477
2	Jumlah penduduk (Jiwa)	187.392	189.877	191.895	193.358	195.385
3	Tingkat prevalensi Tuberculosis (per100.000 pdk)	108,00	135,00	239,76	176,36	244,13

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Barru Tahun 2025

Populasi yang beresiko terjangkit penyakit menular masih tinggi. Tingginya kasus penderita TB dikarenakan masih tingginya penularan kontak serumah. Adapun alternatif solusi yang dilakukan adalah menurunkan angka CDR dengan penemuan dini kasus TB penjarangan suspek, pemberdayaan CBS (*Community Base Surveylans*), peningkatan pengobatan penderita manajemen program P2ML, masyarakat dilibatkan secara aktif, kemitraan para stake holder serta pemeriksaan kontak serumah penderita TB.

u. Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)

Tuberkulosis adalah suatu penyakit infeksi kronis yang menyerang paru dan bisa menyebabkan kematian. Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 64
Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pasien TB yang meninggal (Jiwa)	13	24	16	15	28
2	Jumlah penduduk (Jiwa)	187.392	189.877	191.895	194.543	195,385
3	Tingkat kematian karena Tuberculosis (per100.000 pddk)	7,00	13,00	8,34	7,71	14,3

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel diatas terlihat bahwa Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Kabupaten Barru pada periode tahun 2020-2024 cenderung berfluktuasi dari tahun ke tahun. Hanya pada tahun 2023 terjadi penurunan dari tahun sebelumnya tetapi nilainya masih tetap tinggi. Hal ini tentu mengindikasikan masih tingginya tingkat kematian akibat penyakit Tuberkolosis.

v. Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS

Proporsi jumlah kasus tubercolosis yang terdeteksi dalam Program Directly Observed Treatment Shortcourse (DOTS) merupakan presentase jumlah pasien baru TB/BTA yang diperkirakan ada terhadap jumlah pasien yang telah mendapat pengobatan melalui program DOTS. Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 65

Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pasien Tuberkulosis BTA yang terdeteksi dalam program DOTS (Jiwa)	202	256	298	341	360
2	Jumlah pasien baru TB paru BTA yang Terdeteksi dalam program DOTS (Jiwa)	388	388	298	570	477
3	Proporsi jumlah kasus t uberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (%)	52.06	65,98	100,00	59,82	75

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025

Populasi yang beresiko terjangkit penyakit menular masih tinggi. Tingginya kasus penderita TB dikarenakan masih tingginya penularan kontak serumah. Adapun alternatif solusi yang dilakukan adalah menurunkan angka CDR dengan penemuan dini kasus TB penjarangan suspek, pemberdayaan CBS, peningkatan pengobatan penderita manajemen program P2ML, masyarakat dilibatkan secara aktif, kemitraan para stake holder serta pengiriman dan pengambilan sedimen TBC di PRM.

w. Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS

Proporsi kasus kasus tubercolosis yang di obati dan sembuh dalam Program Directly Observed Treatment Shortcourse (DOTS)

merupakan presentase jumlah pasien TB/BTA yang telah mendapat pengobatan melalui program DOTS terhadap jumlah pasien yang sembuh. Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 66

Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pasien Tuberkulosis BTA Yang diobati dan sembuh dalam program DOTS (Jiwa)	83	77	203	298	341
2	Jumlah pasien baru TB paru BTA Yang diobati dan sembuh dalam program DOTS (Jiwa)	357	388	388	460	570
3	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis Yang diobati dan sembuh dalam program DOTS (%)	23	20	52	65	60

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel diatas terlihat bahwa Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS Kabupaten Barru pada periode tahun 2020-2024 cenderung berfluktuasi. Dengan cakupan tertinggi terjadi pada tahun 2023 dan cakupan terendah pada tahun 2020 dengan capaian 23.

x. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

Cakupan ini merupakan persentase atas jumlah penderita DBD yang ditemukan dengan jumlah penderita DBD yang ditangani.

Tabel 2. 67

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai (Jiwa)	32	36	25	32	103
2	Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu (Jiwa)	32	36	25	32	103
3	Cakupan penemuan dan penanganan penderita (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel diatas terlihat bahwa Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Kabupaten Barru pada periode tahun 2020-2024 cenderung stagnan dan telah berhasil mempertahankan cakupan selama lima tahun sebesar 100 persen.

y. Penderita diare yang ditangani

Indikator ini merupakan persentase penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader disuatu wilayah dalam waktu satu tahun terhadap jumlah perkiraan penderita diare dalam suatu wilayah tertentu pada waktu yang sama dimana 10% dari angka kesakitan dikalikan jumlah penduduk. Penderita diare yang ditangani Di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 68

Penderita diare yang ditangani Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan Kader (Jiwa)	2.024	1.168	1.779	1.779	1754
2	Jumlah perkiraan penderita diare (10% dari angka kesakitan diare x (Jiwa)	6.721	5.127	5.127	5.127	1789
3	Penderita diare yang ditangani (%)	60,29	22,78	34,70	34,70	98

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025

Penderita diare yang ditangani mengalami penurunan karena jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan mengalami penurunan akibat pandemi Covid 19, masyarakat enggan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan karena takut tertular virus corona atau lebih memilih menahan diri untuk tidak datang ke fasilitas kesehatan. Namun pada tahun 2024 angka penderita diare yang ditangani menjadi 98 persen.

z. Angka kejadian Malaria

Angka kejadian malaria merupakan indikator untuk mengetahui insiden penyakit malaria pada satu daerah tertentu selama satu tahun. Angka kejadian malaria di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 69

Angka kejadian Malaria Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Penduduk yang menderita malaria (Jiwa)	1	3	24	31	44
2	Jumlah penduduk (Jiwa)	187.392	189.877	191.895	194.543	195,385
3	Angka kejadian malaria (per 100.000 penduduk)	0,53	1,58	12,5	15,93	0,02

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel diatas terlihat bahwa Angka kejadian malaria Kabupaten Barru pada periode tahun 2020-2024 cenderung berfluktuatif, dengan jumlah kasus tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 15,93 kasus, sementara jumlah kasus terendah terjadi pada tahun 2024 hanya sebesar 0,02 kasus.

aa. Tingkat kematian akibat malaria

Tingkat kematian akibat malaria adalah jumlah kematian tersangka malaria terhadap jumlah penduduk per 1000 jiwa. Tingkat kematian akibat malaria di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 70
Tingkat kematian akibat malaria Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kematian malaria (Jiwa)	0	0	0	0	0
2	Jumlah penduduk (Jiwa)	187.392	189.877	191.895	194.543	195.385
3	Angka Kematian malaria (per 100.000 penduduk)	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025

Tingkat kematian akibat malaria dari tahun 2020 sampai tahun 2024 adalah 0 per 1000 penduduk, hal ini menunjukkan bahwa penanganan penderita malaria di Kabupaten Barru termasuk berhasil karena semua penderita malaria tidak ada yang meninggal.

bb. Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida

Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida adalah persentase banyaknya balita yang pada malam sebelumnya survei tidur dengan menggunakan kelambu yang sudah dipoteksi dengan insektisida terhadap jumlah balita keseluruhan. Namun di Kabupaten Barru belum ditemukan indikasi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 71
Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Banyaknya balita yang pada malam sebelumnya survey tidur dengan menggunakan kelambu yang sudah diproteksi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

	dengan insektisida (Jiwa)					
2	Jumlah Balita (Jiwa)	13.343	13.024	12.355	9.574	
3	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida (%)	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025

cc. Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi

HIV dan AIDS merupakan penyakit yang dapat ditularkan melalui hubungan seksual dan penggunaan jarum suntik yang sering dikaitkan dengan kesehatan reproduksi terutama perempuan. Persentase Prevalensi HIV/AIDS merupakan jumlah pasien HIV dan AIDS terhadap total populasi penduduk. Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 72
Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi
Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pasien HIV dan AIDS (Jiwa)	5	6	11	10	21
2	Jumlah Penduduk (Jiwa)	187.392	189.877	191.895	194.543	195,385
3	Prevelensi HIV/AIDS dari Total Populasi (%)	0,003	0,003	0,006	0,001	0,001

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel diatas terlihat bahwa Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi Kabupaten Barru pada periode tahun 2020-2024 cenderung berfluktuatif, dengan jumlah prevelensi tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 0,006 persen, sementara jumlah prevelensi terendah terjadi pada tahun 2024 yang hanya sebanyak 0,001 persen.

dd. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Persentase cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin merupakan pemberian pelayanan kesehatan perorangan meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, keperawatan, rehabilitasi medik dengan menginap di ruang rawat inap dengan sarana kesehatan strata 1 dan jumlah seluruh masyarakat miskin yang ada dalam satu wilayah tertentu (jumlah Penerima Bantuan Iuran/PBI lokal).

Tabel 2. 73

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan starta 1 (Jiwa)	7.808	113.948	16.971	16.971	
2	Jumlah Masyarakat Penerima KIS di Kabupaten (Jiwa)	135.423	142.732	59.231	59.231	
3	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	5,80	80,00	29,00	29,00	

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel diatas terlihat bahwa Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Kabupaten Barru pada periode tahun 2020-2024 cenderung berfluktuatif, dengan jumlah persentase tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 80,00 persen, sementara jumlah persentase terendah terjadi pada tahun 2020 yang hanya sebesar 5,80 persen.

ee. Cakupan Kunjungan Bayi

Cakupan kunjungan bayi merupakan jumlah kunjungan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standard dibagi jumlah seluruh bayi lahir hidup disuatu wilayah. Cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 74

Cakupan Kunjungan Bayi Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu (Jiwa)	2.955	3.026	2.965	3169	2339
2	Jumlah seluruh bayi lahir hidup di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama (Jiwa)	3.094	3.059	3.061	2544	3091
3	Cakupan Kunjungan Bayi (%)	95,51	98,92	96,86	124,57	75,67%

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel diatas terlihat bahwa Cakupan kunjungan bayi Kabupaten Barru pada periode tahun 2020-2024 cenderung berfluktuatif, dengan jumlah persentase tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 124,57 persen, sementara jumlah persentase terendah terjadi pada tahun 2024 yang hanya sebesar 75,67 persen.

ff. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 adalah cakupan kunjungan ke-4 ibu hamil dan mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar yaitu paling minim empat kali terhadap jumlah sasaran ibu hamil. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 di Kabupaten Barru dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 75
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kabupaten Barru
Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 (Jiwa)	3.173	3.070	3.011	2.630	2.292
2	Jumlah sasaran ibu hamil (Jiwa)	3.404	3.391	3.402	3.436	3270
3	Cakupan kunjungan ibu hamil K4 (%)	93,21	90,53	88,51	89,14	70,09%

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel diatas terlihat bahwa Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kabupaten Barru pada periode tahun 2020-2024 cenderung berfluktuatif, dengan jumlah persentase tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 93,21 persen, sementara jumlah persentase terendah terjadi pada tahun 2024 yang hanya sebesar 70,09 persen.

gg. Cakupan Pelayanan Nifas

Nifas adalah periode mulai 6 jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan. Pelayanan nifas sesuai standar adalah pelayanan kepada ibu nifas sedikitnya 3 kali, pada 6 jam pasca persalinan sampai dengan 3 hari. Cakupan pelayanan nifas di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 76
Cakupan Pelayanan Nifas Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar (Jiwa)	3.112	2.962	2.970	2.970	2325
2	Jumlah seluruh ibu nifas (Jiwa)	3.246	3.199	3.199	3.199	3251
3	Cakupan pelayanan nifas (%)	95,87	92,59	92,84	92,84	71,52

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel diatas terlihat bahwa Cakupan Pelayanan Nifas Kabupaten Barru pada periode tahun 2020-2024 cenderung berfluktuatif, dengan jumlah persentase tertinggi terjadi pada tahun

2020 sebesar 95,87 persen, sementara jumlah persentase terendah terjadi pada tahun 2024 yang hanya sebesar 71,52 persen.

hh. Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani adalah neonatus dengan komplikasi di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang ditangani sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih di seluruh sarana pelayanan kesehatan. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 77
Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani
Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani (Kasus)	313	609	289	263	975
2	Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada (Kasus)	313	609	521	522	975
3	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)	100	100	55,47	50,38	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel diatas terlihat bahwa Cakupan Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani Kabupaten Barru pada periode tahun 2020-2024 cenderung berfluktuatif, dengan jumlah persentase tertinggi terjadi pada tahun 2020, 2021 dan 2024 sebesar 100 persen, sementara jumlah persentase terendah terjadi pada tahun 2023 yang hanya sebesar 50,38 persen.

ii. Cakupan Pelayanan Anak Balita

Cakupan pelayanan anak balita adalah persentase anak balita (usia 12 sampai dengan 59 bulan) yang memperoleh pelayanan sesuai standard. Cakupan pelayanan anak balita di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 78
Cakupan Pelayanan Anak Balita Kabupaten Barru
Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali (Jiwa)	7.750	8.682	10.216	10.393	12.506
2	Jumlah seluruh anak balita (Jiwa)	12.788	12.788	12.355	13.413	15.177
3	Cakupan pelayanan anak balita (%)	60,60	67,89	82,60	77,46	82,40

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel diatas terlihat bahwa Cakupan Pelayanan anak balita Kabupaten Barru pada periode tahun 2020-2024 cenderung berfluktuatif, dengan jumlah persentase tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 82,60 persen, sementara jumlah persentase terendah terjadi pada tahun 2020 yang hanya sebesar 60,60 persen.

jj. Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6 – 24 Bulan Keluarga Miskin

Gizi memegang peranan penting dalam siklus hidup manusia. Kekurangan gizi pada ibu hamil dapat menyebabkan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) dan dapat pula menyebabkan penurunan tingkat kecerdasan. Untuk itu pemberian MP-ASI pada bayi usia 6-24 bulan dari keluarga miskin karena mereka memiliki keterbatasan dalam penyediaan pangan di rumah tangga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 79

Cakupan Pemberian MP ASI Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah anak usia 6-24 bulan keluarga miskin yang mendapat MP-ASI (Jiwa)	421	215	596	0	0
2	Jumlah seluruh anak usia 6-24 bulan keluarga miskin (Jiwa)	890	215	596	0	0
3	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin (%)	47,30	100,00	100,00	0%	0%

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel diatas terlihat bahwa Cakupan Pemberian MP ASI Kabupaten Barru pada periode tahun 2020-2024 cenderung berfluktuatif, dengan jumlah persentase tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 100 persen, sementara jumlah persentase terendah terjadi pada tahun 2020 yang hanya mencapai 47,30 persen. Sementara untuk data Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin pada tahun 2023 dan 2024 tidak tersedia data terpilah.

kk. Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD Dan Setingkat

Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat adalah pemeriksaan kesehatan terhadap murid baru kelas 1

SD/MI yang meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan dan seterusnya. Cakupan penjangran kesehatan siswa SD dan setingkat di Kabupaten Barru dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2. 80
Cakupan Penjangran Kesehatan Siswa SD dan Setingkat
Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih (Jiwa)	10.764	5.211	8.425	2.793	3.203
2	Jumlah murid SD dan setingkat (Jiwa)	16.737	6.762	9.471	3.209	4.472
3	Cakupan penjangran kesehatan siswa SD dan setingkat (%)	64,00	77,06	88,95	87,00	72

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel diatas terlihat bahwa Cakupan Penjangran Kesehatan Siswa SD dan setingkat di Kabupaten Barru pada periode tahun 2020-2024 cenderung berfluaktif, dengan jumlah persentase tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 88,95 persen.

II. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin

Persentase cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin merupakan pemberian pelayanan kesehatan perorangan meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, keperawatan, rehabilitasi medik tanpa rawat inap terhadap jumlah seluruh masyarakat miskin yang ada dalam satu wilayah tertentu (Penerima Bantuan Iuran/PBI Lokal). Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 81
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
Kab. Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kunjungan pasien miskin sarkes strata 1 (Jiwa)	7.808	113.948	16.971	16.971	16.971
2	Jumlah Seluruh Masyarakat Miskin (Jiwa)	135.423	142.732	18.704	18.704	18.704
3	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)	5,80	80,00	90,70	90,70	90,70

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel diatas terlihat bahwa cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin di Kabupaten Barru pada periode tahun 2020-2024 cenderung berfluktuatif, dengan jumlah persentase tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 90,7 persen, sementara jumlah persentase terendah terjadi pada tahun 2020 yang hanya sebesar 5,80 persen.

mm. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)

Indikator ini memberikan acuan pelayanan keperawatan dan penanganan gawat darurat sesuai dengan standar pelayanan yang dilakukan. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 82

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Gawat Darurat Level 1 (Unit)	1	1	1	1	1
2	Jumlah RS (Unit)	1	1	1	1	1
3	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) dari tahun 2020 hingga tahun 2024 telah mencapai 100%.

nn. Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Cakupan desa/kelurahan mengalami kejadian luar biasa (KLB) yang ditangani < 24 jam terhadap KLB periode/kurun waktu tertentu di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 83

Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah KLBdi Desa/Kelurahan yang ditangani <24 (Kasus)	233	1.268	468	11	12
2	Jumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi (Kasus)	233	1.268	468	11	12
3	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel diatas terlihat bahwa Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam di Kabupaten Barru pada periode tahun 2020-2024 telah terpenuhi 100 persen dalam kurun waktu tersebut.

➤ **Bidang Urusan Pekerjaan Umum**

a. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik merupakan perbandingan panjang jalan dalam kondisi baik terhadap panjang jalan secara keseluruhan. Jalan kondisi baik adalah semua ruas jalan dengan permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi baik menurut kriteria teknis. Kondisi jaringan jalan terbagi dalam empat kondisi yaitu kondisi baik, kondisi rusak ringan, kondisi rusak sedang dan kondisi rusak berat. Kondisi panjang jaringan jalan di Kabupaten Barru tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 84
Kondisi Panjang Jaringan Jalan di Kabupaten Barru
Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Panjang Jaringan Jalan Kondisi Baik (km)	445,05	444,24	404,21	425,07	359,86
2	Panjang Jaringan Jalan Kondisi Rusak Ringan (km)	57,56	59,04	38,94	29,14	135,49
3	Panjang Jaringan Jalan Kondisi Rusak Sedang (km)	54,47	53,80	66,53	146,95	58,52
4	Panjang Jaringan Jalan Kondisi Rusak Berat (km)	126,28	126,28	173,69	82,94	130,23
5	Jalan secara keseluruhan (kabupaten)	683,36	683,36	683,36	684,11	684,10
6	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,65	0,65	0,59	0,66	0,52

Sumber: Dinas PUPR Perkim Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa panjang jalan dalam kondisi baik pada tahun 2024 berkurang secara signifikan sebesar 85,19 km dibanding dengan tahun 2020, yang mana pada tahun tersebut merupakan pencapaian tertinggi panjang jalan dalam kondisi baik selama periode tahun 2020-2024. Kondisi ini mengakibatkan penambahan panjang jalan rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat pada tahun 2024.

b. Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk

Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 85

Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk di Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Panjang Jalan Kabupaten (km)	683,36	683,36	683,36	684,11	684,106
2.	Jumlah Penduduk (jiwa)	187.392	189.877	191.895	194.543	195,38
3.	Rasio	0,36	0,36	0,36	0,35	0,35

Sumber: Dinas PUPR Perkim Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa rasio panjang jalan per satuan penduduk pada periode tahun 2020-2024 cenderung stagnan, Hal ini dipengaruhi oleh jumlah jalan kabupaten yang cenderung stagnan dan tidak bertambah. Pada tahun 2023 dan 2024 rasio panjang jalan per satuan penduduk mengalami penurunan sebesar 0,01 jika dibandingkan pada tahun 2020-2022.

c. Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam)

Jalan Kabupaten dalam kondisi baik adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi baik menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan ≤ 6%), sehingga arus lalu lintas dapat berjalan lancar dengan kecepatan diatas 40 km/jam tanpa ada hambatan yang disebabkan oleh kondisi jalan. Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/Jam) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 86

Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam) di Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (km)	445,05	444,24	404,21	425,07	359,865
2	Panjang Seluruh Jalan Kabupaten (Km)	683,36	683,36	683,36	684,11	684,106
3	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) (%)	65,1	65	59,15	66,39	52,60

Sumber: Dinas PUPR Perkim Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel di atas terlihat bahwa persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 Km/jam) yang diasumsikan sebagai jalan dalam kondisi mantap berdasarkan Permen PU No. 13 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan jalan, dari tahun 2020 sampai 2024 cenderung fluktuatif.

d. Persentase Jalan yang memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 m)

Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 87

Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) di Kab.Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Panjang Jalan yang memiliki trotoar dan drainase (km)	-	-	4,650	4,650	4,650
2.	Panjang seluruh Jalan Kabupaten (km)	683,36	683,36	683,36	684,11	684.106
3.	Persentase (%)	-	-	0,68	0,68	0,68

Sumber: Dinas PUPR Perkim Kab. Barru Tahun 2025

Pada tabel diatas mulai tahun 2020 sampai tahun 2021 panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase belum dilakukan pengukuran secara menyeluruh sehingga data yang tersedia tidak mencakup seluruh wilayah Kabupaten Barru, namun pada tahun 2022 dan tahun 2024 telah dilakukan pengukuran dan didapatkan data persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase sebesar 6,8 persen.

e. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Rumah tinggal bersanitasi merupakan rumah tangga yang dapat mengakses sanitasi yang layak dengan pemahaman akan pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan drainase lingkungan. Persentase rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 88

Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi	46.663	46.663	47.318	48.638	33.473
2.	Jumlah rumah tinggal	46.663	46.663	47.318	48.638	48.654
3.	Persentase	100	100	100	100	68,8

Sumber: Dinas PUPR Perkim Kab. Barru Tahun 2025

Pada tabel diatas terlihat jumlah rumah yang berakses sanitasi meningkat setiap tahunnya dengan penjelasan data bahwa jumlah rumah dipersamakan dengan jumlah rumah tangga atau Kepala Keluarga. Angka pada tahun 2023 merupakan angka yang menunjukkan penjumlahan jumlah Rumah tangga atau kepala keluarga yang berakses layak bersama, layak sendiri,

dan akses aman yang telah mencapai 100 % dengan predikat ODF. Namun pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 31,2 persen. Salah satu penyebab adalah pembangunan rumah tinggal yang baru oleh masyarakat tanpa membuat akses sanitasi layak.

f. Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat

Drainase merupakan salah satu fasilitas dasar yang dirancang sebagai sistem guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan merupakan komponen penting dalam perencanaan kota (perencanaan infrastruktur khususnya). Drainase mempunyai arti mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalihkan air. Secara umum, drainase didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan/atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. Untuk drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat di Kabupaten Barru dapat dilihat pada berikut.

Tabel 2. 89

Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Panjang Drainase tersumbat pembuangan aliran air (Km)	-	-	4.130	4.130	3.969
2	Panjang Seluruh Drainase (Km)	643.954	643.954	643.954	645.631	646.522
3	Persen (%)	-	-	6,41	6,40	6,13

Sumber: Dinas PUPR Perkim Kab. Barru Tahun 2025

Pada tabel diatas menunjukkan Persentase panjang drainase yang tersumbat pembuangan aliran airnya dengan total seluruh panjang drainase Kabupaten Barru cenderung mengalami penurunan, hal ini terjadi dikarenakan masih adanya masyarakat yang melakukan pembuangan sampah ke saluran drainase serta adanya tumpukan sedimen yang seharusnya diselesaikan secara gotong royong, namun harus menunggu lagi dari pemerintah, sehingga drainase yang baik dapat berkurang kualitasnya dan mengalami kerusakan dan penyumbatan.

g. Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik

Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi

rawa. Irigasi berarti mengalirkan air secara buatan dari sumber air yang tersedia kepada sebidang lahan untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 90
 Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik
 Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik (m)	3.488	3.514	3.575	3.779	3.464
2	Luas Irigasi kabupaten (m)	6.919	6.919	6.919	6.919	6.919
3	Persentase (%)	50,41	50,79	51,67	54,62	50,07

Sumber: Dinas PUPR Perkim Kab. Barru Tahun 2025

Irigasi Kabupaten Barru tersebar di 7 kecamatan dengan klasifikasi berdasarkan fungsinya terbagi menjadi 3 (tiga) yakni Fungsi Primer, Sekunder dan Tersier dengan persentase dalam kondisi baik pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 4,55 persen menjadi 50,07 persen. Penurunan persentase irigasi dalam kondisi baik di tahun 2024 disebabkan faktor teknis dan fisik seperti Kerusakan jaringan irigasi akibat usia bangunan (saluran, pintu air, bendung) yang sudah lama tidak direhabilitasi, Sedimentasi dan pendangkalan di saluran maupun bendung akibat erosi. Selain itu faktor alam juga menjadi penyebab seperti banjir atau longsor yang merusak jaringan irigasi, terutama di daerah perbukitan/hulu, alih fungsi lahan di daerah tangkapan air.

h. Rasio Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi adalah satu kesatuan bangunan dan saluran yang dipergunakan untuk mengatur jalannya air irigasi, dimulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan pemanfaatannya. Secara umum saluran atau jaringan irigasi di bagi menjadi jaringan primer, sekunder dan tersier. Rasio jaringan irigasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 91
 Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Irigasi Jaringan primer (m)	22.356	22.356	22.356	22.356	125.941
2	Irigasi Jaringan Sekunder (m)	90.264	90.823	91.474	91.474	108.192
3	Irigasi Jaringan Tersier(m)	79.217	79.217	79.217	79.217	55.811
4	Panjang saluran irigasi(m)	191.837	191.837	193.047	193.047	289.944

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
5	Luas Lahan Budidaya pertanian (Ha)	12.984	13.334	13.825	14.703	14.818
6	Rasio (%)	14,77	14,39	13,96	13,13	19,57

Sumber: Dinas PUPR Perkim Kab. Barru Tahun 2025

Pada tabel diatas menunjukkan rasio panjang saluran irigasi dengan luas lahan budidaya pertanian pada tahun 2024 mengalami kenaikan hal ini dikarenakan adanya dukungan dari Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) Kabupaten Barru. Selanjutnya hal ini diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan partisipasi bukan hanya dari GP3A, tetapi dari unsur masyarakat lainnya.

i. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Persentase penduduk berakses air bersih adalah proporsi jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan. Yang dimaksud akses air minum/air bersih adalah air yang berasal dari air ledeng/PAM dengan menggunakan meteran atau tanpa meteran, pompa air/sumur bor, atau mata air yang terlindung dalam jumlah yang cukup sesuai standar kebutuhan minimal dimana syarat-syarat air minum menurut kementerian kesehatan adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung logam berat. Persentase penduduk berakses air minum di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 92

Persentase Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum (jiwa)	176.223	183.744	183.744	189.292	189.789
2.	Jumlah penduduk (jiwa)	187.392	189.877	191.895	194.548	194.616
3.	Persentase Penduduk berakses air minum (%)	96,63	96,77	95,75	97,30	97,52

Sumber: Dinas PUPR Perkim Kab. Barru Tahun 2025

Pada tabel diatas menunjukkan persentase penduduk berakses air minum pada tahun 2020 – 2024 berfluktuatif dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar 97,30 persen. Pada tahun 2022 mengalami penurunan dikarenakan adanya penambahan jumlah penduduk sebesar 2.018 jiwa sementara akses air minumnya tetap. Akses air minum yang dimaksud terdiri dari akses perpipaan dan non perpipaan dimana non perpipaan

meliputi mata air terlindungi, air kemasan, air dijual eceran dan penampungan air hujan.

j. Persentase Areal Kawasan Kumuh

Permukiman kumuh menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan, Pemukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 93

Areal Kawasan Kumuh Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Bidang/Urusan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas Kawasan kumuh (Ha)	21,07	18,55	71,55	122,37	86,77
2	Luas Wilayah Kabupaten (Ha)	117.472	117.472	117.472	117.472	117.472
3	Persentase areal kawasan Kumuh (%)	0,02	0,02	0,06	0,10	0,07

Sumber: Dinas PUPR Perkim Kab. Barru Tahun 2025

Tabel diatas menunjukkan areal kawasan kumuh mulai tahun 2020 hingga tahun 2021 cenderung stagnan diangka 0,02 persen, peningkatan kembali terjadi pada tahun 2022 dan tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Barru telah melakukan beberapa intervensi penganggaran pada lokasi kumuh tersebut, hanya saja belum pernah dilakukan deliniasi kembali luas areal kawasan kumuh yang ditetapkan tersebut.

Apabila dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Barru, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah areal kawasan kumuh pada tahun 2023 belum mencapai target yang diharapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Barru pada tahun 2023 yang juga menetapkan target sebesar 0,06 persen.

k. Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk

Tempat pemakaman terdiri atas Tempat Pemakaman Umum (TPU), Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) dan Tempat Pemakaman Khusus (TPK). Tempat Pemakaman Umum (TPU) adalah areal tempat pemakaman milik/dikuasai pemerintah daerah yang disediakan untuk umum yang berada dibawah pengawasan, pengurusan dan pengelolaan pemerintah daerah. Sedangkan Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman mayat yang pengelolaannya dilakukan oleh yayasan/badan sosial/badan keagamaan. Tempat Pemakaman Khusus (TPK)

adalah areal tanah yang digunakan untuk pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus. Sedangkan rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 94
Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk
Kab.Barru Tahun 2021-2023

No	Uraian	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
		Jmlh	Luas (m2)	Daya Tampung	Jmlh	Luas (m2)	Daya Tampung	Jmlh	Luas (m2)	Daya Tampung
1.	Tempat Pemakaman Umum (TPU)	39	40.001	26.667	39	40.001	26.667	39	40.001	26.667
2.	Tempat Pemakaman Bukan Umum(TPBU)	29	15.910	10.606	29	15.910	10.606	29	15.910	10.606
3.	Tempat Pemakaman Khusus (TPK)	11	218.000	-	11	218.000	-	11	218.000	-
4.	Lain-Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Jumlah Tempat Pemakaman	79	77.711	37.273	79	77.711	37.273	79	77.711	37.273
6.	Jumlah Penduduk (jiwa)	-	-	189.877	-	-	191.895	-	-	194.543
7.	Rasio TPU Persatuan Penduduk(1/6)	-	-	144,21	-	-	138,97	-	-	138,97

Sumber : Dinas PUPR PKP dan Pertanahan Kab. Barru Tahun 2024

Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk pada tabel diatas mengalami penurunan karena adanya penambahan jumlah penduduk sebesar 2.018 jiwa pada tahun 2022, sementara jumlah pemakaman, luas pemakaman dan daya tampungnya tidak bertambah. Sebaiknya dilakukan penambahan daya tampung pemakaman dengan cara optimalisasi pemanfaatan lahan untuk setiap makam di areal pemakaman.

➤ **Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Pemukiman**

a. Rasio rumah Layak huni

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Rasio rumah layak huni di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 95
Rasio Rumah Layak Huni terhadap Jumlah Penduduk
Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Rumah Layak Huni (unit)	44.719	59.920	47.318	48.219	46.967
2.	Jumlah Penduduk (Jiwa)	187.392	189.877	191.895	194.543	194.543
3.	Rasio	0,24	0,31	0,24	0,25	0,24

Sumber: Dinas PUPR Perkim Kab. Barru Tahun 2025

Pada tabel diatas menunjukkan rasio rumah layak huni terhadap jumlah penduduk berfluktuasi hal ini disebabkan oleh adanya penambahan jumlah penduduk setiap tahunnya yang tidak beriringan dengan jumlah rumah layak huni.

b. Rasio Permukiman Layak Huni

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung prikehidupan dan penghidupan. Rasio permukiman yang layak huni di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 96
Rasio Permukiman Layak Huni Kabupaten Barru
Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas Permukiman Layak Huni (Ha)	3.750,57	3.769,12	3.771,32	3.696,00	3.684,87
2	Luas Wilayah Pemukiman	3.771,64	3.771,64	3.771,64	3.771,64	3.771,64
3	Rasio	0,99	0,99	0,99	0,97	0,98

Sumber: Dinas PUPR Perkim Kab. Barru Tahun 2025

Pada tabel diatas rasio permukiman layak huni cenderung stagnan dari tahun 2020 sampai tahun 2022, sedangkan pada tahun 2023 mengalami penurunan. Untuk luas permukiman layak huni didapatkan dari hasil pengurangan luas wilayah permukiman secara keseluruhan dengan luas permukiman kumuh yang pengertiannya dipersamakan dengan permukiman tidak layak huni, khusus untuk tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 luas permukiman layak huni bertambah seiring dengan berkurangnya luas permukiman kumuh Kabupaten Barru.

➤ **Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban**

a. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Persentase cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (linmas) yakni 100 orang petugas linmas kabupaten dibagi dengan satu wilayah kerja kabupaten. Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 97
Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)
Kab. Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	100 orang petugas Linmas di Kabupaten/ Kota daerah pemekaran baru (Orang)	898	898	736	1084	1084
2	1 Wilayah Kerja kabupaten (Jiwa)	187.39 2	189.87 7	191.89 5	194.54 3	195.380
3	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	0,48	0,47	0,38	0,56	0,56

Sumber : Dinas Satpol PP dan Damkar Kab. Barru Tahun 2025

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (linmas) cenderung menurun dari tahun 2020 ke 2022, namun pada tahun 2023 kembali meningkat sebesar 1.084 orang. hal ini tidak mempengaruhi kinerja linmas seiring dengan penambahan jumlah penduduk Kab. Barru pada tahun 2023.

b. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) adalah perbandingan antara jumlah penyelesaian pelanggaran K3 dengan jumlah pelanggaran K3 dikali 100 persen. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 98
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelanggaran K3 Yang terselesaikan (kasus)	254	70	83	70	23
2	Jumlah Pelanggaran K3 Yang Dilaporkan Masyarakat Dan Teridentifikasi (kasus)	14	7	4	5	13
3	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) (%)	18,14	10,00	20,75	14	100

Sumber : Dinas Satpol PP dan Damkar Kab. Barru Tahun 2025

Data Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) menunjukkan bahwa semua kasus pelanggaran K3 yang diselesaikan cenderung berfluktuatif dalam kurun tahun 2020-2024. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 100 persen. Sedangkan capaian terendah

terjadi pada tahun 2021 sebesar 10 persen.

c. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran

Persentase cakupan pelayanan bencana kebakaran meliputi jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran dibagi dengan luas wilayah kabupaten. Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 99

Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran
Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jangkauan Luas wilayah Manajemen Kebakaran (Km ²)	1.174,7	1.174,7	1.174,7	1.174,7	1.174,7
2	Luas Wilayah (Km ²)	1.174,7	1.174,7	1.174,7	1.174,7	1.174,7
3	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Satpol PP dan Damkar Kab. Barru Tahun 2025

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa hingga tahun 2024 target cakupan wilayah manajemen kebakaran dipertahankan dari tahun 2020 sebesar 100 persen, penempatan armada mobil pemadam kebakaran di WMK Kecamatan Pujananting menjadi unsur keterpenuhan jangkauan wilayah sehingga sampai Tahun 2022 ini sudah ada 6 WMK yang ada di Kabupaten Barru (Tanete Riaja, Balusu, Mallusetasi, Soppeng Riaja, Tanete Rilau, dan Pujananting) serta Posko Induk yang ada di Kecamatan Barru, yang diharapkan dapat meminimalisir kerugian masyarakat atau pun korban jiwa akibat kebakaran.

d. Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Penanganan kebakaran merupakan hal yang diantaranya memerlukan keahlian, ketepatan dan kecepatan. Waktu penanganan kebakaran sangat menentukan tingkat keberhasilan penanganan dalam setiap kasus kebakaran. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) merupakan Jumlah Kasus Kebakaran Di WMK Yang Tertangani Dalam Waktu Maksimal 15 Menit terhadap Jumlah Kasus Kebakaran Dalam Jangkauan WMK yang dinyatakan dalam persen. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 100

Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kasus Kebakaran Di WMK Yang Tertangani Dalam Waktu Maksimal 15 Menit (Kasus)	70	35	26	146	94
2	Jumlah Kasus kebakaran Dalam Jangkauan WMK (kasus)	70	35	26	146	94
3	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Wilayah Manajemen Kebakaran	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Satpol PP dan Damkar Kab. Barru Tahun 2025

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terjadi penurunan kasus kebakaran di Kabupaten Barru dari tahun 2020, hal ini dikarenakan musim kemarau relatif lebih singkat, Namun pada tahun 2023 terjadi peningkatan kasus kebakaran sebesar 146. Disamping itu optimalisasi sosialisasi terhadap masyarakat tentang pencegahan dan bahaya kebakaran terus ditingkatkan. Adapun tingkat waktu tanggap daerah WMK telah mencapai 100%, hal ini diasumsikan dengan adanya pemadam kebakaran di tiap Kecamatan maka waktu respon terhadap setiap kejadian kebakaran relatif dapat terpenuhi.

e. Persentase Penegakan PERDA

Penegakan PERDA merupakan salah satu tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja dimana setiap PERDA yang dihasilkan Kabupaten Barru menjadi tanggung jawab Satpol PP dalam Penegakannya. Persentase penegakan PERDA di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 101

Persentase Penegakan PERDA Kab.Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda (Perda)	18	31	55	70	10
2	Jumlah Pelanggaran Perda (perda)	18	31	55	70	10
3	Persentase Penegakan Perda (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Satpol PP dan Damkar Kab. Barru Tahun 2025

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa Persentase penegakan PERDA Kabupaten Barru periode tahun 2020-2024 cenderung dapat dipertahankan dengan capaian sebesar 100 persen.

➤ **Bidang Urusan Sosial**

a. Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 102

Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah PMKS yang diberi bantuan (jiwa)	17.967	18.027	13.171	14.279	14.279
2	Jumlah PMKS yang belum mendapatkan bantuan (jiwa)	21.821	3.794	4.856	3.748	3.748
3	Jumlah PMKS yang ada (jiwa)	39.785	18.027	13.171	12.063	12.063

Sumber : Dinas Sosial Kab. Barru Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penyandang PMKS yang memperoleh bantuan sosial fluktuatif tiap tahunnya. Hal ini membuktikan bahwa kepedulian pemerintah terhadap para PMKS semakin nyata dengan harapan agar mereka dapat meningkatkan kesejahteraannya.

b. Persentase PMKS Yang Tertangani

Persentase PMKS yang tertangani adalah perbandingan jumlah PMKS yang tertangani dengan jumlah PMKS yang ada, yang dinyatakan dalam persen. Persentase PMKS yang tertangani di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 103

Persentase PMKS Yang Tertangani Kabupaten Barru Tahun 2020-20224

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah PMKS yang tertangani (jiwa)	17.967	18.027	13.171	14.279	14.279
2	Jumlah PMKS yang ada (jiwa)	17.967	18.027	13.171	12.063	12.063
3	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tertangani (%)	100	100	100	118,37	118,37

Sumber : Dinas Sosial Kab. Barru Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Jumlah penyandang PMKS yang tertangani mencapai angka 100 persen tiap tahunnya. Hal ini membuktikan bahwa kepedulian pemerintah terhadap para PMKS semakin nyata dengan harapan agar mereka dapat meningkatkan kesejahteraannya sekaligus memenuhi pencapaian SPM.

➤ **Bidang Urusan Tenaga Kerja**

a. Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun

Angka sengketa pengusaha/pekerja pertahun adalah perbandingan jumlah kasus sengketa pengusaha pekerja dibandingkan dengan jumlah perusahaan di kali 100 persen. Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 104
Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Sengketa Pengusaha Pekerja (Kasus)	0	0	1	1	1
2	Jumlah Perusahaan (Unit)	51	51	51	51	54
3	Angka Sengketa Pengusaha- Pekerja per-Tahun (%)	0,00	0,00	0,51	0,51	0,54

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Barru Tahun 2025

Jumlah perselisihan kerja antara perusahaan dan tenaga kerja pada tahun 2024 yang dilaporkan dan ditangani oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bekerjasama dengan Pengawas Ketenagakerjaan wilayah Parepare dan Barru sebanyak 1 kasus.

b. Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Kerjasama (PB)

Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian kerjasama adalah perbandingan jumlah kasus yang diselesaikan dengan perjanjian kerjasama dibandingkan dengan jumlah kasus yang dicatatkan di kali 100 persen. Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian kerjasama di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 105
Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian kerjasama Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kasus yang diselesaikan dengan kerjasama (PB) (Kasus)	0	0	1	0	1
2	Jumlah kasus yang dicatatkan (Kasus)	0	0	1	1	1
3	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian kerjasama (PB) (Kasus)	0	0	1	0	1

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kab .Barru Tahun 2025

Dari tabel diatas terlihat bahwa pada tahun 2024, hanya terdapat 1 kasus yang terjadi di Kabupaten Barru dan telah diselesaikan melalui perjanjian kerjasama yang diinisiasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

c. Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan adalah perbandingan antara jumlah pencari kerja yang ditempatkan dengan jumlah pencari kerja yang mendaftar di kali 100 persen. Data besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 106

Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan Kabupaten Barru Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pencari kerja yang ditempatkan (orang)	132	638	844	461	115
2	Jumlah Pencari kerja yang mendaftar (orang)	250	1.694	2.140	1.220	981
3	Pencari Kerja yang ditempatkan (%)	52,80	38	39	37,78	11,72

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kab .Barru Tahun 2025

Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan berdasarkan monitoring tenaga kerja paing besar terjadi pada tahun tahun 2022 adalah sebesar 844 tenaga kerja dari total pencari kerja yang mendaftar sebanyak 2.140 tenaga kerja atau sebesar 39%.

d. Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek

Persentase besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek adalah perbandingan antara pekerja/buruh jamsostek dengan pekerja/buruh secara keseluruhan di kali 100 persen. Data Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 107

Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pekerja/ Buruh JAMSOSTEK (orang)	38.111	40,008	2.351	2.635	2.350
2	Pekerja/ Buruh (orang)	48.075	48,007	2.423	2.811	2.569
3	Persentase (%)	79	83	97,03	93,74	91,48

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kab .Barru Tahun 2025

Peningkatan yang signifikan terhadap kepesertaan Jaminan ketenagakerjaan di Kabupaten Barru dari 79% di tahun 2020

hingga 97,03% di tahun 2022, dan mengalami sedikit penurunan menjadi 93,74% di tahun 2023.

e. Perselisihan Buruh Dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah

Persentase penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah adalah perbandingan antara jumlah penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan pemda dengan jumlah kejadian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan pemda di kali 100 persen. Persentase penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah tidak ada perselisihan. Data perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 108
Perselisihan Buruh Dan Pengusaha Terhadap Kebijakan

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan Pemda (Kasus)	0	0	1	1	1
2	Jumlah Kejadian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan Pemda (Kasus)	0	0	1	1	1
3	Persentase penyelesaian perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah (%)	0	0	100	100	100

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kab .Barru Tahun 2025

Jumlah Perselisihan Buruh Dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru pada periode Tahun 2020-2024 jumlahnya sangat sedikit, hanya ada 1 kasus pada tahun 2022 sampai tahun 2024, sementara pada tahun 2020- 2021 sama sekali tidak ada kasus perselisihan.

f. Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi adalah perbandingan tenaga kerja yang dilatih dengan pendaftar pelatihan berbasis kompetensi. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 109
Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tenaga kerja yang dilatih (orang)	20	152	40	20	64

2	Pendaftar pelatihan berbasis kompetensi (orang)	20	152	40	20	64
3	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kab .Barru Tahun 2025

Pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi dan sertifikasi pada tahun 2023 dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja melalui Bidang Tenaga Kerja dan Lembaga Pelatihan Jasa Konstruksi sebanyak 20 Tenaga Kerja dengan capaian 100 persen apabila dibandingkan dengan jumlah pendaftar pelatihan. Dan meningkat pesat pada tahun 2024 sebanyak 64 yang dilatih.

g. Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan adalah perbandingan antara tenaga kerja yang dilatih dengan pendaftar pelatihan kewirausahaan dikali 100 persen. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 110

Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan kewirausahaan Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tenaga kerja yang dilatih (Orang)	20	0	0	0	0
2	Pendaftar pelatihan (Orang)	20	0	0	0	0
3	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (%)	100	0	0	0	0

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kab .Barru Tahun 2025

Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan di Kabupaten Barru pada periode 2020-2024, cenderung menurun, sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 belum ada lagi tenaga kerja yang dilatih, hal ini mempengaruhi cakupan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan.

➤ **Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**

Pemberdayaan perempuan merupakan urusan yang sangat penting untuk menuju pencapaian kesetaraan gender yaitu dengan memberikan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk

berperan aktif disemua bidang kehidupan. Sedangkan perlindungan anak merupakan amanah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan dengan ditandatanganinya deklarasi menuju kabupaten layak anak pada tahun 2019, mengharuskan Kabupaten Barru memberikan perhatian besar terhadap pemenuhan hak-hak anak.

Menyadari pentingnya peran perempuan dalam pembangunan, selama periode 2020-2024 telah disiapkan untuk mengatasi isu pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, sekaligus mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG's), terutama tujuan kelima yaitu kesetaraan gender. Capaian pemberdayaan Perempuan ditunjukkan dari angka Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Barru yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 111
Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (%)	95,52	95,51	95,64	95,65	95,65
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (%)	63,96	63,98	65,24	64,91	64,91

Sumber : Dinas DPMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini menggambarkan kesetaraan gender di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Sementara Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indikator yang menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Dari angka IPG dan IDG pada tabel diatas memperlihatkan bahwasanya angka untuk IPG dalam periode tahun 2020-2024 menunjukkan perolehan yang memuaskan meskipun berfluktuasi.

Selain itu pada Tahun 2021 telah terbit Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan. Dalam konteks pembangunan, pengarusutamaan gender, dan pemberdayaan perempuan begitu erat kaitannya dengan memperbaiki kualitas generasi penerus bangsa, untuk itu sangat penting focusing terhadap Pemberdayaan Perempuan. Untuk perlindungan anak Pemerintah Daerah Kabupaten Barru juga telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru

Nomor 6 tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak, diharapkan dengan terbitnya Peraturan Daerah dapat melindungi hak-hak anak di Kabupaten Barru.

a. Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. pekerja perempuan di lembaga pemerintahan dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah dan persentase perempuan yang menempati posisi eselon I-IV. untuk persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 112
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon II (Orang)	2	2	2	2	2
2	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon III (Orang)	29	32	34	41	41
3	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon IV (Orang)	215	220	102	101	101
4	Pekerja perempuan di pemerintah (Orang)	4.710	4.088	2.435	2.547	2.547
5	Jumlah pekerja perempuan (Orang)	25.415	21.687	25.649	25.854	25.854
6	Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah (%)	18,55	18,55	9,49	9,85	9,85

Sumber : Dinas DPMDPPKBPPPA Tahun 2025/BPS Kab. Barru tahun 2025

Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Barru dalam periode Tahun 2020-2024 cenderung berfluktuatif, dari tahun 2020 sampai di tahun 2024, persentasenya di kisaran 18 persen, akan tetapi pada tahun 2022 dan 2023 persentase cenderung menurun pada kisaran angka 9 persen

b. Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan di DPRD

Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD adalah perbandingan jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan dengan jumlah total kursi di keanggotaan DPRD yang dinyatakan dalam persen. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 113
Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan di DPR Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan (Orang)	5	5	5	5	6
	Jumlah total kursi di	25	25	25	25	25

2	keanggotaan DPRD (Orang)					
3	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD (%)	20	20	20	20	24

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Barru Tahun 2023

Persentase proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR Kabupaten Barru dalam periode Tahun 2020-2024 cenderung stagnan, capaian tertinggi pada tahun 2024 dengan persentase sebesar 24 persen, dimana terdapat 6 orang perempuan yang duduk dikursi DPRD.

c. Rasio KDRT

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Rasio KDRT adalah jumlah KDRT yang dilaporkan dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 rumah tangga. Rasio KDRT di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 114
Rasio KDRT terhadap Total Jumlah Rumah Tangga

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah KDRT (Kasus)	8	8	0	1	0
2	Jumlah Rumah Tangga (KK)	54.707	56.657	63.128	63.128	63.128
3	Rasio KDRT (%)	0,01	0,01	0	0,01	0

Sumber : Dinas DPMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025

Rasio KDRT terhadap Total Jumlah Rumah Tangga Kabupaten Barru dalam periode Tahun 2020-2024 cenderung menurun, capaian tertinggi terjadi pada tahun 2020 dengan rasio 0,01 persen. capaian terbaik terjadi pada tahun 2022 dan 2024 dengan tidak adanya kasus KDRT pada tahun tersebut.

d. Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu di Kabupaten Barru Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 115

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu Kab.Barru Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pengaduan/ laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu (Kasus)	3	13	11	24	24
2	Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu (Kasus)	3	13	11	24	24
3	Persentase (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas DPMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025

Persentase Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu Kabupaten Barru dalam kurun 5 tahun terakhir sangat baik dengan cakupan persentase 100 persen. Hal ini mengindikasikan semua pengaduan dilayani dan ditindaklanjuti.

e. Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A Dan PPT/PKT Di Rumah Sakit

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A Dan PPT/PKT di Rumah Sakit di Kabupaten Barru Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 116

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A Dan PPT/PKT di Rumah Sakit di Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih dipuskesmas mampu tatalaksana KtP/A atau PPT/PKT di RS disuatu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu	0	0	0	32	0
2	Jumlah seluruh korban KtP/A yang terdata datang ke puskesmas mampu tatalaksana kasus Ktp/A dan ke RS disuatu wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu	0	0	0	32	0
3	Persentase (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas DPMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga terlatih

dipuskesmas mampu tatalaksana menunjukkan angka 100 persen dalam kurun waktu 5 tahun yang mengindikasikan semua pengaduan dilayani dan ditindaklanjuti.

f. Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Yang Diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu.

Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu di Kabupaten Barru Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 117

Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu di Kabupaten Barru Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah korban kekerasan yang memperoleh pelayanan rehabsos	0	0	0	0	0
2	Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan rehabsos dalam kurun waktu tertentu	0	0	0	0	0
3	Persentase (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas DPMDPPKBPPPA Kab. Barru tahun 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir tidak terdapat kasus kekerasan yang membutuhkan rehabilitasi sosial.

g. Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak

Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Barru Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 118

Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Barru

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undnagan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak (Kasus)	0	0	6	NA	NA

2	Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan (Kasus)	0	0	6	NA	NA
3	Persentase (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas DPMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025

Persentase penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Barru pada Tahun 2024 sangat baik dengan cakupan persentase sebesar 100 persen. Hal ini mengindikasikan penegakan hukum yang baik atas perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak.

h. Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum di Kabupaten Barru Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 119

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum di Kab.Barru

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah korban mendapat layanan bantuan hokum (Orang)	0	0	6	6	6
2	Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum (Orang)	0	0	6	6	6
3	Persentase (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas DPMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025

Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum Kabupaten Barru pada Tahun 2023 sangat baik dengan cakupan persentase 100 persen. Hal ini mengindikasikan semua pengaduan dilayani dan mendapatkan layanan bantuan hukum.

i. Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan

Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Barru Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 120

Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Barru Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang	0	0	4	0	1

	mendapatkan pelayanan pemulangan (Orang)					
2	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di UPT (Orang)	0	0	4	0	1
3	Persentase (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas DPMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025

Persentase Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan Kabupaten Barru pada Tahun 2024 sangat baik dengan cakupan persentase 100 persen. Hal ini mengindikasikan semua pengaduan dilayani dan mendapatkan pelayanan pemulangan.

j. Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan

Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Barru Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 121

Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya	0	0	4	NA	NA
2	Jumlah korban yang membutuhkan reintegrasi sosial	0	0	4	NA	NA
3	Persentase (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas DPMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025

Persentase Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan Kabupaten Barru pada Tahun 2023 sangat baik dengan cakupan persentase 100 persen. Hal ini mengindikasikan semua pengaduan dilayani dan mendapatkan pelayanan reintegrasi sosial.

➤ **Bidang Urusan Pangan**

a. Ketersediaan Pangan Utama, Energi Dan Protein Perkapita Dan Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan

Pangan menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2004 adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan atau minuman.

Indikator ketersediaan pangan utama, energi dan protein

perkapita dan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan merupakan indikator yang digunakan untuk melihat kemampuan meningkatkan ketahanan pangan. Ketersediaan pangan utama, energi dan protein perkapita dan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 122
Ketersediaan Pangan Utama, Energi Dan Protein Perkapita Dan Pengawasan Dan Pembinaan keamanan Pangan

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Ketersediaan pangan utama (Ton)	261,588	229,133	237,98	296,488	366,78
2	Ketersediaan energi (mT)	2,782	2.352	2.354,29	2.063,00	2.068,00
3	Protein perkapita (kalori)	69,77	96,91	81,9	107,40	98,50
4	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	53	45,2	77,3	73,76	73,61

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Barru Tahun 2025

Persentase Ketersediaan Pangan Utama, Energi Dan Protein Perkapita Dan Pengawasan Dan Pembinaan keamanan Pangan Kabupaten Barru dalam periode Tahun 2020-2024 berfluktuasi, Capaian tertinggi pada tahun 2022 dengan persentasenya 77,3 persen, capaian terendah tahun 2021 dengan persentase 45,2 persen.

b. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah persentase angka kecukupan gizi (AKG) di kalikan bobot masing-masing kelompok pangan. Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 123
Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH)

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH) (%)	93	93	93,20	82	78,50

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Barru Tahun 2025

Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH) Kabupaten Barru dalam periode Tahun 2020-2024 berfluktuasi, capaian tertinggi pada tahun 2022 sebesar 93,20 persen sedangkan capaian terendah pada tahun 2024 sebesar 78,50 persen.

➤ **Bidang Urusan Lingkungan Hidup**

a. Tersusunnya RPPLH Dan Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) sebagai instrument perencanaan memiliki fungsi penting

untuk menyeleraskan kebijakan lingkungan baik yang dibuat oleh lembaga yang secara khusus diberi tugas mengelola lingkungan maupun lembaga lain yang tugasnya juga terkait dengan persoalan lingkungan hidup dan harus diintegrasikan dalam rencana pembangunan. Tersusunnya RPPLH dan terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 124

Tersusunnya RPPLH Dan Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2020– 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tersusunnya RPPLH kab/Kota (Ada/Tidak ada)	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kab/Kota (Ada/Tidak Ada)	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

Dalam periode tahun 2020-2024, belum ada dokumen RPPLH yang disusun dan diintegrasikan Dalam Rencana Pembangunan Kabupaten Barru.

b. Terselenggaranya KLHS Untuk K/R/P

Regulasi yang mengatur tiap daerah untuk wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan rencana pembangunan daerah tertuang pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dalam Pasal 15 ayat (2). Pada ayat ini menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi : (a) rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota; dan (b) kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup. Pada prinsipnya KLHS adalah suatu kajian/penilaian mandiri (self assessment) untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Adapun terlaksananya KLHS sebagai bagian dalam pengambilan kebijakan rencana program Kabupaten Barru tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 125
Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Kabupaten Barru

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah (Ada/Tidak ada)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru Tahun 2025

Dalam periode tahun 2020-2024, setiap tahun telah diselenggarakan KLHS untuk K/R/P tingkat daerah di Kabupaten Barru dengan output dokumen KLHS yang disusun dan diintegrasikan Dalam Rencana Pembangunan Kabupaten Barru.

c. Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air, Indeks kualitas Udara, Indeks kualitas Tutupan Lahan

Indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks kualitas tutupan lahan merupakan indikator pengukuran indeks kualitas lingkungan hidup yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang kualitas lingkungan dan sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Indeks kualitas air adalah nilai yang menunjukkan status mutu air dengan metode indeks pencemaran, Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah suatu nilai yang menunjukkan mutu atau tingkat kebaikan udara menurut sifat-sifat unsur pembentuknya yang dihitung berdasarkan emisi dari 2 (dua) polutan udara yaitu karbon monoksida (CO) dan nitrogen oksida (NOx). Kedua jenis polutan ini dijadikan sebagai komponen IKU karena memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kehidupan manusia. Perhitungan indeks tutupan lahan dilakukan melalui perbandingan jumlah luas tutupan berhutan dibagi dengan jumlah luas wilayah Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 126
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Hasil Pengukuran indeks Kualitas Air	50	60,67	50,67	50,67	64,00
2	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	90,59	92,52	92,74	92,74	91,67
3	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	69,77	70,25	70,44	70,44	70,59
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (%)	69,85	75,67	72,04	72,04	76,65

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru Tahun 2025

Pemantauan kualitas air sungai di Kabupaten Barru pada Tahun 2024 dilakukan pada 3 sungai, yaitu sungai Sumpang

BinangaE di Kecamatan Barru, Sungai BottoE yang melintasi wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan Tanete Rilau dan sungai Takkalasi yang melintasi wilayah Kecamatan Barru dan Kecamatan Balusu. Setiap sungai memiliki 3 titik pantau dengan pengambilan sampel minimal 2 kali dalam setahun. Parameter yang dinilai dalam indeks kualitas air yaitu TSS,DO, COD, BOD, Fosfat, Total Coliform dan E.Coli/Fecal Coli. Pada Tahun 2020 Nilai Indeks kualitas Air (IKA) Kabupaten Barru pada sebesar 64 berada pada kondisi baik. Nilai IKA tersebut dipengaruhi oleh berbagai variabel antara lain:

- Penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan (restorasi)
- pada berbagai sumber air
- ketersediaan dan fluktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global
- penggunaan air
- Tingkat erosi dan sedimentasi

Kualitas udara ambient di Kabupaten Barru dipengaruhi oleh kegiatan transportasi dan industri. Pemantauan dilakukan di 4 titik lokasi yang mewakili dari pemukiman, industri, dan padat lalu lintas dengan menggunakan metode passive sampler. Parameter yang digunakan dalam perhitungan Indeks Pencemaran Udara adalah konsentrasi NO₂ dan SO₂. Nilai konsentrasi tahunan adalah rata-rata dari nilai konsentrasi yang terpantau setiap bulan untuk selanjutnya dikonversikan menjadi nilai indeks dalam skala 0-100.

Indeks Kualitas Udara (IKU) Tahun 2024 di Kabupaten Barru pada Tabel di atas menunjukkan angka 91,67 menurun sedikit dari tahun sebelumnya, yang berarti indeks kualitas udara di Kabupaten Barru > 50 jadi termasuk dalam kondisi baik. Tetapi nilai IKU tersebut berfluktuasi dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan karena konsentrasi SO₂ Tahun 2020 mengalami penurunan. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Barru harus meningkatkan upaya dalam peningkatan kualitas udara di Kabupaten Barru terutama pada lokasi perkantoran dan pemukiman.

Berdasarkan data tersebut diatas, maka diperoleh kesimpulan bahwa status IKLH Kabupaten Barru pada Tahun 2024 berada dalam status cukup, hal ini menyimpulkan bahwa

terjadi kenaikan kualitas lingkungan hidup dibanding pada tahun 2020, dimana pada tahun 2020 kualitas lingkungan hidup Kabupaten Barru berada dalam status kurang.

Peningkatan kualitas lingkungan hidup ini disebabkan karena berubahnya status mutu air sungai pada beberapa titik pantau dari tercemar berat menjadi tercemar ringan dan yang tercemar sedang menjadi memenuhi baku mutu. Disamping itu juga disebabkan karena adanya perubahan metode perhitungan indeks tutupan lahan, yang sebelumnya beberapa tutupan lahan tidak dihitung sebagai tutupan hutan, pada tahun ini dihitung sebagai tutupan hutan seperti semak belukar, taman keanekaragaman hayati dan hutan kota.

d. Pembinaan Dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah

Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah merupakan perbandingan antara Jumlah ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang ditangani dengan Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang di bina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang dinyatakan dalam persen. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 127

Pembinaan dan Pengawasan terkait Ketaatan penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Kabupaten Barru Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah (%)	10	10	23	8	11

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru Tahun 2025

Dalam periode tahun 2020-2024, Pembinaan dan Pengawasan terkait Ketaatan penanggungjawab Usaha dan/atau

Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Kabupaten Barru setiap tahunnya telah dilaksanakan, meskipun demikian capaian persentasenya masih rendah dengan kisaran di bawah 25 persen.

e. Peningkatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD)

Peningkatan kapasitas dan sarana prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) terdiri atas Jumlah PPLHD yang dilatih dan/atau dibina dan Jumlah Sarana Prasarana PPLHD yang memenuhi standar minimum. Peningkatan kapasitas dan sarana prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 128

Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) Kabupaten Barru Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Peningkatan kapasitas dan sarana prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD)	1	1	2	1	1
2	Jumlah PPLHD yang dilatih dan/atau dibina;	0	0	0	0	0
3	Jumlah Sarana Prasarana PPLHD yang memenuhi standar minimum	0	0	0	3	3

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru Tahun 2025

Dalam periode tahun 2020-2024, Peningkatan kapasitas dan sarana prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) berfluktuasi, capaian tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan capaian sebanyak 2 kali. Sementara capaian pada tahun 2024 kembali turun menjadi 1.

f. Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup

Penghargaan lingkungan hidup merupakan reward yang diberikan kepada individu atau kelompok karena telah berjasa menjaga, memelihara, dan melestarikan lingkungan serta memenuhi dan/atau melebihi standar nilai yang ditentukan. Dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 2. 129

Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	0	1	3	2	2

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru Tahun 2025

Dalam periode tahun 2020-2024, setiap tahunnya telah terlaksana pemberian penghargaan lingkungan hidup. Hal ini membuktikan komitmen pemerintah kabupaten Barru dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup.

g. Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH Dan PUU LH yang di Terbitkan Oleh Pemerintah Daerah, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah

Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 130

Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah di Kabupaten Barru

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pengaduan masyarakat yang ditangani (Kasus)	10	4	6	4	4
2	Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi (Kasus)	10	4	6	4	4
3	Persentase (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru Tahun 2025

Persentase Cakupan layanan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah di Kabupaten Barru pada Tahun 2024 sangat baik dengan cakupan persentase 100 persen. Hal ini mengindikasikan semua pengaduan dilayani dan terregisterasi.

h. Timbulan Sampah yang ditangani

Timbulan sampah yang ditangani adalah perbandingan antara volume timbulan yang ditangani dengan total timbulan sampah dikali dengan 100 persen. Timbulan sampah yang ditangani tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 131

Timbulan Sampah yang ditangani di Kabupaten Barru

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Volume timbulan sampah yang ditangani (Ton)	22.030	5.130,47	27.817,00	24.562,18	24.855,36
2	Total timbulan sampah (Ton)	27.359	9.929,31	27.817,23	28.230,27	28,526,2
3	Persentase (%)	80,52	51,67	99,99	87,01	87,13

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru Tahun 2025

Persentase Timbulan Sampah yang ditangani di Kabupaten Barru pada tahun 2020-2024 berfluktuasi. Capaian tertinggi

pada tahun 2022 sebesar 99,99 persen, capaian terendah tahun 2021 sebanyak 51,67 persen. Sementara capaian tahun 2024 sebesar 87,13 persen, Hal ini mengindikasikan volume timbulan sampah yang ditangani kabupaten Barru sudah cukup besar.

i. Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R

Sampah yang berkurang melalui 3R adalah jumlah sampah yang dikelola melalui aktifitas 3R seperti bank sampah, pusat daur ulang, pengomposan, dan lain-lain dan tidak diangkut ke TPA atau dibuang ke lingkungan. Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 132
Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R (%)	34,38	34,54	36,86	38,5	39,45

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru Tahun 2025

Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R pada tahun 2024 di kabupaten Barru sebesar 39,45 persen, Hal ini mengindikasikan pengurangan jumlah sampah melalui program ini masih rendah begitu pula efektifitas dari program ini.

j. Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani

Jumlah sampah yang tertangani yaitu volume sampah yang di tangani di bagi dengan Volume produksi sampah yang dinyatakan dalam persen. Persentase jumlah sampah yang tertangani di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 133
Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani Kabupaten Barru Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Jumlah Sampah yang Ditangani (Persen)	80,52	81,93	85,05	86,48	87,13

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru Tahun 2025

Persentase jumlah sampah yang ditangani dari tahun 2020-2024 mengalami peningkatan, dengan persentase tertinggi pada tahun 2024 dengan capaian sebesar 87,13 persen, sementara capaian terendah terjadi pada tahun 2020 dengan capaian sebesar 80,52 persen.

k. Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota

Operasionalisasi TPA/ TPST/ SPA di Kabupaten/ Kota dapat

dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 134
Operasionalisasi TPA/ TPST/ SPA di Kabupaten/ Kota

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Operasionalisasi TPA/ TPST/ SPA di Kabupaten/ Kota (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru Tahun 2025

Persentase operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten Barru mencapai angka 100 persen setiap tahunnya.

➤ **Bidang Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**

a. Rasio Penduduk ber-KTP Per Satuan Penduduk

Rasio penduduk ber-KTP adalah perbandingan jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas yang ber-KTP terhadap jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas atau telah menikah. Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2. 135
Rasio Penduduk ber-KTP Per Satuan Penduduk

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penduduk usia > 17 yang ber-KTP (Jiwa)	135.033	137.147	139.463	144.566	144.566
2	Jumlah penduduk usia >17 atau telah menikah (Jiwa)	135.045	137.159	142.219	145.556	145.556
3	Rasio (Persen)	0,99	0,99	0,98	0,99	0,99

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barru Tahun 2025

Kinerja penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Barru terus menunjukkan tren positif. Terkait kepemilikan KTP terlihat bahwa pada tahun 2023 menunjukkan angka 0,99 yang mendekati angka 1, yang mana berarti jumlah penduduk yang bersyarat memiliki KTP sudah hampir semuanya telah memiliki KTP.

b. Rasio Bayi Dan Penduduk Berakte Kelahiran

Rasio bayi berakte kelahiran adalah perbandingan jumlah bayi lahir dalam 1 tahun yang berakte kelahiran terhadap jumlah bayi lahir pada tahun yang sama. Sedangkan Rasio penduduk berakte kelahiran adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang mempunyai akte kelahiran dengan jumlah penduduk. Rasio bayi dan penduduk berakte kelahiran di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 136
Rasio Bayi dan Penduduk Berakte Kelahiran Kabupaten Barru

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah bayi berakte kelahiran Jiwa)	1.403	1.745	1.745	1.624	1.624

2	Jumlah bayi (Jiwa)	1.422	1.745	1.745	1.624	1.624
3	Rasio (%)	0,99	1	1	1	1

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel terlihat angka rasio bayi berakte kelahiran telah mencapai angka 1 yang berarti setiap bayi yang lahir telah memiliki akte. Sedangkan rasio penduduk berakte kelahiran tahun 2022 -2023 perkecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 137
Rasio Penduduk Berakte Kelahiran Kabupaten Barru

Kode	Kecamatan	Jumlah Penduduk yang Mempunyai Akte Kelahiran		Jumlah Penduduk		Rasio	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023
731101	Tanete Riaja	6.858	7.260	7.066	7.487	0,97	0,97
731102	Tanete Rilau	10.789	11.571	11.289	11.887	0,95	0,97
731103	Barru	12.481	13.533	13.052	13.712	0,95	0,97
731104	Soppeng Riaja	4.923	5.111	4.962	5.232	0,99	0,98
731105	Mallusetasi	7.506	7.943	7.683	8.138	0,97	0,98
731106	Pujananting	3.716	3.793	3.746	3.955	0,99	0,96
731107	Balusu	5.174	5.440	5.273	5.589	0,98	0,97
7311	Kab. Barru	51.447	54.472	53.071	56.000	0,97	0,97

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel di atas terlihat kepemilikan akte kelahiran tidak mencapai angka maksimal. Pemerintah Kabupaten Barru perlu mengatasi keterlambatan pengurusan akte kelahiran yang menjadi permasalahan mengapa tidak pernah mencapai 100%.

c. Rasio Pasangan Berakte Nikah

Rasio pasangan berakte nikah adalah perbandingan jumlah pasangan nikah berakte nikah terhadap jumlah keseluruhan pasangan nikah. Rasio pasangan berakte nikah di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 138
Rasio pasangan berakte nikah Kabupaten Barru

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pasangan nikah berakte nikah (Jiwa)	32.810	38.630	45.498	49.653	49.653
2	Jumlah keseluruhan pasangan nikah (Jiwa)	87.208	88.111	89.700	90.383	90.383
3	Rasio (%)	37,62	43,84	50,72	54,94	54,94

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barru Tahun 2025

Persentase Cakupan Rasio pasangan berakte nikah Kabupaten Barru Tahun 2023 masih cukup rendah dengan cakupan persentase 54,94 persen. Hal ini mengindikasikan

masih banyak pasangan nikah yang belum berakte nikah.

d. Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi Dan Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

KTP berbasis NIK secara Nasional yang selanjutnya disebut KTP Elektronik adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Ketersediaan database kependudukan skala Provinsi dan Penerapan KTP Nasional berbasis NIK di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 139

Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi dan

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel di atas, diketahui bahwa sejak tahun 2020-2024 telah tersedia database dengan skala provinsi, begitupula telah diterapkan KTP nasional berbasis NIK. Hal ini sejalan dengan target RPJMD Pada tahun 2023 yang mengharapkan ada database kependudukan skala propinsi dan sudah dilaksanakan penerapan KTP Nasional Berbasis NIK.

e. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disebut KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cakupan penerbitan KTP Elektronik adalah jumlah dokumen KTP Elektronik yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap tahunnya dibandingkan dengan jumlah wajib KTP dalam satu wilayah pada tahun yang sama, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 140

Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan (Orang)	135.045	137.147	139.463	144.566	144.566
2	Jumlah penduduk wajib KTP (Orang)	135.033	137.159	142.219	145.556	145.556
3	Persen ((1/2)x100%)	99,99	99,99	98,06	99,32	99,32

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel di atas, diketahui bahwa sejak tahun 2020-2024

Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Barru sangat baik, dengan kisaran 98 persen ke atas.

f. Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran

Cakupan penerbitan akte kelahiran di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.141

Cakupan penerbitan akte kelahiran di Kabupaten Barru Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan penerbitan akte kelahiran (%)	44,54	47,27	51,44	97,27	97,27

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barru Tahun 2023

Dari tabel di atas, diketahui bahwa Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran di Kabupaten Barru cenderung meningkat setiap tahun sehingga mencapai angka sebesar 97,27 persen.

➤ **Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**

a. Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik

Pembangunan prasarana di wilayah kelurahan/pedesaan mempunyai dampak langsung terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat secara berkesinambungan. Prasarana yang dibangun harus dapat dimanfaatkan sampai masa yang panjang, untuk itu diperlukan upaya pemanfaatan dan pemeliharaan. Bila prasarana yang dibangun tidak memberikan manfaat jangka panjang akibat lemahnya pengelolaan, akan berakibat pada tidak tercapainya harapan masyarakat dan tujuan program. Selain faktor kualitas konstruksi yang dihasilkan, faktor-faktor penting yang mempengaruhi berfungsinya suatu prasarana dan sarana adalah pengelolaan prasarana, yang mencakup organisasi pengelola, pemanfaatan/pengoperasian dan pemeliharaan yang sesuai dengan kebutuhan. Bila salah satu hal tersebut tidak dipenuhi maka akan berpengaruh kepada kualitas pelayanan dan umur pemanfaatan yang akhirnya akan mengakibatkan tidak tercapainya harapan masyarakat dan tujuan dibangunnya prasaran dan sarana tersebut. Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.142

Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kantor pemerintahan Desa yang Baik (Unit)	40	40	40	40	40

2	Jumlah seluruh pemerintahan desa (Unit)	40	40	40	40	40
3	Persentase (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel di atas, diketahui bahwa sejak tahun 2020-2024 persentase cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik di Kabupaten Barru sudah cukup tinggi, dengan kisaran persentase sebesar 100 persen dalam kurun waktu lima tahun tersebut.

b. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah perbandingan jumlah kelompok binaan LPM dalam 1 (satu) tahun dengan jumlah LPM yang dinyatakan dalam persen. Rata-rata kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.143

Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) (Unit)	55	55	55	55	55
2	Jumlah LPM (Unit)	55	55	55	55	55
3	Rata-rata	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel di atas, diketahui bahwa sejak tahun 2020-2024, Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kabupaten Barru sudah cukup tinggi, dengan kisaran rata-rata sebesar 1 dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

c. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK adalah banyaknya kelompok binaan PKK dalam 1 (satu) tahun dibagi dengan jumlah PKK. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.144

Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kelompok binaan PKK (Kelompok)	2485	NA	2.627	2.677	2.677
2	Jumlah PKK (Kelompok)	63	63	63	63	63
3	Rata-rata (%)	39,44	NA	41,70	42,49	42,49

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel di atas, diketahui bahwa sejak tahun 2020-2024, Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK di Kabupaten Barru masih cukup rendah, dengan kisaran rata-rata di bawah 50 persen dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

d. Persentase LSM Aktif

Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dihitung berdasarkan jumlah LSM aktif. Persentase LSM yang aktif adalah jumlah LSM yang terdaftar di pemerintah dari jumlah yang ada di Kabupaten Barru. Persentase LSM aktif di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.145

Persentase LSM Aktif Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah LSM terdaftar	56	51	41	39	39
2	Jumlah LSM tidak aktif	19	15	11	9	9
3	Jumlah LSM aktif (1-2)	37	36	30	30	30
4	Jumlah LSM	56	51	41	39	39
5	Persentase (%)	66	71	73	77	77

Sumber : Bakesbangpol dan Linmas Kabupaten Barru Tahun 2023

Dari tabel di atas, diketahui bahwa sejak tahun 2020-2024, persentase LSM Aktif di Kabupaten Barru cukup tinggi, dengan kisaran 70 persen dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

e. Persentase LPM Berprestasi

Jumlah LPM berprestasi yaitu Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif melaksanakan kegiatan dibagi jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang berprestasi dikali seratus. Persentase LPM berprestasi di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.146

Persentase LPM Berprestasi Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah LPM Berprestasi	14	14	14	23	23
2	Jumlah LPM	55	55	55	55	55
3	Persentase (%)	25,45	25,45	25,45	41,82	41,82

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel di atas, diketahui bahwa sejak tahun 2020-2024, persentase LPM Berprestasi di Kabupaten Barru menunjukkan trend yang stagnan dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Namun meningkat pada tahun 2023 dengan capaian sebesar 41,82 persen.

f. Persentase PKK aktif

PKK aktif yaitu jumlah PKK yang memiliki pengurus dan

sekretariat dan memiliki program kerja. Persentase PKK aktif adalah perbandingan antara jumlah PKK yang aktif dengan keseluruhan jumlah PKK yang dinyatakan dalam persen. Persentase PKK aktif di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.147

Persentase PKK Aktif Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah PKK Aktif (Kelompok)	63	63	63	63	63
2	Jumlah PKK (Kelompok)	63	63	63	63	63
3	Persentase (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel di atas, diketahui bahwa sejak tahun 2020-2024, persentase PKK Aktif di Kabupaten Barru cukup tinggi, dengan kisaran 100 persen dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

g. Persentase Posyandu Aktif

Persentase posyandu aktif adalah perbandingan jumlah posyandu aktif dengan jumlah semua posyandu yang dinyatakan dalam persen. Persentase posyandu aktif di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.148

Persentase Posyandu Aktif Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Posyandu Aktif (Posyandu)	262	262	270	270	270
2	Total Posyandu (Posyandu)	262	262	270	270	270
3	Persentase (Persen)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel di atas, diketahui bahwa sejak tahun 2020-2024, persentase posyandu aktif di Kabupaten Barru cukup tinggi, dengan kisaran 100 persen dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

h. Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan yang memberikan peluang sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat bisa berupa ide, gagasan, pikiran dan bisa pula berupa bantuan finansial. Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.149

Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah swadaya Masyarakat mendukung program pemberdayaan masyarakat	180	180	180	180	180
2	Total program pemberdayaan Masyarakat	6	6	6	6	6
3	Persentase (%)	30	30	30	30	30

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel di atas, diketahui bahwa sejak tahun 2020-2024, persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Barru cenderung stagnan dari tahun ke tahun, dengan kisaran 30 persen dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

i. Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat

Pada saat kegiatan sudah selesai dilaksanakan maka dilakukan serah terima dari pelaksana kegiatan kepada masyarakat dan masyarakat diwajibkan membentuk tim pemelihara sehingga apabila suatu saat ada kerusakan maka menjadi kewajiban masyarakat dan anggota tim pemelihara mempunyai kewajiban mengkoordinir iuran pemeliharaan serta proses pemeliharaannya. Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.150

Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Program pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan dan dipelihara masyarakat	3	3	3	3	3
2	Total pasca program pemberdayaan masyarakat	6	6	6	6	6
3	Persentase (%)	50	50	50	50	50

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel di atas, diketahui bahwa sejak tahun 2020-2024 persentase Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Barru cenderung stagnan dari tahun ke tahun, dengan kisaran 50 persen dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

➤ **Bidang Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**

a. Total Fertility Rate (TFR)

Total Fertility Rate (TFR) adalah angka kelahiran total. Total

Fertility Rate (TFR) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.151

Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Barru Tahun 2020-2024

NO.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Total Fertility Rate (TFR)	2,55	2,55	2,52	2,40	2,40

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel di atas, diketahui bahwa pada tahun 2024, jumlah total Fertility Rate (TFR) di Kabupaten barru sebesar 2,40.

b. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah melalui Kampung KB

Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.152

Persentase Perangkat Daerah yang Berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah melalui Kampung KB Di Kabupaten Barru Tahun 2020-2024

NO.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	28	28	11	15	15
2	Jumlah Seluruh Perangkat Daerah	45	36	36	33	33
3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/ Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB (%)	62,22	77,75	30,55	45,45	45,45

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel di atas, diketahui bahwa pada tahun 2023 persentase OPD yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB sebesar 45,45 persen, atau dengan kata lain sebanyak 15 OPD yang berperan aktif, dari keseluruhan 33 OPD.

c. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk

Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.153

Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk Di Kabupaten Barru Tahun 2020-2024

NO.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Perangkat Daerah yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan	45	36	36	33	33

Induk Pengendalian Penduduk						
2	Jumlah Seluruh Perangkat Daerah	45	36	36	33	33
3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel di atas, diketahui bahwa pada tahun dari tahun ke tahun perangkat daerah baik Dinas maupun Badan di Kabupaten Barru belum mengalami peningkatan atau penambahan yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk.

d. Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, dan Informal yang Melakukan Pendidikan Kependudukan

Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.154

Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, dan Informal yang Melakukan Pendidikan kependudukan Di Kabupaten Barru Tahun 2020-2024

NO.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel di atas, diketahui bahwa pada tahun 2023, Belum ada kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan.

e. Rata-Rata Jumlah Anak per Keluarga

Rata-rata jumlah anak per keluarga adalah perbandingan antara jumlah anak dengan jumlah keluarga. Rata-rata jumlah anak perkeluarga di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.155

Rata-rata jumlah anak per keluarga Tahun 2020 – 2024

NO.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah anak	61.280	54.881	51.580	56.000	
2	Jumlah keluarga	54320	61.838	52.641		
3	Rata-rata jumlah anak per keluarga	1,128	0,887	1,020		

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2020-2024 rata-rata jumlah anak per keluarga di Kabupaten

Barru di bawah 1,2. Dengan capaian rata-rata tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 1,128, dan terendah sebesar 0,887 pada tahun 2021.

f. Ratio Akseptor KB

Rasio akseptor KB adalah perbandingan antara jumlah akseptor KB dengan jumlah pasangan usia subur yang dinyatakan dalam persen. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Rasio akseptor KB di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.156

Rasio akseptor KB Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

NO.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah akseptor KB (Jiwa)	61.280	18.860	14.538	18.808	18.808
2	Jumlah pasangan usia subur (Jiwa)	54.320	27.087	27.083	35.752	35.752
3	Rasio akseptor KB (%)	112,81	69,63	53,68	52,61	52,61

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2020-2024, rasio akseptor KB di kabupaten Barru menunjukkan tren penurunan, dengan capaian tertinggi pada tahun 2020 sebesar 112,81, dan terendah sebesar 52,61 pada tahun 2023.

g. Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 - 49

Angka pemakaian kontrasepsi yang lazim disebut Contraceptive Prevalence Rate (CPR) adalah persentase perempuan usia reproduktif yang menggunakan (atau yang pasangannya menggunakan) suatu metode kontrasepsi pada suatu waktu tertentu. CPR hampir selalu dilaporkan untuk wanita kawin. CPR dapat digunakan untuk mengukur pemakaian semua metode kontrasepsi, baik yang tradisional maupun modern, atau untuk mengukur pemakaian metode kontrasepsi modern saja. CPR adalah perbandingan antara jumlah perempuan usia reproduksi (usia 15 - 49 tahun) yang menggunakan suatu metode kontrasepsi dengan jumlah seluruh perempuan usia 15-49 tahun yang ditanyakan dalam persen. Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.157

Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah peserta KB aktif (Jiwa)	19.562	13.753	14.187		
2	Jumlah pasangan usia subur (Jiwa)	29.361	27.089	27.083	35.752	
3	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 (%)	66,63	75,01	64,99		

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2020-2024, Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 sudah di atas 65 persen selama lima tahun terakhir, dengan capaian tertinggi pada tahun 2021 sebesar 75,01 dan terendah sebesar 64,99 pada tahun 2022.

h. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Istrinya Di bawah 20 Tahun

Pasangan Usia Subur adalah pasangan suami istri yang usia istrinya antara 15-49 tahun yang kemudian dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yakni: di bawah usia 20 tahun, antara 20-35 tahun dan usia di atas 35 tahun. Berdasarkan pertimbangan fisik dan mental usia terbaik melahirkan adalah antara 20-35 tahun, sehingga sangat dianjurkan bagi setiap wanita dapat menikah di atas 20 tahun. Dengan demikian yang dimaksud Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah usia 20 tahun adalah suatu keadaan pasangan suami istri yang isterinya masih di bawah usia 20 tahun yang dapat menyebabkan risiko tinggi bagi seorang ibu yang melahirkan dan anak yang dilahirkan. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah 20 tahun di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.158

Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Istrinya Di Bawah 20 Tahun Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pasangan usia subur dengan istri di umur kurang 20 tahun (Jiwa)	443	474	389		
2	Jumlah pasangan usia subur (Jiwa)	29361	27087	27.083	35.752	
3	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah 20 tahun (%)	1,51	1,75	1,44		

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun

2020-2024, Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Istrinya Di bawah 20 berfluktuasi, dengan capaian tertinggi pada tahun 2021 sebesar 1,75 persen dan terendah sebesar 1,44 persen pada tahun 2022.

Apabila dikaitkan dengan target RPJMD Pada tahun 2023 yang mengharapkan Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Istrinya Di Bawah 20 Tahun Kabupaten Barru sebesar 1,15 persen, maka dapat disimpulkan bahwa capaian pada tahun 2023 belum mencapai target karna baru mencapai 1,44 persen.

i. Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*)

Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmet need*) adalah perbandingan antara jumlah PUS yang ingin ber-KB tapi tidak terlayani dengan jumlah pasangan usia subur yang dinyatakan dalam persen. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tapi tidak terpenuhi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.159

Cakupan PUS yang Ingin ber-KB tidak Terpenuhi (*Unmet Need*) Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani (Jiwa)	4.906	13.753	4.716	6.156	6.156
2	Jumlah pasangan usia subur (Jiwa)	29.361	27.087	27.083	35.752	35.752
3	Persentase ((1/2)x100%) (%)	16,71	15,89	17,41	17,22	17,22

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2020-2024, Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang ingin ber-KB tidak Terpenuhi (*unmet need*) berfluktuasi, dengan capaian tertinggi pada tahun 2022 sebesar 17,41 dan terendah sebesar 15,89 pada tahun 2021.

j. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka panjang (MKJP) adalah perbandingan jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP dengan jumlah akseptor yang dinyatakan dalam persen. Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.160

Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP (Jiwa)	2.760	3.398	1.447	1.790	1.790
2	Jumlah akseptor KB (Jiwa)	19.859	18.860	14.187	18.808	18.808

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
3	Persentase ((1/2)x100%) (%)	13,90	18,02	10,20	9,52	9,52

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2020-2024, Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kabupaten Barru cenderung berfluktuasi, dengan capaian tertinggi pada tahun 2021 sebesar 18,02 persen kemudian menurun signifikan tahun selanjutnya sekaligus menjadi capaian terendah pada periode lima tahun terakhir yang hanya sebesar 9,52 persen.

k. Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi

Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi adalah perbandingan jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi dengan jumlah akseptor KB yang dinyatakan dalam persen. Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.161

Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi (Jiwa)	9.799	7.977	4.716	4.716	4.716
2	Jumlah akseptor KB (Jiwa)	19.562	18.860	14.537	14.537	14.537
3	Persentase ((1/2)x100%)	50,09	42,3	32,44	32,44	32,44

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2018-2022, Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi di Kabupaten Barru cenderung berfluktuasi, dengan capaian tertinggi pada tahun 2020 sebesar 50,09 persen kemudian menurun signifikan secara berturut-turut pada dua tahun selanjutnya sekaligus menjadi capaian terendah pada tahun 2022 selama periode lima tahun terakhir yang hanya sebesar 32,44 persen.

1. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB

Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB adalah perbandingan jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB dengan jumlah anggota kelompok BKB yang dinyatakan dalam persen. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.162

Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB
Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB (Jiwa)	3.642	3.488	2.642	2.642	2.642
2	Jumlah anggota kelompok BKB (Jiwa)	7.672	5.693	5.168	5.168	5.168
3	Persentase ((1/2)x100%)	45,13	61,05	51,12	51,12	51,12

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2020-2024, Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB di Kabupaten Barru cenderung berfluktuasi, dengan capaian tertinggi pada tahun 2021 sebesar 61,05 persen kemudian menurun pada tahun 2022 menjadi 51,12 persen.

m. Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR)

Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB adalah perbandingan jumlah anggota kelompok yang ber-KB dengan jumlah anggota kelompok BKR yang dinyatakan dalam persen. Cakupan anggota bina keluarga remaja ber-KB di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.163

Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB
Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah anggota kelompok BKR yang ber-KB (Jiwa)	3008	2.940	2.249	2.249	2.249
2	Jumlah anggota kelompok BKR (Jiwa)	9992	7.730	5.222	5.222	5.222
3	Persentase ((1/2)x100%)	30,10	30,90	43,06	43,06	43,06

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2020-2024, Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB di Kabupaten Barru cenderung berfluktuasi, dengan capaian tertinggi pada tahun 2022 sebesar 43,06 persen kemudian capaian terendah pada tahun 2020 sebesar 30,10 persen.

n. Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB

Cakupan anggota bina keluarga lansia ber-KB adalah jumlah anggota kelompok BKL yang dinyatakan dalam persen. Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.164

Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB (Jiwa)	2325	301	2.499	2.499	2.499
2	Jumlah anggota kelompok BKL (Jiwa)	7012	5.331	4.963	4.963	4.963
3	Persentase ((1/2)x100%)	33,16	34,05	50,35	50,35	50,35

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2020-2024, Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB di Kabupaten Barru cenderung berfluktuasi, dengan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 50,35 persen kemudian capaian terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 33,16 persen.

o. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan

Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan adalah perbandingan antara jumlah PPKS dengan jumlah kecamatan yang dinyatakan dalam persen. Persentase pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.165

Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah PPKS (Unit)	7	7	7	7	7
2	Jumlah kecamatan (Unit)	7	7	7	7	7
3	Persentase ((1/2)x100%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2020-2024, Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan di Kabupaten Barru dapat dipertahankan dengan capaian 100 persen selama lima tahun terakhir. Setiap Kecamatan di Kabupaten Barru telah memiliki setidaknya 1 unit PPKS.

p. Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa

Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa adalah jumlah pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa dengan jumlah kecamatan yang dinyatakan dalam persen. Untuk mengetahui cakupan remaja

dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.166

Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah PIK R/M	63	72	53	53	53
2	Jumlah kecamatan	7	7	7	7	7
3	Persentase (%)	900	1024	757	757	757

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2020-2024, Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa di Kabupaten Barru berfluktuatif, dengan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 1042 persen, sementara capaian terendah terjadi pada tahun 2022 sebesar 757 persen.

q. Cakupan PKB/PLKB Yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk

Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang penegendalian penduduk adalah perbandingan jumlah PKB dan PLKB yang didayagunakan dengan jumlah PKB/PKLB yang dinyatakan dalam persen. Cakupan PKB/PKLB yang didayagunakan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.167

Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 –2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah PKB dan PLKB yang didayagunakan	50	50	49	49	49
2	Jumlah PKB/PLKB	50	50	49	49	49
3	Persentase ((1/2)x100%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2020-2024, Persentase Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah di Kabupaten Barru dapat dipertahankan dengan capaian 100 persen selama lima tahun terakhir.

Apabila dikaitkan dengan dokumen RPJMD Pada tahun 2022 yang menargetkan Persentase Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah di Kabupaten Barru sebesar 100 persen, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pada tahun

2022 sudah tercapai karna realisasi sudah sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 100 persen.

r. Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Yang ber-KB Mandiri

Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri adalah perbandingan jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri dengan jumlah anggota kelompok UPPKS yang dinyatakan dalam persen. Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber- KB mandiri di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.168

Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB Mandiri Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri (Unit)	469	358	219	219	219
2	Jumlah anggota kelompok UPPKS (Unit)	917	917	224	224	224
3	Persentase ((1/2)x100%)	51,15	39,02	97,77	97,77	97,77

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2020-2024, Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri Kabupaten Barru di Kabupaten Barru berfluktuatif, dengan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 97,77 persen, sementara capaian terendah terjadi pada tahun 2021 sebesar 39,02 persen.

s. Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan

Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa kelurahan adalah perbandingan jumlah petugas pembantu Pembina KB desa dengan jumlah desa kelurahan yang dinyatakan dalam persen. Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.169

Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah petugas pembantu Pembina KB	55	55	55	55	55

	Desa					
2	Jumlah desa/kelurahan	55	55	55	55	55
3	Persentase ((1/2)x100%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2020-2024, Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan di Kabupaten Barru dapat dipertahankan dengan capaian 100 persen selama lima tahun terakhir. Dengan kata lain setiap desa dan kelurahan di kabupaten Barru memiliki petugas pembantu Pembina KB Desa.

t. Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat

Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat adalah perbandingan jumlah alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di faskes dan gudang alkon dengan perkiraan permintaan masyarakat yang dinyatakan persen. Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.170

Cakupan Ketersediaan dan distribusi alat dan obat Kontrasepsi Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di Faskes dan gudang Alkon kab/kota	34.279	34.279	2.198	2.198	2.198
2	Perkiraan Permintaan Masyarakat	34.279	34.279	20.840	20.840	20.840
3	Cakupan (1/2)x100%)	100	100	10,55	10,55	10,55

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2020-2024, Cakupan Ketersediaan dan distribusi alat dan obat Kontrasepsi di Kabupaten Barru dapat dipertahankan dengan capaian 100 persen selama empat tahun terakhir. Baru pada tahun 2022 terjadi penurunan yang signifikan dengan realisasi sebesar 10,55 persen.

u. Persentase Faskes dan Jejaringnya (Di Seluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerjasama Dengan BPJS Dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan

Persentase faskes dan jejaringnya (di seluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan adalah perbandingan jumlah faskes dan jejaring yang bekerjasama

dengan BPJS dengan jumlah faskes dan jejaring yang dinyatakan dalam persen. Persentase faskes dan jejaringnya di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.171

Persentase Faskes Dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerjasama Dengan BPJS Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS (Unit)	14	14	13	13	13
2	Jumlah Faskes dan jejaring (Unit)	14	14	13	13	13
3	Persentase ((1/2)x100%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2020-2022, Persentase Faskes Dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerjasama Dengan BPJS di Kabupaten Barru dapat dipertahankan dengan capaian 100 persen selama lima tahun terakhir. Dengan kata lain semua faskes dan jejaringnya selama lima tahun terakhir sudah bekerjasama dengan BPJS.

v. Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa

Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa adalah perbandingan antara jumlah informasi data mikro keluarga yang tersedia dengan jumlah seluruh informasi data mikro keluarga yang dinyatakan dalam persen. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.172

Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah informasi data mikro keluarga yang tersedia (Bulan)	12	12	12	12	12
2	Jumlah seluruh informasi data mikro keluarga (Bulan)	12	12	12	12	12
3	Persentase (1/2)x100%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2020-2024, Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa di Kabupaten Barru dapat dipertahankan dengan capaian 100 persen selama lima tahun terakhir.

w. Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga

Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui fungsi keluarga merupakan perbandingan antara jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga dengan jumlah kelompok kegiatan yang dinyatakan dalam persen. Cakupan kelompok kegiatan melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.173

Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	255	255	255	255	255
2	Jumlah kelompok kegiatan	255	255	255	255	255
3	Persentase $((1/2) \times 100\%)$	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2020-2024, Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga di Kabupaten Barru dapat dipertahankan dengan capaian 100 persen selama lima tahun terakhir.

➤ **Bidang Urusan Perhubungan**

a. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Jumlah arus penumpang umum adalah jumlah keseluruhan penumpang yang menggunakan angkutan umum yang keluar masuk pada suatu daerah selama 1 (satu) tahun. Jumlah arus penumpang angkutan umum di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.174

Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penumpang angkutan desa (Jiwa)	826.600	592.908	189.900	60.000	60.000
2	Jumlah penumpang Kapal laut (Jiwa)	22.788	22.993	23.362	30.816	30.816
3	Jumlah Arus Penumpang Kapal Penyebrangan	29.298	3.802	52.342	55.024	55.024
4	Jumlah Arus Penumpang Kereta Api	-	-	-	80.470	80.470
5	Total Jumlah Penumpang (Jiwa)	853.764	641.295	264.704	226.310	226.310

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Barru Tahun 2025

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penumpang bus maupun jumlah penumpang kapal laut berfluktuasi. Untuk jumlah penumpang kapal laut cenderung mengalami Peningkatan sampai tahun 2022, sementara penumpang bus cenderung menurun.

b. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

Jumlah Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Jumlah Uji Kir Angkutan umum di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.175
Jumlah Uji Kir Angkutan umum Kabupaten Barru
Tahun 2020-2024

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Uji Kir angkutan	20	0	0	0	0
2	Persentase Kepemilikan Kir angkutan umum	0,68	0	0	0	0

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Barru Tahun 2025

Kegiatan Uji Kir tahun di Kabupaten Barru mulai tahun 2020 hingga tahun 2024 tidak dilakukan karena masih kurang lengkapnya sarana dan prasarana untuk melakukan pengujian tersebut, belum lagi persoalan sumberdaya manusia yang masih terbatas.

c. Rasio Ijin Trayek

Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal. Rasio ijin trayek adalah perbandingan antara jumlah ijin trayek yang dikeluarkan dengan jumlah penduduk. Rasio ijin trayek di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.176
Rasio Ijin Trayek Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Izin Trayek perkotaan	-	-	-	-	-
2	Izin Trayek perdesaan	41	41	41	41	41
3	Jumlah Izin Trayek	41	41	41	41	41
4	Jumlah penduduk	187,392	189,877	191.895	194,543	194,543
5	Rasio Ijin Trayek	2,18	2,15	2,14	2,11	2,11

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Barru Tahun 2025

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa rasio ijin trayek dari tahun 2020 sampai 2024 cenderung menurun, hal ini di pengaruhi jumlah permintaan ijin yang berkurang dan jumlah penduduk yang terus bertambah.

d. Jumlah Pelabuhan Laut/Terminal Bus

Pelabuhan laut diartikan sebagai sebuah fasilitas untuk menerima kapal laut dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Terminal bus dapat diartikan sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Jumlah pelabuhan laut/terminal bus di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.177
Jumlah Pelabuhan Laut/Terminal Bus Kabupaten Barru
Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pelabuhan laut	5	5	5	5	5
2	Jumlah terminal bis	3	3	3	3	3
3	Jumlah	8	8	8	8	8

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Barru Tahun 2025

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah pelabuhan laut/terminal bus cenderung stagnan, hanya saja khusus untuk terminal bus pada tahun 2020-2023 mengalami penurunan disebabkan oleh adanya pengalihan kewenangan dari kabupaten ke provinsi.

Apabila dikaitkan dengan dokumen RPJMD Pada tahun 2023 yang menargetkan Jumlah Pelabuhan Laut/Terminal Bus di Kabupaten Barru sebanyak 11 buah maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2023 belum mencapai target karna baru mencapai 8 buah pelabuhan laut/terminal bus.

e. Persentase Layanan Angkutan Darat

Persentase layanan angkutan darat adalah perbandingan antara jumlah angkutan darat dengan jumlah penumpang yang terangkut yang dinyatakan dalam persen. Persentase layanan angkutan darat di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.178

Persentase Layanan Angkutan Darat Kabupaten Barru
Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Angkutan darat	525	31.026	8.277	9.600	9.600
2	Jumlah penumpang angkutan darat	825.600	592.908	237.738	60.000	60.000
3	Persentase (%)	0,063	0,052	0,035	0,16	0,16

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Barru Tahun 2025

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa persentase layanan angkutan darat mulai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 berfluktuatif, hal ini disebabkan oleh menurunnya jumlah penumpang angkutan umum yang beralih menggunakan kendaraan pribadi, di samping itu terjadinya penurunan jumlah angkutan darat karena kurangnya peremajaan kendaraan.

Apabila dikaitkan dengan dokumen RPJMD Pada tahun 2023 yang menargetkan Persentase Layanan Angkutan Darat di Kabupaten Barru sebesar 100 persen, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2023 belum mencapai target karena baru mencapai 0,16 persen.

f. Pemasangan Rambu-rambu

Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan di antaranya, yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan.

Tabel 2.179

Pemasangan Rambu-rambu Kabupaten Barru
Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pemasangan rambu-rambu	156	-	-	-	-
2	Jumlah Rambu-Rambu yang seharusnya tersedia	3951	3951	3951	3951	3951
3	Persentase (%)	3.95	-	-	-	-

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Barru Tahun 2025

Pada tabel di atas, khusus tahun 2021 dan 2024 data tidak tersedia karena, kegiatan pemasangan rambu-rambu tidak dilaksanakan dengan pertimbangan adanya refocusing anggaran.

g. Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum

Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum adalah jumlah orang atau barang yang diangkut dengan moda transportasi angkutan umum. Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum di Kabupaten Barru dapat dilihat

pada tabel berikut

Tabel 2.180

Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum
Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum (Jiwa)	825.600	592.908	189.900	145.840	145.840
2	Jumlah Barang yang Terangkut Angkutan Umum (Ton)	8.784	32.610	96.360	72.920	72.920

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Barru Tahun 2025

Pada tabel di atas jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum cenderung menurun mulai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, hal ini di sebabkan oleh menurunnya jumlah orang/barang yang menggunakan sarana angkutan umum karena beralih menggunakan kendaraan pribadi, disamping itu terjadinya penurunan jumlah angkutan umum karena kurangnya peremajaan kendaraan.

h. Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Terminal Per Tahun

Jumlah orang/barang yang melalui dermaga/ terminal adalah jumlah orang atau barang yang diangkut dengan moda transportasi angkutan umum yang melalui dermaga dan terminal. Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.181

Jumlah Orang/Barang Melalui dermaga/Terminal Per tahun
Di Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Tahun	Satuan	Dermaga	Terminal	Jumlah
1	2020	Orang	51.977	825,600	877.577
		Barang	2.123.201	8,784	2.131.985
2	2021	Orang	61,013	592,908	653.921
		Barang	11.483.159	32.610	11.515.769
3	2022	Orang	75.704	189.900	265.604
		Barang	24.851.564	96.360	24.947.924
4	2023	Orang	85.840	145.840	231.680
		Barang	39.470.568	72.920	39.543.488
5	2024	Orang	85.840	145.840	231.680
		Barang	39.470.568	72.920	39.543.488

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Barru Tahun 2025

Pada tabel di atas jumlah orang melalui dermaga cenderung menurun disebabkan pemilihan moda transportasi masyarakat dari kapal laut ke pesawat udara. Untuk jumlah orang yang melalui terminal menurun sangat signifikan hal ini disebabkan menurunnya jumlah penumpang angkutan umum yang beralih menggunakan kendaraan pribadi. Sedangkan jumlah barang yang melalui dermaga dan terminal meningkat, hal ini

terjadi karena fungsi dermaga sangat optimal dari sisi pengangkutan barang, disamping itu pemilihan pelabuhan-pelabuhan di Kabupaten Barru menjadi alternatif para pengguna jasa.

Apabila dikaitkan dengan dokumen RPJMD Pada tahun 2022 yang menargetkan Jumlah orang yang terangkut angkutan umum di Kabupaten Barru sebanyak 1.881.879 jiwa, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2022 belum mencapai target karna realisasi pada tahun tersebut hanya sebanyak 237.738 jiwa.

Sementara, untuk target Jumlah barang yang terangkut angkutan umum di Kabupaten Barru sebagaimana ditetapkan pada dokumen RPJMD sebesar 9.785.137 ton, dapat disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2022 sudah melampaui target karna realisasi pada tahun tersebut sudah sebesar 18.552.717 ton.

➤ **Bidang Urusan Komunikasi Dan Informatika**

Urusan komunikasi dan informatika memiliki peran strategis dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat menuntut pemerintah daerah untuk menghadirkan layanan publik yang cepat, efisien, dan terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi digital. Oleh karena itu, pembangunan sektor komunikasi dan informatika diarahkan untuk memperkuat infrastruktur teknologi informasi, memperluas akses komunikasi masyarakat, serta mengembangkan ekosistem layanan berbasis digital. Di tahun 2024 seluruh Perangkat Daerah telah terhubung dengan dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Barru. Selanjutnya Pada Tahun 2024 sebesar 79 persen capaian untuk masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten Barru.

➤ **Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah**

a. Persentase Koperasi Aktif

Persentase koperasi aktif merupakan perbandingan jumlah koperasi aktif dengan jumlah semua koperasi yang ada dan dinyatakan dalam persen. Persentase koperasi aktif di

Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.182

Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah koperasi aktif (Unit)	65	66	68	68	68
2	Jumlah koperasi (Unit)	104	105	107	107	107
3	Persentase koperasi aktif (%)	62,50	62,86	63,55	63,55	63,55

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Barru Tahun 2025

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa persentase Koperasi Aktif mulai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 mengalami tren peningkatan tiap tahunnya.

Sementara, untuk target persentase koperasi aktif di Kabupaten Barru sebagaimana ditetapkan pada dokumen RPJMD sebesar 76,31 persen, dapat disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2022 belum mencapai target karna realisasi pada tahun tersebut sudah sebesar 63,55 persen.

b. Persentase UKM non BPR/LKM Aktif

Persentase UKM non BPR/LKM aktif merupakan perbandingan antara jumlah UKM non BPR/LKM aktif dengan jumlah seluruh UKM non BPR/LKM yang dinyatakan dalam persen. Persentase UKM non BPR/LKM di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.183

Persentase UKM non-BPR/LKM Aktif Kabupaten Barru Tahun 2020–2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah UKM non BPR/LKM Aktif	762	762	-		
2	Jumlah seluruh UKM non BPR/LKM	790	790	-	-	
3	Persentase (%)	96,46	96,46	-	-	

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Barru Tahun 2025

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa persentase UKM non BPR/LKM Aktif mulai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 stagnan dengan capaian sebesar 96,46 persen. Berdasarkan sumber data dari Dinas Koperasi, UKM dan perdagangan Kabupaten Barru untuk tahun 2022 sudah tidak melakukan pendataan karena bukan merupakan kewenangan dinas koperasi sesuai SOTK nomor 19 Tahun 2022.

Sementara, untuk target persentase koperaasi aktif di Kabupaten Barru sebagaimana ditetapkan pada dokumen RPJMD sebesar 95, 20 persen.

c. Persentase BPR/LKM Aktif

Persentase BPR/LKM aktif merupakan perbandingan antara jumlah BPR/LKM aktif dengan jumlah seluruh BPR/LKM yang dinyatakan dengan persen. Persentase jumlah BPR/LKM aktif di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.184

Persentase BPR/LKM Aktif Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah BPR/LKM aktif	20	20	20	20	20
2	Jumlah seluruh BPR/LKM	28	28	28	28	28
3	Persentase (%)	71,43	71,43	71,43	71,43	71,43

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Barru Tahun 2025

Data BPR/LKM di Kabupaten Barru adalah sebanyak 28 LKM yakni 20 unit merupakan Bumdes binaan Dinas PMDPPKBP3A sedangkan 8 merupakan binaan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan yang sudah tidak aktif karena baik dari usaha maupun pengurus sudah tidak ada.

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase BPR/LKM Aktif mulai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 menunjukkan trend yang sama setiap tahunnya.

Sementara, untuk target Persentase BPR/LKM Aktif di Kabupaten Barru sebagaimana ditetapkan pada dokumen RPJMD sebesar 73,88 persen, dapat disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2023 belum mencapai target karna realisasi pada tahun tersebut sudah sebesar 71,43 persen.

d. Persentase Usaha Mikro dan Kecil

Persentase usaha mikro dan kecil merupakan perbandingan antara jumlah usaha mikro dan kecil dengan jumlah seluruh usaha mikro dan kecil yang ada di Kabupaten Barru dan dinyatakan dalam persen. Persentase usaha mikro dan kecil di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.185

Persentase Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Usaha mikro	9.208	9.229	10.081	10.081	10.081
2	Jumlah Usaha Kecil	718	718	36	36	36
3	Usaha Menengah	72	72	5	5	5
4	Jumlah UKM	9.998	10.091	10.122	10.122	10.122
5	Persentase (%)	99,27	99,35	99,36	99,36	99,36

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Barru Tahun 2025

Jumlah usaha mikro dan kecil artinya jumlah seluruh usaha yang mempunyai omzet maksimal 300 juta. Jumlah usaha mikro

dan kecil merupakan akumulasi dari jumlah pelaku industri, perdagangan, pertanian, peternakan dan perikanan. Berdasarkan tabel di atas, target kinerja yang ditetapkan adalah 99,27% artinya dari 20.656 unit usaha yang ada di Barru ada 20.505 unit merupakan usaha mikro dan kecil.

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mulai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 menunjukkan trend yang sama setiap tahunnya.

Sementara, untuk target Persentase Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Barru sebagaimana ditetapkan pada dokumen RPJMD sebesar 99.84 persen, dapat disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2023 belum mencapai target karna realisasi pada tahun tersebut sudah sebesar 99,36 persen.

➤ **Bidang Urusan Penanaman Modal**

a. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Investor adalah orang perseorangan atau lembaga baik domestik dan nondomestik yang melakukan suatu investasi dalam jangka pendek atau jangka panjang. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.186

Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	PMDN	118	46	47	209	71
2	PMA	-	2	2	4	5
3	Total	118	48	49	213	76

Sumber : DPMPSTP Kab. Barru Tahun 2025

Jumlah Persetujuan Investasi (usaha) tahun 2022 sebanyak 49 yang dikategorikan Penanaman Modal Dalam Negeri dengan nilai investasi lebih dari 200 juta dan penambahan investasi melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal Daerah tahun 2022.

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) mulai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami penurunan setiap tahunnya, capaian tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 213 investor.

Apabila dikaitkan dengan dokumen RPJMD Pada tahun 2022 yang menargetkan Jumlah investor sebanyak 122,0461, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2022 belum mencapai target karna realisasi pada tahun tersebut hanya sebanyak 49 Investor.

b. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Investasi adalah penanaman aset atau dana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau perseorangan atau lembaga baik domestik dan non domestik untuk jangka waktu tertentu. Jumlah nilai investasi PMDN/PMA dihitung dengan menjumlahkan jumlah realisasi nilai proyek investasi berupa PMDN dan nilai proyek investasi PMA yang telah disetujui dinas terkait. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.187

Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Tahun	Jumlah investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)
1	2020	118	855.316.873.042
2	2021	48	401.993.726.034
3	2022	49	424.182.849.592
4	2023	213	635.321.359.909
5	2024	76	696.033.763.643

Sumber : DPMPSTPT Kab. Barru Tahun 2025

Terjadi Peningkatan nilai investasi sebesar dari nilai investasi tahun sebelumnya. Hal yang perlu menjadi perhatian utamanya dalam hal kepastian lahan kemudian dalam sektor investasi yang dapat ditawarkan kepada investor dengan penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah dan Percepatan RDTR untuk seluruh wilayah di Kabupaten Barru, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan kemudahan/ kebijakan investasi lainnya yang dapat ditawarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barru.

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) mulai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 berfluktuatif setiap tahunnya, capaian tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 855.316.873.042 Rupiah dan rendah pada tahun 2021 sebesar 401.993.726.034 Rupiah.

c. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Rasio daya serap tenaga kerja adalah perbandingan antara jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan dengan jumlah seluruh PMDN/PMA. Rasio daya serap tenaga kerja dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.188

Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kabupaten Barru Tahun 2019 - 2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio daya serap tenaga kerja	237	32	33	33	33

Sumber : DPMPSTSP Kab. Barru Tahun 2025

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kabupaten Barru pada tahun 2022 sebesar 33 Point.

d. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Miliar Rupiah)

Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN dihitung dengan membandingkan realisasi PMDN tahun evaluasi dikurang realisasi PMDN tahun sebelum evaluasi dengan realisasi PMDN sebelum evaluasi. Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.189

Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (miliar rupiah)
Kabupaten Barru Tahun 2020-2024

No	Tahun	Realisasi PMDN Tahun Evaluasi	Realisasi PMDN Tahun Sebelum Evaluasi	Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Miliar Rupiah)
1	2020	855.316.873.042	730.659.151.736	17,06
2	2021	400.889.608.880	360.728.443.384	11,13
3	2022	375.412.751.766	400.899.608.880	-6,36
4	2023	629.278.511.398	375.412.751.766	67,62
5	2024	662.982.182.201	629.278.511.398	5,36

Sumber : DPMPTSP Kab. Barru Tahun 2025

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN mulai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 berfluktuatif setiap tahunnya, capaian tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 67,62 Miliar Rupiah dan rendah pada tahun 2022 sebesar -6,36 Miliar Rupiah.

Apabila dikaitkan dengan dokumen RPJMD Pada tahun 2022 yang menargetkan Jumlah nilai investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) sebesar 17,29968 Miliar Rupiah, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2022 belum mencapai target karna realisasi pada tahun tersebut hanya sebesar -6,36 Miliar Rupiah.

➤ **Bidang Urusan Kepemudaan Dan Olah Raga**

a. Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif

Persentase organisasi pemuda yang aktif adalah perbandingan antara jumlah organisasi pemuda yang aktif dengan jumlah seluruh organisasi pemuda yang dinyatakan dalam persen. Persentase organisasi pemuda di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.190
 Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif Kabupaten Barru
 Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Organisasi Pemuda di Kecamatan Barru	64	79	124	124	124
2	Jumlah Organisasi Pemuda di Kecamatan Tanete Rilau	44	53	123	123	123
3	Jumlah Organisasi Pemuda di Kecamatan Tanete Riaja	38	45	116	116	116
4	Jumlah Organisasi Pemuda di Kecamatan Pujananting	35	47	63	63	63
5	Jumlah Organisasi Pemuda di Kecamatan Balusu	40	59	79	79	79
6	Jumlah Organisasi Pemuda di Kecamatan Soppeng Riaja	39	48	91	91	91
7	Jumlah Organisasi Pemuda di Kecamatan Mallusetasi	38	53	100	100	100
8	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	298	384	696	696	696
9	Jumlah seluruh organisasi Pemuda	298	384	696	696	696
10	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab. Barru Tahun 2025

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa persentase organisasi pemuda yang aktif mulai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mempunyai capaian yang sama setiap tahunnya yaitu sebesar 100 persen.

b. Persentase Wirausaha Muda

Wirausaha adalah pelaku utama dalam pembangunan ekonomi dan fungsinya untuk melakukan inovasi atau kombinasi-kombinasi yang baru untuk sebuah inovasi atau orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya. Persentase wirausaha muda adalah perbandingan antara jumlah wirausaha muda di bagi dengan jumlah seluruh wirausaha yang dinyatakan dalam persen. Persentase wirausaha muda di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.191
 Persentase Wirausaha Muda Kabupaten Barru
 Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah wirausaha muda	139	173	318	357	357
2	Jumlah seluruh wirausaha	150	197	10.127	10.127	10.127
3	Persen ((1/2)x100%)	92,66	87,82	3,14	3,53	3,53

Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab. Barru Tahun 2025

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa persentase wirausaha muda Kabupaten Barru mulai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mempunyai capaian berfluktuatif setiap tahunnya di mana capaian tertinggi pada tahun 2020 sebesar 92,66 persen

sedangkan capaian terendah terjadi pada tahun 2022 sebesar 3,14 persen.

c. Cakupan Pembinaan Olahraga

Cakupan pembinaan olahraga merupakan perbandingan jumlah cabang olahraga yang dibina dengan jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar yang dinyatakan dalam persen. Cakupan pembinaan olahraga di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.192
Cakupan Pembinaan Olahraga Kabupaten Barru
Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah cabang olahraga yang dibina (Cabang)	27	26	26	26	26
2	Jumlah seluruh cabang olahraga yang Ada/terdaftar (Cabang)	29	28	28	28	28
3	Persentase ((1/2)x100%) (%)	93,1	92,86	92,86	92,86	92,86

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab. Barru Tahun 2025

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa Ckupan pembinaan olahraga kabupaten barru mulai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mempunyai capaian cenderung stagnan setiap tahunnya di mana capaian tertinggi pada tahun 2020 sebesar 93,1 persen sedangkan capaian terendah terjadi pada tahun 2024 sebesar 82,8 persen.

d. Cakupan Pelatih Yang Bersertifikasi

Cakupan pelatih yang bersertifikasi adalah perbandingan antara jumlah pelatih bersertifikat dengan jumlah seluruh pelatih yang dinyatakan dalam persen. Cakupan pelatih yang bersertifikat di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.193
Cakupan Pelatih Yang Bersertifikasi Kabupaten Barru
Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pelatih bersertifikat	57	18	42	41	41
2	Jumlah seluruh pelatih	75	18	42	59	59
3	Cakupan pelatih yang bersertifikasi (%)	76,00	100	100	69,49	69,49

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab. Barru Tahun 2025

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa Cakupan pelatih yang bersertifikat Kabupaten Barru mulai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mempunyai capaian berfluktuatif setiap tahunnya di mana capaian tertinggi pada tahun 2021 sebesar 100 persen sedangkan capaian terendah terjadi pada tahun 2024

sebesar 69,49 persen.

e. Cakupan Pembinaan Atlet Muda

Cakupan pembinaan atlet muda adalah perbandingan antara jumlah pembinaan atlet muda dengan jumlah seluruh pembinaan atlet muda yang dinyatakan dalam persen. Cakupan pembinaan atlet muda di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.194
Cakupan Pembinaan Atlet Muda Kabupaten Barru
Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah atlit pelajar yang dibina	430	-	71	97	97
2	Jumlah seluruh atlit pelajar	606	-	104	135	135
3	Persen ((1/2)x100%)	70,90	-	68,27	71,85	71,85

Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab. Barru Tahun 2025

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa Cakupan pembinaan Atlet Muda kabupaten barru mulai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 mengalami penurunan setiap tahunnya di mana capaian tertinggi pada tahun 2020 sebesar 70,90 persen sedangkan capaian terendah terjadi pada tahun 2021 sebesar 0 persen. Kemudian terjadi kenaikan lagi ditahun 2023 sebesar 71,85 persen.

f. Jumlah Atlet Berprestasi

Jumlah atlet berprestasi adalah jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun. Jumlah atlet berprestasi di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.195
Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun (atlet)	0	0	0	2	0

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Barru Tahun 2025

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah atlet berprestasi kabupaten barru mulai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 hanya terdapat 2 atlet saja pada tahun 2023.

g. Jumlah Prestasi Olahraga

Jumlah prestasi cabang olahraga adalah jumlah prestasi cabang

olahraga yang dimenangkan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun. Jumlah prestasi cabang olahraga di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.196

Jumlah Prestasi Olahraga Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun (cabang olahraga)	0	0	0	1	1

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Barru Tahun 2025

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah berprestasi olahraga Kabupaten Barru mulai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 telah ada prestasi cabang olahraga yang di menangkan di tingkat nasional dan internasional.

➤ **Bidang Urusan Statistik**

a. Buku "Kabupaten Barru Dalam Angka" dan Buku "PDRB Kabupaten Barru"

Buku Kabupaten Dalam Angka sebagai sarana untuk menyediakan data statistik yang dapat menggambarkan indikator capaian pembangunan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat/daerah maupun swasta dan selanjutnya digunakan sebagai bahan evaluasi hasil pembangunan. Sedangkan Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah buku yang memuat jumlah nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan disuatu wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu biasanya satu tahun. Ketersediaan Buku Kabupaten Barru Dalam Angka dan PDRB Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.197

Buku "Kabupaten Barru Dalam Angka" dan Buku "PDRB Kabupaten Barru" Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Buku Kabupaten dalam angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Buku PDRB Kabupaten	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa Buku "Kabupaten Barru Dalam Angka" dan Buku "PDRB Kabupaten Barru" mulai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 tetap tersedia.

Dengan demikian, maka dapat dijelaskan bahwa Buku "Kabupaten Barru Dalam Angka" dan Buku "PDRB Kabupaten Barru" sudah sesuai dengan target dalam dokumen RPJMD

Kabupaten Barru pada tahun 2022.

➤ **Bidang Urusan Persandian**

a. Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah

Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah merupakan perbandingan antara jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi dengan jumlah perangkat daerah yang ada di Kabupaten Barru dan dinyatakan dalam persen. Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah di Kabupaten Barru dapat kita lihat pada tabel berikut.

Tabel 2.198

Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah di Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat daerah (OPD)	1	1	1	1	1
2	Jumlah total perangkat daerah (OPD)	37	37	37	37	37
3	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah (%)	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Barru Tahun 2025

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah di Kabupaten Barru mulai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dipertahankan dengan capaian 2,7 persen selama lima tahun terakhir.

➤ **Bidang Urusan Kebudayaan**

a. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Secara umum, seni budaya merupakan segala sesuatu yang diciptakan manusia mengenai cara hidup yang berkembang pada suatu kelompok yang memiliki unsur keindahan secara turun temurun dari generasi ke generasi dan biasanya ditampilkan pada kegiatan festival. Penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.199

Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyelenggaraan festival budaya (Kali)	5	5	8	9	9

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Barru Tahun 2025

Apabila dicermati dari tahun 2020 – 2024 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kabupaten Barru kondisinya mengalami peningkatan dengan capaian tertinggi di tahun 2024 sebanyak 9 kali dan capaian terendah pada tahun 2020 sebanyak 5 kali.

b. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan

Menurut undang-undang Nomor 11 Tahun 2010, cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan. Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dan persentasenya di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.200

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	15	15	15	15	15
2	Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah	15	15	18	18	18
3	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya dilestarikan (%)	100,00	100,00	83,33	83,33	83,33

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Barru Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, apabila dicermati dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 Benda, Situs dan Kawasan cagar Budaya Yang Dilestarikan di Kabupaten Barru kondisinya mengalami peningkatan dengan capaian tertinggi di dua tahun terakhir yaitu tahun 2020 sampai tahun 2021 sebesar 100 persen dan capaian terendah pada tahun 2023 sampai tahun 2024 sebesar 83,33 persen.

c. Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi Dan Inventarisasi

Revitalisasi dan inventarisasi karya budaya merupakan kewajiban dalam hal pelestarian budaya, hal ini dilakukan dalam rangka menjaga, memelihara, membangkitkan serta memperkenalkan kekayaan budaya yang ada di suatu

wilayah. Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi di Kabupaten Barru yang dituangkan dalam bentuk dokumen dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.201

Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi dan Inventarisasi Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi (Dokumen)	3	3	3	4	4

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Barru Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, apabila dicermati dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi dan Inventarisasi Kabupaten Barru selama dua tahun terakhir masih bertahan sebanyak 4 Dokumen dan capaian terendah pada tahun 2020 sebanyak 3 dokumen.

d. Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu

Pengelolaan cagar budaya Kabupaten Barru merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan dari tahun ke tahun, hal ini sebagai bentuk pemeliharaan dan pelestarian cagar budaya yang ada. Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.202

Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu (Jenis)	15	15	15	15	15

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Barru Tahun 2025

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu di Kabupaten Barru pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2020 sampai tahun 2024 tetap bertahan dengan capaian sebanyak 15 jenis.

➤ **Bidang Urusan Perpustakaan**

Perpustakaan adalah suatu wadah atau tempat di mana didalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut sistem tertentu, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan.

a. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Pengunjung perpustakaan adalah pemakai perpustakaan yang berkunjung ke perpustakaan untuk mencari bahan pustaka dalam satu (1) tahun. Pengunjung perpustakaan dihitung

berdasar pengunjung yang mengisi daftar kehadiran atau berdasar data yang diperoleh melalui sistem pendataan pengunjung. Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.203

Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun
Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pengunjung perpustakaan milik Pemerintah Daerah (pemda)	121.286	123.347	127.693	133.453	170.969
2	Jumlah pengunjung perpustakaan milik non pemda	0	0	0	0	0
3	Total pengunjung Perpustakaan (1+2)	121.286	123.347	127.693	133.453	170.969

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Barru Tahun 2024

Apabila dicermati dari tahun 2020–2024 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun di Kabupaten Barru kondisinya cenderung meningkat dengan capaian tertinggi di tahun 2024 sebanyak 170.969 orang dan terendah pada tahun 2020 sebanyak 121.286 orang.

b. Koleksi Buku dan Judul Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Jumlah koleksi buku dan judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah adalah jumlah buku dan judul buku yang ada di perpustakaan. Jumlah koleksi buku dan judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.204

Koleksi Buku dan Judul Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Koleksi jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah	58.685	59.137	59.837	59.909	59.318
2	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia diperpustakaan daerah	11.676	11.922	12.272	12.337	12.103

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Barru Tahun 2025

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah kabupaten barru mulai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan setiap tahunnya, capaian tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 59.909 koleksi buku dan capaian terendah pada tahun 2020 sebanyak 58.685 koleksi buku, sedangkan untuk jumlah koleksi judul buku yang tersedia diperpustakaan

daerah juga mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 di mana capaian tertinggi terjadi di tahun 2023 sebanyak 12.337 Judul buku dan terendah di tahun 2020 hanya 11.676 judul buku.

c. Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk

Jumlah perpustakaan dihitung berdasarkan jumlah perpustakaan umum yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat yang beroperasi di wilayah pemerintah daerah di mana rasio perpustakaan persatuan penduduk adalah perbandingan antara jumlah perpustakaan per 1.000 penduduk. Rasio perpustakaan persatuan penduduk dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.205

Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk Kabupaten Barru Tahun 2020–2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah perpustakaan	56	56	56	56	56
2	Jumlah Penduduk	187,392	189,877	191.895	194.543	195.385
3	Rasio (1/2*1000)	0,30	0,29	0,29	0,29	0,29

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Barru Tahun 2025

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk kabupaten barru mulai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami penurunan, capaian tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 0,30 dan capaian terendah pada tahun 2021 sampai tahun 2024 sebanyak 0,29.

d. Jumlah Rata-rata Pengunjung Perpustakaan/ Tahun

Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.206

Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun Kabupaten Barru Tahun 2019 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	493	631	855	630	950

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Barru Tahun 2025

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun kabupaten barru pada tahun 2024 sebanyak 950 orang.

e. Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat

Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai yang memiliki

Sertifikat di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.207

Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat	3	5	10	9	9
2	Jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai	3	5	10	9	9
3	Persentase (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Barru Tahun 2025

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat Kabupaten Barru pada tahun tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan di mana capaian tertinggi pada tahun 2022 sebanyak 10 orang dan capaian terendah terjadi pada tahun 2020 sebanyak 3 orang.

➤ **Bidang Urusan Kearsipan**

a. Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip

Secara baku persentase perangkat daerah yang mengeloa arsip secara baku adalah perbandingan antara jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan arsip secara baku dengan jumlah seluruh perangkat daerah. Persentase perangkat daerah yang mengeloa arsip secara baku di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.208

Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku	29	29	18	19	25
2	Jumlah Perangkat Daerah	36	36	33	33	34
3	Persentase (%)	80,50	80,50	55,00	57	73

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Barru Tahun 2025

Apabila dicermati dari tahun 2020 – 2024 Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku di kabupaten Barru cenderung fluktuatif, di mana capaian tertinggi pada tahun 2020 sebesar 80,50 persen dan capaian terendah terjadi pada tahun 2022 dengan capaian sebesar 55 persen.

b. Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.209

Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	0	4	0	3	4

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Barru Tahun 2024

Apabila dicermati dari tahun 2020 – 2024 peningkatan SDM pengelolaan Kearsipan di kabupaten Barru cenderung berfluktuatif di mana pada tahun 2020 dan 2022 tidak ada kegiatan peningkatan SDM pengelolaan Kearsipan. Capaian tertinggi pada tahun 2021 terdapat 4 kegiatan dan capaian terendah terdapat pada tahun 2023 dengan capaian sebesar 3 kegiatan.

➤ **Bidang Urusan Kelautan Dan Perikanan**

a. Produksi Perikanan

Produksi perikanan adalah banyaknya produksi perikanan yang diperoleh dalam rentan waktu tertentu. Produksi perikanan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.210

Produksi Perikanan Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah produksi ikan (ton)	25.773,9	26.167,72	26.421,3	26.616,1	26.616,1
2	Target Daerah (ton)	27.324,19	27.906,01	26.615,74	27.047,56	27.047,56
3	Persentase (%)	94,32	93,77	99,19	98,40	98,40

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Barru Tahun 2025

Apabila dicermati dari tahun 2020 – 2024 produksi Perikanan di Kabupaten Barru mengalami peningkatan dari tahun ke tahun di mana capaian tertinggi pada tahun 2023 sebesar 26.616,1 Ton dan capaian terendah terdapat pada tahun 2020 dengan capaian sebesar 25.773,9Ton.

b. Konsumsi Ikan

Konsumsi ikan dihitung berdasarkan perbandingan jumlah konsumsi ikan dengan target daerah yang dinyatakan dalam persen. Persentase konsumsi ikan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.211

Konsumsi Ikan Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Tahun	Jumlah Konsumsi ikan Kg	Target Daerah Kg	Persentase
1	2020	8.014.464	8.014.496	99,99
2	2021	8.020.407	8.080.130	99,26
3	2022	8.558.380	8.556.739	100,01

4	2023	8.893.360	8.875.132	100,20
5	2024	8.893.360	8.875.132	100,20

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Barru Tahun 2025

Apabila dicermati dari tahun 2020 – 2024 persentase konsumsi ikan di Kabupaten Barru mengalami peningkatan dari tahun ke tahun tetapi pada tahun 2021 sempat mengalami penurunan sebesar 0, 73 persen, di mana capaian tertinggi pada tahun 2023 sebesar 100,2 persen dan capaian terendah terdapat pada tahun 2021 dengan capaian sebesar 99,26.

c. Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Cakupan bina kelompok nelayan dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan dengan target kelompok nelayan yang dinyatakan dalam persen. Cakupan bina kelompok nelayan di Kabupaten Barru dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 2.212
Cakupan Bina Kelompok Nelayan Kabupaten Barru
Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kelompok Nelayan yang mendapatkan bantuan	69	69	51	20	20
2	Target Kelompok Nelayan yang mendapatkan Bantuan	18	18	18	18	18
3	Persentase (%)	383	383	283	111	111

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Barru Tahun 2025

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa persentase cakupan bina kelompok nelayan di Kabupaten Barru pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan, tetapi pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 100 persen dengan capaian tertinggi pada tahun 2020 sebesar 383 persen dan capaian terendah pada tahun 2023 dan 2024 sebesar 111 persen.

d. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Produksi perikanan kelompok nelayan merupakan perbandingan jumlah produksi ikan (Ton) kontribusi hasil kelompok nelayan dengan jumlah produksi ikan di daerah yang dinyatakan dalam persen. Produksi perikanan kelompok nelayan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.213
Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Kabupaten Barru
Tahun 2020 – 2024

No	Tahun	Jumlah Produksi Ikan (Ton) kontribusi hasil kelompok nelayan	Jumlah Produksi ikan di daerah	Prosentase
1	2020	12.554,69	25.773,90	48,71
2	2021	12.703,36	26.167,72	48,54

3	2022	14.640,82	26.421,3	55,41
4	2023	15.879,68	26.616,1	59,66
5	2024	15.879,68	26.616,1	59,66

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Barru Tahun 2025

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa Produksi Perikanan Kelompok Nelayan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 cenderung meningkat, penurunan hanya terjadi pada periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2021

➤ **Bidang Urusan Pariwisata**

a. Kunjungan Wisata

Kunjungan wisata dihitung dengan membandingkan antara Jumlah capaian kinerja kunjungan wisata se-kabupaten dengan jumlah seluruh kunjungan wisata yang direncanakan se-kabupaten yang dinyatakan dalam persen. Kunjungan wisata di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.214

Kunjungan Wisata Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah capaian kinerja kunjungan wisata se-kabupaten	61,52	87,13	233,97	234,71	234,71
2	Lama kunjungan wisata	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari
3	Jumlah seluruh kunjungan wisata se-kabupaten	61.519	57.133	88.441	95.330	95.330
4	Jumlah seluruh kunjungan wisata yang direncanakan se-kabupaten	33.000	35.000	37.800	40.616	40.616
5	Persentase (%)	186,42	248,95	154,80	107,79	107,79

Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Barru Tahun 2025

Apabila dicermati dari tahun 2020 – 2024 persentase kunjungan wisata di kabupaten Barru cenderung berfluktuatif di mana capaian tertinggi pada tahun 2020 sebesar 186,42 persen dan capaian terendah terdapat pada tahun 2023 dengan capaian sebesar 107,79 persen.

b. PAD Sektor Pariwisata

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata merupakan perbandingan antara PAD sektor pariwisata dengan total PAD yang dinyatakan dalam persen. Kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap total PAD di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.215

PAD Sektor Pariwisata Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Tahun	PAD sektor pariwisata	Total PAD	Persen
1	2020	64.119.000	107.388.426.060	0,06
2	2021	988.335.966	92.407.370.305	0,07
3	2022	1.240.615.399	95.606.566.726	0,30
4	2023	1.889.291.399	95.606.566.727	1,98
5	2024	1.889.291.399	95.606.566.727	1,98

Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Barru Tahun 2025

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD di Kabupaten Barru pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan, dengan capaian tertinggi pada tahun 2023 sebesar 1,98 persen dan capaian terendah pada tahun 2020 sebesar 0,06 persen.

➤ **Bidang Urusan Pertanian**

a. Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal merupakan perbandingan antara produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya dengan luas areal tanaman padi/bahan pangan utama local yang dinyatakan dalam persen. Produktivitas padi atau bahan pangan local dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.216

Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Produksi Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya (Ton)	132.097,08	135.698,00	141.676,46	143.114,91	147.411,87
2	Luas Areal Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal (Ha)	23.385	23.995	24.768	24.963	28.516
3	Produktivitas Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya (Ku/Ha)	56,49	56,55	57,20	57,33	51,7

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Barru 2025

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 terus mengalami peningkatan, meskipun kenaikan pertahunnya tidak signifikan

b. Cakupan Bina Kelompok Petani

Cakupan bina kelompok petani merupakan perbandingan antara jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan Pemda dengan jumlah kelompok tani yang dinyatakan dalam persen.

Cakupan bina kelompok petani di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.217
Cakupan Bina Kelompok Petani Kabupaten Barru
Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan Pemda	87	105	88	382	407
2	Jumlah kelompok tani	729	756	783	808	890
3	Persentase (%)	23,88	13,88	11,24	47,28	45,73

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Barru 2025

Apabila dicermati dari tahun 2020 – 2024 persentase Cakupan Bina kelompok petani di Kabupaten Barru cenderung berfluktuatif di mana capaian tertinggi pada tahun 2024 sebesar 45,73 persen dan capaian terendah terdapat pada tahun 2022 dengan capaian sebesar 11,2 persen.

➤ **Bidang Urusan Perdagangan**

a. Ekspor Bersih Perdagangan

Ekspor bersih perdagangan merupakan selisih antara nilai ekspor dengan nilai impor. Ekspor bersih perdagangan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.218
Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten Barru
Tahun 2020 – 2024

No	Tahun	Nilai ekspor	Nilai Impor	Jumlah Ekspor Bersih Perdagangan
1	2020	-	-	-
2	2021	-	-	-
3	2022	116.834.755.62	-	116.834.755.620
4	2023			
5	2024			

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Barru Tahun 2025

Apabila dicermati dari tahun 2020–2024 Ekspor Bersih Perdagangan di Kabupaten Barru cenderung menurun, sementara untuk data tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, tidak tersedia data di dinas terkait namun untuk tahun 2022 kembali disajikan. Untuk target RPJMD Pada tahun 2022 senilai 103.166.478 rupiah

b. Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal merupakan perbandingan antara jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan pemda tahun dengan jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang dinyatakan dalam persen. Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal

di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.219
Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal
Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan pemda Tahun n	12	-	-	-	-
2	Jumlah kelompok pedagang/usaha informal	39	39	39	39	39
3	Cakupan (%)	30,77	-	-	-	-

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Barru Tahun 2023

Apabila dicermati dari tahun 2020 – 2024 terjadi kenaikan Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal di Kabupaten Barru ditandai dengan meningkatnya jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan pemda, sementara dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, tidak terjadi peningkatan jumlah kelompok. Untuk tahun 2021 dan 2022, tidak tersedia data di dinas terkait. Untuk target RPJMD Pada tahun 2022 sebesar 28,82 persen.

➤ **Bidang Urusan Perindustrian**

a. Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

Cakupan bina kelompok pengrajin merupakan perbandingan antara jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan pemda dengan jumlah kelompok pengrajin yang dinyatakan dalam persen. Cakupan bina kelompok pengrajin dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.220
Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Kabupaten Barru
Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan bina kelompok pengrajin (%)	14	-	-		

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Barru Tahun 2025

Apabila dicermati dari tahun 2020 sampai dengan 2024 terjadi penurunan Cakupan Bina Kelompok Pengrajin setelah sebelumnya pada periode 2020-2024 cakupan tersebut dapat dipertahankan. Untuk tahun 2021 dan 2022, tidak tersedia data di dinas terkait. Untuk target RPJMD Pada tahun 2022 sebesar 15 persen.

➤ **Perencanaan**

a. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJPD, RPJMD, RKPD dan RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA

Dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan rentang waktu 25 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan rentang waktu 5 tahun, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan rentang waktu 30 tahun sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan ditetapkan dengan PERKADA. Ketersediaan dokumen perencanaan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.221

Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	RPJPD	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
2	RPJMD	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
3	RKPD	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
4	RTRW	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA

Sumber : Bappelitbangda Kab. Barru Tahun 2025

Pada tabel di atas, mulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Barru konsisten dalam penyediaan dokumen perencanaan baik dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD dan RTRW. Untuk target RPJMD Pada tahun 2024 ketersediaan dokumen perencanaan tetap konsisten ada.

Tabel 2.222

Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Kabupaten Barru Tahun 2020 -2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Program RKPD Tahun Berkenaan (Program)	276	104	221	135	126
2	Jumlah Program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun Berkenaan (Program)	276	104	221	135	126
3	Persentase (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Bappelitbangda Kab. Barru Tahun 2025

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa persentase penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD kabupaten Barru dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 capainnya 100 persen.

b. Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD

Konsistensi penjabaran program RKPD kedalam APBD merupakan perbandingan antara jumlah program yang ada di

APBD dengan jumlah program RKPD yang harus dilaksanakan dan dinyatakan dalam persen. Angka 100% menunjukkan dokumen RKPD telah konsisten dan angka di bawah 100% menunjukkan terjadi inkonsistensi antar dokumen APBD dengan RKPD. Penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.223
 Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD
 Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Program APBD Tahun Berkenaan (Program)	276	104	221	131	126
2	Jumlah Program RKPD yang harus dilaksanakan Tahun Berkenaan (Program)	276	104	221	135	126
3	Persentase (%)	100	100	100	97,04	100

Sumber : Bappelitbangda Kab. Barru Tahun 2025

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa persentase penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD kabupaten Barru dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 capainnya 100 persen. Apabila dikaitkan dengan dokumen RPJMD Pada tahun 2024 yang menargetkan persentase penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD sebesar 100 persen, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2024 sudah sesuai dengan target RPJMD 100 persen.

➤ **Keuangan**

a. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan

Opini BPK terhadap laporan keuangan merupakan penilaian ketaatan dan kepatutan dalam pengelolaan keuangan daerah. Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.224
 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Barru
 Tahun 2020-2024

No	Tahun	Opini BPK
1	2020	WTP
2	2021	WTP
3	2022	WTP
4	2023	WTP
5	2024	WTP

Sumber : BKAD Kab. Barru Tahun 2025

Pada tabel di atas, mulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Barru konsisten dengan predikat WTP dalam mempertahankan Opini BPK terhadap Laporan

Keuangan setiap tahunnya. Untuk target RPJMD Pada tahun 2024 sudah sesuai target RPJMD yaitu WTP.

b. Persentase SILPA

SILPA adalah sisa lebih perhitungan anggaran sebagai selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Sedangkan persentase SILPA merupakan perbandingan antara total SILPA dengan total APBD yang dinyatakan dalam persen. Persentase SILPA di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.225

Persentase SILPA Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No.	Tahun	Total SILPA	Total APBD	Persentase (%)
1	2020	83.734.357.547,35	920.669.003.812,00	9,09
2	2021	118.879.623.079,89	940.680.195.326,00	12,63
3	2022	118.943.534.504,89	902.412.131.655,00	13,18
4	2023	103.949.293.775	1.007.708.922.840	10,32
5	2024	111.087.525.917,80	1.029.655.210.843,00	10,79

Sumber :BBKAD Kab. Barru Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2020-2024, persentase SILPA Kabupaten Barru berfluktuatif, dengan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 13,18 persen, sementara capaian terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 9,09 persen.

c. Persentase Belanja Pendidikan (20%)

Persentase belanja pendidikan merupakan perbandingan antara jumlah belanja bidang urusan pendidikan dengan total APBD yang dinyatakan dalam persen. Persentase belanja pendidikan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.226

Persentase Belanja Pendidikan(20%) Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No.	Tahun	Jumlah Belanja Bidang Urusan Pendidikan	Total APBD	Persentase (%)
1	2020	232.729.629.587,00	920.669.003.812,00	22,92
2	2021	297.079.401.936	940.680.195.326,00	31,58
3	2022	284.755.591.738	902.412.131.655,00	31,55
4	2023	320.936.846.904	1.007.608.922.840	31,85
5	2024	308.623.499.999,00	1.029.655.210.843,00	29,97

Sumber : BKAD Kab. Barru Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2020-2024, persentase Belanja Pendidikan (20%) Kabupaten Barru berfluktuatif, dengan capaian tertinggi terjadi

pada tahun 2023 sebesar 31,85 persen, sementara capaian terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 22,92 persen.

d. Persentase Belanja Kesehatan (10%)

Persentase belanja kesehatan merupakan perbandingan antara jumlah belanja bidang urusan kesehatan dengan total APBD yang dinyatakan dalam persen. Persentase belanja kesehatan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.227
 Persentase Belanja Kesehatan (10%) Kabupaten Barru
 Tahun 2020 – 2024

No.	Tahun	Jumlah Belanja Bidang Urusan Kesehatan	Total APBD	Persentase
1	2020	189.542.241.675	920.669.003.812,00	18,66
2	2021	200.340.333.581	940.680.195.326,00	21,29
3	2022	163.577.216.781	902.412.131.655,00	18,13
4	2023	222.023.338.7541	1.007.608.922.840	22,03
5	2024	140.864.443.486,00	1.029.655.210.843,00	13,68

Sumber : BKAD Kab. Barru Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2020-2024, persentase Belanja kesehatan (10%) Kabupaten Barru berfluktuatif, dengan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 22,03 persen, sementara capaian terendah terjadi pada tahun 2024 sebesar 13,68 persen.

Apabila dikaitkan dengan dokumen RPJMD pada tahun 2023 yang menargetkan 10 persen, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2023 sudah melampaui target karna realisasi pada tahun tersebut 22,03 persen.

e. Perbandingan Antara Belanja Langsung Dengan Belanja Tidak Langsung

Perbandingan belanja langsung dengan belanja tidak langsung merupakan perbandingan antara jumlah belanja langsung dan jumlah belanja tidak langsung terhadap total APBD yang dinyatakan dalam persen. Perbandingan belanja langsung dengan belanja tidak langsung di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.228
 Perbandingan Belanja Langsung Dengan Belanja Tidak Langsung
 Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Tahun	Jumlah Belanja Langsung	Jumlah Belanja Tidak Langsung	Total APBD	Persentase Belanja Langsung (%)	Persentase Belanja tidak Langsung (%)
1	2020	413.690.046.654,10	586.660.283.440,98	920.669.003.812,00	44,93	63,72
2	2021	716.429.332.596,00	60.840.341.589,00	940.680.195.326,00	76,16	6,47

No	Tahun	Jumlah Belanja Langsung	Jumlah Belanja Tidak Langsung	Total APBD	Persentase Belanja Langsung (%)	Persentase Belanja tidak Langsung (%)
3	2022	710.668.831.700	200.250.069.935	902.412.131.655,00	79,00	22,00
4	2023	730.275.965.899	181.612.170.854	1.007.608.922.840	72,47	18,02
5	2024	861.128.602.764	168.526.608.078	1.029.655.210.843,00	83,63	16,37

Sumber : BKAD Kab. Barru Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2020-2024, perbandingan belanja langsung dengan belanja tidak langsung Kabupaten Barru berfluktuatif, dengan capaian belanja langsung tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 83,63 persen, sementara capaian terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 44,93 persen. Sedangkan persentase belanja tidak langsung capaian tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 63,72 persen, sementara capaian terendah terjadi pada tahun 2021 sebesar 6,47 persen.

f. Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa

Bagi hasil kabupaten/kota dan desa merupakan perbandingan antara jumlah belanja bagi hasil kabupaten/kota dan desa yang dinyatakan dalam persen. Bagi hasil kabupaten/kota dan desa di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.229
 Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa Kabupaten Barru
 Tahun 2020 – 2024

No.	Tahun	Jumlah Belanja Bagi Hasil Kab/kota/desa	Total APBD	Persentase (%)
1	2020	108.940.698.605	920.669.003.812,00	11,83
2	2021	107.273.106.000	940.680.195.326,00	11,40
3	2022	95.523.960.500	902.412.131.655,00	10,58
4	2023	92.940.837.151	1.007.608.922.840	9,22
5	2024	96.044.198.660,00	1.029.655.210.843,00	9,33

Sumber : BKAD Kab. Barru Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2020-2024, persentase bagi hasil kabupaten/kota dan desa Kabupaten Barru berfluktuatif, dengan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 11,83 persen, sementara capaian terendah terjadi pada tahun 2023 sebesar 9,22 persen.

g. Penetapan APBD

APBD ditetapkan dengan perkara yang sebelumnya telah dibahas dengan badan legislatif (DPRD). Penetapan APBD di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.230

Penetapan APBD Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No.	Tahun	Penetapan APBD
1	2020	17 Desember 2019
2	2021	30 Desember 2020
3	2022	29 Desember 2021
4	2023	25 November 2022
5	2024	28 Desember 2023

Sumber : BKAD Kab. Barru Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2020-2024, penetapan APBD Kabupaten Barru tidak tepat waktu. Jika melihat target dokumen RPJMD, penetapan APBD Kabupaten Barru tahun 2023 yaitu pada tanggal 30 November 2022 , maka disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2022 belum mencapai target karena di tetapkan pada tanggal 30 Desember 2021.

➤ **Kepegawaian**

a. Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan

Salah satu kebijakan pemerintah dalam UU ASN Nomor 5 Tahun 2014, Setiap ASN berhak mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan minimal 20 jam per tahun. Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan dihitung beradsarkan perbandingan antara jumlah jam pelajaran yang telah diikuti PNS dengan jumlah PNS. Rata-rata lama pegawai mendapat pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.231

Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah JPL yang telah diikuti PNS Kab. Barru (JPL)	64.816	100.386	101.863	13.123	174.397
2	Jumlah PNS (Orang)	3.919	3.909	3.745	3519	3947
3	Rata - Rata lama Diklat (JPL)	16,54	25,68	27,20	3,73	44,18

Sumber data : BKP SDM Kab. Barru Tahun 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan dari tahun ketahun cenderung meningkat, penurunan terjadi pada tahun 2020 ke tahun 2024. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebanyak 44,18 JPL, sedangkan capaian terendah terjadi pada tahun 2023 sebanyak 3,73 JPL.

Jika melihat target dokumen RPJMD, Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan Kabupaten Barru tahun 2022 sebanyak 20 JPL , maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2022 sudah melampaui target yaitu sebesar 26,77 JPL.

b. Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal adalah perbandingan antara ASN yang mengikuti diklat teknis dengan jumlah seluruh ASN yang dinyatakan dalam persen. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.232

Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Diklat Teknis (Orang)	417	282	888	1.438	1394
2	Jumlah PNS (Orang)	3.919	3.909	3.745	3.519	3947
3	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (%)	10,64	7,21	23,71	40,86	35,32%

Sumber data : Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Kab. Barru Tahun 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dari tahun ketahun berfluktuatif, penurunan terjadi pada tahun 2021 dan 2024. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 40,86 persen, sedangkan capaian terendah terjadi pada tahun 2021 sebesar 7,21 peren.

c. Persentase Pejabat ASN yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural

Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural adalah perbandingan antara jumlah ASN yang telah mengikuti diklat struktural dengan jumlah total jabatan yang dinyatakan dalam persen. Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.233

Persentase Pejabat ASN yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah ASN yang telah mengikuti Diklat Struktural (ASN)	383	202	161	144	134
2	Jumlah Total Jabatan (Jabatan)	664	371	381	396	412
3	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural (%)	57,68	54,45	42,26	36,36	32,52%

Sumber data : Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Kab. Barru Tahun 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Struktural dari tahun ketahun mengalami penurunan. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 57,68 persen, sedangkan capaian terendah terjadi pada tahun 2024 sebesar 32,52 persen.

d. Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah, Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional Tertentu.

Berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), jabatan pimpinan tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah, jabatan administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan sedangkan jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah, jabatan administrasi, jabatan fungsional tertentu di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.234

Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah, Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional Tertentu Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah (Orang)	28	28	32	30	24
2	Jumlah jabatan administrasi pada Instansi Pemerintah (Orang)	1.341	1.022	976	920	895
3	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah (Orang)	2.546	2.857	2.733	2.555	3.011

Sumber data : Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Kab. Barru Tahun 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada instansi pemerintah dari tahun ketahun berfluktuatif, capaian tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebanyak 32 orang dan terendah pada tahun 2020 dan 2021 sebanyak 28 orang. Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah dari tahun ke tahun berfluktuatif, capaian tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebanyak 1.341 orang dan capaian terendah pada tahun 2024 sebanyak 895 orang. Sedangkan untuk Jumlah jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah dari tahun ke tahun berfluktuatif, capaian tertinggi terjadi pada tahun 2024

sebanyak 3.011 orang dan capaian terendah terjadi pada tahun 2020 sebanyak 2.546 orang.

➤ **Pendidikan dan Pelatihan**

a. Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan

Persentase implementasi rencana kelitbangan merupakan perbandingan antara jumlah kelitbangan dalam RKPD dengan jumlah kelitbangan dalam RPJMD yang dinyatakan dalam persen. Persentase implementasi rencana kelitbangan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.235

Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kelitbangan dalam RKPD (kegiatan)	8	14	8	2	2
2	Jumlah kelitbangan dalam RPJMD (kegiatan)	8	14	8	2	2
3	Persentase (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Bappelitbangda Kab. Barru Tahun 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan dari tahun ketahun cenderung dapat di pertahankan dengan angka 100 persen.

b. Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan

Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan merupakan perbandingan antara jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti dalam hal ini hasil-hasil kelitbangan yang sesuai dengan renja perangkat daerah yang berkenaan dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan dengan jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah yang dinyatakan dalam persen. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.236

Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kelitbangan yang ditindak lanjuti (Kegiatan)	7	14	8	2	2
2	Jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah (Kegiatan)	8	14	8	2	2
3	Persentase (%)	87,5	100	100	100	100

Sumber : Bappelitbangda Kab. Barru Tahun 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dari tahun ketahun cenderung dapat di pertahankan, capaian tertinggi terjadi pada tahun 2021

sampai tahun 2024 sebesar 100 persen, capaian terendah pada tahun 2020 sebanyak 87,5 persen.

c. Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah.

Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah adalah jumlah perangkat daerah yang difasilitasi dengan jumlah total perangkat daerah yang dinyatakan dalam persen. Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.237

Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi	40	44	42	42	47
2	Jumlah total perangkat daerah	44	44	42	42	47
3	Persentase (%)	90,90	100	100	100	100

Sumber : Bappeltibangda Kab. Barru Tahun 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah dari tahun ketahun meningkat, capaian tertinggi terjadi pada tahun 2021 sampai tahun 2024 sebesar 100 persen, capaian terendah pada tahun 2020 sebanyak 90,90 persen.

d. Persentase Kebijakan Inovasi Yang Diterapkan di Daerah.

Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah adalah jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan dengan jumlah inovasi yang diusulkan. Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.238

Persentase Kebijakan Inovasi Daerah yang diterapkan Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan (Penerapan)	50	70	18	20	8
2	Jumlah inovasi yang Diusulkan (Penerapan + Ujicoba + Inisiatif)	77	96	25	30	14
3	Persentase (%)	64,93	72,92	72,00	66,66	57,14

Sumber : Bappeltibangda Kab. Barru Tahun 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase Kebijakan Inovasi Daerah yang diterapkan dari tahun ketahun berfluktuatif, capaian tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 72,92 persen, capaian terendah pada tahun 2024 sebesar 57,14 persen.

Jika melihat target dokumen RPJMD, persentase Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah Kabupaten Barru tahun 2023 sebesar 100 persen , maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2023 belum mencapai target yaitu sebesar 66,66 persen.

Tabel 2.239

Daftar Inovasi Daerah Kabupaten Barru Tahun 2023 – 2024

NO	NAMA INOVASI	OPD PENGAMPU
1.	BOLATA YASSIBERRUI	Dinas Kominfo
2.	LaNCAR D'DUKCAPIL 7311 KIAMiSOL (Layanan Nyaman Cepat Akurat dan Ramah dalam menerbitkan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kartu Identitas Anak Mitra Sekolah secara OnLine)	Dinas Dukcapil
3	LaNCAR D'DUKCAPIL 7311 MATiPPE (layanan yang cepat dan akurat dalam menyerahkan akte kematian)	Dinas Dukcapil
4	TARO ADA TARO GAU (Tera/Tera Ulang Metrologi Legal Secara Digital Tanpa Mengganggu Proses Perdagangan dan Jual Beli)	Dinas Koperasi
5	KITA BERBAGI (Kegiatan Rencana Kota Berbasis Digital	Dinas Pupr
6	GERAKAN JUS MANIS (Jumat Serentak mendukung aksi hidup sehat)	Puskesmas Ralla
7	PEPAYA MATANG	Dinas Pertanian
8	MPOK DARTI (Kelompok Sadar Stunting)	Dinas Sosial
9	RUKIA (Rumah Klinik Anggaran)	Inspektorat
10	POSKESMAS (Pos Kesehatan Masjid)	Puskesmas Pekkae
11	KLIK DESA (Klinik Layanan Konsultasi Desa)	Dinas Pmdp2kbp3a
12	SI PANCA (Sinergi Pendataan Bencana)	Bpbd
13	WISATA POSYANDU	Puskesmas Palakka
14	Posyandu SUBUR (Sore Hari Bagi Yang Tidak Hadir)	Puskesmas Mangkoso
15	GEMAR SYANTI (Gerakan Marennu Sayang Anak, Ibu Dan Keluarga)	Puskesmas Pujananting
16	SI CENTING (Pencegahan Stunting)	Puskesmas Doi-Doi
17	Masyarakat DOi- Doi Aktif CegAh PenYakit Hipertensi)	Puskesmas Doi-Doi
18	MAKKURAGA (Memantau Keadaan Keluarga Agar Tetap Aman)	Puskesmas Mangkoso
19	PARENTING (Pemberdayaan Remaja Peduli Stunting)	Dinas Kesehatan
20	Ajak pak camat	Bapenda
21	PINJATRIN (Pendampingan dan Pemijatan Endorphin)	Rsud Lapatarai
22	KPOP (Kartu Pantau Observasi Pasien) EWS	Rsud Lapatarai
23	PAMAN SENJA BERKELANA (Pemantauan Kesehatan jasmani Berkelanjutan)	Puskesmas Bojo Baru
24	Peran Benih Unggul dalam Meningkatkan Produktivitas Padi	Dinas Pertanian
25	Sorgum, Peluang dan Tantangan	Dinas Pertanian
26	KWT Penyangga Ekonomi Rumah Tangga Petani	Dinas Pertanian
27	Pelayanan Kesehatan Hewan Berbasis Masyarakat	Dinas Pertanian
28	TRAUMA PMK (Peningkatan Komunikasi Informasi dan Edukasi dalam Mencegah Penyakit Mulut dan Kuku di Kab. Barru)	Dinas Pertanian
29	BANK DATA DIGITAL KECAMATAN	Kecamatan Soppeng Riaja
30	Barru Pro SS (Barru Pro Stop Stunting)	BAPPELITBANGDA

Sumber : Bappelitbangda Kab. Barru Tahun 2024

Kegiatan Penilaian Indeks Inovasi Daerah dilaksanakan oleh Kemendagri setiap tahunnya, hal ini dimaksudkan agar dapat

mendorong kompetisi positif antar pemerintah provinsi dan antar pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat diwujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan, guna terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Bagi Pemerintahan Kabupaten Barru penilaian Indeks Inovasi Daerah merupakan motivasi untuk mewujudkan Kabupaten Barru sebagai daerah yang inovatif. Namun, tentu saja perlu dukungan dari Organisasi Pemerintahan Daerah yang berada di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Barru untuk mewujudkan hal itu. OPD harus berpartisipasi dalam menciptakan inovasi baru di tiap tahunnya agar penilaian IID untuk Kabupaten Barru mendapatkan predikat Inovatif hingga Sangat Inovatif tiap tahunnya.

Penilaian IID ini dengan maksud untuk memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang berhasil menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dalam upaya peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

Berdasarkan hasil penilaian Badan Strategis Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri pada sistem aplikasi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Kementerian Dalam Negeri tentang Indeks Inovasi Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2023, dapat disampaikan bahwa Skor Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Barru sebesar 48.50 dan berada pada kategori Kabupaten *Inovatif*. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya nilai indeks inovasi Kabupaten Barru Tahun 2023 meningkat sebesar 2.37 poin.

➤ **Sekretariat DPRD**

Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota serta Terintegrasi Program-Program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan (RPJMD dan RKPD) dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD.

Tabel 2.240

Tersedianya Rencana Kerja, terintegrasi program-program DPRD ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD Kabupaten Barru Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat- alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA

2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA

Sumber : Sekretarat DPRD Kab. Barru Tahun 2025

Pada tabel di atas, mulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 konsisten dalam penyediaan Rencana Kerja, terintegrasi program-program DPRD ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD Kabupaten Barru. Untuk target RPJMD Pada tahun 2024 tetap konsisten ada.

➤ **Pengawasan**

a. Persentase Tindaklanjut Temuan

Persentase tindaklanjut temuan merupakan perbandingan antara jumlah temuan yang ditindaklanjuti dengan jumlah total temuan yang dinyatakan dalam persen. Persentase tindaklanjut temuan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.241
 Persentase Tindak Lanjut temuan Kabupaten Barru
 Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah temuan Yang ditindaklanjuti	42	19	27	85	85
2	Jumlah total temuan	50	21	53	254	254
3	Persen ((1/2)x100%)	84,00	90,47	50,94	33,46	33,46

Sumber : Inspektorat Daerah Kab. Barru Tahun 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase Tindak lanjut Temuan Kabupaten Barru dari tahun ketahun berfluktuatif, capaian tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 90,47 persen, capaian terendah pada tahun 2023 sebanyak 33,46 persen.

Jika melihat target dokumen RPJMD, persentase Tindak lanjut Temuan Kabupaten Barru tahun 2023 sebesar 100 persen, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2023 belum mencapai target yaitu sebesar 33,46 persen.

b. Persentase Pelanggaran Pegawai

Persentase pelanggaran pegawai merupakan perbandingan antara jumlah ASN yang dikenai sanksi dengan jumlah total ASN yang dinyatakan dalam persen. Persentase pelanggaran pegawai di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.242
 Persentase Pelanggaran Pegawai Kabupaten Barru
 Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah ASN yang dikenai sanksi	7	22	4	7	7
2	Jumlah total ASN	3.919	3.919	3.909	3.992	3.992
3	Persen ((1/2)x100%)	0,18	0,56	0,10	0,17	0,17

Sumber : Inspektorat Daerah Kab. Barru Tahun 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase pelanggaran pegawai Kabupaten Barru dari tahun ketahun berfluktuatif, capaian tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 0,56 persen, capaian terendah pada tahun 2022 sebanyak 0,10 persen.

Jika melihat target dokumen RPJMD, persentase pelanggaran pegawai Kabupaten Barru tahun 2023 sebesar persen, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2023 belum mencapai target yaitu sebesar 0,17 persen.

c. Jumlah Temuan BPK

Indikator jumlah temuan BPK dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal (BPK) yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan total seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI.

Tabel 2.243
 Jumlah Temuan BPK Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah temuan BPK (Kasus)	8	20	21	10	10

Sumber : Inspektorat Daerah Kab. Barru Tahun 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa Jumlah Temuan BPK Kabupaten Barru dari tahun ketahun berfluktuatif, capaian tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 21 kasus, capaian terendah pada tahun 2020 sebesar 8 kasus.

Jika melihat target dokumen RPJMD, Jumlah Temuan BPK Kabupaten Barru tahun 2023 sebesar 10 kasus , maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2023 belum mencapai target yaitu sebesar 9 kasus.

2.2. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi pedoman dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang berimplikasi pada kebijakan daerah dan desentralisasi fiskal sebagai akibat adanya pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan disertai

pemberian sumber-sumber keuangan untuk mendanai urusan yang diserahkan kepada daerah. Tujuannya adalah untuk semakin meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, pelaksanaan pembangunan daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Desentralisasi fiskal harus memperhatikan dan merupakan bagian pengaturan yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan Negara. Hal ini merupakan konsekuensi dari pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
2. Pemberian sumber keuangan Negara kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi adalah dengan memperhatikan stabilitas perekonomian nasional dan keseimbangan fiskal antara pusat dengan daerah dan antar daerah;
3. Perimbangan keuangan Negara antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan atas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan.

Selain itu, Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah semakin dipertegas melalui terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah telah meletakkan dasar-dasar penyempurnaan dan penguatan tata kelola hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah. Hal ini merupakan upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan bernegara. Upaya tersebut dimanifestasikan dalam berbagai redesain instrumen utama desentralisasi fiskal yang tidak hanya melalui TKD, pajak daerah, dan retribusi daerah, melainkan juga melalui sinergi kebijakan fiskal nasional, Pembiayaan Utang Daerah, DAD, dan Sinergi Pendanaan.

Untuk melaksanakan beberapa amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tersebut pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional. Harmonisasi kebijakan fiskal nasional merupakan proses atau upaya untuk menyelaraskan, menyerasikan, dan/atau menyesuaikan kebijakan fiskal antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah di dalam pengelolaan dan pengaturan pendapatan, belanja, dan pembiayaan negara dan Daerah untuk menjalankan fungsi alokasi dan distribusi dalam rangka menjaga stabilitas, pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pembiayaan Utang Daerah, penyelenggaraan DAD, pelaksanaan Sinergi Pendanaan, dan penerapan sinergi kebijakan fiskal nasional dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah. Pengaturan ini mengenai penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan Daerah yang menyempurnakan harmonisasi pengaturan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di tingkat pusat dan Daerah.

Pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional selain ditujukan untuk

meningkatkan kualitas kebijakan fiskal Daerah, juga diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas Belanja Daerah dalam mendukung perbaikan kualitas keluaran (output) dan dampak (outcome) layanan publik di Daerah. Peningkatan kualitas Belanja Daerah dalam Peraturan Pemerintah ini dilakukan melalui penguatan belanja produktif di Daerah dan harmonisasi belanja pusat dan Belanja Daerah yang akan didukung melalui sinergi BAS. Dengan adanya sinergi BAS, Pemerintah dapat menyelaraskan program, kegiatan, dan keluaran agar kebijakan fiskal yang diambil lebih terukur dan meningkatkan keselarasan belanja pusat dan Belanja Daerah.

Penyusunan gambaran keuangan daerah ini adalah untuk menyajikan Penyusunan Gambaran keuangan daerah adalah untuk menyajikan analisis pengelolaan keuangan daerah yang berlangsung selama satu periode kepemimpinan daerah terakhir. Analisis tersebut mencakup kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan daerah masa lalu, dan kerangka pendanaan. Bagian ini ditujukan untuk melihat posisi kemampuan keuangan daerah dalam lima tahun terakhir sebagai kondisi eksisting, untuk selanjutnya menjadi landasan dalam memproyeksi kemampuan keuangan daerah untuk satu periode kepemimpinan daerah, selama lima tahun yang akan datang dengan memperhatikan sinergitas antara kebijakan fiskal nasional yang tertuang dalam Undang-undang nomor 1 tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024.

Keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru. Sebagai instrumen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan yang baik dan efisien menjadi salah satu faktor penentu kesuksesan program-program yang telah dijanjikan kepada masyarakat. Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati mencakup berbagai aspek pembangunan, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga peningkatan kualitas lingkungan hidup. Semua tujuan ini membutuhkan dukungan finansial yang memadai. Oleh karena itu, keuangan daerah harus dikelola dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi agar sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Adapun uraian tentang gambaran keuangan daerah Kabupaten Barru dan Proyeksi Kebutuhan anggaran akan diuraikan melalui sub-sub bab berikut.

2.2.1. Gambaran Ringkas Kondisi Keuangan Daerah Lima Tahun Terakhir

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi pedoman dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang berimplikasi pada kebijakan daerah dan desentralisasi fiskal sebagai akibat adanya pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan disertai pemberian sumber-sumber keuangan untuk mendanai urusan yang diserahkan kepada daerah. Tujuannya adalah untuk semakin meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat,

pelaksanaan pembangunan daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Desentralisasi fiskal harus memperhatikan dan merupakan bagian pengaturan yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan Negara. Hal ini merupakan konsekuensi dari pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
2. Pemberian sumber keuangan Negara kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi adalah dengan memperhatikan stabilitas perekonomian nasional dan keseimbangan fiskal antara pusat dengan daerah dan antar daerah;
3. Perimbangan keuangan Negara antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan atas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan.

Selain itu, Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah semakin dipertegas melalui terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah telah meletakkan dasar-dasar penyempurnaan dan penguatan tata kelola hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah. Hal ini merupakan upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan bernegara. Upaya tersebut dimanifestasikan dalam berbagai redesain instrumen utama desentralisasi fiskal yang tidak hanya melalui TKD, pajak daerah, dan retribusi daerah, melainkan juga melalui sinergi kebijakan fiskal nasional, Pembiayaan Utang Daerah, DAD, dan Sinergi Pendanaan.

Untuk melaksanakan beberapa amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tersebut pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional. Harmonisasi kebijakan fiskal nasional merupakan proses atau upaya untuk menyelaraskan, menyerasikan, dan/atau menyesuaikan kebijakan fiskal antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah di dalam pengelolaan dan pengaturan pendapatan, belanja, dan pembiayaan negara dan Daerah untuk menjalankan fungsi alokasi dan distribusi dalam rangka menjaga stabilitas, pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pembiayaan Utang Daerah, penyelenggaraan DAD, pelaksanaan Sinergi Pendanaan, dan penerapan sinergi kebijakan fiskal nasional dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah. Pengaturan ini mengenai penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan Daerah yang menyempurnakan harmonisasi pengaturan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan

anggaran di tingkat pusat dan Daerah.

Pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional selain ditujukan untuk meningkatkan kualitas kebijakan fiskal Daerah, juga diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas Belanja Daerah dalam mendukung perbaikan kualitas keluaran (output) dan dampak (outcome) layanan publik di Daerah. Peningkatan kualitas Belanja Daerah dalam Peraturan Pemerintah ini dilakukan melalui penguatan belanja produktif di Daerah dan harmonisasi belanja pusat dan Belanja Daerah yang akan didukung melalui sinergi BAS. Dengan adanya sinergi BAS, Pemerintah dapat menyelaraskan program, kegiatan, dan keluaran agar kebijakan fiskal yang diambil lebih terukur dan meningkatkan keselarasan belanja pusat dan Belanja Daerah.

Penyusunan gambaran keuangan daerah ini adalah untuk menyajikan Penyusunan Gambaran keuangan daerah adalah untuk menyajikan analisis pengelolaan keuangan daerah yang berlangsung selama satu periode kepemimpinan daerah terakhir. Analisis tersebut mencakup kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan daerah masa lalu, dan kerangka pendanaan. Bagian ini ditujukan untuk melihat posisi kemampuan keuangan daerah dalam lima tahun terakhir sebagai kondisi eksisting, untuk selanjutnya menjadi landasan dalam memproyeksi kemampuan keuangan daerah untuk satu periode kepemimpinan daerah, selama lima tahun yang akan datang dengan memperhatikan sinergitas antara kebijakan fiskal nasional yang tertuang dalam Undang-undang nomor 1 tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024.

Keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru. Sebagai instrumen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan yang baik dan efisien menjadi salah satu faktor penentu kesuksesan program-program yang telah dijanjikan kepada masyarakat. Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati mencakup berbagai aspek pembangunan, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga peningkatan kualitas lingkungan hidup. Semua tujuan ini membutuhkan dukungan finansial yang memadai. Oleh karena itu, keuangan daerah harus dikelola dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi agar sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Adapun uraian tentang gambaran keuangan daerah Kabupaten Barru dan Proyeksi Kebutuhan anggaran akan diuraikan melalui sub-sub bab berikut.

A. Gambaran Ringkas Kondisi Keuangan Daerah Lima Tahun Terakhir

Selama lima tahun terakhir, kondisi keuangan daerah mengalami dinamika yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari sisi pendapatan maupun belanja, yang berhubungan langsung dengan program

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Keberhasilan maupun tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah ini menjadi cerminan dari bagaimana pemerintah daerah menjalankan fungsi pengelolaan anggaran yang efisien, akuntabel, dan transparan.

Kinerja keuangan masa lalu dalam hal ini kinerja untuk Tahun 2020 - 2024 terdiri atas kinerja pelaksanaan APBD dan neraca keuangan daerah. Kinerja pelaksanaan APBD terdiri atas target dan realisasi pendapatan, target dan realisasi belanja, serta penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Sedangkan neraca keuangan daerah berupa perkembangan dan analisis neraca keuangan daerah Tahun 2020-2024, pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Barru masih bertumpu pada sumber daya keuangan yang bersumber dari dana perimbangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Uraian kinerja keuangan masa lalu ini akan dijelaskan pada sub-sub bab berikut ini.

A. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Untuk itulah sehingga analisis pengelolaan keuangan daerah menjelaskan tentang aspek kebijakan keuangan daerah yang berkaitan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah guna mewujudkan visi dan misi. Proses perencanaan dan penganggaran dalam Pemerintah Daerah menggunakan pendekatan kinerja, di mana penekanan penganggaran pada kinerja yang terukur dari aktivitas dan program kegiatan.

Berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, APBD merupakan satu kesatuan yang disusun dalam struktur tertentu. Beberapa ketentuan terkait struktur APBD adalah sebagai berikut:

1. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah; dan
 - c. Pembiayaan daerah.
2. APBD diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Klasifikasi APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi disesuaikan dengan kebutuhan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
5. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
6. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Untuk melihat gambaran kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Barru Tahun 2020-2024.

Tabel 2.244
Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun 2020 – 2024

Kode Rekening	Uraian	2020 (RP)	2021 (RP)	2022 (RP)	2023 (RP)	2024 (RP)
1	2	3	4	5	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH	914.860.358.821	942.029.873.041	859.473.591.915	888.425.426.756	915.109.741.982
04.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	101.324.046.920	91.080.726.896	95.625.586.780	108.669.905.584	111.784.187.566,50
04.01.01	Pajak Daerah	17.444.416.351	20.295.192.486	24.325.109.080	25.785.922.730	26.846.071.256
04.01.02	Retribusi Daerah	5.537.188.953	6.591.238.990	7.194.962.118	3.844.587.603	67.901.095.031
04.01.03	Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.942.135.943	9.198.474.101	10.027.692.032	9.922.742.013	10.008.783.290
04.01.04	Lain-lain PAD yang Sah	69.400.305.673	54.995.821.319	54.077.823.550	69.116.653.238	7.028.237.989,50
04.02	PENDAPATAN TRANSFER	783.721.605.526	824.919.254.145	763.848.005.136	779.755.521.172	756.421.677.108
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	733.600.397.994	755.924.175.624	705.893.635.719	701.463.994.931	756.421.677.108
4.2.01.01	Dana Perimbangan	645.189.154.994	650.326.376.624	653.050.902.719	662.724.372.931	697.461.885.108
4.2.01.05	Dana Desa	52.436.179.000	53.277.341.000	42.933.469.000	38.739.622.000	39.357.327.000
4.2.01.06	Insentif Fiskal	35.975.064.000	52.320.458.000	9.909.264.000	-	19.602.465.000
04.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	50.121.207.532	68.995.078.521	57.954.369.417	78.291.526.241	46.075.054.532
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	41.250.135.532	38.595.826.521	49.829.122.855	61.253.240.366	41.302.648.532
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	8.871.072.000	30.399.252.000	8.125.246.562	17.038.285.875	4.772.406.000
	Lain-lain Pendapatan daerah Yang Sah	29.814.706.375	26.029.892.000	0	0	0
	Pendapatan Hibah	29.814.706.375	1.500.000.000			-
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	24.529.892.000			-

5	BELANJA DAERAH	923.948.418.308	890.957.264.894	893.989.998.349	906.753.762.123	871.732.996.867
05.01	BELANJA OPERASI	670.071.082.748	661.492.325.198	647.181.906.392	665.057.375.056	728.024.663.117
05.01.01	Belanja Pegawai	382.370.058.168	403.999.557.253	383.900.225.528	380.173.392.967	402.283.316.011
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	228.576.042.030	230.322.937.642	250.638.718.839	258.845.601.745	286.570.967.417
05.01.03	Belanja Bunga	2.454.813.533	1.558.157.404	1.374.006.968	2.088.449.782	1.720.723.191
05.01.04	Belanja Subsidi		-		313.026.525	-
05.01.05	Belanja Hibah	56.670.169.017	1.558.157.404	9.699.655.057	23.636.904.037	36.634.256.498
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial		24.053.515.495	1.569.300.000	-	815.400.000
05.02	BELANJA MODAL	127.312.791.930	112.254.470.242	145.652.719.665	148.034.364.234	141.186.777.959
05.02.01	Belanja Modal Tanah	576.970.000			7.100.823.000	-
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.272.678.303	26.807.348.852	38.094.991.086	21.375.154.752	19.869.786.593
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19.644.028.786	25.594.076.313	43.887.170.944	53.248.357.339	64.680.027.133
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	77.135.469.226	58.300.233.427	63.617.630.635	65.926.169.143	56.230.308.533
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.683.645.615	1.552.811.650	52.927.000	383.860.000	406.655.700
05.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	22.551.942.073	11.507.218.331	5.498.981.654	839.982.105	2.521.555.792
05.03.01	Belanja Tidak Terduga	22.551.942.073	11.507.218.331	5.498.981.654	839.982.105	2.521.555.792
05.04	BELANJA TRANSFER	104.012.601.553	105.703.151.123	95.656.390.638	92.840.040.727	95.944.432.961
05.04.02	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	487.220.650	78.300.000	133.000.000		15.219.939
05.04.02	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota kepada Desa	103.525.380.903	105.624.851.123	95.523.390.638	92.840.040.727	95.929.213.022
	SURPLUS/DEFISIT	-9.088.059.483	51.072.608.147	-34.516.406.434	-18.328.335.367	-53.396.510.622
6	PEMBIAYAAN DAERAH	80.453.859.703	66.312.768.955	114.901.609.782	110.751.925.059	89.375.130.422
06.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	84.506.890.967	71.365.800.219	118.954.641.046	113.804.956.324	92.428.161.687
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	84.506.890.967	71.365.800.219	118.954.641.046	113.804.956.324	92.428.161.687
06.02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.053.031.264	5.053.031.264	4.053.031.264	3.053.031.264	3.053.031.265
06.02.03 1	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	3.053.031.264	3.053.031.264	3.053.031.264	3.053.031.264	3.053.031.265
	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000	2.000.000.000	1.000.000.000		
	PEMBIAYAAN NETTO	80.453.859.703	66.312.768.955	114.901.609.782	110.751.925.059	89.375.130.422
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	71.365.800.220	117.385.377.102	80.385.203.348	92.423.589.693	35.978.619.800

Sumber : BKAD Tahun 2025

Secara umum kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Barru Tahun anggaran 2020 – 2024 menunjukkan peran APBD sebagai stimulus kinerja pembangunan daerah yang telah berkontribusi dalam mendukung pencapaian target-target Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru sesuai yang ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2025 – 2030 diuraikan sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah.

Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kebijakan Pendapatan daerah ditujukan untuk peningkatan pendapatan daerah guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah, mengurangi ketergantungan fiskal, serta meningkatkan ruang fiskal daerah. Gambaran umum pendapatan selama periode 2020 – 2024 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 2.245
Kinerja Pendapatan Daerah Tahun 2020 – 2024

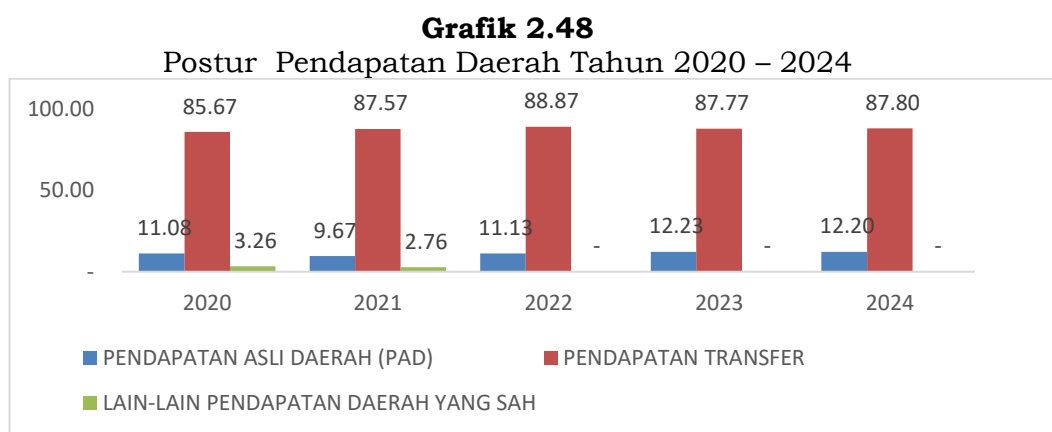


Sumber : BKAD Tahun 2025

Grafik di atas menunjukkan gambaran pendapatan daerah yang masih didominasi oleh pendapatan transfer berfluktuasi sesuai dengan kebijakan nasional yang akan diserahkan ke daerah. Nilai terbesar pendapatan transfer diperoleh pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 824.919.254.145,- besarnya pendapatan transfer ini

dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah untuk penanganan COVID 19 dan pemulihan ekonomi. Di tahun ini juga PAD menurun drastic dari Rp. 101.324.046.920,- pada tahun 2020 menjadi Rp. 91.080.726.896,- pada tahun 2021 disebabkan oleh pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sehingga aktivitas masyarakat diruang-ruang public sebagai sumber penerimaan PAD sangat berkurang. Untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah yang posturnya tidak selalu ada dalam APBD seperti pada tahun 2022 dan 2024 tergantung dari besaran Hibah yang merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Dana darurat yang merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Postur pendapatan daerah di Kabupaten Barru yang masih didominasi oleh pendapatan transfer dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber : BKAD Tahun 2025

Dilihat dari grafik di atas postur pendapatan selama kurun waktu 2020-2024 didominasi oleh Pendapatan transfer antara 85,67% - 87,80%, pendapatan asli daerah antara 11,08% - 12,20% dan lain-lain pendapatan daerah yang sah antara 0 % - 3,26%.

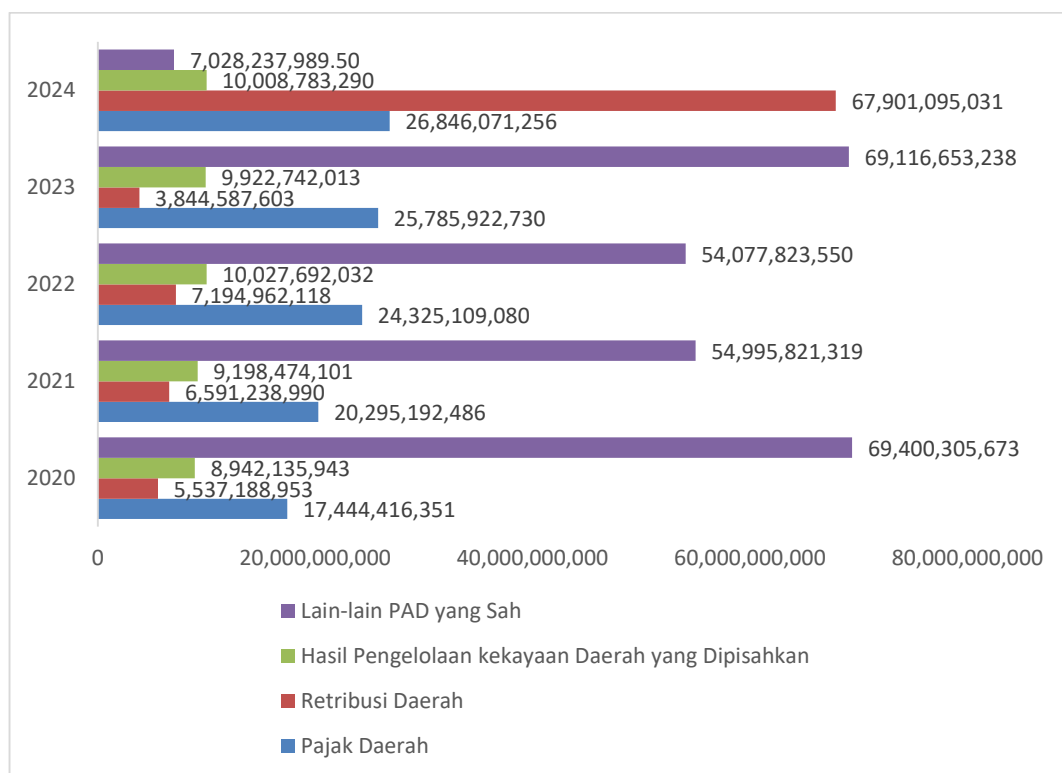
Lebih lanjut mengacu pada Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Pendapatan Asli Daerah diatur sebagai berikut:

- 1) pajak daerah;

- 2) retribusi daerah;
- 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- 4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Di Kabupaten Barru kinerja pendapatan asli daerah selama kurun waktu 2020 - 2024 dapat dilihat berikut:

Grafik 2.49
Kinerja Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 – 2024



Sumber : BKAD Tahun 2025

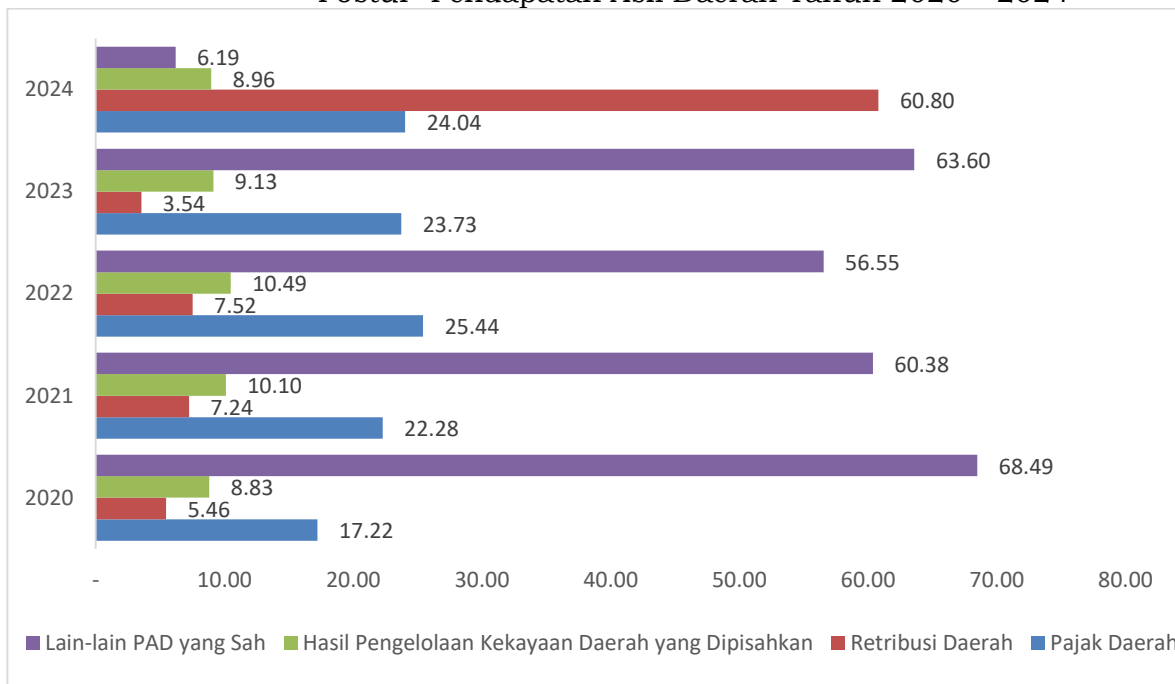
Dari grafik di atas dapat diuraikan bahwa Pendapatan Pajak Daerah menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, dari Rp.17.444.416.351,- pada tahun 2020 selama kurun waktu 5 tahun meningkat menjadi Rp.26.846.071.256,- pada tahun 2024. Peningkatan ini didukung oleh 4 jenis pajak dengan penerimaan terbesar yaitu : Pajak Penerangan Jalan yang dihasilkan sendiri, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta BPHTB Pemindahan Hak.

Pendapatan Retribusi Daerah mengalami fluktuasi pendapatan retribusi terendah pada tahun 2023 hanya sebesar Rp.3.844.587.603,-, pada tahun 2024 pendapatan retribusi mengalami peningkatan yang signifikan menjadi Rp.67.901.095.031,- yang disebabkan oleh perpindahan pendapatan layanan rumah sakit dan puskesmas dari lain-lain pendapatan yang sah menjadi retribusi pelayanan di rumah sakit dan retribusi pelayanan di puskesmas. Fluktuasi dalam PAD ini mencerminkan perubahan kondisi ekonomi serta efektivitas kebijakan pemerintah daerah. Penting bagi pemerintah daerah untuk terus memonitor dan menyesuaikan

strategi pendapatan guna memastikan keberlanjutan dan peningkatan PAD di masa mendatang.

Untuk postur pendapatan asli daerah pertahunnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.50
Postur Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 – 2024



Sumber : BKAD Tahun 2025

Berdasarkan grafik di atas bahwa postur pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barru didominasi oleh lain – lain pendapatan yang sah dengan besaran yang fluktuatif selama kurun waktu 2020 – 2023 yang diperoleh dari penjualan dan pemanfaatan BMD, Jasa Giro, Pendapatan Bunga, Pendapatan BLUD, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan serta pendapatan denda pajak dan retribusi daerah. Pada tahun 2024 terdapat pergeseran dominasi dari lain-lain pendapatan yang sah ke retribusi yang disebabkan oleh perpindahan penempatan jasa pelayanan rumah sakit dan jasa pelayanan puskesmas.

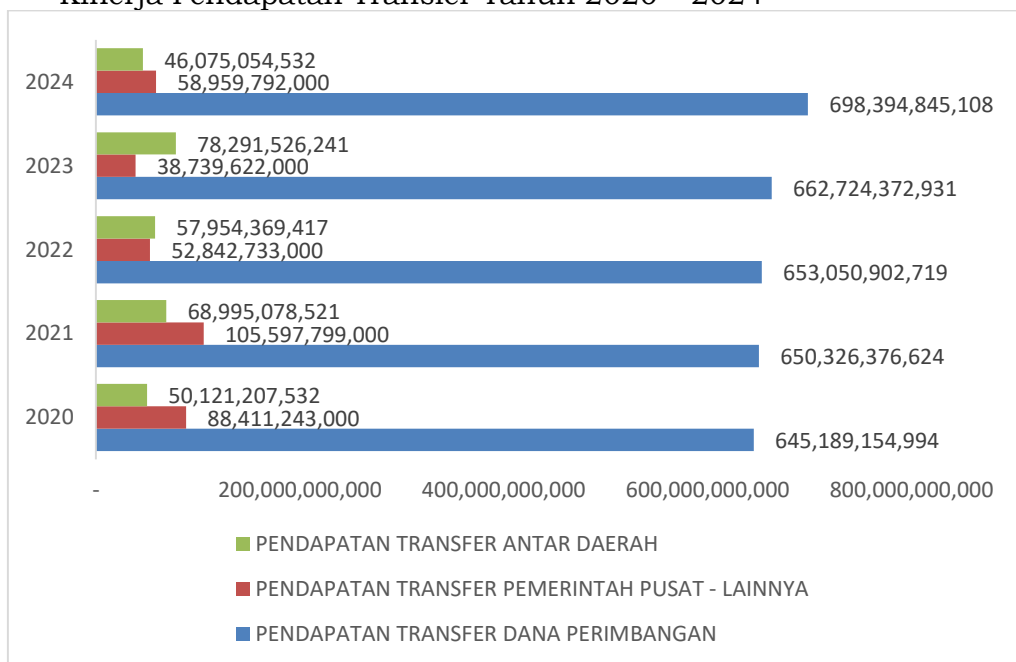
Pendapatan Transfer berdasarkan pada pasal 34 sampai dengan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Pendapatan Transfer meliputi:

- 1) Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. Pengalokasian transfer Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Transfer Antar-Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

Kinerja pendapatan Transfer di Kabupaten Barru dapat dilihat

pada grafik berikut :

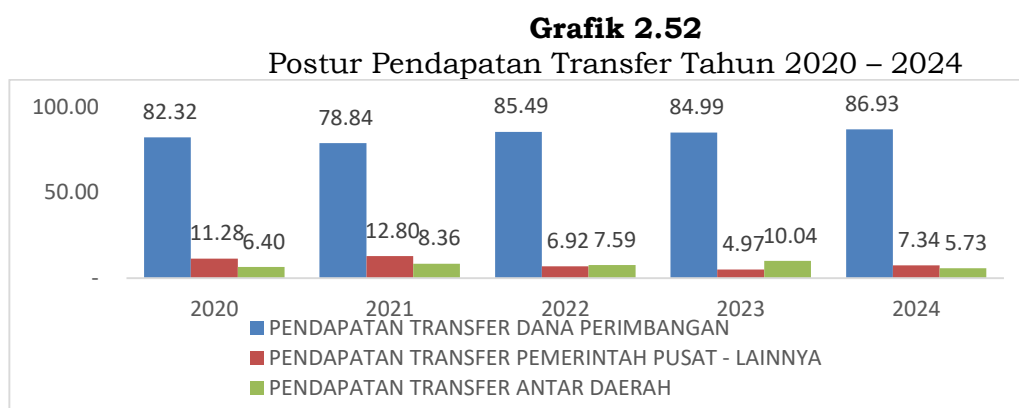
Grafik 2.51
Kinerja Pendapatan Transfer Tahun 2020 – 2024



Sumber : BKAD Tahun 2025

Grafik di atas menunjukkan pendapatan transfer pemerintah pusat - dana perimbangan cenderung stabil dari tahun ke tahun meskipun menurun pada tahun 2020 yang disebabkan oleh dampak pandemic covid 19 yang berdampak pada penurunan pendapatan nasional. Setelah penurunan pada tahun 2020, terjadi peningkatan secara bertahap hingga tahun 2024 . Untuk Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LRA menunjukkan fluktuasi yang cukup besar. Terjadi peningkatan signifikan pada tahun 2020 dan 2021, namun kemudian menurun drastis pada tahun 2022 dan 2023. Peningkatan yang terjadi pada tahun 2020-2021 dipengaruhi oleh peningkatan Dana Insentif Daerah yang diperuntukkan untuk Penanganan Covid 19 untuk sector kesehatan berupa jaring pengaman sosial, pemulihan ekonomi serta upaya mempercepat pelaksanaan tracing, testing, dan treatment (3T).

Untuk postur pendapatan transfer pertahunnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Sumber : BKAD Tahun 2025

Postur pendapatan transfer tahun 2020 - 2024 didominasi oleh transfer pemerintah pusat - dana perimbangan berada pada kisaran 78,84 % - 86,93 % yang meliputi Dana Transfer Umum (Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum) dan Dana Alokasi Khusus baik fisik dan non fisik, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya berada pada kisaran 4,97% - 12,80% yang meliputi Dana Desa dan Insentif Fiskal, Pendapatan Transfer Antar Daerah berada pada kisaran 4,97%-8,36% yang meliputi pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.

Dan yang terakhir dari rincian pendapatan daerah adalah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Mengacu pada Pasal 46 sampai dengan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas :

- 1) Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Pendapatan Hibah Dana BOS, dan Pendapatan Pengembalian Hibah tahun sebelumnya.

Grafik 2.53
Kinerja Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Tahun 2020 – 2024



Sumber : BKAD Tahun 2025

Lain-lain pendapatan daerah yang sah diberikan pemerintah pusat ke pemerintah daerah melalui hibah untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan ke Pemerintah Kabupaten Barru pada 2 tahun yaitu tahun 2020 dan tahun 2021. Perbedaan signifikan dalam pendapatan hibah dari pemerintah daerah antara tahun 2020 dan 2021 menunjukkan adanya perubahan dalam prioritas dan alokasi anggaran pemerintah daerah. Pada tahun 2020, terdapat alokasi dana hibah yang besar Rp. 29.814.706.375,-, untuk menangani situasi darurat Covid 19. Sebaliknya, pada tahun 2021, alokasi dana hibah menurun drastis, dengan kebijakan yang berbeda yaitu pengadaan jaringan air minum untuk masyarakat berpenghasilan rendah kepada PDAM melalui pemerintah daerah sebesar Rp. 1.500.000.000,-.

2. Belanja Daerah

Berdasarkan Pasal 55 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

- a. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
- b. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
- c. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- d. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

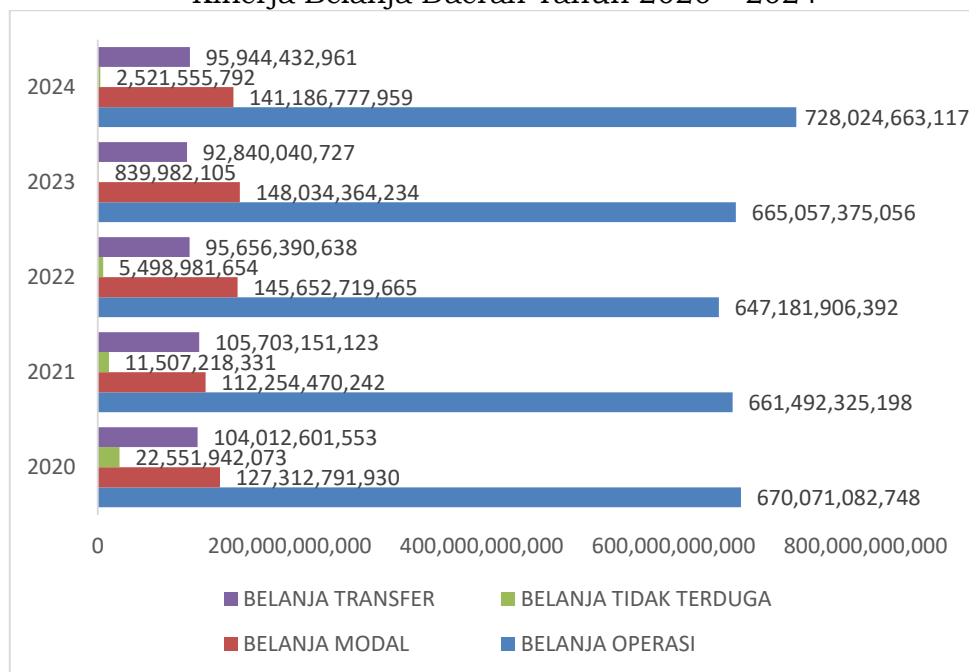
Kinerja Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Berdasarkan grafik batang yang menyajikan data alokasi belanja pemerintah dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat jelas bahwa belanja pemerintah didominasi oleh dua komponen utama: belanja operasi dan belanja transfer. Selama lima tahun ini, belanja operasi secara konsisten menjadi pos pengeluaran terbesar, yang menunjukkan prioritas pemerintah dalam membiayai pengeluaran rutin dan kegiatan operasional sehari-hari. Sementara itu, belanja transfer menempati urutan kedua, yang mencerminkan komitmen terhadap transfer dana ke daerah atau program bantuan sosial. Di

sisi lain, belanja modal dan belanja tidak terduga memiliki porsi yang jauh lebih kecil dan cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun.

Grafik 2.54

Kinerja Belanja Daerah Tahun 2020 – 2024



Sumber : BKAD Tahun 2025

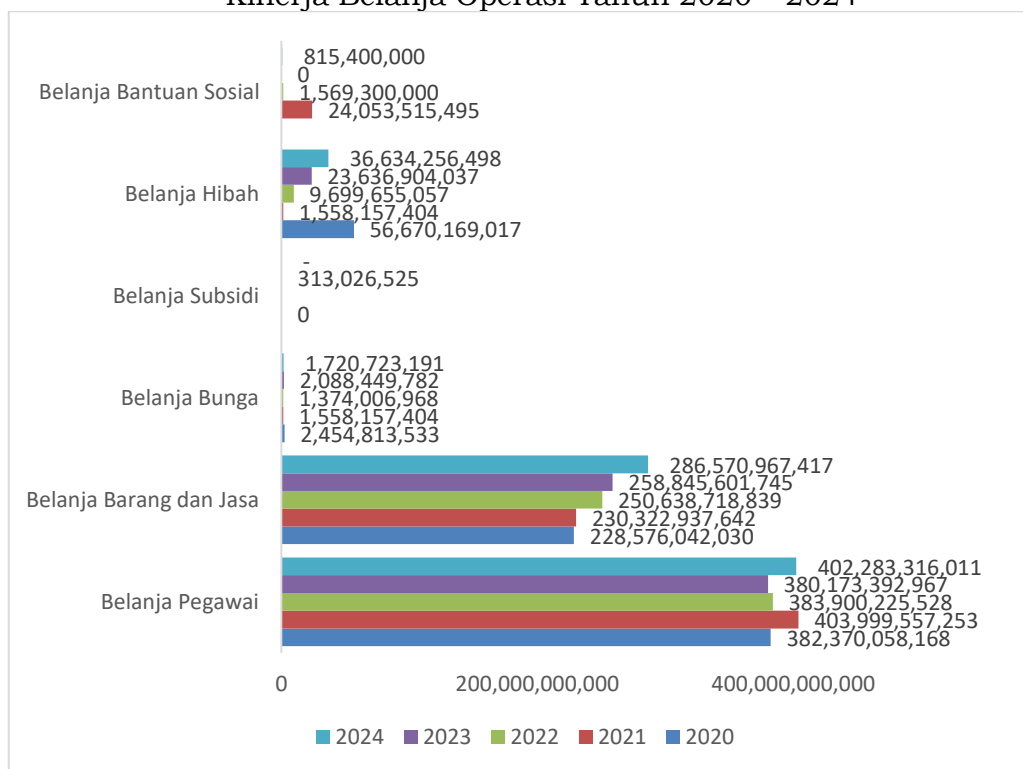
Belanja operasi menunjukkan tren yang berfluktuasi namun tetap berada pada angka yang sangat tinggi. Angka tertinggi tercatat di tahun 2024 dengan nilai mencapai Rp728 triliun, yang menandakan lonjakan signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Di sisi lain, belanja transfer juga menunjukkan dinamika yang menarik. Setelah mengalami kenaikan dari tahun 2020 ke 2021, pos pengeluaran ini sempat menurun sebelum kembali naik tajam di tahun 2024, mencapai puncaknya di angka lebih dari Rp95 triliun. Peningkatan ini bisa mengindikasikan adanya perluasan program transfer atau realokasi sumber daya yang lebih besar untuk skema bantuan di tahun tersebut.

Berbeda dengan dua pos belanja teratas, belanja modal memiliki porsi yang lebih kecil dan tidak menunjukkan tren kenaikan yang signifikan. Nilainya bergerak dalam kisaran yang relatif stabil, yang mungkin menandakan bahwa investasi fisik dan pembangunan infrastruktur tidak menjadi fokus utama dalam alokasi anggaran selama periode tersebut. Sementara itu, belanja tidak terduga, sebagai pos pengeluaran terendah, menunjukkan pola yang sangat tidak menentu. Angka yang paling mencolok terlihat di tahun 2020 dengan nilai lebih dari Rp22 miliar, yang dapat diasumsikan sebagai respons cepat terhadap kondisi luar biasa, seperti pandemi COVID-19. Setelah itu, porsinya jauh menurun dan tetap di angka yang relatif kecil, menunjukkan bahwa penggunaan dana darurat tidak terjadi dalam skala besar di tahun-tahun berikutnya.

Secara keseluruhan, data grafik ini memberikan gambaran tentang prioritas belanja pemerintah yang sangat berfokus pada pengeluaran operasional dan transfer. Angka yang melonjak tajam di tahun 2024 untuk kedua pos belanja tersebut menunjukkan adanya perubahan kebijakan fiskal atau prioritas pengeluaran yang signifikan menjelang tahun tersebut. Fluktuasi pada belanja modal dan belanja tidak terduga juga memberikan petunjuk tentang bagaimana pemerintah menyesuaikan pengeluaran untuk investasi dan keadaan darurat, namun kedua pos ini tetap bukan merupakan pendorong utama dari total pengeluaran pemerintah selama periode 2020-2024.

Untuk melihat jenis belanja yang menjadi komponen dari ke tiga belanja tersebut akan diuraikan di bawah ini.

Grafik 2.55
Kinerja Belanja Operasi Tahun 2020 – 2024



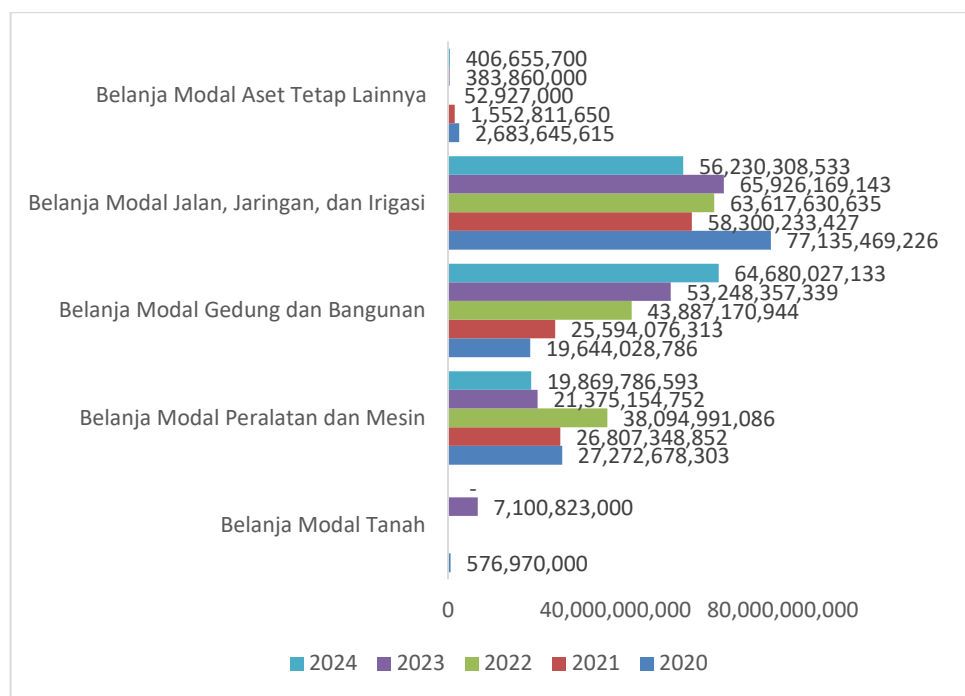
Sumber : BKAD Tahun 2025

Data belanja operasi di atas menunjukkan adanya perubahan prioritas dan kebijakan dari tahun ke tahun. Analisis lebih lanjut diperlukan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut dan untuk memastikan bahwa belanja operasi dialokasikan secara efektif dan efisien. Dari grafik di atas terlihat bahwa Belanja Pegawai merupakan komponen terbesar dari belanja operasi setiap tahunnya dilanjutkan Belanja Barang dan Jasa merupakan komponen terbesar kedua setelah belanja pegawai. Belanja Bunga relatif kecil dibandingkan komponen lainnya. Sedangkan untuk Belanja Hibah menunjukkan peningkatan yang

signifikan dalam beberapa tahun terakhir yaitu pada tahun 2023 dan tahun 2024, yang disebabkan oleh pendanaan pilkada berubah hibah kepada KPU, BAWASLU, TNI dan POLISI yang menjadi bagian penting dari pelaksanaan PILKADA.

Selanjutnya kinerja belanja modal selama kurun waktu 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.56
Kinerja Belanja Modal Tahun 2020 – 2024



Sumber : BKAD Tahun 2025

Grafik ini menyajikan rincian alokasi belanja modal pemerintah untuk lima kategori utama dari tahun 2020 hingga 2024. Secara keseluruhan, terlihat bahwa belanja modal untuk Jalan, Jaringan, dan Irigasi secara konsisten mendominasi pengeluaran, menempati porsi terbesar dari total belanja modal di setiap tahunnya. Kategori lainnya, seperti Belanja Modal Gedung dan Bangunan serta Belanja Modal Peralatan dan Mesin, memiliki porsi yang cukup besar tetapi jauh di bawah pos Jalan, Jaringan, dan Irigasi. Belanja Modal Tanah dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya merupakan pos pengeluaran yang paling kecil. Dinamika pengeluaran menunjukkan fluktuasi tahunan untuk setiap kategori, tanpa adanya tren naik atau turun yang linier sepanjang periode tersebut.

Belanja modal untuk Jalan, Jaringan, dan Irigasi merupakan tulang punggung investasi fisik pemerintah. Angkanya menunjukkan pola yang tidak stabil: pengeluaran tertinggi tercatat di tahun 2020 dengan angka lebih dari Rp77 triliun, yang kemungkinan besar merupakan bagian dari proyek-proyek infrastruktur besar. Angka ini kemudian mengalami penurunan signifikan di tahun 2021 dan 2022,

sebelum akhirnya kembali meningkat di tahun 2023 dan 2024. Peningkatan pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan adanya kembali fokus pemerintah pada pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar setelah sempat menurun.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan serta Belanja Modal Peralatan dan Mesin menunjukkan tren yang berbeda. Belanja Gedung dan Bangunan mengalami penurunan yang cukup tajam dari puncaknya di tahun 2020 (lebih dari Rp64 triliun) ke angka terendah di tahun 2022 (sekitar Rp19 triliun), sebelum sedikit meningkat kembali. Hal ini bisa mengindikasikan bahwa proyek pembangunan gedung pemerintah mencapai puncaknya di awal periode dan kemudian melambat. Sementara itu, Belanja Modal Peralatan dan Mesin menunjukkan pola yang lebih stabil, meskipun dengan fluktuasi, di mana angkanya tidak jauh berbeda dari tahun ke tahun. Pos ini tidak mengalami lonjakan atau penurunan drastis seperti kategori lainnya.

Dua kategori belanja modal lainnya, yaitu Tanah dan Aset Tetap Lainnya, memiliki porsi yang sangat kecil. Belanja Modal Tanah menunjukkan pola yang sangat tidak beraturan, dengan pengeluaran signifikan hanya tercatat di tahun 2023 (lebih dari Rp7 miliar), sementara di tahun-tahun lain angkanya sangat rendah atau bahkan tidak ada. Ini menunjukkan bahwa akuisisi tanah dalam skala besar tidak terjadi secara rutin. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya juga memiliki angka yang kecil, tetapi menunjukkan kenaikan yang stabil dari tahun 2020 hingga 2024. Kenaikan ini mengindikasikan adanya investasi yang terus-menerus, meskipun dalam skala kecil, untuk aset-aset tetap yang tidak masuk ke dalam kategori utama lainnya.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari SiLPA, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, dan Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan Pasal 70 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, terdiri atas a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Pinjaman Daerah;

dan/atau pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tabel 2.244 menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi dalam pembiayaan daerah dari tahun ke tahun. Penurunan signifikan terjadi pada tahun 2022, diikuti oleh penurunan pada tahun 2023 dan 2024. Penurunan pada tahun 2023 dan 2024 disebabkan oleh penyesuaian anggaran atau perubahan prioritas pembiayaan. Penerimaan pembiayaan menunjukkan tren yang mirip dengan pembiayaan daerah, dengan peningkatan pada tahun 2022 dan penurunan pada tahun 2023 dan 2024. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pembiayaan sangat terkait dengan kebutuhan pembiayaan daerah. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya menunjukkan tren yang sama dengan penerimaan pembiayaan. Hal ini mengindikasikan bahwa sisa lebih anggaran dari tahun sebelumnya digunakan untuk mendukung pembiayaan tahun berjalan.

Pengeluaran pembiayaan relatif stabil, dengan sedikit peningkatan pada tahun 2021. Penurunan pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan adanya efisiensi atau penyesuaian dalam Pembayaran pinjaman daerah dari pemerintah pusat sangat stabil dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pembayaran pinjaman dilakukan secara konsisten tanpa fluktuasi yang signifikan. Penyertaan modal daerah mengalami peningkatan pada tahun 2021, kemudian menurun pada tahun 2022 dan tidak ada alokasi pada tahun 2023 dan 2024.

Hal ini menunjukkan perubahan kebijakan atau prioritas dalam penyertaan modal daerah. Pembiayaan netto menunjukkan tren yang mirip dengan pembiayaan daerah dan penerimaan pembiayaan. Peningkatan pada tahun 2022 diikuti oleh penurunan pada tahun 2023 dan 2024. Sisa lebih pembiayaan anggaran menunjukkan fluktuasi, dengan peningkatan signifikan pada tahun 2021. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat sisa anggaran yang dapat digunakan untuk tahun-tahun berikutnya.

Pembiayaan daerah dan penerimaan pembiayaan menunjukkan tren yang mirip, dengan peningkatan pada tahun 2022 dan penurunan pada tahun 2023 dan 2024. Pengeluaran pembiayaan relatif stabil, dengan penurunan pada tahun 2023 dan 2024. Penyertaan modal daerah tidak dialokasikan pada tahun 2023 dan 2024, menunjukkan perubahan kebijakan atau prioritas. Sisa lebih pembiayaan anggaran menunjukkan adanya sisa anggaran yang dapat digunakan untuk tahun-tahun berikutnya. Perlu dilakukan

evaluasi terhadap alokasi penyertaan modal daerah untuk memastikan bahwa kebutuhan pembiayaan daerah terpenuhi. Pembiayaan netto yang menurun pada tahun 2023 dan 2024 perlu dipantau untuk memastikan bahwa tidak ada proyek yang terganggu. Sisa lebih pembiayaan anggaran dapat digunakan untuk mendukung proyek-proyek prioritas di masa depan.

B. Neraca Daerah

Akuntansi Pemerintah Daerah didesain sebagai sebuah sistem yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan mengakomodasi arsitektur Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibangun oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Pilar utama pengembangan akuntansi pemerintah daerah terletak pada perumusan kebijakan akuntansi dan pengembangan sistem akuntansi.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Kebijakan akuntansi tersebut disusun oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat SAPD, adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah. SAPD tersebut ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

SAPD pada entitas akuntansi dilaksanakan dalam rangkaian prosedur identifikasi transaksi, teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, serta penyusunan laporan keuangan entitas akuntansi berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Salah satu bagian dari SAPD adalah neraca. Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban

peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Perkembangan neraca daerah, menguraikan pelaporan keseimbangan umum daerah, yakni keseimbangan antara aset daerah dengan kewajiban dan ekuitas dana daerah. Perkembangan neraca daerah Kabupaten Barru selama periode pencatatan 2020– 2024, ditunjukkan pada tabel berikut ini

Tabel 2.245
Neraca Daerah Tahun 2020 – 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
ASET					
ASET LANCAR	109.085.095.748	159.739.967.198	152.340.866.735	142.761.540.908	73.106.823.386
Kas Daerah	70.658.101.460	118.743.137.315	113.599.277.103	92.344.580.521	35.894.130.253
Kas di Kas Daerah	67.221.962.284	109.562.758.303	103.949.293.775	81.146.569.014	27.467.626.408,81
Kas di Bendahara Pengeluaran	2.352.730	166.892.353	200.747	13.540.100	145.862.268,00
Kas di Bendahara Penerimaan	1.000	17.463.750	-	881.000	-
Kas di BLUD	1.993.870.542	8.315.895.790	9.554.281.135	11.183.590.407	8.280.641.576,47
Kas di Bendahara FKTP	1.439.914.904	680.127.119	95.501.446	-	-
Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD)	686.524.759	200.816.094	229.534.037	847.114.031	160.810.805
Kas di Bendahara BOS	682.274.744	196.566.079	83.524.122	85.968.786	1.795.000
Kas Lainnya Sertifikasi	4.250.015	4.250.015	4.250.015	4.250.015	
Kas Lainnya di PAUD	-	-	9.600.000	2.595.230	
Kas Lainnya Bendahara Pengeluaran	-	-	132.159.900	754.300.000	159.015.805,00
Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-	-
Piutang Pajak Daerah	3.601.551.327	3.471.914.201	3.216.560.429	7.742.244.711	(6.361.095.404)
Penyisihan Piutang Pajak	(1.184.395.807)	(1.544.005.433)	(1.982.643.477)	4.992.368.087	(14.660.841.648)
Piutang Pajak Daerah (Netto)	4.785.947.133	5.015.919.634	5.199.203.906	2.749.876.624	8.299.746.244,43
Piutang retribusi Daerah	5.279.246.657	5.355.679.444	3.872.955.379	9.103.402.858	13.735.040.730
Penyisihan Piutang Retribusi	(836.253.348)	(882.480.900)	(1.982.643.477)	7.557.596.717	
Piutang Retribusi Daerah (Netto)	6.115.500.005	6.238.160.344	5.855.598.856	1.545.806.141	13.735.040.730,33
Piutang Transfer	10.588.463.320	17.713.761.372	19.763.584.868	14.257.681.920	25.924.919.218
Penyisihan Piutang Transfer	-	-	-	-	
Piutang Dana Bagi Hasil (Netto)	10.588.463.320	17.713.761.372	19.763.584.868	14.257.681.920	25.924.919.218,00
Beban Dibayar Dimuka	471.093.253	443.381.678	316.775.585	353.323.565	104.041.555
Bagian Lancar Tagihan Penjualan angsuran	277.113.678	277.113.678	226.268.275	127.055.290	104.041.555,00
Peny. Bag. Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	(41.567.052)	(55.422.736)	(67.880.483)	226.268.275	
Bag. Lancar tagihan Penjualan Angsuran (Netto)	235.546.627	221.690.735	158.387.793	-	
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	973.615.400	959.315.400	958.715.400	957.715.400	-

Piutang Lainnya	3.707.142.442	3.799.578.636	1.938.791.711	4.395.685.061	(9.349.281.521)
Penyisihan Piutang Lainnya	(689.606.791)	(689.606.791)	(689.606.791)	706.643.821	- 13.744.966.582,29
Piutang Lainnya (Netto)	4.396.749.233	4.489.185.427	2.628.398.502	3.689.041.240	4.395.685.061
Persediaan	13.119.357.130	9.052.383.058	8.444.672.223	12.759.792.840	12.998.257.749
INVESTASI JANGKA PANJANG	-	-	-	-	
Investasi jangka Panjang Non Permanen	4.040.577.171	4.012.290.171	3.984.003.171	11.867.148.513	-
Investasi Non Permanen Lainnya	3.955.716.171	3.955.716.171	3.955.716.171	3.955.716.171	3.955.716.171
Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya	3.955.716.171	3.955.716.171	3.955.716.171	3.955.716.171	- 3.955.716.170,95
Investasi Non Permanen Lainnya (Netto)	(3.870.855.171)	(3.899.142.171)	(3.927.429.171)	3.955.716.171	
INVESTASI JANGKA PANJANG PERMANEN	66.361.210.682	94.584.103.776	91.800.132.792	89.822.608.182	89.005.814.204
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	66.361.210.682	94.584.103.776	91.800.132.792	89.822.608.182	89.005.814.204,00
Investasi Permanen Lainnya	-	-	-	-	
ASET TETAP	-	-	-	-	1.900.277.052.032
Tanah	354.620.210.853	353.565.314.789	354.523.652.989	354.523.652.989	369.532.766.545
peralatan dan Mesin	365.160.728.577	391.830.625.878	433.150.377.922	433.150.377.922	473.434.141.682
Gedung dan Bangunan	746.557.174.520	786.527.913.382	826.508.905.275	826.508.905.275	881.833.810.097
jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.957.332.057.373	2.041.911.342.643	2.100.165.574.344	2.100.165.574.344	2.250.483.116.151
Aset Tetap lainnya	81.715.034.294	83.339.253.638	84.971.408.047	84.971.408.047	91.477.569.286
Konstruksi Dalam Pengerjaan	43.832.258.554	22.273.225.957	40.592.727.804	40.592.727.804	47.901.080.614
Akumulasi Penyusutan	(1,633,893,658,876,81)	(1,762,810,823,026,10)	(1,885,501,879,917,20)	(1,885,501,879,917,20)	(2.214.385.432.342)
DANA CADANGAN	-	-	-	-	-
Dana Cadangan	-	-	-	-	-
ASET LAINNYA	-	-	-	-	78.003.842.636
Tagihan Jangka Panjang	801.965.268	801.965.268	801.965.268	801.965.268	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-
Aset tidak Berwujud	1.005.170.331	1.204.170.331	2.083.640.331	2.083.640.331	2.333.605.174
Amortisasi Aset Tak Berwujud	(127,948,486,00)	(397,019,518,00)	(532,094,383,49)	(740,458,416,59)	(971.735.894)
Aset Lain-lain	148.089.500.451	147.620.193.953	146.823.189.758	149.557.837.562	146.003.155.440
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-	(61.620.333.832)	(61.620.333.832)	8.823.675.668	(69.361.182.085)
Dana Transfer Treasury Deposit facility (TDF)			2.182.825.792		
Dana Transfer Treasury Deposit facility (TDF)			2.182.825.792		
KEWAJIBAN					44.370.335.869
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					35.211.242.077
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		418.904	13.393.900	5.883.270	76.321.257,00
Utang Bunga	2.168.086.407	175.037.133	154.340.509	149.671.098	192.758.608,85
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	3.053.031.264	3.053.031.264	3.053.031.265	3.053.031.265	3.053.031.264,26

Pendapatan Diterima Dimuka / Pendapatan yang ditangguhkan	81.971.535	6.351.810	1.204.532.014	183.283.783	516.453.110,43
Utang Beban	14.458.544.402	19.705.089.663	19.815.286.852	19.176.348.648	31.372.677.836,58
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-	-	-	
Utang Kepada Pihak Ketiga	8.251.182.909	7.496.808.044	11.082.785.809	15.255.683.894	
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-	-	9.159.093.792
Utang Dalam Negeri	21.371.218.850	18.318.187.586	15.265.156.322	12.212.125.057	9.159.093.792,27
Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	
EKUITAS	-	-	-	-	2.108.047.533.643
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2.243.284.219.832	2.261.695.402.095	2.292.947.400.508	2.275.440.959.268	2.152.417.869.513

Sumber : BKAD Tahun 2025

1. Aset

Aset lancar Kabupaten Barru mengalami fluktuasi cukup tajam. Pada tahun 2020, aset lancar tercatat sebesar Rp109,09 miliar, meningkat pesat menjadi Rp159,74 miliar di tahun 2021. Namun, sejak 2022 terjadi tren penurunan, yaitu Rp152,34 miliar (2022), Rp142,76 miliar (2023), hingga menyusut cukup drastis pada tahun 2024 menjadi Rp73,11 miliar.

Komponen utama aset lancar adalah kas daerah, yang menurun signifikan dari Rp118,74 miliar pada 2021 menjadi hanya Rp35,89 miliar pada 2024. Penurunan kas ini mengindikasikan terjadinya penyerapan anggaran yang tinggi serta semakin kecilnya sisa saldo akhir. Meskipun demikian, pos piutang transfer mengalami peningkatan signifikan, dari Rp10,58 miliar pada 2020 menjadi Rp25,92 miliar pada 2024, yang menunjukkan adanya hak pendapatan daerah yang belum terealisasi.

Selain itu, persediaan relatif stabil di kisaran Rp8–13 miliar, sedangkan beban dibayar dimuka dan piutang lainnya menunjukkan fluktuasi namun dengan nilai yang tidak terlalu dominan terhadap total aset lancar.

Investasi jangka panjang permanen, yang umumnya berupa penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMD atau institusi lain, mengalami kenaikan dari Rp66,36 miliar pada 2020 menjadi Rp94,58 miliar pada 2021, kemudian menurun stabil hingga mencapai Rp89,01 miliar pada 2024. Perubahan ini mencerminkan adanya penyesuaian terhadap nilai penyertaan modal serta kebijakan pengelolaan investasi daerah.

Sedangkan investasi jangka panjang non permanen relatif stagnan di kisaran Rp3,95 miliar, dengan beberapa penyesuaian nilai penyisihan. Aset tetap merupakan komponen terbesar dalam struktur

aset daerah. Terdapat peningkatan konsisten dari Rp3,55 triliun pada 2020 menjadi lebih dari Rp3,96 triliun pada 2024. Komponen terbesar berasal dari jalan, irigasi, dan jaringan yang mencapai Rp2,25 triliun pada 2024. Selain itu, gedung dan bangunan juga mengalami kenaikan, dari Rp746,56 miliar (2020) menjadi Rp881,83 miliar (2024).

Pos kontruksi dalam pengerjaan (KDP) juga menunjukkan peningkatan signifikan dari Rp22,27 miliar (2021) menjadi Rp47,90 miliar pada 2024, menandakan adanya intensitas pembangunan infrastruktur daerah yang masih berlangsung.

Meskipun demikian, nilai aset tetap telah dikurangi akumulasi penyusutan yang meningkat cukup tajam dari Rp1,63 triliun (2020) menjadi Rp2,21 triliun pada 2024, mencerminkan usia pemakaian aset daerah yang semakin panjang.

Aset lainnya juga memiliki porsi cukup penting, di mana tahun 2024 tercatat sebesar Rp78 miliar. Komponen ini didominasi oleh aset tidak berwujud (Rp2,33 miliar) serta aset lain-lain (Rp146 miliar) setelah dikompensasi dengan akumulasi penyusutan.

Secara keseluruhan, total aset Pemerintah Kabupaten Barru menunjukkan tren pertumbuhan jangka panjang meskipun terdapat fluktuasi pada komponen tertentu. Penurunan aset lancar dikompensasi dengan peningkatan aset tetap, sehingga struktur aset semakin didominasi oleh infrastruktur dan sarana prasarana. Hal ini menandakan orientasi belanja daerah lebih diarahkan pada pembangunan jangka panjang dibandingkan akumulasi kas atau aset lancar.

2. Kewajiban

Struktur kewajiban Pemerintah Kabupaten Barru selama periode 2020–2024 menunjukkan adanya dinamika yang mencerminkan kondisi fiskal daerah, terutama dari sisi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang.

Kewajiban jangka pendek merupakan komponen terbesar dalam struktur kewajiban daerah. Pada tahun 2024, kewajiban jangka pendek tercatat sebesar Rp35,21 miliar, dengan beberapa komponen utama:

- a. Utang Beban menunjukkan peningkatan signifikan dari Rp14,45 miliar (2020) menjadi Rp31,37 miliar pada 2024. Lonjakan ini menandakan adanya akumulasi kewajiban atas beban yang belum diselesaikan pemerintah daerah, baik berupa belanja barang/jasa maupun beban lainnya.
- b. Utang Kepada Pihak Ketiga juga mengalami tren meningkat, dari Rp8,25 miliar (2020) menjadi puncaknya Rp15,25 miliar pada

2023, sebelum kemudian tidak tercatat lagi pada 2024. Hal ini mengindikasikan adanya upaya penyelesaian kewajiban kepada pihak ketiga menjelang akhir periode.

- c. Pendapatan Diterima Dimuka / Pendapatan Ditangguhkan mengalami fluktuasi cukup tajam. Dari Rp81,97 juta (2020), melonjak menjadi Rp1,20 miliar (2022), kemudian stabil di Rp516,45 juta pada 2024. Komponen ini menggambarkan adanya penerimaan kas yang belum diakui sebagai pendapatan karena belum terpenuhi kewajiban penyediaan jasa/barang.
- d. Utang Bunga relatif menurun dibandingkan awal periode. Dari Rp2,16 miliar (2020), sempat turun ke Rp149 juta (2023), lalu sedikit naik ke Rp192,75 juta pada 2024. Hal ini menunjukkan adanya penurunan beban bunga jangka pendek seiring dengan menurunnya saldo pokok pinjaman.
- e. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) awalnya tidak signifikan, namun di 2024 melonjak menjadi Rp76,32 juta, yang mencerminkan adanya kewajiban terkait setoran pihak ketiga yang belum ditunaikan.

Kewajiban jangka panjang Kabupaten Barru mengalami tren penurunan yang cukup jelas. Pada 2020 tercatat sebesar Rp21,37 miliar, kemudian turun secara bertahap hingga menjadi Rp9,15 miliar pada 2024. Komponen utama kewajiban jangka panjang adalah utang dalam negeri, yang mengindikasikan pinjaman pemerintah daerah untuk pembiayaan pembangunan.

Penurunan ini mencerminkan adanya komitmen pemerintah daerah untuk mengurangi beban utang jangka panjang melalui pembayaran cicilan pokok secara berkesinambungan, sehingga memperbaiki struktur kewajiban jangka panjang dan menurunkan beban bunga di tahun-tahun berikutnya.

Secara agregat, total kewajiban Kabupaten Barru tahun 2024 tercatat sebesar Rp44,37 miliar. Jika dibandingkan dengan 2020 (Rp21,37 miliar pada utang dalam negeri ditambah utang jangka pendek), terlihat adanya peningkatan kewajiban, meskipun struktur kewajiban bergeser dari dominasi utang jangka panjang (2020) ke utang jangka pendek (2024).

Pergeseran ini menunjukkan bahwa beban kewajiban jangka panjang daerah semakin menurun, namun kewajiban jangka pendek justru meningkat, terutama pada komponen utang beban. Dengan demikian, pemerintah daerah perlu memperkuat manajemen kas dan pengendalian belanja agar tidak terlalu membebani kewajiban jangka pendek di masa mendatang.

3. Rasio Keuangan (likuiditas, solvabilitas)

Tingkat kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat diketahui berdasarkan analisis rasio atau perbandingan antara kelompok/element laporan keuangan yang satu dengan kelompok yang lain. Beberapa rasio yang dapat diterapkan di sektor publik adalah Rasio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas. Rasio Likuiditas terdiri rasio lancar (*current ratio*), rasio kas (*cash ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*). Sedangkan rasio lancar (*current ratio*) adalah rasio standar untuk menilai kesehatan organisasi. Rasio ini menunjukkan apakah pemerintah daerah memiliki aset yang cukup untuk melunasi kewajiban yang jatuh tempo. Kualitas pengelolaan keuangan daerah dikategorikan baik apabila nilai rasio lebih dari satu.

Begitupun kondisi rasio keuangan Kabupaten Barru diukur dengan menggunakan analisis terhadap rasio likuiditas, Rasio Solvabilitas dan Rasio Utang. Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten Barru dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Sementara Rasio Solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Kabupaten Barru dalam memenuhi kewajiban jangka panjang.

Perkembangan rasio keuangan Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Dalam Komponen Rasio Likuiditas ini ada 2 (dua) komponen rasio yang dihitung yaitu Rasio Lancar dengan formula aset lancar dibagi dengan kewajiban jangka pendek dan Rasio Quick dengan formula adalah aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan kewajiban jangka pendek.

Kondisi Rasio Likuiditas yang diukur dengan rasio lancar mengalami fluktuatif dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Rasio ini menunjukkan hubungan antara kas dan aset lancar lainnya dalam hal ini dari entitas pemerintah daerah dengan kewajiban lancarnya untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban lancarnya. Untuk mengetahui rincian rasio lancar Kabupaten Barru dapat dilihat

pada tabel berikut

Tabel 2.246
Rasio Lancar Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

TAHUN	ASET LANCAR	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	RASIO LIKUIDITAS
2020	111.745.655.291,59	28.012.816.516,96	3,99
2021	162.808.894.856,99	30.493.903.110,74	5,34
2022	156.969.021.320,24	35.323.370.347,88	4,44
2023	129.278.664.007,65	37.823.902.008,43	3,42
2024	84.329.195.373	35.211.242.077,12	2,39

Sumber : BKAD Tahun 2025

Pada tabel di atas menunjukkan Secara keseluruhan, meskipun rasio likuiditas Kabupaten Barru selama periode 2020–2024 masih berada di atas standar minimal (umumnya 2,00 dianggap cukup aman), tren penurunannya cukup mengkhawatirkan. Hal ini terutama disebabkan oleh:

- a. Penurunan aset lancar yang cukup tajam, khususnya pada tahun 2023–2024.
- b. Kewajiban jangka pendek yang cenderung meningkat.

Apabila tren ini berlanjut, maka likuiditas daerah dapat menghadapi risiko tekanan keuangan lebih besar di masa mendatang, sehingga diperlukan strategi penguatan kas, optimalisasi penerimaan daerah, dan efisiensi belanja untuk menjaga stabilitas fiskal.

Rasio keuangan lainnya adalah rasio quick, rasio ini akan menunjukkan kemampuan keuangan daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar atau tanpa memperhitungkan persediaan karena persediaan akan membutuhkan waktu yang lama untuk diuangkan dibanding dengan aset lainnya. Rasio cepat (Quick Ratio) Kabupaten Barru menunjukkan nilai yang semakin menurun dari tahun 2020 ke tahun 2024, seperti yang diperlihatkan table berikut ini.

Tabel 2.247
Rasio Quick Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

Uraian	PERSEDIAAN	ASET LANCAR	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	RASIO QUICK
2020	13.119.357.130,08	111.745.655.291,59	28.012.816.516,96	3,52
2021	9.052.383.058,25	162.808.894.856,99	30.493.903.110,74	5,04
2022	8.444.672.222,54	156.969.021.320,24	35.323.370.347,88	4,2
2023	12.759.792.840,43	129.278.664.007,65	37.823.902.008,43	3,08
2024	12.998.257.749	84.329.195.373	35.211.242.077	2,03

Sumber : BKAD Tahun 2025 dan diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa Perbandingan rasio likuiditas dengan rasio quick memperlihatkan bahwa persediaan memang menjadi komponen signifikan dalam aset lancar Kabupaten Barru. Meski begitu, meskipun tanpa memperhitungkan persediaan, pemerintah daerah masih mampu menutup kewajiban jangka pendek selama 2020–2024. Namun, penurunan rasio quick dari 5,04 (2021) menjadi 2,03 (2024) menandakan adanya pelemahan kondisi keuangan daerah, terutama akibat:

- a. Turunnya nilai aset lancar secara tajam pada 2023–2024.
- b. Beban kewajiban jangka pendek yang relatif tinggi dan cenderung meningkat.

Rasio Likiuditas juga diukur melalui rasio cash. Rasio kas pada neraca pemerintah menunjukkan kemampuan pemerintah untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya hanya dengan menggunakan kas dan setara kas yang dimilikinya. Rasio ini adalah salah satu ukuran likuiditas yang memberikan gambaran tentang seberapa baik pemerintah dapat memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa perlu menjual aset lainnya. Rasio Kas > 1: Pemerintah memiliki cukup kas dan setara kas untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya lebih dari satu kali. Ini menunjukkan likuiditas yang sangat kuat. Rasio Kas = 1: Pemerintah memiliki kas dan setara kas yang cukup untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya sepenuhnya. Rasio Kas < 1: Pemerintah tidak memiliki cukup kas dan setara kas untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya. Ini bisa menjadi tanda peringatan tentang masalah likuiditas yang mungkin dihadapi pemerintah. Rasio Cash Kabupaten Barru selama kurun waktu 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.248
Rasio Cash Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

Uraian	KAS DAERAH	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	RASIO CASH
2020	71.365.800.219,10	28.012.816.516,96	2,55
2021	118.943.953.408,89	30.493.903.110,74	3,9
2022	113.828.811.140,35	35.323.370.347,88	3,22
2023	93.191.694.552,30	37.823.902.008,43	2,46
2024	36.054.941.058	35.211.242.077,00	1,02

Sumber : BKAD Tahun 2025 dan diolah

Rasio cash di atas 1 berarti kas masih cukup untuk menutup kewajiban jangka pendek. Namun, tren menurun dari 2021 (3,90) hingga 2024 (1,02) menunjukkan penurunan drastis kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kewajiban segera dengan kas yang tersedia.

Kondisi tahun 2024 perlu diwaspadai karena margin kas terhadap kewajiban jangka pendek sangat tipis. Jika ada tekanan fiskal atau keterlambatan penerimaan, potensi kesulitan likuiditas jangka pendek bisa terjadi.

Secara umum, Kabupaten Barru masih menjaga rasio cash di atas batas aman (≥ 1) selama 2020–2024. Namun, tren penurunan tajam, khususnya pada 2024, menjadi sinyal perlunya langkah strategis seperti:

- Optimalisasi penerimaan daerah untuk memperkuat kas.
- Pengendalian pengeluaran jangka pendek.
- Pengelolaan kas yang lebih hati-hati agar kewajiban jangka pendek tetap dapat terpenuhi tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal.

c. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjang. Adapun rasio yang digunakan untuk menghitung Rasio Solvabilitas ini adalah Rasio Total Hutang terhadap Total Aset yang secara langsung membandingkan Total Kewajiban dengan Total Aset. Formula ini menunjukkan bahwa seberapa besar pendanaan yang dibiayai oleh hutang dibandingkan dengan total asset yang dimiliki. Sedangkan untuk Rasio Total Hutang terhadap Modal secara langsung membandingkan Total Kewajiban dengan Total Ekuitas yang berarti bahwa seberapa besar pendanaan yang dibiayai dari total hutang dibandingkan dengan total modal yang dimiliki. Berdasarkan formula tersebut maka Rasio Solvabilitas Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Barru selama lima tahun terakhir akan dipaparkan berikut ini.

Tabel 2.249

Rasio Total Utang terhadap Total Aset Tahun 2020 – 2024

Uraian	ASET	KEWAJIBAN/UTANG	RASIO TOTAL UTANG TERHADAP TOTAL ASET
2020	2.243.284.219.831,77	49.384.035.366,88	0,02
2021	2.261.695.402.095,09	48.812.090.696,40	0,02
2022	2.292.947.400.508,46	50.588.526.669,54	0,02
2023	2.275.440.959.268,40	50.036.027.064,96	0,02
2024	2.152.417.869.512,54	44.370.335.869,39	0,02

Sumber : BKAD Tahun 2025 dan diolah

Selama periode 2020 hingga 2024, rasio total utang terhadap total aset pemerintah daerah menunjukkan stabilitas dan pengelolaan keuangan yang baik. Dengan rasio yang berkisar antara 0,02 hingga 0,03, pemerintah daerah memiliki beban utang yang sangat rendah dibandingkan dengan asetnya. Hal ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga kesehatan keuangan dan meminimalkan risiko finansial yang disebabkan oleh utang. Untuk mengetahui Rasio total hutang terhadap aset daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.250

Rasio Total Utang terhadap Modal Tahun 2020 – 2024

URAIAN	KEWAJIBAN/UTANG	EKUITAS/MODAL	RASIO TOTAL UTANG TERHADAP MODAL
2020	49.384.035.367	2.193.900.184.465	0,023
2021	48.812.090.696	2.212.883.311.399	0,022
2022	50.588.526.670	2.242.358.873.839	0,023
2023	50.036.027.065	2.225.404.932.203	0,022
2024	44.370.335.869	2.108.047.533.643	0,021

Sumber : BKAD Tahun 2025

Nilai rasio yang sangat rendah ini menunjukkan bahwa struktur permodalan Pemerintah Kabupaten Barru sangat sehat dengan tingkat ketergantungan pada utang yang sangat kecil. Hal ini menggambarkan:

- o Tingginya kemandirian keuangan daerah.
- o Risiko finansial akibat kewajiban jangka panjang relatif rendah.

Kapasitas fiskal pemerintah daerah untuk melakukan pembiayaan pembangunan tidak terbebani oleh kewajiban yang signifikan.

Rasio utang terhadap aset yang tetap di level 0,02 dalam lima tahun terakhir menunjukkan stabilitas keuangan daerah yang baik. Dengan beban kewajiban yang kecil dibandingkan nilai aset, Pemerintah Kabupaten Barru memiliki ruang fiskal yang luas untuk mendukung belanja pembangunan.

Namun, tren penurunan aset dari tahun 2022 ke 2024 (Rp2,29 triliun menjadi Rp2,15 triliun) perlu diperhatikan agar tidak mengurangi kapasitas keuangan jangka panjang. Oleh karena itu,

strategi optimalisasi aset daerah serta pengendalian kewajiban tetap penting untuk menjaga keberlanjutan fiskal.

d. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi efisiensi operasi suatu organisasi dalam menggunakan asetnya. Rasio ini mengukur sejauh mana perusahaan menggunakan sumber daya yang ada untuk menghasilkan pendapatan.

Rasio aktivitas membantu mengevaluasi seberapa efisien pemerintah daerah dalam menggunakan aset, mengelola piutang, mengelola persediaan, dan menggunakan modal kerja. Rasio yang lebih tinggi umumnya menunjukkan efisiensi yang lebih baik, sementara rasio yang lebih rendah dapat menunjukkan bahwa ada ruang untuk perbaikan dalam pengelolaan sumber daya. Jenis rasio aktivitas yang digunakan untuk Pemerintah Daerah adalah Rata-rata umur piutang, yaitu rasio untuk melihat berapa lama, hari yang diperlukan untuk melunasi piutang (merubah piutang menjadi kas). Rata-rata umur piutang (Average Collection Period) adalah salah satu rasio aktivitas yang mengukur jumlah hari rata-rata yang diperlukan oleh perusahaan atau pemerintah daerah untuk menagih piutang dari debitur. Rasio ini penting untuk memahami efisiensi pengelolaan piutang dan kemampuan organisasi dalam mengumpulkan pendapatan. Di Kabupaten Barru Rata-rata Umur Piutang selama kurun waktu 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 3.8 berikut ini :

Tabel 2.251
Rata-rata Umur Piutang Tahun 2020 – 2024c

Uraian	Awal Saldo Piutang Awal Saldo	Akhir Saldo Piutang	Rata - Rata Piutang Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	Perputaran Piutang	Rata - Rata Umur Piutang
2020	29.735.207.262	27.095.821.717	28.415.514.490	914.860.358.822	32	11
2021	37.706.960.571	34.638.033.119	36.172.496.845	942.029.873.042	26	14
2022	39.193.114.619	34.563.889.324	36.878.501.971	930.868.198.225	25	14
2023	36.631.255.221	23.200.121.325	29.915.688.273	888.425.426.755	30	12
2024	36.682.998.225	49.832.796.659	33.866.132.429	915.109.741.982	13	10

Sumber : BKAD Tahun 2025 dan diolah

Secara umum, Pemerintah Kabupaten Barru memiliki kinerja penagihan piutang yang cukup baik, dengan rata-rata umur piutang di bawah 15 hari, yang tergolong sangat efisien dalam standar pengelolaan keuangan daerah.

Namun, tren menurunnya perputaran piutang pada tahun 2024 menjadi catatan penting. Peningkatan signifikan saldo piutang akhir tahun menunjukkan adanya akumulasi piutang yang belum tertagih

optimal. Kondisi ini berpotensi memengaruhi arus kas daerah apabila tidak dilakukan langkah perbaikan dalam manajemen penagihan piutang.

Selama 2020–2023, Pemerintah Kabupaten Barru menunjukkan kinerja pengelolaan piutang yang relatif baik, dengan tingkat perputaran tinggi dan umur piutang singkat. Namun, pada 2024 terdapat pelemahan signifikan dalam efektivitas perputaran piutang yang mengindikasikan perlunya strategi intensifikasi penagihan dan pengendalian piutang agar tidak membebani keuangan daerah di masa mendatang.

B. Analisis Keuangan Daerah

Terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, pemerintah memberikan pedoman dasar dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dinamisnya legalitas pengelolaan keuangan daerah tersebut ditujukan untuk menciptakan pengelolaan keuangan publik di daerah yang akuntabel, transparan dan berkinerja untuk mendorong akselerasi pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat. Keuangan daerah diharapkan mampu secara efisien mengalokasikan sumberdaya pembangunan daerah, semata-mata untuk kepentingan masyarakat. Keuangan daerah harus mampu teralokasi kembali secara tepat untuk kepentingan masyarakat, karena uang yang dikelola oleh pemerintah daerah memang berasal dari masyarakat itu sendiri.

Pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, belanja serta pembiayaan daerah. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Barru sebagaimana tergambar dalam APBD selama periode 2020 – 2024, menguraikan dua aspek penting, yakni (1) proporsi penggunaan anggaran dan (2) hasil analisis keuangan Daerah. Pada kedua aspek ini telah dicermati sejumlah kebijakan keuangan daerah khususnya yang terkait orientasi alokasi belanja daerah dan pembiayaan daerah pada kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah yang dijalankan. Orientasi alokasi belanja dan pembiayaan pembangunan daerah ini sangat terkait dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai pada periode pembangunan berjalan, sehingga sangat terkait pada penguatan kapasitas terhadap pelayanan publik untuk penciptaan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

A. Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran dapat dilihat melalui proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran, analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur, analisis belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama, dan analisis proyeksi belanja daerah. Dalam era otonomi daerah saat ini, antara kepentingan masyarakat dengan alokasi belanja daerah seringkali tidak sejalan. Kepentingan masyarakat jika tidak diidentifikasi secara baik, tidak direncanakan secara cermat oleh pemerintah daerah, seringkali justru menimbulkan pemborosan dan tidak efisiennya belanja daerah. Akibatnya, kebutuhan belanja (*fiscal needs*) senantiasa akan tidak terkendali besarnya. Sebaliknya, pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Barru memiliki keterbatasan untuk menarik uang dari masyarakat, karena di samping akan berdampak negatif terhadap daya beli masyarakat dan timbulnya biaya tinggi bagi investasi dan industri lokal, juga kondisi sebagian besar masyarakat masih berada dalam kondisi kemiskinan yang berkepanjangan.

Kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) yang rendah dan kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) yang tinggi, menyebabkan terjadinya kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) yang semakin lebar. Untuk memperkecil kesenjangan fiskal tersebut, diperlukan pengelolaan keuangan daerah secara tepat. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan efisiensi keuangan daerah yang diarahkan untuk mengelola belanja daerah secara cermat, efisiensi belanja pegawai, belanja operasional dan pemeliharaan, belanja pelayanan publik yang tepat sasaran, belanja modal pada sektor strategis dan akseleratif untuk menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan daerah secara berkesinambungan.

Untuk analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.252

Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2020 – 2024

No	Tahun	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Persentase (%)
1	2020	382.370.058.168	928.001.449.570	41,20
2	2021	403.999.557.254	894.452.138.756	45,17
3	2022	383.900.225.528	899.043.029.613	42,70
4	2023	380.173.393.167	909.806.793.387	41,79
5	2024	402.049.751.749	913.124.962.915	44,03

Sumber : BKAD Tahun 2025 dan diolah

Belanja pemenuhan kebutuhan aparatur merupakan bagian yang signifikan dari total belanja daerah, berkisar antara 41% hingga 45%. Peningkatan pada tahun 2021 dan 2024 menunjukkan adanya kebutuhan tambahan pada tahun tersebut, sementara penyesuaian di tahun-tahun berikutnya mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan anggaran.

Proporsi belanja ini penting untuk memastikan bahwa aparatur daerah memiliki sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya dengan efektif, namun juga harus seimbang dengan kebutuhan anggaran untuk sektor lain yang juga memerlukan pendanaan.

B. Analisis Pembiayaan

Analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Dengan diberlakukannya anggaran berbasis kinerja, dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit. Untuk menutup defisit maka diperlukan pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Defisit Riil dan Komposisi penutupan defisit Anggaran, serta realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024 secara berturut-turut ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.253
Surplus/Defisit Riil Anggaran Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Realisasi Pendapatan Daerah	914.860.358.821	942.029.873.041	859.473.591.915	888.425.426.756	915.109.741.982
Dikurangi Realisasi :					
Belanja Daerah	923.948.418.304	890.957.264.894	893.989.998.349	906.753.762.123	910.071.931.651
Pengeluaran Pembiayaan	4.053.031.264	5.053.031.264	4.053.031.264	3.053.031.264	3.053.031.265
Defisit Riil	-13.141.090.747	46.019.576.883	-38.569.437.698	-21.381.366.631	1.984.779.066

Sumber : BKAD Tahun 2025 dan diolah

Defisit riil menunjukkan ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran, dengan fluktuasi yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tabel di atas terlihat terjadi surplus pada tahun 2021 dan 2024 yang menunjukkan bahwa terdapat pengelolaan keuangan yang baik pada tahun-tahun tersebut. Defisit pada tahun 2020, 2022, dan 2023 perlu dipantau untuk memastikan bahwa tidak ada proyek atau program yang terganggu akibat ketidakseimbangan keuangan.

Pembiayaan digunakan untuk menutup defisit dan mendanai proyek-proyek pemerintah. Meskipun ada fluktuasi dalam jumlah pembiayaan, secara keseluruhan pembiayaan tetap pada tingkat yang tinggi, menunjukkan bahwa pemerintah daerah terus mencari sumber dana untuk menutup kekurangan anggaran dan mendukung pengeluaran pembangunan. Agar tidak terjadi gagal bayar dan peningkatan defisit ditahun-tahun berikutnya beberapa hal perlu dilakukan antara lain :

1. Peningkatan pendapatan melalui sumber pendapatan baru dan peningkatan efisiensi dalam pemungutan pajak dan retribusi,
2. Efisiensi pengeluaran untuk memastikan anggaran dilaksanakan secara efektif dan efisien
3. Manajemen defisit perlu dikelola dengan baik dengan memperhatikan surplus ditahun sebelumnya.

C. Analisis Fiskal Daerah

1. Rasio Kemandirian Fiskal

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), tanpa ketergantungan yang besar terhadap sumber pendanaan yang berasal dari pemerintah pusat maupun provinsi. Rasio ini diukur dengan membandingkan besaran PAD terhadap total pendapatan transfer dan sumber pembiayaan lainnya.

Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah, menunjukkan semakin besar kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan dari potensi pendapatan yang dimilikinya sendiri. Hal ini mencerminkan efektivitas pengelolaan sumber daya

daerah, kemandirian fiskal, serta kapasitas pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Sebaliknya, rasio kemandirian yang rendah mengindikasikan ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan dan transfer dana dari pemerintah pusat atau provinsi, yang berarti ruang gerak fiskal daerah menjadi terbatas. Selama kurun waktu 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.254
Rasio Kemandirian Fiskal Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan Asli Daerah	101.324.046.920	91.080.726.896	95.625.586.780	108.669.905.584	111.784.187.567
Pendapatan Transfer	783.721.605.526	824.919.254.145	763.848.005.136	779.755.521.172	756.421.677.108
Pembiayaan Pinjaman	3.053.031.264	3.053.031.264	3.053.031.264	3.053.031.264	3.053.031.265
Rasio Kemandirian Fiskal	12,88	11,00	12,47	13,88	14,72

Sumber : BKAD Tahun 2025 dan diolah

Berdasarkan data pada tabel diatas selama periode 2020 hingga 2024, Rasio Kemandirian Fiskal menunjukkan tren peningkatan meskipun fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2020, rasio kemandirian fiskal tercatat sebesar 12,88%, kemudian mengalami penurunan menjadi 11,00% pada tahun 2021. Penurunan ini dipengaruhi oleh menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp101,32 miliar menjadi Rp91,08 miliar, sementara pendapatan transfer justru meningkat.

Memasuki tahun 2022, rasio kemandirian fiskal sedikit membaik menjadi 12,47% seiring kenaikan PAD menjadi Rp95,63 miliar. Peningkatan lebih signifikan terjadi pada tahun 2023 dengan rasio mencapai 13,88%, seiring meningkatnya PAD menjadi Rp108,67 miliar meskipun pendapatan transfer juga mengalami sedikit kenaikan. Tren positif ini berlanjut hingga tahun 2024, di mana rasio kemandirian fiskal mencapai angka tertinggi dalam lima tahun terakhir sebesar 14,72%, didorong oleh peningkatan PAD menjadi Rp111,78 miliar dan penurunan pendapatan transfer menjadi Rp756,42 miliar.

Meskipun terdapat peningkatan dalam lima tahun terakhir, secara keseluruhan rasio kemandirian fiskal daerah masih berada pada kategori sangat rendah (di bawah 25%). Hal ini menunjukkan ketergantungan yang cukup besar terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi. Upaya peningkatan

kemandirian fiskal perlu difokuskan pada optimalisasi potensi PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, retribusi, pengelolaan aset, serta pengembangan sektor ekonomi produktif di daerah.

2. Rasio Pajak Daerah

Rasio Pajak Daerah merupakan indikator yang menunjukkan kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap keseluruhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau total pendapatan daerah. Rasio ini mencerminkan sejauh mana sektor pajak menjadi sumber utama pembiayaan daerah. Semakin tinggi nilai rasio pajak daerah, semakin besar peran pajak dalam menopang keuangan daerah, yang sekaligus menunjukkan efektivitas pemungutan pajak dan optimalisasi potensi sumber daya ekonomi lokal.

Pajak daerah, yang meliputi pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, mineral bukan logam dan batuan, parkir, air tanah, sarang burung walet, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), menjadi salah satu instrumen penting bagi daerah dalam mendukung otonomi fiskal. Rasio pajak daerah yang tinggi menandakan bahwa pemerintah daerah mampu menggali potensi pajak secara optimal untuk membiayai belanja pembangunan dan pelayanan publik.

Sebaliknya, rasio pajak daerah yang rendah menunjukkan ketergantungan yang lebih besar pada sumber PAD lain, seperti retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, atau lain-lain pendapatan yang sah. Kondisi ini dapat mengindikasikan masih adanya potensi pajak yang belum tergarap secara maksimal, baik karena keterbatasan basis pajak, rendahnya kepatuhan wajib pajak, atau belum optimalnya sistem pemungutan.

Oleh karena itu, peningkatan rasio pajak daerah memerlukan strategi yang komprehensif, seperti intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, pemutakhiran data objek dan subjek pajak, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif untuk memperluas basis pajak. Dengan demikian, pajak daerah dapat menjadi sumber pendapatan yang lebih berkelanjutan, memperkuat kemandirian fiskal, dan mendukung pembangunan daerah secara optimal.

Perkembangan Rasio Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.255
Rasio Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Barru Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Penerimaan Pajak Daerah	17.444.416.351	20.295.192.486	24.325.109.080	25.785.922.730	26.846.071.256
Pendapatan Asli Daerah	101.324.046.920	91.080.726.896	95.625.586.780	108.669.905.584	111.784.187.567
Rasio Pajak Daerah	17,22	22,28	25,44	23,73	24,02

Sumber : BKAD Tahun 2025 dan diolah

Berdasarkan data pada tabel diatas selama periode 2020 hingga 2024, kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan tren fluktuatif namun cenderung meningkat pada akhir periode. Pada tahun 2020, rasio pajak daerah tercatat sebesar 36,37%, yang berarti lebih dari sepertiga PAD bersumber dari pajak. Pada tahun 2021, rasio ini menurun menjadi 33,85% seiring penurunan penerimaan pajak dan PAD secara keseluruhan.

Memasuki tahun 2022, rasio pajak daerah kembali menurun menjadi 33,25%, mengindikasikan bahwa peran pajak dalam struktur PAD masih relatif stabil namun belum mengalami penguatan signifikan. Pada tahun 2023, rasio ini mulai meningkat menjadi 35,45%, didorong oleh peningkatan penerimaan dari beberapa jenis pajak seperti BPHTB dan pajak penerangan jalan. Tren positif berlanjut di tahun 2024, di mana rasio pajak daerah mencapai angka tertinggi dalam lima tahun terakhir sebesar 36,80%, menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan dan pemungutan pajak daerah.

Meskipun terjadi peningkatan, rasio pajak daerah yang berada di kisaran 33–37% menunjukkan bahwa peran pajak daerah sebagai sumber PAD masih dapat dioptimalkan. Pemerintah daerah perlu memperkuat strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, modernisasi administrasi pajak, serta memperluas basis pajak melalui pemutakhiran data objek dan subjek pajak. Langkah-langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kontribusi pajak terhadap PAD, memperkuat kemandirian fiskal, dan mengurangi ketergantungan pada sumber pendapatan lainnya.

3. Rasio Belanja Pegawai

Rasio Belanja Pegawai merupakan indikator yang menggambarkan porsi anggaran pemerintah daerah yang

dialokasikan untuk membiayai belanja pegawai dibandingkan dengan total belanja daerah. Belanja pegawai meliputi gaji dan tunjangan aparatur sipil negara, honorarium, serta berbagai komponen pengeluaran yang terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia di pemerintahan daerah.

Tingkat rasio belanja pegawai yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar APBD terserap untuk membiayai kebutuhan rutin pegawai, yang berpotensi membatasi alokasi anggaran untuk belanja pembangunan dan pelayanan publik. Sebaliknya, rasio yang rendah memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pembiayaan program-program strategis dan pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan ketentuan dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dan berbagai pedoman pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat menjaga rasio belanja pegawai pada tingkat yang proporsional. Idealnya, proporsi belanja pegawai tidak melebihi 50% dari total belanja daerah, sehingga APBD dapat dikelola secara berimbang antara kebutuhan belanja aparatur dan belanja publik.

Peningkatan efisiensi belanja pegawai dapat dilakukan melalui penataan struktur organisasi, pengendalian formasi pegawai, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan produktivitas aparatur. Dengan demikian, belanja pegawai yang proporsional tidak hanya akan mendukung keberlanjutan fiskal, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah secara menyeluruh. Adapun Rasio Belanja Pegawai Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.256

Rasio Belanja Pegawai Kabupaten Barru Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Belanja Pegawai	382.370.058.168	403.999.557.253	383.900.225.528	380.173.392.967	402.283.316.011
Belanja Daerah	923.948.418.308	890.957.264.894	893.989.998.349	906.753.762.123	871.732.996.867
Rasio Pajak Daerah	41,38	45,34	42,94	41,93	46,15

Berdasarkan data pada tabel diatas Selama periode 2020 hingga 2024, Rasio Belanja Pegawai menunjukkan tren fluktuatif dengan kecenderungan meningkat pada akhir periode. Pada tahun 2020, rasio belanja pegawai tercatat sebesar 41,38% dari total belanja

daerah, menandakan bahwa lebih dari dua perlima anggaran daerah dialokasikan untuk membiayai belanja pegawai.

Pada tahun 2021, rasio ini meningkat signifikan menjadi 45,34%, seiring naiknya belanja pegawai menjadi Rp403,99 miliar, sementara total belanja daerah justru menurun. Kondisi ini mengindikasikan meningkatnya porsi belanja rutin terhadap total anggaran daerah.

Memasuki tahun 2022, rasio belanja pegawai menurun menjadi 42,94%, diikuti penurunan nilai belanja pegawai dan sedikit peningkatan total belanja daerah. Penurunan berlanjut pada tahun 2023 menjadi 41,93%, yang merupakan titik terendah dalam lima tahun terakhir.

Namun, pada tahun 2024, rasio belanja pegawai kembali meningkat tajam menjadi 46,15%, meskipun total belanja daerah mengalami penurunan. Kenaikan ini disebabkan oleh lonjakan belanja pegawai yang mencapai Rp402,28 miliar, didorong oleh kebijakan penyesuaian gaji, tunjangan, dan belanja pegawai lainnya.

Secara umum, rasio belanja pegawai selama periode ini berada di kisaran 41–46%, yang berarti masih berada di bawah ambang batas 50% yang direkomendasikan, namun porsi ini tetap cukup tinggi. Untuk menjaga ruang fiskal yang memadai bagi belanja pembangunan dan pelayanan publik, pemerintah daerah perlu mengendalikan pertumbuhan belanja pegawai melalui penataan formasi, peningkatan efisiensi organisasi, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik.

4. **Rasio Belanja Modal**

Rasio Belanja Modal adalah indikator yang menggambarkan proporsi anggaran daerah yang dialokasikan untuk belanja modal dibandingkan dengan total belanja daerah. Belanja modal mencakup pengeluaran yang digunakan untuk memperoleh, membangun, atau menambah aset tetap seperti gedung, jalan, jembatan, irigasi, peralatan, dan infrastruktur lainnya yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Rasio ini menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan investasi daerah dibandingkan dengan belanja rutin. Rasio belanja modal yang tinggi mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat kapasitas pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi

melalui penyediaan sarana dan prasarana. Sebaliknya, rasio yang rendah dapat mengindikasikan tingginya porsi belanja rutin, sehingga ruang fiskal untuk pembangunan fisik menjadi terbatas.

Berdasarkan praktik pengelolaan keuangan yang ideal, rasio belanja modal yang proporsional perlu dijaga agar pembangunan daerah dapat berjalan seimbang dengan kebutuhan belanja operasional. Peningkatan rasio ini dapat dilakukan melalui efisiensi belanja pegawai dan belanja barang/jasa, perencanaan pembangunan yang berbasis kebutuhan prioritas, serta pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Dengan menjaga dan meningkatkan porsi belanja modal secara tepat sasaran, pemerintah daerah dapat menciptakan infrastruktur yang memadai, meningkatkan daya saing daerah, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Rasio Belanja Modal Kabupaten Barru selama kurun waktu 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.257

Rasio Belanja Modal Kabupaten Barru Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Belanja Modal	127.312.791.930	112.254.470.242	145.652.719.665	148.034.364.234	141.366.777.959
Belanja Daerah	923.948.418.308	890.957.264.894	893.989.998.349	906.753.762.123	871.732.996.867
Rasio Belanja Moda;	13,78	12,60	16,29	16,33	16,22

Berdasarkan tabel diatas Rasio Belanja Modal menggambarkan proporsi anggaran yang dialokasikan untuk pembiayaan aset tetap dan investasi jangka panjang dibandingkan dengan total belanja daerah. Selama periode 2020 hingga 2024, rasio ini mengalami fluktuasi yang cukup signifikan.

Pada tahun 2020, rasio belanja modal tercatat sebesar 13,78%, dengan realisasi belanja modal senilai Rp127,31 miliar dari total belanja daerah Rp923,94 miliar. Pada tahun 2021, rasio ini turun menjadi 12,60% akibat penurunan nilai belanja modal menjadi Rp112,25 miliar, sementara total belanja daerah juga mengalami penurunan.

Memasuki tahun 2022, rasio belanja modal meningkat cukup tajam menjadi 16,29%, seiring kenaikan realisasi belanja modal menjadi Rp145,65 miliar. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2023 dengan rasio sebesar 16,33%, yang menjadi capaian tertinggi selama

lima tahun terakhir. Peningkatan ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah untuk memperbesar alokasi anggaran pada sektor pembangunan infrastruktur dan investasi aset daerah.

Pada tahun 2024, rasio belanja modal sedikit menurun menjadi 16,22%, walaupun nilainya relatif stabil dibanding tahun sebelumnya. Penurunan ini terjadi karena turunnya nilai belanja modal menjadi Rp141,36 miliar, bersamaan dengan penurunan total belanja daerah.

Secara keseluruhan, rasio belanja modal daerah selama periode 2020–2024 berada di kisaran 12–16%, yang berarti proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah masih relatif moderat. Untuk memperkuat kualitas pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, pemerintah daerah perlu meningkatkan porsi belanja modal, khususnya pada sektor-sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. **Rasio Belanja Per Kapita**

Belanja Per Kapita merupakan indikator yang menunjukkan jumlah rata-rata pengeluaran pemerintah daerah untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan yang dibelanjakan bagi setiap penduduk dalam satu tahun anggaran. Nilai belanja per kapita diperoleh dengan membagi total realisasi belanja daerah dengan jumlah penduduk pada periode yang sama.

Indikator ini digunakan untuk menggambarkan tingkat kapasitas fiskal daerah dalam menyediakan layanan kepada masyarakat. Semakin tinggi belanja per kapita, semakin besar pula potensi daerah dalam membiayai berbagai program dan kegiatan yang bermanfaat langsung bagi warga. Namun, tingginya belanja per kapita belum tentu mencerminkan kualitas pelayanan publik yang baik, karena efektivitas penggunaan anggaran sangat dipengaruhi oleh perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang tepat.

Belanja per kapita juga menjadi salah satu alat analisis untuk membandingkan kinerja fiskal antar-daerah. Daerah dengan belanja per kapita yang tinggi, namun memiliki tingkat kesejahteraan rendah, dapat diindikasikan memiliki permasalahan pada efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran. Sebaliknya, daerah dengan belanja per kapita moderat namun berhasil meningkatkan kualitas pelayanan publik menunjukkan adanya efisiensi penggunaan

anggaran. Peningkatan belanja per kapita dapat dilakukan dengan mendorong pertumbuhan pendapatan daerah, mengoptimalkan alokasi anggaran pada sektor prioritas, serta meningkatkan kapasitas aparatur dalam pengelolaan program dan proyek pembangunan. Dengan demikian, belanja per kapita yang optimal akan berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pencapaian tujuan pembangunan daerah. Rasio Belanja Per Kapita Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.258
Rasio Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Belanja Daerah	923.948.418.308	890.957.264.894	893.989.998.349	906.753.762.123	871.732.996.867
Jumlah Penduduk	187.442	189.877	191.895	194.543	196.001
Rasio Belanja Per Kapita	492.924.967,89	469.228.640,06	465.874.565,96	466.094.263,03	444.759.463,91

Selama periode 2020 hingga 2024, indikator ini cenderung mengalami penurunan, yang mengindikasikan berkurangnya kapasitas belanja pemerintah daerah per penduduk meskipun jumlah penduduk terus meningkat.

Pada tahun 2020, belanja per kapita tercatat sebesar Rp492,92 juta, dengan total belanja daerah sebesar Rp923,95 miliar dan jumlah penduduk sebanyak 187.442 jiwa. Pada tahun 2021, nilai ini turun menjadi Rp469,23 juta, seiring penurunan total belanja daerah menjadi Rp890,96 miliar dan bertambahnya jumlah penduduk menjadi 189.877 jiwa.

Penurunan berlanjut pada tahun 2022 dengan belanja per kapita sebesar Rp465,87 juta, meskipun total belanja daerah sedikit meningkat menjadi Rp893,99 miliar. Pada tahun 2023, nilai belanja per kapita relatif stabil di Rp466,09 juta, yang menunjukkan bahwa kenaikan belanja daerah hampir seimbang dengan pertumbuhan penduduk.

Tahun 2024 mencatat penurunan terbesar, dengan belanja per kapita menjadi Rp444,76 juta, akibat penurunan belanja daerah menjadi Rp871,73 miliar di tengah pertumbuhan jumlah penduduk menjadi 196.001 jiwa.

Tren penurunan belanja per kapita ini perlu mendapat perhatian, karena dapat memengaruhi kualitas layanan publik dan

pembangunan yang dinikmati oleh masyarakat. Untuk meningkatkan belanja per kapita, pemerintah daerah perlu memperkuat pendapatan asli daerah, mengoptimalkan efisiensi belanja, serta memprioritaskan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

D. Analisis Share APBD Terhadap Nilai PDRB

Konsumsi pemerintah yang bersumber dari belanja APBD merupakan salah satu komponen penting dalam struktur PDRB menurut pengeluaran. Besarnya kontribusi konsumsi pemerintah terhadap PDRB mencerminkan peranan fiskal daerah dalam mendorong aktivitas ekonomi, menjaga stabilitas, dan memberikan multiplier effect terhadap sektor-sektor lainnya. Kontribusi APBD/Konsumsi Pemerintah Terhadap Nilai PDRB dapat dilihat pada tabel Berikut :

Tabel 2.259

Kontribusi APBD/Konsumsi Pemerintah Terhadap Nilai PDRB
Kabupaten Barru Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Total Konsumsi Pemerintah (Miliar Rp)					
a. ADHB	1.042,00	1.082,49	1.059,83	1.118,16	1.228,05
b. ADHK 2010	653,07	666,07	638,85	642,08	682,04
Proporsi/Kontribusi terhadap PDRB (%ADHB)	14,02	13,43	11,94	11,91	12,42
Laju Pertumbuhan (%ADHK)	-2,44	2,04	-4,33	0,51	6,22
Konsumsi Pemerintah Per Kapita (Juta Rp)					
a. ADHB	5,66	5,84	5,68	5,95	6,49
b. ADHK 2010	3,55	3,59	3,42	3,42	3,6

Pada tabel diatas terlihat bahwa total konsumsi pemerintah menunjukkan nilai belanja konsumsi pemerintah daerah yang berkontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Selama periode 2020 hingga 2024, terjadi fluktuasi baik dari sisi nilai riil (ADHK 2010) maupun harga berlaku (ADHB). Pada tahun 2020, total konsumsi pemerintah tercatat sebesar Rp1.042,00 miliar (ADHB) atau Rp653,07 miliar (ADHK 2010), dengan kontribusi terhadap PDRB sebesar 14,02%. Namun, laju pertumbuhan pada

tahun tersebut mengalami kontraksi sebesar -2,44% akibat tekanan pandemi COVID-19.

Tahun 2021 menunjukkan perbaikan, dengan kenaikan konsumsi menjadi Rp1.082,49 miliar (ADHB) dan Rp666,07 miliar (ADHK 2010), serta kontribusi terhadap PDRB turun menjadi 13,43%. Laju pertumbuhan berhasil pulih ke angka 2,04%, menunjukkan adanya pemulihan ekonomi.

Namun, pada tahun 2022, konsumsi pemerintah kembali menurun menjadi Rp1.059,83 miliar (ADHB) dan Rp638,85 miliar (ADHK 2010), dengan kontribusi terhadap PDRB melemah menjadi 11,94%. Pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi pemerintah bahkan mengalami kontraksi cukup tajam sebesar -4,33%.

Pada tahun 2023, konsumsi pemerintah meningkat tipis menjadi Rp1.118,16 miliar (ADHB) dan Rp642,08 miliar (ADHK 2010). Kontribusinya terhadap PDRB relatif stagnan di 11,91%, dengan pertumbuhan yang sangat kecil yaitu 0,51%, menandakan masih terbatasnya peran konsumsi pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Tahun 2024 mencatat peningkatan yang lebih signifikan, dengan total konsumsi pemerintah mencapai Rp1.228,05 miliar (ADHB) atau Rp682,04 miliar (ADHK 2010). Kontribusi terhadap PDRB naik menjadi 12,42%, sementara laju pertumbuhan melonjak hingga 6,22%, mencerminkan penguatan kinerja fiskal dan peran konsumsi pemerintah sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi daerah.

Dari sisi konsumsi pemerintah per kapita, tren relatif meningkat dari Rp5,66 juta (2020) menjadi Rp6,49 juta (2024) pada harga berlaku (ADHB). Sementara dalam harga konstan (ADHK 2010), nilai per kapita juga bergerak fluktuatif dari Rp3,55 juta (2020) menjadi Rp3,60 juta (2024). Hal ini menunjukkan adanya perbaikan daya dukung fiskal terhadap pelayanan publik, meskipun secara riil peningkatannya tidak terlalu besar.

Secara keseluruhan, konsumsi pemerintah masih menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas kontribusi terhadap PDRB. Namun, peningkatan signifikan pada tahun 2024 menjadi sinyal positif bahwa peran belanja pemerintah dalam menggerakkan ekonomi daerah semakin menguat.

2.2.2. Kerangka Pendanaan

Kerangka Pendanaan adalah bagian dari kerangka keuangan yang mempunyai keterkaitan dengan kemampuan untuk membiayai belanja pemerintah. Penyusunan kerangka pendanaan ini dimaksudkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses penyusunan rencana kinerja daerah. Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Sebelum dialokasikan ke berbagai pos belanja dan pengeluaran, besaran masing-masing sumber penerimaan memiliki kebijakan pengalokasian yang harus diperhatikan.

A. Asumsi Ekonomi, Sosial, dan Fiskal

Proyeksi pendapatan dan belanja daerah didasarkan atas asumsi makro ekonomi daerah, asumsi kondisi sosial masyarakat, dan asumsi pokok-pokok kebijakan fiskal untuk tahun 2025 – 2030. Ketiga asumsi ini memiliki korelasi secara langsung dan secara tidak langsung pada keuangan daerah ke depan, baik dari sisi pendapatan daerah maupun belanja daerah. Artinya, asumsi tersebut, selain akan menuntun proyeksi besaran pendapatan daerah, juga akan menentukan besarnya kebutuhan belanja daerah untuk jangka waktu empat tahun ke depan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Barru tetap optimis untuk pencapaian target pertumbuhan yang telah ditetapkan, perekonomian dapat terkendali dengan asumsi bahwa faktor utama yang berpengaruh terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi adalah sektor pertanian, dan meskipun Pertumbuhan ekonomi melambat namun tidak mengalami pertumbuhan yang negatif. Selain itu dalam pencapaian sasaran indikator makro ekonomi daerah, pemerintah daerah Kabupaten Barru selain berperan secara langsung dalam implementasi program pembangunan yang teralokasikan dalam APBD Kabupaten Barru, secara tidak langsung juga dituntut untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaku ekonomi lainnya dalam menjalankan aktivitas usahanya di Kabupaten Barru. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing memberikan kontribusi pada pencapaian sasaran makro ekonomi Kabupaten Barru, mulai pertumbuhan ekonomi, laju inflasi yang stabil, PDRB per kapita meningkat, persentase penduduk miskin yang menurun, indeks pembangunan manusia yang meningkat, pertumbuhan investasi yang tinggi, serta tingkat pengangguran terbuka yang menurun. Adapun asumsi indikator makro Ekonomi dan Sosial Kabupaten Barru Periode 2025 – 2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.255
Asumsi Indikator Makro Ekonomi dan Sosial Tahun 2025 – 2029

No	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Kondisi awal (Tahun 2024)	Target Tahun Ke-					Kondisi Akhir Periode RPJMD
				2025 (t0)	2026 (n)	2027 (n+1)	2028 (n+2)	2029 (n+3)	
1	Indeks Pembangunan Manusia	poin	74,51	75,22	75,77	76,32	76,87	77,42	77,42
2	Angka Kemiskinan	%	8,31	7,65	7,47	7,28	6,60	6,32	6,14
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,42	6,33	6,24	5,90	5,56	5,22	4,88
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,92	5,11	5,81	6,31	6,91	7,51	7,81
5	PDRB Perkapita (ADHB)	Juta Rp	52,28	56,26	66,75	77,23	87,52	98,21	108,75
6	Rasio Gini	Angka	0,354	0,304	0,298	0,292	0,285	0,279	0,272
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	0	36,56	39,88	43,20	46,51	49,83	53,15

Sumber : Data Olahan 2025

Perumusan asumsi indikator makro ekonomi dan sosial ini menjadi dasar dalam penyusunan RPJMD 2025–2029, dengan memperhatikan kondisi awal tahun 2024, target pembangunan nasional, serta potensi dan permasalahan daerah. Asumsi indikator makro ekonomi dan sosial tahun 2025–2029 menunjukkan arah pembangunan daerah yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Fokus utama adalah:

1. Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan, kesehatan, dan pengurangan kemiskinan.
2. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperkuat sektor produktif dan inovasi daerah.
3. Menurunkan kesenjangan dan pengangguran agar hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata.
4. Menjaga keberlanjutan lingkungan melalui pengendalian emisi GRK dan kebijakan hijau.

B. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Struktur Pendapatan dan Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2025 - 2029 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Pendapatan Daerah dengan rincian pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan komponen belanja daerah dibagi atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer proyeksi ini juga mempertimbangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.256
Proyeksi Pendapatan Tahun 2026 – 2030

URAIAN	2024	2026	2027	2028	2029	2030
PENDAPATAN	914.280.919.207	971.211.018.854	984.110.163.912	993.599.050.698	1.019.322.772.046	1.037.917.214.660
PENDAPATAN ASLI DAERAH	111.784.187.567	129.724.012.500	142.864.541.868	150.855.916.243	175.684.152.523	193.398.056.054
Pajak Daerah	26.846.071.256	39.921.855.239	45.160.600.496	50.399.345.753	55.638.091.010	60.876.836.267
Retribusi Daerah	67.901.095.031	72.536.483.917	80.438.268.028	83.190.897.146	102.780.388.168	115.362.536.644
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.008.783.290	10.418.879.114	10.418.879.114	10.418.879.114	10.418.879.114	10.418.879.114
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7.028.237.990	6.846.794.230	6.846.794.230	6.846.794.230	6.846.794.230	6.739.804.029
PENDAPATAN TRANSFER	802.496.731.640	841.487.006.354	841.245.622.044	842.743.134.455	843.638.619.523	844.519.158.606
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	756.421.677.108	800.184.357.822	799.942.973.512	801.440.485.923	802.335.970.991	803.216.510.074
Dana Perimbangan	697.461.885.108	741.224.565.822	740.983.181.512	742.480.693.923	743.376.178.991	744.256.718.074
Dana Desa	39.357.327.000	39.357.327.000	39.357.327.000	39.357.327.000	39.357.327.000	39.357.327.000
Insentif Fiskal	19.602.465.000	19.602.465.000	19.602.465.000	19.602.465.000	19.602.465.000	19.602.465.000
Pendapatan Transfer Antar-Daerah	46.075.054.532	41.302.648.532	41.302.648.532	41.302.648.532	41.302.648.532	41.302.648.532
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	41.302.648.532	41.302.648.532	41.302.648.532	41.302.648.532	41.302.648.532	41.302.648.532
Bantuan Keuangan Dari Provinsi	4.772.406.000	-	-	-	-	-

Sumber : BKAD, Data Olahan 2025

Tabel ini menampilkan proyeksi pendapatan daerah untuk periode 2024 hingga 2029. Secara garis besar, total pendapatan daerah diproyeksikan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, dari sekitar Rp914,28 triliun di tahun 2024 menjadi lebih dari Rp1.019 triliun di tahun 2029. Kenaikan ini didorong oleh dua sumber utama: Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer. Meskipun demikian, Pendapatan Transfer memiliki kontribusi yang jauh lebih dominan terhadap total pendapatan dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan mengalami peningkatan yang signifikan dan konsisten dari tahun ke tahun, naik dari Rp111,78 triliun di tahun 2024 menjadi Rp175,68 triliun di tahun 2029. Kenaikan PAD ini terutama didorong oleh dua komponen utama: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Meskipun data Pajak Daerah tidak tersedia untuk tahun 2024, proyeksinya menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan signifikan dari tahun 2025 hingga 2029. Hal yang sama juga terjadi pada Retribusi Daerah, yang diproyeksikan terus meningkat setiap tahunnya. Sementara itu, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diproyeksikan tetap konstan dari tahun 2025 hingga 2029.

Pendapatan Transfer, sebagai sumber pendapatan terbesar, juga diproyeksikan terus mengalami kenaikan dari tahun 2024 hingga 2029, meskipun dengan laju pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan dengan PAD. Komponen terbesar dari pendapatan transfer adalah Pendapatan Transfer

Pemerintah Pusat, khususnya Dana Perimbangan. Proyeksi Dana Perimbangan menunjukkan kenaikan yang stabil dan signifikan setiap tahunnya, yang mencerminkan komitmen pemerintah pusat untuk terus mendistribusikan dana kepada daerah. Di sisi lain, Dana Desa dan Insentif Fiskal diproyeksikan tetap stagnan di angka Rp39,35 miliar dan Rp19,60 miliar setiap tahunnya, menunjukkan bahwa alokasinya tidak diproyeksikan mengalami perubahan selama periode tersebut.

Pendapatan Transfer Antar-Daerah memiliki kontribusi yang lebih kecil namun juga signifikan. Angka ini diproyeksikan menurun dari Rp46,07 miliar di tahun 2024 menjadi Rp41,30 miliar dan tetap konstan hingga tahun 2029. Penurunan ini disebabkan oleh tidak adanya proyeksi Bantuan Keuangan dari Daerah di tahun-tahun setelah 2024. Sementara itu, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi diproyeksikan tetap konstan di angka Rp41,30 miliar dari tahun 2024 hingga 2029. Pola ini mengindikasikan bahwa transfer antar-daerah cenderung stabil, kecuali untuk bantuan keuangan yang tampaknya hanya dianggarkan di tahun 2024.

Tabel 2.257
 Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2025 - 2029

Uraian	2024	2026	2027	2028	2029	2030
BELANJA	906.753.762.123	971.211.018.854	984.110.163.912	993.599.050.698	1.019.322.772.046	1.037.917.214.660
BELANJA OPERASI	665.057.375.056	723.785.834.677	731.829.020.864	732.614.421.125	750.123.935.272	755.718.377.886
Belanja Pegawai	380.173.392.967	441.365.562.634	459.337.531.705	459.781.589.761	460.731.288.602	461.275.430.057
Belanja Barang dan Jasa	258.845.601.745	255.876.681.950	255.970.169.615	256.311.511.820	272.893.354.927	277.943.656.086
Belanja Bunga	2.088.449.782	2.043.169.705	2.020.899.156	2.020.899.156	1.998.871.355	1.998.871.355
Belanja Subsidi	313.026.525	0	0	0	0	0
Belanja Hibah	23.636.904.037	24.500.420.388	14.500.420.388	14.500.420.388	14.500.420.388	14.500.420.388
Belanja Bantuan Sosial	815.400.000					
BELANJA MODAL	148.016.364.234	148.915.284.634	153.008.248.177	156.917.005.458	163.304.178.289	176.304.178.289
Belanja Modal tanah	7.100.823.000	5.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	12.000.000.000	18.000.000.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.357.154.752	17.180.185.615	17.467.568.712	17.781.935.677	18.078.100.841	23.078.100.841
Belanja Modal gedung dan Bangunan	53.248.357.339	56.010.451.498	55.962.629.174	56.930.993.870	58.915.820.765	60.915.820.765
Belanja Modal jalan, Irigasi dan Jaringan	65.926.169.143	70.326.802.070	69.175.430.695	71.796.624.880	73.897.916.239	73.897.916.239
Belanja Modal Aset Tetap lainnya	383.860.000	397.845.451	402.619.596	407.451.031	412.340.444	412.340.444

BELANJA TAK TERDUGA	839.982.105	2.565.714.654	2.565.714.654	2.565.714.654	2.565.714.654	2.565.714.654
Belanja Tak Terduga	839.982.105	2.565.714.654	2.565.714.654	2.565.714.654	2.565.714.654	2.565.714.654
TRANSFER	92.840.040.727	95.944.184.889	96.707.180.217	101.501.909.461	103.328.943.831	103.328.943.831
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	92.840.040.727	95.944.184.889	96.707.180.217	101.501.909.461	103.328.943.831	103.328.943.831
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	92.840.040.727	95.944.184.889	96.707.180.217	101.501.909.461	103.328.943.831	103.328.943.831
Transfer bantuan Keuangan Lainnya	0	-	-	-	-	-

Sumber : Data Olahan 2025

Tabel ini menyajikan proyeksi belanja pemerintah daerah, yang mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan transfer bantuan, dari tahun 2024 hingga 2030. Secara keseluruhan, total belanja diproyeksikan terus meningkat setiap tahun, dari Rp906,75 triliun di tahun 2024 menjadi lebih dari Rp1.037 triliun di tahun 2030. Komponen terbesar dari belanja ini adalah belanja operasi, yang secara konsisten mendominasi anggaran. Belanja modal juga memiliki porsi yang signifikan, sementara belanja tidak terduga dan transfer bantuan menempati porsi yang lebih kecil.

Belanja Operasi, sebagai pos pengeluaran terbesar, diproyeksikan terus naik dari tahun ke tahun. Komponen utama dari belanja operasi adalah Belanja Pegawai, yang diproyeksikan meningkat dari sekitar Rp380 triliun di tahun 2024 menjadi Rp461 triliun di tahun 2030. Kenaikan ini menunjukkan adanya komitmen terhadap peningkatan kesejahteraan pegawai atau penambahan jumlah pegawai. Selain itu, Belanja Barang dan Jasa juga diproyeksikan terus naik, menunjukkan peningkatan kegiatan operasional pemerintah. Sementara itu, Belanja Subsidi dan Belanja Bantuan Sosial terlihat hanya dianggarkan pada tahun 2024 dan tidak diproyeksikan untuk tahun-tahun berikutnya, menunjukkan sifat pengeluaran yang spesifik di tahun tersebut. Belanja Hibah diproyeksikan mengalami penurunan tajam dari tahun 2024 ke 2026, lalu tetap konstan hingga 2030, menandakan bahwa hibah dalam jumlah besar hanya terjadi di awal periode.

Belanja Modal diproyeksikan mengalami kenaikan yang substansial, dari Rp148,01 triliun di tahun 2024 menjadi Rp176,30 triliun di tahun 2030. Kenaikan ini didorong oleh pertumbuhan di hampir semua kategorinya. Belanja Modal Gedung dan Bangunan serta Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi adalah dua pos pengeluaran terbesar dalam belanja modal, keduanya diproyeksikan terus meningkat. Hal ini menunjukkan fokus pemerintah pada pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta aset fisik. Belanja Modal Peralatan dan Mesin juga menunjukkan pola yang terus meningkat, meski dengan fluktuasi. Sementara itu, Belanja Modal Tanah dan Belanja Modal Aset Tetap

Lainnya memiliki angka yang jauh lebih kecil, namun diproyeksikan juga mengalami kenaikan secara bertahap.

Belanja Tidak Terduga diproyeksikan melonjak tajam dari Rp839,98 miliar di tahun 2024 menjadi Rp2,56 triliun di tahun 2026, dan tetap konstan hingga tahun 2030. Kenaikan ini bisa mengindikasikan adanya proyeksi risiko atau kebutuhan dana cadangan yang lebih besar di masa depan. Di sisi lain, Transfer Bantuan juga diproyeksikan meningkat dari Rp92,84 triliun di tahun 2024 menjadi Rp101,50 triliun di tahun 2028, dan kemudian menjadi Rp103,32 triliun di tahun 2029 dan 2030. Peningkatan ini seluruhnya didorong oleh Transfer Bantuan Keuangan ke Desa. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan alokasi dana bantuan ke desa-desa, sementara Transfer Bantuan Lainnya hanya terlihat di tahun 2024.

C. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan yang dialokasikan kedalam 3 (tiga) prioritas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 157 yaitu :

1. Prioritas Pertama, untuk membiayai belanja wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Adapun belanja wajib dan mengikat yang dimaksud adalah belanja gaji dan tunjangan, Belanja penerimaan pimpinan dan anggota DPRD serta operasional KDH/WKDH, Belanja Bunga dan Belanja Bagi hasil.
2. Prioritas kedua, untuk membiayai belanja pemenuhan visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
3. Prioritas Ketiga, untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Struktur Pendapatan dan Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2025 - 2029 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Pendapatan Daerah dengan rincian pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan perhitungan untuk Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Barru diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.258

Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2026 – 2030

No	Uraian	Proyeksi Rp.				
		2026	2027	2028	2029	2030
1	Kapasitas riil kemampuan keuangan	971.211.018.854	984.110.163.912	993.599.050.698	1.019.322.772.046	1.037.917.214.660

2	Prioritas I	728.408.264.141	738.082.622.934	745.199.288.024	764.492.079.035	778.437.910.995
3	Prioritas II	145.681.652.828	147.616.524.587	149.039.857.605	152.898.415.807	155.687.582.199
4	Prioritas III	97.121.101.885	98.411.016.391	99.359.905.070	101.932.277.205	103.791.721.466

Sumber : Data Olahan 2025

Rencana penggunaan kapasitas rill kemampuan keuangan meliputi pemenuhan rasio belanja pegawai 30% diluar tunjangan guru dan tambahan penghasilan guru yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.259
 Proyeksi Rasio Belanja Pegawai diluar Tunjangan Guru Tahun 2026 – 2030

Uraian	2026	2027	2028	2029	2030
Belanja Pegawai	441.365.562.634	459.337.531.705	459.781.589.761	460.731.288.602	461.275.430.057
Belanja Tunjangan Guru dan Tambahan Penghasilan	76.896.749.000	80.741.586.450	84.778.665.773	89.017.599.061	93.468.479.014
Belanja Daerah	971.211.018.854	984.110.163.912	993.599.050.698	1.019.322.772.046	1.037.917.214.660
Rasio Belanja Pegawai	37,53	38,47	37,74	36,47	35,44

Sumber : Data Olahan 2025

Berdasarkan data tabel yang menunjukkan proyeksi anggaran belanja pemerintah daerah dari tahun 2026 hingga 2030, terlihat adanya tren peningkatan yang konsisten pada setiap pos pengeluaran. Total Belanja Daerah diproyeksikan terus meningkat, melampaui Rp1 triliun pada tahun 2029 dan mencapai lebih dari Rp1,037 triliun di tahun 2030. Peningkatan ini didukung oleh kenaikan pada pos Belanja Pegawai dan Belanja Tunjangan Guru, yang masing-masing menunjukkan pertumbuhan signifikan. Meskipun nilai Belanja Pegawai terus bertambah secara nominal, rasio belanja pegawai terhadap total Belanja Daerah justru diproyeksikan menurun dari 37,53% di tahun 2026 menjadi 35,44% di tahun 2030. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan belanja di sektor lain, di luar belanja pegawai, lebih cepat dalam periode tersebut, mencerminkan adanya diversifikasi atau prioritas anggaran yang bergeser.

Untuk rasio belanja modal untuk program prioritas kepala daerah terhadap total belanja daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.260
 Proyeksi Rasio Belanja Modal untuk Program Prioritas terhadap Belanja Daerah Tahun 2026 – 2030

Uraian	2026	2027	2028	2029	2030
Belanja Modal	148.915.284.634	153.008.248.177	156.917.005.458	163.304.178.289	176.304.178.289
Belanja Daerah	971.211.018.854	984.110.163.912	993.599.050.698	1.019.322.772.046	1.037.917.214.660
Rasio Belanja Modal	15,33	15,55	15,79	16,02	16,99

Sumber : Data Olahan 2025

Berdasarkan data yang disajikan, terlihat adanya tren peningkatan yang stabil pada alokasi anggaran belanja modal dari tahun ke tahun. Rasio belanja modal, yang mengukur proporsi investasi infrastruktur dan aset tetap terhadap total belanja daerah, diproyeksikan terus tumbuh dari 15,33% pada tahun 2026 menjadi 16,99% pada tahun 2030. Kenaikan yang konsisten ini mengindikasikan prioritas pemerintah daerah untuk memperkuat investasi jangka panjang, yang dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Peningkatan ini menunjukkan komitmen terhadap pembangunan yang berkelanjutan, seiring dengan pertumbuhan total belanja daerah.

Namun, Rasio belanja modal ini tidak dapat mencapai 40 % disebabkan oleh mandatory spending lainnya yang harus terpenuhi serta terdapat program prioritas lainnya yang juga harus terpenuhi.

2.2.3. Pembiayaan Pembangunan Daerah Non APBD Kabupaten

1. Pembiayaan Pembangunan melalui APBN

a. Pembangunan Bendungan

Pembangunan bendungan merupakan proyek besar yang memerlukan perencanaan matang dan alokasi anggaran yang signifikan. Kebutuhan anggaran untuk pembangunan bendungan terbagi dalam beberapa tahapan yang meliputi perencanaan, desain, pengadaan lahan, konstruksi, hingga pemeliharaan setelah selesai dibangun. Anggaran yang diperlukan akan bervariasi tergantung pada ukuran bendungan, lokasi, jenis bendungan (irigasi, pembangkit listrik, pengendalian banjir), serta kompleksitas proyek secara keseluruhan.

b. Pembangunan Kawasan Perdesaan Gurilla

c. Pembangunan Jalan dan Jembatan

2. Pembiayaan Pembangunan Daerah melalui APBD Provinsi Sulawesi Selatan

a. Pembangunan Kawasan Perdesaan Gurilla

b. Pembangunan Jalan dan Jembatan

3. Kebutuhan Investasi

B. Kawasan Industri Kabupaten Barru

Kawasan industri di Kabupaten Barru memiliki potensi besar untuk menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah dalam jangka panjang. Dengan posisi geografis yang strategis, dekat dengan jalur transportasi utama dan pelabuhan, serta sumber daya alam yang melimpah, Kabupaten Barru dapat menjadi pusat industri yang tidak hanya melayani pasar lokal, tetapi juga pasar internasional. Proyeksi

kebutuhan investasi untuk pengembangan kawasan industri di wilayah ini mencakup beberapa sektor yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

1. Pengembangan Infrastruktur Kawasan Industri

Salah satu kebutuhan mendesak untuk pengembangan kawasan industri di Kabupaten Barru adalah pembangunan infrastruktur yang memadai. Beberapa sektor yang membutuhkan investasi untuk mendukung kawasan industri ini antara lain:

- **Pembangunan Jalan Akses dan Jaringan Transportasi:** Investasi dalam pembangunan jalan akses yang menghubungkan kawasan industri dengan pusat distribusi dan pelabuhan sangat penting untuk kelancaran logistik. Selain itu, peningkatan jaringan transportasi darat dan laut akan meningkatkan efisiensi pengiriman barang dan bahan baku, serta memperkuat daya saing kawasan industri.
- **Fasilitas Energi dan Sumber Daya:** Investasi dalam penyediaan sumber energi yang andal, seperti listrik dan air, sangat penting untuk mendukung operasional industri. Pembangunan fasilitas penyediaan energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya atau biomassa dapat menjadi pilihan untuk mendukung keberlanjutan kawasan industri.
- **Jaringan Telekomunikasi dan Teknologi:** Investasi dalam infrastruktur digital dan telekomunikasi, seperti jaringan internet berkecepatan tinggi, akan menjadi faktor penentu dalam menarik perusahaan-perusahaan berbasis teknologi dan industri kreatif ke kawasan industri Barru.

2. Sektor Industri Pengolahan Sumber Daya Alam

Kabupaten Barru memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, termasuk potensi besar di sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan. Oleh karena itu, sektor industri pengolahan menjadi salah satu area yang sangat menjanjikan untuk investasi. Beberapa subsektor yang perlu mendapat perhatian dalam proyeksi investasi ini meliputi:

- **Industri Pengolahan Hasil Perikanan:** Barru memiliki sektor perikanan yang sangat potensial. Investasi dalam fasilitas pengolahan ikan, seperti pabrik pengolahan ikan asin, kerupuk ikan, dan produk seafood lainnya, akan meningkatkan daya saing produk perikanan lokal dan memberikan nilai tambah bagi ekonomi daerah.
- **Industri Pengolahan Hasil Pertanian:** Pengolahan produk pertanian seperti jagung, kedelai, dan padi juga membutuhkan investasi dalam fasilitas pengolahan. Industri pengolahan ini tidak hanya

meningkatkan nilai tambah, tetapi juga berperan dalam menciptakan lapangan pekerjaan di tingkat lokal.

3. **Pembangunan Kawasan Industri Berbasis Teknologi dan Inovasi**

Dalam rangka mempercepat diversifikasi ekonomi, investasi di kawasan industri berbasis teknologi dan inovasi juga menjadi hal yang penting. Kabupaten Barru perlu mengembangkan kawasan industri yang mendukung sektor teknologi, termasuk:

- **Industri Manufaktur Berbasis Teknologi:** Kawasan industri yang dirancang untuk menarik investor di bidang manufaktur, seperti elektronik, komponen otomotif, dan teknologi canggih lainnya, akan membuka peluang baru dalam penciptaan lapangan kerja yang berkualitas tinggi.
- **Inkubator Bisnis dan Teknologi:** Investasi dalam pendirian inkubator bisnis dan pusat penelitian dan pengembangan (R&D) di kawasan industri akan mendukung berkembangnya usaha berbasis inovasi dan teknologi. Hal ini sangat penting dalam menghadapi persaingan global dan memastikan keberlanjutan industri di masa depan.
- **Sumber Daya Manusia dan Pelatihan Keterampilan:** Untuk mendukung pengembangan industri berbasis teknologi, perlu adanya investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan, agar tenaga kerja lokal siap untuk bekerja di sektor-sektor industri yang berkembang pesat.

4. **Pembangunan Pergudangan**

Pembangunan pergudangan di kawasan industri Barru memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, terutama dalam mendukung distribusi barang, logistik, dan memenuhi kebutuhan pasar baik domestik maupun internasional. Kawasan industri Barru, yang terletak strategis dekat dengan jalur transportasi dan pelabuhan, menjadi lokasi yang ideal untuk pengembangan pergudangan guna mendukung kegiatan manufaktur, perdagangan, dan ekspor.

Untuk mewujudkan pembangunan pergudangan yang efisien dan efektif, dibutuhkan investasi yang mencakup beberapa aspek penting mulai dari infrastruktur, fasilitas pendukung, hingga sistem manajemen logistik yang modern. Berikut adalah rincian kebutuhan investasi yang diperlukan dalam pembangunan pergudangan di kawasan industri Barru.

- **Pengadaan Lahan**

Pengadaan lahan merupakan salah satu komponen utama dalam pembangunan pergudangan. Lahan yang cukup luas diperlukan untuk

pembangunan fasilitas pergudangan serta ruang tambahan untuk pengembangan di masa depan.

- **Pembebasan Lahan:** Biaya untuk membeli atau menyewa tanah yang akan digunakan untuk pembangunan pergudangan.
- **Lokasi Strategis:** Memilih lokasi yang strategis dengan akses mudah ke jalur transportasi (jalan raya, pelabuhan, dan bandara) untuk mempermudah distribusi barang.

Estimasi Biaya Pengadaan Lahan: Pengadaan lahan diperkirakan memakan sekitar 15-30% dari total anggaran investasi, tergantung pada harga lahan dan lokasi.

- **Pembangunan Infrastruktur Fisik Pergudangan**

Pembangunan infrastruktur pergudangan meliputi fasilitas gudang itu sendiri, sistem jalan akses, serta utilitas pendukung lainnya. Infrastruktur ini harus dirancang untuk memastikan kelancaran operasional logistik dan kegiatan distribusi barang.

- **Pembangunan Gudang:** Bangunan gudang dengan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan. Gudang ini harus dilengkapi dengan struktur yang kokoh, ruang penyimpanan yang optimal, dan sistem ventilasi yang baik.
- **Fasilitas Akses dan Jalan Raya:** Pembangunan jalan akses menuju pergudangan dan penghubung ke jalan utama atau pelabuhan untuk memastikan kelancaran distribusi barang.
- **Fasilitas Listrik dan Air:** Pembangunan sistem kelistrikan, air bersih, serta sistem drainase yang baik untuk mendukung operasional gudang.
- **Pembangunan Keamanan:** Pembangunan sistem keamanan yang mencakup pagar, CCTV, dan penjagaan 24 jam untuk menjaga keamanan barang yang disimpan di pergudangan.

Estimasi Biaya Pembangunan Infrastruktur: Infrastruktur fisik gudang dan fasilitas pendukung biasanya memakan 40-50% dari total biaya investasi.

- **Pembangunan Sistem Manajemen Pergudangan**

Untuk meningkatkan efisiensi operasional, sistem manajemen pergudangan yang modern dan berbasis teknologi sangat diperlukan. Sistem ini akan membantu dalam pengelolaan stok, pemantauan barang, serta proses pengiriman dan penerimaan barang.

- **Sistem Manajemen Gudang (WMS):** Investasi dalam perangkat lunak dan perangkat keras untuk sistem manajemen gudang (Warehouse Management System/WMS) yang akan memantau dan mengatur alur barang dengan lebih efisien.

- **Automasi Pergudangan:** Penggunaan teknologi seperti sistem pemindaian barcode, conveyor, dan robot untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam proses distribusi barang di gudang.
- **Sistem Keamanan dan Pemantauan:** Pengadaan perangkat keamanan seperti sensor, alarm, dan sistem pemantauan berbasis cloud untuk memonitor keadaan gudang secara real-time.

Estimasi Biaya Sistem Manajemen: Sistem manajemen dan automasi dapat memakan sekitar 10-15% dari total anggaran pembangunan pergudangan, tergantung pada tingkat teknologi yang diterapkan.

- **Penyediaan Fasilitas Penunjang**

Fasilitas penunjang di sekitar pergudangan sangat penting untuk mendukung kenyamanan dan kelancaran operasional.

- **Ruang Kantor dan Administrasi:** Pembangunan ruang kantor untuk staf yang mengelola pergudangan dan administrasi logistik.
- **Area Parkir:** Penyediaan area parkir untuk kendaraan pengangkut barang, seperti truk dan mobil distribusi.
- **Fasilitas Kesehatan dan Keamanan:** Area kesehatan seperti ruang pertolongan pertama, serta fasilitas kebersihan dan sanitasi untuk mendukung kenyamanan para pekerja di pergudangan.

Estimasi Biaya Fasilitas Penunjang: Fasilitas penunjang dapat memakan sekitar 5-10% dari total anggaran pembangunan.

5. Fasilitas Penunjang Kawasan Industri

Untuk mendukung kelancaran operasional kawasan industri, berbagai fasilitas penunjang juga perlu diperhatikan, antara lain:

- **Pembangunan Kawasan Hunian dan Perumahan:** Untuk menarik tenaga kerja yang berkualitas, investasi dalam pembangunan perumahan dan fasilitas hunian yang layak sangat dibutuhkan. Kawasan industri yang terintegrasi dengan hunian akan meningkatkan kenyamanan pekerja dan mengurangi biaya transportasi.
- **Fasilitas Kesehatan dan Pendidikan:** Kehadiran fasilitas kesehatan dan pendidikan yang berkualitas di sekitar kawasan industri akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar dan menarik investor yang mengutamakan kesejahteraan karyawan.
- **Area Komersial dan Pusat Logistik:** Investasi dalam pembangunan pusat komersial dan fasilitas logistik akan mempercepat distribusi barang dan mendukung kebutuhan sektor perdagangan serta manufaktur.

6. Sektor Industri Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan

Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan menjaga keberlanjutan lingkungan, kawasan industri di Kabupaten Barru

harus memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Beberapa sektor yang dapat menjadi fokus investasi adalah:

- **Industri Daur Ulang dan Pengolahan Limbah:** Investasi dalam teknologi pengolahan limbah dan industri daur ulang sangat penting untuk mendukung keberlanjutan kawasan industri. Teknologi ramah lingkungan yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dapat menjadi nilai tambah yang signifikan bagi investor.
- **Industri Energi Terbarukan:** Pengembangan sektor industri yang berbasis energi terbarukan, seperti panel surya, biomassa, dan energi angin, dapat mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil dan menjadikan kawasan industri lebih ramah lingkungan.

2.3. Permasalahan dan Isu Strategis

2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan Pembangunan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realitas/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya dicapai. Hasil evaluasi terhadap gambaran umum kondisi daerah dapat diidentifikasi sejumlah permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan yang perlu diselesaikan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Untuk itu, sub bab ini menguraikan berbagai permasalahan dominan pembangunan daerah Kabupaten Barru untuk menentukan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dengan uraian sebagai berikut:

a. Risiko Bencana yang tinggi

Kabupaten Barru merupakan wilayah yang memiliki kerentanannya terhadap bencana yang cukup besar, terutama bencana hidrometeorologi. Dengan tren yang terus meningkat akibat perubahan iklim. Sehingga perlu diperkuat upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang lebih baik, melalui pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang tahan terhadap bencana serta penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran terhadap risiko perubahan iklim dan bencana alam. Serta dengan terus mendorong peningkatan kemampuan petugas penanganan bencana secara berkelanjutan.

Berdasarkan tren Indeks Resiko Bencana (IRB) Kabupaten Barru periode Tahun 2019-2024 sebagaimana disajikan pada subbab sebelumnya, diketahui bahwa resiko bencana di Kabupaten Barru masih dalam kategori resiko tinggi (Dengan nilai IRB diatas nilai 144, selama kurun waktu 5 tahun terakhir). Hal ini disebabkan peningkatan frekuensi dan

intensitas bencana alam khususnya bencana hidrometeorologi di sebagian besar wilayah di Kabupaten Barru.

b. Kualitas lingkungan hidup yang belum memadai

Berdasarkan data yang diuraikan pada sub bab 2.1 diketahui bahwa Indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Barru dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, berkisar di angka 69,85 yang merupakan capaian terendah sampai dengan capaian yang tertinggi, yang mencapai angka 76,65 di tahun 2024. Pencapaian ini masuk dalam kategori Baik, akan tetapi masih di bawah capaian Provinsi Sulawesi selatan yang berada di angka 77,17. Hal ini tentu menyiratkan masih belum memadainya kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Barru secara umum.

Ada beberapa penyebab yang berpengaruh terhadap kualitas lingkungan di Kabupaten Barru yakni Alih fungsi lahan dan hutan yang terus terjadi; Polusi dan pengelolaan sampah yang tidak optimal; serta permasalahan minimnya upaya edukasi dan pengawasan dalam pengelolaan lingkungan yang tentu menjadi faktor penghambat dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di Kabupaten Barru.

Meskipun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menunjukkan pencapaian yang baik, tetapi tantangan yang lebih besar terletak pada implementasi kebijakan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan. Pengawasan yang tidak optimal terhadap kegiatan alih fungsi lahan, pengelolaan sampah, serta pemanfaatan sumber daya alam lainnya menyebabkan kerusakan lingkungan yang lebih luas. Oleh karena itu, pendidikan lingkungan yang lebih intensif dan pengawasan yang lebih ketat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan memastikan bahwa setiap aktivitas pembangunan tidak merusak keberlanjutan ekosistem dan kualitas hidup yang ada.

c. Kualitas lingkungan Penanganan kemiskinan yang belum optimal

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Barru dari tahun 2020 hingga tahun 2024 cenderung stagnan dengan kisaran angka 8,26 sampai dengan 8,68 persen. Dengan capaian tahun 2024 sebesar 8,31% yang berada di atas angka kemiskinan provinsi Sulawesi selatan yang angkanya berjumlah 8,06 %. Hal tersebut memberi gambaran bahwa upaya penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Barru masih belum sesuai harapan dan belum berhasil mencapai penurunan angka kemiskinan secara signifikan dengan kisaran angka kemiskinan 5 tahun terakhir berkisar di angka 8 persen.

Sehingga Kemiskinan menjadi salah satu fokus perhatian pemerintah Kabupaten Barru. Kompleksitas masalah kemiskinan dipengaruhi oleh

tingginya beban pengeluaran masyarakat, yang disebabkan oleh inflasi, rasio ketergantungan, dan tuntutan kebutuhan hidup. Serta masih rendahnya pendapatan masyarakat, yang disebabkan oleh kurangnya lapangan pekerjaan, tingginya pengangguran, derajat pendidikan yang rendah, dan derajat kesehatan belum optimal. Juga dipengaruhi oleh belum berkembangnya usaha ekonomi mikro dan kecil, yang disebabkan oleh kurangnya akses terhadap permodalan dan belum optimalnya pendampingan serta penguatan kewirausahaan.

Kemiskinan yang terjadi berdampak terhadap sulitnya masyarakat untuk mendapatkan akses perumahan yang layak, terbatasnya akses air bersih, sanitasi, akses terhadap layanan ketenagalistrikan di daerah terpencil, dan kebutuhan dasar lainnya, yang tentu pada akhirnya berdampak pada produktifitas daerah.

d. Meningkatkan angka pengangguran dan rendahnya partisipasi angkatan kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Barru selama lima tahun terakhir hanya berkisar di angka 57,18 persen sampai dengan angka tertinggi sebesar 62,36 persen yang terjadi pada tahun 2022. Capaian di tahun 2023 sebesar 62,26%, dan menurun di tahun 2024 sebesar hanya 59,32%. Selanjutnya, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Barru selama kurun waktu lima tahun terakhir (Periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024) berada di kisaran angka 5,32 persen hingga tertinggi mencapai angka 6,74 pada tahun 2021. Selama tiga tahun terakhir tren tingkat pengangguran cenderung meningkat di Kabupaten Barru.

Rendahnya angka partisipasi angkatan kerja dan meningkatnya angka pengangguran terbuka di Kabupaten Barru disebabkan oleh calon tenaga kerja yang kurang terampil, pengembangan wirausaha belum optimal serta pengembangan UMK belum memadai. Selain itu terdapat juga permasalahan lain seperti masih rendahnya kualitas lulusan lembaga pelatihan serta belum optimalnya *link and match* antara dunia pelatihan dengan dunia kerja.

e. Pertumbuhan ekonomi yang masih rendah

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Barru sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 tidak pernah menyentuh angka 6 persen. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, capaian tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan capaian hanya 5,11 persen. Capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru selama kurun waktu dua tahun terakhir juga selalu berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional dan provinsi Sulawesi selatan, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya serius dan berkesinambungan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Barru.

Sektor pertanian dan perikanan yang menjadi penggerak utama Ekonomi di Kabupaten Barru sangat sensitif terhadap perubahan iklim. Perubahan pola curah hujan, kenaikan suhu, dan frekuensi bencana alam dapat mempengaruhi hasil pertanian dan perikanan, yang pada gilirannya memperburuk kemiskinan dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Daerah ini. Selain itu ada juga permasalahan terkait rendahnya kualitas ekosistem pasar yang mampu mendorong para produsen untuk menjadi lebih inovatif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan pasar.

Oleh karena itu, upaya untuk mengurangi kerentanan sosial dan ekonomi terhadap dampak perubahan iklim harus menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Barru. Selain itu dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah perlu penciptaan iklim investasi yang sehat, pengembangan SDM lewat pelatihan yang relevan, serta penguatan infrastruktur fisik dan digital. Selain itu UMKM perlu didorong melalui pembiayaan, inkubasi, dan diversifikasi produk. Sembari memperkuat sektor-sektor potensial lainnya di Kabupaten Barru seperti sektor peternakan, konstruksi, jasa, informasi dan komunikasi, industri, serta pariwisata.

f. Kuantitas dan kualitas infrastruktur yang belum memadai

Dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, Indeks layanan infrastruktur Kabupaten Barru cenderung menurun, yang tadinya mencapai angka 6,5 poin pada tahun 2019, mengalami penurunan drastis, hingga hanya 2,99 poin pada tahun 2023. Hal ini tentu menyiratkan bahwa kepuasan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Barru cenderung menurun ditandai dengan keterbatasan kuantitas dan kualitas infrastruktur di Kabupaten ini.

Hal ini juga mempengaruhi Capaian indeks daya saing daerah Kabupaten Barru selama kurun waktu lima tahun terakhir, dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 yang selalu berada dibawah capaian indeks daya saing provinsi sulawesi selatan. Belum optimalnya daya saing daerah Kabupaten Barru dikontribusi oleh keterbatasan infrastruktur yang mendukung konektivitas dan mobilitas. Jalan yang rusak, terbatasnya akses transportasi, serta minimnya fasilitas umum dan digitalisasi yang menjadi hambatan bagi pengembangan industri dan sektor-sektor lainnya.

g. Kualitas Sumber Daya Manusia yang masih belum memadai

Meskipun Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Barru mengalami tren peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, pada semua komponen, baik kualitas kesehatan, pendidikan maupun pengeluaran per kapita, akan tetapi capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Barru tersebut selalu berada di bawah

capaian IPM Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional selama kurun waktu lima tahun tersebut.

Beberapa penyebab yang mempengaruhi belum optimalnya dan meratanya kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Barru adalah layanan kesehatan dan pendidikan yang belum berkualitas dan merata, khususnya di wilayah pegunungan yang aksesibilitasnya masih sulit, ketersediaan SDM layanan kesehatan dan tenaga pendidik/kependidikan yang belum tersebar secara merata sesuai kebutuhan baik dari aspek kuantitas maupun kualitas, terbatasnya kesempatan dan peluang kerja terutama untuk perempuan dan penyandang disabilitas, dan belum setaranya akses perempuan dan kelompok rentan di bidang pendidikan dan ekonomi.

Selanjutnya permasalahan di bidang gizi serta pola perilaku hidup sehat masyarakat di Kabupaten Barru tercermin dari kenaikan prevalensi stunting selama tiga tahun terakhir di Kabupaten Barru, mulai dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2022 angka prevalensi stunting Kabupaten Barru sebesar 14,1 persen, tahun 2023 angkanya meningkat drastis menjadi 22,1 persen, dan terakhir pada tahun 2024 angkanya kembali meningkat menjadi 26,9 persen. Selain itu angka harapan hidup di Kabupaten Barru selama lima tahun terakhir dalam kurun periode tahun 2020 sampai dengan 2024, selalu berada di bawah capaian Provinsi Sulawesi selatan dan Nasional.

Skor Pola Pangan Harapan yang menggambarkan kualitas konsumsi pangan masyarakat di Kabupaten Barru juga cenderung menurun dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dengan nilai skor pada tahun 2024 hanya sebesar 78,5 persen, menurun dari capaian skor pola pangan harapan tahun 2022 yang mencapai angka 93,2 persen. Hal ini mencerminkan pola konsumsi pangan masyarakat di Kabupaten Barru yang kurang berkualitas yang tentu berpengaruh terhadap kualitas SDM secara keseluruhan, sehingga perlu dilakukan upaya perbaikan di sektor kesehatan masyarakat dan lingkungan termasuk bagaimana menghadapi kerawanan pangan yang telah menjadi permasalahan global.

h. Kualitas Pelayanan publik dan Tata kelola pemerintahan yang masih belum optimal

Capaian indeks pelayanan publik kabupaten Barru yang menggambarkan kinerja pelayanan publik menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, akan tetapi terjadi penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2023 yang nilainya sebesar 4,01 menjadi 3,48 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kabupaten Barru belum sesuai harapan dan

perlu dilakukan penyempurnaan secara gradual. Urgensi pelayanan publik sangat tinggi karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di daerah. Selain itu pelayanan publik juga sangat terkait dengan hadirnya layanan dasar yang berkualitas bagi masyarakat.

Selain itu ada juga permasalahan terkait dengan belum optimalnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Barru, padahal pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel melalui sistem berbasis elektronik ini. Perlu dipahami urgensi SPBE sebagai suatu sistem yang teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung pelaksanaan pemerintahan, termasuk dalam hal pelayanan publik, pengelolaan data, hingga pengambilan keputusan berbasis data yang lebih akurat. Capaian indeks SPBE tertinggi Kabupaten Barru dalam kurun waktu lima tahun terakhir hanya berkisar di 2,79 dengan klasifikasi capaian kategori cukup, capaian ini masih dibawah capaian indeks SPBE provinsi Sulawesi selatan dan memerlukan perbaikan berkelanjutan.

Dari segi kuantitas dan kualitas inovasi, yang menjadi salah satu indikator utama dari pelaksanaan reformasi birokrasi dan mencerminkan kualitas pengembangan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Barru, capaiannya juga belum memadai utamanya pada tahun 2024. Sejak empat tahun terakhir capaian indeks Inovasi daerah di Kabupaten Barru berkisar di angka 31 sampai dengan 48,5. Capaian ini menempatkan kabupaten Barru secara umum sebagai kabupaten dengan klasifikasi inovatif, meskipun demikian dua tahun terakhir capaian kabupaten Barru cenderung menurun dan menyebabkan pada tahun 2024 Kabupaten Barru masuk dalam kategori daerah yang kurang inovatif.

Hal ini perlu mendapat perhatian bersama mengingat inovasi daerah penting ketika melihat realitas bahwa setiap daerah memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda-beda. Tidak semua kebijakan atau program pembangunan yang diterapkan di satu daerah dapat diimplementasikan dengan efektif di daerah lain. Oleh karena itu, inovasi daerah menjadi sangat penting untuk menciptakan solusi yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan spesifik yang dihadapi oleh masing-masing daerah dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan tata kelola pemerintahan.

2.3.2 Isu Strategis

Isu strategis dalam RPJMD Tahun 2025-2029 adalah isu yang berisi

subtansi tantangan atau peluang yang bersifat penting dan memerlukan perhatian serius karena dapat mempengaruhi keberhasilan pembangunan dalam periode 5 tahun. Isu strategis berdasarkan lingkungan dinamis akan diuraikan secara berurutan mulai tingkat global, nasional hingga tingkat regional termasuk tingkat propinsi dan daerah sebagaimana diuraikan berikut ini.

2.3.2.1 Isu Global

1. Dinamika Geopolitik Global

Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara tak terkecuali Indonesia. Perkembangan geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi Indonesia adalah eskalasi persaingan antarnegara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Kemunculan berbagai kekuatan baru telah mempengaruhi pergolakan di kawasan maupun tatanan global serta sikap Indonesia dalam dunia internasional.

Perang antara Rusia dan Ukraina serta perang antara Israel dan Palestina termasuk dengan Iran telah meningkatkan kewaspadaan global terhadap potensi konflik geopolitik ke depan di kawasan lainnya, seperti konflik di Selat Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia, kawasan timur tengah dan Laut China Selatan. Perang menyebabkan kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi negara-negara lainnya, seperti tekanan inflasi global yang tinggi serta adanya krisis energi dan pangan.

Persaingan geopolitik terutama di kawasan Indo-Pasifik yang dekat dengan Indonesia semakin meningkat dan meluas. Kawasan Indo-Pasifik muncul karena adanya dinamika geopolitik yang berkembang dan melibatkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik sebagai zona maritim. Nilai strategis Kawasan Indo-Pasifik yang diproyeksikan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dunia, telah menarik perhatian banyak pihak. Hal ini kemudian berdampak pada penciptaan persaingan pengaruh antarnegara, baik yang berada di kawasan maupun di luar kawasan. Ketidakstabilan geopolitik dapat menimbulkan krisis energi dan pangan yang selanjutnya memicu ketidakpastian geoekonomi di tingkat global yang pengaruhnya tentu akan dirasakan hingga pelosok dalam negeri. Tantangan-tantangan yang bersifat tanpa batas (*borderless*) membutuhkan kolaborasi yang erat dari berbagai pemangku kepentingan lintas sektor baik lokal, regional, nasional maupun internasional.

Dampak perang ini berpengaruh ke Indonesia hingga ke level daerah, di Kabupaten Barru sendiri, telah dilakukan berbagai upaya dalam menekan angka inflasi dan krisis pangan, termasuk alokasi anggaran daerah yang ada difokuskan untuk penanganan hal tersebut. Kabupaten Barru Sendiri memiliki potensi lahan yang memadai dengan daya dukung pangan yang masih lebih tinggi dari kebutuhan pangan. Kedepannya yang mungkin perlu diperkuat adalah bagaimana mengoptimalkan lahan tidur dan memaksimalkan lahan produktif yang ada dalam penanganan inflasi dan krisis pangan tersebut.

2. Isu Perubahan Iklim

Perubahan iklim secara global diperkirakan akan berlangsung terus dan tidak dapat dihindari. Keseluruhan fenomena akibat krisis global diperkirakan akan berdampak buruk pada berbagai aspek kehidupan, seperti lingkungan, kesehatan, penghidupan masyarakat, dan laju pembangunan secara keseluruhan jika masyarakat tidak melakukan perubahan secara signifikan. Hal ini akan mendorong perubahan tren dalam dinamika pembangunan global, seperti meningkatnya urgensi untuk meninggalkan paradigma pembangunan lama menuju ke praktik yang lebih berkelanjutan. Hal ini berimplikasi terhadap tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi dengan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) lebih rendah di berbagai sektor, seperti sektor energi, industri, lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian serta limbah dan penerapan ekonomi sirkuler.

Beberapa negara maju dan berkembang berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK secara berkelanjutan, seperti Norwegia dengan target net zero emission pada tahun 2030, Spanyol dan selandia baru pada tahun 2050, serta Tiongkok dan Indonesia sendiri mendeklarasikan pada tahun 2060. Pelaksanaan jalur pembangunan yang lebih hijau dan pembangunan rendah karbon merupakan arah pembangunan global di masa mendatang. Pemanfaatan energi baru dan terbarukan akan menjadi sumber energi utama di Dunia.

Kelangkaan sumber energi fosil dan isu perubahan iklim mendorong seluruh negara menggunakan energi baru dan terbarukan sebagai sumber energi utama. Teknologi energi terbarukan akan menjadi sangat kompetitif di masa mendatang. Skala keekonomian tenaga surya dan bayu akan semakin menurun dan murah ke depannya. Kabupaten Barru sendiri memiliki potensi energi terbarukan yang cukup besar, sebagai wilayah tropis dan wilayah dengan beberapa sungai besar yang tentu memiliki potensi

energi tenaga surya dan air yang memadai.

3. Tingginya Potensi dan Ancaman Urbanisasi Penduduk Dan Tenaga Kerja Dunia

Era keterbukaan migrasi tenaga kerja seperti sekarang ini mendorong kita untuk menyiapkan kuantitas dan kualitas tenaga kerja domestik agar bisa bersaing di tingkat global, sertamenyediakan lapangan kerja yang memadai. Saat ini dengan terbatasnya kesempatan kerja di Indonesia, pekerja Indonesia berketerampilan rendah mencari pekerjaan di luar negeri. Negara- negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, dan Republik Korea berhasil mengubah pertumbuhan ekonominya menjadi pertumbuhan lapangan kerja, dan dengan meningkatnya integrasi ekonomi dan berkurangnya hambatan untuk bermigrasi, maka semakin mudah bagi tenagakerja Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri.

Hal ini juga diperparah dengan kondisi ketenagakerjaan domestik, dalam beberapa tahun terakhir, kehadiran tenaga kerja dari China di Indonesia semakin meningkat, khususnya di sektor konstruksi, manufaktur, dan pertambangan. Fenomena ini menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Banyak pekerja lokal merasa tersaingi oleh tenaga kerja asing yang seringkali menerima upah lebih murah dan memiliki keahlian yang tak kalah dari tenaga kerja lokal.

Dampaknya, lapangan pekerjaan yang sebelumnya diisi oleh tenaga kerja Indonesia berkurang, sementara peluang kerja bagi masyarakat lokal menipis. Sehingga, Pemerintah termasuk pemerintah daerah Kabupaten Barru diharapkan berperan aktif dalam mendorong pengembangan kompetensi tenaga kerja lokal agar dapat bersaing di era globalisasi dan keterbukaan pasar tenaga kerja seperti sekarang ini. Kabupaten Barru sendiri berdasarkan proyeksi penduduk memiliki potensi bonus demografi di waktu mendatang yang perlu dipersiapkan dalam menghadapi persaingan pasar kerja internasional yang semakin terbuka.

4. Terjadinya perang dagang Global dan perubahan konstelasi perdagangan global

Perang dagang global saat ini menjadi tantangan besar bagi perekonomian dunia yang sedang berjuang menghadapi ketidakpastian dan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Ketegangan perdagangan yang dipicu oleh tarif dan pembatasan ekspor-impor antara negara-negara besar, khususnya antara Amerika Serikat dan Tiongkok, berdampak langsung pada dinamika ekonomi global.

Secara ekonomi, perang dagang ini menyebabkan meningkatnya biaya produksi dan distribusi. Perusahaan yang bergantung pada rantai pasokan internasional harus menanggung beban tarif tambahan dan hambatan perdagangan yang mempersulit kelancaran operasional mereka. Akibatnya, harga barang di pasar konsumen dapat meningkat, menyebabkan inflasi yang tidak diinginkan di berbagai negara.

Selain itu, ketidakyakinkan pasar dan kekhawatiran akan ketidakstabilan ekonomi menyebabkan berkurangnya investasi dan konsumsi. Investor cenderung menahan dana mereka karena ketidakpastian kebijakan tarif dan hambatan perdagangan, yang akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi di berbagai negara serta memperlambat penciptaan lapangan kerja baru. Lalu, perang dagang juga memicu pergeseran kekuatan dan aliran ekonomi. Banyak negara yang mulai mencari alternatif pasar dan sumber bahan baku yang lebih aman dari ketergantungan terhadap negara yang terlibat konflik dagang. Kebijakan ini bisa menyebabkan terjadinya fragmentasi pasar global dan memperlambat integrasi ekonomi yang selama ini terbentuk.

Selain itu, Pergeseran peningkatan peranan negara berkembang dalam ekonomi global mendorong perdagangan internasional berpusat di kawasan Asia dan Afrika. Perekonomian negara berkembang diperkirakan akan meningkat tinggi dan mendominasi perekonomian dunia menggantikan dominasi dari negara maju yang tergabung dalam forum G7. Pertumbuhan perdagangan negara berkembang akan didorong oleh perdagangan intra-Asia yang menunjukkan tren yang berlanjut terutama dari Tiongkok, India, dan negara-negara ASEAN. Selain itu, peningkatan pendapatan serta proyeksi peningkatan demografi penduduk di Kawasan Afrika, Nigeria, dan beberapa negara di Afrika Selatan, mendorong perdagangan internasional bergerak ke kawasan tersebut untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang tinggi.

Kerjasama kawasan menciptakan hubungan perdagangan strategis. Kerjasama kawasan seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) yang beranggotakan negara-negara dengan kekuatan ekonomi yang signifikan, sumber daya alam yang melimpah dan posisi geografis yang strategis, akan menciptakan peluang perdagangan yang lebih besar di kawasan Asia Pasifik yang mendorong ketersediaan rantai pasok global, investasi, serta inovasi dan teknologi. Dengan demikian, perdagangan internasional akan

berpusat di Asia terutama kawasan Indo Pasifik. Pemerintah Kabupaten Barru dalam konteks ini memiliki potensi produksi di sektor perikanan, pertanian, peternakan dan perkebunan, sehingga selanjutnya menjadi penting bagaimana melakukan hilirisasi dan diversifikasi produksi dan memetakan target ekspor dalam rangka mencermati perang dagang global dan perubahan konstelasi perdagangan global.

5. Tingginya Kecepatan Perubahan Teknologi Dunia

Kecepatan perubahan teknologi telah menimbulkan disrupsi teknologi di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi digital telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, hal ini perlu didorong agar mampu memanfaatkan perkembangan teknologi secara optimal, yang diiringi dengan meminimalkan risiko yang menyertai terjadinya disrupsi teknologi. Pandemi COVID-19 telah mendorong akselerasi disrupsi teknologi di berbagai sektor.

Selama pandemi, banyak pelaku usaha seperti UMKM dan Koperasi mengembangkan digitalisasi usaha untuk menjaga keberlangsungan proses bisnis. Digitalisasi usaha dapat mendorong peningkatan produktivitas serta pasar usaha. Meskipun demikian, tingkat pemanfaatan teknologi digital dalam operasional usaha masih terbatas dan belum merata karena faktor sumber daya manusia, permodalan, dan infrastruktur penunjang. Faktor penghambat pemanfaatan teknologi dan digital dapat mendorong efektivitas dan efisien usaha sehingga dapat meningkatkan produktivitas.

Teknologi yang berkembang di masa depan akan mempengaruhi sektor manufaktur. Perubahan teknologi mencakup percepatan otomatisasi di sebagian besar aktivitas industri yang mengintegrasikan proses produksi komponen dan produk akhir untuk rantai pasok terlokalisasi; serta teknologi hijau, termasuk untuk menyediakan energi baru terbarukan.

Perkembangan teknologi di masa depan juga akan mempengaruhi sektor pendidikan. Inovasi pengajaran dan pembelajaran yang berbasis artificial intelligence (AI) menjadi sebuah keniscayaan sehingga transfer ilmu pengetahuan dan pengembangan kompetensi dapat berlangsung kontinu, tanpa terbatas ruang dan waktu. Melalui pemanfaatan AI, penyelenggaraan pendidikan akan menjadi lebih efisien, efektif, transparan dan ekonomis.

Perkembangan teknologi menyebabkan jenis pekerjaan

tergantikan oleh teknologi. Saat ini, kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) bahkan bisa melakukan tugas-tugas berpikir yang sebelumnya harus dilakukan oleh manusia, seperti menuliskan artikel dan membuat karya seni grafis. Industri media termasuk yang paling terdampak dan hanya meninggalkan sedikit pelaku usaha yang mampu bertahan ditengah gempuran disrupsi. Bahkan, pekerjaan yang membutuhkan aspek kreatif (seni dan hiburan) dalam jangka panjang juga beresiko tergantikan atau setidaknya tersingi oleh kemajuan teknologi dengan perkembangan pesat kecerdasan buatan. Perkembangan teknologi juga berdampak pada sektor yang tidak mampu beradaptasi.

Perkerjaan jarak jauh (remote working) menciptakan peluang di sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan mendorong perkembangan sektor lain yang mendukung pola kerja work from anywhere (WFA). Akan tetapi, disisi lain hal tersebut akan memukul sektor yang selama ini bertumpu pada pola kerja konvensional, seperti properti perkantoran dan real estate. Pola kerja jarak jauh mengasumsikan terbangunannya kepercayaan antara pekerjaan dan pemberi kerja sehingga kualitas hasil pekerjaan terjaga.

Perkembangan teknologi dapat berdampak terhadap cara kerja pemerintah. Teknologi membuka peluang baru dalam pembangunan ekonomi, mendorong inovasi dan transformasi tata kelola melalui peningkatan kinerja pelayanan publik, pembuatan kebijakan berbasis bukti, serta efisiensi sumber daya. Peralihan menuju era digital dalam konteks tata kelola akan mendorong pemerintah untuk mendesain ulang proses bisnis pelayanan publik dan mengubah pola interaksi di antara masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah.

Perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan proses perumusan kebijakan, termasuk dalam penyusunan regulasi. Pemanfaatan teknologi dapat membantu mewujudkan proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih terencana, terpadu dan sistematis serta penataan kelembangaan negara. Teknologi dan informasi membantu adanya interkoneksi di setiap tahapan/proses pembentukan peraturan perundang-undangan, mendorong penataan regulasi, memetakan berbagai regulasi yang berpotensi tumpang tindih secara vertikal maupun horizontal, mengkaji regulasi yang inonsisten, meningkatkan partisipasi publik dalam semua proses pembentukan peraturan perundang-undangan, serta membantu menganalisa dan evaluasi pelaksanaan regulasi. Potensi

bonus demografi yang akan terjadi di kabupaten Barru harus dimaknai sebagai momentum ketersediaan SDM yang siap berperan dalam perkembangan, kemajuan, dan pemanfaatan teknologi secara berkelanjutan.

2.3.2.2 Isu Nasional

1. Potensi SDA Dan Maritim

Kekayaan alam merupakan modal dasar pembangunan nasional untuk kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan bangsa. Kekayaan alam termasuk di dalamnya sumber daya alam yang bersifat ekstraktif meliputi hutan, minyak bumi, gas alam, batu bara, dan mineral, serta sumber energi baru dan terbarukan, serta keanekaragaman hayati yang mencakup keragaman genetik, spesies dan ekosistem.

Hutan tropis Indonesia yang luas memiliki fungsi sebagai penyangga kehidupan, pengatur tata air, penggerak aktivitas ekonomi dan aktivitas social budaya masyarakat. Indonesia memiliki 125,57 juta hektar kawasan hutan yang terdiri dari 120,25 juta hektar kawasan hutan daratan dan 5,32 juta hektar kawasan hutan yang berupa hutan konservasi perairan. Kawasan hutan daratan meliputi hampir 63 persen dari luas total wilayah daratan Indonesia. Selain berfungsi sebagai penyedia jasa lingkungan seperti pengatur tata air, penyerap dan penyimpan karbon, hutan dan laut juga berfungsi sebagai sumber mata pencaharian dan tempat aktivitas social budaya masyarakat.

Cadangan sumber daya energi dan mineral yang melimpah. Jumlah cadangan minyak bumi terdiri dari cadangan terbukti sebanyak 2,27 miliar barrel dan cadangan potensial 1,9 miliar barrel. Dalam lima tahun terakhir, penambahan cadangan migas baru berdasarkan Reserve Replacement Ratio (RRR) telah melebihi 100 persen dari target seiring penemuan cadangan migas baru yang melebihi jumlah produksi migas. Energi terbarukan memiliki potensi pemanfaatan yang besar dengan adanya kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi yang didorong dengan kebijakan afirmasi yang mendukung pengembangan energi terbarukan akan menyeimbangkan persaingan usaha dengan energi fosil sehingga dapat menurunkan harga produksi listrik dari energi terbarukan khususnya energi surya dan bayu. Sisanya adalah potensi energi biomassa, air, panas bumi, bayu, laut dan energi terbarukan lainnya.

Kekayaan keanekaragaman hayati juga menjadi modal dasar

pembangunan berkelanjutan. Sebagai salah satu negara megabiodiversitas, Indonesia memiliki potensi ekonomi yang besar baik dari sektor kelautan yang mencapai USD 1,4 triliun/tahun, sektor lingkungan hidup dan kehutanan yang mencapai Rp 220 triliun/tahun yang bersumber dari ekspor hasil hutan, tumbuhan dan satwaliar dan bioprospeksi.

Indonesia juga kaya akan keanekaragaman ekosistem. Di Indonesia terdapat sekitar 74 tipe ekosistem, mulai dari laut dalam, daratan rendah hingga alpin di pegunungan jayawijaya. Sumberdaya perikanan sebagai salah satu sumber daya alam laut memiliki potensi perikanan tangkap 12 juta ton di 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP).

Selain itu posisi Indonesia di kawasan tropis menjadikannya kawasan subur yang menghasilkan sumber daya alam yang melimpah dan dibutuhkan oleh berbagai negara yang dapat dimanfaatkan dan menjadi modal untuk berbagai hilirisasi dan bahan baku industri. Potensi kekayaan alam Indonesia terdiri dari sumber daya hayati, sumber daya mineral, dan sumber daya energi baik yang konvensional maupun energi terbarukan. Selain itu, terdapat potensi jasa lingkungan yang bernilai ekonomis tinggi dari kekayaan alam, topografi, keunikan dan daya tarik lainnya.

Kekuatan maritim Indonesia tampak nyata dari letak geografis dan karakteristik wilayahnya. Secara geografis, wilayah Indonesia berada di antara dua samudra utama dunia, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia. Karakteristik wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia menjadikan laut sebagai penghubung seluruh wilayah Indonesia. Kondisi tersebut ditopang oleh tiga Alur Lintas Kepulauan Indonesia (ALKI) yang menjadi asset perhubungan penting di kawasan Asia Tenggara sebagai pusat distribusi, perdagangan dan pelayaran internasional. Potensi Kabupaten Barru sendiri sebagai salah satu wilayah yang masuk dalam Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI II), sangat berpeluang besar dalam memperkuat konektivitas nasional dan tol laut nusantara, mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif dan berkelanjutan sebagai jalur perdagangan sumberdaya alam terutama dalam konteks mendukung wilayah metropolitan Makassar dan wilayah Ibukota Nusantara.

2. Tingginya Tuntutan Transformasi Digital dan E-Government

Transformasi digital adalah proses yang diterapkan organisasi untuk mengintegrasikan teknologi digital di dalam pelaksanaan tugas

dan fungsinya. Proses ini secara mendasar mengubah cara organisasi untuk menyediakan layanan dan melaksanakan proses kerjanya. Transformasi digital menciptakan pergeseran budaya dalam organisasi. Di sektor pemerintahan sendiri transformasi digital ditandai dengan pelaksanaan E-Government. E-government merupakan upaya sistematis untuk mengembangkan penyelenggaraan proses kerja pemerintah dan penyediaan layanan publik yang berbasis elektronik dan digital. Suatu penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, untuk meningkatkan efisiensi internal, kualitas pelayanan publik, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang demokratis.

Pelaksanaan e-Government sendiri lahir terutama untuk mengakomodir tuntutan penyediaan layanan publik yang semakin berkembang, apalagi apabila dikaitkan dengan era society 5.0 yang mana masyarakat akan sangat familiar dengan perkembangan teknologi dan penggunaan perangkat digital. Pemerintah Kabupaten Barru sendiri telah memulai untuk menerapkan e-government melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan berbagai inovasi pelayanan publik yang berbasis digital. Kedepannya penerapan transformasi digital dan e-government di Kabupaten Barru perlu terus didorong dengan tetap mengacu pada prinsip efisiensi, efektifitas dan taat azas.

3. Tuntutan Penerapan Pertumbuhan Ekonomi Hijau

Indonesia menikmati pertumbuhan ekonomi yang kuat dan konsisten sebesar sekitar 6% per tahun selama 15 tahun terakhir. Dengan cita-cita untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi pada 2030, Indonesia memerlukan pertumbuhan ekonomi yang pesat, namun juga inklusif dan berkelanjutan, agar dapat memberikan standar kehidupan yang layak bagi seluruh masyarakatnya. Pertumbuhan Ekonomi Hijau mendukung Indonesia dalam mencapai cita-cita yang ambisius untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan dan inklusif di tiga sektor prioritas yaitu energi berkelanjutan, lanskap berkelanjutan dan infrastruktur berkelanjutan dalam konteks Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pertumbuhan Ekonomi Hijau adalah Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan, Pertumbuhan yang inklusif dan merata, ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan, ekosistem yang sehat dan produktif dalam menghasilkan jasa ekosistem serta penurunan emisi GRK.

Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau mendukung Indonesia dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang dapat mengurangi kemiskinan serta memastikan inklusi sosial, kelestarian lingkungan dan efisiensi sumber daya. Mengembangkan proyek-proyek berdasarkan Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), serta menghubungkan proyek-proyek tersebut dengan sumber pendanaan yang sesuai. Memasukkan faktor-faktor yang memungkinkan investasi pertumbuhan hijau, dalam perencanaan sektoral, kabupaten, provinsi, maupun nasional. Dan merancang instrumen ekonomi dan kebijakan yang inovatif untuk mengurangi risiko dan memungkinkan aliran modal ke sektor terkait. Kabupaten Barru memiliki Kawasan Ekonomi khusus Garongkong yang memiliki potensi integrasi dengan pelabuhan, sektor ekonomi strategis, dan kawasan industri dalam konteks pengembangan ekonomi hijau di daerah ini.

4. Potensi Bonus Demografi

Dengan jumlah penduduk yang cukup besar, Indonesia memiliki potensi pasar yang tinggi. Hal tersebut juga berimbas pada potensi bonus demografi dan menjadikan Produk Domestik Bruto Indonesia diproyeksi berada di posisi kedua di Asia dengan pada tahun 2045 yang menandai era Indonesia emas, sebagaimana dicanangkan oleh pemerintah. Pada periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2040, Indonesia akan mengalami periode bonus demografi. Pada rentan waktu tersebut, diperkirakan penduduk usia produktif Indonesia akan mencapai presentase 70 persen dibanding total jumlah penduduk. Pada saat itu, sekitar 2 juta penduduk dengan usia produktif diperkirakan akan masuk ke pasar tenaga kerja setiap tahunnya. Untuk memaksimalkan potensi dari bonus demografi tersebut, pengembangan kualitas SDM menjadi sangat krusial.

Peningkatan kualitas SDM ini dilakukan melalui Pendidikan formal, selain itu juga melalui jalur pendidikan informal, Pemerintah mendorong agar masyarakat dapat meningkatkan kompetensinya dengan lebih mudah melalui jenis-jenis pelatihan yang tersedia dan memilih pelatihan yang diinginkan. Program peningkatan kewirausahaan tentu juga sangat penting mengingat rasio kewirausahaan di Indonesia masih rendah dibandingkan dengan total jumlah penduduk nasional. Di Kabupaten Barru sendiri berdasarkan hasil proyeksi hingga tahun 2045 rasio angkaketergantungan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 cenderung menurun, dengan

rasio ketergantungan terendah terjadi pada periode tahun 2040 sampai dengan tahun 2045, dan rasio ketergantungan tertinggi terjadi pada periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2030. Rasio ketergantungan rendah harus dimaknai sebagai potensi bonus demografi yang harus dioptimalkan. kuantitas penduduk usia produktif yang besar ini harus diikuti juga dengan kualitas penduduk yang baik terutama dari segi aspek kesehatan, pendidikan dan produktivitas.

5. Tingginya Ekspektasi Terhadap Penerapan Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum

Sejak era reformasi, isu penerapan demokrasi menjadi krusial sebagai pondasi pelaksanaan pembangunan yang partisipatif. Aspek terpenting dari Demokrasi adalah prinsip kedaulatan rakyat. Prinsip ini menekankan bahwa kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik dijalankan terutama untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Rakyat dijamin haknya untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik melalui pemilihan umum dan mekanisme partisipasi publik lainnya. Selain itu perlu ditempuh upaya Penguatan Lembaga Demokrasi, penjaminan Kebebasan Sipil dan Hak-hak Politik.

Berkaitan dengan penerapan demokrasi juga, salah satu isu penting lainnya adalah perlindungan Hak asasi Manusia. Penegakan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia sendiri telah mengalami kemajuan, di mana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM). Pembentukan Komnas HAM dan Pengadilan HAM juga merupakan sebuah kemajuan dalam penegakan dan pengadilan tentang hak asasi manusia di Indonesia. Penegakan hak asasi manusia adalah tugas seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya tugas bagi lembaga negara saja. Semua lapisan masyarakat tersebut diharapkan dapat berkerjasama dan saling membantu dalam menegakkan hak asasi manusia.

Pada aspek kepastian hukum, kegiatan prioritas pemerintah berupa penegakan hukum yang berkualitas serta pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif. Penciptaan Kondisi Aman yang Cepat dan Tanggap, Peningkatan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba. Penanggulangan Terorisme dan Konflik Sosial Politik, Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri, serta Penguatan Diplomasi. Saat ini Kabupaten Barru memiliki sumberdaya dengan keberadaan Tim kewaspadaan dini dan telah melakukan kegiatan pembinaan terhadap

organisasi masyarakat sipil dalam rangka penguatan ideologi Pancasila dan pembinaan terkait penerapan prinsip-prinsip demokrasi.

2.3.2.3. Isu regional dan Provinsi

1. Integrasi Moda Transportasi Pulau Sulawesi

Integrasi moda transportasi di Pulau Sulawesi merupakan suatu pendekatan yang penting untuk meningkatkan efisiensi, konektivitas, dan mobilitas di wilayah tersebut. Pulau Sulawesi, dengan karakteristik geografisnya yang unik, memerlukan strategi integrasi moda transportasi yang baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan kehidupan sehari-hari penduduk. Integrasi moda transportasi di Pulau Sulawesi sangat penting dalam rangka membangun jaringan transportasi yang terpadu, termasuk darat, laut, dan udara, untuk memastikan konektivitas yang baik antara berbagai daerah di Pulau Sulawesi. Kondisi infrastruktur dasar maupun konektivitas di Pulau Sulawesi masih belum optimal.

Pelabuhan yang menjadi simpul utama di Pulau Sulawesi seperti Pelabuhan Bitung (Sulawesi Utara) belum berperan optimal sebagai hub transshipment Kawasan Timur Indonesia (KTI) karena belum optimalnya pengembangan kawasan ekonomi pada hinterland serta belum berkembangnya konektivitas feeder yang menghubungkan Pelabuhan Bitung dengan pelabuhan-pelabuhan di sekitarnya. Di samping itu, keterbatasan kapasitas dan fasilitas pelabuhan di KTI menyebabkan kapal-kapal kontainer belum beroperasi secara optimal.

Bandara utama di Sulawesi seperti Bandara Sultan Hasanuddin (Sulawesi Selatan) dan Bandara Sam Ratulangi (Sulawesi Utara), masih memerlukan pengembangan baik dari sisi kapasitas maupun integrasi terhadap wilayah hinterland dan multimoda untuk menunjang pariwisata dan sebagai simpul logistik angkutan barang di KTI.

Belum tuntasnya pembangunan Jalan Trans Sulawesi, serta ketersediaan dan kualitas infrastruktur jalan daerah yang masih rendah juga menyumbang pada keterbatasan aksesibilitas. Pendekatan konektivitas multimoda dan antarmoda belum secara optimal dilaksanakan di Wilayah Sulawesi. Pengembangan transportasi perkotaan, termasuk pengembangan angkutan umum massal di Wilayah Metropolitan Makassar (Kota Makassar, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Maros) masih belum optimal. Sementara kota-kota lainnya seperti Wilayah Metropolitan Manado (Kota Bitung, Kab. Minahasa, Kota Manado, Kab. Minahasa Utara, Kota Tomohon), Kendari, dan Gorontalo, belum secara optimal dipersiapkan untuk mengantisipasi peningkatan urbanisasi.

Kedepannya Pulau Sulawesi akan memiliki jaringan kereta api, hal ini merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk mengembangkan jalur kereta api di pulau Sulawesi sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan konektivitas. Pemerintah Kabupaten Barru perlu bekerja sama untuk mengembangkan dan memelihara infrastruktur transportasi yang terintegrasi, terutama dalam mendukung integrasi moda transportasi Pulau Sulawesi yang memudahkan konektivitas antar wilayah. Pengembangan transportasi inovatif, seperti layanan transportasi berbasis aplikasi, juga dapat menjadi bagian dari sistem transportasi terintegrasi di Pulau Sulawesi dan khususnya di Kabupaten Barru yang memiliki potensi sebagai wilayah yang strategis yang berada pada alur laut kepulauan Indonesia (ALKI II).

2. Cadangan Biosfer Kawasan Marupanne

Isu strategis terkait cadangan biosfer di daerah mencakup berbagai tantangan dan peluang yang berkaitan dengan pelestarian sumber daya alam, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan. Cadangan biosfer, sebagai kawasan yang dilindungi untuk menjaga keragaman hayati dan ekosistem, memiliki peran vital dalam memastikan keseimbangan ekologi yang mendukung kehidupan manusia.

Salah satu isu utama yang sering muncul adalah ancaman terhadap kelestarian cadangan biosfer akibat konversi lahan untuk keperluan pertanian, perkebunan, atau pembangunan infrastruktur. Aktivitas ini dapat mengancam habitat alami dan menyebabkan degradasi lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan cadangan biosfer yang berkelanjutan menjadi sangat penting untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan menjaga fungsi ekologisnya.

Dengan pendekatan yang tepat, cadangan biosfer dapat menjadi sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat lokal tanpa merusak ekosistem yang ada. Pendidikan dan penelitian mengenai pentingnya keberagaman hayati juga dapat dilakukan di kawasan ini, memperkaya pengetahuan dan meningkatkan kesadaran masyarakat di daerah akan pentingnya melestarikan alam.

Isu strategis terkait cadangan biosfer mengharuskan adanya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan kebijakan yang seimbang antara pelestarian lingkungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat. Keberlanjutan cadangan biosfer bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama untuk generasi sekarang dan yang akan datang. Kabupaten Barru sendiri memiliki potensi sebagai daerah yang mendukung

ekowisata biosfer berbasis budaya yang terintegrasi dengan kabupaten lain seperti Maros, pangkep dan Bone.

2.3.2.4. Isu daerah

1. Potensi ekonomi Biru

Ekonomi biru merupakan konsep yang semakin mendapat perhatian dalam fokus pembangunan berkelanjutan. Dengan fokus pada pemanfaatan sumber daya air secara berkelanjutan, ekonomi biru bertujuan untuk memaksimalkan potensi ekonomi dari ekosistem laut dan pesisir tanpa merusak keseimbangan alam. Konsep ini mencakup berbagai sektor, mulai dari perikanan, pariwisata, energi terbarukan, hingga pelabuhan dan transportasi laut.

Laut dan sungai sebagai sumber daya alam yang luas menyimpan potensi besar untuk pertumbuhan ekonomi regional dan lokal. Sektor perikanan laut dan budidaya membuka lapangan pekerjaan dan mendorong peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan, sementara pariwisata berbasis kelautan turut menyumbang devisa yang signifikan bagi banyak daerah. Namun, pemanfaatan ini harus dilakukan secara bijaksana karena dapat menimbulkan kerusakan ekosistem yang mengancam keberlanjutan lingkungan.

Kabupaten Barru dan Kabupaten Sekitarnya di pesisir barat daya Provinsi Sulawesi selatan dengan garis pantai yang panjang dan berbatasan dengan selat makassar memiliki potensi ekonomi biru yang cukup besar yang harus dioptimalkan. Dari segi pariwisata, potensi pariwisata kelautan dan mangrove dapat menjadi penggerak ekonomi. Selain itu potensi pemanfaatan pelabuhan dan transportasi laut juga cukup menjanjikan apalagi bila dikaitkan dengan potensi laut yang cukup dalam dan posisi Sulawesi selatan sebagai penyangga Ibukota Nusantara.

2. Transformasi pendidikan nonformal dan pendidikan vokasi

Transformasi pendidikan nonformal dan penguatan pendidikan vokasi merupakan dua hal penting dalam menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan siap pakai di dunia kerja. Keduanya berfokus pada pengembangan keterampilan praktis, keterampilan hidup, dan pengetahuan yang relevan dengan perkembangan zaman. Pendidikan nonformal merupakan jalur pendidikan yang dapat diakses oleh siapa saja, tanpa terikat pada sistem pendidikan formal. Pendidikan ini berfokus pada pengembangan keterampilan, karakter, serta pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks

transformasi, pendidikan nonformal perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan dinamika sosial-ekonomi. Transformasi ini bisa mencakup penggunaan teknologi digital dalam proses pembelajaran, pengembangan kurikulum yang berbasis kebutuhan industri dan masyarakat, serta memperluas akses pendidikan bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan.

Pendidikan nonformal, yang mencakup kursus, pelatihan, dan program pendidikan berbasis komunitas, harus mengedepankan pendekatan yang lebih fleksibel dan berbasis pada kebutuhan individu atau kelompok tertentu. Dalam hal ini, pendidikan nonformal dapat berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat, seperti memberikan kesempatan untuk memperoleh keterampilan baru bagi mereka yang tidak dapat mengakses pendidikan formal. Sementara Pendidikan vokasi fokus pada pengembangan keterampilan praktis yang langsung diterapkan di dunia kerja. Penguatan pendidikan vokasi sangat penting, mengingat perkembangan dunia industri yang semakin pesat dan membutuhkan tenaga kerja terampil dalam bidang tertentu. Kedua hal ini perlu mendapat perhatian di Kabupaten Barru dalam rangka penanganan anak tidak sekolah dan pengangguran terbuka yang angkanya cukup tinggi dan trennya meningkat selama tiga tahun terakhir. Kabupaten barru memiliki potensi di sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan pariwisata serta memiliki perencanaan pengembangan kawasan industri yang bisa diintegrasikan dengan penguatan pendidikan vokasi.

3. Peran Kabupaten Barru sebagai bagian dari kawasan wilayah metropolitan makassar

Sebagai bagian integral dari wilayah metropolitan Makassar, Kabupaten Barru berperan sebagai penyangga vital yang memperkuat tercapainya kesejahteraan bersama di kawasan wilayah metropolitan Makassar melalui sinergi ekonomi, infrastruktur, dan kualitas hidup. Barru memiliki potensi pertanian, perikanan, serta sumber daya alam yang dapat mensuplai kebutuhan wilayah metropolitan Makassar, sambil menjaga keseimbangan lingkungan. Dengan konektivitas yang terus ditingkatkan, Barru menjadi hub logistik regional yang memperlancar aliran barang, tenaga kerja, dan pariwisata antara kota Makassar dan daerah sekitarnya.

Dalam kerangka wilayah metropolitan, Kabupaten Barru berperan sebagai penjaga nilai-nilai budaya dan lingkungan, menjaga identitas daerah sambil mendorong inovasi berkelanjutan yang berdampak positif

bagi kualitas hidup masyarakat pada kawasan wilayah metropolitan Makassar dan sekitarnya terkhusus bagi masyarakat Kabupaten Barru sendiri. Posisi Kabupaten Barru sebagai daerah perlintasan jalan poros Nasional juga sangat strategis dalam rangka menghubungkan kota-kota besar di Pulau Sulawesi melalui jalur darat. Keberadaan jalan ini membawa peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi, mobilitas tenaga kerja, dan akses layanan bagi kawasan metropolitan Makassar.

4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengembangan infrastruktur berkelanjutan serta wilayah berketahanan bencana

Di Kabupaten Barru, peningkatan kualitas lingkungan hidup menjadi prasyarat utama untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan. Tantangan utama mencakup polusi dan pengelolaan sampah, erosi di wilayah pertanian dan lahan perikanan, serta luasan lahan yang berpotensi terdegradasi karena alih fungsi lahan dan tekanan kebutuhan akan permukiman. Namun, Barru memiliki potensi alam yang kaya, seperti sumber air, lahan pertanian subur, serta keanekaragaman hayati yang perlu dilindungi. Upaya perbaikan kualitas lingkungan perlu terintegrasi dengan program rehabilitasi dan reboisasi lahan, peningkatan fasilitas pengolahan sampah, serta penguatan kampanye dan peningkatan kepedulian lingkungan bagi masyarakat.

Sementara itu, pembangunan wilayah berketahanan bencana perlu menjadi fokus strategis untuk mengurangi risiko dan meningkatkan kapasitas adaptasi serta mitigasi. Kabupaten Barru perlu memperkuat sistem peringatan dini bencana, memperbaiki kualitas infrastruktur yang berketahanan bencana, serta memperkuat kapasitas respon darurat melalui pelatihan, peningkatan kapasitas petugas dan masyarakat, dan pembentukan posko bencana di masing-masing daerah. Integrasi kebijakan zonasi, perlindungan lahan, dan perlindungan sumber air baku akan mengurangi dampak banjir dan kekeringan yang dapat mengancam mata rantai pangan serta menyebabkan kerugian ekonomi.

Selanjutnya, Pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Kabupaten Barru juga perlu dirancang sebagai fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kualitas hidup warga. Prioritas utama meningkatkan konektivitas antarwilayah, peningkatan fasilitas transportasi umum, serta infrastruktur air bersih dan sanitasi yang menjangkau semua lapisan masyarakat. Dalam sektor energi, fokus pada pemanfaatan sumber energi terbarukan serta jaringan listrik yang memadai untuk mendukung kegiatan ekonomi dan layanan publik.

Kolaborasi lintas-sektor antara pemerintah daerah dan segenap pemangku kepentingan menjadi kunci dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Barru. Program-program seperti pengelolaan sampah berbasis komunitas, rehabilitasi hutan kerja sama dengan instansi terkait, serta insentif bagi sektor pertanian dan perikanan berkelanjutan dapat memperbaiki kualitas lingkungan sambil menciptakan peluang ekonomi lokal.

5. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan berbasis digital

Pada Pemerintah Kabupaten Barru, peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan berbasis digital menjadi pilar utama transformasi birokrasi menuju layanan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Implementasi e-government terintegrasi memungkinkan warga mengakses layanan publik, perizinan, dan informasi publik secara langsung dan lebih cepat.

Dalam kerangka tata kelola, Kabupaten Barru perlu mendorong peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) dan literasi digital bagi publik, pelaporan kinerja berbasis indikator, serta mekanisme umpan balik dari masyarakat yang responsif dan partisipatif. Penggunaan data secara analitik memungkinkan perencanaan berbasis bukti, evaluasi program secara akurat, dan alokasi anggaran yang lebih efisien. Pemerintah Kabupaten Barru perlu mengakselerasi pembangunan jaringan internet sampai ke pelosok desa, membangun pusat layanan digital, dan sistem e-government untuk memudahkan akses informasi serta layanan publik secara berkualitas dan berbasis digital.

6. Pengembangan kawasan Industri dan Kawasan perdesaan

Kawasan Industri Barru dirancang sebagai motor pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, mengutamakan nilai tambah produk lokal, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing investasi. Lokasinya sangat strategis sebagai pendukung Kawasan wilayah Metropolitan Makassar, terintegrasi dengan pelabuhan Garongkong dan Jalur kereta api yang direncanakan menghubungkan kota-kota besar di Pulau Sulawesi. Potensi pengembangan kawasan industri Kabupaten Barru meliputi pengembangan industri pengolahan, industri logistik dan distribusi, serta industri galangan kapal.

Selain itu Kabupaten Barru memiliki kawasan perdesaan yang meliputi 2 kecamatan dan 7 desa yang memiliki keunggulan dan potensi besar di

sektor pertanian, peternakan, pengembangan UMKM, dan pariwisata. Kawasan Perdesaan ini juga beririsan dengan Rencana Pengembangan Kawasan Industri Barru, sehingga kedua kawasan ini dapat diintegrasikan dan saling mendukung satu sama lain.

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN

3.1. VISI

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan prioritas, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barru Tahun 2025 – 2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Visi pembangunan daerah merupakan Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yaitu Bupati Barru **ANDI INA KARTIKA SARI, S.H, M.Si** dan Wakil Bupati Barru **DR. Ir. ABUSTAN, M.Si** yang disampaikan pada saat pemilihan kepala daerah dan menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Visi pembangunan daerah Kabupaten Barru untuk periode RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

**“BARRU BERKEADILAN,
BARRU MAJU BERKELANJUTAN,
BARRU SEJAHTERA LEBIH CEPAT”**

Rumusan visi ini mengandung tiga kata kunci visi yakni berkeadilan, maju berkelanjutan, sejahtera lebih cepat. Ketiga pokok visi ini merupakan rangkaian yang terkait satu sama lain dalam mewujudkan kondisi pada tahun 2029.

Memahami substansi Visi merupakan bagian dari upaya membangun value yang harus melekat dalam merencanakan pembangunan Kab. Barru kedepan. Value Visi inilah yang akan menghantarkan kita dalam menyusun

misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang lebih tepat. Beberapa value yang terkandung dalam Visi diatas dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 3.1
Value Visi Pembangunan Kab. Barru



Keselarasan visi RPJMD Kabupaten Barru dengan visi RPJMN tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Penyelarasan Visi RPJMD Tahun 2025-2030 Kab.Barru dengan RPJM Nasional dan RPJMD Prov.Sulsel Tahun 2025-2029

Visi Nasional Tahun 2025 – 2029	Visi Provinsi Sulsel Tahun 2025 – 2029	Visi RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025-2029
Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045	Sulawesi Selatan Maju dan Berkarakter	Barru Berkeadilan, Barru Maju Berkelanjutan, Barru Sejahtera Lebih Cepat

3.2. MISI

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Sejalan gambaran misi yang demikian, maka tim menelaah misi kepala daerah dan makna serta implikasinya bagi perencanaan pembangunan, lalu menerjemahkannya ke dalam pernyataan misi sesuai kriteria pernyataan

misi sebagaimana telah dijelaskan di atas. Adapun pernyataan misi yang merupakan penjabaran visi Kepala Daerah Kabupaten Barru sebagai berikut:

1. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka
2. Membangun Manusia yang Unggul dan Inklusif
3. Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur dan wilayah Yang Berketahanan Iklim
4. Meningkatkan *Good Governance* yang Bernafaskan Keagamaan
5. Meningkatkan Produktivitas perekonomian yang Berdaya Saing

Gambar 3.2

Keterkaitan Pokok-Pokok Visi dengan Misi RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025 – 2029



Misi pembangunan Kabupaten Barru mengacu pada Asta Cita sebagaimana arahan RPJMN Tahun 2025 – 2029 yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,

- serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi millennial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan;
 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Keterkaitan Misi RPJMN Tahun 2025-2029 dengan misi pembangunan RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025-2029 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Keterkaitan RPJMD Tahun 2025-2030 Kab.Barru dengan RPJM Nasional Tahun 2025-2029

No	Misi RPJMD Kab.Barru Tahun 2025-2030	Misi RPJMN 2025-2029
1	Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
2	Membangun Manusia yang Unggul dan Inklusif	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi millennial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas
3	Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur dan wilayah Yang Berketahanan Iklim	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
4	Meningkatkan Good Governance yang Bernafaskan Keagamaan	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
		Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur
5	Meningkatkan Produktivitas perekonomian yang Berdaya Saing	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
		Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri

Sementara Visi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 - 2029 adalah “SULAWESI SELATAN MAJU DAN BERKARAKTER” dengan misi yang meliputi:

1. Meningkatkan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas, Berahlak, dan

- Berdaya Saing;
2. Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berkualitas, Merata dan Berkelanjutan;
 3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Melayani, Berintegritas, Adaptif dan Produktif;
 4. Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan, Tangguh terhadap Bencana dan Perubahan Iklim untuk mendukung akselerasi Pertumbuhan Ekonomi

Keterkaitan antara dokumen RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025-2030 dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2030 dijelaskan dalam tabel berikut ini :

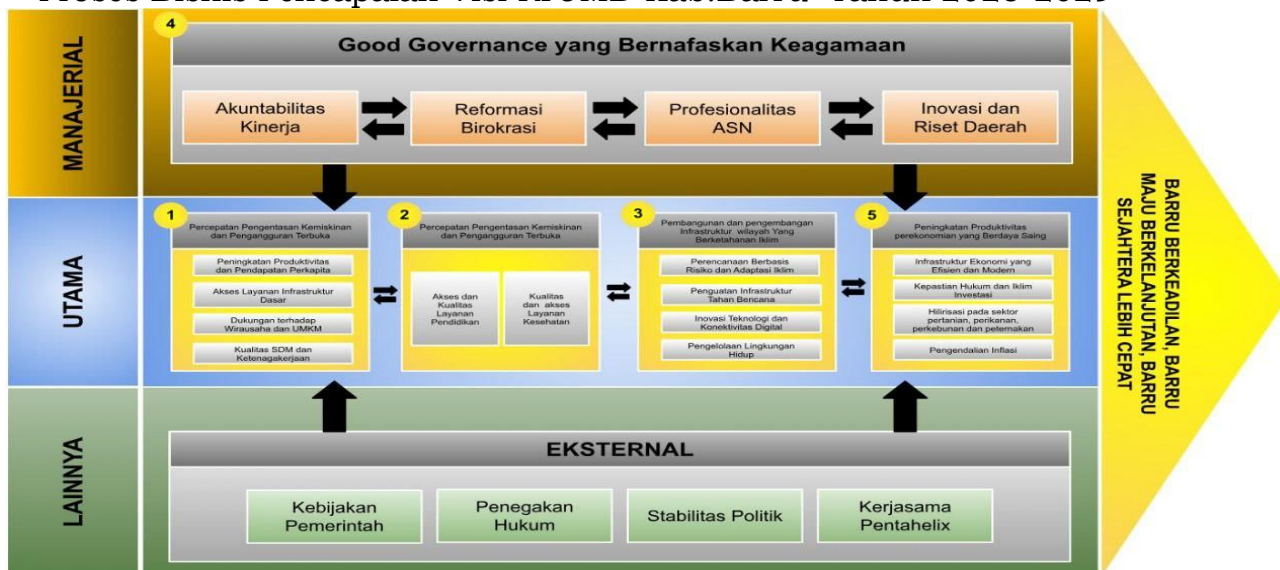
Tabel 3.3

Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Kab.Barru Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Perubahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029

RPJMD KAB.BARRU TAHUN 2025-2029	RPJMD PROV. SULSEL TAHUN 2025-2029
VISI	
BARRU BERKEADILAN, BARRU MAJU BERKELANJUTAN, BARRU SEJAHTERA LEBIH CEPAT	SULAWESI SELATAN MAJU DAN BERKARAKTER
MISI	
Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka	Meningkatkan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas, Berahlak, dan Berdaya Saing
Membangun Manusia yang Unggul dan Inklusif	
Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur dan wilayah Yang Berketahanan Iklim	Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan, Tangguh terhadap Bencana dan Perubahan Iklim untuk mendukung akselerasi Pertumbuhan Ekonomi
Meningkatkan Good Governance yang Bernafaskan Keagamaan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Melayani, Berintegritas, Adaptif dan Produktif
Meningkatkan Produktivitas perekonomian yang Berdaya Saing	Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berkualitas, Merata dan Berkelanjutan

Misi pembangunan diatas selanjutnya dijadikan rujukan dalam menyusun kerangka berpikir pencapaian misi dalam bentuk cascading tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPJMD ini. Cascading pencapaian Misi Pembangunan Daerah ini menunjukkan langkah-langkah intervensi yang harus dilakukan secara berjenjang. Serta menunjukkan ukuran keberhasilan intervensi tersebut serta siapa yang harus melakukan intervensi tersebut. Kerangka ini disusun untuk memberikan kemudahan kepada Perangkat Daerah untuk menyusun perencanaan strategis sektoral (Renstra Perangkat Daerah) yang harus tetap terhubung dan terintegrasi dengan RPJMD ini.

Gambar 3.3
 Proses Bisnis Pencapaian Visi RPJMD Kab.Barru Tahun 2025-2029



3.2.1. Misi 1

“Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka”

Mengarah pada penciptaan perubahan sosial dimana pembangunan tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Pada misi ini untuk mewujudkan visi yang bertujuan untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan setara, di mana setiap individu, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya mereka, memiliki akses yang sama terhadap kesempatan, layanan, dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai potensi penuh mereka.

Dimana misi ini fokus pada upaya untuk mengurangi dan menangani kemiskinan. Serta fokus pada mengurangi tingkat pengangguran dengan menciptakan peluang kerja, memberikan pelatihan keterampilan, dan mendorong wirausaha dan investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru.

3.2.2. Misi 2

“Membangun Manusia yang Unggul dan Inklusif”

Mengarah pada upaya untuk mewujudkan pengembangan sumber daya manusia Kabupaten Barru yang memiliki kualitas Fisik, moral dan budaya yang baik. Ini mencakup pendidikan yang berkualitas, kesehatan yang baik, dan pembangunan budaya yang memperkuat nilai-nilai positif dalam masyarakat.

Selain itu upaya pengembangan manusia yang unggul dan inklusif juga mengarahkan pada penciptaan kondisi lingkungan yang kondusif. Keamanan dan ketertiban diupayakan melalui mendorong kepatuhan masyarakat terhadap peraturan dan norma sosial untuk menciptakan lingkungan yang tertib

3.2.3. Misi 3

“Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur dan Wilayah yang Berketahanan Iklim”

Mengarahkan perwujudan suatu kondisi di mana pembangunan infrastruktur terlaksana dengan memperhatikan dampak lingkungan, yang mengandung makna bahwa memanfaatkan sumber daya secara efisien, ekosistem alami terjaga dan dikelola secara berkelanjutan, berketahanan terhadap bencana namun tetap membangun infrastruktur baru berdasarkan potensi dan daya dukung wilayah yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakat. Hal ini dimaksud untuk melindungi dan memulihkan ekosistem alami untuk mempertahankan keanekaragaman hayati dan fungsi ekologisnya.

Sementara itu berketahanan iklim mengandung makna berketahanan terhadap kondisi ekstrem yang dapat mengakibatkan bencana, ketahanan terhadap bencana diupayakan melalui mengembangkan strategi untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana, termasuk bencana alam dan non alam.

3.2.4. Misi 4

“Meningkatkan Good Governance yang Bernafaskan Keagamaan”

Mengarahkan perwujudan pemerintahan yang jujur, terbuka, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, sambil tetap memegang teguh nilai-nilai keagamaan. Pemerintahan yang transparan dan akuntabilitas yang berarti setiap tindakan, keputusan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus dapat diakses dan dipahami oleh publik. Serta bertanggung jawab atas segala keputusan dan tindakan yang diambil serta meningkatkan kompetensi ASN yang berkahlak. Pemerintah harus bersedia diawasi dan dievaluasi oleh publik serta memberikan pertanggungjawaban yang jelas atas penggunaan sumber daya publik. Partisipasi

masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga merupakan kunci untuk menciptakan pemerintahan yang inklusif dan responsif, menuju reformasi Birokrasi.

Misi ini juga menekankan pentingnya nilai-nilai keagamaan sebagai landasan dalam setiap aspek tata kelola pemerintahan. Ini mencakup integritas, keadilan, dan penghormatan terhadap etika dan moral dalam menjalankan pemerintahan.

3.2.5. Misi 5

“Meningkatkan Produktivitas perekonomian yang Berdaya Saing”

Mengarahkan sumber daya dan upaya dalam mewujudkan optimalisasi potensi ekonomi lokal guna menciptakan transformasi ekonomi yang berdaya saing. Melalui strategi ini, kami berkomitmen untuk mengidentifikasi dan mengembangkan keunggulan ekonomi Kabupaten Barru, memanfaatkan serta mengintegrasikan sumber daya lokal dengan cara yang inovatif dan berkelanjutan.

Peningkatan investasi menjadi pilar utama dalam mendukung upaya ini, dengan mengundang investasi dalam skala lokal dan internasional untuk mendukung pertumbuhan sektor basis seperti sektor pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Dengan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dapat terwujud, memberikan manfaat jangka panjang bagi semua pemangku kepentingan. Selain itu dalam rangka mewujudkan kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Barru menempatkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu strategis pembangunan daerah pada misi ini. Strategi ini diwujudkan melalui optimalisasi potensi sumber-sumber penerimaan daerah yang berkelanjutan, inovatif, dan berkeadilan.

3.3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kabupaten Barru 2025 – 2029 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan bersifat strategis dan makro, dan mencerminkan arah pembangunan yang diinginkan. Ciri utamanya bersifat umum, fokus pada

hasil akhir (*ultimate outcome*) dan menyatakan kondisi yang dicapai. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja, maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran. Perumusan tujuan didasarkan dari visi dan misi dan isu strategis, rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yang lebih spesifik dan terukur, menunjukkan kondisi atau capaian yang diinginkan dari pelaksanaan program/kegiatan. Ciri utama: Lebih spesifik, bersifat terukur, dan menunjukkan bagaimana tujuan akan dicapai.

RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025-2029 dilengkapi dengan arsitektur kinerja berupa alir visi misi hingga program. Tujuan dan Sasaran RPJMD merupakan hasil dari perumusan capaian strategis Kabupaten Barru yang merepresentasikan atau tolok ukur keberhasilan atau kegagalan pemerintah. Sehingga, syarat utama penentuan tujuan dan sasaran adalah *measurable* yang direpresentasikan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) atau indikator tujuan sebagai indikator keberhasilan kepala daerah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) atau indikator kinerja sasaran RPJMD.

Tujuan dan sasaran merupakan acuan dalam penyusunan logframe Kabupaten Barru. Cascading tujuan dan sasaran akan menunjukkan gambaran pola intervensi yang harus dilakukan secara berjenjang dan disertai dengan indikator keberhasilan yang melekat didalamnya. Masing masing sasaran terdapat intervensi program prioritas yang merupakan kumpulan dari program-program pembangunan daerah terdapat keterlibatan lintas perangkat daerah/lintas urusan untuk mendorong pencapaian sasaran Pemerintah Daerah. Program prioritas daerah ditransformasikan ke program nomenklatur di Permendagri 90 tahun 2019 yang menfokuskan Langkah intervensi tersebut harus lakukan bersama-sama oleh Perangkat Daerah. Keberadaan Program Prioritas Daerah dalam arsitektur kinerja merupakan inovasi Pemerintah Kabupaten Barru dalam mewujudkan pendekatan *money follow program* yang berorientasi pada pendekatan tematik. Program prioritas daerah dilaksanakan bersama dengan perangkat daerah yang berperan dalam pencapaian Misi .

Berikut merupakan penjabaran Tujuan dan Sasaran Pembangunan RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025-2029 :

➤ **Misi 1 Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka**

Dalam rangka pencapaian Misi 1 Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka, maka tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

Tujuan :

Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat

Sasaran :

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Berkurangnya Kemiskinan Masyarakat
2. Berkembangnya Lapangan Kerja dan Peluang Usaha

➤ **Misi 2 Membangun Manusia yang Unggul dan Inklusif**

Dalam rangka pencapaian Misi 2 Membangun Manusia yang Unggul dan Inklusif, maka tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

Tujuan :

Meningkatnya Kualitas Manusia yang Cerdas dan Sehat

Sasaran :

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya Mutu pendidikan
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan masyarakat

➤ **Misi 3 Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur dan wilayah Yang Berketahanan Iklim**

Dalam rangka pencapaian Misi 3 Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur dan Wilayah yang Berketahanan Iklim, maka tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

Tujuan :

Meningkatnya Daya Saing Infrastruktur yang Berkelanjutan dan Wilayah yang berketahanan terhadap Bencana

Sasaran :

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya kualitas infrastruktur
2. Menurunnya Emisi GRK
3. Meningkatnya Kualitas Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

➤ **Misi 4 Meningkatkan Good Governance yang Bernafaskan Keagamaan**

Dalam rangka pencapaian Misi 4 Meningkatkan *Good Governance* yang Bernafaskan Keagamaan, maka tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

Tujuan :

Meningkatnya Integritas Tata Kelola Pemerintahan

Sasaran :

Meningkatnya kualitas birokrasi yang responsif, adaptif, kolaboratif

➤ **Misi 5 Meningkatkan Produktifitas Perekonomian Yang Berdaya Saing**

Dalam rangka pencapaian Misi 5 Meningkatkan Produktifitas Perekonomian Yang Berdaya Saing, maka tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

Tujuan :

Meningkatnya Produktifitas Ekonomi Daerah

Sasaran :

1. Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi Daerah
2. Meningkatkan Daya Saing Industri Pengolahan
3. Meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

Dalam rangka mengintegrasikan perencanaan pembangunan di Kabupaten Barru, mulai dari level pemerintah daerah hingga level perangkat daerah, maka cascading yang telah digambarkan pada setiap misi diatas selanjutnya akan di breakdown secara menyeluruh pada level perencanaan perangkat daerah. Cascading yang dibangun pada perangkat daerah sekurang-kurangnya merujuk pada cascading yang ada di RPJMD ini. Hal tersebut dilaksanakan untuk menjaga konsistensi perencanaan, dan mewujudkan target-target dari tiap indikator kinerja yang telah ditentukan, Adapun target indikator kinerja utama (IKU) Tahun 2025 – 2029 seperti yang diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.4

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Barru Tahun 2025 - 2030

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFENISI OPERASIONAL	SATUAN	BASELINE (2025)	TARGET TAHUN					KET
							2026	2027	2028	2029	2030	
Visi : BARRU BERKEADILAN, BARRU MAJU BERKELANJUTAN, BARRU SEJAHTERA LEBIH CEPAT												
Misi 1 : Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka	T.1 Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat		Indeks Gini	Indeks Gini atau Gini Ratio adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau pengeluaran penduduk di suatu wilayah dalam periode tertentu. Nilainya berkisar antara 0 hingga 1, di mana 0 menunjukkan pemerataan sempurna dan 1 menunjukkan ketimpangan sempurna. Data di rilis oleh BPS	Poin	0,304	0,298	0,292	0,285	0,279	0,272	
		S1.1 Berkurangnya Kemiskinan Masyarakat	Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan adalah Jumlah penduduk miskin (penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) ÷ Jumlah total penduduk × 100% Data di rilis oleh BPS	%	7,65	7,47	7,28	6,60	6,32	6,14	
		S1.2 Berkembangnya Lapangan Kerja dan peluang usaha	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang menunjukkan persentase jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja di suatu wilayah dan periode tertentu, dengan rumus Jumlah Penganggur dibagi Jumlah Angkatan kerja × 100% Data di rilis oleh BPS	%	6,33	6,24	5,90	5,56	5,22	4,88	
Misi 2 : Membangun Manusia yang Unggul dan Inklusif	T.2 Meningkatnya Kualitas Manusia yang Cerdas dan Sehat		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia dari tiga dimensi dasar: 1. Umur panjang dan hidup sehat, diukur dengan usia harapan hidup saat lahir. 2. Pengetahuan, diukur dengan : Rata-rata lama sekolah (RLS) untuk penduduk usia 25 tahun ke atas. Dan Harapan lama sekolah (HLS) untuk anak usia 7 tahun. 3. Standar hidup layak, diukur dengan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Data di rilis oleh BPS	poin	75,22	75,77	76,32	76,87	77,42	77,97	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFENISI OPERASIONAL	SATUAN	BASELINE (2025)	TARGET TAHUN					KET
							2026	2027	2028	2029	2030	
		S2.1 Meningkatnya Mutu pendidikan	Indeks Pendidikan	Indeks Pendidikan adalah salah satu komponen utama dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang digunakan untuk menggambarkan tingkat pencapaian pembangunan di sektor pendidikan. Indeks Pendidikan dibentuk dari dua indikator utama : 1. Harapan Lama Sekolah (HLS) : Rata-rata jumlah tahun sekolah yang diharapkan akan dijalani oleh anak usia 7 tahun. 2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) : Rata-rata jumlah tahun sekolah yang telah dijalani oleh penduduk usia 25 tahun ke atas. Data di rilis oleh BPS	Poin	67,51	68,15	68,78	69,42	70,05	70,68	
			Nilai Rapor Pendidikan	Nilai Rapor Pendidikan adalah skor kuantitatif yang mencerminkan capaian mutu pendidikan di suatu satuan pendidikan (sekolah/PAUD) atau daerah, berdasarkan data Asesmen Nasional. Nilai ini disusun dalam rentang 1,00 hingga 3,00. Data di rilis oleh : Kementerian Pendidikan	Poin	80,21	82,17	84,42	87,91	90,38	92,17	
		S2.2 Meningkatnya Derajat Kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Indeks Kesehatan adalah salah satu dari tiga komponen utama penyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan di bidang kesehatan dan umur panjang. Indeks Kesehatan diukur melalui Usia Harapan Hidup saat lahir (UHH), yaitu rata-rata perkiraan usia yang akan dicapai oleh seseorang yang baru lahir, jika mengalami pola kematian seperti yang berlaku saat ini Data di rilis oleh BPS	Poin	82,51	83,31	84,11	84,91	85,7	86,49	
			Prevalensi Stunting	Prevalensi stunting adalah indikator yang menunjukkan persentase balita (anak di bawah 5 tahun) yang mengalami stunting dibandingkan dengan total jumlah balita dalam suatu wilayah dan waktu tertentu. Prevalensi stunting diukur dengan indikator tinggi badan menurut umur (TB/U) menggunakan standar WHO Child Growth Standards, dengan formulasi = jumlah balita stunting dibagi jumlah total balita X 100% Data di rilis oleh : Kementerian Kesehatan	%	24,6	22,3	20,0	17,6	15,3	13,0	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFENISI OPERASIONAL	SATUAN	BASELINE (2025)	TARGET TAHUN					KET
							2026	2027	2028	2029	2030	
Misi 3 : Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur dan wilayah Yang Berketahanan Iklim	T.3 Meningkatnya Daya Saing Infrastruktur yang Berkelanjutan dan Wilayah yang berketahanan terhadap Bencana		Indeks Daya saing Pilar Infrastruktur	Indeks Daya Saing Pilar Infrastruktur adalah salah satu komponen dari Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang mengukur kualitas dan ketersediaan infrastruktur sebagai faktor pendukung utama dalam meningkatkan daya saing suatu daerah. Data di rilis oleh : BRIN	Poin	3,995	4,000	4,010	4,080	4,120	4, 200	
			Indeks Resiko Bencana	Indeks Risiko Bencana (IRBI) merupakan ukuran komposit yang digunakan untuk menilai potensi risiko bencana di suatu wilayah (kabupaten/kota/provinsi). Indeks ini dihitung berdasarkan interaksi antara tiga komponen utama: 1. Bahaya (Hazard) – frekuensi dan intensitas potensi kejadian bencana. 2. Kerentanan (Vulnerability) – tingkat paparan penduduk, ekonomi, dan lingkungan terhadap bahaya tersebut. 3. Kapasitas (Capacity) – kemampuan daerah dalam mitigasi, kesiapsiagaan, dan penanggulangan bencana Data di rilis oleh : BNPB	Poin	136,41	128,93	121,45	113,96	106,48	99,00	
	S3.1 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks Infrastruktur Daerah merupakan ukuran komposit yang digunakan untuk menilai capaian kualitas pembangunan infrastruktur Kabupaten Barru. Indeks ini dihitung berdasarkan : 1. Tingkat Kemantapan Jalan (%) 2. Rasio Konektivitas (%) 3. Persentase Rumah Layahak Huni (%) 4. Persentase RT terlayani akses air minum aman (%) 5. Persentase RT terlayani sanitasi layak (%) 6. Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/ Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (%) Data di rilis oleh : Bappelitbangda Kab.Barru	Poin	55	56.85	60.12	62.59	64.46	65.78		
	S3.2 Menurunnya Emisi GRK	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Penurunan Intensitas Gas Rumah Kaca (GRK) secara operasional mengacu pada pengurangan jumlah emisi GRK yang dihasilkan per unit output ekonomi atau aktivitas tertentu dalam suatu wilayah atau sektor selama periode waktu tertentu. Dengan Formulasi : (Intensitas GRK pada periode awal dikurangi Intensitas GRK pada periode akhir) dibagi Intensitas GRK pada periode awal X 100% Data di rilis oleh : Kementrian LH/Bappelitbangda Prov.Sulsel	%	36,56	39,88	43,2	46,51	49,83	53,15		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFENISI OPERASIONAL	SATUAN	BASELINE (2025)	TARGET TAHUN					KET	
							2026	2027	2028	2029	2030		
		S3.3 Meningkatnya Kualitas Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah adalah ukuran komposit yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu daerah dalam menghadapi, mengelola, dan pulih dari berbagai tantangan dan ancaman, baik yang bersifat sosial, ekonomi, lingkungan, maupun bencana. Data di rilis oleh : BNPB	Poin	0,53	0,54	0,56	0,58	0,59	0,61		
Misi 4 : Meningkatkan Good Governance yang Bernafaskan Keagamaan	T.4 Meningkatnya Integritas Tata Kelola Pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai tingkat kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di suatu instansi pemerintah atau daerah. Indeks ini mengukur capaian reformasi birokrasi berdasarkan komponen utama seperti: Perubahan Tata Laksana, Perubahan Struktur Organisasi, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dan Penguatan Pengawasan dan Pengendalian Data di rilis oleh : KemenPAN RB	Poin	70,82	73,37	75,91	78,46	81	83,54		
			Nilai Sakip	SAKIP adalah sistem yang digunakan untuk mengukur, mengevaluasi, dan meningkatkan kinerja serta akuntabilitas instansi pemerintah. Nilai SAKIP dihitung berdasarkan penilaian dokumen perencanaan, pelaporan, capaian kinerja, dan sistem pengendalian internal. Penilaian dilakukan dengan menggunakan metodologi yang mengacu pada Peraturan Menteri PAN-RB tentang pedoman evaluasi SAKIP. Data di rilis oleh : KemenPAN RB	Poin	62,83	65,87	68,92	71,96	75	78,04		
		S4.1 Meningkatnya kualitas birokrasi yang responsif, adaptif, kolaboratif	Indeks Pemerintahan Digital	ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu negara atau daerah menerapkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Data di rilis oleh : Kementerian Komdigi	Poin	-	0,8	1,00	1,20	1,50	1,80	1,80	
			Indeks Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik adalah ukuran kinerja pelayanan yang dihitung berdasarkan pemenuhan terhadap komponen standar pelayanan publik, mekanisme pelayanan, dan kualitas hasil layanan.” Indeks ini ditujukan untuk menilai pelaksanaan pelayanan publik di instansi pusat maupun daerah. Data di rilis oleh : KemenPAN RB	Poin	4,010	4,066	4,123	4,179	4,235	4,291		
			Maturitas SPIP	Tingkat maturitas SPIP adalah tingkat kematangan pelaksanaan pengendalian intern yang mencerminkan kapabilitas instansi pemerintah dalam merancang, melaksanakan, memantau, dan memperbaiki sistem pengendalian intern. Data di rilis oleh : BPKP/Inspektorat Daerah	Level	3	3	3	3	4	4		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFENISI OPERASIONAL	SATUAN	BASELINE (2025)	TARGET TAHUN					KET
							2026	2027	2028	2029	2030	
Misi 5: Meningkatkan Produktivitas perekonomian yang Berdaya Saing	T.5 Meningkatnya Produktifitas Ekonomi Daerah		PDRB Perkapita	PDRB per kapita (Produk Domestik Regional Bruto per kapita) adalah ukuran yang menunjukkan rata-rata nilai tambah bruto (PDRB) yang dihasilkan oleh setiap penduduk di suatu wilayah dalam periode tertentu, biasanya satu tahun. Indikator ini digunakan untuk melihat tingkat kemakmuran atau kesejahteraan ekonomi rata-rata penduduk di wilayah tersebut. PDRB per kapita adalah hasil bagi antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku atau harga konstan dengan jumlah penduduk pertengahan tahun di suatu wilayah.” Data dirilis : BPS – Badan Pusat Statistik	Juta Rupiah	56,26	66,75	77,23	87,52	98,21	108,75	
		S5.1 Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan suatu wilayah dalam memproduksi barang dan jasa, yang diukur dari perubahan PDRB atas dasar harga konstan dari tahun ke tahun. Data dirilis : BPS – Badan Pusat Statistik	%	5,74	5,81	6,31	6,91	7,51	7,81	
		S5.2 Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	Kontribusi sektor industri pengolahan secara operasional adalah persentase sumbangan nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di suatu wilayah dalam periode tertentu. Kontribusi sektor industri pengolahan adalah perbandingan antara nilai tambah bruto sektor industri pengolahan terhadap total PDRB atas dasar harga berlaku, dinyatakan dalam persentase. Data dirilis : Badan Pusat Statistik – BPS	%	5,29	5,62	5,94	6,29	6,59	7,21	
		S5.3 Meningkatnya kemandirian fiskal daerah	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	Rasio PAD terhadap APBD adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rasio ini menggambarkan tingkat kemandirian fiskal suatu daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahannya. Rasio PAD terhadap APBD adalah persentase Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan total pendapatan dalam APBD, yang mencerminkan kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan fiskalnya dari sumber pendapatan sendiri. Data Dirilis : BPK/BKAD	%	12,97	13,36	14,52	15,18	17,24	18,63	

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan tujuan sasaran serta indikator yang akan mendukung pencapaian Misi Kabupaten Barru terdiri atas 5 tujuan, dan 11 sasaran dengan rumusan indikator sebanyak 5 indikator tujuan dan 17 indikator sasaran sehingga total indikator yang digunakan untuk mengukur capaian Misi Kabupaten Barru sebanyak 22 Indikator.

3.4. Arah kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan, strategi dan program pembangunan daerah merupakan rumusan perencanaan komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan permasalahan serta isu strategis yang telah dikemukakan dalam Bab II, dikaitkan dengan target-target solusi yang dirumuskan dalam tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diuraikan diatas, maka dirumuskan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah selama 5 (lima) Tahun 2025-2029 dapat dijabarkan sebagai berikut.

3.4.1. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

A. Perumusan Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun perumusan arah kebijakan RPJMD sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perumusan Arah Kebijakan RPJMD

No	Misi	Arah Kebijakan	Ket
1	Misi 1 : Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka	Mengintegrasikan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran melalui pembangunan sistem terpadu berbasis teknologi informasi, yang mencakup perbaikan infrastruktur layanan dasar, peningkatan akses pendidikan vokasi, dan pengembangan program pelatihan yang selaras dengan kebutuhan pasar kerja (AK.1)	
2	Misi 2 : Membangun Manusia yang Unggul dan Inklusif	Meningkatkan mutu pendidikan, derajat kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan lembaga terkait lainnya, dengan dukungan kebijakan yang mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk memastikan peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan (AK.2)	
3	Misi 3 : Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur dan	Meningkatkan kualitas infrastruktur berkelanjutan dan ketahanan wilayah terhadap bencana melalui perencanaan terpadu berbasis risiko, optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, penguatan	

No	Misi	Arah Kebijakan	Ket
	Wilayah Yang Berketahanan Iklim	kapasitas sumber daya manusia dengan penerapan teknologi inovatif, penguatan sistem peringatan dini, serta perluasan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat guna membangun infrastruktur yang tangguh, ramah lingkungan, dan adaptif terhadap perubahan iklim serta risiko bencana (AK.3)	
4	Misi 4 : Meningkatkan Good Governance yang Bernafaskan Keagamaan;	Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi melalui inovasi pelayanan publik yang cepat, mudah, dan transparan, dengan dukungan pengembangan sumber daya manusia yang kompeten serta berbasis hasil penelitian (AK.4)	
5	Misi 5 : Meningkatkan Produktivitas perekonomian yang Berdaya Saing	Mengembangkan kawasan industri yang terintegrasi dengan sektor pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, dan pariwisata, serta memperkuat kapasitas UMKM, menciptakan iklim investasi yang kondusif, dan meningkatkan kemandirian fiskal daerah (AK.5)	

Sumber : Analisis Tim Penyusun RPJMD, 2025

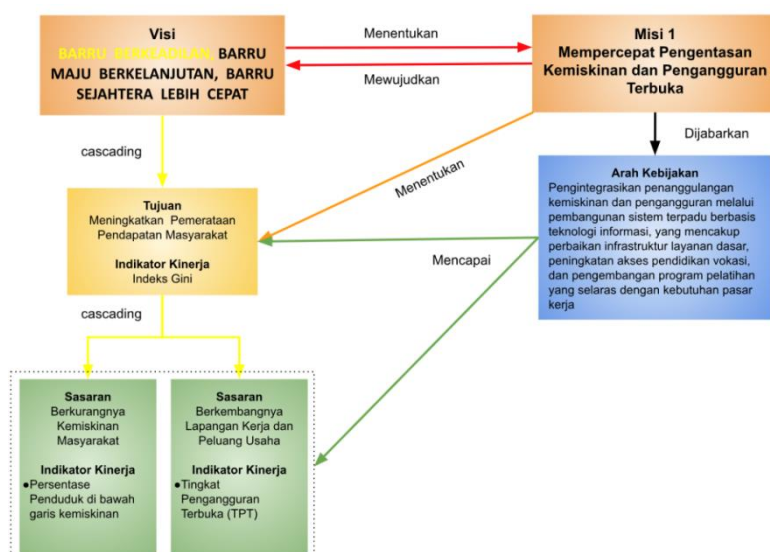
Adapun penjelasan dan skema arah kebijakan sebagaimana pada perumusan arah kebijakan diatas sebagai berikut :

Misi 1 Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka

Kondisi yang menjadi tujuan misi 1 adalah meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat dengan arah kebijakan mengintegrasikan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran melalui pembangunan sistem terpadu berbasis teknologi informasi, yang mencakup perbaikan infrastruktur layanan dasar, peningkatan akses pendidikan vokasi, dan pengembangan program pelatihan yang selaras dengan kebutuhan pasar kerja.

Adapun skema arah kebijakan seperti gambar di bawah ini.

Gambar 3.4
Skema Arah Kebijakan Pencapaian Misi 1



Sumber : Analisis Tim Penyusun RPJMD, 2025

Arah kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran secara komprehensif dan berkelanjutan dengan membangun sebuah sistem yang terintegrasi, memanfaatkan teknologi informasi, dan melibatkan berbagai sektor dengan harapan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas program-program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran terbuka untuk mencapai tujuan meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat untuk mewujudkan Barru Berkeadilan.

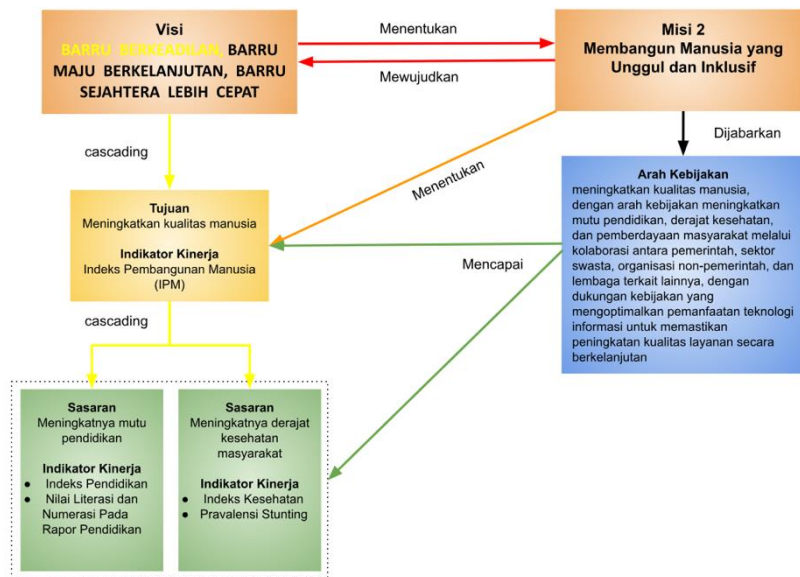
Berdasarkan hal tersebut akan dilakukan perbaikan infrastruktur layanan dasar untuk memberi manfaat akses masyarakat terhadap pendidikan, pekerjaan, pasar, dan layanan publik lainnya serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin, membuka peluang ekonomi baru, dan mendukung pengembangan sumber daya manusia. Peningkatan akses pendidikan vokasi serta pengembangan program pelatihan yang relevan untuk menyiapkan tenaga kerja yang terampil dan siap kerja sesuai dengan kebutuhan pasar untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran.

Misi 2 Membangun Manusia yang Unggul dan Inklusif

Kondisi yang menjadi tujuan misi 2 adalah meningkatnya kualitas manusia, dengan arah kebijakan meningkatkan mutu pendidikan, derajat kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan lembaga terkait lainnya, dengan dukungan kebijakan yang mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk memastikan peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan. Adapun skema arah kebijakan seperti gambar 3.5 di bawah ini.

Arah kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat, tanpa terkecuali, dapat menikmati layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, dengan mengutamakan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, organisasi non pemerintahan, dan lembaga terkait lainnya untuk mencapai tujuan meningkatkan kualitas manusia untuk mewujudkan Barru Berkeadilan.

Gambar 3.5
Skema Arah Kebijakan Pencapaian Misi



Sumber : Analisis Tim Penyusun RPJMD, 2025

Dibidang pendidikan peningkatan kualitas dilakukan dengan penyelenggaraan wajib belajar tiga belas tahun melalui jalur pendidikan formal, non formal dan informal, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan berkelanjutan, program mentoring, dan pemberian tunjangan. Lingkungan belajar yang kondusif dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, seperti sanitasi yang aman, perpustakaan, laboratorium, dan ruang kelas yang nyaman, serta memperkuat literasi melalui program membaca, penyediaan buku berkualitas, dan pelibatan komunitas literasi, pemberian subsidi biaya pendidikan dan beasiswa pendidikan tinggi dan peningkatan dukungan kerjasama perguruan tinggi dan pendidikan kejuruan. Selain itu, keolahragaan mendapat perhatian khusus, termasuk realisasi janji politik berupa pendirian akademi sepak bola sebagai wadah pembinaan atlet muda, penyediaan fasilitas olahraga yang memadai, dan penyelenggaraan kompetisi olahraga untuk mendorong perkembangan bakat siswa. Partisipasi sektor swasta atau lembaga lainnya juga didorong untuk berkontribusi dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh.

Pada sektor kesehatan, fokus diarahkan pada peningkatan kualitas layanan, penyediaan infrastruktur kesehatan, promosi kesehatan preventif khususnya penguatan intervensi spesifik dan intervensi sensitif dalam penanganan stunting , dan penguatan sumber daya manusia dengan optimalisasi pemanfaatan teknologi. Teknologi seperti telemedicine, yang memanfaatkan teknologi

informasi dan komunikasi (TIK) untuk memberikan layanan kesehatan jarak jauh, memungkinkan pasien berkonsultasi dengan tenaga medis atau dokter tanpa harus datang langsung ke fasilitas kesehatan. Selain itu, rekam medis elektronik dioptimalkan untuk mempermudah akses dan efisiensi layanan kesehatan bagi masyarakat. Kampanye kesadaran kesehatan berbasis komunitas juga diperkuat melalui media digital dan kolaborasi lintas sektor guna meningkatkan edukasi dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kesehatan.

Dalam aspek pemberdayaan masyarakat, arah kebijakan mencakup peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan mendorong keterlibatan perempuan mendukung pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta menciptakan lingkungan yang mendukung kesetaraan gender. Program perlindungan anak difokuskan pada pencegahan kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap anak melalui pendidikan berbasis komunitas, penguatan peran keluarga, dan kolaborasi lintas sektor. Upaya ini diintegrasikan dengan kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan untuk memastikan keberlanjutan kesejahteraan sosial masyarakat.

Melalui langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat dapat menikmati pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan yang mudah diakses. Dengan demikian, tercipta sumber daya manusia yang unggul, inklusif, dan berdaya saing, yang menjadi fondasi pembangunan berkelanjutan di masa depan.

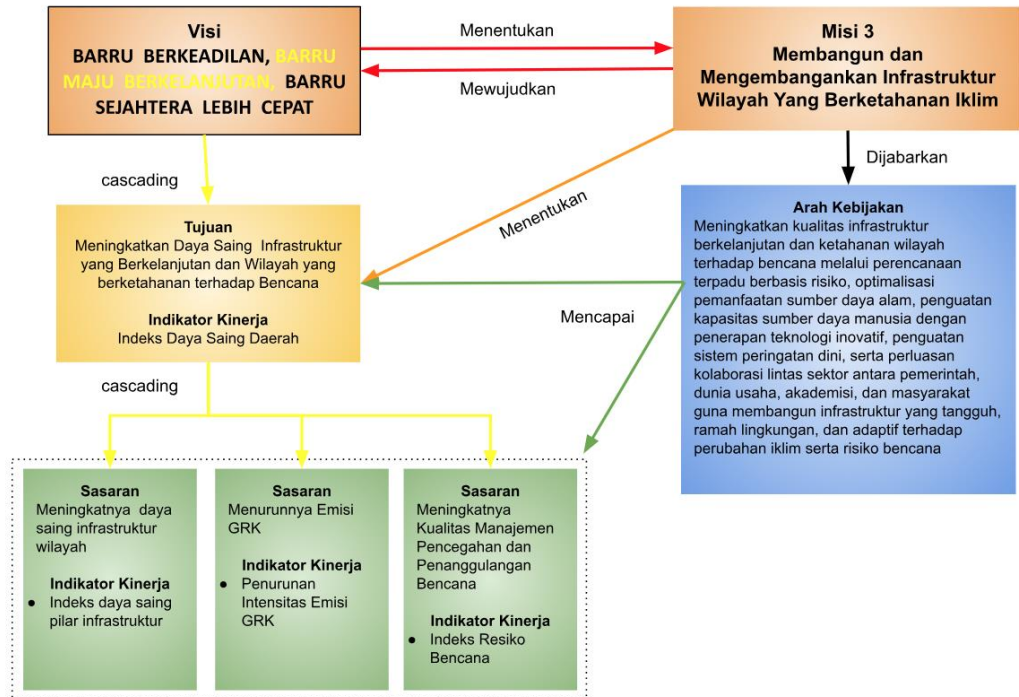
Misi 3 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur dan Wilayah yang Berketahanan Iklim

Kondisi yang menjadi tujuan misi 3 adalah meningkatnya daya saing infrastruktur yang berkelanjutan dan wilayah yang berketahanan terhadap bencana dengan arah kebijakan Meningkatkan kualitas infrastruktur berkelanjutan dan ketahanan wilayah terhadap bencana melalui perencanaan terpadu berbasis risiko, optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, penguatan kapasitas sumber daya manusia dengan penerapan teknologi inovatif, penguatan sistem peringatan dini, serta perluasan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat guna membangun infrastruktur yang

tangguh, ramah lingkungan, dan adaptif terhadap perubahan iklim serta risiko bencana.

Adapun skema arah kebijakan seperti gambar di bawah ini.

Gambar 3.6
Skema Arah Kebijakan Pencapaian Misi 3



Sumber : Analisis Tim Penyusun RPJMD, 2025

Arah kebijakan ini berfokus pada pembangunan infrastruktur yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan dirancang untuk bertahan dalam situasi bencana, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Pembangunan ini mencakup peningkatan kuantitas dan kualitas jalan serta jembatan yang mendukung konektivitas antar wilayah, sehingga memudahkan mobilitas dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, peningkatan infrastruktur sumber daya air, sanitasi, dan persampahan juga menjadi prioritas untuk memastikan akses masyarakat terhadap air dan sanitasi yang aman.

Pembangunan yang berkelanjutan juga difokuskan pada pengelolaan ruang dan bangunan dengan perencanaan yang konsisten, pemanfaatan ruang yang optimal, dan pengendalian yang baik terhadap dampak lingkungan. Dalam hal ini, pengurangan pencemaran air dan reduksi emisi karbon menjadi bagian dari upaya pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik. Dengan demikian, infrastruktur yang dibangun tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik masyarakat tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan ekosistem.

Selain itu, penguatan manajemen bencana untuk meminimalkan dampak dari bencana alam. Strategi ini mencakup mitigasi bencana, serta peningkatan kapasitas tanggap darurat dan pemulihan pasca-bencana. Pembangunan infrastruktur yang tahan bencana juga memerlukan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat, agar dapat terintegrasi dengan baik dalam upaya penanggulangan bencana.

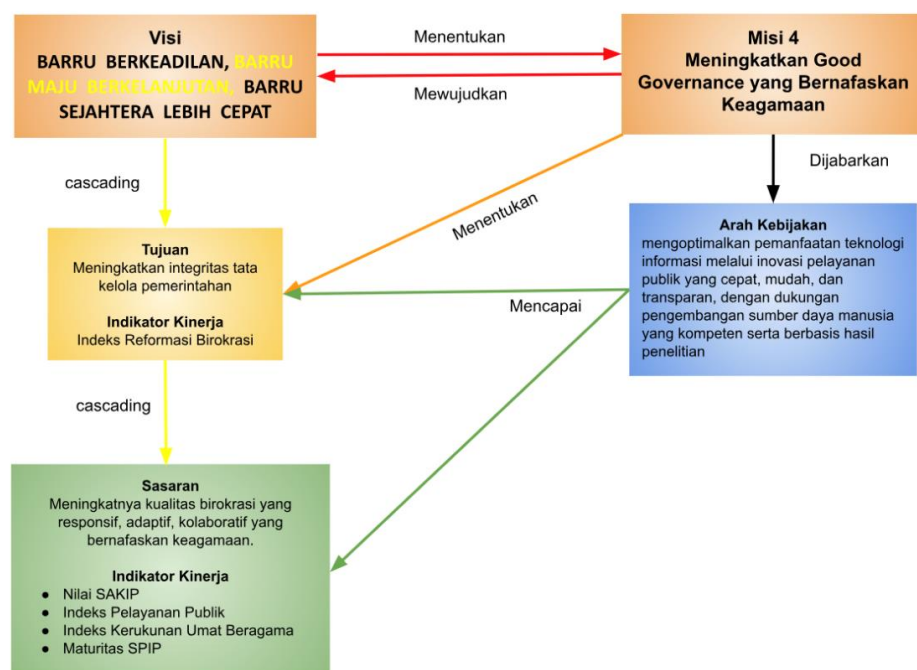
Secara keseluruhan, arah kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan infrastruktur yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga mendukung kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesiapan terhadap bencana. Diharapkan dengan strategi ini, kualitas hidup masyarakat akan meningkat, akses terhadap layanan dasar akan lebih merata, dan keberlanjutan lingkungan dapat terjaga.

Misi 4 Meningkatkan Good Governance yang Bernafaskan Keagamaan

Kondisi yang menjadi tujuan misi 4 adalah meningkatnya integritas tata kelola pemerintahan dengan arah kebijakan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi melalui inovasi pelayanan publik yang cepat, mudah, dan transparan, dengan dukungan pengembangan sumber daya manusia yang kompeten serta berbasis hasil penelitian.

Adapun skema arah kebijakan seperti gambar di bawah ini.

Gambar 3.7
Skema Strategi Pencapaian Misi 4



Sumber : Analisis Tim Penyusun RPJMD, 2025

Arah kebijakan ini berfokus untuk menciptakan pemerintahan yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, inovasi dalam aspek pelayanan publik dan menggunakan hasil penelitian dalam pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, diharapkan dapat terwujud pemerintahan yang lebih terbuka, transparan, dan akuntabel.

Salah satu fokus utama dari arah kebijakan ini adalah digitalisasi desa. Melalui digitalisasi, diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat desa terhadap informasi dan layanan publik, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan pemerintahan desa. Selain itu, peningkatan kapasitas dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) juga menjadi prioritas. Pelatihan dan pengembangan kompetensi yang berkelanjutan akan memastikan bahwa ASN memiliki kemampuan untuk mengoperasikan teknologi informasi dengan baik serta memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Selain itu, arah kebijakan ini juga menekankan pentingnya penguatan demokrasi dan toleransi. Dengan memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat terhadap informasi dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, diharapkan dapat meningkatkan kualitas demokrasi. Selain itu, upaya untuk memfasilitasi forum keagamaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dalam menjaga kerukunan masyarakat. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten juga menjadi bagian penting dari strategi ini. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta rasa keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat.

Arah kebijakan ini juga menekankan pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif, diharapkan dapat mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintah juga sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan

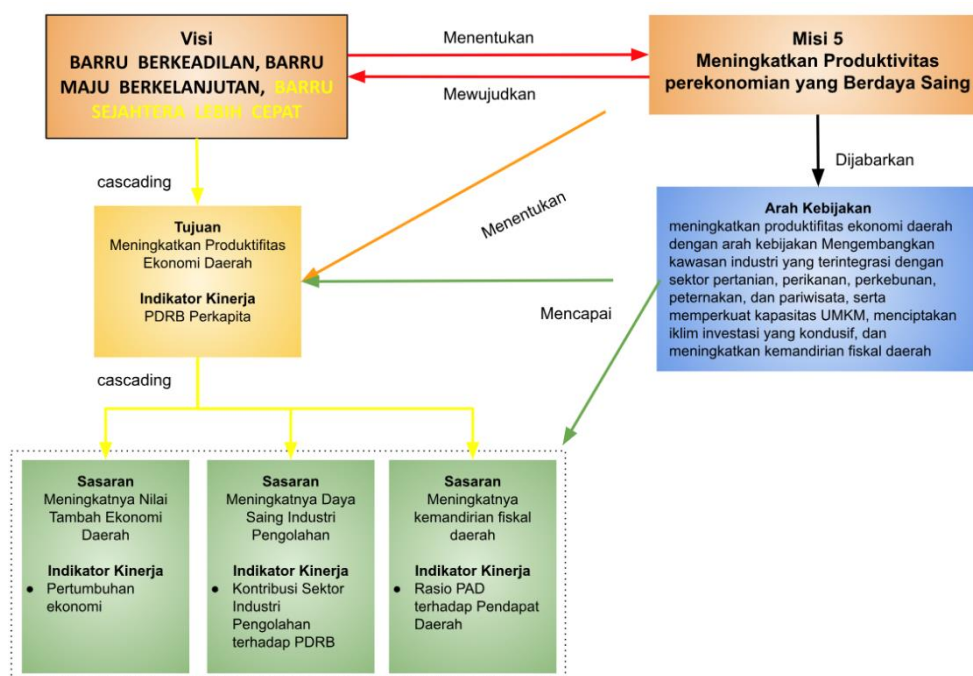
demikian, diharapkan dapat terwujud pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif yang bernafaskan keagamaan.

Misi 5 Meningkatkan Produktivitas perekonomian yang Berdaya Saing

Kondisi yang menjadi tujuan misi 5 adalah meningkatnya produktifitas ekonomi daerah dengan arah kebijakan Mengembangkan kawasan industri yang terintegrasi dengan sektor pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, dan pariwisata, serta memperkuat kapasitas UMKM, menciptakan iklim investasi yang kondusif, dan meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

Adapun skema arah kebijakan seperti gambar di bawah ini.

Gambar 3.8
Skema Strategi Pencapaian Misi 5



Sumber : Analisis Tim Penyusun RPJMD, 2025

Arah kebijakan ini bertujuan untuk mengembangkan kawasan industri berbasis sumber daya alam yang terintegrasi dengan berbagai sektor, seperti pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, dan pariwisata. Dalam hal ini, kawasan industri tidak hanya difokuskan pada produksi barang, tetapi juga berperan sebagai penghubung yang mengoptimalkan potensi sumber daya alam lokal untuk menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan daerah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pembangunan kawasan industri Barru menjadi fokus utama dalam strategi ini, di mana potensi sumber daya alam

terkhususnya di sektor perikanan dan pertanian akan dimanfaatkan secara maksimal untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang saling terhubung dan berkelanjutan untuk menuju ekonomi biru sesuai RPJPD Kabupaten Barru.

Pengembangan ekonomi desa menjadi fokus penting dalam strategi ini, melalui pemanfaatan teknologi tepat guna dan kemitraan dengan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Dengan pendekatan ini, desa-desa akan memiliki kesempatan untuk mengembangkan usaha-usaha berbasis lokal, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan nilai tambah melalui teknologi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Sektor pariwisata juga menjadi bagian penting dari strategi ini, dengan mengembangkan destinasi dan daya tarik wisata yang menyeluruh, serta memberikan pendampingan kelembagaan, sertifikasi, dan bantuan kepada pelaku industri pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif (ekraf). Hal ini akan mendukung pengembangan sektor pariwisata yang lebih terstruktur, profesional, dan berkelanjutan.

Selain itu, arah kebijakan ini juga menekankan pada penguatan sistem dan jaringan distribusi barang, yang meliputi pengembangan pasar domestik serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional. Dengan memperbaiki sistem distribusi, akan tercipta efisiensi dalam pasokan barang dan produk dari sektor pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, serta produk UMKM ke pasar. Hal ini turut berperan dalam menekan inflasi dan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Peningkatan investasi di sektor-sektor ini menjadi pendorong utama transformasi ekonomi yang lebih stabil dan inklusif.

Kemudian pembangunan dan pengembangan agroteknologi, yang berfokus pada agropolitan serta hilirisasi di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan. Dengan hilirisasi, produk mentah dari sektor-sektor ini akan diproses lebih lanjut untuk menghasilkan barang dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Penguatan kelembagaan kelompok petani dan nelayan menjadi langkah penting untuk meningkatkan manajemen pengelolaan produksi di sektor pertanian dan perikanan, serta meningkatkan daya saing produk di pasar domestik. Untuk sektor UMKM, penguatan kualitas dan diversifikasi produk serta peningkatan kelembagaan UMKM dan koperasi juga menjadi prioritas untuk

menciptakan pelaku usaha yang lebih profesional dan adaptif terhadap pasar yang dinamis.

Sebagai bagian dari arah kebijakan ini, akan ada upaya untuk meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan pangan, yang berkontribusi pada stabilitas harga pangan dan barang penting. Dengan peningkatan sistem distribusi yang efisien, masyarakat akan mendapatkan akses yang lebih baik terhadap pangan yang beragam dan terjangkau, serta memperkuat ketahanan pangan dalam jangka panjang. Secara keseluruhan, strategi ini berfokus pada menciptakan ekosistem yang saling terhubung, di mana sektor industri, pertanian, perikanan, peternakan, pariwisata, dan UMKM bekerja bersama-sama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkualitas.

Selain itu dalam rangka optimalisasi upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah dilakukan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan Retribusi daerah, penguatan pengawasan internal terhadap pengelolaan pendapatan pajak dan retribusi daerah dan Optimalisasi tata Kelola BUMD dan Perusda dalam rangka mendukung penerimaan pendapatan daerah.

3.4.2. Strategi Pembangunan Daerah

A. Perumusan Strategi

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, penahapan pembangunan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Rumusan strategi merasionalkan pilihan arah kebijakan sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Untuk memudahkan pemahaman terhadap kesinambungan pembangunan setiap tahun dalam jangka 5 (lima) tahun, terlebih dahulu disederhanakan dalam penahapan pembangunan RPJMD setiap tahun. Atas dasar penahapan pembangunan inilah disusun

strategi lebih jelas agar RPJMD mudah dituangkan dalam RKPD. Penekanan fokus setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. adapun penahapan pembangunan sebagai berikut.

Tabel 3.6
Penahapan Pembangunan RPJMD

TAHAP 1 (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Konsolidasi Sosial-Ekonomi dan Penataan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur Strategis dan Reformasi Birokrasi	Transformasi Ekonomi Wilayah Berbasis Potensi Lokal	Optimalisasi Sektor Unggulan Menuju Ekosistem Berkelanjutan	Pemantapan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Wilayah

Sumber : Analisis Tim Penyusun RPJMD, 2025

Berdasarkan penahapan pembangunan diatas kemudian disusun strategi yang berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD sebagai berikut:

- Misi 1** : **Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat**
 Tujuan : Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat
 Sasaran : 1. Berkurangnya kemiskinan masyarakat
 2. Berkembangnya lapangan kerja dan peluang usaha
 Arah Kebijakan : Mengintegrasikan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran melalui pembangunan sistem terpadu berbasis teknologi informasi, yang mencakup perbaikan infrastruktur layanan dasar, peningkatan akses pendidikan vokasi, dan pengembangan program pelatihan yang selaras dengan kebutuhan pasar kerja

Tabel 3.7
Perumusan Strategi RPJMD Misi 1

Tahapan Pertahun	Optimalisasi Sumber Daya	Fokus Kewilayahan	Program Prioritas Daerah
2026	- Pemetaan Berbasis Teknologi Informasi untuk identifikasi kantong kemiskinan dan wilayah TPT tinggi - Penataan Layanan Dasar yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat miskin - Bantuan Sosial yang terarah	- Desa tertinggal dengan Angka kemiskinan dan pengangguran tertinggi - Daerah Infrastruktur Terbatas (Desa	- Percepatan Penanggulangan kemiskinan terintegrasi dan Terpadu (PIK PAKET - Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Tahapan Pertama	Optimalisasi Sumber Daya	Fokus Kewilayahan	Program Prioritas Daerah
	<p>berbasis data terpadu yang terintegrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan Vokasi berbasis kebutuhan sektor pertanian, perikanan,UMKM dan konstruksi dan pertambangan - Pengembangan Sekolah Rakyat - Mendorong kepemilikan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah melalui program 3 juta rumah 	Bulo-bulo, Gattareng, Bacu-bacu Kecamatan Pujananting)	
2027	<ul style="list-style-type: none"> - Perluasan Infrastruktur Dasar untuk meningkatkan produktifitas ekonomi masyarakat miskin - Integrasi Sistem Informasi database kemiskinan dengan layanan bantuan sosial dan pelatihan kerja - Peningkatan Bantuan Sosial - Diversifikasi pelatihan vokasi dengan menambah sektor pariwisata dan UMKM berbasis teknologi - Pengembangan Sekolah Rakyat - Mendorong kepemilikan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah melalui program 3 juta rumah 	- Fokus kantong kemiskinan dengan potensi pertanian/perikanan dan pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - Percepatan Penanggulangan kemiskinan terintegrasi dan Terpadu (PIK PAKET - Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
2028	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan ekonomi lokal untuk menciptakan lapangan kerja baru - Digitalisasi pelatihan vokasi - Optimalisasi bantuan sosial - Perluasan Infrastruktur Produktif - Pengembangan Sekolah Rakyat - Mendorong kepemilikan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah melalui program 3 juta rumah 	Fokus kantong kemiskinan dengan potensi pariwisata, pertanian/perikanan	<ul style="list-style-type: none"> - Percepatan Penanggulangan kemiskinan terintegrasi dan Terpadu (PIK PAKET - Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
2029	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberdayaan wirausaha - Sistem informasi terintegrasi untuk monitoring kemiskinan dan lapangan kerja - Pelatihan vokasi berbasis industri - Mendorong kepemilikan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah melalui program 3 juta rumah 	Fokus pada pusat ekonomi dan wilayah tertinggal yang mulai berkembang.	<ul style="list-style-type: none"> - Percepatan Penanggulangan kemiskinan terintegrasi dan Terpadu (PIK PAKET - Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
2030	<ul style="list-style-type: none"> - Keberlanjutan wirausaha - Optimalisasi teknologi informasi - Penguatan layanan dasar - Pelatihan vokasi untuk pasar kerja regional/nasional - Mendorong kepemilikan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah melalui program 3 juta rumah 	Pusat ekonomi dan pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - Percepatan Penanggulangan kemiskinan terintegrasi dan Terpadu (PIK PAKET - Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Sumber : Analisis Tim Penyusun RPJMD, 2025

Misi 2 : Membangun Manusia yang Unggul dan Inklusif

Tujuan : Meningkatkan kualitas manusia yang cerdas dan sehat

Sasaran : 1. Meningkatnya mutu pendidikan

2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Arah Kebijakan : Meningkatkan mutu pendidikan, derajat kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan lembaga terkait lainnya, dengan dukungan kebijakan yang mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk memastikan peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan

Tabel 3.8
Perumusan Strategi RPJMD Misi 2

Tahapan Pertahun	Optimalisasi Sumber Daya	Fokus Kewilayahan	Program Prioritas Daerah
2026	<ul style="list-style-type: none"> - Pemetaan Kebutuhan pendidikan dan Kesehatan dengan wilayah akses yang rendah - Peningkatan akses layanan dasar sekolah, puskesmas dan posyandu di wilayah tertinggal. - Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan - Pelatihan bagi guru, tenaga kesehatan dan kader posyandu untuk peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan - Peningkatan kesejahteraan kades posyandu, kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD - Subsidi SPP Mahasiswa S1, S2, dan S3 dan terutama Beasiswa 5 orang untuk Mahasiswa Kedokteran; - Pendampingan Makan Bergizi Sehat (MBG) 	<ul style="list-style-type: none"> - Wilayah dengan Anak Putus Sekolah yang tinggi - Wilayah dengan prevalensi tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kualitas dan akses pelayanan pendidikan. - Subsidi SPP Mahasiswa S1, S2, dan S3 dan terutama Beasiswa 5 orang untuk Mahasiswa Kedokteran; - Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD - Peningkatan kualitas dan akses Pelayanan Kesehatan - Peningkatan kesejahteraan kader posyandu;
2027	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan pusat pengembangan bakat dan prestasi yang terintegrasi dengan sistem pendidikan dan pelatihan kepemudaan. - Penguatan Literasi melalui inovasi pelayanan perpustakaan yang terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi. - Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk SD/MI dan SMP/MTs - Perbaikan tata kelola musabab tilawatil qur'an dan umroh serta peningkatan insentif bagi pegawai sara dan guru mengaji; - Akselerasi Penanganan Stunting 	<ul style="list-style-type: none"> - Wilayah prioritas intervensi pendidikan - Wilayah Prioritas Kesehatan (Desa dengan rasio tenaga kesehatan rendah, pravelensi stunting 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Akademi Sepak Bola Ramang; - Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk SD/MI dan SMP/MTs; - Perbaikan tata kelola musabab tilawatil qur'an dan umroh serta peningkatan insentif bagi pegawai sara dan guru mengaji; - Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan perempuan;

Tahapan Pertahun	Optimalisasi Sumber Daya	Fokus Kewilayahan	Program Prioritas Daerah
2028	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan wajib belajar tiga belas tahun melalui jalur pendidikan formal, Non Formal dan informal - Peningkatan aksesibilitas pendidikan tinggi melalui subsidi pendidikan, beasiswa dan kemitraan dengan perguruan tinggi. 	Wilayah prioritas intervensi pendidikan	- Peningkatan Kualitas dan akses pelayanan pendidikan.
2029	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan layanan kesehatan primer dan rujukan, termasuk standarisasi dan pemerataan tenaga kesehatan hingga tingkat desa melalui pendekatan spasial. - Penguatan sistem layanan kesehatan masyarakat (UKM) dan kesehatan perorangan (UKP) berbasis data epidemiologis dan kebutuhan wilayah 	Wilayah prioritas intervensi Kesehatan rendah, pravelensi stunting	- Peningkatan kualitas dan akses Pelayanan Kesehatan
2030	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui kolaborasi lintas sektor dan penguatan kelembagaan sosial di tingkat komunitas - 	- Wilayah Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Akademi Sepak Bola Ramang; - Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan perempuan;

Sumber : Analisis Tim Penyusun RPJMD, 2025

Misi 3 : Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur Wilayah Yang Berketahanan Iklim

Tujuan : Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat

Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah
2. Menurunnya Emisi GRK
3. Meningkatnya Kualitas Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Arah Kebijakan : Meningkatkan kualitas infrastruktur berkelanjutan dan ketahanan wilayah terhadap bencana melalui perencanaan terpadu berbasis risiko, optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, penguatan kapasitas sumber daya manusia dengan penerapan teknologi inovatif, penguatan sistem peringatan dini, serta perluasan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat guna membangun infrastruktur yang tangguh, ramah lingkungan, dan adaptif terhadap perubahan iklim serta risiko bencana

Tabel 3.9
Perumusan Strategi RPJMD Misi 3

Tahapan Pertahun	Optimalisasi Sumber Daya	Fokus Kewilayahan	Program Prioritas Daerah
2026	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas dan konektivitas infrastruktur dasar (jalan, jembatan, air bersih, sanitasi) untuk mendukung pemerataan pembangunan dan akses ekonomi. - Penguatan infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang ramah lingkungan guna meningkatkan ketahanan pangan dan efisiensi air. - Kajian lingkungan awal (AMDAL) untuk Kawasan Industri dan inisiasi program pengadaan lahan secara berkelanjutan untuk KIBAR 	<p>Wilayah rural dengan infrastruktur terbatas, resiko bencana banjir dan wilayah potensi meningkatkan pendapatan masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Infrastruktur Jalan - Peningkatan Infrastruktur Irigasi - Peningkatan Infrastruktur air Bersih
2027	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas dan konektivitas infrastruktur dasar (jalan, jembatan, air bersih, sanitasi) untuk mendukung pemerataan pembangunan dan akses ekonomi. - Penguatan infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang ramah lingkungan guna meningkatkan ketahanan pangan dan efisiensi air. - Pengembangan Pengembangan Ring Road Colliq Pujie Kota Barru, sebagai simpul konektivitas antarwilayah di Kabupaten Barru. Integrasi moda transportasi darat, pusat kulineran dimana Ring Road Colliq Pujie akan menjadi etalase kuliner khas Barru, tempat UMKM lokal berkembang, selain itu ring road ini juga akan terkoneksi dengan potensi destinasi bahari, serta ikon budaya yang dimiliki Barru, 	<ul style="list-style-type: none"> - Wilayah rural dengan infrastruktur terbatas, resiko bencana banjir dan wilayah potensi meningkatkan pendapatan masyarakat - Ring Road Colliq Pujie Kota Barru wilayah Kecamatan Tanete Rilau- Kecamatan Barru (Desa GAressi, Kelurahan Coppo, Kelurahan SUMPANG Binangae, Kelurahan Mangempang, Kelurahan Tuwung) 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Infrastruktur Jalan - Peningkatan Infrastruktur Irigasi - Peningkatan Infrastruktur air Bersih
2028	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan sistem transportasi antarwilayah yang berkelanjutan dan adaptif terhadap risiko perubahan iklim. - Pengembangan sistem tata ruang yang konsisten melalui penegakan pemanfaatan ruang dan pengendalian bangunan berbasis mitigasi risiko bencana. - Pengembangan Pengembangan Ring Road 	<ul style="list-style-type: none"> - Wilayah rural dengan infrastruktur terbatas, resiko bencana banjir dan wilayah potensi meningkatkan pendapatan masyarakat - Ring Road Colliq Pujie Kota Barru wilayah Kecamatan Tanete Rilau- Kecamatan Barru (Desa GAressi, 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Infrastruktur Jalan - Peningkatan Infrastruktur Irigasi - Peningkatan Infrastruktur air Bersih

Tahapan Pertahun	Optimalisasi Sumber Daya	Fokus Kewilayahan	Program Prioritas Daerah
	<p>Collieq Pujie Kota Barru, sebagai simpul konektivitas antarwilayah di Kabupaten Barru. Integrasi moda transportasi darat, pusat kulineran dimana Ring Road Collieq Pujie akan menjadi etalase kuliner khas Barru, tempat UMKM lokal berkembang, selain itu ring road ini juga akan terkoneksi dengan potensi destinasi bahari, serta ikon budaya yang dimiliki Barru</p>	<p>Kelurahan Coppo, Kelurahan Sumpang Binangae, Kelurahan Mangempang, Kelurahan Tuwung)</p>	
2029	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan sistem transportasi antarwilayah yang berkelanjutan dan adaptif terhadap risiko perubahan iklim. - Pengembangan sistem tata ruang yang konsisten melalui penegakan pemanfaatan ruang dan pengendalian bangunan berbasis mitigasi risiko bencana. - Pengembangan Pengembangan Ring Road Collieq Pujie Kota Barru, sebagai simpul konektivitas antarwilayah di Kabupaten Barru. Integrasi moda transportasi darat, pusat kulineran dimana Ring Road Collieq Pujie akan menjadi etalase kuliner khas Barru, tempat UMKM lokal berkembang, selain itu ring road ini juga akan terkoneksi dengan potensi destinasi bahari, serta ikon budaya yang dimiliki Barru 	<ul style="list-style-type: none"> - Wilayah rural dengan infrastruktur terbatas, resiko bencana banjir dan wilayah potensi meningkatkan pendapatan masyarakat - Ring Road Collieq Pujie Kota Barru wilayah Kecamatan Tanete Rilau- Kecamatan Barru (Desa GAressi, Kelurahan Coppo, Kelurahan Sumpang Binangae, Kelurahan Mangempang, Kelurahan Tuwung) 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Infrastruktur Jalan - Peningkatan Infrastruktur Irigasi - Peningkatan Infrastruktur air Bersih
2030	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurangan emisi karbon melalui peningkatan pengelolaan lingkungan hidup, energi bersih, dan teknologi hijau. - Penguatan sistem mitigasi dan adaptasi bencana melalui pelatihan, modernisasi peralatan, sistem peringatan dini, serta partisipasi aktif masyarakat. 	<p>Wilayah rural dengan infrastruktur terbatas, resiko bencana banjir dan wilayah potensi meningkatkan pendapatan masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Infrastruktur Jalan - Peningkatan Infrastruktur Irigasi - Peningkatan Infrastruktur air Bersih

Sumber : Analisis Tim Penyusun RPJMD, 2025

Misi 4 : Meningkatkan Good Governance yang Bernafaskan Keagamaan

Tujuan : Meningkatnya Integritas Tata Kelola Pemerintahan

Sasaran : Meningkatnya kualitas birokrasi yang responsif,

adaptif, kolaboratif

Arah Kebijakan : Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi melalui inovasi pelayanan publik yang cepat, mudah, dan transparan, dengan dukungan pengembangan sumber daya manusia yang kompeten serta berbasis hasil penelitian.

Tabel 3.10
Perumusan Strategi RPJMD Misi 4

Tahapan Pertahun	Optimalisasi Sumber Daya	Fokus Kewilayahan	Program Prioritas Daerah
2026	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan SPIP dan SAKIP, serta penerapan E-Government - Peningkatan kapasitas dan profesionalisme ASN melalui implementasi merit system, pelatihan berkelanjutan, digitalisasi manajemen kinerja, dan pembentukan budaya kerja yang adaptif serta bernafaskan keagamaan - Penguatan kolaborasi riset dan kebijakan publik bersama akademisi, lembaga riset - Digitalisasi pelayanan desa tahap I (70% Desa sudah pelayanan berbasis digital) - Peningkatan kapasitas kelembagaan keagamaan dan organisasi masyarakat untuk mendukung keharmonisan sosial, toleransi antarumat, serta keterlibatan dalam pelayanan publik - Pengarahan program kegiatan CSR swasta agar mendukung pembangunan prioritas daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> - Wilayah dengan indeks pelayanan rendah, digitalisasi minim 	<ul style="list-style-type: none"> - Penerapan dan Pengembangan Pemerintahan yang berbasis elektornik (SPBE) - merit system ASN; - Digitalisasi Desa; - Perbaikan Tata Kelola dan peningkatan TPP ASN termasuk TPP bagi guru bersertifikasi
2027	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan SPIP dan SAKIP, serta penerapan E-Government - Peningkatan kapasitas dan profesionalisme ASN melalui implementasi merit system, pelatihan berkelanjutan, digitalisasi manajemen kinerja, dan pembentukan budaya kerja yang adaptif serta bernafaskan keagamaan - Penguatan kolaborasi riset dan kebijakan publik bersama akademisi, lembaga riset - Digitalisasi pelayanan desa II (90% Desa sudah pelayanan berbasis digital) - Peningkatan kapasitas kelembagaan keagamaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Wilayah dengan indeks pelayanan rendah, digitalisasi minim 	<ul style="list-style-type: none"> - Penerapan dan Pengembangan Pemerintahan yang berbasis elektornik (SPBE) - merit system ASN; - Digitalisasi Desa;

	<p>dan organisasi masyarakat untuk mendukung keharmonisan sosial, toleransi antarumat, serta keterlibatan dalam pelayanan publik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lanjutan program kegiatan CSR swasta agar mendukung pembangunan prioritas daerah. 		
2028	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan SPIP dan SAKIP, serta penerapan E-Government - Peningkatan Manajemen Aset Daerah melalui pengadaan gudang pengelola aset - Digitalisasi pelayanan desa secara keseluruhan - Peningkatan kapasitas kelembagaan keagamaan dan organisasi masyarakat untuk mendukung keharmonisan sosial, toleransi antarumat, serta keterlibatan dalam pelayanan publik 	<ul style="list-style-type: none"> - Wilayah dengan indeks pelayanan rendah, digitalisasi minim 	<ul style="list-style-type: none"> - Penerapan dan Pengembangan Pemerintahan yang berbasis elektornik (SPBE) - merit system ASN; - Digitalisasi Desa; - Perbaikan Tata Kelola dan peningkatan TPP ASN termasuk TPP bagi guru bersertifikasi
2029	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan SPIP dan SAKIP, serta penerapan E-Government - Peningkatan kapasitas dan profesionalisme ASN melalui implementasi merit system, pelatihan berkelanjutan, digitalisasi manajemen kinerja, dan pembentukan budaya kerja yang adaptif serta bernafaskan keagamaan - Penguatan kolaborasi riset dan kebijakan publik bersama akademisi, lembaga riset - Monitoring dan evaluasi kinerja Digitalisasi desa - Peningkatan kapasitas kelembagaan keagamaan dan organisasi masyarakat untuk mendukung keharmonisan sosial, toleransi antarumat, serta keterlibatan dalam pelayanan publik 	<ul style="list-style-type: none"> - Wilayah dengan indeks pelayanan rendah, digitalisasi minim 	<ul style="list-style-type: none"> - Penerapan dan Pengembangan Pemerintahan yang berbasis elektornik (SPBE); - merit system ASN;
2030	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan SPIP dan SAKIP, serta penerapan E-Government - Peningkatan kapasitas dan profesionalisme ASN melalui implementasi merit system, pelatihan berkelanjutan, digitalisasi manajemen kinerja, dan pembentukan budaya kerja yang adaptif serta bernafaskan keagamaan - Penguatan kolaborasi riset dan kebijakan publik bersama akademisi, 	<ul style="list-style-type: none"> - Wilayah dengan indeks pelayanan rendah, digitalisasi minim 	<ul style="list-style-type: none"> - Penerapan dan Pengembangan Pemerintahan yang berbasis elektornik (SPBE) - merit system ASN;

	lembaga riset - Monitoring dan evaluasi kinerja Digitalisasi desa - Peningkatan kapasitas kelembagaan keagamaan dan organisasi masyarakat untuk mendukung keharmonisan sosial, toleransi antarumat, serta keterlibatan dalam pelayanan publik		
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Sumber : Analisis Tim Penyusun RPJMD, 2025

Misi 5 : Meningkatkan Produktivitas perekonomian yang Berdaya Saing

Tujuan : Meningkatnya Produktifitas Ekonomi Daerah

- Sasaran :
1. Meningkatnya nilai tambah ekonomi daerah
 2. Meningkatnya daya saing industri pengolahan
 3. Meningkatnya kemandirian fiskal daerah

Arah Kebijakan : Mengembangkan kawasan industri yang terintegrasi dengan sektor pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, dan pariwisata, serta memperkuat kapasitas UMKM, menciptakan iklim investasi yang kondusif, dan meningkatkan kemandirian fiskal daerah

Tabel 3.11
Perumusan Strategi RPJMD Misi 5

Tahapan Pertahun	Optimalisasi Sumber Daya	Fokus Kewilayahan	Program Prioritas Daerah
2026	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan master plan kawasan industri berbasis data spasial dan potensi ekonomi lokal. - Kolaborasi lintas sektor dengan pemerintah pusat, daerah, dan swasta untuk menyusun regulasi insentif dan tata ruang yang mendukung. - Penguatan UMKM dan koperasi terutama koperasi merah putih sebagai tulang punggung ekonomi lokal melalui pembiayaan, pendampingan, dan teknologi. - Penyusunan rencana pengelolaan kawasan dan membangun kerjasama dengan Pihak ketiga untuk pengelola Kawasan Industri. - peningkatan pengawasan, pengendalian dan monitoring yang ketat terhadap pemungutan pajak dan retribusi daerah; 	<ul style="list-style-type: none"> - Kawasan Industri Barru (KIBAR) dan sekitarnya sebagai lokomotif transformasi ekonomi industri. - Wilayah agropolitan dan pesisir dengan potensi pertanian, perikanan, dan peternakan untuk pengembangan hilirisasi dan agroteknologi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan dan pengembangan kawasan industri Barru (KIBAR) - Perbaikan tata kelola dan subsidi pupuk - Pembangunan dan pengembangan agroteknologi, agropolitan serta hilirisasi pada sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan. - SPBU Nelayan

Tahapan Pertahun	Optimalisasi Sumber Daya	Fokus Kewilayahan	Program Prioritas Daerah
	<ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi potensi sumber-sumber pajak daerah melalui perluasan dan pemutakhiran basis pajak, peningkatan kepatuhan pajak serta digitalisasi sistem perpajakan daerah; 		
2027	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan struktur ekonomi daerah melalui hilirisasi komoditas unggulan berbasis pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan - Pengembangan kawasan industri yang terintegrasi secara spasial dengan sektor-sektor primer dan pariwisata lokal - Akselerasi program promosi investasi nasional dan internasional. - Penyusunan skema insentif fiskal dan non-fiskal bagi investor, termasuk kemudahan perizinan dan kepabeanan. - Penguatan branding kawasan Agrowosata Gurilla - Pengelolaan Aset daerah yang tidak produktif melalui sewa dan kerjasama pemanfaatan (KSP) serta Transparansi dalam pengelolaan aset dan pencatatan nilai aset; 	<ul style="list-style-type: none"> - Kawasan Industri Barru (KIBAR) dan sekitarnya sebagai lokomotif transformasi ekonomi industri. - Wilayah agropolitan dan pesisir dengan potensi pertanian, perikanan, dan peternakan untuk pengembangan hilirisasi dan agroteknologi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan dan pengembangan kawasan industri Barru (KIBAR) - Perbaikan tata kelola dan subsidi pupuk - Pembangunan dan pengembangan agroteknologi, agropolitan serta hilirisasi pada sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan. - SPBU Nelayan
2028	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan rantai pasok lokal dan regional melalui integrasi dengan pelabuhan, kawasan pergudangan, dan pelaku UMKM. - Implementasi penuh sistem digitalisasi kawasan industri Barru : manajemen utilitas, sistem keamanan, layanan logistik, dan administrasi satu pintu. - Peningkatan kapasitas SDM industri melalui kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga vokasi. - Pembangunan ekosistem pariwisata daerah berbasis budaya dan potensi lokal dengan tata kelola destinasi profesional. - revitalisasi BUMD agar lebih profesional dan profit-oriented dengan berfokus pada sektor-sektor strategis 	<p>Sentra UMKM dan desa wisata sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata. Wilayah dengan potensi investasi strategis dan kebutuhan penguatan fiskal daerah (wilayah dengan potensi pajak dan retribusi tinggi).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Pariwisata Gurilla

Tahapan Pertahun	Optimalisasi Sumber Daya	Fokus Kewilayahan	Program Prioritas Daerah
2029	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan ekosistem pariwisata daerah berbasis budaya dan potensi lokal dengan tata kelola destinasi profesional. - Penataan sistem distribusi dan pasar daerah untuk mendukung stabilitas harga dan kelancaran logistik. - Penguatan ekonomi biru melalui pengelolaan sumber daya kelautan dan pesisir secara berkelanjutan, inovatif, dan berbasis komunitas. - revitalisasi BUMD agar lebih profesional dan profit-oriented dengan berfokus pada sektor-sektor strategis 	Sentra UMKM dan desa wisata sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata. Wilayah dengan potensi investasi strategis dan kebutuhan penguatan fiskal daerah (wilayah dengan potensi pajak dan retribusi tinggi).	- Pembangunan Pariwisata Gurilla,
2030	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan kebijakan fiskal daerah melalui intensifikasi pajak, optimalisasi BUMD, dan promosi investasi daerah. - Evaluasi menyeluruh terhadap capaian kinerja kawasan industri barru dan kawasan agrowisata gurilla, termasuk dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan. - Penyusunan roadmap jangka panjang (2031-2045) untuk perluasan kawasan dan diversifikasi sektor industri. - Ekspansi jaringan kerja sama internasional, promosi kawasan sebagai destinasi investasi utama di Asia Tenggara. 	Kecamatan Barru	Penguatan Kapasitas UMKM dan Fasilitasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis lokal.

Sumber : Analisis Tim Penyusun RPJMD, 2025

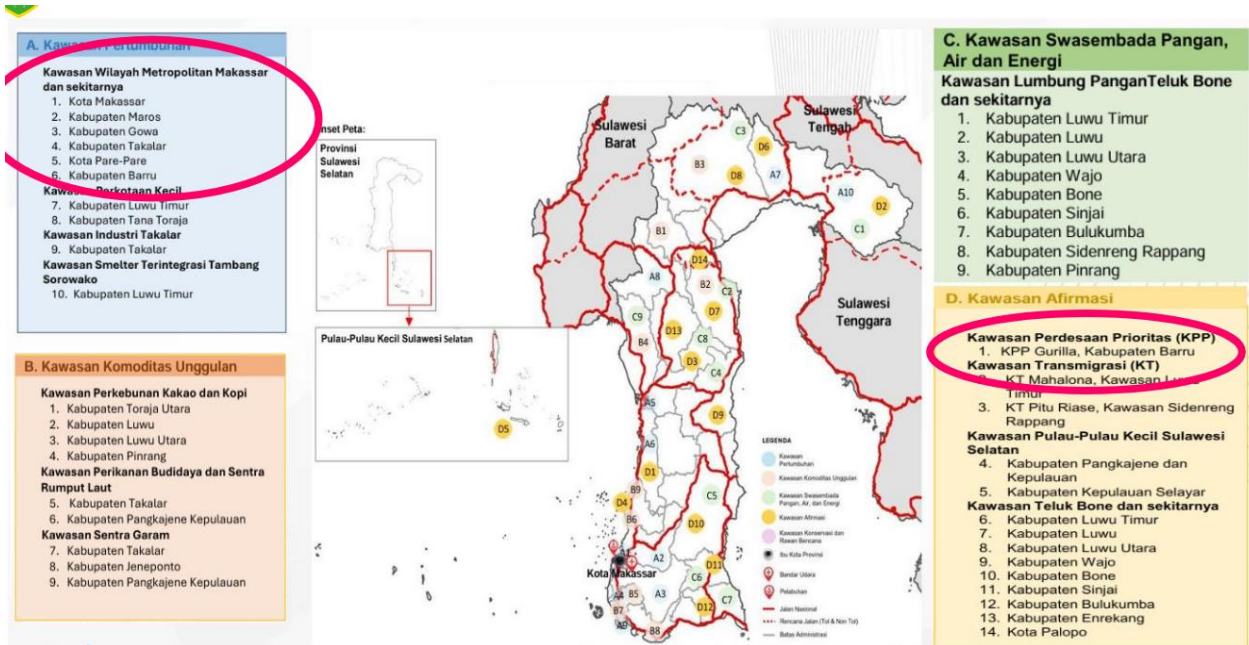
3.5. Arah Pembangunan Kewilayahan

1) Arah Pembangunan Kewilayahan Nasional

RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) adalah dokumen perencanaan pembangunan yang memuat arah dan strategi pembangunan nasional Indonesia dalam jangka waktu lima tahun. RPJMN ini mengarahkan kebijakan dan program pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan merata, dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi wilayah di setiap provinsi, termasuk Sulawesi Selatan, serta kabupaten-kabupaten di dalamnya seperti Kabupaten Barru. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025 – 2029 untuk arah pembangunan kewilayahan Kabupaten Barru diuraikan seperti gambar berikut ini :

Gambar 3.9

Arah Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Barru yang termuat dalam RPJMN Tahun 2025 - 2029



Sumber : Pepres 12 tahun 2025, Bappenas

2) Arah Pembangunan Kewilayahan Provinsi Sulawesi Selatan

Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi sebagai alat operasionalisasi RTRWN yang berfungsi sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan mengarahkan pengembangan wilayah Pulau Sulawesi untuk memperkuat peran Sulawesi sebagai salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan Internasional dan pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia, pengembangan industri berbasis logistik, lumbung pangan nasional, pusat pengembangan ekonomi kelautan, pusat perkebunan kakao berbasis bisnis, pusat pariwisata, serta pusat pertambangan minyak dan gas bumi, mineral, dan panas bumi, dengan mempertimbangkan pendekatan mitigasi dan adaptasi bencana. Sedangkan arahan kebijakan nasional dalam Visi Indonesia 2045 secara umum mengarahkan pengembangan wilayah Sulawesi sebagai basis industri pangan dan gerbang Kawasan Timur Indonesia (KTI). Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Pulau Sulawesi berpotensi besar baik sebagai penggerak ekonomi maupun sumber keanekaragaman hayati Indonesia yang didukung oleh keunggulan sector pertanian, perikanan, pariwisata dan pertambangan.

Pengembangan sektor pertanian diarahkan untuk mewujudkan lumbung pangan padi nasional di bagian Selatan Pulau Sulawesi dan lumbung pangan jagung nasional di bagian utara Pulau Sulawesi serta pusat perkebunan kakao berbasis bisnis di bagian tengah Pulau

Sulawesi. Peningkatan peran di sektor jasa didorong dengan pengembangan kawasan metropolitan di Kawasan Perkotaan Mamminasata dan Kendari serta pengembangan akses dan infrastruktur transportasi untuk perdagangan dari Manado-Bitung dengan luar Indonesia. Pengembangan Kawasan Pariwisata Bunaken dan Wakatobi serta Tana Toraja diharapkan dapat mendorong peningkatan sektor jasa, sedangkan peningkatan sektor industri pengolahan didorong dengan industri pengolahan pada beberapa kawasan industri antara lain Kawasan Industri Bantaeng, Kawasan Industri Takalar dan Kawasan Industri Morowali dan industri jasa hasil perkebunan kakao dan pengembangan industri barang dari rotan serta pembangunan industri pengolahan logam dasar dan non logam dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Sulawesi Selatan sebagai bagian dari wilayah Pulau Sulawesi diarahkan pembangunannya sebagai lumbung pangan padi nasional dan pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari dan ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran yang didukung oleh keterkaitan jaringan antar wilayah dan memperhatikan kelestarian kawasan berfungsi lindung yang bervegetasi hutan tetap. Untuk arahan pengembangan wilayah Kabupaten Barru berdasarkan rencana tata ruang wilayah nasional digambarkan sebagai berikut.

Tabel 3.12

Posisi Kabupaten Barru pada Arah Pembangunan Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029

NO	KAN/ KOTA	ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN		
		KAWASAN PEMBANGUNAN DALAM RPJMN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
1	Barru	Kawasan Pertumbuhan Kawasan Wilayah Metropolitan Makassar DSK	Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan	Penguatan konektivitas dan pengembangan transportasi perkotaan yang berkelanjutan yang terintegrasi dengan TOD melalui dukungan penyelenggaraan kereta api lintas Makassar-Parepare dan pembangunan dan pengembangan stasiun KA, serta dukungan pengembangan terminal tipe A dan pengembangan terminal Tipe B, dukungan peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan pengumpul serta pengembangan pelabuhan pengumpan regional termasuk pengembangan dermaga pendukung bandar udara perairan (seaplane) dan dukungan pembangunan jalan tol lintas MakassarParepare-Palopo, peningkatan dan preservasi jalan daerah serta pemenuhan fasilitas keselamatan jalan provinsi dan peningkatan keselamatan angkutan darat

NO	KAN/ KOTA	ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN		
		KAWASAN PEMBANGUNAN DALAM RPJMN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				Penyediaan perumahan dan permukiman serta pemenuhan pelayanan dasar di wilayah perkotaan melalui penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman, penanganan permukiman kumuh, peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi aman melalui pembangunan SPAM Regional Ajatappareng, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan sanitasi regional, penanganan sampah sistem regional yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan berbasis 3R, dukungan fasilitasi peningkatan konektivitas ketenagalistrikan, dukungan dan fasilitasi pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM
			Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi	Penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan melalui pengembangan unit pelayanan kesehatan berbasis digital; peningkatan kesediaan farmasi dan alat kesehatan, peningkatan pendayagunaan SDM Kesehatan, serta peningkatan pemanfaatan, inovasi teknologi dan pelayanan kesehatan digital.
				Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak melalui: penuntasan TBC, pengendalian penyakit HIV/AIDS, pengendalian penyakit malaria, pengendalian penyakit kusta, pengendalian penyakit rabies, penguatan intervensi spesifik stunting dan peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi perempuan
				Pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan, perluasan akses pendidikan sektor strategis, penguatan pendidikan tinggi dan pengembangan bidang STEAM serta penguatan pendidikan vokasi dan produktivitas tenaga kerja, melalui pengembangan sarana dan prasarana sekolah menengah berbasis teknologi, penerapan sistem pembelajaran SMK berbasis industri dan pelatihan vokasi di sektor strategis, penguatan sumber daya manusia dan peningkatan peran dalam industri yang berbasis sektor unggulan daerah, dan fasilitasi pemagangan industri di dalam dan luar negeri.
			Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan	Perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif, melalui pengembangan tata kelola registrasi Regrosek, dukungan penguatan JKN dan penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran
			Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal	Penguatan ekosistem budaya berbasis urban heritage, pemanfaatan cagar budaya dan revitalisasi budaya bahari serta pengembangan teknologi tradisional melalui: pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah berkelas internasional, pengelolaan terpadu cagar budaya di kawasan pemajuan kebudayaan, peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan; dan pelestarian cagar budaya, nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal berbasis urban heritage.

NO	KAN/ KOTA	ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN		
		KAWASAN PEMBANGUNAN DALAM RPJMN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
			Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi	Peningkatan ketahanan dan penanganan bencana serta penguatan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pengendalian risiko bencana dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan manajemen risiko dan pengendalian banjir di perkotaan, pengendalian daya rusak air, dan peningkatan infrastruktur berketahanan bencana dan layanan peringatan dini bencana.
			Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	Pengembangan nilai tambah dan kompleksitas industri, termasuk hilirisasi industri berbasis sumber daya alam mineral, pertanian dan perikanan berikut pengembangan teknologi dan elisiensi rantai distribusinya, melalui pengembangan industri produk olahan hasil laut, penguatan tata kelola dan pengembangan industri hilir, jaminan ketersediaan bahan baku, peningkatan adaptasi teknologi, riset inovasi, dan kapasitas tenaga kerja di industri rumput laut dan komoditas unggulan lainnya; dan peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi industri padat karya terampil dan pengembangan industri medium-high technology
				Pengembangan kawasan pertanian dan perikanan, melalui: peningkatan produktivitas lahan pertanian serta rehabilitasi dan dukungan peningkatan jaringan irigasi, pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan; fasilitasi stabilisasi pasokan dan harga pangan; pengelolaan sarana prasarana produksi perikanan tangkap dan budidaya; penguatan logistik, pemasaran dan sistem rantai dingin produk perikanan; peningkatan daya saing sumber daya manusia pembudidaya dan penyedia jasa logistik, kelembagaan, usaha kelautan dan perikanan; fasilitasi kerja sama perluasan pasar, pengembangan koperasi, serta rantai pasok ekspor produk perikanan; dan dukungan pengembangan pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan.
				KPU - 09 - Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food) melalui peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan, penguatan kapasitas SDM, serta penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan nelayan
			Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing	Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan untuk mendorong perkotaan yang maju dan menyejahterakan melalui penguatan ekosistem pemangku ekonomi kreatif; penguatan ekosistem film, animasi, video, dan musik; penguatan ekosistem fesyen dan kriya; penguatan ekosistem aplikasi dan gim; dan penguatan ekosistem kuliner
			Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital	Peningkatan kapasitas dan tata kelola perkotaan untuk mencapai transparansi, akuntabilitas, cerdas dan terpadu, serta pembentukan kelembagaan (atau forum) pengelola WM Makassar
				Fasilitasi dan pembinaan kerja sama antar daerah untuk mendorong perdagangan domestik dan antar daerah melalui pembentukan lembaga pengelolaan lintas wilayah (transboundary management) dan lintas pemerintahan (fragmented government) serta penguatan kerja sama multipihak dalam pembiayaan dan pembangunan perkotaan
				Fasilitasi pengembangan data berbasis kawasan fungsional sebagai basis perencanaan untuk perkotaan

NO	KAN/ KOTA	ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN		
		KAWASAN PEMBANGUNAN DALAM RPJMN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				Fasilitasi dan pembinaan kerja sama antar daerah untuk mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan serta penguatan kerja sama multipihak dalam pembiayaan dan pembangunan perkotaan melalui penguatan tata kelola dan teknologi pemerintah digital, pengembangan kompetensi dan budaya digital aparatur sipil negara, transformasi digital layanan publik prioritas, serta penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data pemerintah
				Peningkatan tata kelola pelayanan publik yang efektif dan akuntabel melalui peningkatan kualitas dan tata kelola pelayanan publik, penguatan manajemen kinerja pembangunan, serta sinergi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan
		Kawasan Afirmasi Kawasan Perdesaan Prioritas Gurilla	Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan	Peningkatan Kawasan Perdesaan Prioritas Agrowisata Gurilla, melalui penyediaan layanan dasar skala desa dan perdesaan, peningkatan aksesibilitas desa, pengembangan dan diversifikasi ekonomi lokal, pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi lokal, fasilitasi dan pembinaan peningkatan kapasitas tata kelola desa berbasis digitalisasi dan peningkatan ketahanan sosial dan lingkungan perdesaan

Sumber : Bappelitbangda Provinsi Sulsel, Tahun 2025

Arahan kebijakan pembangunan Sulawesi Selatan dalam rangka pembangunan Wilayah Pulau Sulawesi diarahkan untuk memperkuat peran Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagai simpul transportasi dan pusat perdagangan dan jasa, sebagai lumbung pangan nasional, dan pusat industri pengolahan komoditas unggulan sumber daya alam.

3) Arah Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Barru

Berdasarkan Revisi RTRW Kabupaten Barru tahun 2021-2041, untuk pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan, diuraikan sebagai berikut :

- a. Pusat Pelayanan Kawasan Mangkoso di Kecamatan Soppeng Riaja;
- b. Pusat Pelayanan Kawasan Pekkae di Kecamatan Tanete Rilau;
- c. Pusat Pelayanan Kawasan Palanro di Kecamatan Mallusetasi;
- d. Pusat Pelayanan Kawasan Takkalasi di Kecamatan Balusu;
- e. Pusat Pelayanan Kawasan Ralla di Kecamatan Tanete Riaja; dan
- f. Pusat Pelayanan Kawasan Doi-Doi di Kecamatan Pujananting.

Adapun untuk Pusat Pelayanan Lingkungan terdiri atas:

- a. Pusat Pelayanan Lingkungan Tompo di Kecamatan Barru;
- b. Pusat Pelayanan Lingkungan Palakka di Kecamatan Barru;
- c. Pusat Pelayanan Lingkungan Lipukasi di Kecamatan Tanete Rilau;
- d. Pusat Pelayanan Lingkungan Tanete di Kecamatan Tanete Rilau;

- e. Pusat Pelayanan Lingkungan Pancana di Kecamatan Tanete Rilau;
- f. Pusat Pelayanan Lingkungan Cilellang di Kecamatan Mallusetasi;
- g. Pusat Pelayanan Lingkungan Mallawa di Kecamatan Mallusetasi;
- h. Pusat Pelayanan Lingkungan Kupa di Kecamatan Mallusetasi;
- i. Pusat Pelayanan Lingkungan Bojo Baru di Kecamatan Mallusetasi;
- j. Pusat Pelayanan Madello di Kecamatan Balusu;
- k. Pusat Pelayanan Lampoko di Kecamatan Balusu;
- l. Pusat Pelayanan Kamiri di Kecamatan Balusu;
- m. Pusat Pelayanan Kiru-Kiru di Kecamatan Soppeng Riaja;
- n. Pusat Pelayanan Siddo di Kecamatan Soppeng Riaja;
- o. Pusat Pelayanan Lingkungan Ajakkang di Kecamatan Soppeng Riaja asi;
- p. Pusat Pelayanan Lingkungan Lompo Tengah di Kecamatan Tanete Riaja;
- q. Pusat Pelayanan Lingkungan Harapan di Kecamatan Tanete Riaja;
- r. Pusat Pelayanan Lingkungan Kading di Kecamatan Tanete Riaja;
- s. Pusat Pelayanan Lingkungan Pujananting di Kecamatan Pujananting; dan
- t. Pusat Pelayanan Lingkungan Gattareng di Kecamatan Pujananting.

Pembangunan wilayah pada RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025-2029 diarahkan agar dapat berperan sebagai wadah pelaksanaan visi-misi dan berbagai program prioritas yang ditekankan untuk mendukung pencapaian target di tahun 2029 Kabupaten Barru.

Sebagai upaya mendorong peningkatan pembangunan wilayah, maka RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025-2029 menetapkan highlight intervensi sebagai penjabaran peran pemerintah Kabupaten Barru baik dalam pencapaian visi misi juga dalam pencapaian rencana jangka menengah nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun highlight intervensi

Tabel 3.13

Arah Pembangunan Kabupaten Barru berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 dan RTRW Kabupaten Barru

NOMOR	KECAMATAN	ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN		
		KAWASAN PEMBANGUNAN DALAM RPJMN DAN RPJMD PROV.SULSEL	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 dan RTRW Kabupaten Barru
1	BARRU, MALLUSETASI, SOPPENG RIAJA, TANETE RILAU, BALUSU, TANETE RIAJA DAN PUJANANTING	Kawasan Pertumbuhan Kawasan Wilayah Metropolitan Makassar DSK	Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka;	Keberlanjutan sosial-ekonomi. Intervensi Regsosek di Barru untuk bantuan sosial lebih tepat sasaran. Pelatihan vokasi dan sertifikasi bagi pemuda, lulus sekolah, tenaga kerja informal untuk kesiapan kerja (sektor pariwisata, pertanian, industri kreatif).

NOMOR	KECAMATAN	ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN		
		KAWASAN PEMBANGUNAN DALAM RPJMN DAN RPJMD PROV.SULSEL	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 dan RTRW Kabupaten Barru
				Pengembangan ekonomi lokal. Perkuat UMKM, koperasi dengan akses permodalan, pemasaran, legalisasi, dan digitalisasi. Kembangkan eco-tourism berbasis potensi lokal dan sektor unggulan (pertanian, perikanan).
			Peningkatan kualitas dan akses Pelayanan Kesehatan dan pendidikan;	Penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan melalui pengembangan unit pelayanan kesehatan berbasis digital; peningkatan kesediaan farmasi dan alat kesehatan, peningkatan pendayagunaan SDM Kesehatan, serta peningkatan pemanfaatan, inovasi teknologi dan pelayanan kesehatan digital.
				Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak melalui: penuntasan TBC, pengendalian penyakit HIV/AIDS, pengendalian penyakit malaria, pengendalian penyakit kusta, pengendalian penyakit rabies, penguatan intervensi spesifik stunting dan peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi perempuan
				Pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan, perluasan akses pendidikan sektor strategis, penguatan pendidikan tinggi dan pengembangan bidang STEAM serta penguatan pendidikan vokasi dan produktivitas tenaga kerja, melalui pengembangan sarana dan prasarana sekolah menengah berbasis teknologi, penerapan sistem pembelajaran SMK berbasis industri dan pelatihan vokasi di sektor strategis, penguatan sumber daya manusia dan peningkatan peran dalam industri yang berbasis sektor unggulan daerah, dan fasilitasi pemagangan industri di dalam dan luar negeri.
			Peningkatan kualitas dan kuantitas Infrastruktur;	Peningkatan kualitas dan konektivitas infrastruktur dasar (jalan, jembatan, air bersih, sanitasi) untuk mendukung pemerataan pembangunan dan akses ekonomi pada Wilayah rural dengan infrastruktur terbatas, resiko bencana banjir dan wilayah potensi meningkatkan pendapatan masyarakat
				Pengembangan Ring Road Collieq Pujie Kota Barru , sebagai simpul konektivitas antarwilayah di Kabupaten Barru. Integrasi moda transportasi darat, pusat kulineran dimana Ring Road Collieq Pujie akan menjadi etalase kuliner khas Barru, tempat UMKM lokal berkembang, selain itu ring road ini juga akan terkoneksi dengan potensi destinasi bahari, serta ikon budaya yang dimiliki Barru,

NOMOR	KECAMATAN	ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN		
		KAWASAN PEMBANGUNAN DALAM RPJMN DAN RPJMD PROV.SULSEL	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 dan RTRW Kabupaten Barru
				Penguatan infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang ramah lingkungan guna meningkatkan ketahanan pangan dan efisiensi air, pada Wilayah rural dengan infrastruktur terbatas, resiko bencana banjir dan wilayah potensi meningkatkan pendapatan masyarakat
				Penguatan sistem mitigasi dan adaptasi bencana melalui pelatihan, modernisasi peralatan, sistem peringatan dini, serta partisipasi aktif masyarakat.
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik;	Penguatan SPIP dan SAKIP, serta penerapan E-Government
				Peningkatan kapasitas dan profesionalisme ASN melalui implementasi merit system, pelatihan berkelanjutan, digitalisasi manajemen kinerja, dan pembentukan budaya kerja yang adaptif serta bernafaskan keagamaan
				Penguatan kolaborasi riset dan kebijakan publik bersama akademisi, lembaga riset dan Digitalisasi pelayanan desa
				Peningkatan kapasitas kelembagaan keagamaan dan organisasi masyarakat untuk mendukung keharmonisan sosial, toleransi antarumat, serta keterlibatan dalam pelayanan publik
				Pengarahannya program kegiatan CSR swasta agar mendukung pembangunan prioritas daerah
			Pengembangan Kawasan Industri Barru;	Optimalisasi kawasan industri sesuai skema aglomerasi industri, IKM, dan ekspor berkelanjutan. Sesuai arahan RTRW Zona industri berat/ sedang/ rumah tangga + zona ekonomi strategis → Siapkan infrastruktur dasar & iklim investasi.
				Infrastruktur & Aksesibilitas, Hubungkan kawasan industri dengan jalur Makassar–Parepare railway (operasional hingga Barru) untuk logistik & komuter industri
2	BARRU, MALLUSETASI, SOPPENG RIAJA, TANETE RILAU, BALUSU, TANETE RIAJA DAN PUJANANTING	Kawasan Afirmasi Kawasan Perdesaan Prioritas Gurilla	Pembangunan dan Pengembangan Agroteknologi, agropolitan serta Hilirisasi pada sektor pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan;	Agropolitan terintegrasi, hilirisasi lokal, pasar & fasilitas, SIG, benih unggul, peternakan sapi Bali. Hilirisasi Multi-Komoditas. Dirikan Unit Pengolahan Pangan: bawang, cabe, nenas. Fasilitas produksi daging sapi lokal dan pemasaran pascapanen. Kembangkan olahan ikan/udang tempatan melalui PPI & minapolitan

NOMOR	KECAMATAN	ARAHAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN		
		KAWASAN PEMBANGUNAN DALAM RPJMN DAN RPJMD PROV.SULSEL	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Provinsi, Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029 dan RTRW Kabupaten Barru
				Inovasi Agroteknologi & Standarisasi. Gunakan benih unggul tahan stres, sistem irigasi hemat, automasi pertanian. Terapkan Agro Standar dalam perbenihan, sanitasi, pengemasan, mutu. Penguatan SDM & Lembaga Lokal. Latih petani muda modern (digital, irigasi, panen efisien). Bentuk kelembagaan pengendali agropolitan: petani, penyuluh, dinas.
			Pengembangan Pariwisata Tuntas;	Infrastruktur Aksesibilitas & Amenitas. Kembangkan rute feeder dari stasiun kereta ke destinasi utama. Tingkatkan fasilitas amenities seperti toilet tematik, signage, rest area, jalur pedestrian. Kolaborasi dengan Kemenparekraf & PUPR untuk pendanaan, desain tematik yang sesuai destinasi.
				Optimalkan destinasi alam & desa wisata, festival budaya, transportasi multimoda, SDM, community-based management
			Pemberdayaan dan Penguatan UMKM dan Koperasi	Fungsikan koperasi Merah Putih sebagai hub promosi, distribusi, dan pelatihan digital di setiap desa/kelurahan. Pelatihan Tingkat Lanjut & Inkubasi Bisnis. Launch pelatihan high-touch berupa inkubator bisnis, mentoring, akses legalitas & branding untuk UMKM berpotensi nasional.

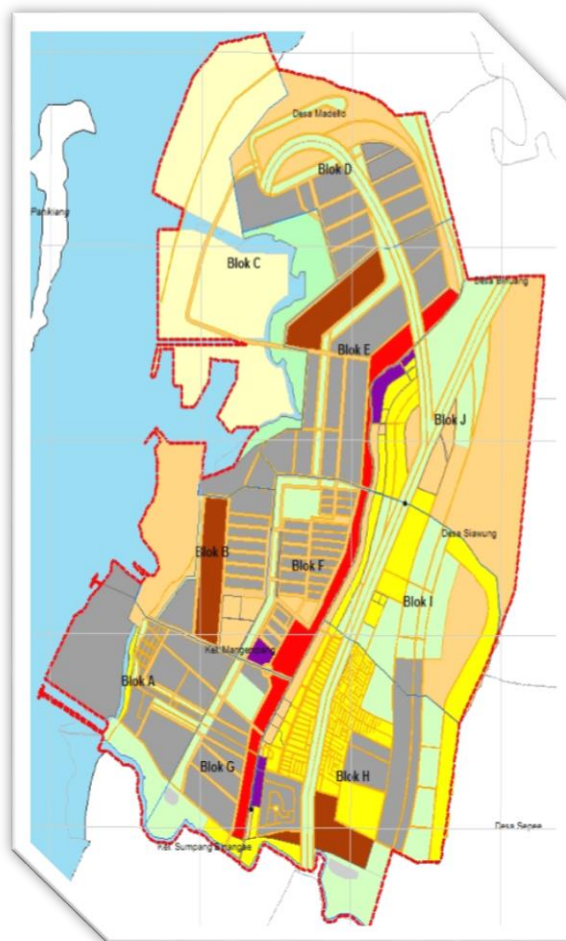
1. Kawasan Industri Barru (KIBAR)

Kabupaten Barru yang terletak strategis di pesisir barat Sulawesi Selatan, memiliki potensi besar sebagai pusat pertumbuhan industri baru di Kawasan Timur Indonesia. Dengan posisi yang menguntungkan di jalur logistik nasional (berada di antara Makassar dan Parepare), serta berada pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI II), sehingga berpeluang besar dalam memperkuat konektivitas nasional dan tol laut nusantara, mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif dan berkelanjutan, menjadi Superhub IKN dan penunjang Wilayah Metropolitan Makassar. Kabupaten Barru memiliki semua elemen strategis : pelabuhan laut, akses kereta api trans-Sulawesi, konektivitas darat yang unggul, serta lahan potensial untuk pengembangan kawasan industri dan logistik.

Lokasi yang strategis yang berada dekat dengan pesisir laut sehingga diharapkan proses distribusi barang ekspor impor lebih

cepat dan efisien. Pada kawasan itu telah tersedianya dukungan infrastruktur pelabuhan laut yang terdiri dari pelabuhan penyeberangan Ferry dan pelabuhan curah yang lokasinya tepat langsung berhadapan dengan lokasi kawasan industri. Pelabuhan laut ini juga diharapkan menjadi penyanggah ibukota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur; selain itu juga tersedia Stasiun Kereta Api yang tepat berdampingan dengan rencana lokasi kawasan industri. Saat ini jalur kereta api sudah terhubung dari Kabupaten Maros hingga Kabupaten Barru, dan terus akan dikembangkan hingga kota Parepare. Dengan demikian, kawasan industri ini berada satu kompleks dengan Pelabuhan Laut dan Stasiun Kereta Api sehingga saling terintegrasi; Tersedianya jaringan listrik PLTU Bawasalo (1x100 MW dan 2x50 MW) yang mendukung pasokan energi ke kawasan industri; Tersedianya pasokan air, baik dari PDAM maupun dari sungai yang hanya berjarak ±1,5 kilometer dari lokasi; Akses ke jalan Nasional Trans Sulawesi yang hanya berjarak sekitar 1 (satu) kilometer; Terdapat perusahaan Pengelola Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang masuk dalam kawasan industri.

Gambar 3.10
Kawasan Industri Barru (KIBAR) Kabupaten Barru



Sumber : RTRW Kabupaten Barru, 2025

2. Kawasan Prioritas Perdesaan Kawasan Agrowisata Gurilla

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa pembangunan kawasan perdesaan merupakan salah satu pendekatan dalam menyelesaikan permasalahan desa dan kawasan perdesaan. Pelaksanaan undang-undang tersebut telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014, sebagaimana telah dirubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan peraturan turunan lainnya. Legalitas dan acuan penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan semakin lengkap dengan diundangkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif sebagaimana termaktub dalam Pasal 83 UU Nomor 6 tahun 2014. Lebih lanjut disebutkan bawa pembangunan kawasan perdesaan meliputi: a). penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota; b). pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan; c). pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan d). pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

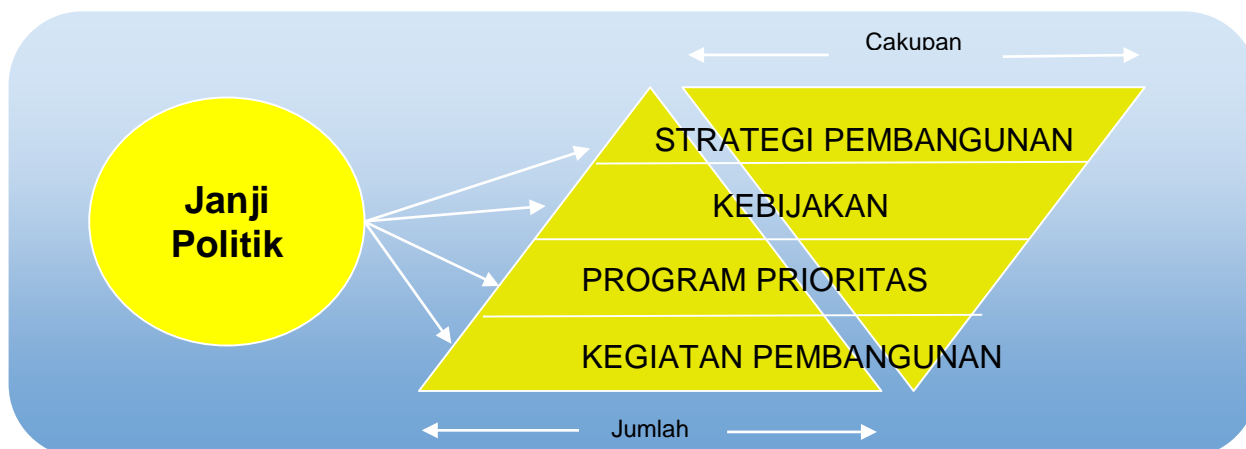
Kabupaten Barru telah menetapkan Kawasan Perdesaan Agrowisata Gurilla melalui Keputusan Bupati Barru Nomor 392/Bappeda/XI/2016 tentang Penetapan Lokasi Pengembangan Kawasan Perdesaan Agrowisata Gurilla Kabupaten Barru. Kawasan pengembangan perdesaan Agrowisata Gurilla ini mencakup wilayah gunung, rimba, lembah, dan laut yang meliputi tujuh desa dalam satu kawasan, yaitu Kecamatan Balusu terdiri dari Desa Binuang, Desa Kamiri, dan Desa Madello, serta Kecamatan Barru terdiri dari Desa Anabanua, Desa Palakka, Desa Galung dan Desa Tompo.

Pengembangan Kawasan Agropolitan Gurilla ini bertujuan untuk mengembangkan agribisnis pertanian peternakan (sapi), tanaman pangan (padi organik) dan terintegrasi dengan kawasan pariwisata yang berwawasan lingkungan guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing, mendayagunakan sumber daya agribisnis kawasan agropolitan Gurilla, meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan, meningkatkan kontribusi dalam pertumbuhan PDRB, melakukan repositioning pemasaran daerah Kabupaten Barru di pasar nasional maupun global sehingga fungsi Kabupaten Barru sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) dan wilayah metropolitan Makassar dapat terwujud sesuai dengan amanat RPJMD Teknokratik Kabupaten Barru Tahun 2025 - 2029.

3.6. Program Pembangunan Daerah

Program prioritas pembangunan daerah adalah program yang secara langsung menopang perwujudan visi misi kepala daerah terpilih sebagaimana direpresentasikan dalam janji kampanye sebagai program unggulan. Berbasis pada analisis konten unsur visi dan misi bupati terpilih dan mengikuti regulasi nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Verifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Jika bunyi janji Bupati dan Wakil Bupati terpilih bersifat sangat mikro dan berada di level output, maka akan diterjemahkan kedalam Kegiatan. Namun, apabila sedikit lebih makro dan berada pada level outcome, maka didefinisikan kedalam program yang kemudian disebut program prioritas. Sedangkan jika jauh lebih makro lagi, dapat diterjemahkan ke dalam Strategi. Pernyataan ini dapat diilustrasikan pada gambar berikut ini

Gambar 3.11
Ilustrasi Janji Bupati dan Wakil Bupati terpilih



Penentuan program prioritas juga memperhatikan poin-poin penting janji politik kepala daerah terpilih. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru terpilih periode RPJMD 2025–2029 mengusung 8 prioritas pembangunan yang terdiri dari 38 program. Adapun 8 Prioritas Pembangunan adalah :

1. Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka;
2. Peningkatan kualitas dan akses Pelayanan Kesehatan dan pendidikan;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas Infrastruktur;
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
5. Pengembangan Kawasan Industri Barru;
6. Pembangunan dan Pengembangan Agroteknologi, agropolitan serta Hilirisasi pada sektor pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan;
7. Pengembangan Pariwisata Tuntas; dan
8. Pemberdayaan dan Penguatan UMKM dan Koperasi

Bupati Kabupaten Barru Tahun 2026-2030 menerjemahkan Visi dan Misinya melalui prioritas pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2025–2029 dan program prioritas yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.14

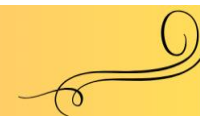
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Barru 2026-2030

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN		
BARRU BERKEADILAN, BARRU MAJU BERKELANJUTAN, BARRU SEJAHTERA LEBIH CEPAT	Misi 1: Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka	T.1 Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat				Indeks Gini			
				S1.1 Berkurangnya Kemiskinan Masyarakat		Angka Kemiskinan			
						Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase rumah tangga yang mengakses air minum layak	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	DINAS PUTR PERKIM
						Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase rumah tangga yang mengakses layanan pengolahan air limbah domestik layak	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	DINAS PUTR PERKIM
						Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	DINAS PUTR PERKIM
						Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah	persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kab/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	DINAS PUTR PERKIM
						Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/ kota yang ditangani	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PUTR PERKIM
						Meningkatnya Kualitas Permukiman	Persentase penurunan Jumlah rumah tidak layak huni	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	DINAS PUTR PERKIM
						Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan pemberdayaan sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	DINAS SOSIAL DAN P3A

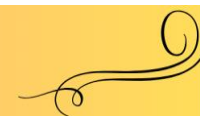
VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota (SPM)	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	DINAS SOSIAL DAN P3A
				Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	DINAS SOSIAL DAN P3A
				Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	DINAS SOSIAL DAN P3A
			S1.2 Berkembangnya Lapangan Kerja dan peluang usaha		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		
				Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi terlatih yang Bersertifikat	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	DINAS PUTR PERKIM
				Meningkatnya Kegiatan Yang Dilaksanakan yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
				Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Bersertifikat Kompetensi	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
				Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
				Meningkatnya UMKM yang berskala mikro	persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	PPROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO	DINAS KOP, UKM & DAG
				Meningkatnya daya saing kepemudaan	Persentase Wirausaha Muda	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
	Misi 2 : Membangun Manusia yang Unggul dan Inklusif	T.2 Meningkatnya Kualitas Manusia yang Cerdas dan Sehat			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		
			S2.1 Meningkatnya Mutu pendidikan		Indeks Pendidikan		
					Nilai Rapor Pendidikan		
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan dan Kualitas Pembelajaran Peserta Didik	APM PAUD	Program Pengelolaan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					APM SD		
					APM SMP		
					Anak Tidak Sekolah yang Kembali Bersekolah		
				Meningkatnya kebudayaan dan prestasi olah raga	Persentase Atlet berprestasi pada event olahraga nasional dan provinsi	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA
			S2.2 Meningkatnya Derajat Kesehatan masyarakat		Indeks Kesehatan		
					Prevalensi Stunting		
				Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) per 1000 Kelahiran Hidup	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN
					Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup		
					Angka keberhasilan penanganan kasus penyakit menular dan tidak menular		
					Persentase capaian SPM Rumah Sakit		
					Persentase Puskesmas dengan nilai Penilaian kinerja puskesmas Baik		
				Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM Kesehatan yang sesuai standar	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	DINAS KESEHATAN

				Meningkatkan Rumah Tangga yang menerapkan PHBS	Persentase Rumah Tangga yang menerapkan PHBS	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
				Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	DINAS PMDPPKB
	Misi 3 : Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur dan wilayah Yang Berketahanan Iklim	T.3 Meningkatkan Daya Saing Infrastruktur yang Berkelanjutan dan Wilayah yang berketahanan terhadap Bencana			Indeks Daya Saing Daerah		
					Indeks Resiko Bencana		
			S3.1 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur		Indeks Daya saing Pilar Infrastruktur		
				Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	DINAS PUTR PERKIM
				Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	DINAS PUTR PERKIM
				Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	DINAS PUTR PERKIM
				Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Jaringan Drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	DINAS PUTR PERKIM
				Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	DINAS PUTR PERKIM
				Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase ketaatan pemanfaatan ruang terhadap RTRW	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	DINAS PUTR PERKIM

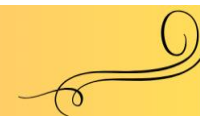


VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	persentase jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	DINAS PUTR PERKIM
				Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten /kota	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	DINAS PERHUBUNGAN
				Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Presentase Layanan Angkutan Darat	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	DINAS PERHUBUNGAN
			S3.2 Menurunnya Emisi GRK		Penurunan Intensitas Emisi GRK		
				Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					Indeks Kualitas Udara		
				Meningkatnya Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Persentase Limbah B3 yang dikelola	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Meningkatnya tata kelola persampahan	Presentase sampah yang tertangani	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			S3.3 Meningkatkan Kualitas Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		Indeks Ketahanan Daerah		
				Meningkatnya kualitas layanan informasi dan edukasi rawan bencana dan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana dan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BPBD

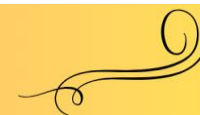


VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
				Meningkatnya penanganan bencana pada saat pascabencana	Persentase pemulihan pascabencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
				Meningkatnya kualitas layanan pencegahan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan pencegahan, Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran (SPM)	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	SATPOL PP DAN DAMKAR
	Misi 4 : Meningkatkan Good Governance yang Bernafaskan Keagamaan	T.4 Meningkatkan Integritas Tata Kelola Pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi		
			S4.1 Meningkatkan kualitas birokrasi yang responsif, adaptif, kolaboratif		Nilai Sakip		
					Indeks Pemerintahan Digital		
					Indeks Pelayanan Publik		
					Maturitas SPIP		
				Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Perekaman KTP-EL	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
				Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
				Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Desa yang Memiliki Tata Kelola Administrasi Pemerintahan yang Baik	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	DINAS PMDPPKB
				Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	DINAS KOMINFO SP
				Menurunnya insidensi penyimpangan/ penyalahgunaan baik keuangan maupun yang bersifat kewenangan	Persentase penurunan nilai kerugian daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan	INSPEKTORAT DAERAH

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Peningkatan Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang diterbitkan	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DINAS PMPTSP
				Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	BAPPERIDA
					Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD		
				Meningkatnya tata kelola anggaran yang berkinerja	Persentase Belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BKAD
					Persentase alokasi belanja infrastruktur		
				Meningkatnya tata kelola perbendaharaan yang efisien	Persentase penurunan SILPA		
				Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran	Persentase laporan keuangan tepat waktu		
				Meningkatnya Pengelolaan kepegawaian daerah	Nilai elemen NSPK Manajemen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BKPSDM
					Nilai elemen NSPK Manajemen Mutasi dan pengembangan karier		
					Nilai elemen NSPK Manajemen Pengembangan kompetensi, Kinerja dan Penghargaan		
				Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional ASN	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan SDM	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BKPSDM
	Misi 5: Meningkatkan Produktivitas perekonomian yang Berdaya Saing	T.5 Meningkatkan Produktifitas Ekonomi Daerah			PDRB Perkapita		
			S5.1 Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi Daerah		Pertumbuhan Ekonomi		



VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata	Presentase Peningkatan PAD Pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA
				Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Nusantara dan Mancanegara	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA
				Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Peningkatan pelaku Ekraf yang memiliki HAKI	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA
				Meningkatnya tenaga kerja pariwisata dan ekraf	Persentase Peningkatan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA
				Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	DINAS KOP, UKM & DAG
				Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Peningkatan Kualitas SDM Perkoperasian	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	DINAS KOP, UKM & DAG
				Meningkatnya Produksi perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap Nelayan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Dinas Perikanan
				Meningkatnya Produksi perikanan Budidaya	Produksi Pengelolaan perikanan budidaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Dinas Perikanan
				Meningkatnya hasil pertanian dengan sarana pertanian yang terpenuhi	Tingkat Produktivitas pertanian per hektar per tahun	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
				Meningkatnya hasil pertanian dengan prasarana pertanian yang terpenuhi	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian mendukung tanaman pangan, Perkebunan dan Holtikultura	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
				Meningkatnya hasil peternakan dengan sarana pertanian yang terpenuhi	Tingkat Produktivitas Sektor Peternakan Per Tahun	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN



VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Meningkatnya hasil peternakan dengan prasarana pertanian yang terpenuhi	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian mendukung Peternakan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			S5.2 Meningkatkan Daya Saing Industri Pengolahan		Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB		
				Meningkatnya daya saing UMKM	Persentase Peningkatan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha mikro	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	DINAS KOP, UKM & DAG
				Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
			S5.3 Meningkatkan kemandirian fiskal daerah		Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah		
				Meningkatnya Penyelenggaraan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BAPENDA

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Arsitektur perencanaan pembangunan memisahkan antara aspek strategis dan operasional, maka program prioritas dipisahkan pula menjadi 2 (dua), yaitu program prioritas untuk perencanaan strategis dan program prioritas untuk perencanaan operasional. Program prioritas yang dikategorikan strategis merupakan tanggung jawab bersama Kepala Perangkat Daerah dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan.

Pagu indikatif merupakan kebutuhan pendanaan pelaksanaan program pembangunan yang dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, termasuk penjabaran kegiatan beserta kebutuhan pendanaannya yang dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Penjabaran visi dan misi dari gubernur dan wakil gubernur terpilih.
2. Berdasarkan permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah.
3. Pelayanan dasar berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM).
4. Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).
5. Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah, serta kualitas lingkungan hidup.
6. Penerapan sub urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan

Pada RPJMD Tahun 2025-2029, juga menyajikan program dan penganggaran sampai dengan tahun 2030, dimana tahun 2030 target akhir pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) secara global, selain itu tahun 2030 juga merupakan bagian dari fase awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, yang dijabarkan secara bertahap melalui RPJMN dan RPJMD. Dengan demikian, mencantumkan indikasi kebutuhan anggaran atau output strategis hingga tahun 2030 bertujuan menjembatani transisi antar periode perencanaan, sekaligus memperlihatkan kesinambungan pembangunan lintas RPJMD. Adapun program perangkat daerah dan besaran pagu indikatif setiap program dapat dilihat dalam Tabel IV.1.

Tabel 4.1
Program Perangkat Daerah Kabupaten Barru Tahun 2025 - 2029

BIDANG/URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)											KET
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASARURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				256,578,354,804		257,156,712,820		257,056,972,322		258,158,803,633		258,169,506,385	
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah	3 Poin	3 Poin	256,578,354,804	4 Poin	257,156,712,820	4 Poin	257,056,972,322	4 Poin	258,158,803,633	4 Poin	258,169,506,385	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Program Pengelolaan Pendidikan				51,772,586,500		52,218,586,500		52,218,586,500		53,218,586,500		53,218,586,500	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan dan Kualitas Pembelajaran Peserta Didik	APM PAUD	91.97%	92,10%	51,772,586,500	92,15%	52,218,586,500	92,20%	52,218,586,500	92,25%	53,218,586,500	2 Unit	53,218,586,500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	APM SD	92.43%	95%		95.26 %		95.57 %		95.93 %		92,25%		
	APM SMP	92.40%	95%		95.26 %		95.57 %		95.93 %		95.93 %		
	Anak Tidak Sekolah yang Kembali Bersekolah	1240 Orang	840 Orang		640 Orang		440 Orang		240 Orang		95.93 %		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				146,154,777,171		146,755,289,300		149,574,729,573		152,810,037,287		161,118,139,424	DINAS KESEHATAN
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah	2 poin	2 poin	146,154,777,171	3 poin	146,755,289,300	3 poin	149,574,729,573	3 poin	152,810,037,287	4 poin	161,118,139,424	DINAS KESEHATAN

BIDANG/URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)											KET
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				73,989,615,426		74,797,730,811		76,295,685,427		78,014,588,349		84,272,166,587	
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) per 1000 Kelahiran Hidup	2.1	2.1	73,989,615,426	1.7	74,797,730,811	1.7	76,295,685,427	1.3	78,014,588,349	1.3	84,272,166,587	DINAS KESEHATAN
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup	14.7	14.7		13.4		13.4		12.6		12.6		
	Persentase Pengendalian Penyakit menular dan Penyakit Tidak Menular sesuai Peraturan PerUndang-undangan	63%	75%		75%		88%		88%		88%		
	Persentase capaian SPM Rumah Sakit	85%	85%		85%		85%		85%		85%		
	Persentase Puskesmas dengan nilai Penilaian kinerja puskesmas Baik	50%	58%		67%		75%		83%		83%		
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				704,325,680		710,664,611		724,877,903		741,187,656		757,864,378	
Meningkatnya SDM Kesehatan yang sesuai standar	Persentase pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar dan Peraturan Perundang-undangan	92%	92%	704,325,680	100%	710,664,611	100%	724,877,903	100%	741,187,656	100%	757,864,378	DINAS KESEHATAN
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				52,727,760		52,885,943		53,943,662		55,157,395		76,398,436	
Meningkatnya pemenuhan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang berizin dan bersertifikat	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	77%	100%	52,727,760	100%	52,885,943	100%	53,943,662	100%	55,157,395	100%	76,398,436	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				161,674,820		161,859,844		163,097,041		164,516,725		195,968,351	
Meningkatkan Rumah Tangga yang menerapkan PHBS	Persentase Rumah Tangga yang menerapkan PHBS	53.95%	57%	161,674,820	60%	161,859,844	65%	163,097,041	70%	164,516,725	80%	195,968,351	DINAS KESEHATAN

BIDANG/URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)											KET
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
PROGRAM AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN				50,000,000		55,000,000		60,500,000		66,550,000		66,550,000	
Meningkatnya akreditasi pelayanan kesehatan	Persentase Fasilitas Kesehatan yang mencapai akreditasi utama atau lebih tinggi	100%	100%	50,000,000	100%	55,000,000	100%	60,500,000	100%	66,550,000	100%	66,550,000	DINAS KESEHATAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8,042,279,509		7,115,262,515		7,249,418,549		9,403,362,599		7,560,770,390	
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah	2 Poin	3 Poin	8,042,279,509	3 Poin	7,115,262,515	3 Poin	7,249,418,549	3 Poin	9,403,362,599	4 Poin	7,560,770,390	DINAS PUTR PERKIM
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				895,000,000		2,897,685,000		1,097,685,000		1,122,382,913		4,147,636,528	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Rumah tangga dengan akses air minum aman	10.00%	15%	895,000,000	18%	2,897,685,000	20%	1,097,685,000	23%	1,122,382,913	23%	4,147,636,528	DINAS PUTR PERKIM
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				957,300,000		960,171,900		979,375,338		1,001,411,283		1,023,943,037	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase rumah tangga yang mengakses layanan pengolahan air limbah domestik layak	62.5%	68%	957,300,000	71%	960,171,900	73%	979,375,338	75%	1,001,411,283	80%	1,023,943,037	DINAS PUTR PERKIM
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				1,125,000,000		1,128,375,000		1,150,942,500		1,176,838,706		1,203,317,577	
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi terlatih yang Bersertifikat	0	100	1,125,000,000	100	1,128,375,000	100	1,150,942,500	100	1,176,838,706	100	1,203,317,577	DINAS PUTR PERKIM
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				35,341,450,929		37,440,708,515		33,770,361,771		41,686,953,206		44,912,666,539	

BIDANG/URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)											KET
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	33%	39.89%	35,341,450,929	41,33%	37,440,708,515	42,63%	33,770,361,771	44,24%	41,686,953,206	45%	44,912,666,539	DINAS PUTR PERKIM
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				2,953,353,000		4,462,213,059		2,472,599,698		4,505,733,191		6,539,612,188	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	41.91%	58.00%	1,181,341,200	60.00%	1,784,885,224	65.00%	989,039,879	68.00%	3,002,293,277	70.00%	4,415,844,875	DINAS PUTR PERKIM
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota	10.71%	11,71%	1,772,011,800	12,21%	2,677,327,835	12,71%	1,483,559,819	13,21%	1,503,439,915	13,71%	2,123,767,313	DINAS PUTR PERKIM
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			-	-		1,000,000,000	-	-		1,000,000,000		1,000,000,000	
Meningkatnya kapasitas penampungan tempat pembuangan sampah dengan jumlah penduduk	Persentase Kapasitas penampungan Tempat Pembuangan Sampah Dengan Jumlah Penduduk	0	-	-	35%	1,000,000,000	-	-	50%	1,000,000,000	65%	1,000,000,000	DINAS PUTR PERKIM
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				1,616,484,033		621,333,485		621,333,485		635,313,488		649,608,042	
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Jaringan Drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten	39,17%	41.50%	1,616,484,033	42,21%	621,333,485	42,92%	621,333,485	43,65%	635,313,488	44,38%	649,608,042	DINAS PUTR PERKIM
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				6,112,736,900		5,327,936,000		5,434,494,720		6,556,770,851		6,681,798,195	
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	100%	100%	6,112,736,900	100%	5,327,936,000	100%	5,434,494,720	100%	6,556,770,851	100%	6,681,798,195	DINAS PUTR PERKIM
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				757,010,100		858,820,241		161,396,702		776,242,630		193,708,089	

BIDANG/URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN										KET
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2,448,448,978		2,473,681,180		2,520,062,555		2,573,285,183		2,627,705,320	
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah	2 Poin	3 Poin	2,448,448,978	3 Poin	2,473,681,180	3 Poin	2,520,062,555	3 Poin	2,573,285,183	4 Poin	2,627,705,320	BPBD
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				606,087,560		624,270,187		636,755,591		651,082,591		665,731,950	
Meningkatnya kualitas layanan informasi dan edukasi rawan bencana dan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana dan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	0%	33.34	106,087,560	35	124,270,187	38	136,755,591	40,05	151,082,591	45	165,731,950	BPBD
Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	0%	100.00	430,000,000	100	430,000,000	100	430,000,000	100	430,000,000	100	430,000,000	
Meningkatnya penanganan bencana pada saat pascabencana	Persentase pemulihan pascabencana	0%	78.00	70,000,000	80	70,000,000	82	70,000,000	85	70,000,000	88	70,000,000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5,705,071,883		5,763,297,965		5,870,328,091		5,993,145,161		6,118,725,614	
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah	2 Poin	3 Poin	5,705,071,883	3 Poin	5,763,297,965	3 Poin	5,870,328,091	3 Poin	5,993,145,161	4 Poin	6,118,725,614	SATROL PP DAN DAMKAR

BIDANG/URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)											KET
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				1,010,966,300		1,013,999,199		1,034,279,183		1,057,550,464		1,081,345,350	
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda Dan Perkada	100%	100%	1,010,966,300	100%	1,013,999,199	100%	1,034,279,183	100%	1,057,550,464	100%	1,081,345,350	SATJOL PP DAN DAMKAR
Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Trantibunlinmas	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				1,756,236,450		1,914,297,730		1,952,583,685		1,996,516,817		2,041,438,446	
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan pencegahan, Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran	100	100%	1,756,236,450	100%	1,914,297,730	100%	1,952,583,685	100%	1,996,516,817	100%	2,041,438,446	SATJOL PP DAN DAMKAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3,748,727,393		3,591,975,772		3,697,911,475		3,719,472,694		3,843,769,040	
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah	2 Poin	3 Poin	3,748,727,393	3 Poin	3,591,975,772	3 Poin	3,697,911,475	3 Poin	3,719,472,694	4 Poin	3,843,769,040	DINAS SOSIAL DAN P3A
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				1,216,774,900		1,216,774,900		1,216,774,900		1,266,774,900		1,266,774,900	

BIDANG/URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)											KET
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3,945,917,224		4,086,364,313		4,060,730,447		4,146,058,700		4,233,306,839	
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah	2 Poin	3 Poin	3,945,917,224	3 Poin	4,086,364,313	3 Poin	4,060,730,447	3 Poin	4,146,058,700	4 Poin	4,233,306,839	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				-		-		-		-		-	
Meningkatnya Kegiatan Yang Dilaksanakan yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				204,493,600		205,107,081		209,209,222		213,916,430		218,729,550	
Meningkatnya Kualitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	100%	100%	204,493,600	100%	205,107,081	100%	209,209,222	100%	213,916,430	100%	218,729,550	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				50,978,000		50,007,934		50,208,093		50,437,775		50,672,625	
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	100%	100%	50,978,000	100%	50,007,934	100%	50,208,093	100%	50,437,775	100%	50,672,625	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				587,833,600		599,447,101		600,236,043		612,616,354		625,275,222	

BIDANG/URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)											KET
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
Meningkatnya pekerja yang terlindungi	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	24,32%	42,88%	587,833,600	52,16%	599,447,101	61,44%	600,236,043	70,72%	612,616,354	80%	625,275,222	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK													
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				43,856,670		43,988,240		44,868,005		45,877,535		46,909,779	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (Poin)	65.09	67.08	43,856,670	68.94	43,988,240	70.73	44,868,005	71.09	45,877,535	71.09	46,909,779	DINAS SOSIAL DAN P3A
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				198,192,000		198,786,576		202,762,308		207,324,459		211,989,260	
Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	0,2%	0.008	198,192,000	0.008	198,786,576	0.008	202,762,308	0.0070	207,324,459	0.0070	211,989,260	DINAS SOSIAL DAN P3A
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000	
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Persentase layanan pembelajaran keluarga yg terstandarisasi	0	100	25,000,000	100	25,000,000	100	25,000,000	100	25,000,000	100	25,000,000	DINAS SOSIAL DAN P3A
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				14,546,630		14,590,270		14,882,075		15,216,922		15,559,303	
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Persentase OPD yang menerapkan anggaran berbasis gender	0.8	82	14,546,630	86	14,590,270	87	14,882,075	88	15,216,922	90	15,559,303	DINAS SOSIAL DAN P3A
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				65,210,230		65,405,861		66,713,978		68,215,042		69,749,881	

BIDANG/URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)											KET
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
Terwujudnya OPD yang menerapkan pemenuhan Hak Anak dalam Pelayanan Tupoksi OPDnya	Persentase OPD yang menerapkan pemenuhan Hak Anak dalam Pelayanan Tupoksi OPDnya	100%	100	65,210,230	100	65,405,861	100	66,713,978	100	68,215,042	100	69,749,881	DINAS SOSIAL DAN P3A
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				276,983,100		277,814,049		283,370,330		289,746,163		296,265,451	
Meningkatnya penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan pelayanan Komprehensif	100%	100	276,983,100	100	277,814,049	100	283,370,330	100	289,746,163	100	296,265,451	DINAS SOSIAL DAN P3A
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN													
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN				5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000	
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	36,67 Persen	39,14 Persen	5,000,000	40,38 Persen	5,000,000	41,62 Persen	5,000,000	42,85 Persen	5,000,000	42,85 Persen	5,000,000	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				414,589,940		431,173,538		439,797,008		449,692,441		459,810,521	
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	78,6 Persen	81,30 Persen	414,589,940	82,68 Persen	431,173,538	84,08 Persen	439,797,008	85,51 Persen	449,692,441	85,51 Persen	459,810,521	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				42,363,400		44,057,936		44,939,095		45,950,224		46,984,104	
Menurunnya kasus Kerawanan Pangan	Persentase Penurunan Kasus Kerawanan Pangan	9,09 Persen	10 Persen	42,363,400	10 Persen	44,057,936	10 Persen	44,939,095	10 Persen	45,950,224	10 Persen	46,984,104	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				38,982,600		40,541,904		41,352,742		42,283,179		43,234,550	

BIDANG/URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)											KET
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	73,61 Persen	78 Persen	38,982,600	82 Persen	40,541,904	86 Persen	41,352,742	90 Persen	42,283,179	90 Persen	43,234,550	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN													
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN				25,000,000		25,500,000		26,010,000		26,530,200		27,060,804	
Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum	Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang diselesaikan tepat waktu	0	100%	25,000,000.00	100%	25,500,000.00	100%	26,010,000.00	100%	26,530,200.00	100%	27,060,804.00	DINAS PUTR PERKIM
PROGRAM REDISTRIBUSITANAH,DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE				12,836,000		12,874,508		13,131,998		13,427,468		13,729,586	
Meningkatnya Penyelesaian Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian	Persentase Penyelesaian Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian	100%	100%	12,836,000.00	100%	12,874,508.00	100%	13,131,998.16	100%	13,427,468.12	100%	13,729,586.15	DINAS PUTR PERKIM
PROGRAM SENGKETA TANAH GARAPAN				20,000,000		20,400,000		20,808,000		21,224,160		21,648,643	
Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	0	100%	20,000,000.00	100%	20,400,000.00	100%	20,808,000.00	100%	21,224,160.00	100%	21,648,643.20	DINAS PUTR PERKIM
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3,041,674,973		3,072,956,171		3,130,456,701		3,196,438,559		3,263,905,009	
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah	2 Poin	3 Poin	3,041,674,973	3 Poin	3,072,956,171	3 Poin	3,130,456,701	3 Poin	3,196,438,559	4 Poin	3,263,905,009	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BIDANG/URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)											KET
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				343,316,500		143,746,450		146,621,378		149,920,360		153,293,568	
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Yang ditindaklanjuti	100%	100%	343,316,500	100%	143,746,450	100%	146,621,378	100%	149,920,360	100%	153,293,568	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				84,000,000		95,000,000		95,000,000		95,000,000		95,000,000	
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	77 Poin (Baik)	78.71 Poin	84,000,000	78.91 Poin	95,000,000	79.11 Poin	95,000,000	79.31 Poin	95,000,000	79.31 Poin	95,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Indeks Kualitas Lahan	67 Poin	69 Poin		70 Poin		71 Poin		72 Poin		73 Poin		
	Indeks Kualitas Udara	78 Poin	80.25 Poin		80.55 Poin		80.85 Poin		81.15 Poin		80.85 Poin		
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				30,933,400		31,026,200		32,000,000		33,500,000		34,000,000	
Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)	75%	76.11%	30,933,400	76.18%	31,026,200	76.25%	32,000,000	76.32%	33,500,000	76.40%	34,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				17,439,500		19,000,000		22,000,000		25,000,000		25,000,000	
Meningkatnya Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	86%	89.76%	17,439,500	90.96%	19,000,000	92.16%	22,000,000	92.58%	25,000,000	93%	25,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				15,000,000		20,000,000		25,000,000		30,000,000		30,000,000	

BIDANG/URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)											KET
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	100%	100%	15,000,000	100%	20,000,000	100%	25,000,000	100%	30,000,000	100%	30,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH				5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000	
Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota	0%	100%	5,000,000	100%	5,000,000	100%	5,000,000	100%	5,000,000	100%	5,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				24,254,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000	
Meningkatnya Kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup Yang ditingkatkan Kompetennya	100%	100%	24,254,000	100%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	25,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000	
Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	100%	100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	10,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				9,219,060,900		5,006,718,083		5,006,718,083		5,119,369,240		5,234,555,047	
Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	0 Poin	64.72 Poin	9,219,060,900	65.42 Poin	5,006,718,083	66.12 Poin	5,006,718,083	66.82 Poin	5,119,369,240	66.82 Poin	5,234,555,047	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3,471,748,446		3,507,622,872		3,573,566,590		3,649,237,006		3,726,610,006	

BIDANG/URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)											KET
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah	2 Poin	3 Poin	3,471,748,446.39	3 Poin	3,507,622,872.37	3 Poin	3,573,566,589.95	3 Poin	3,649,237,005.87	4 Poin	3,726,610,006.15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				142,691,200		143,119,274		145,981,659		149,266,246		152,624,737	
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Perekaman KTP-EL	98%	99%	142,691,200.00	99%	143,119,273.60	99%	145,981,659.07	99%	149,266,246.40	99%	152,624,736.95	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
PROGRAM PENCATATAN SIPIL				81,408,400		81,652,625		83,285,678		85,159,605		87,075,697	
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	96.38%	97.50%	81,408,400.00	98.00%	81,652,625.20	98.50%	83,285,677.70	98.75%	85,159,605.45	99.00%	87,075,696.58	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				32,868,300		32,966,905		33,626,243		34,382,833		35,156,447	
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Pemanfaatan data kependudukan	31%	42%	32,868,300.00	47%	32,966,904.90	52%	33,626,243.00	57%	34,382,833.47	57%	35,156,447.22	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				43,000,000		43,000,000		43,000,000		43,000,000		43,000,000	
Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Persentase Pemanfaatan Profil KependudukanN	100%	100%	43,000,000.00	100%	43,000,000.00	100%	43,000,000.00	100%	43,000,000.00	100%	43,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2,673,055,960		2,697,841,152		2,745,077,205		2,803,575,577		2,861,345,161	

BIDANG/URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)											KET
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah	2 Poin	3 Poin	2,673,055,960	3 Poin	2,697,841,152	3 Poin	2,745,077,205	3 Poin	2,803,575,577	4 Poin	2,861,345,161	DINAS PMDPPKB
PROGRAM PENATAAN DESA				120,143,200		2,000,000		2,000,000		2,000,000		2,000,000	
Meningkatnya Penataan Desa sesuai peraturan Per UU an	Persentase fasilitasi penataan Desa sesuai peraturan Per UU an	100%	100%	120,143,200	100%	2,000,000	100%	2,000,000	100%	2,000,000	100%	2,000,000	DINAS PMDPPKB
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA				18,061,360		18,115,544		18,477,855		18,893,607		19,318,713	
Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	100%	100%	18,061,360	100%	18,115,544	100%	18,477,855	100%	18,893,607	100%	19,318,713	DINAS PMDPPKB
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				2,056,491,122		1,240,200,595		1,265,004,607		1,293,467,211		2,122,570,223	
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Desa yang Memiliki Tata Kelola Administrasi Pemerintahan yang Baik	100%	100%	2,056,491,122	100%	1,240,200,595	100%	1,265,004,607	100%	1,293,467,211	100%	2,122,570,223	DINAS PMDPPKB
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				151,487,220		151,941,682		154,980,515		158,467,577		162,033,097	
Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Yang Aktif	100%	100%	151,487,220	100%	151,941,682	100%	154,980,515	100%	158,467,577	100%	162,033,097	DINAS PMDPPKB
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA													
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				191,996,600		192,572,590		196,424,042		200,843,583		205,362,563	

BIDANG/URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)											KET
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
Terkendalinya pertumbuhan jumlah penduduk	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate / ASFR 15-19</i>) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	2,12 Poin	19.8-19.5	191,996,600	19.5-19.2	192,572,590	19.2-19.0	196,424,042	19.0-18.7	200,843,583	18.7-18.2	205,362,563	DINAS PMDPPKB
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				3,214,233,983		3,223,876,685		3,288,354,219		3,362,342,189		3,437,994,888	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	8,48 %	10,40 %	3,214,233,983	11,80 %	3,223,876,685	13,20 %	3,288,354,219	14,70 %	3,362,342,189	14,70 %	3,437,994,888	DINAS PMDPPKB
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				1,111,146,000		1,114,479,438		1,136,769,027		1,162,346,330		1,188,499,122	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarag Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga Sejahtera (KS) yang mengakses layanan Pembangunan Keluarga dan Keluarga Sejahtera	100%	100%	1,111,146,000	100%	1,114,479,438	100%	1,136,769,027	100%	1,162,346,330	100%	1,188,499,122	DINAS PMDPPKB
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				4,503,417,747		4,503,417,747		4,587,355,282		4,683,673,604		4,782,159,088	
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah	2 Poin	3 Poin	4,503,417,747	3 Poin	4,503,417,747	3 Poin	4,587,355,282	3 Poin	4,683,673,604	4 Poin	4,782,159,088	DINAS PERHUBUNGAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				1,864,945,250		1,164,945,250		1,188,244,155		1,214,979,648		1,242,316,691	
Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten /kota	43%	52%	1,864,945,250	55%	1,164,945,250	58%	1,188,244,155	60%	1,214,979,648	65%	1,242,316,691	DINAS PERHUBUNGAN
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Presentase Layanan Angkutan Darat	5.08%	5,50 %		6,00%		6,10%		6,20%		6,30%		DINAS PERHUBUNGAN

BIDANG/URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)											KET
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
PENGLOLAAN PELAYARAN				-		150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000	
Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Persentase layanan angkutan transportasi laut	0	0.000%	-	0.002%	150,000,000	0.002%	150,000,000	0.002%	150,000,000	0.002%	150,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3,320,307,559		3,333,302,242		3,363,952,469		3,383,548,605		3,454,710,653	
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah	2 Poin	3 Poin	3,320,307,559	3 Poin	3,333,302,242	3 Poin	3,363,952,469	3 Poin	3,383,548,605	4 Poin	3,454,710,653	DINAS KOMINFO SP
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				6,107,894,400		1,110,948,083		1,131,367,045		1,154,797,803		1,168,755,754	
Meningkatnya Penyelenggaraan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran Informasi Publik (%)	79%	80%	6,107,894,400	81%	1,110,948,083	82%	1,131,367,045	83%	1,154,797,803	83%	1,168,755,754	DINAS KOMINFO SP
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				1,833,395,700		1,838,895,887		1,875,673,805		1,917,876,465		1,961,028,686	
Meningkatnya Penyelenggaraan Layanan Publik secara Online dan Terintegrasi	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	86.04%	88%	1,833,395,700	89%	1,838,895,887	91%	1,875,673,805	92%	1,917,876,465	92%	1,961,028,686	DINAS KOMINFO SP
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA				2,108,126,080		2,028,869,594		2,066,999,943		2,110,754,519		2,155,493,573	

BIDANG/URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)											KET
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah	2 Poin	3 Poin	2,108,126,080	3 Poin	2,028,869,594	3 Poin	2,066,999,943	3 Poin	2,110,754,519	4 Poin	2,155,493,573	DINAS KOP, UKM & DAG
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				43,165,100		48,776,563		49,752,094		50,871,516		52,016,125	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	69.6	79.89	43,165,100	83.65	48,776,563	87.5800204	49,752,094	91.70	50,871,516	91.70	52,016,125	DINAS KOP, UKM & DAG
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				7,697,900		7,720,994		7,875,414		8,052,610		8,233,794	
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase koperasi yang aktif	60%	65	7,697,900	70	7,720,994	70	7,875,414	75	8,052,610	75	8,233,794	DINAS KOP, UKM & DAG
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				145,000,000		145,900,000		146,932,750		146,932,750		147,988,737	
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Peningkatan Kualitas SDM Perkoperasian	36.53	75%	145,000,000	80%	145,900,000	85%	146,932,750	90%	146,932,750	95%	147,988,737	DINAS KOP, UKM & DAG
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO				15,681,700		15,728,745		16,043,320		16,404,295		16,773,391	
Meningkatnya UMKM yang berskala mikro	persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	10.08%	10.55%	15,681,700	10.97%	15,728,745	11.33%	16,043,320	11.54%	16,404,295	11.54%	16,773,391	DINAS KOP, UKM & DAG
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				150,000,000		153,000,000		156,442,500		159,962,456		159,962,456	

BIDANG/URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)											KET
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
Meningkatnya daya saing UMKM	Persentase Peningkatan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha mikro	0.46%	0.90%	150,000,000	1.12%	153,000,000	1.34%	156,442,500	1.56%	159,962,456	1.56%	159,962,456	DINAS KOP, UKM & DAG
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2,781,336,530		2,809,980,377		2,862,632,976		2,923,051,834		2,984,830,115	
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah	2 Poin	3 Poin	2,781,336,530	3 Poin	2,809,980,377	3 Poin	2,862,632,976	3 Poin	2,923,051,834	4 Poin	2,984,830,115	DINAS PMPTSP
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				66,704,300		66,904,413		68,242,501		69,777,957		71,347,961	
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Peningkatan Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang diterbitkan	100%	100%	66,704,300	100%	66,904,413	100%	68,242,501	100%	69,777,957	100%	71,347,961	DINAS PMPTSP
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				21,508,200		21,572,725		22,004,179		22,499,273		23,005,507	
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Persentase kebijakan pro investasi yang tersusun sesuai standart peraturan per UU an	100%	100%	21,508,200	100%	21,572,725	100%	22,004,179	100%	22,499,273	100%	23,005,507	DINAS PMPTSP
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				34,156,500		34,258,970		34,944,149		35,730,392		36,534,326	
Meningkatnya Kualitas Kegiatan Promosi Investasi di Tingkat Provinsi dan Nasional	Persentase Calon Investor yang Berinvestasi	-	3,8%	34,156,500	4,1%	34,258,970	4,9%	34,944,149	5,5%	35,730,392	6%	36,534,326	DINAS PMPTSP
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				53,105,900		53,265,218		54,330,522		55,552,959		56,802,900	

BIDANG/URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)											KET
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku usaha dalam membuka usaha	100%	100%	53,105,900	100%	53,265,218	100%	54,330,522	100%	55,552,959	100%	56,802,900	DINAS PMPTSP
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA													
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				2,999,987,300		3,008,987,262		3,069,167,007		3,138,223,265		3,208,833,288	
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirasusaha Pemuda	0,46%	0,48%	2,999,987,300	0,57%	3,008,987,262	0,66%	3,069,167,007	0,75%	3,138,223,265	0,85%	3,208,833,288	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Persentase Peningkatan Pemuda Yang Aktif dalam Organisasi Kepemudaan dan Kemasyarakatan	9,18%	9,35%		9,44%		9,53%		9,62%		9,71%		
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				400,001,700		401,201,705		409,225,739		418,433,318		427,848,068	
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	60%	82%	400,001,700	84%	401,201,705	86%	409,225,739	88%	418,433,318	90%	427,848,068	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				2,404,184,009		2,411,396,561		8,459,624,492		8,649,966,043		1,844,590,279	
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Persentase Event Kejuaraan Olahraga yang diselenggarakan dan diikuti	29,03%	64,52%	2,404,184,009	38,78%	2,411,396,561	41,94%	8,459,624,492	45,16%	8,649,966,043	48,39%	1,844,590,279	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Persentase Peningkatan Atlet Yang meraih prestasi	2,37%	9,49%		12,65%		15,81%		18,97%		22,13%		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK													
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				66,410,200		66,609,431		67,941,619		69,470,306		71,033,388	

BIDANG/URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)											KET
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
Meningkatnya ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas	Persentase Publikasi Statistik yang menerapkan standar akurasi dan berkualitas	70%	80%	66,410,200	85%	66,609,431	90%	67,941,619	93%	69,470,306	95%	71,033,388	DINAS KOMINFO SP
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN													
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				17,230,500		17,282,192		17,627,835		18,024,462		18,430,012	
Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Skor Nilai Area Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	225 Poin	340 Poin	17,230,500	368 Poin	17,282,192	395 Poin	17,627,835	432 Poin	18,024,462	459 Poin	18,430,012	DINAS KOMINFO SP
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN													
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				630,741,100		635,156,288		647,859,413		662,436,250		684,925,961	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Persentase objek kemajuan budaya yang terpelihara dan terdaftar sebagai warisan budaya tak benda (WBTB)	55%	66%	630,741,100	77%	635,156,288	88%	647,859,413	99%	662,436,250	99%	684,925,961	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				65,000,000		66,950,000		68,289,000		69,825,503		72,196,078	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Presentase kesenian tradisional yang dikembangkan dan dilestarikan sebagai WBTB	100%	100%	65,000,000	100%	66,950,000	100%	68,289,000	100%	69,825,503	100%	72,196,078	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				89,276,100		89,543,928		91,334,807		93,389,840		96,560,425	
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase budaya lokal dan situs bersejarah yang di lestarikan	100%	100%	89,276,100	100%	89,543,928	100%	91,334,807	100%	93,389,840	100%	96,560,425	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BIDANG/URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)											KET
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				250,000,000		250,000,000		250,000,000		250,000,000		250,000,000	
Meningkatnya tata kelola museum	Presentase Koleksi museum yang terpelihara	100%	100%	250,000,000	100%	250,000,000	100%	250,000,000	100%	250,000,000	100%	250,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4,168,599,187		4,211,735,367		4,291,027,510		4,382,015,244		4,475,050,202	
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah	2 Poin	3 Poin	4,168,599,187	3 Poin	4,211,735,367	3 Poin	4,291,027,510	3 Poin	4,382,015,244	4 Poin	4,475,050,202	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				809,903,100		812,332,809		828,579,465		847,222,503		866,285,010	
Meningkatnya Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	71.92 Poin	72.10 Poin	809,903,100	72.20 Poin	812,332,809	72.30 Poin	828,579,465	72.40 Poin	847,222,503	72.50 Poin	866,285,010	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN													
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				49,000,000		49,147,000		50,129,940		51,257,864		52,411,166	
Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno Yang dimiliki	0%	0.008%	49,000,000	0.0150%	49,147,000	0.0220%	50,129,940	0.0300%	51,257,864	0.0360%	52,411,166	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				25,352,570		25,428,628		25,937,200		26,520,787		27,117,505	

BIDANG/URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)											KET
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
Meningkatnya Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis	Tingkat Ketersediaan Arsip	75	75	25,352,570	100	25,428,628	100	25,937,200	100	26,520,787	100	27,117,505	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				11,907,000		11,942,721		12,181,575		12,455,661		12,735,913	
Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip sesuai SNPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	100%	100%	11,907,000	100%	11,942,721	100%	12,181,575	100%	12,455,661	100%	12,735,913	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3,322,880,922		3,356,883,560		3,419,386,589		3,491,108,816		3,564,444,793	
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah	2 Poin	3 Poin	3,322,880,922	3 Poin	3,356,883,560	3 Poin	3,419,386,589	3 Poin	3,491,108,816	4 Poin	3,564,444,793	Dinas Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				219,306,800		219,829,720		223,326,315		227,338,657		231,441,277	
Meningkatnya Produksi perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	20.413,8 Ton	21.030,80 Ton	219,306,800	21.346,26 Ton	219,829,720	21.666,46 Ton	223,326,315	21.991,45 Ton	227,338,657	22.321,32 Ton	231,441,277	Dinas Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				863,373,830		864,463,951		871,753,231		880,117,678		888,670,326	

BIDANG/URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)											KET
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
Meningkatnya Produksi perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	6.525 Ton	6.801,7 Ton	863,373,830	6.937,7 Ton	864,463,951	7076,5 Ton	871,753,231	7218 ton	880,117,678	7362,36 Ton	888,670,326	Dinas Perikanan
PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000	
Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Persentase Cakupan Pengawasan sumberdaya Perikanan	0	100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	10,000,000	Dinas Perikanan
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				222,048,660		222,579,806		226,131,402		230,206,859		234,374,013	
Meningkatnya Produksi Olahan Perikanan	Produksi Produk Olahan Hasil Perikanan UMKK	1.435,15 Ton	1493,13 Ton	222,048,660	1523 Ton	222,579,806	1553,46 Ton	226,131,402	1584,06 Ton	230,206,859	1615.74 Ton	234,374,013	Dinas Perikanan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3,773,063,168		3,807,639,939		3,791,198,332		3,834,131,587		3,838,705,840	
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah	2 Poin	3 Poin	3,773,063,168	3 Poin	3,807,639,939	3 Poin	3,791,198,332	3 Poin	3,834,131,587	4 Poin	3,838,705,840	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				4,289,000,001		4,644,689,943		4,864,689,943		4,532,623,750		5,060,357,784	
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata	Presentase Peningkatan PAD Pariwisata	-	2.02	4,289,000,001	3,30	4,644,689,943	4,73	4,864,689,943	5,82	4,532,623,750	6,15	5,060,357,784	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA

BIDANG/URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)											KET
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				188,021,400		188,585,464		192,357,173		196,685,210		201,110,627	
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	72.57%	2,19 %	188,021,400	3,65 %	188,585,464	4,81 %	192,357,173	5,19 %	196,685,210	6,35%	201,110,627	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				-		150,000,000		153,000,000		156,442,500		159,962,456	
Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Presentase Produk Ekonomi Kreatif yang Memiliki HAKI	0.00%	0%	-	2,5%	150,000,000	4%	153,000,000	5%	156,442,500	6%	159,962,456	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				94,483,800		94,767,251		96,662,596		98,837,505		101,061,349	
Meningkatnya tenaga kerja pariwisata dan ekraf	Persentase Tenaga Kerja Sektor Pariwisata dan ekraf	1,05%	1,15%	94,483,800	1,21%	94,767,251	1,27%	96,662,596	1,33%	98,837,505	1,38%	101,061,349	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				10,004,300,650		10,107,650,623		10,297,626,664		10,515,624,171		10,738,526,623	
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah	2 Poin	3 Poin	10,004,300,650	3 Poin	10,107,650,623	3 Poin	10,297,626,664	3 Poin	10,515,624,171	4 Poin	10,738,526,623	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				1,053,843,000		1,095,996,720		1,117,916,654		1,143,069,779		1,168,788,849	

BIDANG/URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)											KET
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
Meningkatnya hasil pertanian dengan sarana pertanian yang terpenuhi	Tingkat Produktivitas pertanian per hektar per tahun	5,10 Persen	5,37 Persen	1,053,843,000	5,50 Persen	1,095,996,720	5,64 Persen	1,117,916,654	5,78 Persen	1,143,069,779	5,78 Persen	1,168,788,849	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				824,129,700		833,094,888		837,756,786		843,106,313		848,576,205	
Meningkatnya hasil pertanian dengan prasarana pertanian yang terpenuhi	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian mendukung tanaman pangan, Perkebunan dan Holtikultura	100 Persen	100 Persen	824,129,700	100 Persen	833,094,888	100 Persen	837,756,786	100 Persen	843,106,313	100 Persen	848,576,205	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				80,531,700		83,752,968		85,428,027		87,350,158		89,315,537	
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penurunan kerugian akibat bencana pertanian	38,46 Persen	50 Persen	80,531,700	50 Persen	83,752,968	50 Persen	85,428,027	50 Persen	87,350,158	50 Persen	89,315,537	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				2,953,600		3,071,744		3,133,179		3,203,675		3,275,758	
Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Usaha Pertanian yang memiliki Izin Usaha Sesuai Standart	100 Persen	100 Persen	2,953,600	100 Persen	3,071,744	100 Persen	3,133,179	100 Persen	3,203,675	100 Persen	3,275,758	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				647,587,114		673,490,599		686,960,411		702,417,020		718,221,403	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	23.52	25	647,587,114	30	673,490,599	30	686,960,411	35	702,417,020	40	718,221,403	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1,664,499,844		1,680,609,342		1,710,221,529		1,744,201,514		1,778,946,048	

BIDANG/URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)											KET
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah	2 Poin	3 Poin	1,664,499,844	3 Poin	1,680,609,342	3 Poin	1,710,221,529	3 Poin	1,744,201,514	4 Poin	1,778,946,048	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				350,000,000		360,500,000		367,710,000		375,983,475		384,443,103	
Meningkatnya hasil peternakan dengan sarana pertanian yang terpenuhi	Tingkat Produktivitas Sektor Peternakan Per Tahun	3,04 Persen	3,23 Persen	350,000,000	3,32 Persen	360,500,000	3,42 Persen	367,710,000	3,53 Persen	375,983,475	3,53 Persen	384,443,103	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				157,500,000		162,225,000		165,469,500		169,192,564		172,999,396	
Meningkatnya hasil peternakan dengan prasarana pertanian yang terpenuhi	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian mendukung Peternakan	100 Persen	100 Persen	157,500,000	100 Persen	162,225,000	100 Persen	165,469,500	100 Persen	169,192,564	100 Persen	172,999,396	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				234,487,280		241,521,898		246,352,336		251,895,264		257,562,907	
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	76,09 Persen	79,63 Persen	234,487,280	81,46 Persen	241,521,898	83,33 Persen	246,352,336	85,25 Persen	251,895,264	85,25 Persen	257,562,907	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				2,953,600		3,071,744		3,133,179		3,203,675		3,275,758	
Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha peternakan	Persentase Usaha peternakan yang memiliki Izin Usaha Sesuai Standart	100 Persen	100 Persen	2,953,600	100 Persen	3,071,744	100 Persen	3,133,179	100 Persen	3,203,675	100 Persen	3,275,758	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN													
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00	

BIDANG/URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)											KET
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
Meningkatnya kemudahan proses perizinana dan pendaftaran berusaha	Persentase Peningkatan pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	12.66	31.65	10,000,000	37.97	10,000,000	44.3	10,000,000	50.63	10,000,000	50.63	10,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				928,073,000.00		930,857,219.00		949,474,363.38		970,837,536.56		992,681,381.13	
Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan dan Distribusi Barang yang Efisien	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	90	95	928,073,000	95	930,857,219	95	949,474,363	95	970,837,537	95	992,681,381	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				6,739,000.00		6,759,217.00		6,894,401.34		7,049,525.37		7,208,139.69	
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	koefisien variasi harga antar waktu	13	10	6,739,000	10	6,759,217	10	6,894,401	10	7,049,525	10	7,208,140	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				39,668,500.00		39,787,505.50		40,583,255.61		41,496,378.86		42,430,047.39	
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	88.19	90.59	39,668,500	91.39	39,787,506	92.19	40,583,256	92.99	41,496,379	92.99	42,430,047	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN													
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				5,057,679,485.34		19,400,944,472.24		19,651,756,358.40		15,349,865,237.28		10,350,116,237.33	

BIDANG/URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)											KET	
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
			Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	100%	100%	5,057,679,485	100%	19,400,944,472	100%	19,651,756,358	100%	15,349,865,237	100%	10,350,116,237	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA	
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				22,984,900.00		23,053,854.70		23,514,931.79		24,044,017.76		24,585,008.16		
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang diterbitkan	100%	100%	22,984,900	100%	23,053,855	100%	23,514,932	100%	24,044,018	100%	24,585,008	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				15,287,800.00		15,333,663.40		15,640,336.67		15,992,244.24		16,352,069.74		
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tingkat efektifitas pemanfaatan sistem informasi industri nasional	100%	100%	15,287,800	100%	15,333,663	100%	15,640,337	100%	15,992,244	100%	16,352,070	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA	
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
SEKRETARIAT DAERAH														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				524,826,880.00		32,350,208,196		31,396,819,118		32,956,185,579		33,695,101,628		34,435,361,016
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah	2 Poin	3 Poin	31,825,381,316	3 Poin	30,861,992,238	3 Poin	32,418,535,579	3 Poin	33,141,316,467	4 Poin	33,868,890,598	SEKRETARIAT DAERAH	
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Pemerintah Daerah	Tingkat Kematangan Organisasi	3 Poin	3 Poin	524,826,880	3 Poin	534,826,880	4 Poin	537,650,000	4 Poin	553,785,160	5 Poin	566,470,418		

BIDANG/URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)											KET
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				14,320,539,920		14,292,383,792		14,578,231,468		14,906,241,676		15,241,632,114	
Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	Nilai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	2.7379 Poin	2.8379 Poin	340,181,840	2.8879 Poin	260,962,386	2.9379 Poin	266,181,633	2.9379 Poin	272,170,720	2.9379 Poin	278,294,561	SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	Persentase Produk Hukum yang dihasilkan	100%	100%	337,861,200	100%	347,997,036	100%	354,956,977	100%	362,943,509	100%	371,109,738	
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang keagamaan	Indeks Moderasi Beragama	-	63 Poin	13,642,496,880	65 Poin	13,683,424,371	67 Poin	13,957,092,858	68 Poin	14,271,127,447	70 Poin	14,592,227,815	
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				717,961,490		724,321,413		738,807,841		755,431,017		765,941,673	
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Pembangunan, Perekonomian, pengelolaan SDA, serta pengadaan barang dan jasa.	Persentase Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang ditetapkan	100%	100%	155,779,190	100%	160,452,566	100%	163,661,617	100%	167,344,003	100%	171,109,243	SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase Peningkatan Rata-rata capaian kinerja Program Sekretariat Daerah / Capaian target realisasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah	100%	100%	275,591,800	100%	276,418,575	100%	281,946,947	100%	288,290,753	100%	288,290,753	
	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa / Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ	35.56	80 Poin	286,590,500	85 Poin	287,450,272	90 Poin	293,199,276.9	95 Poin	299,796,260.7	100 Poin	306,541,676.5	
SEKRETARIAT DPRD													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				18,254,419,347		18,308,672,954		18,671,448,745		19,087,733,965		19,513,385,603	
Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi terhadap DPRD	Persentase Layanan Administrasi terhadap DPRD	100	100		100		100		100		100		

BIDANG/URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)											KET
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah	100	100	18,254,419,347	100	18,308,672,954	100	18,671,448,745	100	19,087,733,965	100	19,513,385,603	SEKRETARIAT DPRD
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				8,081,742,950		8,105,988,179		8,268,107,942		8,454,140,371		8,644,358,529	
Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang-undangan	Persentase propemperda yang ditetapkan menjadi perda	75	100	8,081,742,950	100	8,105,988,179	100	8,268,107,942	100	8,454,140,371	100	8,644,358,529	SEKRETARIAT DPRD
	Persentase terfasilitasinya proses penyusunan dan penetapan APBD dan LAPBD	100	100		100		100		100		100		
	Persentase terfasilitasinya peningkatan kapasitas DPRD	100	100		100		100		100		100		
UNSUBSIDIARIS													
PERENCANAAN													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3,467,653,142.50		3,325,817,147.10		3,605,733,786.75		3,599,172,783.66		3,594,357,323.93	
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah	2 Poin	3 Poin	3,467,653,142.50	3 Poin	3,325,817,147.10	3 Poin	3,605,733,786.75	3 Poin	3,599,172,783.66	4 Poin	3,594,357,323.93	BAPPERIDA
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				254,519,900.00		457,198,847.50		258,407,904.84		358,783,128.56		459,559,477.94	

BIDANG/URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)											KET
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPDP	100%	100%	254,519,900.00	100%	457,198,847.50	100%	258,407,904.84	100%	358,783,128.56	100%	459,559,477.94	BAPPERIDA
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
	Rata-rata Capaian Kinerja Progam Prioritas RPJMD	84%	86%		87%		88%		89%		90%		
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				310,197,600.00		311,748,588.00		312,683,833.76		313,621,885.27		314,562,750.92	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian, SDA, dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPDP dengan Renja PD Pada Bidang Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian, SDA, dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	100%	310,197,600.00	100%	311,748,588.00	100%	312,683,833.76	100%	313,621,885.27	100%	314,562,750.92	BAPPERIDA
	Persentase Keselarasan Program Prioritas Renja dengan Prioritas Nasional (PN)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
KEUANGAN													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6,763,181,226		6,833,645,063		6,963,170,407		7,111,800,738		7,263,775,253	
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah	2 Poin	3 Poin	6,763,181,226	3 Poin	6,833,645,063	3 Poin	6,963,170,407	3 Poin	7,111,800,738	4 Poin	7,263,775,253	BKAD
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				110,960,003,410		112,180,563,448		114,424,174,716		116,998,718,648		119,631,189,817	
Meningkatnya tata kelola anggaran yang berkinerja	Persentase Belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	37.50	37.76	109,467,230,626	37.14	110,671,370,163	36.71	112,884,797,566	35.50	115,424,705,511	34.60	118,021,761,385	BKAD
	Persentase alokasi belanja infrastruktur	14.35%	17.04%		17.88%		18.74%		19.56%		19.56%		BKAD

BIDANG/URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)											KET
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
Meningkatnya tata kelola perbendaharaan yang efisien	Persentase penurunan SILPA	3,79%	1,5%	663,639,628	1.7	670,939,664	1.9	684,358,457	2.10	699,756,522	2.2	715,501,044	BKAD
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran	Persentase laporan keuangan tepat waktu	100%	100%	829,133,156	100%	838,253,621	100%	855,018,693	100%	874,256,614	100%	893,927,388	BKAD
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				1,151,817,700		1,242,811,298		1,267,667,524		1,296,190,044		1,325,354,320	
Meningkatnya tata kelola barang milik daerah yang memadai	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	3.41%	3.88%	1,151,817,700	3.88%	1,242,811,298	3.88%	1,267,667,524	3.88%	1,296,190,044	3.88%	1,325,354,320	BKAD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3,800,402,344		3,800,402,344		3,800,402,344		3,800,402,344		3,800,402,344	
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah	2 Poin	3 Poin	3,800,402,344	3 Poin	3,800,402,344	3 Poin	3,800,402,344	3 Poin	3,800,402,344	4 Poin	3,800,402,344	BAPENDA
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				1,813,098,323		1,869,304,371		1,906,690,458		1,949,590,994		1,993,456,791	
Meningkatnya Penyelenggaraan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	0,01 Persen	0,02 Persen	1,813,098,323	0,03 Persen	1,869,304,371	0,04 Persen	1,906,690,458	0,05 Persen	1,949,590,994	0,05 Persen	1,993,456,791	BAPENDA
KEPEGAWAIAN													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3,462,811,800		3,498,424,445		3,563,886,962		3,639,005,200		3,715,813,598	

BIDANG/URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Tahun 2026										KET
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN													
INSPEKTORAT DAERAH													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kab/Kota				8,456,114,222		8,545,571,430		8,710,010,042		8,898,703,351		9,091,642,258	
Meningkatnya Mutu Layanan dan Keterpenuhan Administrasi Inspektorat	Persentase keterpenuhan layanan administrasi	100%	100%	8,456,114,222	100%	8,545,571,430	100%	8,710,010,042	100%	8,898,703,351	100%	9,091,642,258	INSPEKTORAT DAERAH
Program Penyelenggaraan Pengawasan				4,278,807,400		4,407,171,622		4,495,315,054		4,596,459,643		4,699,879,985	
Menurunnya insidensi penyimpangan/penyalahgunaan baik keuangan maupun yang bersifat kewenangan	Persentase penurunan nilai kerugian daerah	-	19%	4,278,807,400	18%	4,407,171,622	17%	4,495,315,054	16%	4,596,459,643	15%	4,699,879,985	INSPEKTORAT DAERAH
Program Perumusan Kebijakan Pendampingan Dan Asistensi				982,650,300		1,061,262,324		1,082,487,570		1,106,843,541		1,131,747,520	
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Persentase keterjadian penyalahgunaan/penyimpangan	0.16%	0.16%	982,650,300	0.16%	1,061,262,324	0.16%	1,082,487,570	0.16%	1,106,843,541	0.16%	1,131,747,520	INSPEKTORAT DAERAH
UNSUR KEWILAYAHAN													
KECAMATAN BARRU													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6,210,440,967		6,274,843,737		6,393,227,737		6,529,073,377		6,667,975,544	
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah	2 Poin	3 Poin	6,210,440,967	3 Poin	6,274,843,737	3 Poin	6,393,227,737	3 Poin	6,529,073,377	4 Poin	6,667,975,544	KECAMATAN BARRU

BIDANG/URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)											KET
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				52,880,330		53,038,971		54,099,750		55,316,995		56,561,627	
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Pemerintahan dan Publik yang Terpenuhi Sesuai Standar Operasional Pelayanan	100%	100%	52,880,330	100%	53,038,971	100%	54,099,750	100%	55,316,995	100%	56,561,627	KECAMATAN BARRU
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1,700,515,067		1,865,571,724		1,898,883,158		1,937,108,029		1,976,192,960	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa/kelurahan	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa/kelurahan	100%	100%	1,700,515,067	100%	1,865,571,724	100%	1,898,883,158	100%	1,937,108,029	100%	1,976,192,960	KECAMATAN BARRU
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				30,594,000		30,685,782		31,299,498		32,003,736		32,723,820	
Meningkatnya Layanan terkait Pengaduan Kasus Konflik dan Kriminalitas	Persentase Penyelesaian Pengaduan Kasus Konflik dan Kriminalitas	44%	100%	30,594,000	100%	30,685,782	100%	31,299,498	100%	32,003,736	100%	32,723,820	KECAMATAN BARRU
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				1,234,000		1,237,702		1,262,456		1,290,861		1,319,906	
Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelesaian tugas pemerintahan umum tepat waktu	100%	100%	1,234,000	100%	1,237,702	100%	1,262,456	100%	1,290,861	100%	1,319,906	KECAMATAN BARRU
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				5,070,000		5,085,210		5,186,914		5,303,620		5,422,951	
Terwujudnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pemerintahan desa/kelurahan yang dibina dan diawasi	100%	100%	5,070,000	100%	5,085,210	100%	5,186,914	100%	5,303,620	100%	5,422,951	KECAMATAN BARRU
KECAMATAN TANETE RIAJA													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3,483,480,794		3,519,201,699		3,584,863,216		3,660,209,808		3,737,251,698	

BIDANG/URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)											KET
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah	2 Poin	3 Poin	3,483,480,794	3 Poin	3,519,201,699	3 Poin	3,584,863,216	3 Poin	3,660,209,808	4 Poin	3,737,251,698	KECAMATAN TANETE RIAJA
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				18,532,400		18,587,997		18,959,757		19,386,352		19,822,545	
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Pemerintahan dan Publik yang Terpenuhi Sesuai Standar Operasional Pelayanan	100%	100%	18,532,400	100%	18,587,997	100%	18,959,757	100%	19,386,352	100%	19,822,545	KECAMATAN TANETE RIAJA
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				406,316,433		440,011,241		446,811,466		454,614,724		462,593,555	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa/kelurahan	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa/kelurahan	100%	100%	406,316,433	100%	440,011,241	100%	446,811,466	100%	454,614,724	100%	462,593,555	KECAMATAN TANETE RIAJA
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				30,033,600		30,123,701		30,726,175		31,417,514		32,124,408	
Meningkatnya Layanan terkait Pengaduan Kasus Konflik dan Kriminalitas	Persentase Penyelesaian Pengaduan Kasus Konflik dan Kriminalitas	100%	100%	30,033,600	100%	30,123,701	100%	30,726,175	100%	31,417,514	100%	32,124,408	KECAMATAN TANETE RIAJA
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				28,115,500		28,199,847		28,763,843		29,411,030		30,072,778	
Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelesaian tugas pemerintahan umum tepat waktu	100%	100%	28,115,500	100%	28,199,847	100%	28,763,843	100%	29,411,030	100%	30,072,778	KECAMATAN TANETE RIAJA
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				3,224,500		3,234,174		3,298,857		3,373,081		3,448,976	
Terwujudnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pemerintahan desa/kelurahan yang dibina dan diawasi	100%	100%	3,224,500	100%	3,234,174	100%	3,298,857	100%	3,373,081	100%	3,448,976	KECAMATAN TANETE RIAJA

BIDANG/URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)											KET
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
KECAMATAN TANETE RILAU													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4,292,591,194		4,336,677,080		4,417,714,955		4,510,705,917		4,605,789,175	
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah	2 Poin	3 Poin	4,292,591,194	3 Poin	4,336,677,080	3 Poin	4,417,714,955	3 Poin	4,510,705,917	4 Poin	4,605,789,175	KECAMATAN TANETE RILAU
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				24,607,310		24,681,132		25,174,755		25,741,187		26,320,363	
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Pemerintahan dan Publik yang Terpenuhi Sesuai Standar Operasional Pelayanan	100%	100%	24,607,310	100%	24,681,132	100%	25,174,755	100%	25,741,187	100%	26,320,363	KECAMATAN TANETE RILAU
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				686,882,950		751,440,075		764,468,876		779,419,426		794,706,363	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa/kelurahan	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa/kelurahan	100%	100%	686,882,950	100%	751,440,075	100%	764,468,876	100%	779,419,426	100%	794,706,363	KECAMATAN TANETE RILAU
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				40,702,000		40,824,106		41,640,588		42,577,501		43,535,495	
Meningkatnya Layanan terkait Pengaduan Kasus Konflik dan Kriminalitas	Persentase Penyelesaian Pengaduan Kasus Konflik dan Kriminalitas	100%	100%	40,702,000	100%	40,824,106	100%	41,640,588	100%	42,577,501	100%	43,535,495	KECAMATAN TANETE RILAU
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				50,354,600		50,505,664		51,515,777		52,674,882		53,860,067	
Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelesaian tugas pemerintahan umum tepat waktu	100%	100%	50,354,600	100%	50,505,664	100%	51,515,777	100%	52,674,882	100%	53,860,067	KECAMATAN TANETE RILAU

BIDANG/URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)											KET
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				2,000,000		2,006,000		2,046,120		2,092,158		2,139,231	
Terwujudnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pemerintahan desa/kelurahan yang dibina dan diawasi	100%	100%	2,000,000	100%	2,006,000	100%	2,046,120	100%	2,092,158	100%	2,139,231	KECAMATAN TANETE RILAU
KECAMATAN SOPPENG RIAJA													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3,528,156,044		3,562,540,535		3,628,421,844		3,704,168,146		3,782,641,240	
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah	2 Poin	3 Poin	3,528,156,044	3 Poin	3,562,540,535	3 Poin	3,628,421,844	3 Poin	3,704,168,146	4 Poin	3,782,641,240	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				25,492,940		25,569,419		26,080,807		26,667,625		27,267,647	
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Pemerintahan dan Publik yang Terpenuhi Sesuai Standar Operasional Pelayanan	100%	100%	25,492,940	100%	25,569,419	100%	26,080,807	100%	26,667,625	100%	27,267,647	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				608,728,660		664,688,812		675,982,588		688,942,197		702,193,396	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa/kelurahan	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa/kelurahan	100%	100%	608,728,660	100%	664,688,812	100%	675,982,588	100%	688,942,197	100%	702,193,396	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				28,475,000		28,560,425		29,131,634		29,787,095		30,457,305	
Meningkatnya Layanan terkait Pengaduan Kasus Konflik dan Kriminalitas	Persentase Penyelesaian Pengaduan Kasus Konflik dan Kriminalitas	44%	100%	28,475,000	100%	28,560,425	100%	29,131,634	100%	29,787,095	100%	30,457,305	KECAMATAN SOPPENG RIAJA

BIDANG/URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)											KET
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				19,858,500		19,918,076		20,316,437		20,773,557		21,240,962	
Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelesaian tugas pemerintahan umum tepat waktu	100%	100%	19,858,500	100%	19,918,076	100%	20,316,437	100%	20,773,557	100%	21,240,962	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				1,578,000		3,582,734		4,614,389		5,650,712		5,687,853	
Terwujudnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pemerintahan desa/kelurahan yang dibina dan diawasi	100%	100%	1,578,000	100%	3,582,734	100%	4,614,389	100%	5,650,712	100%	5,687,853	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
KECAMATAN BALUSU													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2,615,652,850		2,642,643,458		2,692,257,102		2,749,188,758		2,807,401,377	
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah	2 Poin	3 Poin	2,615,652,850	3 Poin	2,642,643,458	3 Poin	2,692,257,102	3 Poin	2,749,188,758	4 Poin	2,807,401,377	KECAMATAN BALUSU
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				17,586,170		17,638,929		17,991,707		18,396,520		18,810,442	
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Pemerintahan dan Publik yang Terpenuhi Sesuai Standar Operasional Pelayanan	100%	100%	17,586,170	100%	17,638,929	100%	17,991,707	100%	18,396,520	100%	18,810,442	KECAMATAN BALUSU
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				364,871,370		394,007,221		399,887,365		406,634,831		413,534,115	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa/kelurahan	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa/kelurahan	100%	100%	364,871,370	100%	394,007,221	100%	399,887,365	100%	406,634,831	100%	413,534,115	KECAMATAN BALUSU

BIDANG/URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)											KET
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				21,791,800		21,857,175		22,294,319		22,795,941		23,308,850	
Meningkatnya Layanan terkait Pengaduan Kasus Konflik dan Kriminalitas	Persentase Penyelesaian Pengaduan Kasus Konflik dan Kriminalitas	44%	100%	21,791,800	100%	21,857,175	100%	22,294,319	100%	22,795,941	100%	23,308,850	KECAMATAN BALUSU
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				31,909,800		32,005,529		32,645,640		33,380,167		34,131,221	
Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelesaian tugas pemerintahan umum tepat waktu	100%	100%	31,909,800	100%	32,005,529	100%	32,645,640	100%	33,380,167	100%	34,131,221	KECAMATAN BALUSU
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				1,436,500		1,440,810		1,469,626		1,502,692		1,536,503	
Terwujudnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pemerintahan desa/kelurahan yang dibina dan diawasi	100%	100%	1,436,500	100%	1,440,810	100%	1,469,626	100%	1,502,692	100%	1,536,503	KECAMATAN BALUSU
KECAMATAN PUJANANTING													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2,497,658,110		2,523,422,924		2,570,783,336		2,625,129,409		2,680,698,269	
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah	2 Poin	3 Poin	2,497,658,110	3 Poin	2,523,422,924	3 Poin	2,570,783,336	3 Poin	2,625,129,409	4 Poin	2,680,698,269	KECAMATAN PUJANANTING
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				12,249,500		12,286,249		12,531,973		12,813,943		13,102,257	

BIDANG/URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)											KET
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Pemerintahan dan Publik yang Terpenuhi Sesuai Standar Operasional Pelayanan	100%	100%	12,249,500	100%	12,286,249	100%	12,531,973	100%	12,813,943	100%	13,102,257	KECAMATAN PUJANANTING
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				332,878,820		358,495,490		363,665,400		369,597,872		375,663,824	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa/kelurahan	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa/kelurahan	100%	100%	332,878,820	100%	358,495,490	100%	363,665,400	100%	369,597,872	100%	375,663,824	KECAMATAN PUJANANTING
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				24,109,400		24,181,728		24,665,363		25,220,333		25,787,791	
Meningkatnya Layanan terkait Pengaduan Kasus Konflik dan Kriminalitas	Persentase Penyelesaian Pengaduan Kasus Konflik dan Kriminalitas	44%	100%	24,109,400	100%	24,181,728	100%	24,665,363	100%	25,220,333	100%	25,787,791	KECAMATAN PUJANANTING
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				32,074,100		32,170,322		32,813,729		33,552,038		34,306,958	
Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelesaian tugas pemerintahan umum tepat waktu	100%	100%	32,074,100	100%	32,170,322	100%	32,813,729	100%	33,552,038	100%	34,306,958	KECAMATAN PUJANANTING
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				1,289,000		1,292,867		1,318,724		1,348,396		1,378,735	
Terwujudnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pemerintahan desa/kelurahan yang dibina dan diawasi	100%	100%	1,289,000	100%	1,292,867	100%	1,318,724	100%	1,348,396	100%	1,378,735	KECAMATAN PUJANANTING
KECAMATAN MALLUSETASI													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4,879,652,545		4,929,950,869		5,022,408,333		5,128,503,273		5,236,985,349	

BIDANG/URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)											KET
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah	2 Poin	3 Poin	4,879,652,545	3 Poin	4,929,950,869	3 Poin	5,022,408,333	3 Poin	5,128,503,273	4 Poin	5,236,985,349	KECAMATAN MALLUSETASI
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				9,423,600		9,451,871		9,640,908		9,857,829		10,079,630	
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Pemerintahan dan Publik yang Terpenuhi Sesuai Standar Operasional Pelayanan	100%	100%	9,423,600	100%	9,451,871	100%	9,640,908	100%	9,857,829	100%	10,079,630	KECAMATAN MALLUSETASI
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				861,116,670		940,439,504		956,448,294		974,818,380		993,601,794	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa/kelurahan	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa/kelurahan	100%	100%	861,116,670	100%	940,439,504	100%	956,448,294	100%	974,818,380	100%	993,601,794	KECAMATAN MALLUSETASI
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				28,833,100		28,919,599		29,497,991		30,161,696		30,840,334	
Meningkatnya Layanan terkait Pengaduan Kasus Konflik dan Kriminalitas	Persentase Penyelesaian Pengaduan Kasus Konflik dan Kriminalitas	100%	100%	28,833,100	100%	28,919,599	100%	29,497,991	100%	30,161,696	100%	30,840,334	KECAMATAN MALLUSETASI
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				34,213,600		34,316,241		35,002,566		35,790,123		36,595,401	
Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelesaian tugas pemerintahan umum tepat waktu	100%	100%	34,213,600	100%	34,316,241	100%	35,002,566	100%	35,790,123	100%	36,595,401	KECAMATAN MALLUSETASI
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				3,500,000		3,750,000		4,350,000		5,000,000		5,000,000	
Terwujudnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pemerintahan desa/kelurahan yang dibina dan diawasi	100%	100%	3,500,000	100%	3,750,000	100%	4,350,000	100%	5,000,000	100%	5,000,000	KECAMATAN MALLUSETASI

BIDANG/URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)											KET
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM													
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				2,302,537,265		2,326,078,043		2,369,350,273		2,419,005,157		2,469,777,276	
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Level 3	Level 3	2,302,537,265	Level 3	2,326,078,043	Level 3	2,369,350,273	Level 4	2,419,005,157	Level 4	2,469,777,276	BADAN KESBANGPOL
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				1,060,179,800		1,069,721,418		1,091,115,847		1,115,665,953		1,103,760,373	
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase Tingkat Keikutsertaan Aparat dan Masyarakat Bela Negara	100%	100%	1,060,179,800	100%	1,069,721,418	100%	1,091,115,847	100%	1,115,665,953	100%	1,103,760,373	BADAN KESBANGPOL
Program pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				15,952,000		16,159,376		16,482,564		16,853,421		17,232,623	
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100%	100%	15,952,000	100%	16,159,376	100%	16,482,564	100%	16,853,421	100%	17,232,623	BADAN KESBANGPOL
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan Konflik Sosial				266,446,800		267,246,140		272,591,063		278,724,362		284,995,660	
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase penurunan konflik sosial di Lingkungan Masyarakat	50%	50%	266,446,800	50%	267,246,140	50%	272,591,063	50%	278,724,362	50%	284,995,660	BADAN KESBANGPOL

BIDANG/URUSAN/PROGRAM/OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)											KET
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan pengembangan Etika Serta Budaya Politik				594,363,126		596,146,215		608,069,140		621,750,695		635,740,086	
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase pelaksanaan pendidikan politik		100%	594,363,126	100%	596,146,215	100%	608,069,140	100%	621,750,695	100%	635,740,086	BADAN KESBANGPOL
Program Pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000	
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi kemasyarakatan yang Diberdayakan dan Diawasi	100%	100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000	BADAN KESBANGPOL
				971,211,018,854		984,110,163,912		993,599,050,698		1,019,322,772,046		1,037,917,214,660	

4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan daerah pada akhir periode jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diharapkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Ukuran keberhasilan suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut serta perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah kepada masyarakat yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD).

Data dan informasi yang tertuang dalam indikator kinerja dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang dan sebagai bahan pengendalian dan evaluasi atas kebijakan yang dibuat.

A. Indikator Makro

Indikator makro pembangunan daerah merupakan tolok ukur utama yang menggambarkan kinerja dan arah pencapaian pembangunan dalam periode lima tahunan. Dalam penyusunan RPJMD 2025–2029, Pemerintah Kabupaten Barru memformulasikan indikator makro sebagai instrumen pengendali strategis yang merepresentasikan kondisi ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Adapun target indikator makro Kabupaten Barru tahun 2025 – 2030 seperti yang diuraikan berikut ini.

Tabel 4.2
Indikator Makro Kabupaten Barru Tahun 2025 – 2030

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Gini	Poin	0,304	0,298	0,292	0,285	0,279	0,272	
2	Angka Kemiskinan	%	7,65	7,47	7,28	6,60	6,32	6,14	
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,33	6,24	5,90	5,56	5,22	4,88	
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	poin	75,22	75,77	76,32	76,87	77,42	77,97	
5	PDRB Perkapita	Juta Rupiah	56,26	66,75	77,23	87,52	98,21	108,75	
6	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,74	5,81	6,31	6,91	7,51	7,81	
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	36,56	39,88	43,20	46,51	49,83	53,15	

Sumber : Bappelitbangda diolah Tahun 2025

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (*impact based*) yang bersifat kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah selama 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Barru Tahun 2025 – 2030

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I	Indeks Gini	Poin	0,304	0,298	0,292	0,285	0,279	0,272	
I.1	Angka Kemiskinan	%	7,65	7,47	7,28	6,60	6,32	6,14	
I.2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,33	6,24	5,90	5,56	5,22	4,88	
II	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	poin	75,22	75,77	76,32	76,87	77,42	77,97	
II.1	Indeks Pendidikan	Poin	67,51	68,15	68,78	69,42	70,05	70,68	
II.2	Nilai Rapor Pendidikan	Poin	80,21	82,17	84,42	87,91	90,38	92,17	
II.3	Indeks Kesehatan	Poin	82,51	83,31	84,11	84,91	85,7	86,49	
II.4	Prevalensi Stunting	%	24,6	22,3	20,0	17,6	15,3	13,0	
III.a	Indeks Daya saing Pilar Infrastruktur	Poin	3,995	4,000	4,005	4,01	4,015	4,02	
III.a.1	Indeks Infrastruktur Daerah	Poin	55	56,85	60,12	62,59	64,46	65,78	
III.b	Indeks Resiko Bencana	Poin	136,41	128,93	121,45	113,96	106,48	99,00	
III.b.1	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	36,56	39,88	43,20	46,51	49,83	53,15	
III.b.2	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,53	0,54	0,56	0,58	0,59	0,61	
IV	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	70,82	73,37	75,91	78,46	81	83,54	
IV.1	Nilai Sakip	Poin	62,83	65,87	68,92	71,96	75	78,04	
IV.2	Indeks Pemerintahan Digital	Poin	-	0,8	1,00	1,20	1,50	1,80	
IV.3	Indeks Pelayanan Publik	Poin	4,010	4,066	4,123	4,179	4,235	4,291	
IV.4	Maturitas SPIP	Level	3	3	3	3	4	4	

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
V	PDRB Perkapita	Juta Rupiah	56,26	66,75	77,23	87,52	98,21	108,75	
V.1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,74	5,81	6,31	6,91	7,51	7,81	
V.2	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	5,29	5,62	5,94	6,29	6,59	7,21	
V.3	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	12,97	13,36	14,52	15,18	17,24	18,63	

Sumber : Bappelitbangda diolah Tahun 2025

C. Indikator Kinerja Daerah

Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pembangunan daerah, khususnya dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, dan program pembangunan daerah. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator Kinerja Daerah (IKD) ini telah memuat seluruh Indikator Utama Pembangunan (IUP) Kabupaten Barru pada RPJPD Tahun 2025 – 2045 yang tersaji secara sistematis berdasarkan pengelompokan aspek pembangunan yang memuat aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan Masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum, dan indikator kinerja kunci (IKK) yang disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan dan kewenangan pemerintah Kabupaten Barru sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah. Capaian indikator kinerja daerah Tahun 2024 serta penetapan target indikator kinerja daerah Kabupaten Barru Tahun 2025-2030 sebagaimana tertuang pada tabel-tabel berikut :

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Daerah Kab. Barru Tahun 2025 – 2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
a.	Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan									
1	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	86.67	86.85	87.03	87.22	87.40	86.85	87.76	
2	Skor Pola Pangan Harapan	%	75	78	80	83	85	88	90	
3	Jumlah Produksi Perikanan budidaya	Ton	5027	5500	6000	6500	7000	7500	8000	
4	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	8.70	7.98	7.27	6.55	5.84	5.12	4.40	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/kapita	-	1680	1958	2236	2514	2792	3070	
6	Akses Rumah Tangga perkotaan terhadap Air siap Minum perpipaan	%	31.79	33.63	35.47	37.31	39.15	40.99	42.83	
b. Lingkungan Hidup Berkualitas										
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	76.65	77.38	78.11	78.84	79.57	80.3	81.03	
	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	%	1.19	4.25	7.31	10.38	13.44	16.5	19.56	
	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	16.02	20.98	25.94	30.90	35.86	40.82	45.78	
	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	2.13	17.70	33.278	48.852	64.426	80	95.574	
c. Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim										
	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%		0.9	1.68	2.46	3.24	4.02	4.8	
	Indeks Risiko Bencana	Poin	149.41	149.41	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100	
	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0.49	0.5	0.51	0.52	0.53	0.54	0.55	
d. Demografi										
	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1.38	1.394	1.408	1.422	1.436	1.45	1.464	
	Rasio Penduduk	%	96.61	96.61	96.61	96.61	96.61	96.61	96.61	
	Kepadatan Penduduk	Org/km ²	165.65	165.65	165.65	165.65	165.65	180.00	194.35	
II ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT										
a. Kesejahteraan Ekonomi										
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4.92	5.37	5.81	6.2	6.58	6.97	7.36	
2	Tingkat Kemiskinan	%	8.31	7.45	6.58	5.85	5.13	4.4	4.07	
3	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	52.28	56.26	66.76	77.26	87.75	98.25	108.75	
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6.42	6.33	6.24	5.79	5.33	4.88	4.43	
5	Indeks Gini	Poin	0.31	0.3	0.297	0.295	0.292	0.29	0.288	
6	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	74.51	75.22	75.77	76.32	76.87	77.42	77.97	
b. Kesehatan untuk Semua										
1	Usia Harapan Hidup	Tahun	69.7	72.37	72.875	73.38	73.885	74.39	74.895	
2	Indeks Keluarga Sehat	Poin	0.312	0.41	0.51	0.60	0.70	0.80	0.90	
3	Prevalensi Stunting	%	21	19.5	16.31	13.48	10.24	7.05	5	
4	Persentase Persalinan di fasilitas Kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Jumlah Kematian Ibu	Per100.000 Kelahiran	210	200	180	170	160	150	150	
6	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis	%	100	100	100	100	100	100	100	
7	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	100	100	100	100	100	100	100	
c. Pendidikan Berkualitas yang Merata										
1	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8.8	8.91	9.02	9.13	9.24	9.35	9.46	
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.63	13.69	13.74	13.80	13.85	13.91	13.97	
3	Angka Literasi/Numerasi	Poin	62.62	64.26	65.908	67.552	69.196	70.84	72.48	
4	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	38.6	44.88	51.16	57.44	63.72	70	76.28	
e. Perlindungan Sosial yang Adaptif										
1	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	21,44	21,44	21,44	21,44	21,44	39,03	39,03	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
f.	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju									
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	74,6	74,6	74,6	74,6	74,6	82,33	82,33	
g.	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif									
2	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Poin	70,74	70,92	71,16	71,39	71,80	72,16	72,16	
3	Indeks Ketimpangan Gender	Poin	0,36	0,35	0,34	0,33	0,32	0,31	0,31	
III ASPEK DAYA SAING DAERAH										
a.	Daya Saing Sumber Daya Manusia									
1	Angka Ketergantungan	%	48,66	48,34	48,09	47,78	47,51	47,22	47,22	
b.	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi									
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	62,26	63,55	64,87	66,21	67,99	69,33	69,33	
2	Indeks Inovasi Daerah	Poin	35	36	38	40	43	45	50	
3	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Poin	80	85	88	90	92	95	95	
c.	Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru									
1	Indeks Ekonomi Hijau	Poin	59,95	63,77	67,86	70,34	72,01	74,75	74,75	
f.	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi									
1	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Poin	3,99	4,05	4,17	4,39	4,51	4,77	4,77	
2	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	98,01	98,38	98,56	98,94	99,03	99,15	99,15	
3	Persentase Desa Mandiri	%	82,50	82,50	82,50	82,50	82,50	99,50	99,50	
g.	Stabilitas Ekonomi Makro									
1	Tingkat Inflasi	Poin	1,73	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	
2	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Poin	5,10	5,13	5,14	5,15	5,16	5,18	5,18	
IV ASPEK PELAYANAN UMUM										
a.	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif									
1	Indeks Reformasi Hukum	Poin	96,12	96,20	96,40	96,70	96,90	97,00	97,00	
2	Indeks SPBE	Poin	2,79	2,82	2,84	2,87	2,90	2,95	2,95	
3	Indeks Pelayanan Publik	Poin	3,48	3,62	3,87	4,18	4,33	4,57	4,57	
4	Maturitas SPIP	Poin	3	3,2	3,5	3,7	3,8	3,9	4	
b.	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial									
1	Persentase Penegakan Perda	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Capaian Aksi HAM	%	33,3	42,01	49,36	56,23	63,94	70,00	70,00	
3	Persentase Tindak Kriminal yang Ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100	
c.	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan									
1	Indeks Daya Saing Daerah	Poin	3,19	3,190	3,225	3,260	3,295	3,330	3,330	
2	Persentase Jumlah Kerjasama Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	

Sumber : Bappelitbangda diolah Tahun 2025

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kab. Barru Tahun 2025 – 2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	KET
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar									
1	Pendidikan									
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	91,97	100	100	100	100	100	100	
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	99,30	100	100	100	100	100	100	
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	96,51	100	100	100	100	100	100	
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	76,28	100	100	100	100	100	100	
2	Kesehatan									
1	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	Rasio	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	
2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	70	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	72	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	75	100	100	100	100	100	100	
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	82	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	99	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	93	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	70	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	89	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	112	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	KET
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	102	100	100	100	100	100	100	
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	72	100	100	100	100	100	100	
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	71	100	100	100	100	100	100	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Nilai	10,71	16,74	23,37	30,03	42,37	50,00	50,00	
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	Nilai	17,96	28	35	50	65	80	80	
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Nilai	50,07	50,07	60,86	71,21	82,29	90,00	90,00	
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga	%	97,53	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	100	100	100	100	100	100	100	
7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	33,30	42,15	51,09	59,77	67,27	75,00	75,00	
8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman									
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	21,14	34,89	47,09	60,17	75,98	87,0 0	87,0 0	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	KET
5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat										
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	125	125	125	125	125	125	125	
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	145	145	145	145	145	145	145	
5	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	365	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100	
7	Waktu tanggap (response time rate) Penanganan Kebakaran	Menit	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	
8 Sosial										
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	
2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar										
1 Tenaga Kerja										
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	70	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	31	35	40	45	50	55	55	
3	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	22	30	40	50	60	70	70	
4	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	42,3	50	60	70	80	90	90	
2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										
1	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk Perempuan)	Rasio	0,08	0	0	0	0	0	0	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	KET
3	Indeks Ketimpangan Gender	Poin	0,330	0,298	0,296	0,294	0,292	0,290	0,288	
3	Pangan									
1	Persentase cadangan pangan	%	316	100	100	100	100	100	100	
4	Pertanahan									
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	78	100	100	100	100	100	100	
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Tersedianya tanah untuk masyarakat	%	0,00	100	100	100	100	100	100	
5	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan elalui mediasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Lingkungan Hidup									
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Nilai	76,65	77	77,33	77,51	77,88	78,00	78,00	
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	87,04	88,15	88,93	89,59	90,57	93,12	95	
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh PEMDA	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
1	Perekaman KTP elektronik	%	99,37	99,40	99,45	99,50	99,55	99,60	100	
2	Persentase anak usia 0-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA (Kepemilikan akta kelahiran)	%	53,58	60	65	70	75	80	80	
3	Kepemilikan akta kelahiran	%	96,85	97	97,50	98	98,50	99	100	
4	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	PD	33	33	33	33	33	33	33	
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase peningkatan status desa mandiri	Persen	82,5	85	90 95	100	100	100	100	
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	%	2,52	2,80	2,95	3,15	3,20	3,35	3,35	
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	67,98	80	90	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	KET
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	7,76	10	15	20	25	30	30	
9	Perhubungan									
1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Rasio	77,5	80	90	100	100	100	100	
10	Komunikasi dan Informatika									
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	86,04	87	88	89	91	92	92	
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persen	79	79	80	81	82	85	85	
11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah									
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Persen	63,46	65	67	70	73	75	75	
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Persen	1,27	1,55	1,75	1,90	2,05	2,15	2,15	
12	Penanaman Modal									
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	investor	76	80	85	90	95	100	100	
13	Kepemudaan dan Olahraga									
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	3,95	4,5	5	5,5	6	6,5	6,5	
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	9,25	12	15	17	20	22	22	
3	Peningkatan prestasi olahraga	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
14	Statistik									
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
15	Persandian									
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	34,88	35	37	40	45	50	50	
16	Kebudayaan									
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	Persen	0,33	0,5	1	1,5	2	2,5	2,5	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	KET
17 Perpustakaan										
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Poin	71,92	72,00	72,10	72,20	72,30	72,40	72,50	
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	84,17	84,50	84,70	84,90	85,10	85,30	85,50	
18 Kearsipan										
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan)	Nilai	75	75	100	100	100	100	100	
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Nilai	66,66	66,66	83,33	83,33	100	100	100	
3 Pelayanan Urusan Pilihan										
1 Kelautan dan Perikanan										
1	Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	ton	26939,65	27.388	27.832	28.283	28.743	29.209	29.210	
2 Pariwisata										
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	79	85	95	100	100	100	100	
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%	3,42	5	10	15	20	25	25	
3	Tingkat Hunian Akomodasi	%	12	20	40	60	80	100	100	
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB ADHB	%	0,12	0,50	1	1,5	2	2,5	2,5	
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	3,35	4,05	4,75	5,15	5,45	5,75	5,75	
3 Pertanian										
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	%	5,33	6,14	5,33	5,33	5,33	5,33	5,33	
3	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	0,76	0,5	0,3	0	0	0	0	
4 Perdagangan										
1	Persentase Peningkatan pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	20,83	27,89	34,13	40,11	48,97	56,98	56,98	
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	91,66	95	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	KET
3	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Perindustrian									
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten Kota	%	36,26	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	#N/A	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0,00	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	%	0,00	100	100	100	100	100	100	
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Poin	100	100	100	100	100	100	100	
4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan									
1	Perencanaan, Keuangan, dan Pengawasan									
1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	23,18	23.15	22.85	22.5	22.15	21.5	20	
2	Rasio PAD	%	12	12,5	13	14	15	16	16	
3	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,09	3,09	3,10	3,10	3,5	3,5	3,7	
4	Indeks Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Poin	3,00	3,09	3,10	3,10	3,2	3,3	3,5	
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures)	%	71,18	77.47	72.62	71.91	71.21	70.79	68.10	
6	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Indeks	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
2	Sekretariat Daerah									
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	KET
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	348	100	100	100	100	100	100	
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	65	100	100	100	100	100	100	
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	%	2,97	10	20	30	40	50	50	
3	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan									
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	77.28	80	82	84	85	85	85	
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	27.24	30	31	33	34	35	35	
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	14.83	20	25	30	35	40	40	
4	Manajemen Keuangan									
1	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	0.08	5	4	4	3	3	3	
2	Revenue mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	%	-1,46	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,05	
3	Assets Management	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	3,79	3.78	3.76	3.74	3.72	3.70	3.68	
5	Transparansi dan Partisipasi Publik									
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	89,05	90	95	100	100	100	100	
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	

Sumber : Bappelitbangda diolah Tahun 2025

D. SPM

Pemerintah daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Sebagaimana yang termuat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar yang dimaksud adalah :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;

- d. Perumahan Rakyat;
- e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat; dan
- f. Sosial

SPM diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Penetapan target Indikator SPM Tahun 2025-2030 tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 4.6
Indikator SPM Kab. Barru Tahun 2025 – 2029

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						OPD PJ
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Bidang Pendidikan										
Pendidikan Anak usia dini	Warga negara usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan anak usia dini	%	78,31	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pendidikan Dasar (SD & SMP)	Warga negara usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan dasar (SD)	%	99,30	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Warga negara usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan dasar (SMP)	%	96,51	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pendidikan Kesetaraan	Warga negara usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapanbelas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan kesetaraan	%	98,30	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Bidang Kesehatan										
Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil	ibu hamil untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan ibu hamil	%	70	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Bersalin	ibu bersalin untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan ibu bersalin	%	73	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Bagi Bayi Baru Lahir	bayi baru lahir untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan bayi	%	76	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						OPD PJ
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	baru lahir									
Pelayanan Kesehatan Bagi Balita	balita untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan balita	%	82	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Bagi usia pendidikan dasar	usia pendidikan dasar untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	%	99	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Bagi Usia Produktif	usia produktif untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia produktif	%	93	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Bagi Usia Lanjut	usia lanjut untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia lanjut	%	70	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Penderita hipertensi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan penderita hipertensi	%	89	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Bagi Diabetes Militus	penderita diabetes melitus untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	%	112	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Bagi Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	orang dengan gangguan jiwa berat untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	%	102	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Bagi tuberkolosis	Orang terduga tuberkulosis untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	%	72	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Bagi penderita HIV	Orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	%	71	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
Bidang Pekerjaan Umum										
pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Penduduk yang memiliki akses air minum	%	97,52	100	100	100	100	100	100	Dinas PUTR Perkim
penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Penduduk yang memiliki akses air limbah Domestik	%	68,8	100	100	100	100	100	100	Dinas PUTR Perkim

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						OPD PJ	
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
Bidang Perumahan Rakyat											
penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	korban bencana kabupaten/kota yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas PUTR Perkim
fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas PUTR Perkim
Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban											
pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Warga negara yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah kabupaten/kota dan peraturan kepala Daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan
pelayanan informasi rawan bencana, Pencegahan dan Kesiapsiagaan, serta penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100	BPBD
pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran	Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						OPD PJ	
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
Bidang Sosial											
rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	penyandang disabilitas telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	anak telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti	Lanjut usia telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	gelandangan dan pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	korban bencana kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial

Sumber : Bappelitbangda diolah Tahun 2025

E. TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (TPB/SDGs)

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global. TPB/SDGs bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk

menyejahterakan masyarakat masyarakat mencakup 17 tujuan. Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota. Capaian Tahun TPB Tahun 2024 dan Penetapan target indicator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) Kabupaten Barru Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.7
Indikator TPB/SDGs Kab. Barru Tahun 2025 – 2030

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	Satuan	2024 (Baseline)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	OPD PENANGGUNG JAWAB DATA
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	%	8,31	7,65	7,47	7,28	6,60	6,32	6,14	BAPPERIDA
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Jiwa	35,648	37,335	37,335	37,335	37,335	37,335	37,335	DINAS PPTK
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	%	80	90	90	90	90	90	90	DINAS KESEHATAN
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	%	96,75	100	100	100	100	100	100	DINAS PUTR PERKIM
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	%	68,8	100	100	100	100	100	100	DINAS PUTR PERKIM
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	%	98.82	99,30	100	100	100	100	100	DINAS PENDIDIKAN

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	Satuan	2024 (Baseline)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	OPD PENANGGUNG JAWAB DATA
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	%	96.59	98	100	100	100	100	100	DINAS PENDIDIKAN
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	%	97.27	99	99	100	100	100	100	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Per 100.000 Orang	0.02568	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	BPBD
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Lokasi	27	28	29	30	32	35	40	BPBD
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Jiwa	1474	532	550	560	570	580	590	DINAS SOSIAL DAN BPBD
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Jiwa	2	2	2	2	2	2	2	DINAS SOSIAL DAN BPBD
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB= Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)		3	4	5	6	7	8	10	BPBD

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	Satuan	2024 (Baseline)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	OPD PENANGGUNG JAWAB DATA
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Rupiah	1,989,500,000	107.989.531	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	BPBD
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Dokumen	Belum Ada	Belum Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	BPBD
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	2.1.1*	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	%	8.2	8	7	6	5	4	3	DINAS PERTANIAN
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	%	7.65		7.65	7.65	7.65	7.65	7.65	DINAS PERTANIAN
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	%	26,9	24,6	22,3	20,0	17,6	15,3	13,0	DINAS PERTANIAN

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	Satuan	2024 (Baseline)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	OPD PENANGGUNG JAWAB DATA
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.		11	10	8	6	4	2	0	DINAS KESEHATAN
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.		15	10	8	6	4	2	0	DINAS KESEHATAN
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	%	80	100	100	100	100	100	100	DINAS KESEHATAN
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	%	9,52	9,88	10	10,50	11	11,50	12	DINAS PMDPPKBPP PA
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	%	81.24	83	83	83	83	83	83	DINAS PENDIDIKAN

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	Satuan	2024 (Baseline)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	OPD PENANGGUNG JAWAB DATA
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	%	74.36	77	77	77	77	77	77	DINAS PENDIDIKAN
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	%	98.83	99,05	99,05	99,05	99,05	99,05	99,05	DINAS PENDIDIKAN
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	%	96.59	97,8	97,8	97,8	97,8	97,8	97,8	DINAS PENDIDIKAN
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.		8.54	8.77	8.77	8.77	8.77	8.77	8.77	DINAS PENDIDIKAN

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	Satuan	2024 (Baseline)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	OPD PENANGGUNG JAWAB DATA
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.		6	6	6	6	6	6	6	DINAS PMDPPKBPP PA
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	%	20	20	20	20	20	20	20	DINAS PMDPPKBPP PA
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	%	97,52	100	100	100	100	100	100	DINAS PUPR&PERKI M
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	%	10	12	10	10	10	10	10	DINAS PUPR&PERKI M
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	%	68,8	75	100	100	100	100	100	DINAS PUPR&PERKI M

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	Satuan	2024 (Baseline)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	OPD PENANGGUNG JAWAB DATA
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Desa/Kelurahan	55	55	55	55	55	55	55	DINAS KESEHATAN
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Desa/Kelurahan	55	55	55	55	55	55	55	DINAS KESEHATAN
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Juta Rupiah	52,28	56,26	66,75	77,23	87,52	98,21	108,75	BAPPEDA
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	10.1.1*	Koefisien Gini.	Poin	0,31	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	BAPPEDA
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	jiwa	0,061	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	BPBD

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	Satuan	2024 (Baseline)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	OPD PENANGGUNG JAWAB DATA
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur	Lembaga	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Ada	Ada	Ada	BKAD
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	jiwa	0,061		0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	BPBD
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati	Dok	3	2	2	2	2	2	2	DINAS LH
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	BADAN KESBANGPOL

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	Satuan	2024 (Baseline)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	OPD PENANGGUNG JAWAB DATA
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Dok	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	BAG HUKUM SETDA
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Org	5	7	10	15	20	25	30	DISKOMINFO SP
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	17.1.1.(a)	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya	Rupiah	1.081.662.957.430	919,207,351,010	970,531,014,774	984,015,904,639	993,523,996,685	1,019,232,772,046	1,037,827,214,660	BKAD

Sumber : Bappelitbangda diolah Tahun 2025

BAB V

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barru Tahun 2025-2029, merupakan pedoman pemerintah daerah dan masyarakat Barru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah selama 5 tahun kedepan. RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025-2029 diharapkan dapat dilaksanakan secara konsisten dengan komitmen tinggi seluruh pelaku pembangunan. Adapun Visi pembangunan daerah Kabupaten Barru untuk periode RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025 – 2029 adalah **“BARRU BERKEADILAN, BARRU MAJU BERKELANJUTAN, BARRU SEJAHTERA LEBIH CEPAT”**. Dengan misi sebagai berikut :

1. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka,
2. Membangun Manusia yang Unggul dan Inklusif,
3. Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur dan wilayah Yang Berketahanan Iklim,
4. Meningkatkan *Good Governance* yang Bernafaskan Keagamaan,
5. Meningkatkan Produktivitas perekonomian yang Berdaya Saing.

Adapun arah kebijakan RPJMD Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

1. Mengintegrasikan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran melalui pembangunan sistem terpadu berbasis teknologi informasi, yang mencakup perbaikan infrastruktur layanan dasar, peningkatan akses pendidikan vokasi, dan pengembangan program pelatihan yang selaras dengan kebutuhan pasar kerja,
2. Meningkatkan mutu pendidikan, derajat kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan lembaga terkait lainnya, dengan dukungan kebijakan yang mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk memastikan peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan,
3. Meningkatkan kualitas infrastruktur berkelanjutan dan ketahanan wilayah terhadap bencana melalui perencanaan terpadu berbasis risiko, optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, penguatan kapasitas sumber daya manusia dengan penerapan teknologi inovatif, penguatan sistem peringatan dini, serta perluasan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat guna membangun infrastruktur yang tangguh, ramah lingkungan, dan adaptif terhadap

perubahan iklim serta risiko bencana,

4. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi melalui inovasi pelayanan publik yang cepat, mudah, dan transparan, dengan dukungan pengembangan sumber daya manusia yang kompeten serta berbasis hasil penelitian,
5. Mengembangkan kawasan industri yang terintegrasi dengan sektor pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, dan pariwisata, serta memperkuat kapasitas UMKM, menciptakan iklim investasi yang kondusif, dan meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

Adapun 8 Prioritas Pembangunan adalah :

1. Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka;
2. Peningkatan kualitas dan akses Pelayanan Kesehatan dan pendidikan;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas Infrastruktur;
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
5. Pengembangan Kawasan Industri Barru;
6. Pembangunan dan Pengembangan Agroteknologi, agropolitan serta Hilirisasi pada sektor pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan;
7. Pengembangan Pariwisata Tuntas; dan
8. Pemberdayaan dan Penguatan UMKM dan Koperasi

Dalam pelaksanaan RPJMD perlu memperhatikan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Konsistensi Perencanaan

Dalam rangka memastikan kesinambungan pembangunan perlu menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi pedoman bagi dokumen perencanaan turunannya yakni Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Indikator RPJMD harus menjadi bagian dari RKPD, dan seluruh indikator RPJMD harus menjadi bagian dari Renstra Perangkat Daerah. Dokumen perencanaan harus menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran pemerintah daerah. Sinkronisasi periodisasi dan substansi dilakukan dalam penjabaran RPJMD ke RKPD. Arah (Tujuan) Pembangunan dan indikator dalam RPJMD menjadi pedoman dalam

penentuan tujuan dan sasaran pada RKPD, dan selanjutnya menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun sasaran program RKPD. Dokumen RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan sectoral seperti rencana induk/Master Plan/ Grand Design, strategi daerah, peta jalan, atau sebutan lainnya terkait perencanaan pembangunan daerah. RPJMD menjadi pedoman visi, misi, dan program bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan anggota DPRD Kabupaten Barru.

2. Pendanaan Pembangunan

Dalam rangka pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 diperlukan kapasitas pendanaan yang memadai untuk menjamin pencapaian sasaran pembangunan daerah selama 5 tahun. Olehnya itu perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan pembangunan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun non pemerintah secara lebih inovatif, *integrative*, dan tepat sasaran. Optimalisasi pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan diperlukan peningkatan kualitas belanja dan pembiayaan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tahapan pembangunan. Peningkatan kapasitas pendanaan dapat dilakukan melalui pengembangan inovasi pembiayaan, baik berupa perluasan sumber-sumber dan pengembangan inovasi pendanaan, penerapan skema atau mekanisme pelaksanaan yang baru, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dan non publik, optimalisasi peran sektor keuangan, dan perluasan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

3. Kerangka Pengendalian

Pengendalian pelaksanaan RPJMD dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi dan dan manajemen risiko sesuai inmendagri no.2 tahun 2025 yang dilakukan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai inmendagri nomor 2 tahun 2025. Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan untuk memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, dan menjamin ketersediaan alokasi anggaran. Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian pembangunan perlu didukung dengan tatanan regulasi dan system elektronik yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Tatanan regulasi diharapkan dapat menyinergikan regulasi pemantauan, evaluasi, pengendalian, manajemen

resiko pembangunan, dan manajemen kinerja, dan mengoordinasikan pengendalian lintas dan internal perangkat daerah dan pemerintah daerah. Sistem elektronik pengendalian diintegrasikan dengan tata Kelola data pembangunan yang mendorong kebijakan pembangunan berbasis bukti. Pengendalian RPJMD dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka pendek sesuai aturan yang berlaku dengan mengedepankan prinsip pengarusutamaan gender dan inklusif untuk memastikan bahwa dalam pelaksanaan dan penjabaran RPJMD ke dalam perencanaan pembangunan tahunan telah memperhatikan pengarusutamaan pembangunan yang melingkupi pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, ramah gender serta inklusif bagi kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas dan lanjut usia, untuk pemerataan pembangunan dan layanan dasar yang optimal.

4. Mekanisme Perubahan RPJMD

Dokumen perencanaan yang adaptif memerlukan ruang penyesuaian atas faktor yang tidak dapat dikendalikan. Dalam keadaan kahar (*force majeure*) yang meliputi perubahan geopolitik, geoekonomi, dan bencana, serta penyimpangan pencapaian sasaran pembangunan yang signifikan dari tahapan-tahapan sebelumnya sehingga tidak memungkinkan pencapaian sasaran dan target pembangunan jangka menengah daerah, serta perubahan kebijakan nasional, maka RPJMD dapat dimutakhirkan melalui RKPD atau melalui perubahan RKP sesuai peraturan yang berlaku.

5. Komunikasi Publik

Dalam rangka pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 diperlukan komunikasi publik untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif. Komunikasi kepada masyarakat umum termasuk swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, diaspora, pemuda, dan kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lansia yang dilakukan melalui berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan dengan memberikan masukan, kritik, atau dukungan. Komunikasi publik dilaksanakan dengan mengutamakan keterbukaan, menjamin akses yang luas, jelas, tepat, cepat, dan obyektif agar dapat mendorong partisipasi publik yang

lebih bermakna dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pembangunan.

